PROBLEMATIKA KOMUNIKASI ANTARA PEMIMPIN DAN RAKYAT DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN (STUDI TAFSIR TEMATIK TENTANG ETIKA DAN RELASI SOSIAL)

DISERTASI

Diajukan kepada Program Studi Doktor Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan studi Strata Tiga
Untuk memperoleh gelar Doktor (Dr.)

Oleh:
DENI RAHMAN
NIM: 203530006

PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
KONSENTRASI ILMU TAFSIR
PASCA SARJANA UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA
2026 M. /1448 H.

ABSTRAK

Penelitian ini menyimpulkan bahwa problematika komunikasi antara pemimpin dan rakyat dalam perspektif Al-Qur'an tidak semata-mata berkaitan dengan persoalan teknis penyampaian pesan, tetapi berakar pada dimensi etika, moralitas, dan relasi sosial dalam kehidupan masyarakat. Al-Qur'an memandang komunikasi sebagai fondasi penting dalam membangun hubungan sosial yang adil dan harmonis antara pemimpin dan rakyat. Kerusakan komunikasi kepemimpinan sering muncul ketika komunikasi berubah menjadi dominasi kekuasaan, manipulasi informasi, atau praktik komunikasi yang tidak jujur sehingga merusak kepercayaan sosial. Problem komunikasi kepemimpinan dapat dipahami melalui tiga dimensi utama, yaitu problem kekuasaan yang menutup ruang dialog, problem moralitas yang ditandai dengan komunikasi manipulatif, serta problem relasi sosial yang memicu polarisasi dan keretakan sosial. Berdasarkan analisis tersebut, penelitian ini merumuskan model komunikasi pemimpin Qur'ani yang menempatkan komunikasi sebagai amanah moral yang berfungsi membangun kepercayaan, memperkuat kohesi sosial, dan mewujudkan kemaslahatan masyarakat melalui prinsip-prinsip etika komunikasi Qur'ani.

Kesimpulan tersebut diperoleh melalui kajian tafsir tematik terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan komunikasi sosial, kepemimpinan, dan relasi antara pemimpin dan masyarakat. Penelitian ini menghimpun berbagai ayat yang berkaitan dengan konsep komunikasi seperti *qaul, lisan, kalam,* dan *risālah*, kemudian dianalisis secara integratif dengan mengkaji konteks ayat, penafsiran ulama klasik seperti Ibn Katsir dan Al-Qurṭubi, serta tafsir kontemporer seperti M. Quraish Shihab. Melalui pendekatan ini ditemukan bahwa Al-Qur'an tidak hanya mengidentifikasi berbagai bentuk kerusakan komunikasi sosial, tetapi juga memberikan prinsip-prinsip etika komunikasi yang berfungsi menjaga harmoni masyarakat. Komunikasi kepemimpinan dalam Al-Qur'an memiliki dimensi moral yang kuat karena berkaitan dengan tanggung jawab amanah seorang pemimpin dalam menyampaikan kebenaran, membangun dialog dengan masyarakat, serta menjaga keseimbangan relasi sosial dalam kehidupan bersama.

Temuan penelitian ini mendukung sejumlah teori komunikasi etis dan kepemimpinan dalam kajian ilmu sosial modern. Dalam teori *discourse ethics*, Jürgen Habermas menegaskan bahwa komunikasi yang ideal harus dibangun melalui dialog rasional yang terbuka, jujur, dan bebas dari dominasi kekuasaan dalam ruang publik. Prinsip tersebut memiliki kesesuaian dengan konsep musyawarah (*syūrā*) dalam Al-Qur'an yang menekankan pentingnya komunikasi dialogis dan partisipatif antara pemimpin dan masyarakat. Selain itu, temuan penelitian ini juga memiliki kesamaan dengan teori *transformational leadership* yang dikembangkan oleh James MacGregor

Burns yang menekankan pentingnya komitmen moral pemimpin dalam membangun hubungan yang bermakna dengan para pengikutnya. Dalam perspektif Qur'ani, komunikasi kepemimpinan juga berfungsi sebagai sarana membangun kesadaran moral, memperkuat kepercayaan sosial, serta mendorong transformasi sosial menuju kehidupan masyarakat yang lebih adil dan berkeadaban.

Penelitian ini menolak paradigma komunikasi sekuler. Dalam teori *discourse ethics* yang dikembangkan oleh Jürgen Habermas, legitimasi etika komunikasi terutama dibangun melalui konsensus rasional yang dicapai dalam ruang publik. Sementara itu, dalam perspektif Qur'ani legitimasi etika komunikasi tidak hanya didasarkan pada konsensus sosial, tetapi juga bersumber dari wahyu yang menuntut tanggung jawab moral manusia di hadapan Tuhan. Perbedaan serupa juga tampak jika dibandingkan dengan pendekatan etika komunikasi yang dikemukakan oleh Clifford Christians yang menekankan prinsip *truth telling* dan tanggung jawab sosial dalam kerangka humanisme sekuler. Penelitian ini menempatkan etika komunikasi dalam kerangka wahyu yang mengintegrasikan dimensi moral, spiritual, dan sosial secara simultan, sehingga komunikasi kepemimpinan tidak hanya berorientasi pada efektivitas persuasi, tetapi juga pada amanah moral dan kemaslahatan publik.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan tafsir tematik (*tafsir maudhu'i*). Metode ini dilakukan dengan menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tema komunikasi antara pemimpin dan rakyat, kemudian dianalisis secara sistematis untuk menemukan konsep-konsep komunikasi yang terkandung di dalamnya. Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu identifikasi ayat-ayat tematik, analisis linguistik terhadap istilah Qur'ani yang berkaitan dengan komunikasi dan kepemimpinan, penelaahan tafsir klasik dan kontemporer, serta integrasi temuan tafsir dengan kajian teori komunikasi sosial. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep komunikasi kepemimpinan dalam Al-Qur'an. Dengan metode tersebut, penelitian ini berhasil merumuskan model komunikasi pemimpin Qur'ani yang terdiri dari dimensi etika komunikasi, dimensi relasi sosial, dan dimensi transformasi sosial sebagai kerangka konseptual bagi komunikasi kepemimpinan yang berkeadaban dalam kehidupan masyarakat.

ABSTRACT

This study concludes that the problem of communication between leaders and the people in the perspective of the Qur'an is not solely related to the technical problem of message delivery, but is rooted in the dimensions of ethics, morality, and social relations in people's lives. The Qur'an views communication as an important foundation in building just and harmonious social relations between leaders and people. Leadership communication breakdowns often arise when communication turns into power dominance, information manipulation, or dishonest communication practices that undermine social trust. Leadership communication problems can be understood through three main dimensions, namely power problems that close the space for dialogue, morality problems that are characterized by manipulative communication, and social relations problems that trigger polarization and social rifts. Based on this analysis, this study formulates a communication model of Qur'ani leaders that places communication as a moral mandate that functions to build trust, strengthen social cohesion, and realize the benefits of society through the ethical principles of Qur'anic communication.

This conclusion was obtained through a thematic interpretation study of Qur'anic verses related to social communication, leadership, and the relationship between leaders and society. This research collects various verses related to the concepts of communication such as *qaul, lisan, kalam,* and *risālah*, then analyzed integratively by examining the context of the verses, the interpretation of classical scholars such as Ibn Katsir and Al-Qurṭubi, as well as contemporary interpretations such as M. Quraish Shihab. Through this approach, it was found that the Qur'an not only identifies various forms of social communication damage, but also provides principles of communication ethics that function to maintain the harmony of society. Leadership communication in the Qur'an has a strong moral dimension because it is related to the responsibility of a leader in conveying the truth, building dialogue with the community, and maintaining a balance of social relations in common life.

The findings of this study have similarities with a number of theories of ethical communication and leadership in modern social science studies. In the theory of *discourse ethics*, Jürgen Habermas asserts that ideal communication must be built through rational dialogue that is open, honest, and free from the domination of power in the public sphere. This principle is in accordance with the concept of deliberation (*syūrā*) in the Qur'an which emphasizes the importance of dialogical and participatory communication between leaders and society. In addition, the findings of this study also have similarities with *the transformational leadership* theory developed by James MacGregor Burns which emphasizes the importance of a leader's moral commitment in building

meaningful relationships with his followers. In the Qur'anic perspective, leadership communication also serves as a means of building moral awareness, strengthening social trust, and encouraging social transformation towards a more just and civilized society.

Although it has similarities with modern ethical communication theory, this research also has fundamental differences with the secular communication paradigm. In the theory *of discourse ethics* developed by Jürgen Habermas, the legitimacy of communication ethics is mainly built through rational consensus reached in the public sphere. Meanwhile, in the Qur'anic perspective, the legitimacy of communication ethics is not only based on social consensus, but also comes from revelation that demands human moral responsibility before God. Similar differences are also seen when compared to the approach to communication ethics put forward by Clifford Christians, which emphasizes the principles of *truth telling* and social responsibility within the framework of secular humanism. This research places communication ethics within the framework of revelation that integrates moral, spiritual, and social dimensions simultaneously, so that leadership communication is not only oriented to the effectiveness of persuasion, but also to moral mandate and public benefit.

This research uses a qualitative research method with a thematic interpretation approach (*tafsir maudhu'i*). This method is carried out by collecting verses of the Qur'an related to the theme of communication between leaders and the people, then systematically analyzed to find the communication concepts contained in it. The analysis process is carried out through several stages, namely identification of thematic verses, linguistic analysis of Qur'anic terms related to communication and leadership, study of classical and contemporary interpretations, and integration of interpretation findings with the study of social communication theory. This approach allows researchers to gain a comprehensive understanding of the concept of leadership communication in the Qur'an. With this method, this study succeeded in formulating a communication model of Qur'anic leaders consisting of the dimension of communication ethics, the dimension of social relations, and the dimension of social transformation as a conceptual framework for civilized leadership communication in people's lives.

الملخص

تستنتج هذه الدراسة أن مشكلة التواصل بين القادة والشعب من منظور القرآن ليست مرتبطة فقط بالمشكلة التقنية لتوصيل الرسالة، بل هي متجذرة في أبعاد الأخلاق والعلاقات الاجتماعية في حياة الناس. يرى القرآن أن التواصل أساس مهم لبناء علاقات اجتماعية عادلة ومتناغمة بين القادة والشعب. غالبا ما تنشأ انهيارات التواصل القيادي عندما يتحول التواصل إلى هيمنة في السلطة، أو التلاعب بالمعلومات، أو ممارسات تواصل غير نزيهة تقوض الثقة الاجتماعية. يمكن فهم مشاكل التواصل في القيادة من خلال ثلاثة أبعاد رئيسية، وهي مشاكل السلطة التي تغلق المجال للحوار، ومشاكل الأخلاق التي تتميز بالتواصل التلاعبي، ومشاكل العلاقات الاجتماعية التي تثير الاستقطاب والانقسامات الاجتماعية. استنادا إلى هذا التحليل، تضع هذه الدراسة نموذجا للتواصل لقادة القرآن يضع الاتصال كتفويض أخلاقي يعمل على بناء الثقة، وتعزيز التماسك الاجتماعي، وتحقيق فوائد المجتمع من خلال المبادئ الأخلاقية للتواصل القرآني.

تم التوصل إلى هذا الاستنتاج من خلال دراسة تفسيرية موضوعية لآيات القرآن المتعلقة بالتواصل الاجتماعي، والقيادة، والعلاقة بين القادة والمجتمع. يجمع هذا البحث آيات مختلفة تتعلق بمفاهيم التواصل مثل *القول، واللسان، والكلام، والرسالة*، ثم يتم تحليلها بشكل تكاملي من خلال فحص سياق الآيات، وتفسير العلماء الكلاسيكيين مثل ابن كاتسير والقرطوبي، بالإضافة إلى تفسيرات معاصرة مثل محمد قريش شهاب. ومن خلال هذا النهج، تبين أن القرآن لا يحدد فقط أشكالا مختلفة من أضرار التواصل الاجتماعي، بل يوفر أيضا مبادئ أخلاقيات التواصل التي تعمل على الحفاظ على انسجام المجتمع. التواصل القيادي في القرآن له بعد أخلاقي قوي لأنه مرتبط بمسؤولية القائد في نقل الحقيقة، وبناء الحوار مع المجتمع، والحفاظ على توازن العلاقات الاجتماعية في الحياة المشتركة.

تتشابه نتائج هذه الدراسة مع عدد من نظريات التواصل الأخلاقي والقيادة في دراسات العلوم الاجتماعية الحديثة. في نظرية *أخلاقيات الخطاب*، يؤكد يورغن هابرماس أن التواصل المثالي يجب أن يبنى من خلال حوار عقلاني يكون مفتوحا وصادقا وخاليا من هيمنة السلطة في المجال العام. هذا المبدأ يتوافق مع مفهوم المداولات (*الشورى*) في القرآن الكريم الذي يؤكد على أهمية التواصل الحواري والتشاركي بين القادة والمجتمع. بالإضافة إلى ذلك، تتشابه نتائج هذه الدراسة مع نظرية *القيادة التحويلية* التي طورها جيمس ماكجريجور بيرنز والتي تؤكد على أهمية الالتزام الأخلاقي للقائد في بناء علاقات ذات معنى مع أتباعه. من منظور القرآن، يعمل التواصل القيادي أيضا كوسيلة لبناء الوعي الأخلاقي، وتعزيز الثقة الاجتماعية، وتشجيع التحول الاجتماعي نحو مجتمع أكثر عدلا وتحضرا.

على الرغم من تشابهه مع نظرية الاتصال الأخلاقي الحديثة، إلا أن هذا البحث يحمل اختلافات جوهرية مع نموذج الاتصال العلماني. في نظرية *أخلاقيات الخطاب* التي طورها يورغن هابرماس، تبنى شرعية أخلاقيات الاتصال بشكل رئيسي من خلال التوافق العقلاني الذي يتم التوصل إليه في المجال العام. وفي المقابل، من منظور القرآن، فإن شرعية أخلاقيات التواصل لا تستند فقط إلى الإجماع الاجتماعي، بل تأتي أيضا من الوحي الذي يفرض المسؤولية الأخلاقية البشرية أمام الله. تظهر اختلافات مماثلة أيضا عند مقارنتها بالنهج في أخلاقيات التواصل الذي طرحه كليفورد كريستيانز، والذي يركز على مبادئ *قول الحقيقة* والمسؤولية الاجتماعية ضمن إطار الإنسانية العلمانية. تضع هذه الأبحاث أخلاقيات التواصل ضمن إطار الوحي الذي يدمج الأبعاد الأخلاقية والروحية والاجتماعية في آن واحد، بحيث لا يقتصر التواصل على القيادة على فعالية الإقناع، بل أيضا نحو التفويض الأخلاقي والمنفعة العامة.

يستخدم هذا البحث منهجا نوعيا للبحث مع نهج تفسير موضوعي (*تفسر الموضعي*). يتم تنفيذ هذه الطريقة بجمع آيات من القرآن المتعلق بموضوع التواصل بين القادة والشعب، ثم تحليلها بشكل منهجي للعثور على مفاهيم التواصل الواردة فيه. تجرى عملية التحليل عبر عدة مراحل، وهي تحديد الآيات الموضوعية، والتحليل اللغوي للمصطلحات القرآنية المتعلقة بالتواصل والقيادة، ودراسة التفسيرات الكلاسيكية والمعاصرة، ودمج نتائج التفسير مع دراسة نظرية الاتصال الاجتماعي. يتيح هذا النهج للباحثين فهم شامل لمفهوم التواصل القيادي في القرآن. وبهذه الطريقة، نجحت هذه الدراسة في

صياغة نموذج تواصل لقادة القرآن يتكون من بعد أخلاقيات التواصل، وبعد العلاقات الاجتماعية، وبعد التحول الاجتماعي كإطار مفاهيمي للتواصل العسكري المتحضر في حياة الناس.

PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Deni Rahman
Nomor Induk Mahasiswa	:	203530006
Program Studi	:	Doktor Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi	:	Ilmu Tafsir
Judul Disertasi	:	Problematika Komunikasi Antara Pemimpin Dan Rakyat Dalam Perspektif Alquran (Studi Tafsir Tematik Tentang Etika Dan Relasi Sosial)

Menyatakan bahwa :

1. Disertasi ini adalah murni hasil karya sendiri. Apabila saya mengutip dari karya orang lain, maka saya akan mencantumkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Disertasi ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan sanksi yang berlaku di lingkungan Universitas PTIQ Jakarta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 24 Januari 2026
Yang membuat pernyataan



Deni Rahman

TANDA PERSETUJUAN DISERTASI

PROBLEMATIKA KOMUNIKASI ANTARA PEMIMPIN DAN RAKYAT DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN (STUDI TAFSIR TEMATIK TENTANG ETIKA DAN RELASI SOSIAL)

DISERTASI
Diajukan kepada Program Studi Doktor Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan studi Strata Tiga
untuk memperoleh gelar Doktor (Dr.)

Disusun oleh:
Oleh:
Deni Rahman
NIM: 203530006

Telah selesai dibimbing oleh kami, dan menyetujui untuk selanjutnya dapat diujikan.

Jakarta, 24 Januari 2026

Menyetujui:

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si.	Dr. Ahmad Zain Sarnoto, M.A, M.Pd.I

Mengetahui,
Ketua Program Studi Doktor Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Universitas PTIQ Jakarta

Dr. Muhammad Hariyadi, M.A.

TANDA PENGESAHAN DISERTASI

PROBLEMATIKA KOMUNIKASI ANTARA PEMIMPIN DAN RAKYAT DALAM PERSPEKTIF ALQURAN (STUDI TAFSIR TEMATIK TENTANG ETIKA DAN RELASI SOSIAL)

Disusun Oleh:

Nama	: Deni Rahman
Nomor Induk Mahasiswa	: 203530006
Program Studi	: Doktor Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi	: Ilmu Tafsir

Telah diajukan pada sidang terbuka pada tanggal:
15 April 2026

No.	Nama Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. H. M. Darwis Hude, M.Si.	Ketua	
2.	Prof. Dr. Hamdani Anwar, M.A.	Penguji I	
3.	Prof. Dr. Hj. Nur Arfiyah Febriani, M.A.	Penguji II	
4.	Assoc Prof. Dr. Muhammad Hariyadi, M.A.	Penguji III	
5.	Prof. Dr. H. M. Darwis Hude, M.Si.	Pembimbing I	
6.	Assoc Prof. Dr. Ahmad Zain Sarnoto, M.A, M.Pd.I	Pembimbing II	
7.	Assoc. Prof Dr. H. Akhmad Shunhaji, M.Pd.I	Panitera/Sekeretaris	

Jakarta, 15 April 2026
Mengetahui,
Direktur Pascasarjana
Universitas PTIQ Jakarta,

Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penggunaan transliterasi Arab-Indonesia ini berpedoman pada transliterasi Arab-Indonesia yang dibakukan berdasarkan Surah Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1998.

Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin
ا	'	ز	Z	ق	q
ب	b	س	S	ك	k
ت	t	ش	Sy	ل	l
ث	ts	ص	Sh	م	m
ج	j	ض	Dh	ن	n
ح	h	ط	Th	و	w
خ	kh	ظ	Zh	ه	h
د	d	ع	‘	ء	a
ذ	dz	غ	G	ي	y
ر	r	ف	F	-	-

CATATAN:

a. Konsonan yang ber-*syaddah* ditulis dengan rangkap, misalnya: رب ditulis *rabba*
b. Vokal Panjang (mad): *fathah* (baris di atas) ditulis *â* atau *Â*, kasrah (baris di bawah) ditulis î atau Î, serta *dhammah* (baris depan) ditulis dengan atau û atau Û, misalnya: القارعة ditulis *al-qâri'ah*, المساكين ditulis *al-masâkîn*, المفلحون *muflihûn*.
c. Kata sandang *alif* + *lam* (ال) apabila diikuti oleh huruf *qamariyah* ditulis *al*, misalnya: الكافرون ditulis *al-kâfirûn*. Sedangkan, bila diikuti oleh huruf *syamsiyah*, huruf *lam* diganti dengan huruf yang mengikutinya, misalnya: الرجال ditulis *ar-rijâl*, atau diperbolehkan dengan menggunakan transliterasi *al-qamariyah* ditulis *al-rijâl*. Asalkan konsisten dari awal sampai akhir.
d. T
a'marbúthah (ة), apabila terletak di akhir kalimat, ditulis dengan *h*, misalnya: البقرة ditulis *al-Baqarah*. Bila di Tengah kalimat ditulis dengan *i*, misalnya: زكاةالمال *zakât al*-mâl, atau ditulis سورة النسا *sûrat an-Nisâ*. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, misalnya: وهو خير الرازقين ditulis *wa huwa khair ar-râziqîn*.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillāhi rabbil 'ālamīn, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga disertasi ini dapat diselesaikan. *Shalawat* serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw., teladan utama dalam membangun peradaban yang berlandaskan nilai wahyu, keadilan, dan akhlak mulia, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Atas izin dan pertolongan Allah SWT., penulis dapat menyelesaikan disertasi ini sebagai bagian dari ikhtiar akademik dalam mengembangkan kajian Al-Qur'an dan Tafsir yang relevan dengan persoalan kebangsaan dan kehidupan bernegara di Indonesia.

Proses penyusunan disertasi ini merupakan perjalanan akademik yang panjang, bertahap, dan penuh perjuangan. Penelitian diawali dengan penelusuran problem konseptual dan empiris terkait dinamika komunikasi, kepemimpinan, dan relasi sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai moral ideal dan praktik sosial yang berlangsung. penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khazanah keilmuan dengan menghadirkan Al-Qur'an sebagai sumber epistemologis alternatif dalam pengembangan teori komunikasi, yang tidak hanya rasional dan teknis, tetapi juga berakar pada nilai moral dan transendental. Teori Komunikasi Kepemimpinan Qur'ani yang dirumuskan dalam disertasi ini diharapkan menjadi rujukan awal bagi penelitian lanjutan yang lebih empiris, komparatif, dan lintas disiplin.

Terselesaikannya disertasi ini tentu tidak lepas dari dukungan dan kebaikan banyak pihak yang telah memberikan keluangan waktu, tenaga, bimbingan, biaya serta dorongan moral spiritual sepanjang proses penyusunan disertasi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas PTIQ Jakarta, sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal, serta sebagai Menteri Agama RI Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, M.A. yang senantiasa memberikan semangat dan teladan yang luar biasa.
2. Direktur Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta, Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si. atas segala bimbingan, arahan serta kemudahan dalam melewati proses ini.
3. Ketua Program Studi Doktoral Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas PTIQ Jakarta, Dr. H. Muhammad Hariyadi, M.A.
4. Dosen Pembimbing Disertasi, Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si dan Dr. H. Zain Sarnoto, M.A. yang tidak pernah lelah dalam meluangkan waktu, pikiran, dan tenaganya untuk memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi dalam proses penyusunan disertasi ini.
5. Segenap sivitas akademika Universitas PTIQ Jakarta, khususnya Prof. Dr. Hj. Nur Arfiyah Febriani, S.Pd.I., M.A, segenap para dosen, staf TU, Kepala Perpustakaan beserta seluruh staf atas segala fasilitas, dukungan, serta kemudahan yang diberikan, sehingga proses penulisan disertasi ini dapat berjalan dengan lancar.
6. Kepada Ayahanda (alm) Muhasan dan Ibunda Yunasih, saya haturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas doa, kasih sayang, dan nilai-nilai kehidupan yang sejak awal menjadi fondasi langkah saya. Keteladanan Ayah dalam keikhlasan berjuang dan kebijaksanaan dalam mendidik, serta kasih sayang Ibu yang tak pernah putus mengalirkan kekuatan, menjadi sumber inspirasi yang doa-doanya senantiasa mengiringi saya dalam menempuh perjalanan akademik ini.
7. Untuk saudara-saudara saya, wa Nunung, wa Wawan, wa Iman, wa Ifik, wa Euis, dan seluruh keluarga besarnya yang telah banyak mendidik saya sebagai anak bungsu dan juga telah menanamkan nilai kebaikan, serta keteguhan.
8. Kepada istri tercinta Dewi Yuliani, S.Pd. dan 4 jagoan abi : mas Jundi, abang Fawaz, kaka Kareema, dan ade Syauqi. Terima kasih atas cinta, doa, dan keteguhan yang senantiasa menguatkan langkah saya dalam proses panjang penyusunan disertasi ini. Kesabaran dan dukungan tulus dari istri menjadi peneduh di tengah kesibukan, sementara tawa dan keceriaan 4 jagoan kami menjadi sumber energi yang tak ternilai. Semoga karya ini menjadi persembahan kecil atas segala pengorbanan

dan kebersamaan yang terus mengilhami setiap langkah perjalanan akademik saya.

9. Kepada para Guru saya, Imaam Yakhsyallah Mansur, Ustadz Abul Hidayat Saerodjie, Ustadz Agus Sudarmajie, Ustadz Abdul Hamid, M.A, Phd, dan yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, semoga ilmu yang sudah diajarkan menjadi amal jariah yang terus mengalir.
10. Kepada manajemen STAI Al-Fatah, ketua dan para pureknya, para dosen, khususnya Bu Dr. Hafniati, M.Kom.I, dan juga sahabat-sahabat seperjuangan staf di PRODI Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI), Ekonomi Syariah & Pendidikan Bahasa Arab (PBA), khususnya mba Lia & mba Alimah, juga mas Toyibi, mba Laila, mas Sidik & mas Edo, saya sampaikan penghargaan dan terima kasih yang tulus. Kebersamaan kita dalam menapaki jalan akademik, berbagi semangat, saling menguatkan di tengah dinamika studi, dan menjaga komitmen hingga titik ini,
11. Kepada seluruh sahabat-sahabat, khususnya Habib Nabiel Al-Musawwa, Ibu Anaway Mansur Anis Matta, Pak Khaerudin, Pak Imam Saparudin, dan semua yang masuk ke dalam grup Gabungan 23-24-25, dan rekan dakwah seperjuangan.
12. Para staf Maktab ‘Am terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang selalu menguatkan dalam setiap tahap perjuangan ini. Kehadiran antum semua menjadikan proses panjang ini lebih ringan dan bermakna.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa keberhasilan penyusunan disertasi ini merupakan hasil dari doa, dukungan, dan inspirasi banyak pihak yang tidak mungkin disebutkan satu per satu. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya atas segala bentuk kebaikan, perhatian, dan bantuan yang telah diberikan. Semoga seluruh kontribusi tersebut memperoleh balasan terbaik dari Allah SWT dan bernilai sebagai amal kebajikan yang terus mengalir. Penulis berharap disertasi ini dapat memberikan manfaat akademik, menambah khazanah keilmuan, serta menjadi sumbangan pemikiran meskipun sederhana bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan penuh kesadaran akan keterbatasan, karya ini diserahkan untuk dikaji, dikritisi, dan disempurnakan, sebagai bagian dari proses ilmiah yang berkelanjutan.

Jakarta, 24 Januari 2026
Penulis

Deni Rahman

DAFTAR ISI

ABSTRAK iii
PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI ix
TANDA PERSETUJUAN DISERTASI xi
TANDA PENGESAHAN DISERTASI xiii
KATA PENGANTAR xvii
DAFTAR ISI xxi

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah **1**
B. Identifikasi Masalah **11**
C. Pembatasan Masalah **12**
D. Rumusan Masalah **13**
E. Tujuan Penelitian **13**
F. Manfaat Penelitian **14**
1. Manfaat Teoritis 14
2. Manfaat Praktis 14
G. Kerangka Teori **14**
1. Teori Komunikasi 15
2. Teori Etika Sosial 17
3. Teori Kepemimpinan 19
H. Tinjauan Pustaka dan Penelitian Terdahulu yang Relevan **21**
I. Metodologi Penelitian **38**
J. Sistematika Penulisan **45**

BAB II KAJIAN TEORI TENTANG ETIKA DAN RELASI SOSIAL DALAM KOMUNIKASI PEMIMPIN DAN RAKYAT 47
A. Konsep Etika **47**
1. Definisi Etika 47
2. Etika Komunikasi 51
3. Etika Komunikasi Sekuler 54
4. Etika Rasional Instrumental dan Transendental 58
5. Etika dalam Interaksi Sosial 62
6. Etika dalam Kepemimpinan 66
B. Teori Komunikasi **70**
1. Definisi Komunikasi 70
2. Unsur Komunikasi 73
3. Teori Tindakan Komunikatif – Jürgen Habermas 76
4. Teori Komunikasi Dialogis - Paulo Freire 78
5. Teori Komunikasi Empati – Daniel Goleman 80
6. Teori Komunikasi Islam 83
7. Komunikasi Intrapersonal 87
8. Komunikasi Interpersonal 89
C. Teori Relasi Sosial **93**
1. Konsep Relasi Sosial 93
2. Teori Interaksi Simbolik – Goerge Herbert Mead 96
3. Teori Kekuasaan dan Dis-kursus – Michel Foucault 98
4. Teori Kepemimpinan Tranformasional – James MacGregor Burns 101
D. Rakyat dalam Relasi Sosial **105**
1. Partisipasi Sosial 105
2. Aspirasi dan Kritik 108
3. Relasi Simbolik 111
E. Etika dan Relasi Sosial dalam Perspektif Islam **113**
1. Prinsip Musyawarah 116
2. Prinsip Keadilan 119
3. Prinsip Persamaan 122
F. Komunikasi Politik **124**

BAB III PROBLEMATIKA KOMUNIKASI ANTARA PEMIMPIN DAN RAKYAT DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN 131
A. Problematika Komunikasi **131**
1. Krisis komunikasi 131
2. Kerusakan relasi komunikasi 136
3. Kerangka problematika komunikasi. 139
B. Problematika Komunikasi Berbasis Kekuasaan (*Power-Oriented Communication*) **142**

1. *Istikbār* (الاستكبار): Komunikasi Dominatif dan Penolakan terhadap Dialog 142
2. *Ṭughyān* (الطغيان): Penyalahgunaan Otoritas 148
3. *Ẓulm* (الظلم): Ketidakadilan Struktural dalam Relasi Komunikasi Pemimpin dan Rakyat 151

C. Problematika Moralitas (*Ethical Breakdown*) 154
1. *Nifāq* (النفاق): Manipulasi Komunikasi 154
2. *Kizb* dan *Takdzīb* (الكذب / التكذيب): Distorsi Kebenaran 157
3. *Fasād* (الفساد): Kerusakan Moral dalam Komunikasi Sosial 160

D. Problematika Relasi Sosial (*Social Disconnection*) 164
1. *Tafarruq* (التفرق): Polarisasi Sosial 164
2. *Qaswah al-Qalb* (قسوة القلب): Kekerasan Hati 167
3. *I'rāḍ* (الإعراض): Penolakan terhadap Nasihat 170

E. Sintesis Problematika Komunikasi 172
1. Kekuasaan, moralitas, dan relasi sosial 172
2. Legitimasi kepemimpinan 177

BAB IV ISYARAT QUR'ANI TENTANG KOMUNIKASI ANTARA PEMIMPIN DAN RAKYAT DALAM MEMBANGUN ETIKA DAN RELASI SOSIAL 183

A. Kerangka Qur'ani tentang Komunikasi Pemimpin 184
1. Komunikasi dalam perspektif Al-Qur'an 184
2. Tanggung Jawab Moral Pemimpin 187
3. Pendekatan Tafsir Tematik 190
4. Klasifikasi term Qur'ani 193

B. Isyarat Qur'an tentang Komunikasi 196
1. *Qaul* (قول) - Konsep Dasar Komunikasi 196
2. Lisan (لسان) - Instrumen Bahasa 199
3. *Kalam* (كلام) - Proses Penyampaian Makna 202
4. *Risālah* (رسالة) - Model Komunikasi 205

C. Isyarat Qur'an tentang Pemimpin 207
1. *Khalifah* (خليفة) - Pemimpin Amanah Sosial 207
2. *Imām* (إمام) - Pemimpin Teladan 210
3. *Uli al-Amri* (أولي الأمر) - Otoritas pemimpin 212
4. *Ulil Aydī wa al-Abṣār* (أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ) – Pemimpin Berintegritas dan Berwawasan 215
5. *Ulī Quwwah* (أُولِي الْقُوَّةِ) – Pemimpin yang Memiliki Kekuatan dan Keteguhan 218

D. Isyarat Qur'ani tentang Rakyat dalam Struktur Sosial 220
1. *Qawm* (قوم) - Komunitas Sosial 220
2. *Ummah* (أمة) - Kolektivitas Moral 222
3. *An-Nās* (الناس) - Subjek Sosial 225

E. Isyarat Qur'an tentang Etika Komunikasi.....227
1. *Qaulan Karīman* (قولًا كريمًا): Komunikasi yang Menghormati.....227
2. *Qaulan Ma'rūfan* (قولًا معروفًا): Komunikasi yang Selaras 232
3. *Qaulan Sadīdan* (قولًا سديدًا): Komunikasi yang Jujur 238
4. *Qaulan Layyinan* (قولًا لينًا): Komunikasi Humanis.....243
5. *Qaulan Balīghan* (قولًا بليغًا): Komunikasi Efektif.....248
6. *Qaulan Maisūran* (قولًا ميسورًا) – Komunikasi yang Memudahkan dan Menenangkan.....254

F. Pemimpin-Rakyat dalam Kisah-Kisah Qur'an.....257
1. Para Nabi sebagai Komunikator Ilahi 258
2. Kepemimpinan Perempuan – Kepemimpinan Konsultatif.....282
3. Kisah Pemimpin zalim 285

BAB V MODEL KOMUNIKASI PEMIMPIN QUR'ANI DALAM MEMBANGUN ETIKA DAN RELASI SOSIAL 303

A. Urgensi Rekonstruksi Model Komunikasi Kepemimpinan 304
1. Keterbatasan paradigma komunikasi kepemimpinan modern 304
2. Krisis etika komunikasi pemimpin dan rakyat dalam realitas sosial 306
3. Relevansi nilai Qur'ani sebagai landasan etika komunikasi publik..308
4. Posisi model komunikasi pemimpin Qur'ani 311

B. Formulasi Prinsip Komunikasi Pemimpin Qur'ani 312
1. Komunikasi sebagai Amanah Moral 312
2. Komunikasi sebagai Instrumen Pembangunan Kepercayaan Sosial.315
3. Komunikasi sebagai Sarana Rekonsiliasi Sosial.....317
4. Komunikasi sebagai Manifestasi Keteladanan Kepemimpinan.....319

C. Model Komunikasi Pemimpin Qur'ani 321
1. Fondasi Model: Etika Komunikasi Qur'ani 321
2. Struktur Model Komunikasi Pemimpin Qur'ani.....323
3. Karakteristik Model Komunikasi Pemimpin Qur'ani 330

D. Implikasi Model Komunikasi Pemimpin Qur'ani 331
1. Implikasi Teoretis.....331
2. Implikasi Sosial.....333
3. Implikasi Kepemimpinan.....334

BAB VI PENUTUP 337
A. Kesimpulan 337
B. Rekomendasi.....339

DAFTAR PUSTAKA.....337
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 353

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena komunikasi antara pemimpin dan rakyat pada era modern menunjukkan dinamika yang kompleks, di mana sering kali terjadi kesenjangan antara wacana ideal etika kepemimpinan dan praktik komunikasi yang berlangsung di ranah sosial maupun politik. Krisis kepercayaan publik terhadap pemimpin menjadi gejala sosial yang meluas akibat ketidakhadiran nilai kejujuran, keterbukaan, dan keadilan dalam komunikasi publik.[1]

Krisis komunikasi antara pemimpin dan rakyat kerap muncul dalam berbagai dinamika sosial.[2] Misalnya komunikasi politik sering kali terjebak dalam retorika populisme, manipulasi media, serta mis-komunikasi antara kepentingan penguasa dan aspirasi publik.[3] Jürgen Habermas (1929-) menyoroti pentingnya ruang publik (*public sphere*) sebagai wadah dialog kritis antara otoritas dan warga negara.[4]

---

[1] Fikri Awla, & Ahmad Rifai., Political Communication in the Qur'anic Perspective: Ethical Principles for Contemporary Politics, *Palakka: Media and Islamic Communication*, 2025, hal. 72.

[2] Dudih Sutrisman, *Pendidikan Politik, Persepsi, Kepemimpinan, dan Mahasiswa*, Guepedia, 2019, hal. 54..

[3] Gun Gun Heryanto, *Media Komunikasi Politik*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2018, hal. 112

[4] Jurgen Habermas, J. *The Structural Transformation of the Public Sphere*. MIT Press, 1989, hal. 27

Dalam realitas komunikasi kekuasaan dewasa ini, tampak ketimpangan struktural yang membuat aspirasi rakyat kerap tidak terakomodasi secara bermakna.[5] Internet, media sosial, dan kanal komunikasi digital telah menciptakan ruang interaksi yang lebih terbuka namun juga penuh *noise* dan disinformasi.[6]

Perkembangan teknologi informasi, globalisasi budaya, dan kemunculan masyarakat digital (*digital society*) membawa implikasi terhadap pola komunikasi antara pemimpin dan rakyat.[7] Di satu sisi, teknologi dapat menjadi medium efektif dalam membangun komunikasi dua arah, tetapi di sisi lain, memperlebar jurang disinformasi, polarisasi opini, dan munculnya figur otoriter yang memperkuat pengaruh politiknya.[8]

Praktik komunikasi politik bersifat *top-down* dan sering mengalami distorsi akibat kepentingan partisan dan oligarki media.[9] Dalam negara yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan demokrasi, proses komunikasi menjadi instrumen membangun konsensus sosial.[10]

Tanpa komunikasi yang harmonis, kesalahpahaman dapat terjadi, ketidakpercayaan, ketidakpuasan, dan bahkan konflik sosial.[11] Dalam konteks Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia,[12] komunikasi pemimpin dan rakyat menghadapi tantangan serupa. Hal ini terlihat jelas dari laporan yang disampaikan oleh berbagai lembaga, seperti *Kementerian* Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI),[13] Kementerian

---

[5] Seperti penelitian yang dilakukan di Kelurahan Mampang, Depok oleh Najoan, B., Kawengian, D. D., & Harilama, S. H. (2017). Peranan Komunikasi Tokoh Masyarakat dalam Meminimalisir Kesenjangan Sosial di Kelurahan Mampang Kota Depok Jawa Barat. Acta Diurna Komunikasi, 6 (3)., menunjukkan bahwa ketimpangan sosial terjadi akibat kurang efektifnya pelayanan masyarakat. pemerintah menyatakan tidak ada hambatan dalam

[6] Aris Sarjito, Hoaks, Disinformasi, Dan Ketahanan Nasional: Ancaman Teknologi Informasi Dalam Masyarakat Digital Indonesia. *Journal Of Governance And Local Politics (Jglp)*, 6(2), 2024, hal. 175-186.

[7] Christiany Juditha Nugroho, *Cyber Society: Teknologi, Media Baru, dan Disrupsi Informasi*, Jakarta: Prenada Media, 2020, hal. 87..

[8] Robert W. McChesney, *Digital Disconnect: How Capitalism is Turning the Internet Against Democracy*. New Press, 2013, hal. 45.

[9] Haryatmoko, *Etika Komunikasi: Manipulasi Media, Kekerasan, dan Pornografi*, Yogyakarta: Kanisius, 2016, hal. 103.

[10] Yusa Djuyandi, *Pengantar Ilmu Politik*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2023, hal. 74.

[11] Salahuddin, *Komunikasi Dalam Organisasi Multikultural. Komunikasi Sosial Dan Lintas Budaya*, 2024, hal.2.

[12] worldpopulationreview.com menampilkan data jumlah umat muslim sebanyak 242.700.000 jiwa dari populasi 275.000.000 penduduk Indonesia dengan prosentase 88,25% di Indonesia dan 12,27 % di dunia.

[13] Analisis oleh Kemhan RI menyoroti kelemahan dalam komunikasi antara pemimpin organisasi dan pemangku kepentingan. Laporan ini mencatat bahwa komunikasi yang tidak efektif dapat menyebabkan ketidakpuasan staf dan stakeholder, serta menghambat

Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI),[14] Lembaga Penyiaran Publik TVRI Stasiun Yogyakarta,[15] Universitas Lampung (Unila),[16] Universitas Indonesia (UI).[17] Sering kali masyarakat disuguhi berita tentang konflik antara pemimpin dan rakyatnya yang disebabkan permasalahan komunikasi.[18]

Fenomena krisis komunikasi antara pemimpin dan rakyat di Indonesia juga tampak dalam berbagai polemik kebijakan publik yang memicu reaksi luas di masyarakat. Salah satu contoh yang banyak disorot adalah polemik komunikasi pemerintah dalam proses pembahasan Undang-undang Cipta Kerja pada tahun 2020. Sejumlah kelompok masyarakat menilai bahwa proses komunikasi kebijakan tersebut tidak dilakukan secara partisipatif dan transparan sehingga memunculkan gelombang demonstrasi di berbagai daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan yang tidak disertai dialog publik dapat menimbulkan kesalahpahaman serta memperlemah legitimasi sosial terhadap kebijakan pemerintah.[19]

---

pencapaian tujuan organisasi, lihat *https://www.kemhan.go.id/pothan/2023/07/27/analisa-kelemahan-kepemimpinan-dan-saran-sebagai-pemimpin-organisasi-untuk-dapat-melaksanakan-tugasnya-dengan-efektif.html*

[14] Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu RI menerbitkan artikel yang menyoroti pentingnya komunikasi efektif antara pimpinan dan bawahan. artikel ini mencatat bahwa komunikasi yang buruk dapat menyebabkan kelelahan pada pemimpin dan ketidakpuasan di kalangan bawahan, yang pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan organisasi. Lihat https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pangkalanbun/baca-artikel/13852/ Pentingnya-Komunikasi-

[15] Studi Kasus Di LPP TVRI Stasiun Yogyakarta menunjukkan bahwa komunikasi vertikal dan horizontal yang tidak efektif antara pimpinan dan anggota organisasi dapat menyebabkan misinterpretasi dan kurangnya keselarasan dalam berkomunikasi. hal ini dapat menghambat inovasi dan efektivitas organisasi. Seperti ditulis Lia Kartika Dewi, dkk, pada Jurnal CANTRIK, dengan judul *Model Komunikasi Kepemimpinan dalam Manajemen LPP TVRI Stasiun Yogyakarta, (*2024) Lihat: https://journal.uii.ac.id/ cantrik/article/download/ 35997/17595/128215

[16] Penelitian oleh Andy Corry Di Universitas Lampung membahas peran komunikasi pemimpin daerah dalam menyelesaikan masalah-masalah di daerah. Studi ini menekankan bahwa komunikasi yang baik antara pemimpin dan masyarakat dapat mempercepat penyelesaian masalah, sementara komunikasi yang buruk dapat memperburuk ketidakharmonisan. Lihat: http://digilib.unila.ac.id/1928/1/komunikasi%20 pemerintahan%20%20daerah-andy%20corry.pdf

[17] Tesis oleh Evawani Elysa Lubis Dari Universitas Indonesia meneliti konflik antara bupati kampar dan masyarakat serta jajaran pemerintahannya. studi ini mengidentifikasi bahwa gaya komunikasi dan kepemimpinan bupati menjadi pemicu utama konflik, menunjukkan pentingnya kompetensi komunikasi dalam kepemimpinan daerah.

[18] Seperti yang dimuat di berita online Kompas.com pada Hari Kamis Tanggal 25 April 2024, Pkl. 17.31 Wib, bahwa mantan wakil presiden jusuf kalla menyatakan bahwa konflik di papua terjadi karena masyarakat menganggap pemerintah ingin "merampok" kekayaan daerah tersebut. pernyataan ini mencerminkan adanya ketidakpercayaan dan komunikasi yang tidak harmonis antara pemerintah pusat dan masyarakat papua

[19] Gelombang Demonstrasi Menolak UU Cipta Kerja Terjadi di Berbagai Daerah," *Kompas.com*, 8 Oktober 2020. Diakses tanggal 28 Februari 2026

Selain itu, problem komunikasi publik juga tampak dalam dinamika komunikasi pemerintah terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam pelaksanaannya, sejumlah pengamat menilai bahwa komunikasi pemerintah belum sepenuhnya konsisten sehingga menimbulkan beragam persepsi di masyarakat mengenai mekanisme pelaksanaan, sasaran penerima manfaat, serta kesiapan anggaran program tersebut. Perbedaan pernyataan antar pejabat mengenai teknis implementasi, sumber pendanaan, dan waktu pelaksanaan turut memengaruhi persepsi publik terhadap kesiapan pemerintah dalam menjalankan program nasional tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam kebijakan publik berskala besar, kualitas komunikasi pemimpin memiliki peran penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan negara.

Lebih jauh lagi, survei nasional menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik sangat dipengaruhi oleh kualitas komunikasi publik para pemimpin. Ketika komunikasi pemerintah dianggap tidak transparan atau tidak responsif terhadap aspirasi masyarakat, tingkat kepercayaan publik cenderung menurun.[20] Temuan ini menguatkan pandangan bahwa komunikasi kepemimpinan bukan sekadar penyampaian informasi, tetapi merupakan sarana membangun legitimasi moral dan sosial antara pemimpin dan rakyat.

Di era digital, tantangan komunikasi antara pemimpin dan rakyat juga semakin kompleks akibat meningkatnya penyebaran informasi palsu dan disinformasi politik di media sosial. Laporan penelitian global menunjukkan bahwa Indonesia termasuk negara dengan tingkat paparan disinformasi politik yang relatif tinggi di ruang digital.[21] Fenomena ini menyebabkan ruang komunikasi publik sering dipenuhi narasi yang saling bertentangan sehingga memperkeruh dialog antara pemimpin dan masyarakat. Dalam kondisi seperti ini, komunikasi yang tidak didasarkan pada prinsip transparansi dan kejujuran justru dapat memperbesar polarisasi sosial dan memperlemah kohesi masyarakat.

Perkembangan komunikasi politik di era digital memperlihatkan adanya transformasi dalam pola interaksi antara pemimpin dan masyarakat, namun tidak diiringi dengan peningkatan kualitas etika komunikasi. Banyak pemimpin menggunakan media komunikasi bukan untuk membangun kesalingpahaman, melainkan sebagai alat pencitraan dan manipulasi simbolik yang mereduksi substansi dialog publik.[22] Akibatnya, rakyat cenderung

---

[20] Burhanuddin Muhtadi, *Survei Nasional Indikator Politik Indonesia tentang Kepercayaan Publik terhadap Institusi Negara*, Jakarta, 2022.

[21] Nic Newman et al., *Digital News Report 2023*, Oxford: Reuters Institute for the Study of Journalism, 2023.

[22] Agung Danarta, "Social Ethics Political Buzzer in the Living Religions (Qur'an and Hadith)," *Jurnal Sosiologi Agama*, 2022, hal. 95.

menjadi objek komunikasi politik, bukan subjek yang memiliki ruang partisipasi aktif dalam proses kebijakan. Dalam konteks ini, Al-Qur'an mengajarkan prinsip *qaulan ma'rūfa*, perkataan yang baik dan membawa kemaslahatan, sebagai landasan etika komunikasi yang mengutamakan kemanusiaan dan keadilan.[23] Ketika nilai ini diabaikan, komunikasi kepemimpinan kehilangan fungsi moralnya dan justru melahirkan ketimpangan sosial yang semakin tajam antara pemerintah dan rakyat.

Pemilihan judul "Problematika Komunikasi antara Pemimpin dan Rakyat dalam Perspektif Al-Qur'an" didasarkan pada keprihatinan terhadap semakin menurunnya kualitas komunikasi etis dalam relasi kekuasaan di berbagai tingkat pemerintahan. Berbagai penelitian kontemporer menunjukkan bahwa krisis etika komunikasi politik dan sosial sering kali bersumber dari absennya nilai amanah (*trustworthiness*) dan keadilan dalam pengelolaan kekuasaan.[24] Dalam konteks Islam, kepemimpinan bukan hanya urusan administratif, melainkan tanggung jawab moral dan spiritual yang menuntut integritas dan komunikasi yang menyejukkan hati umat.

Konteks sosial Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar dengan populasi Muslim yang signifikan memperlihatkan adanya paradoks antara nilai-nilai keislaman yang diajarkan dan praktik komunikasi publik yang dijalankan. Banyak kasus penyalahgunaan kekuasaan dan manipulasi wacana publik yang menyebabkan lahirnya krisis kepercayaan rakyat terhadap pemimpin.[25]

Fenomena empiris di lapangan memperlihatkan bahwa kegagalan komunikasi pemimpin dengan rakyat bukan hanya berdampak pada ketidakefektifan kebijakan, tetapi juga pada keretakan sosial dan moral masyarakat. Dalam studi yang dilakukan oleh Syarif (2023) ditemukan bahwa lemahnya etika komunikasi pemimpin di tingkat lokal berimplikasi pada menurunnya solidaritas sosial dan kepercayaan antar warga.[26] Kondisi ini menandakan adanya kebutuhan mendesak untuk membangun paradigma komunikasi kepemimpinan yang bersumber dari nilai-nilai Qur'ani seperti *shidq* (kejujuran), *adl* (keadilan), dan *rahmah* (kasih sayang). Dengan demikian, penelitian ini berangkat dari kesadaran bahwa komunikasi bukan

---

[23] Khairuddin, dkk., "The Principles of Internalization of Qawlan Ma'rufa Perspective of the Quran and Its Relevance to Ethics Contemporary Communication," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 2023, hal. 148.

[24] Muhammad Imam Prasojo dan Naufal Athallah, "Leadership Ethics in Islam," *International Journal of Strategic Studies*, 2025, hal. 63.

[25] Nur Chanifah, Abu Samsudin, dan Ibnu Hajar Ansori, "Quranic Leadership: The Effort to Realize the Integrity of Leaders in Preventing Corruption," *International Journal of Educational Management and Innovation*, 2024, hal. 118.

[26] Muhammad Syarif, "Ethics Of Leadership Communication In Islam," *Qanun: Journal Of Islamic Laws And Studies* 1, No. 2, 2023, hal. 91–95.

sekadar alat transfer informasi, tetapi sarana membangun tatanan sosial yang bermoral dan berkeadaban sebagaimana dikehendaki oleh ajaran Islam.

Secara teoretis, problematika komunikasi antara pemimpin dan rakyat dapat dijelaskan melalui pendekatan teori komunikasi etis dan partisipasi yang dikembangkan oleh Habermas (1929-) dalam konsep *discourse ethics*, di mana komunikasi ideal ditandai dengan keterbukaan, kejujuran, dan kesetaraan posisi dalam dialog sosial. Dalam konteks Islam, prinsip ini memiliki relevansi kuat dengan nilai *syūrā* (musyawarah) yang menuntut pemimpin untuk membuka ruang dialog yang adil dan transparan dengan rakyatnya.[27] Dalam perspektif Al-Qur'an, musyawarah merupakan prinsip fundamental yang menegakkan nilai kebersamaan dan kesetaraan moral antara pemimpin dan rakyat

Teori etika kepemimpinan yang dikembangkan oleh James MacGregor Burns (1918-2014) dalam konsep transformational *leadership* juga memiliki irisan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya nilai moral dan spiritual dalam interaksi antara pemimpin dan pengikut. Burns menegaskan bahwa pemimpin yang transformasional harus memiliki komitmen moral untuk mengangkat kesadaran etis rakyatnya dan mendorong perubahan sosial yang berkeadilan. Prinsip ini sejalan dengan konsep kepemimpinan dalam Islam yang menuntut nilai amanah dan *fathanah* dalam menjalankan tanggung jawab sosial.[28] Dalam konteks komunikasi, kepemimpinan transformasional mendorong keterbukaan dan empati sebagai sarana membangun legitimasi moral dan spiritual di hadapan umat. Maka, komunikasi pemimpin yang berorientasi pada nilai ilahiah dapat menjadi sarana efektif untuk menumbuhkan loyalitas sosial dan kesejahteraan kolektif.

Selain itu, teori *symbolic interactionism* yang dikembangkan oleh George Herbert Mead (1863-1931) menekankan bahwa makna sosial terbentuk melalui proses interaksi simbolik yang terus-menerus antara individu dan kelompok. Dalam konteks komunikasi pemimpin dan rakyat, teori ini membantu menjelaskan bagaimana simbol-simbol religius dan moral digunakan untuk membangun legitimasi kepemimpinan dan kepercayaan sosial.[29] Islam sebagai agama wahyu telah lama menekankan pentingnya simbol komunikasi yang mengandung nilai kebenaran *(qaulan sadīdan)* dan

---

[27] Sundus Rana, "Quranic Principles of Effective Communication: A Timeless Framework for Digital and Interpersonal Ethics," *International Journal of Social Science & Entrepreneurship*, 2025, hal. 84.

[28] Ahmad Saiful Azlin Puteh Salin, "Islamic Ethical Leadership," *I-IECONS E-Proceedings*, 2023, hal. 47.

[29] Muhammad Solekhan, "Communication Ethics in Social Relationships Using Social Media Wisely in Islamic Values," *Journal of Modern Islamic Studies and Civilization*, 2023, hal. 92.

kelembutan *(qaulan layyinan)* sebagai bentuk komunikasi yang memanusiakan lawan bicara.

Dalam ranah ilmu komunikasi Islam, teori etika komunikasi Qur'ani memberikan paradigma yang lebih komprehensif dibandingkan teori sekuler, karena mengintegrasikan aspek moral, sosial, dan spiritual secara simultan. Etika komunikasi Qur'ani menekankan keseimbangan antara *shidq* (kejujuran), *adl* (keadilan), dan *rahmah* (kasih sayang) sebagai prinsip komunikasi yang tidak hanya mengatur relasi horizontal antar manusia, tetapi juga relasi vertikal dengan Allah SWT.[30] Prinsip ini memperkaya teori komunikasi modern dengan menambahkan dimensi transendental yang selama ini diabaikan dalam paradigma sekuler. Oleh karena itu, membangun komunikasi antara pemimpin dan rakyat berdasarkan etika Qur'ani berarti menegakkan struktur sosial yang berkeadaban dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

Relevansi teori komunikasi etis modern dengan ajaran Islam juga tampak pada prinsip tanggung jawab moral dalam setiap tindakan komunikasi. Dalam teori komunikasi moral oleh Clifford Christians (1941-), komunikasi harus mengandung unsur *truth-telling* dan *public responsibility* yang menghindarkan individu dari manipulasi atau penyesatan informasi. Dalam konteks kepemimpinan, prinsip ini menjadi landasan penting untuk membangun komunikasi yang berintegritas antara pemimpin dan rakyat dalam kerangka nilai ilahiah dan kemanusiaan.[31]

Urgensi penelitian tentang komunikasi antara pemimpin dan rakyat dalam perspektif Al-Qur'an muncul dari kenyataan bahwa krisis moral dalam kepemimpinan modern telah meluas ke ranah komunikasi publik dan politik. Banyak pemimpin gagal menjalankan fungsi komunikasi yang adil dan bermartabat karena hilangnya orientasi nilai spiritual dalam interaksi sosial.[32] Komunikasi yang didasari pada kepentingan pragmatis sering kali menghasilkan distorsi makna dan manipulasi informasi yang mengikis kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Dalam kerangka Islam, komunikasi bukan sekadar alat retorika, tetapi juga bagian dari ibadah dan tanggung jawab moral untuk menyampaikan kebenaran.

Dalam konteks sosial Indonesia yang plural dan demokratis, urgensi penelitian ini semakin meningkat karena komunikasi publik sering kali

---

[30] Haerudin, Iyad Suryadi, dan Helmawati Helmawati, "Ethics of Communication on Social Media in the Perspective of the Interpretation of Ibn Kathir," *Studia Quranika*, 2025, hal. 58.

[31] Hakeem Jaiyeoba, Taha Ushama, dan Yusuf Amuda, "The Quran as a Source of Ethical and Moral Guidance in Contemporary Society," *Al-Irsyad: Journal of Islamic and Contemporary Issues*, 2024, hal. 37.

[32] Desy Rahma Wati, "The Ethics of Social Media Communication in the Perspective of the Al-Qur'an," *Journal of Islamic Communication and Counseling*, 2023, hal. 72.

menjadi sarana untuk mempertajam polarisasi sosial dan politik. Ketika komunikasi kehilangan landasan etiknya, masyarakat terjebak dalam konflik opini dan disinformasi yang berujung pada krisis sosial. Oleh sebab itu, nilai-nilai Qur'ani seperti *qaulan karīman* (perkataan yang mulia) dan *qaulan balīghan* (perkataan yang tepat) perlu diaktualisasikan sebagai pedoman etis komunikasi politik dan sosial.[33] Dalam konteks komunikasi kepemimpinan, hal ini berarti pemimpin harus mampu menggunakan bahasa yang membangun martabat dan menghindari ujaran kebencian yang dapat merusak persatuan umat. Relevansi penelitian ini terletak pada upaya membangun paradigma komunikasi yang tidak hanya komunikatif, tetapi juga berakhlak, berorientasi pada maslahat, dan berdasar pada nilai wahyu.

Selain itu, relevansi penelitian ini tampak pada perannya dalam memberikan kontribusi terhadap rekonstruksi teori komunikasi Islam kontemporer. Seiring perkembangan teori komunikasi global yang semakin sekuler, muncul kebutuhan mendesak untuk menghadirkan paradigma komunikasi yang berakar pada nilai-nilai Qur'ani sebagai alternatif etika global.[34] Teori komunikasi Barat seperti Habermas (1929-) dan Rogers (1902-1987) memang menekankan aspek rasionalitas dan empati, tetapi masih minim dalam memasukkan unsur *transendensi* dan pertanggungjawaban moral di hadapan Tuhan. Al-Qur'an menghadirkan prinsip keseimbangan antara aspek rasional dan spiritual yang menjadikan komunikasi tidak hanya alat sosial, tetapi juga sarana pemuliaan manusia sebagai makhluk berakal dan beriman.

Urgensi lain dari kajian ini adalah meningkatnya kebutuhan akan kepemimpinan yang berorientasi moral di tengah maraknya krisis integritas dan penyalahgunaan kekuasaan. Kepemimpinan yang tidak berlandaskan nilai spiritual cenderung melahirkan komunikasi manipulatif yang menjauh dari nilai keadilan dan kejujuran.

Selain urgensi teoretis, penelitian ini juga memiliki relevansi praktis yang besar bagi pembangunan sosial dan pemerintahan beretika di Indonesia. Komunikasi yang dilandasi nilai ilahiah dapat memperkuat legitimasi moral pemimpin sekaligus meningkatkan partisipasi rakyat dalam pembangunan. Penelitian ini berpotensi menjadi rujukan akademik dan praktis bagi para pemimpin, akademisi, serta pembuat kebijakan untuk menegakkan komunikasi yang amanah, adil, dan transparan.[35] Implementasi prinsip komunikasi Qur'ani

---

[33] Lukmanul Hakim, "The Importance of Da'wa Ethics in Social Media: A Quranic Perspective," *QOF: Journal of Qur'anic Studies*, 2023, hal. 64.

[34] Ashari Mujamil dan Ali Wafa, "Relevance of Verses on Politics in the Quran with the Constitution in Indonesia; Thematic Pancasila, UUD 1945, and Controversial Articles in Criminal Code (KUHP)," *Istinbath*, 2023, hal. 221

[35] Sabil Mokodenseho, Sahara Yarbo, Fatmawaty Toani, Liliana Korompot, Fadlun Pakelo, dan Elvi Dotinggulo, "Communication-based Da'wah Ethics Inspired by the Prophet's Sunnah in the Qur'an," *West Science Islamic Studies*, 2024, hal. 134.

juga dapat memperkuat budaya organisasi pemerintahan yang akuntabel dan berpihak pada kepentingan publik.

Penelitian ini menjadi relevan dalam konteks global, ketika dunia menghadapi degradasi etika komunikasi akibat perkembangan teknologi informasi dan media sosial. Dalam banyak kasus, media digital justru memperburuk jarak sosial antara pemimpin dan rakyat karena komunikasi menjadi dangkal dan penuh disinformasi. Prinsip komunikasi Qur'ani yang menekankan *tabayyun* (klarifikasi) dan tanggung jawab moral dapat menjadi solusi universal untuk menghadapi fenomena ini.[36]

Kajian mengenai komunikasi kepemimpinan dalam Islam sejauh ini masih cenderung berfokus pada aspek moral normatif tanpa menyentuh dimensi komunikasi sebagai proses sosial yang dinamis. Beberapa penelitian hanya menyoroti nilai-nilai kepemimpinan Islam seperti amanah dan adil, tetapi belum banyak yang mengaitkannya dengan konsep komunikasi dua arah yang partisipatif dan berbasis nilai wahyu.[37] Hal ini menimbulkan kesenjangan konseptual antara teori komunikasi modern yang berbasis rasionalitas dan model komunikasi Qur'ani yang berlandaskan spiritualitas dan moralitas. Dalam konteks ini, penelitian ini diharapkan dapat mengisi celah tersebut dengan menyusun suatu model komunikasi kepemimpinan yang berakar pada prinsip *qaulan* dalam Al-Qur'an, seperti *qaulan sadīdan* (perkataan yang benar)*, qaulan kariiman* (perkataan yang memuliakan), *qaulan balīghan* (perkataan yang efektif), dan *qaulan layyinan* (perkataan yang lembut).

Kesenjangan lain yang perlu diisi adalah kurangnya penelitian yang menjelaskan hubungan antara etika komunikasi pemimpin dan pembangunan kepercayaan sosial *(social trust)* dalam masyarakat Muslim kontemporer. Sebagian besar kajian hanya menyoroti dimensi teologis dari komunikasi Islam tanpa menempatkannya dalam konteks sosial-politik yang aktual.[38] Padahal, kepercayaan sosial adalah modal dasar dalam membangun legitimasi kepemimpinan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya memperluas perspektif dengan menempatkan etika komunikasi Qur'ani sebagai variabel yang berperan penting dalam memperkuat struktur sosial dan politik umat. Melalui pendekatan tafsir tematik *(tafsir maudhū'ī)*, nilai-nilai komunikasi Qur'ani akan dianalisis secara sistematis untuk menjelaskan bagaimana prinsip moral dan spiritual mampu memulihkan kepercayaan publik terhadap pemimpin.

---

[36] Ejen Jaenudin, "Ethics of Using Social Media in the Quran and Hadith Guide," *Jurnal Da'wah: Risalah Merintis, Da'wah Melanjutkan*, 2022, hal. 52.

[37] Salin, Ahmad Saiful Azlin Puteh. *"Islamic ethical leadership: a conceptual discussion*." I-iECONS e-Proceedings, 2023, hal. 472-479.

[38] Fikra Awla, & Ahmad Rifai., Political Communication in the Qur'anic Perspective: Ethical Principles for Contemporary Politics, *Palakka: Media and Islamic Communication*, 2025, hal. 72.

Selain itu, sebagian penelitian sebelumnya mengenai komunikasi kepemimpinan Islam cenderung terfragmentasi antara ranah teologi, tafsir, dan ilmu sosial, sehingga belum menghasilkan model konseptual yang utuh dan operasional. Pendekatan yang digunakan sering kali bersifat deskriptif tanpa menghasilkan teori aplikatif yang dapat dijadikan pedoman dalam konteks komunikasi pemerintahan dan kepemimpinan publik.[39]

Kontribusi ilmiah lain dari penelitian ini adalah memberikan dasar epistemologis bagi pengembangan ilmu komunikasi Islam berbasis wahyu. Selama ini, banyak teori komunikasi dikembangkan dari paradigma Barat yang memisahkan etika dari spiritualitas, sehingga tidak mampu menjelaskan dimensi moralitas dalam komunikasi manusia. Penelitian ini berupaya menegaskan bahwa komunikasi dalam perspektif Al-Qur'an memiliki landasan ontologis yang berbeda, yaitu menempatkan komunikasi sebagai bentuk *tabligh* dan tanggung jawab moral di hadapan Allah SWT.[40] Melalui pendekatan ini, kontribusi teoretis yang dihasilkan tidak hanya bersifat akademik, tetapi juga normatif, karena mengembalikan fungsi komunikasi pada posisi spiritual yang suci dan konstruktif.

Fokus utama penelitian ini secara tegas diarahkan untuk mengkaji dan merumuskan model komunikasi antara pemimpin dan rakyat dalam perspektif Al-Qur'an yang berlandaskan pada prinsip-prinsip etika ilahiah. Penelitian ini akan menelaah ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung konsep komunikasi etis, seperti *qaulan sadīdan, qaulan layyinan, qaulan ma'rūfa, qaulan balīghan* dan *qaulan maisuran* untuk membangun suatu kerangka konseptual yang mengintegrasikan nilai moral, spiritual, dan sosial dalam praktik komunikasi kepemimpinan.[41] Fokus ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah yang signifikan dalam pengembangan teori komunikasi Islam yang tidak hanya menekankan efektivitas pesan, tetapi juga keabsahan moral dan kesalehan sosial di dalamnya. Dengan pendekatan tafsir tematik (*tafsir maudhū'ī*), penelitian ini berupaya menggali relevansi nilai-nilai Qur'ani terhadap fenomena komunikasi kontemporer antara pemimpin dan rakyat, serta merumuskan model komunikasi Qur'ani yang bersifat partisipatif, transendental, dan berkeadilan. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa komunikasi kepemimpinan yang ideal dalam perspektif Islam bukan hanya persoalan teknis atau retoris, melainkan manifestasi tanggung jawab

---

[39] Dewi Suriyani Djamdjuri dan Fadia Holisah, "The Importance of Ethics in Communication toward Children: An Islamic Overview," *Al-Aulad: Journal of Islamic Primary Education*, 2021, hal. 41.

[40] Khairuddin, "The Principles of Internalization of Qawlan Ma'rufa Perspective of the Quran and Its Relevance to Ethics Contemporary Communication," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 2023, hal. 148.

[41] Sundus Rana, dkk., "Quranic Principles of Effective Communication: A Timeless Framework for Digital and Interpersonal Ethics," *International Journal of Social Science & Entrepreneurship*, 2025, hal. 86.

moral dan spiritual untuk mewujudkan masyarakat yang berakhlak, adil, dan berperadaban sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-Qur'an.

Penelitian tentang komunikasi kepemimpinan telah banyak dilakukan dalam kajian komunikasi politik maupun kepemimpinan transformasional. Namun sebagian besar penelitian tersebut berangkat dari paradigma komunikasi modern yang menempatkan komunikasi sebagai instrumen persuasi dan manajemen citra politik. Sementara itu, kajian tafsir Al-Qur'an yang membahas komunikasi sosial lebih banyak menyoroti etika komunikasi antar individu secara umum dan belum secara khusus mengkaji relasi komunikasi antara pemimpin dan rakyat secara tematik. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya merumuskan model komunikasi kepemimpinan dalam perspektif Al-Qur'an melalui pendekatan tafsir tematik terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan relasi sosial dan komunikasi.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada upaya merumuskan model komunikasi kepemimpinan Qur'ani yang dibangun melalui analisis tematik terhadap konsep-konsep komunikasi dalam Al-Qur'an. Berbeda dengan kajian komunikasi kepemimpinan modern yang lebih menekankan aspek strategis dan instrumental, penelitian ini menempatkan komunikasi sebagai amanah moral yang berfungsi membangun relasi sosial yang adil antara pemimpin dan rakyat.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, dapat dipahami bahwa persoalan komunikasi antara pemimpin dan rakyat dalam perspektif Al-Qur'an tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis dan kontekstual dalam kehidupan sosial, politik, serta keagamaan masyarakat modern. Kompleksitas hubungan antara kekuasaan, moralitas, dan komunikasi menuntut adanya kajian yang lebih mendalam untuk menemukan model komunikasi kepemimpinan yang sesuai dengan nilai-nilai Qur'ani. Oleh karena itu, penelitian ini mengidentifikasi beberapa permasalahan pokok yang memerlukan penjelasan dan penyelesaian secara ilmiah dan normatif, antara lain sebagai berikut:

1. Terjadinya krisis kepercayaan antara pemimpin dan rakyat akibat lemahnya etika komunikasi dan absennya nilai kejujuran, keterbukaan, serta tanggung jawab moral dalam penyampaian pesan-pesan kepemimpinan.
2. Adanya dominasi komunikasi vertikal yang bersifat satu arah, di mana aspirasi rakyat sering kali tidak terakomodasi secara adil dan dialogis dalam proses pengambilan keputusan publik.
3. Terjadinya penyimpangan dalam praktik komunikasi politik dan sosial yang mengabaikan prinsip-prinsip etika Qur'ani seperti *qaulan sadīdan, qaulan karīman, qaulan layyinan, qaulan ma'rūfan, dan qaulan balīghan*

4. Lemahnya internalisasi nilai-nilai spiritual dan moral dalam teori-teori komunikasi modern yang menyebabkan hilangnya dimensi transendental dalam relasi antara pemimpin dan rakyat.
5. Minimnya model konseptual komunikasi kepemimpinan yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai Qur'ani dengan teori komunikasi kontemporer secara komprehensif dan aplikatif.
6. Ketiadaan pedoman praktis bagi para pemimpin dalam mengimplementasikan prinsip komunikasi Qur'ani dalam konteks pemerintahan dan kehidupan sosial-politik modern.
7. Belum adanya penelitian yang menyajikan sintesis antara tafsir tematik Al-Qur'an dan teori komunikasi modern dalam membentuk model komunikasi pemimpin berbasis nilai-nilai wahyu.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini membatasi ruang lingkup kajian agar analisis lebih terarah dan mendalam terhadap problematika komunikasi antara pemimpin dan rakyat dalam perspektif Al-Qur'an. Pembatasan ini dilakukan dengan menitikberatkan pada dimensi krisis komunikasi pemimpin serta upaya perumusan model komunikasi berdasarkan nilai-nilai Qur'ani. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Penelitian ini dibatasi pada kajian mengenai krisis komunikasi antara pemimpin dan rakyat dalam kehidupan sosial kontemporer, yang ditandai oleh dominasi komunikasi kekuasaan, manipulasi wacana publik, serta melemahnya partisipasi rakyat dalam dialog sosial. Kajian ini kemudian dianalisis melalui perspektif Al-Qur'an dengan pendekatan tafsir tematik (*tafsir maudhū'ī*) untuk mengidentifikasi bagaimana Al-Qur'an memotret problematika relasi komunikasi sosial dalam kepemimpinan.
2. Penelitian ini difokuskan pada analisis konsep *qaulan* dalam Al-Qur'an sebagai dasar etika komunikasi kepemimpinan, meliputi *qaulan sadīdan, qaulan karīman, qaulan layyinan, qaulan ma'rūfan, qaulan balīghan* dan *qaulan maisuran*. Konsep-konsep tersebut dikaji untuk menemukan prinsip-prinsip komunikasi Qur'ani yang dapat menjadi solusi normatif terhadap krisis etika komunikasi antara pemimpin dan rakyat dalam konteks sosial dan politik.
3. Penelitian ini diarahkan untuk merumuskan model komunikasi pemimpin Qur'ani sebagai alternatif solusi terhadap krisis komunikasi kepemimpinan modern, dengan menekankan nilai-nilai etika Qur'ani.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah tersebut di atas, maka untuk memperoleh arah penelitian yang lebih sistematis dan fokus terhadap inti persoalan yang dikaji, diperlukan perumusan masalah yang menggambarkan hubungan antara konsep komunikasi, nilai-nilai Qur'ani, dan praktik kepemimpinan dalam konteks sosial. Rumusan masalah ini disusun agar penelitian dapat menjawab secara ilmiah bagaimana prinsip etika komunikasi Islam dapat diintegrasikan dalam pola komunikasi antara pemimpin dan rakyat? Oleh karena itu, dengan memperhatikan tujuan dan ruang lingkup kajian, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Al-Qur'an menjelaskan prinsip-prinsip etika komunikasi antara pemimpin dan rakyat dalam konteks sosial dan moral pemimpin Qur'ani?
2. Bagaimana Problematika komunikasi antara pemimpin dan rakyat dalam konteks sosial Qur'ani?
3. Bagaimana isyarat Qur'ani tentang komunikasi antara pemimpin dan rakyat dalam konteks etika sosial?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan utama penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis prinsip-prinsip etika komunikasi pemimpin dan rakyat berdasarkan penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an melalui pendekatan tafsir tematik dalam perspektif sosial dan moral pemimpin Qur'ani.
2. Mengidentifikasi konsep komunikasi Qur'ani, khususnya prinsip *qaulan sadīdan, qaulan ma'rūfan, qaulan kariiman, qaulan layyinan, qaulan balīghan* dan *qaulan maisuran* sebagai *basic* komunikasi pemimpin dalam perspektif Al-Qur'an.
3. Menganalisis isyarat Al-Qur'an terkait model komunikasi pemimpin Qur'ani untuk memperkuat relasi etis antara pemimpin dan rakyat dalam konteks sosial kontemporer.
4. Menemukan prinsip etika komunikasi Islam yang diintegrasikan dengan relasi sosial dalam pola komnikasi pemimpin dan rakyat.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
   a. Memberikan kontribusi terhadap pengayaan wawasan keilmuan dalam bidang komunikasi Islam dengan menghadirkan teori baru yang bersumber dari prinsip etika komunikasi Al-Qur'an.
   b. Mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya dalam ranah integrasi antara kajian tafsir tematik dan teori komunikasi modern, guna membangun paradigma komunikasi yang etis, spiritual, dan kontekstual.
   c. Menjadi referensi akademik bagi peneliti, dosen, dan mahasiswa yang tertarik untuk mengembangkan studi interdisipliner antara ilmu komunikasi, etika sosial, dan studi keislaman.
2. Manfaat Praktis
   a. Dapat menjadi panduan akademik bagi mahasiswa dalam menyusun penelitian atau karya ilmiah yang berkaitan dengan komunikasi kepemimpinan, etika sosial, dan nilai-nilai Qur'ani.
   b. Memberikan informasi ilmiah yang bermanfaat bagi dosen dan peneliti dalam mengembangkan kurikulum atau riset lanjutan tentang etika komunikasi Islam dan kepemimpinan moral.
   c. Dapat dijadikan sebagai acuan konseptual bagi lembaga pendidikan, lembaga pemerintahan, maupun organisasi sosial dalam membangun pola komunikasi yang adil, transparan, dan berorientasi pada nilai spiritual.
   d. Menjadi landasan praktis bagi para pemimpin dalam menerapkan prinsip komunikasi Qur'ani untuk memperkuat legitimasi moral dan kepercayaan publik dalam kehidupan sosial dan politik.

G. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan kerangka teoretis yang memadukan beberapa teori seperti teori komunikasi Harold D. Lasswell[42], Shannon dan

[42] Harold Dwight Lasswell (1902–1978) adalah ilmuwan politik dan komunikasi asal Amerika Serikat, dikenal sebagai pelopor studi komunikasi massa dan perumus model komunikasi "Who says what in which channel to whom with what effect". Lebih lanjut lihat https://www.britannica.com/biography/Harold-D-Lasswell

Weaver[43], Wilbur Schramm[44], teori etika komunikasi sosial seperti Jürgen Habermas[45], teori kepemimpinan seperti James MacGregor Burns[46], dan Bernard Bass[47].

1. Teori Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu elemen fundamental dalam kehidupan manusia yang memungkinkan terjadinya interaksi sosial, pertukaran informasi, serta pembentukan hubungan antara individu maupun kelompok dalam masyarakat. Melalui komunikasi, manusia dapat menyampaikan gagasan, nilai, dan pengalaman yang kemudian membentuk kesepahaman dalam kehidupan bersama. Oleh karena itu, komunikasi tidak hanya dipahami sebagai proses penyampaian pesan, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang berperan dalam membangun struktur relasi sosial dan dinamika kehidupan masyarakat.[48]

Dalam kajian komunikasi klasik, Harold D. Lasswell merumuskan komunikasi melalui model yang terkenal dengan formula: *Who says what in which channel to whom with what effect*. Model ini menjelaskan bahwa komunikasi melibatkan lima unsur utama, yaitu komunikator, pesan, saluran komunikasi, penerima pesan, serta efek yang dihasilkan dari proses komunikasi tersebut.[49]

---

[43] Claude Elwood Shannon (1916–2001) adalah matematikawan dan insinyur listrik asal Amerika Serikat, pelopor teori informasi modern yang merumuskan model komunikasi matematis bersama Warren Weaver. lebih lanjut lihat https://www.britannica.com/biography/Claude-Shannon

[44] Wilbur Lang Schramm (1907–1987) adalah pakar komunikasi asal Amerika Serikat, pelopor studi komunikasi modern dan pendiri lembaga penelitian komunikasi di beberapa universitas. Ia mengembangkan model komunikasi interaktif yang menekankan proses umpan balik dan pengalaman bersama.

[45] Jürgen Habermas (1929–) adalah filsuf dan sosiolog Jerman dari mazhab Frankfurt yang dikenal melalui teori *discourse ethics* dan *communicative action*, menekankan rasionalitas dialogis, kesetaraan partisipasi, serta komunikasi bebas dominasi dalam ruang publik demokratis.

[46] James MacGregor Burns (1918–2014) adalah sejarawan dan ilmuwan politik asal Amerika Serikat yang mengembangkan teori transformational leadership, menekankan kepemimpinan berbasis nilai moral yang mampu meningkatkan kesadaran etis dan perubahan sosial pengikut.

[47] Bernard Morris Bass (1925–2007) adalah psikolog organisasi asal Amerika Serikat yang mengembangkan teori transformational leadership lanjutan dari James MacGregor Burns, dengan menekankan pengaruh karisma, motivasi inspiratif, stimulasi intelektual, dan perhatian individual dalam membangun kepemimpinan efektif.

[48] Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek,* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007, hal. 9.

[49] Harold D. Lasswell, "The Structure and Function of Communication in Society," dalam Wilbur Schramm (ed.), *Mass Communications*, Urbana: University of Illinois Press, 1948, hal. 37.

Selain model Lasswell, Shannon dan Weaver mengembangkan model komunikasi yang menekankan proses transmisi pesan melalui sistem komunikasi tertentu. Menurut mereka, komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari sumber kepada penerima melalui suatu saluran yang dapat dipengaruhi oleh gangguan (*noise*). Konsep *noise* ini menjelaskan bahwa dalam setiap proses komunikasi terdapat kemungkinan terjadinya distorsi pesan yang dapat mempengaruhi pemahaman penerima terhadap informasi yang disampaikan.[50]

Perkembangan kajian komunikasi selanjutnya tidak hanya menekankan aspek teknis penyampaian pesan, tetapi juga memperhatikan proses pembentukan makna dalam interaksi sosial. Wilbur Schramm menyatakan bahwa komunikasi merupakan proses berbagi pengalaman (*sharing of experience*) antara komunikator dan komunikan. Keberhasilan komunikasi sangat dipengaruhi oleh kesamaan latar belakang pengalaman, budaya, serta sistem nilai yang dimiliki oleh pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi tersebut.[51]

Dalam perspektif sosiologis, komunikasi memiliki fungsi penting dalam membangun integrasi sosial dalam masyarakat. Komunikasi berperan sebagai sarana penyebaran informasi, pembentukan opini publik, serta mekanisme koordinasi dalam kehidupan sosial. Melalui komunikasi, masyarakat dapat membangun kesepahaman terhadap norma dan nilai yang menjadi dasar kehidupan bersama sehingga tercipta stabilitas sosial dalam suatu komunitas.[52]

Dalam konteks kepemimpinan, komunikasi memiliki posisi yang sangat strategis karena menjadi instrumen utama bagi pemimpin dalam menyampaikan visi, kebijakan, dan arah pembangunan kepada masyarakat. Seorang pemimpin tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga berperan sebagai komunikator yang mampu menjelaskan tujuan kepemimpinan serta membangun partisipasi masyarakat dalam mencapai tujuan bersama. Tanpa komunikasi yang efektif, kepemimpinan akan kehilangan legitimasi sosial di mata masyarakat.[53]

Komunikasi kepemimpinan memiliki karakteristik yang berbeda dengan komunikasi interpersonal biasa karena komunikasi yang dilakukan oleh pemimpin biasanya bersifat publik dan memiliki dampak yang luas terhadap masyarakat. Setiap pernyataan yang disampaikan oleh pemimpin dapat

---

[50] Claude E. Shannon dan Warren Weaver, *The Mathematical Theory of Communication* Urbana: University of Illinois Press, 1949, hal. 5.

[51] Wilbur Schramm, *The Process and Effects of Mass Communication*, Urbana: University of Illinois Press, 1954, hal. 3.

[52] Denis McQuail, *Mass Communication Theory*, London: Sage Publications, 2010, hal. 52.

[53] Joseph S. Nye, *The Powers to Lead*, New York: Oxford University Press, 2008, hal. 35.

mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap legitimasi kepemimpinan serta menentukan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah atau otoritas yang memimpin mereka.[54] Oleh karena itu, komunikasi pemimpin harus dilakukan secara hati-hati dan berlandaskan pada prinsip tanggung jawab moral.

Dalam perkembangan teori komunikasi modern, para ahli mulai menekankan pentingnya dimensi etika dalam komunikasi publik. Komunikasi yang dilakukan oleh pemimpin tidak hanya dituntut untuk efektif dalam menyampaikan pesan, tetapi juga harus berlandaskan pada nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, serta penghormatan terhadap martabat manusia. Komunikasi yang tidak berlandaskan etika berpotensi menimbulkan manipulasi informasi, penyalahgunaan kekuasaan, serta konflik sosial dalam masyarakat.[55]

2. Teori Etika Sosial

Etika komunikasi merupakan cabang kajian dalam ilmu komunikasi yang menekankan dimensi moral dalam proses penyampaian pesan antara individu maupun kelompok dalam masyarakat. Etika komunikasi tidak hanya berkaitan dengan efektivitas penyampaian informasi, tetapi juga dengan nilai-nilai moral yang mengatur bagaimana komunikasi seharusnya dilakukan secara benar, jujur, dan bertanggung jawab.[56] Dalam konteks ini, komunikasi dipandang sebagai aktivitas sosial yang tidak dapat dipisahkan dari norma etika karena setiap pesan yang disampaikan memiliki implikasi terhadap hubungan antar individu dan stabilitas kehidupan masyarakat.

Dalam perspektif filsafat moral, etika komunikasi berkaitan dengan prinsip-prinsip normatif yang menjadi dasar tindakan komunikasi manusia. Clifford G. Christians menjelaskan bahwa komunikasi yang etis harus berlandaskan pada penghormatan terhadap martabat manusia serta tanggung jawab moral dalam penggunaan bahasa dan informasi. Komunikasi yang tidak didasarkan pada prinsip etika berpotensi menjadi alat manipulasi dan dominasi yang dapat merusak hubungan sosial dalam masyarakat.[57] Oleh karena itu, etika komunikasi menuntut adanya komitmen terhadap nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dalam proses penyampaian pesan.

Salah satu teori penting dalam kajian etika komunikasi adalah teori tindakan komunikatif (*Theory of Communicative Action*) yang dikembangkan

---

[54] James M. Burns, *Leadership*, New York: Harper & Row, 1978, hal. 19.

[55] Clifford G. Christians, *Communication Ethics and Universal Values*, London: Sage Publications, 1997, hal. 17.

[56] Stephen W. Littlejohn dan Karen A. Foss, *Theories of Human Communication*, Belmont: Wadsworth Publishing, 2009, hal. 35.

[57] Clifford G. Christians, *Communication Ethics and Universal Values*, London: Sage Publications, 1997, hal. 15.

oleh Jürgen Habermas. Menurut Habermas, komunikasi yang ideal harus memenuhi empat klaim validitas, yaitu kebenaran (*truth*), ketepatan norma (*rightness*), kejujuran (*sincerity*), dan kejelasan (*comprehensibility*).[58] Keempat unsur tersebut menjadi syarat agar komunikasi dapat berlangsung secara rasional dan menghasilkan kesepahaman yang bebas dari manipulasi maupun dominasi kekuasaan.

Habermas juga menegaskan bahwa tujuan utama komunikasi adalah tercapainya kesepahaman bersama (*mutual understanding*) antara para pelaku komunikasi. Dalam situasi komunikasi yang ideal, setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat tanpa adanya tekanan dari kekuasaan atau kepentingan tertentu.[59] Dengan demikian, komunikasi tidak digunakan sebagai alat untuk mengendalikan atau memanipulasi orang lain, melainkan sebagai sarana dialog yang memungkinkan terciptanya konsensus sosial yang rasional.

Dalam konteks kehidupan sosial dan politik, etika komunikasi memiliki peran penting dalam menjaga kualitas hubungan antara pemimpin dan masyarakat. Komunikasi yang dilakukan oleh pemimpin harus berlandaskan pada prinsip kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab terhadap kepentingan publik. Komunikasi yang tidak etis dapat menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan serta memicu konflik sosial yang merusak stabilitas masyarakat.[60]

Etika komunikasi juga berkaitan erat dengan penggunaan bahasa dalam ruang publik. Bahasa yang digunakan dalam komunikasi publik tidak hanya berfungsi sebagai alat penyampaian pesan, tetapi juga sebagai sarana yang membentuk persepsi dan sikap masyarakat terhadap suatu isu.[61] Oleh karena itu, penggunaan bahasa yang provokatif, manipulatif, atau menyesatkan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan sosial masyarakat dan berpotensi menimbulkan konflik.

Dalam kajian kepemimpinan, etika komunikasi merupakan salah satu indikator penting yang menentukan kualitas kepemimpinan seseorang. Pemimpin yang memiliki integritas komunikasi cenderung memperoleh kepercayaan masyarakat karena komunikasi yang disampaikan mencerminkan konsistensi antara ucapan dan tindakan. Sebaliknya, pemimpin yang

---

[58] Jürgen Habermas, *The Theory of Communicative Action*, Vol. 1, Boston: Beacon Press, 1984, hal. 8.

[59] Jürgen Habermas, *The Theory of Communicative Action*, hal. 99.

[60] Denis McQuail, *Mass Communication Theory*, London: Sage Publications, 2010, hal. 145.

[61] Clifford G. Christians, *Communication Ethics and Universal Values*, hal. 32.

menggunakan komunikasi sebagai alat manipulasi politik akan kehilangan legitimasi moral di mata masyarakat.[62]

Selain itu, etika komunikasi juga berkaitan dengan konsep tanggung jawab sosial dalam komunikasi. Teori tanggung jawab sosial menekankan bahwa komunikasi publik harus digunakan untuk kepentingan masyarakat luas dan tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan kelompok tertentu. Dalam konteks kepemimpinan, prinsip ini menegaskan bahwa komunikasi pemimpin harus diarahkan untuk membangun kesejahteraan masyarakat serta menjaga harmoni sosial dalam kehidupan bersama.[63]

Dalam perspektif Islam, etika komunikasi memiliki kedudukan yang sangat penting karena komunikasi dipandang sebagai bagian dari akhlak manusia dalam kehidupan sosial. Islam menekankan bahwa setiap perkataan yang diucapkan oleh manusia memiliki konsekuensi moral di hadapan Allah SWT. Oleh karena itu, manusia diperintahkan untuk menjaga lisannya dan menggunakan bahasa yang baik dalam berinteraksi dengan sesama manusia.[64]

Al-Qur'an memberikan berbagai pedoman tentang bagaimana manusia harus berkomunikasi secara etis dalam kehidupan sosial.[65] Prinsip-prinsip komunikasi Qur'ani tidak hanya menekankan efektivitas penyampaian pesan, tetapi juga menekankan dimensi moral seperti kejujuran, kelembutan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Nilai-nilai tersebut tercermin dalam berbagai konsep komunikasi Qur'ani seperti *qaulan sadīdan*, *qaulan ma'rūfan*, *qaulan layyinan*, *qaulan karīman*, dan *qaulan balīghan* yang menjadi pedoman etika komunikasi dalam Islam.

3. Teori Kepemimpinan

Kepemimpinan merupakan salah satu konsep penting dalam ilmu sosial yang berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan menggerakkan individu maupun kelompok dalam mencapai tujuan bersama. Dalam kajian organisasi dan ilmu sosial, kepemimpinan tidak hanya dipahami sebagai posisi formal dalam struktur kekuasaan, tetapi juga sebagai proses sosial yang melibatkan interaksi antara pemimpin dan pengikutnya. Melalui proses tersebut, pemimpin memainkan peran penting dalam membentuk arah kebijakan, mengelola hubungan sosial, serta membangun legitimasi dalam kehidupan masyarakat.[66]

---

[62] Joseph S. Nye, *The Powers to Lead*, New York: Oxford University Press, 2008, hal. 45.

[63] Werner J. Severin dan James W. Tankard, *Communication Theories: Origins, Methods, and Uses in the Mass Media*, New York: Longman, 2010, hal. 425.

[64] M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Jakarta: Lentera Hati, 2007, hal. 297.

[65] M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, hal. 301.

[66] Gary Yukl, *Leadership in Organizations*, New York: Pearson Education, 2013, hal. 3.

Secara konseptual, kepemimpinan sering didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi perilaku orang lain agar bersedia bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Yukl menjelaskan bahwa kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi orang lain untuk memahami dan menyepakati apa yang perlu dilakukan serta bagaimana melakukannya secara efektif.[67] Kepemimpinan tidak hanya berkaitan dengan kekuasaan formal, tetapi juga dengan kemampuan komunikasi dan interaksi sosial yang dimiliki oleh seorang pemimpin.

Dalam perspektif teori kepemimpinan modern, komunikasi memiliki posisi yang sangat penting karena menjadi sarana utama bagi pemimpin dalam menyampaikan visi, membangun kepercayaan, serta menggerakkan partisipasi masyarakat. Tanpa komunikasi yang efektif, kepemimpinan tidak dapat berjalan secara optimal karena masyarakat tidak akan memahami arah dan tujuan dari kepemimpinan yang dijalankan.[68] Oleh karena itu, kemampuan komunikasi merupakan salah satu kompetensi utama yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin.

James MacGregor Burns menjelaskan bahwa kepemimpinan merupakan proses hubungan timbal balik antara pemimpin dan pengikut dalam mencapai tujuan bersama. Dalam proses tersebut, komunikasi menjadi mekanisme utama yang memungkinkan terjadinya interaksi antara pemimpin dan masyarakat. Melalui komunikasi, pemimpin dapat menyampaikan nilai, gagasan, serta visi yang menjadi dasar dalam membangun perubahan sosial dalam masyarakat.[69]

Selain itu, Bernard Bass mengembangkan konsep kepemimpinan transformasional yang menekankan bahwa pemimpin harus mampu menginspirasi dan memotivasi pengikutnya melalui komunikasi yang efektif. Pemimpin transformasional tidak hanya memberikan instruksi kepada masyarakat, tetapi juga membangun kesadaran kolektif yang mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mencapai tujuan bersama. Komunikasi dalam kepemimpinan transformasional berfungsi sebagai sarana membangun komitmen moral serta memperkuat hubungan antara pemimpin dan masyarakat.[70]

Dalam konteks kehidupan sosial dan politik, komunikasi kepemimpinan juga memiliki peran penting dalam membangun legitimasi kekuasaan. Legitimasi kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh aspek formal seperti jabatan atau kekuasaan politik, tetapi juga oleh kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan kredibilitas pemimpin. Komunikasi yang transparan

---

[67] Gary Yukl, *Leadership in Organizations*, hal. 6.

[68] Joseph S. Nye, *The Powers to Lead*, New York: Oxford University Press, 2008, hal. 45.

[69] James MacGregor Burns, *Leadership*, New York: Harper & Row, 1978, hal. 18.

[70] Bernard M. Bass dan Ronald E. Riggio, *Transformational Leadership*, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 2006, hal. 4.

dan jujur akan memperkuat kepercayaan masyarakat, sedangkan komunikasi yang manipulatif dapat merusak legitimasi kepemimpinan di mata publik.[71]

Komunikasi kepemimpinan juga memiliki fungsi penting dalam menjaga stabilitas sosial dalam masyarakat. Pemimpin yang mampu berkomunikasi secara efektif dapat meredakan konflik sosial, membangun dialog antara berbagai kelompok masyarakat, serta menciptakan suasana sosial yang kondusif. Sebaliknya, komunikasi yang tidak bijaksana dapat memperburuk konflik dan memperdalam polarisasi sosial dalam masyarakat.[72]

Dalam perspektif Islam, kepemimpinan memiliki dimensi moral dan spiritual yang sangat kuat karena dipandang sebagai amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Seorang pemimpin tidak hanya bertanggung jawab kepada masyarakat, tetapi juga kepada Allah Swt. atas amanah kepemimpinan yang diembannya.[73] Oleh karena itu, komunikasi yang dilakukan oleh pemimpin harus mencerminkan nilai-nilai kejujuran, keadilan, serta tanggung jawab moral dalam kehidupan sosial.

Al-Qur'an memberikan berbagai pedoman tentang bagaimana seorang pemimpin seharusnya berinteraksi dengan masyarakat melalui komunikasi yang baik. Dalam beberapa ayat, Al-Qur'an menekankan pentingnya komunikasi yang lembut, jujur, serta menghormati martabat manusia. [74] Prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa komunikasi dalam kepemimpinan tidak hanya bertujuan untuk menyampaikan kebijakan, tetapi juga untuk membangun hubungan sosial yang harmonis antara pemimpin dan masyarakat.

H. Tinjauan Pustaka dan Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berikut ini adalah beberapa tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu yang relevan baik dari buku, disertasi, dan jurnal :

1. Buku

Pertama, buku yang ditulis oleh HR Dhona dengan judul "Islam dalam Studi Komunikasi"[75] yang diterbitkan oleh Universitas Islam Indonesia (UII Press) merupakan kajian komprehensif tentang hubungan antara ajaran Islam dan ilmu komunikasi modern. Penelitian ini berfokus pada upaya mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan teori komunikasi Barat, terutama dalam konteks pembentukan etika komunikasi Islami di era modern. HR Dhona menekankan pentingnya spiritualitas, akhlak, dan kesadaran moral

---

[71] Denis McQuail, *Mass Communication Theory*, London: Sage Publications, 2010, hal. 94.

[72] Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015, hal. 92.

[73] M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2007, hal. 376.

[74] M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, hal. 381.

[75] Holy Rafika Dhona Et Al., *"Islam Dalam Studi Komunikasi*", Uii Press, 2022.

dalam praktik komunikasi agar dapat menghadirkan komunikasi yang tidak hanya efektif secara teknis tetapi juga bernilai secara moral dan sosial. Penelitian ini memberikan dasar epistemologis bahwa komunikasi dalam Islam bersumber pada prinsip keesaan (tauhid), yang menuntun perilaku komunikasi manusia agar tetap sejalan dengan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus kajiannya, di mana penelitian HR Dhona lebih menyoroti aspek konseptual integrasi Islam dan ilmu komunikasi secara umum, sedangkan penelitian ini akan menelaah problematika komunikasi antara pemimpin dan rakyat secara spesifik melalui perspektif tafsir tematik Al-Qur'an, dengan penekanan pada etika dan relasi sosial. HR Dhona dalam penelitiannya menggunakan pendekatan filosofis dan teoritis untuk meninjau landasan ontologis komunikasi Islam, sementara penelitian yang akan dilakukan bersifat tekstual-interpretatif dengan analisis terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan etika komunikasi kepemimpinan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menelusuri nilai komunikasi dalam Islam secara umum, tetapi juga menyoroti aspek praksis dari komunikasi antara pemimpin dan rakyat dalam kerangka etika Qur'ani. Perbedaan metodologis ini menjadi titik pembeda penting, karena penelitian ini berupaya menyusun pemahaman yang lebih aplikatif melalui analisis tafsir tematik, bukan sekadar teoretisasi konseptual.

Selain perbedaan ruang lingkup, penelitian ini juga memiliki orientasi hasil yang berbeda. HR Dhona menitikberatkan penelitiannya pada pembentukan paradigma komunikasi Islami yang integratif antara teori modern dan ajaran Islam, sedangkan penelitian ini diarahkan untuk menemukan model komunikasi kepemimpinan Qur'ani yang etis, dialogis, dan transendental. Fokus pada relasi sosial pemimpin-rakyat menjadikan penelitian ini lebih konkret dalam konteks penerapan nilai-nilai Qur'ani terhadap dinamika sosial-politik umat Islam. Dengan demikian, penelitian yang akan dilakukan berupaya melengkapi kekosongan studi yang belum banyak mengulas hubungan komunikasi kepemimpinan berdasarkan nilai-nilai wahyu secara sistematis dan tematik.

Kedua, buku karya N. Saniah dengan judul "Ilmu Komunikasi Islam"[76] yang diterbitkan oleh Borneo Novelty Publisher merupakan sebuah kajian komprehensif yang berupaya memetakan dasar-dasar konseptual komunikasi dalam perspektif Islam. Penelitian ini menyoroti pentingnya membangun sistem komunikasi yang tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga transformasional dan spiritual sesuai dengan nilai-nilai Al-Qur'an. N. Saniah menjelaskan bahwa komunikasi Islam sejatinya berakar pada prinsip tauhid, di mana setiap bentuk komunikasi harus mencerminkan hubungan harmonis antara manusia dengan Allah, serta antara sesama manusia. Buku ini juga

[76] Nurul Saniah, *Ilmu Komunikasi Islam*, Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2024.

menegaskan bahwa komunikasi dalam Islam bukan sekadar pertukaran pesan, melainkan sarana dakwah, pembentukan karakter, dan penegakan nilai moral dalam kehidupan sosial.

Perbedaan mendasar antara penelitian N. Saniah dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus dan orientasi analisisnya. Penelitian "Ilmu Komunikasi Islam" lebih menekankan pada aspek teoretis dan konseptual mengenai prinsip dasar komunikasi dalam Islam secara umum, sedangkan penelitian yang akan dilakukan memiliki fokus yang lebih spesifik, yakni pada problematika komunikasi antara pemimpin dan rakyat yang ditinjau melalui perspektif tafsir tematik Al-Qur'an. Penelitian ini akan menggali ayat-ayat Al-Qur'an yang secara eksplisit maupun implisit membahas etika dan relasi sosial dalam konteks kepemimpinan, untuk menemukan pedoman normatif yang dapat menjadi dasar komunikasi etis antara pemimpin dan rakyat. Dengan demikian, penelitian yang akan dilakukan tidak hanya menguraikan teori komunikasi Islam, tetapi juga berupaya menerapkannya dalam konteks sosial-politik kepemimpinan kontemporer.

Selain itu, penelitian "Ilmu Komunikasi Islam" disusun dengan pendekatan deskriptif-literatur yang bertujuan memperkenalkan kerangka dasar keilmuan komunikasi dalam Islam, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan pendekatan tafsir *maudhū'ī* yang berorientasi pada eksplorasi makna ayat-ayat Qur'ani secara lebih mendalam dan kontekstual. Penelitian ini juga berupaya menjawab persoalan empiris mengenai krisis komunikasi antara pemimpin dan rakyat di era modern dengan merujuk pada nilai-nilai etika Qur'ani. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu mengisi celah yang belum banyak dikaji, yaitu bagaimana prinsip komunikasi Islam dapat diterapkan secara praktis dalam membangun kepemimpinan yang amanah, adil, dan berkeadaban berdasarkan tuntunan Al-Qur'an.

Ketiga, buku yang berjudul "Etika Komunikasi: Sebuah Paradigma Integratif" karya R Ghulam Dzaljad[77] merupakan karya akademik yang membahas secara mendalam mengenai konsep etika dalam komunikasi lintas disiplin ilmu, baik dari perspektif filsafat, sosial, maupun agama. Penelitian ini menjelaskan bahwa etika komunikasi tidak hanya berkaitan dengan tata cara berbicara atau menyampaikan pesan, tetapi juga mencakup tanggung jawab moral komunikator terhadap kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan. Dalam kajiannya, penulis menyoroti bagaimana komunikasi yang tidak beretika dapat menyebabkan disinformasi, ketidakpercayaan publik, dan degradasi nilai-nilai sosial. Melalui pendekatan integratif, buku ini berusaha memadukan berbagai perspektif etika dalam membangun paradigma komunikasi yang lebih bermoral dan beradab.

---

[77] Ghulam Dzaljad., "*Etika Komunikasi: Sebuah Paradigma Integratif*" Penerbit Tidak Dicantumkan, 2022.

Perbedaan pokok antara penelitian "Etika Komunikasi: Sebuah Paradigma Integratif" dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada titik fokus dan sumber nilai yang digunakan. Penelitian tersebut berorientasi pada penggabungan berbagai pendekatan etika komunikasi dari beragam sistem filsafat dan teori sosial modern, sementara penelitian yang akan dilakukan berfokus secara eksklusif pada nilai-nilai etika komunikasi dalam perspektif Al-Qur'an. Dengan menggunakan metode tafsir tematik (*maudhū'ī*), penelitian ini akan menggali langsung prinsip-prinsip komunikasi Qur'ani yang mengatur hubungan antara pemimpin dan rakyat, seperti nilai amanah, keadilan, kejujuran, serta prinsip *qaulan sadīdan* dan *qaulan ma'rūfa*. Oleh karena itu, penelitian yang akan dilakukan menitikberatkan pada sumber wahyu sebagai fondasi moral dan etika, bukan pada sintesis antar aliran pemikiran modern sebagaimana dalam paradigma integratif.

Selain itu, penelitian "Etika Komunikasi: Sebuah Paradigma Integratif" memiliki orientasi konseptual yang bersifat universal dan teoritis, tanpa menempatkan konteks sosial-politik tertentu sebagai objek kajian utama. Sebaliknya, penelitian yang akan dilakukan berorientasi pada konteks praktis dan kontekstual, yakni relasi komunikasi antara pemimpin dan rakyat dalam masyarakat modern. Penelitian ini bertujuan untuk menafsirkan ulang nilai-nilai komunikasi Qur'ani agar dapat diterapkan dalam pola kepemimpinan yang adil, terbuka, dan berkeadaban. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan kontribusi baru dalam bentuk model komunikasi kepemimpinan Qur'ani yang bersifat normatif sekaligus aplikatif, melengkapi studi etika komunikasi yang selama ini lebih banyak berangkat dari paradigma rasional dan filsafat Barat.

Keempat, Karya klasik yang berjudul "Al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Walayah al-Diniyyah" yang ditulis oleh al-Mawardi dan diterbitkan oleh Dar al-Fikr (Beirut) sekitar tahun 1996 merupakan salah satu referensi utama dalam bidang politik Islam dan kepemimpinan pemerintahan berdasarkan syariat. Dalam karyanya, al-Mawardi menjelaskan secara mendalam mengenai prinsip-prinsip pemerintahan Islam, hak dan kewajiban seorang pemimpin, serta relasi antara penguasa dan rakyat dalam bingkai hukum dan moral Islam. Buku ini membahas bagaimana kekuasaan harus dijalankan dengan amanah, keadilan, dan tanggung jawab sosial, serta menekankan pentingnya komunikasi moral dalam menjaga stabilitas pemerintahan dan keharmonisan masyarakat. Karya ini menjadi rujukan penting dalam memahami struktur otoritas Islam klasik serta nilai-nilai dasar etika dalam kepemimpinan.

Perbedaan yang paling mencolok antara karya al-Mawardi tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada pendekatan dan fokus analisisnya. Karya "*Al-Ahkam al-Sultaniyyah"* lebih menyoroti aspek hukum dan sistem pemerintahan Islam dari sudut pandang fikih *siyasah* (politik Islam), sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada aspek

komunikasi dan etika sosial antara pemimpin dan rakyat berdasarkan nilai-nilai Al-Qur'an. Dengan kata lain, jika al-Mawardi menitikberatkan kajiannya pada struktur kekuasaan dan tanggung jawab pemerintahan, maka penelitian ini menelaah hubungan komunikasi yang menghubungkan kedua pihak tersebut bagaimana prinsip-prinsip Qur'ani dapat membentuk relasi yang harmonis, transparan, dan adil antara pemimpin dan rakyat.

Selain itu, karya al-Mawardi menggunakan pendekatan normatif-hukum klasik yang berorientasi pada tatanan kenegaraan Islam tradisional, sedangkan penelitian ini mengadopsi pendekatan tafsir tematik (*maudhū'ī*) yang berusaha memahami nilai-nilai etika komunikasi pemimpin-rakyat dari ayat-ayat Al-Qur'an dan mengaitkannya dengan konteks sosial modern. Penelitian ini juga menempatkan komunikasi sebagai instrumen moral yang memiliki fungsi strategis dalam membangun kepercayaan publik dan legitimasi kepemimpinan di masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memperluas pemahaman terhadap nilai-nilai kepemimpinan Islam dari sisi komunikasi dan etika sosial, sebagai pelengkap terhadap kerangka konseptual yang telah dirumuskan oleh al-Mawardi dalam konteks hukum dan pemerintahan.

Kelima, buku yang berjudul *"Islamization of Knowledge: General Principles and Work Plan*"[78] yang ditulis oleh Isma'il Raji al-Faruqi dan Abdul Hamid AbuSulayman, diterbitkan oleh *International Institute of Islamic Thought (IIIT)*, Virginia, USA pada tahun 1982, merupakan karya monumental yang menjadi dasar pemikiran bagi gerakan Islamisasi ilmu pengetahuan modern. Dalam karya ini, kedua tokoh tersebut menjelaskan konsep integrasi ilmu pengetahuan modern dengan nilai-nilai Islam, dengan menegaskan bahwa setiap cabang ilmu harus berlandaskan pada pandangan hidup Islam (*Islamic worldview*). Tujuan utama dari gagasan Islamisasi ilmu ini adalah mengembalikan fungsi ilmu pengetahuan agar tidak terlepas dari nilai-nilai tauhid, etika, dan kemaslahatan manusia. Buku ini juga menekankan pentingnya membangun paradigma ilmu yang bersumber pada wahyu, sekaligus mampu menjawab tantangan peradaban modern yang cenderung sekuler dan terpisah dari nilai-nilai spiritual.

Perbedaan utama antara karya "*Islamization of Knowledge*" dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada orientasi dan lingkup pembahasannya. Karya al-Faruqi dan Abu Sulayman menyoroti persoalan epistemologis dan metodologis dalam pengembangan ilmu pengetahuan secara umum, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus secara khusus pada etika komunikasi antara pemimpin dan rakyat dalam perspektif Al-Qur'an. Dengan demikian, penelitian ini bukan membahas Islamisasi ilmu dalam

[78] Isma'il R Al-Faruqi, *Islamization Of Knowledge: General Principles And Work Plan*, International Institute Of Islamic Thought, 1987.

konteks filosofis dan akademik yang luas, melainkan mengaplikasikan prinsip integratif antara nilai-nilai wahyu dan fenomena sosial dalam satu bidang kajian tertentu, yakni komunikasi kepemimpinan. Jika gagasan Islamisasi ilmu bertujuan untuk membangun landasan intelektual Islam dalam seluruh aspek kehidupan ilmiah, maka penelitian ini bertujuan untuk menggali pedoman moral dan etika Qur'ani yang relevan dalam membentuk komunikasi yang adil, terbuka, dan partisipatif antara pemimpin dan rakyat.

Selain itu, karya al-Faruqi dan Abu Sulayman menggunakan pendekatan konseptual-filosofis yang bersifat universal dan makro, sementara penelitian ini menggunakan pendekatan tafsir tematik (*maudhū'ī*) yang bersifat tekstual dan aplikatif. Pendekatan tafsir ini akan menelaah ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan komunikasi, amanah, dan keadilan sosial untuk merumuskan model komunikasi kepemimpinan Qur'ani yang relevan bagi konteks kontemporer. Penelitian ini juga bertujuan untuk menjembatani antara idealitas nilai wahyu dan realitas sosial-politik umat, sesuatu yang belum secara spesifik dibahas dalam karya *Islamization of Knowledge*. Dengan demikian, penelitian ini dapat dianggap sebagai implementasi dari gagasan al-Faruqi dan Abu Sulayman dalam ranah yang lebih sempit dan operasional, yaitu bagaimana prinsip etika Qur'ani dapat diterapkan secara nyata dalam pola komunikasi sosial dan kepemimpinan Islam.

Kelima karya tersebut, Islam dalam Studi Komunikasi karya HR Dhona (2022), Ilmu Komunikasi Islam karya N. Saniah, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Walayah al-Diniyyah* karya al-Mawardi, dan *Islamization of Knowledge* oleh Isma'il al-Faruqi & Abdul Hamid Abu Sulayman, secara kolektif membentuk fondasi teoritis dan filosofis yang kuat mengenai hubungan antara komunikasi, etika, dan nilai-nilai Islam dalam berbagai konteks sosial, budaya, dan politik. Masing-masing karya memiliki keunggulan tersendiri: HR Dhona menonjol dalam mengintegrasikan paradigma Islam dengan teori komunikasi modern; N. Saniah berhasil merumuskan konsep sistematis tentang komunikasi Islam secara ilmiah; al-Mawardi memberikan pijakan normatif klasik tentang moralitas kepemimpinan; sementara al-Faruqi dan Abu Sulayman memperkaya aspek epistemologis dan metodologis Islamisasi ilmu pengetahuan.

Namun, di tengah kekayaan pemikiran tersebut, belum ada satu pun penelitian yang secara spesifik menelaah problematika komunikasi antara pemimpin dan rakyat dalam perspektif Al-Qur'an secara tematik dan kontekstual. Penelitian-penelitian sebelumnya lebih berfokus pada prinsip umum komunikasi Islam, etika komunikasi individual, atau paradigma keilmuan secara luas, bukan pada relasi sosial-politik antara penguasa dan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian berjudul "Problematika Komunikasi antara Pemimpin dan Rakyat dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Tafsir Tematik tentang Etika dan Relasi Sosial)" hadir untuk mengisi kekosongan tersebut.

Penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan menggali langsung nilai-nilai Qur'ani yang mengatur komunikasi sosial antara pemimpin dan rakyat, menafsirkan prinsip etika kepemimpinan dalam konteks kontemporer, serta merumuskan model komunikasi Qur'ani yang bersifat aplikatif dan relevan dengan dinamika masyarakat modern. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melengkapi literatur yang sudah ada, tetapi juga memperluas cakupan keilmuan komunikasi Islam dengan menggabungkan dimensi teologis, moral, dan sosial secara integratif.

2. Disertasi

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Khairul Hakim dengan judul "Analisis Komunikasi Politik Khalifah Ali ibn Abi Thalib"[79] yang diterbitkan oleh UIN Sumatera Utara pada tahun 2020, merupakan kajian mendalam mengenai pola komunikasi politik yang diterapkan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib dalam konteks kepemimpinan Islam. Penelitian ini menguraikan bagaimana prinsip-prinsip moral, keadilan, dan kebijaksanaan dijadikan landasan komunikasi politik oleh Khalifah Ali, baik dalam hubungan dengan rakyat maupun dalam mengelola pemerintahan yang diwarnai oleh konflik sosial dan politik. Dalam analisisnya, peneliti menyoroti gaya komunikasi Ali yang penuh hikmah, tegas namun lembut, serta berorientasi pada penyelesaian konflik melalui dialog dan keadilan. Kajian ini juga menegaskan bahwa komunikasi politik dalam Islam bukan sekadar strategi kekuasaan, tetapi merupakan instrumen dakwah dan pembentukan moral publik.

Perbedaan utama antara penelitian Khairul Hakim dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada cakupan dan pendekatan kajian. Penelitian "Analisis Komunikasi Politik Khalifah Ali ibn Abi Thalib" berfokus pada studi historis terhadap praktik komunikasi politik yang dilakukan oleh tokoh tertentu, yakni Khalifah Ali, dengan mengacu pada sumber sejarah dan narasi kepemimpinan Islam klasik. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan berfokus pada pendekatan tafsir tematik (*maudhū'ī*) terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas prinsip etika komunikasi antara pemimpin dan rakyat secara normatif dan universal. Dengan demikian, penelitian ini tidak berfokus pada tokoh atau periode sejarah tertentu, melainkan pada prinsip dan nilai komunikatif yang bersifat trans historis serta dapat diterapkan pada konteks kepemimpinan masa kini.

Selain itu, penelitian Khairul Hakim lebih menitikberatkan pada dimensi praktik politik dan retorika komunikasi seorang pemimpin dalam konteks sejarah pemerintahan Islam, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menempatkan komunikasi sebagai dimensi moral dan teologis yang berakar langsung pada ajaran wahyu. Penelitian ini bertujuan untuk menggali

---

[79] Khairul Hakim, *"Komunikasi Politik Ali Ibn Abi Thalib Pada Masa Kekhalifahannya (35-40 H/656-661 M)"* Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020.

nilai-nilai Qur'ani yang dapat dijadikan pedoman dalam membangun komunikasi etis, adil, dan berkeadilan sosial antara pemimpin dan rakyat di era modern. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melengkapi studi komunikasi Islam dari sisi historis, tetapi juga memperluasnya ke ranah normatif dan konseptual dengan memberikan kerangka etika Qur'ani yang dapat diaplikasikan dalam berbagai konteks sosial dan pemerintahan.

Kedua, disertasi yang dilakukan oleh Endang Turmudi berjudul "*Struggling for the Umma*: *Changing Leadership Roles of Kiai in Jombang, East Java*"[80] yang diterbitkan oleh Australian National University (ANU) pada tahun 1996, merupakan studi sosiologis yang mendalam mengenai perubahan peran kepemimpinan kiai di Jombang, Jawa Timur, dalam konteks sosial, politik, dan keagamaan masyarakat Indonesia. Penelitian ini menyoroti dinamika kepemimpinan tradisional pesantren yang mengalami transformasi akibat modernisasi dan perubahan struktur sosial. Turmudi menggambarkan bagaimana kiai sebagai figur religius tidak hanya berperan dalam aspek spiritual dan pendidikan, tetapi juga dalam ranah sosial-politik, di mana mereka menjadi mediator, komunikator, sekaligus penggerak moral bagi masyarakat. Kajian ini menekankan pentingnya komunikasi sosial dan legitimasi moral sebagai fondasi hubungan antara pemimpin dan masyarakat dalam mempertahankan otoritas keagamaan di tengah perubahan zaman.

Perbedaan mendasar antara penelitian Endang Turmudi dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus dan pendekatan epistemologisnya. Turmudi meneliti kepemimpinan kiai dalam konteks sosial-budaya Indonesia dengan menggunakan pendekatan antropologis dan sosiologis, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berangkat dari perspektif tafsir tematik Al-Qur'an yang bersifat normatif dan teologis. Penelitian Turmudi berfokus pada realitas empiris dan perubahan peran sosial kiai dalam masyarakat, sementara penelitian ini akan menggali prinsip-prinsip dasar etika komunikasi antara pemimpin dan rakyat sebagaimana diatur dalam wahyu. Dengan kata lain, penelitian Turmudi membahas fenomena kepemimpinan dalam tataran praktis dan historis, sedangkan penelitian ini berupaya membangun kerangka teoretis komunikasi kepemimpinan yang bersumber langsung dari nilai-nilai Qur'ani.

Selain itu, penelitian "*Struggling for the Umma*" berorientasi pada konteks spesifik masyarakat lokal di Indonesia, sedangkan penelitian yang akan dilakukan memiliki cakupan universal yang dapat diterapkan dalam berbagai konteks sosial-politik umat Islam. Penelitian ini tidak hanya menyoroti transformasi sosial kepemimpinan sebagaimana dilakukan Turmudi, tetapi juga menekankan pada fondasi moral, spiritual, dan etika

[80] Endang Turmudi, *Struggling For The Umma: Changing Leadership Roles Of Kiai In Jombang, East Java*, Anu Press, 2006.

komunikasi Qur'ani sebagai dasar ideal dalam membangun hubungan antara pemimpin dan rakyat. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru yang bersifat normatif-konseptual dan aplikatif, yakni menghubungkan nilai-nilai wahyu dengan dinamika komunikasi kepemimpinan modern, yang belum dibahas secara mendalam dalam kajian sosiologis seperti yang dilakukan oleh Endang Turmudi.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Sofian dengan judul "Nilai-nilai Pendidikan dalam Kepemimpinan Profetik Umar Bin Khattab terhadap Pelayanan Publik (Studi Kritis Kitab Al-Faruq Umar Karya Muhammad Husain Haikal)"[81] yang diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2023, merupakan kajian akademik yang menyoroti kepemimpinan Umar bin Khattab sebagai teladan dalam pengelolaan pemerintahan yang berlandaskan nilai-nilai profetik. Penelitian ini menjelaskan bahwa kepemimpinan Umar tidak hanya berorientasi pada aspek administratif, tetapi juga pada nilai-nilai moral dan spiritual yang mencerminkan visi pelayanan publik yang adil dan berkeadaban. Dalam karyanya, Haikal menguraikan bagaimana Umar menerapkan prinsip kejujuran, keadilan, tanggung jawab, serta kepedulian sosial dalam mengelola masyarakat dan memastikan kesejahteraan rakyat. Kepemimpinan Umar digambarkan sebagai model yang memadukan kekuatan iman dengan ketegasan moral, menjadikannya contoh ideal bagi pemimpin dalam konteks pemerintahan Islam dan modern.

Perbedaan utama antara penelitian Sofian dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada tujuan dan pendekatan analisisnya. Penelitian Sofian berfokus pada figur tokoh, yakni Umar bin Khattab, serta bagaimana nilai-nilai profetiknya diterapkan dalam konteks pelayanan publik. Pendekatan yang digunakan bersifat historis dan deskriptif, dengan menitikberatkan pada rekonstruksi perilaku kepemimpinan yang diambil dari sumber sejarah Islam. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan memiliki pendekatan tafsir tematik (*maudhū'ī*) yang menggali prinsip-prinsip komunikasi pemimpin dan rakyat berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an. Artinya, penelitian ini tidak terbatas pada satu figur sejarah, tetapi berusaha menemukan fondasi konseptual dan normatif yang berlaku universal tentang etika komunikasi kepemimpinan dalam Islam.

Selain itu, penelitian Sofian menekankan aspek pendidikan dan nilai profetik dalam konteks kepemimpinan, sedangkan penelitian ini akan memperluas pembahasan ke arah etika komunikasi dan relasi sosial antara pemimpin dan rakyat yang bersumber langsung dari Al-Qur'an. Dengan pendekatan tafsir tematik, penelitian ini akan menyoroti prinsip-prinsip seperti

---

[81] Amrin Sofian, "*Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Kepemimpinan Profetik Terhadap Pelayanan Publik (Studi Kritis Kitab Al-Farûq Umar Karya Muhammad Husain Haikal)*", Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.

amanah, keadilan, dan keterbukaan sebagai dasar komunikasi kepemimpinan yang Qur'ani. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah baru dengan menghadirkan kerangka etika komunikasi yang bersifat universal dan aplikatif, melengkapi kajian Haikal yang lebih menekankan aspek teladan personal kepemimpinan profetik dalam sejarah Islam.

*Keempat, p*enelitian yang dilakukan oleh Effiati Juliana Hasibuan dengan judul "Strategi Komunikasi Islami Guru dalam Pendidikan dan Karakter Siswa"[82] yang diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Sumatera Utara pada tahun 2021, merupakan kajian yang membahas bagaimana prinsip-prinsip komunikasi Islam diterapkan dalam dunia pendidikan untuk membentuk karakter peserta didik. Dalam penelitiannya, Effiati menguraikan bahwa guru sebagai pendidik memiliki peran strategis dalam membangun komunikasi yang tidak hanya informatif tetapi juga inspiratif dan edukatif, dengan menjadikan nilai-nilai Qur'ani dan akhlak Rasulullah SAW sebagai landasan etika komunikasi. Penelitian ini menegaskan bahwa komunikasi Islami mampu menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif, penuh empati, dan berorientasi pada pembentukan karakter moral siswa. Kajian ini memberikan gambaran konkret mengenai penerapan nilai-nilai Islam dalam konteks komunikasi *inter* personal antara pendidik dan peserta didik.

Perbedaan yang mencolok antara penelitian Effiati Juliana Hasibuan dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada konteks dan fokus objek kajian. Penelitian Hasibuan berfokus pada dunia pendidikan, khususnya hubungan komunikatif antara guru dan siswa, dengan tujuan untuk mengembangkan karakter Islami dalam proses belajar mengajar. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan berfokus pada relasi komunikasi antara pemimpin dan rakyat yang dianalisis melalui pendekatan tafsir tematik terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya membahas aspek pedagogis dari komunikasi Islami, tetapi berupaya menggali makna konseptual dan normatif dari komunikasi sosial-politik dalam perspektif wahyu. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini juga bersifat lebih teologis dan tekstual, dengan menitikberatkan pada pesan-pesan Al-Qur'an sebagai pedoman etika dalam kepemimpinan dan hubungan sosial.

Selain itu, penelitian Effiati Juliana Hasibuan bersifat aplikatif dalam konteks pendidikan formal dan berorientasi pada pembentukan karakter individu, sedangkan penelitian ini diarahkan pada penguatan moral sosial dan etika publik dalam konteks kepemimpinan masyarakat. Penelitian yang akan dilakukan berupaya menyusun kerangka konseptual mengenai model komunikasi Qur'ani yang berlandaskan nilai-nilai seperti kejujuran, amanah, dan keadilan, sebagai pedoman etis dalam interaksi pemimpin dan rakyat.

---

[82] Effiati Juliana Hasibuan, *"Strategi Komunikasi Islami Guru Dalam Pendidikan Karakter Siswa Di Sekolah Dasar Islam Terpadu Al Fityan School Medan Dan Nurul Ilmi Kabupaten Deli Serdang*", Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2021.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam ranah komunikasi Islam, dengan memperluas penerapan nilai-nilai Qur'ani dari ruang pendidikan menuju ranah sosial dan politik, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih luas tentang etika komunikasi dalam sistem kepemimpinan Islam.

Seluruh disertasi yang telah dikaji di atas, mulai dari karya Sofian tentang kepemimpinan profetik Umar bin Khattab hingga Effiati Juliana Hasibuan tentang Strategi Komunikasi Islami Guru, memberikan fondasi yang berharga bagi pengembangan wacana komunikasi dan kepemimpinan dalam perspektif Islam. Masing-masing karya memiliki kelebihan yang khas: penelitian Sofian menonjol dalam menggali dimensi spiritual dan moral kepemimpinan profetik yang humanis; dan Effiati Hasibuan memberikan kontribusi aplikatif dalam konteks pendidikan melalui pembentukan karakter Islami melalui komunikasi; sementara Melda Nasution memperkuat kajian empiris tentang efektivitas komunikasi dalam organisasi modern. Keempatnya memperlihatkan bahwa komunikasi dalam Islam bukan hanya sekadar sarana menyampaikan pesan, melainkan instrumen moral yang membangun harmoni sosial dan memperkuat legitimasi kepemimpinan.

Namun demikian, keempat penelitian tersebut masih terbatas pada konteks sektoral pendidikan, organisasi, dan figur kepemimpinan klasik tanpa menyinggung secara komprehensif persoalan problematika komunikasi antara pemimpin dan rakyat dalam perspektif Al-Qur'an. Dari titik inilah, penelitian berjudul "Problematika Komunikasi antara Pemimpin dan Rakyat dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Tafsir Tematik tentang Etika dan Relasi Sosial)" hadir memberikan kontribusi baru. Penelitian ini tidak hanya mengkaji komunikasi sebagai keterampilan sosial, tetapi menempatkannya sebagai sistem nilai teologis yang bersumber langsung dari wahyu. Melalui pendekatan tafsir tematik (*maudhū'ī*), penelitian ini akan menggali prinsip-prinsip Qur'ani seperti amanah, keadilan, musyawarah (*syûrâ*), dan *qaulan sadīdan* sebagai dasar etika komunikasi pemimpin-rakyat. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dan normatif yang belum diulas dalam disertasi-disertasi sebelumnya, yakni menyusun model komunikasi kepemimpinan Qur'ani yang tidak hanya etis dan dialogis, tetapi juga transendental serta relevan dengan dinamika sosial-politik umat Islam kontemporer.

3. Jurnal

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Hasan, K. dengan judul "*Islamic Communication Ethics*: *Concepts and Applications*"[83] yang

[83] Kamaruddin Hasan, "Islamic Communication Ethics; Concepts And Applications In The Digital Era," *Jurnal Al-Fikrah* 13, No. 1, 2024. hal. 112

diterbitkan oleh JIAF: Jurnal Ilmu Akhlak dan Filsafat, merupakan kajian akademik yang membahas secara mendalam tentang konsep dasar dan penerapan etika komunikasi dalam perspektif Islam. Dalam penelitiannya, Hasan menjelaskan bahwa komunikasi dalam Islam memiliki dimensi spiritual, moral, dan sosial yang tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip akhlak Qur'ani. Komunikasi dipahami bukan hanya sebagai alat penyampaian pesan, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap kebenaran dan keadilan. Artikel ini menegaskan pentingnya nilai-nilai seperti kejujuran (*ṣidq*), sopan santun (adab), dan kebijaksanaan (*ḥikmah*) dalam setiap tindakan komunikasi, baik dalam konteks individu maupun sosial. Hasan juga menyoroti bagaimana prinsip-prinsip komunikasi Islam dapat diterapkan dalam kehidupan modern, termasuk di ranah politik, pendidikan, dan media massa, untuk membangun masyarakat yang beradab dan beretika.

Perbedaan mendasar antara penelitian Hasan dan penelitian yang akan dilakukan terletak pada ruang lingkup kajian dan pendekatan analisisnya. Penelitian Hasan bersifat konseptual dan aplikatif, dengan fokus pada pemahaman umum mengenai etika komunikasi Islam dan penerapannya di berbagai bidang kehidupan. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan berfokus secara khusus pada problematika komunikasi antara pemimpin dan rakyat yang ditinjau melalui perspektif tafsir tematik (*maudhū'ī*) terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Dengan kata lain, penelitian ini tidak hanya membahas prinsip etika komunikasi secara umum, tetapi berupaya menggali dan menafsirkan secara mendalam nilai-nilai wahyu yang secara langsung mengatur hubungan sosial-politik antara pemimpin dan masyarakat. Pendekatan ini bersifat teologis dan *hermaneutik*, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan pemahaman baru tentang bagaimana Al-Qur'an mengarahkan pola komunikasi yang ideal antara penguasa dan rakyatnya.

Selain itu, penelitian Hasan lebih berorientasi pada formulasi konsep etika komunikasi Islam yang bersifat universal, sedangkan penelitian yang akan dilakukan diarahkan untuk menghasilkan kerangka etika komunikasi kepemimpinan Qur'ani yang bersifat normatif dan aplikatif dalam konteks sosial-politik modern. Penelitian ini akan menyoroti nilai-nilai seperti amanah, keadilan, dan tanggung jawab sosial pemimpin, yang menjadi pilar utama dalam membangun kepercayaan publik dan keharmonisan sosial. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah yang lebih spesifik, yaitu menjembatani antara teori etika komunikasi Islam dan praktik komunikasi kepemimpinan dalam kehidupan bernegara, serta menempatkan Al-Qur'an sebagai rujukan utama dalam membentuk pola komunikasi yang etis, adil, dan berkeadaban antara pemimpin dan rakyat.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Malik, M., Nikmah, L., Wati, I., Ardhyantama, V., Imaduddin, M., dan Andriningrum, H. (2025) dengan judul

"Etika Komunikasi dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis"[84] yang diterbitkan oleh ASNA: Jurnal Kependidikan Islam dan Keagamaan, Volume 6 Nomor 2, merupakan kajian ilmiah yang menguraikan prinsip-prinsip dasar etika komunikasi dalam Islam dengan landasan tekstual dari Al-Qur'an dan hadis. Penelitian ini menyoroti nilai-nilai utama dalam komunikasi Islami seperti *qaulan sadīdan* (perkataan yang benar), *qaulan ma'rūfan* (ucapan yang baik), *qaulan layyinan* (perkataan yang lembut), dan *qaulan balīghan* (ucapan yang tepat dan efektif). Melalui analisis tekstual, para penulis menjelaskan bahwa komunikasi dalam Islam tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian pesan, tetapi juga sebagai media pembinaan moral dan harmonisasi sosial. Kajian ini menegaskan bahwa keberhasilan komunikasi sangat ditentukan oleh kesesuaian ucapan dengan nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan adab yang diajarkan oleh wahyu.

Perbedaan utama antara penelitian Malik dkk. dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada tujuan dan pendekatan penelitian. Penelitian Malik dkk. bersifat deskriptif-teologis dan berfokus pada pemaparan nilai-nilai komunikasi Qur'ani secara umum tanpa mengaitkannya dengan konteks sosial tertentu. Sebaliknya, penelitian yang akan dilakukan memiliki fokus yang lebih spesifik, yaitu menelaah problematika komunikasi antara pemimpin dan rakyat dalam konteks relasi sosial-politik melalui pendekatan tafsir tematik (*maudhū'ī*). Penelitian ini tidak hanya menjelaskan konsep etika komunikasi, tetapi juga mengkaji penerapannya dalam hubungan kekuasaan dan tanggung jawab moral antara pemimpin dan rakyat sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya menghadirkan pemahaman yang lebih aplikatif terhadap prinsip komunikasi Islam dalam konteks kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.

Selain itu, penelitian Malik dkk. menitikberatkan kajiannya pada tataran teoretis dan normatif, sedangkan penelitian ini akan mengembangkan aspek praktik dan kontekstual dari nilai-nilai Qur'ani dalam membentuk pola komunikasi kepemimpinan yang berkeadilan dan berkeadaban. Penelitian ini berorientasi pada pembentukan model komunikasi Qur'ani yang mampu menjawab tantangan sosial-politik kontemporer, seperti krisis kepercayaan publik, kurangnya transparansi, dan ketimpangan hubungan antara pemimpin dan rakyat. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru yang lebih terfokus dan relevan, yaitu menggali prinsip-prinsip etika komunikasi Qur'ani yang secara langsung dapat diterapkan dalam memperbaiki kualitas komunikasi kepemimpinan dan memperkuat relasi sosial berdasarkan nilai-nilai wahyu.

---

[84] Muh Syauqi Malik Et Al., *"*Etika Komunikasi Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis,*" Asna: Jurnal Kependidikan Islam Dan Keagamaan* 6, No. 2, 2024.hal. 28

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Rafidawati, M. dengan judul "Etika Komunikasi Perspektif Agama Islam"[85] yang diterbitkan oleh al-Akmal : Jurnal Pendidikan Islam, merupakan kajian ilmiah yang menyoroti pentingnya penerapan nilai-nilai etika Islam dalam praktik komunikasi sehari-hari. Dalam tulisannya, Rafidawati menjelaskan bahwa komunikasi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kejujuran, kesantunan, empati, dan tanggung jawab moral, sebagaimana tercermin dalam ajaran Al-Qur'an dan *sunnah* Nabi Muhammad SAW. Penelitian ini juga membahas berbagai bentuk penyimpangan komunikasi modern, seperti ujaran kebencian, fitnah, dan penyebaran informasi palsu, yang dinilai bertentangan dengan prinsip dasar komunikasi Islami. Melalui pendekatan deskriptif-normatif, Rafidawati menguraikan bahwa komunikasi yang berlandaskan iman dan akhlak mulia tidak hanya memperkuat hubungan sosial antar manusia, tetapi juga menjadi wujud penghambaan kepada Allah SWT dalam ranah sosial.

Perbedaan mendasar antara penelitian Rafidawati dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus kajian dan kedalaman analisis tekstualnya. Penelitian Rafidawati bersifat umum dan normatif, dengan fokus pada prinsip-prinsip komunikasi dalam Islam yang berlaku bagi seluruh aspek kehidupan sosial. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan akan menelusuri secara lebih spesifik problematika komunikasi antara pemimpin dan rakyat melalui pendekatan tafsir tematik (*maudhū'ī*). Pendekatan ini bertujuan untuk menggali nilai-nilai Qur'ani yang secara eksplisit maupun implisit mengatur hubungan komunikatif dalam konteks kepemimpinan, seperti amanah, keadilan, musyawarah, dan kejujuran dalam menyampaikan aspirasi dan kebijakan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menguraikan etika komunikasi dalam Islam secara umum, tetapi juga mengaitkannya langsung dengan relasi sosial-politik yang menjadi fondasi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Selain itu, penelitian Rafidawati menekankan pentingnya etika komunikasi dalam kehidupan sosial dan pendidikan, sedangkan penelitian ini menempatkan komunikasi sebagai instrumen kepemimpinan Qur'ani yang memiliki implikasi terhadap keadilan dan kesejahteraan publik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dengan merumuskan model komunikasi yang etis, dialogis, dan partisipasi antara pemimpin dan rakyat berdasarkan nilai-nilai Al-Qur'an. Dengan kata lain, penelitian ini memperluas cakupan kajian etika komunikasi Islam dari ranah *inter* personal menuju tataran sosial-politik, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana prinsip-prinsip komunikasi Qur'ani dapat

[85] Misyailni Rafidawati And Titin Nurjanah, "Etika Komunikasi Perspektif Agama Islam*," Al-Akmal: Jurnal Studi Islam* 4, No. 1, 2025, hal. 47

diterapkan dalam sistem kepemimpinan yang berkeadaban, transparan, dan bertanggung jawab.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Halihasimi, S. Kholil, dan A. A. Azhar dengan judul "Efektivitas Etika Komunikasi Digital Islam dalam Pendidikan Islam"[86] yang diterbitkan oleh Jurnal Etika Komunikasi Islam, Volume 12 Nomor 4, merupakan kajian yang membahas penerapan prinsip-prinsip etika komunikasi Islam di era digital, khususnya dalam konteks pendidikan Islam. Dalam penelitiannya, para penulis menyoroti bagaimana perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah membawa dampak signifikan terhadap pola komunikasi umat Islam, baik dalam ranah pendidikan maupun kehidupan sosial. Mereka menegaskan bahwa prinsip-prinsip komunikasi Islami seperti kejujuran, tanggung jawab, sopan santun, dan penghormatan terhadap kebenaran perlu dijadikan pedoman utama dalam aktivitas komunikasi digital untuk menjaga moralitas publik dan stabilitas sosial. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pendidikan Islam memiliki peran penting dalam membentuk generasi yang mampu menggunakan media digital secara etis dan produktif, sesuai dengan nilai-nilai Al-Qur'an dan *sunnah*.

Perbedaan utama antara penelitian Halihasimi, Kholil, dan Azhar dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada konteks dan fokus kajiannya. Penelitian Halihasimi dkk. lebih menitikberatkan pada efektivitas penerapan etika komunikasi Islam di dunia digital, dengan menyoroti tantangan moral di era informasi dan teknologi. Pendekatannya bersifat empiris dan aplikatif, dengan tujuan menilai sejauh mana prinsip etika komunikasi dapat diterapkan dalam lingkungan pendidikan dan media. Sebaliknya, penelitian yang akan dilakukan berfokus pada aspek normatif-teologis dengan menggunakan pendekatan tafsir tematik (*maudhū'ī*) terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan komunikasi dan relasi sosial antara pemimpin dan rakyat. Penelitian ini akan menggali dimensi etika komunikasi yang tidak hanya relevan untuk konteks teknologi modern, tetapi juga fundamental dalam membentuk tatanan sosial dan pemerintahan yang berkeadilan.

Selain itu, penelitian Halihasimi dkk. menempatkan etika komunikasi Islam dalam konteks individu dan pendidikan, sementara penelitian ini mengangkatnya ke tataran hubungan sosial-politik yang lebih luas, yakni interaksi antara pemimpin dan rakyat. Penelitian ini akan mengkaji prinsip-prinsip Qur'ani seperti amanah, keadilan, dan tanggung jawab sosial sebagai dasar komunikasi kepemimpinan yang ideal, yang tidak hanya bersifat informatif tetapi juga moral dan transformatif. Dengan demikian, penelitian ini

---

[86] Halihasimi Halihasimi, Syukur Kholil, And Anang Anas Azhar, "Efektivitas Etika Komunikasi Digital Islam Dalam Pendidikan Islam Di Lingkungan Kementerian Agama Aceh Tengah," Edukasi Islami*: Jurnal Pendidikan Islam* 12, No. 04, 2023.hal. 5263

memberikan kontribusi baru dengan memperluas cakupan kajian etika komunikasi Islam dari ruang digital menuju ranah kepemimpinan dan masyarakat. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kerangka konseptual tentang komunikasi Qur'ani yang berfungsi memperkuat kepercayaan publik dan membangun hubungan yang harmonis antara pemimpin dan rakyat dalam konteks sosial yang lebih luas.

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Muchlis, K. M. C., Rusli, R., dan Islamdini, M. dengan judul "Konsep Etika Komunikasi dalam Al-Qur'an dan Relevansinya terhadap Praktik Komunikasi Digital Abad ke-21"[87] yang diterbitkan oleh Halaqah: *Journal of Multidisciplinary Islamic Studies,* Volume 2 Nomor 1, merupakan kajian interdisipliner yang membahas bagaimana nilai-nilai etika komunikasi yang terkandung dalam Al-Qur'an dapat diterapkan dalam praktik komunikasi digital di era modern. Penelitian ini menyoroti tantangan moral yang muncul akibat kebebasan berekspresi di media sosial, seperti penyebaran *hoaks*, ujaran kebencian, dan degradasi etika publik. Melalui pendekatan analisis tafsir terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan prinsip komunikasi seperti *qaulan sadīdan* (perkataan benar), *qaulan ma'rūfan* (ucapan baik), dan *qaulan layyinan* (ucapan lembut), para penulis menekankan pentingnya membangun komunikasi digital yang berlandaskan nilai-nilai kebenaran, tanggung jawab, dan keadilan sosial. Kajian ini menawarkan paradigma komunikasi yang beretika sebagai solusi terhadap krisis moral dalam komunikasi global abad ke-21.

Perbedaan mendasar antara penelitian Muchlis dkk. dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada objek dan orientasi kajian. Penelitian Muchlis dkk. berfokus pada penerapan etika komunikasi Qur'ani dalam konteks dunia digital dan media sosial, yang lebih bersifat fenomenologi dan kontemporer. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan akan mengkaji problematika komunikasi antara pemimpin dan rakyat dengan pendekatan tafsir tematik (*maudhū'ī*), yang menggali nilai-nilai komunikasi Qur'ani dalam konteks sosial-politik dan kepemimpinan. Artinya, penelitian ini tidak hanya membahas etika komunikasi secara umum, tetapi juga menelaah bagaimana prinsip-prinsip komunikasi dalam Al-Qur'an dapat diterapkan untuk memperbaiki hubungan komunikatif antara pemimpin dan rakyat, terutama dalam menjaga keadilan, transparansi, dan keharmonisan sosial.

Selain itu, penelitian Muchlis dkk. menggunakan pendekatan analisis normatif-konseptual terhadap fenomena digital, sedangkan penelitian ini akan menggunakan pendekatan teologis-interpretatif yang menekankan pada penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an secara kontekstual untuk membangun model

---

[87] Choirul Muchlis, Risan Rusli, And Meiti Islamdini, "Konsep Etika Komunikasi Dalam Al-Qur'an Dan Relevansinya Terhadap Praktik Komunikasi Digital Abad Ke-21: Studi Tafsir Tematik," *Halaqah: Journal Of Multidisciplinary Islamic Studies* 2, No. 1, 2025.hal. 112

komunikasi kepemimpinan yang etis dan berkeadaban. Penelitian ini akan memperluas cakupan pembahasan etika komunikasi dari dunia digital ke ranah sosial-politik, di mana nilai-nilai Qur'ani seperti amanah, kejujuran, dan tanggung jawab memiliki peranan penting dalam membentuk kepercayaan publik terhadap pemimpin. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan menghadirkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana prinsip komunikasi Qur'ani dapat dijadikan pedoman moral dan praktis dalam membangun relasi pemimpin-rakyat yang selaras dengan tuntunan wahyu dan kebutuhan sosial masyarakat modern.

Seluruh penelitian jurnal mulai dari karya Muchlis, K. M. C., Rusli, R., & Islamdini, M. (2025) tentang Konsep Etika Komunikasi dalam Al-Qur'an dan Relevansinya terhadap Praktik Komunikasi Digital Abad ke-21, H. Halihasimi, S. Kholil, & A. A. Azhar mengenai Efektivitas Etika Komunikasi Digital Islam dalam Pendidikan Islam, Rafidawati, M. dengan Etika Komunikasi Perspektif Agama Islam, hingga Hasan, K. dalam *Islamic Communication Ethics*: *Concepts and Applications*, seluruhnya memberikan kontribusi penting dalam pengembangan pemahaman tentang etika komunikasi Islam di berbagai bidang kehidupan modern. Karya Muchlis dkk. unggul dalam relevansinya terhadap konteks komunikasi digital abad ke-21 dengan mengaitkan nilai-nilai Qur'ani pada ruang publik virtual. Penelitian Halihasimi dkk. memberikan kontribusi praktis dalam penerapan etika komunikasi Islami dalam pendidikan, memperkuat karakter moral peserta didik di era digital. Rafidawati berhasil menekankan aspek normatif dan moral komunikasi Islam dalam kehidupan sosial sehari-hari, sementara Hasan menghadirkan pendekatan konseptual yang sistematis dan aplikatif dalam membangun teori komunikasi Islam yang berakar pada prinsip akhlak Qur'ani.

Namun, seluruh penelitian tersebut masih membahas etika komunikasi Islam dalam ranah umum seperti pendidikan, media, atau interaksi sosial tanpa menguraikan secara mendalam dimensi komunikasi sosial-politik antara pemimpin dan rakyat. Oleh karena itu, penelitian dengan judul "Problematika Komunikasi antara Pemimpin dan Rakyat dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Tafsir Tematik tentang Etika dan Relasi Sosial)" hadir untuk memberikan kontribusi baru yang bersifat konseptual, teologis, dan aplikatif. Penelitian ini akan menelaah secara spesifik ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan prinsip komunikasi kepemimpinan, amanah, keadilan, dan tanggung jawab sosial dalam konteks hubungan antara pemimpin dan rakyat. Dengan menggunakan pendekatan tafsir tematik (*maudhū'ī*), penelitian ini tidak hanya memperluas cakupan kajian komunikasi Islam ke ranah kepemimpinan publik, tetapi juga berupaya merumuskan model komunikasi Qur'ani yang mampu menjawab tantangan krisis kepercayaan dan etika komunikasi dalam relasi kekuasaan modern. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat

memperkaya khazanah keilmuan Islam dan menjadi jembatan antara nilai wahyu dan praksis komunikasi sosial-politik kontemporer.

I. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan orientasi analisis mendalam terhadap teks-teks Al-Qur'an yang berkaitan dengan etika komunikasi dan relasi sosial antara pemimpin dan rakyat. Jenis penelitian ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menelaah makna yang terkandung di balik teks wahyu secara komprehensif dan kontekstual. Penelitian kualitatif menekankan pada upaya memahami fenomena sosial dan keagamaan berdasarkan pandangan partisipan, *nash*, serta sumber-sumber primer yang otoritatif, bukan melalui pengukuran angka atau statistik. Dalam pendekatan kualitatif, peneliti berusaha memahami realitas sosial secara mendalam melalui interpretasi terhadap makna, simbol, dan nilai yang terkandung dalam suatu fenomena.[88] Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada hasil akhir berupa temuan teoritis, tetapi juga pada proses pemaknaan teks dan interpretasi nilai-nilai moral yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an tentang komunikasi kepemimpinan.

Jenis penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*), karena seluruh data utama yang digunakan berasal dari sumber literatur, baik klasik maupun kontemporer. Literatur tersebut mencakup kitab tafsir, karya ilmiah tentang komunikasi Islam, teori etika sosial, serta jurnal-jurnal akademik yang relevan dengan tema kepemimpinan dan komunikasi Qur'ani. Penelitian kepustakaan merupakan metode penelitian yang memanfaatkan sumber-sumber tertulis sebagai data utama untuk dianalisis secara sistematis dan kritis.[89] Melalui penelitian kepustakaan, peneliti dapat menelusuri hubungan antara konsep-konsep komunikasi dalam teori modern dan prinsip-prinsip komunikasi dalam Al-Qur'an. Pendekatan ini memberikan ruang yang luas untuk menggali makna tekstual dan kontekstual dari ayat-ayat Al-Qur'an sehingga dapat membentuk sintesis teori komunikasi Islam yang kokoh dan relevan dengan konteks zaman.

Dalam penelitian ini, Al-Qur'an dijadikan sebagai objek utama kajian, bukan sekadar sumber data pendukung. Hal ini berarti bahwa penelitian ini bertujuan menggali prinsip-prinsip dasar komunikasi kepemimpinan langsung dari wahyu, bukan hanya menguji teori yang sudah ada. Penelitian kualitatif dalam studi keislaman sering digunakan untuk memahami teks-teks keagamaan sebagai sumber nilai normatif yang memiliki relevansi terhadap

---

[88] Creswell, J. W., *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, Sage Publications, 2014, hal. 4

[89] Zed, M., *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, 2014, hal. 3.

kehidupan sosial manusia.[90] Oleh sebab itu, analisis dalam penelitian ini diarahkan untuk menemukan relevansi ajaran Qur'ani terhadap praktik komunikasi antara pemimpin dan rakyat, serta menjelaskan bagaimana nilai-nilai ilahiah dapat diterapkan dalam tatanan sosial kontemporer.

Sebagai penelitian kualitatif berbasis teks, penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu berusaha menggambarkan sekaligus menganalisis isi dan makna ayat-ayat Al-Qur'an yang terkait dengan etika komunikasi. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan fenomena secara sistematis dan faktual, sementara analisis dilakukan untuk menafsirkan makna dari data yang diperoleh.[91] Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan secara ilmiah bagaimana Al-Qur'an memberikan panduan moral, sosial, dan spiritual dalam membangun komunikasi kepemimpinan yang adil, amanah, dan *rahmatan li a-l 'ālamīn*.

Penelitian ini juga dapat dikategorikan sebagai penelitian normatif-teologis, karena berfokus pada nilai dan norma ilahiah yang terkandung dalam teks wahyu. Penelitian normatif dalam studi keislaman bertujuan untuk menelaah nilai-nilai yang terkandung dalam sumber-sumber ajaran Islam guna menghasilkan prinsip-prinsip etika dan hukum yang relevan dengan kehidupan manusia.[92] Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya menafsirkan makna linguistik ayat, tetapi juga menelaah pesan etis dan moral yang terkandung di dalamnya untuk diaplikasikan dalam konteks kehidupan nyata.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan tafsir tematik *(tafsir maudhū'ī)*. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang berorientasi pada penggalian konsep dan nilai-nilai Qur'ani yang berkaitan dengan etika komunikasi antara pemimpin dan rakyat. Metode tafsir tematik merupakan metode penafsiran yang menghimpun seluruh ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan suatu tema tertentu untuk kemudian dianalisis secara komprehensif sehingga menghasilkan pemahaman yang utuh mengenai tema tersebut.[93]

Pendekatan ini bersifat analitis-deskriptif dan komparatif, di mana peneliti tidak hanya mendeskripsikan makna ayat-ayat yang berkaitan dengan komunikasi, tetapi juga membandingkannya dengan teori-teori komunikasi modern. Analisis komparatif digunakan untuk menemukan titik temu dan perbedaan antara paradigma komunikasi sekuler dan nilai-nilai etika komunikasi Qur'ani.[94] Pendekatan ini membantu menjelaskan bahwa prinsip

---

[90] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, 2018, hal. 15

[91] Lexy J. Moleong., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, 2018, hal. 11.

[92] Azyumardi Azra, ., *Metodologi Studi Islam*, Kencana, 2017, hal. 89

[93] Abdul Hayy Al-Farmawi., *Metode Tafsir Maudhu'i*, RajaGrafindo Persada, 2012, hal. 36

[94] Burhan Bungin., *Penelitian Kualitatif*, Kencana, 2015, hal. 207

komunikasi dalam Al-Qur'an memiliki struktur epistemologis dan aksiologis yang lebih luas karena mengintegrasikan dimensi spiritualitas dan moralitas.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan hermeneutika kontekstual, yaitu pendekatan yang menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an berdasarkan konteks sosial dan historisnya. Pendekatan ini digunakan untuk memahami pesan Al-Qur'an secara lebih kontekstual sehingga nilai-nilai Qur'ani dapat diaplikasikan dalam realitas sosial modern.[95] Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu mengungkap pesan-pesan komunikasi kepemimpinan dalam Al-Qur'an yang dapat diterapkan secara praktis dalam kehidupan sosial-politik umat.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, yang keduanya memiliki peran saling melengkapi dalam membangun kerangka analisis penelitian. Dalam penelitian kualitatif, sumber data merupakan unsur penting karena menentukan kedalaman analisis dan validitas temuan penelitian. Data primer berfungsi sebagai sumber utama yang dianalisis secara langsung oleh peneliti, sedangkan data sekunder berfungsi sebagai sumber pendukung yang memperkaya perspektif analisis serta membantu menjelaskan konteks teoritis dari objek penelitian.[96] Oleh karena itu, pemilihan sumber data dalam penelitian ini dilakukan secara selektif dan sistematis agar analisis yang dihasilkan memiliki landasan ilmiah yang kuat serta mampu menjelaskan konsep komunikasi kepemimpinan dalam perspektif Al-Qur'an secara komprehensif.

Dalam penelitian berbasis kepustakaan, sumber data memiliki peran yang sangat penting karena keseluruhan proses penelitian bergantung pada kualitas literatur yang digunakan. Penelitian kepustakaan menekankan pada kegiatan penelusuran, pengumpulan, dan analisis terhadap berbagai dokumen tertulis yang relevan dengan tema penelitian.[97] Melalui pemanfaatan sumber data yang beragam, penelitian ini berupaya mengintegrasikan perspektif tafsir klasik, pemikiran kontemporer, serta teori komunikasi modern untuk memahami secara mendalam konsep komunikasi antara pemimpin dan rakyat dalam perspektif Qur'ani.

Adapun sumber data primer dalam penelitian ini meliputi sumber-sumber utama yang menjadi objek kajian langsung dalam analisis. Dalam penelitian kualitatif berbasis teks keagamaan, data primer biasanya berupa

[95] Richard E, Palmer., *Hermeneutics: Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer*, Northwestern University Press, 1969, hal. 43

[96] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, 2018, hal. 104

[97] Mestika Zed., *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, 2014, hal. 4

dokumen utama yang menjadi fokus penelitian, seperti kitab suci, kitab tafsir, atau karya ilmiah utama yang berkaitan langsung dengan tema yang dikaji.[98] Oleh karena itu, sumber data primer dalam penelitian ini meliputi:

a) Al-Qur'an al-Karim, sebagai sumber utama dan pusat kajian penelitian yang menjadi landasan dalam menafsirkan nilai-nilai etika komunikasi kepemimpinan. Al-Qur'an dipandang sebagai sumber normatif yang memuat prinsip-prinsip dasar mengenai relasi sosial, etika komunikasi, dan tanggung jawab kepemimpinan dalam kehidupan manusia.

b) Kitab tafsir klasik, seperti *Tafsir al-Qurtubi* dan *Tafsir Ibn Katsir*, yang memberikan pandangan para ulama klasik terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan komunikasi, kepemimpinan, dan etika sosial. Kitab-kitab tafsir klasik ini memiliki otoritas ilmiah yang kuat dalam tradisi keilmuan Islam karena disusun berdasarkan metode penafsiran yang sistematis dan berbasis pada riwayat serta analisis bahasa Arab.[99]

c) Kitab tafsir kontemporer, seperti *Tafsir al-Mishbah* karya M. Quraish Shihab, yang digunakan untuk memahami konteks modern dari nilai-nilai Qur'ani tentang komunikasi dan relasi sosial. Tafsir kontemporer membantu menjembatani pemahaman antara pesan-pesan Qur'ani yang bersifat normatif dengan realitas sosial masyarakat modern.[100]

d) Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan kepemimpinan, amanah, musyawarah, serta komunikasi publik dalam masyarakat. Hadis-hadis tersebut diambil dari kitab-kitab hadis otoritatif seperti *Shahih al-Bukhari*, *Shahih Muslim*, dan *Sunan Abu Dawud*. Hadis memiliki posisi penting sebagai sumber kedua dalam ajaran Islam setelah Al-Qur'an, sehingga menjadi rujukan penting dalam memahami nilai-nilai etika komunikasi dalam tradisi Islam.[101]

Sementara itu, sumber data sekunder dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan penguatan teoritis, memperluas wawasan analisis, serta menempatkan hasil kajian dalam kerangka akademik yang lebih luas. Data sekunder dalam penelitian kualitatif biasanya berupa literatur ilmiah yang mendukung interpretasi data utama serta membantu menjelaskan fenomena yang diteliti.[102] Dalam penelitian ini, sumber data sekunder meliputi:

a) Jurnal ilmiah internasional dan nasional bereputasi yang membahas topik komunikasi Islam, kepemimpinan etis, serta etika sosial dalam perspektif

---

[98] Jhon W Creswell., *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, Sage Publications, 2014, hal. 156.

[99] Badruddin Al-Zarkashi., *Al-Burhan fi 'Ulum al-Qur'an*, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2006, hal. 145

[100] M. Quraisy Shihab., *Tafsir Al-Misbah*, Lentera Hati, 2017, jilid 1, hal. 19.

[101] Jalaluddin Al-Suyuthi., *Tadrib al-Rawi fi Sharh Taqrib al-Nawawi*, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003, hal. 34.

[102] Lexy J Moleong., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, 2018, hal. 159.

keislaman. Jurnal-jurnal tersebut digunakan untuk memperoleh perspektif akademik terbaru mengenai komunikasi kepemimpinan serta relevansi nilai-nilai Qur'ani dalam konteks sosial kontemporer.

b) Buku-buku akademik modern yang menguraikan teori komunikasi, filsafat sosial, dan etika kepemimpinan, seperti karya Jürgen Habermas (*Theory of Communicative Action*), Paulo Freire (*Pedagogy of the Oppressed*), dan Daniel Goleman (*Social Intelligence*). Literatur ini digunakan sebagai kerangka teoritis untuk menganalisis konsep komunikasi Qur'ani dalam perspektif ilmu sosial modern. Penggunaan teori-teori tersebut memungkinkan penelitian ini membandingkan paradigma komunikasi Barat dengan nilai-nilai komunikasi dalam Al-Qur'an sehingga dapat menghasilkan sintesis konseptual yang lebih komprehensif.[103]

Dengan mengintegrasikan sumber data primer dan sekunder secara sistematis, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang mendalam mengenai konsep komunikasi antara pemimpin dan rakyat dalam perspektif Al-Qur'an. Penggunaan berbagai sumber literatur juga membantu memastikan bahwa penelitian ini memiliki landasan ilmiah yang kuat serta mampu memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan studi komunikasi Islam dan kepemimpinan Qur'ani.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini disusun dengan tujuan untuk memperoleh data yang relevan, valid, dan komprehensif, baik dari sumber primer maupun sekunder yang telah ditetapkan. Karena penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan (*library research*), maka teknik pengumpulan data difokuskan pada kegiatan yang bersifat dokumentasi dan analitis terhadap berbagai sumber tertulis. Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data merupakan langkah penting yang menentukan kualitas temuan penelitian karena data yang diperoleh akan menjadi dasar bagi proses analisis dan interpretasi ilmiah.[104] Namun demikian, untuk memperkaya perspektif dan memperdalam analisis, penelitian ini juga melibatkan unsur observasi non-partisipatif serta wawancara terbatas terhadap pakar di bidang komunikasi Islam dan studi tafsir. Dengan kombinasi teknik ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan sintesis yang kuat antara data tekstual dan pemahaman konseptual yang mendalam.

Teknik yang digunakan adalah dokumentasi, yaitu pengumpulan data melalui penelusuran dan pengkajian terhadap sumber-sumber tertulis, baik klasik maupun kontemporer. Teknik dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengkaji dokumen, catatan,

---

[103] Burhan Bungin., *Penelitian Kualitatif*, Kencana, 2015, hal. 125

[104] Jhon W Creswell., *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, Sage Publications, 2014, hal. 183.

arsip, buku, maupun literatur ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian.[105] Teknik ini meliputi kegiatan membaca secara kritis, mencatat informasi penting, mengklasifikasi data, serta menginterpretasi berbagai sumber literatur yang relevan. Dalam penelitian ini, teknik dokumentasi digunakan untuk menelaah kitab tafsir, hadis, buku akademik, artikel ilmiah, serta jurnal bereputasi yang berkaitan dengan tema komunikasi kepemimpinan dalam perspektif Al-Qur'an.

Melalui teknik dokumentasi ini, peneliti mengidentifikasi ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan konsep komunikasi sosial seperti *qaulan sadīdan*, *qaulan layyinan*, *qaulan ma'rūfan*, *qaulan karīman*, *qaulan balīghan*, dan *qaulan maisuran* yang kemudian dianalisis secara tematik. Selain itu, teknik dokumentasi juga digunakan untuk menelusuri pandangan para mufasir klasik maupun kontemporer mengenai ayat-ayat tersebut. Analisis terhadap literatur tafsir ini bertujuan untuk memahami makna ayat secara komprehensif, baik dari aspek linguistik, historis, maupun kontekstual. Dokumentasi juga mencakup penelusuran karya ilmiah kontemporer yang mengkaji hubungan antara teori komunikasi modern dan nilai-nilai etika Qur'ani, sehingga penelitian ini dapat menghasilkan pemetaan literatur yang sistematis dan komprehensif.[106]

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis kualitatif, yaitu suatu proses pengolahan data yang bertujuan untuk memahami makna yang terkandung dalam data secara mendalam. Analisis kualitatif tidak berorientasi pada perhitungan statistik, melainkan pada proses interpretasi terhadap data yang diperoleh dari berbagai sumber penelitian. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan secara sistematis sejak proses pengumpulan data hingga tahap penarikan kesimpulan, sehingga peneliti dapat menemukan pola, hubungan, serta makna yang terkandung dalam data yang diteliti.[107] Oleh karena itu, analisis dalam penelitian ini diarahkan untuk memahami secara mendalam konsep komunikasi antara pemimpin dan rakyat sebagaimana tercermin dalam ayat-ayat Al-Qur'an serta penafsiran para ulama.

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahapan ini dilakukan secara sistematis dan berulang sehingga peneliti dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap data yang

---

[105] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, 2018, hal. 124

[106] Mestika Zed., *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, 2014, hal. 89

[107] Sandu Siyoto., & Muhammad Ali Sodik., *Dasar Metodologi Penelitian*, Literasi Media Publishing, 2015, hal. 121

dianalisis. Proses analisis data dalam penelitian kualitatif bersifat dinamis, karena peneliti dapat melakukan peninjauan ulang terhadap data yang telah dianalisis untuk memastikan bahwa hasil interpretasi sesuai dengan konteks penelitian.[108]

Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu proses memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data yang telah diperoleh dari berbagai sumber penelitian. Reduksi data dilakukan dengan cara menyeleksi ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, serta literatur ilmiah yang relevan dengan tema etika komunikasi kepemimpinan. Data yang tidak berkaitan secara langsung dengan fokus penelitian dieliminasi agar analisis tetap terarah pada tujuan penelitian.[109]

Selain melakukan seleksi terhadap data, pada tahap reduksi data peneliti juga melakukan pengelompokan data secara tematik. Ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan komunikasi kemudian diklasifikasikan berdasarkan konsep-konsep utama seperti *qaulan sadīdan, qaulan ma'rūfan, qaulan layyinan, qaulan karīman*, *qaulan balīghan* dan *qaulan maisuran*.

Tahap kedua adalah penyajian data, yaitu proses mengorganisasikan data yang telah direduksi ke dalam bentuk yang lebih sistematis dan mudah dipahami. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, matriks, bagan konsep, maupun tabel tematik yang menggambarkan hubungan antar data penelitian.[110] Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan melalui uraian naratif yang menjelaskan hubungan antara ayat-ayat Al-Qur'an, konsep komunikasi Qur'ani, serta pandangan para mufasir mengenai ayat-ayat tersebut.

Selain itu, penyajian data juga dilakukan melalui analisis komparatif antara pandangan para mufasir klasik dan pemikir kontemporer mengenai konsep komunikasi dalam Al-Qur'an. Analisis komparatif ini bertujuan untuk melihat bagaimana pemahaman terhadap konsep komunikasi Qur'ani berkembang dalam berbagai periode pemikiran Islam. Dengan cara ini, peneliti dapat menemukan kesinambungan maupun perbedaan interpretasi dalam tradisi tafsir, sekaligus memahami relevansi konsep komunikasi Qur'ani dalam konteks sosial modern.

Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi data, yaitu proses merumuskan temuan penelitian berdasarkan hasil analisis terhadap data yang telah disajikan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif dengan menarik makna umum dari berbagai data yang telah dianalisis sebelumnya.

---

[108] Imam Gunawan., *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, Bumi Aksara, 2017, hal. 210.

[109] Hardani et al., *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Pustaka Ilmu, 2020, hal. 165.

[110] Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019, hal. 98

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif biasanya bersifat sementara pada tahap awal dan akan terus diverifikasi selama proses penelitian berlangsung untuk memastikan keakuratan hasil analisis.[111]

Proses verifikasi dilakukan dengan cara membandingkan hasil interpretasi ayat-ayat Al-Qur'an dengan pandangan para mufasir serta literatur ilmiah yang relevan. Selain itu, verifikasi juga dilakukan melalui refleksi kritis terhadap data yang diperoleh dari observasi dan wawancara terbatas dengan para ahli. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa hasil analisis tidak hanya memiliki validitas akademik, tetapi juga relevan dengan realitas komunikasi sosial dalam masyarakat.

Dengan menggunakan tahapan analisis tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang mendalam mengenai konsep komunikasi antara pemimpin dan rakyat dalam perspektif Al-Qur'an. Analisis yang dilakukan tidak hanya bertujuan untuk menjelaskan makna ayat-ayat Al-Qur'an secara tekstual, tetapi juga untuk mengungkap nilai-nilai etika komunikasi yang dapat diterapkan dalam kehidupan sosial kontemporer. Oleh karena itu, teknik analisis data dalam penelitian ini berfungsi sebagai alat untuk membangun sintesis konseptual mengenai model komunikasi kepemimpinan Qur'ani yang berlandaskan pada nilai-nilai kejujuran, kelembutan, keadilan, serta penghormatan terhadap martabat manusia.

J. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari enam bab bahasan sebagai berikut:

Bab pertama memuat kerangka awal penelitian yang meliputi latar belakang masalah yang menjelaskan fenomena krisis komunikasi antara pemimpin dan rakyat dalam konteks sosial kontemporer, baik dalam ranah politik, sosial, maupun komunikasi publik. Bab ini juga memaparkan identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan. Bagian ini menjadi landasan konseptual yang mengarahkan keseluruhan pembahasan dalam penelitian ini.

Bab Kedua berjudul Kajian Teoretis Etika dan Relasi Sosial dalam Komunikasi Pemimpin dan Rakyat, membahas landasan teoritis yang digunakan dalam penelitian. Bab ini menguraikan konsep komunikasi, etika, dan relasi sosial dalam perspektif ilmu komunikasi dan ilmu sosial. Selain itu, dibahas pula sejarah dan perkembangan kajian etika komunikasi dalam pemikiran modern, teori relasi sosial, kekuasaan, serta hubungan antara pemimpin dan rakyat dalam struktur sosial. Pada bagian akhir bab ini juga dipaparkan perbandingan antara etika komunikasi dalam perspektif sekuler

[111] Samiaji Sarosa., *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar*, Indeks, 2017, hal. 122

dan perspektif Islam, dan pandangan para tokoh mengenai komunikasi kepemimpinan dan relasi sosial dalam masyarakat serta komunikasi politik.

Bab ketiga berjudul Problematika Komunikasi antara Pemimpin dan Rakyat dalam Konteks Sosial Kontemporer, mengkaji secara kritis berbagai persoalan komunikasi kepemimpinan yang terjadi dalam realitas sosial modern. Pembahasan dalam bab ini menyoroti transformasi relasi antara pemimpin dan rakyat, pergeseran komunikasi dari relasi etis menuju relasi instrumental, serta dampak komunikasi politik yang berorientasi pada citra dan manipulasi simbolik. Selain itu, bab ini juga menganalisis krisis etika komunikasi, erosi kepercayaan publik, serta keterbatasan pendekatan komunikasi modern yang cenderung mengabaikan dimensi moral dan transendental dalam relasi kepemimpinan.

Bab keempat berjudul Isyarat Al-Qur'an tentang Etika dan Relasi Sosial Pemimpin dan Rakyat, memaparkan analisis terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan konsep komunikasi, kepemimpinan, dan masyarakat. Dalam bab ini dibahas berbagai istilah Qur'ani yang berkaitan dengan komunikasi seperti *qaul*, *lisan*, *kalam*, dan *risālah*, serta istilah pemimpin seperti *khalīfah*, *imām*, *ulī al-amr*, *uli quwwah* dan *uli aydi wa abshar*. Selain itu, bab ini juga mengkaji konsep rakyat dalam Al-Qur'an seperti *qawm*, *ummah*, dan *an-nās*. Melalui pendekatan tafsir tematik (*tafsir maudhū ʻī*), bab ini mengidentifikasi prinsip-prinsip etika komunikasi Qur'ani seperti *qaulan karīman*, *qaulan ma'rūfan*, *qaulan sadīdan*, *qaulan layyinan*, *qaulan balīghan*, dan *qulan maisuran*. sebagai fondasi moral komunikasi antara pemimpin dan rakyat.

Bab kelima berjudul Model Komunikasi Pemimpin dan Rakyat dalam Perspektif Al-Qur'an, merupakan bagian sintesis yang merumuskan model komunikasi pemimpin Qur'ani berdasarkan hasil analisis teoretis dan tafsir tematik pada bab sebelumnya. Dalam bab ini dibahas prinsip-prinsip etika komunikasi Qur'ani, konsep *qaulan* sebagai dasar normatif komunikasi kepemimpinan, serta sintesis antara problematika komunikasi kontemporer dengan nilai-nilai Qur'ani. Bab ini juga merumuskan model komunikasi pemimpin Qur'ani yang menempatkan komunikasi sebagai amanah moral, sarana membangun kepercayaan sosial, serta mekanisme rekonsiliasi dalam relasi antara pemimpin dan rakyat.

Bab keenam merupakan Penutup, berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah penelitian serta rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi kontribusi akademik dan praktis bagi pengembangan ilmu komunikasi Islam, khususnya dalam membangun model komunikasi kepemimpinan yang berlandaskan nilai-nilai etika Qur'ani dalam kehidupan sosial dan politik masyarakat.

BAB II
KAJIAN TEORI TENTANG ETIKA DAN RELASI SOSIAL DALAM KOMUNIKASI PEMIMPIN DAN RAKYAT

Bab ini membahas landasan teoretis mengenai etika dan relasi sosial dalam komunikasi antara pemimpin dan rakyat. Pembahasan diawali dengan penjelasan konsep etika dalam perspektif ilmu sosial yang mencakup pengertian etika dan moralitas, etika dalam interaksi sosial, serta etika dalam kepemimpinan sebagai dasar moral dalam hubungan sosial. Selanjutnya dibahas teori etika komunikasi yang menempatkan komunikasi sebagai tindakan sosial yang harus berlandaskan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap martabat manusia. beberapa teori komunikasi digunakan sebagai kerangka analisis, seperti teori tindakan komunikatif Jürgen Habermas, komunikasi dialogis Paulo Freire, serta komunikasi empati Daniel Goleman. Selain itu, bab ini juga menguraikan teori relasi sosial melalui perspektif interaksi simbolik George Herbert Mead, teori kekuasaan dan diskursus Michel Foucault, serta teori kepemimpinan transformasional James MacGregor Burns.

A. Konsep Etika

1. Definisi Etika

Etika secara umum dipahami sebagai cabang filsafat yang membahas tentang nilai-nilai moral yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan sosial. Dalam tradisi filsafat Barat, etika berkaitan dengan pertanyaan

mendasar tentang apa yang dianggap baik dan buruk serta bagaimana manusia seharusnya bertindak dalam relasi dengan orang lain. Melalui etika, manusia diarahkan untuk membangun kehidupan sosial yang berlandaskan nilai kebaikan, tanggung jawab, dan kesadaran moral.[1]

Dalam perspektif Qur'ani, etika tidak semestinya dipahami sebagai seperangkat nilai yang berhenti pada tataran normatif, tetapi harus menjadi orientasi praksis dalam kehidupan manusia. Muhammad Adlan Nawawi dan Abd. Muid N. menegaskan bahwa pengetahuan dan rasionalitas manusia membutuhkan sandaran etis agar penggunaannya tetap diarahkan pada kemaslahatan dan kemanusiaan. Al-Qur'an dalam kerangka ini tidak hanya berfungsi sebagai sumber informasi keagamaan, tetapi sebagai *hudā* yang memberikan orientasi nilai bagi tindakan manusia. Oleh karena itu, setiap bentuk penggunaan pengetahuan, kekuasaan, dan kemampuan komunikasi harus tetap berada dalam kerangka tanggung jawab moral yang bersumber dari nilai-nilai Qur'ani.[2]

Prinsip tersebut memiliki relevansi langsung dengan komunikasi antara pemimpin dan rakyat. Kemampuan komunikasi seorang pemimpin pada dasarnya merupakan bagian dari kapasitas pengetahuan dan kekuasaan yang dapat digunakan untuk membangun kemaslahatan, tetapi juga berpotensi berubah menjadi instrumen dominasi apabila dilepaskan dari orientasi etis. Karena itu, komunikasi pemimpin Qur'ani tidak cukup diukur dari efektivitas penyampaian pesan, keberhasilan persuasi, atau kemampuan membangun citra publik. Komunikasi tersebut harus diuji pula melalui orientasi moralnya, apakah informasi disampaikan secara jujur, apakah bahasa yang digunakan menghormati martabat rakyat, apakah komunikasi membuka ruang dialog, dan apakah keseluruhan proses tersebut diarahkan pada kemaslahatan sosial. Dengan demikian, nilai Qur'ani berfungsi sebagai kerangka etik yang mengendalikan penggunaan pengetahuan dan kekuasaan komunikasi agar tetap berada dalam tujuan kemanusiaan dan tanggung jawab kepada Allah.[3]

Aristoteles memandang etika sebagai ilmu yang berkaitan dengan upaya manusia mencapai kehidupan yang baik (*eudaimonia*). Menurutnya, etika tidak hanya membahas aturan moral secara abstrak, tetapi juga menekankan pembentukan karakter melalui kebiasaan yang baik. Dalam pandangan

---

[1] Franz Magnis-Suseno, *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, Yogyakarta: Kanisius, 2006, hal. 14.

[2] Muhammad Adlan Nawawi dan Abd. Muid N., "Ilmu Pengetahuan dan Etika: Pencarian Makna dan Relevansi dalam Narasi Qur'anik," *Al Burhan: Jurnal Kajian Ilmu dan Pengembangan Budaya Al-Qur'an*, Vol. 22, No. 1, 2022, hlm. 89–103

[3] Muhammad Adlan Nawawi dan Abd. Muid N., "Ilmu Pengetahuan dan Etika: Pencarian Makna dan Relevansi dalam Narasi Qur'anik," *Al Burhan: Jurnal Kajian Ilmu dan Pengembangan Budaya Al-Qur'an*, Vol. 22, No. 1, 2022, hlm. 89–103

Aristoteles, manusia menjadi bermoral melalui latihan kebajikan (*virtue*) yang dilakukan secara terus-menerus dalam kehidupan sosial.[4]

Immanuel Kant mendefinisikan etika sebagai prinsip moral yang bersifat universal dan rasional. Kant menegaskan bahwa tindakan manusia dinilai bermoral apabila dilakukan berdasarkan kewajiban moral, bukan semata-mata karena kepentingan pribadi atau konsekuensi tertentu. Prinsip etika menurut Kant berlandaskan pada *categorical imperative*, yaitu perintah moral yang menuntut manusia bertindak sedemikian rupa sehingga tindakannya dapat dijadikan hukum universal.[5]

Dalam kajian etika modern, Clifford G. Christians memandang etika sebagai sistem nilai yang mengatur tindakan manusia dalam relasi sosial, khususnya dalam komunikasi. Ia menekankan bahwa etika berfungsi sebagai pedoman moral untuk memastikan bahwa tindakan manusia tidak merugikan orang lain serta menghormati nilai kebenaran dan tanggung jawab sosial.[6]

Denis McQuail menjelaskan bahwa etika merupakan seperangkat prinsip moral yang membimbing perilaku individu dalam kehidupan sosial dan komunikasi publik. Menurutnya, etika menjadi dasar penting dalam menentukan apakah suatu tindakan komunikasi dapat diterima secara moral atau tidak. Dalam konteks komunikasi sosial, etika menuntut adanya tanggung jawab moral terhadap dampak yang ditimbulkan oleh pesan yang disampaikan kepada masyarakat.[7]

Dalam perspektif ilmu sosial, Soerjono Soekanto mendefinisikan etika sebagai nilai dan norma yang menjadi pedoman perilaku manusia dalam masyarakat. Etika berkaitan dengan standar moral yang mengatur bagaimana individu harus bersikap terhadap sesamanya dalam kehidupan sosial. Melalui etika, masyarakat membangun sistem nilai yang berfungsi menjaga keteraturan sosial dan mencegah terjadinya konflik dalam interaksi sosial.[8]

Deddy Mulyana memandang etika sebagai seperangkat prinsip moral yang menjadi dasar bagi perilaku manusia dalam komunikasi dan interaksi sosial. Dalam pandangannya, etika berperan penting dalam membentuk kualitas hubungan antar individu, terutama dalam proses pertukaran informasi

---

[4] Aristotle, *Nicomachean Ethics*, New York: Oxford University Press, 2009, hal. 23.

[5] Immanuel Kant, *Groundwork of the Metaphysics of Morals*, Cambridge: Cambridge University Press, 2012, hal. 31.

[6] Clifford G. Christians, *Communication Ethics and Universal Values*, London: Sage Publications, 1997, hal. 17.

[7] Denis McQuail, *McQuail's Mass Communication Theory*, London: Sage Publications, 2010, hal. 74.

[8] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015, hal. 62.

dan makna. Komunikasi yang tidak dilandasi oleh etika berpotensi menimbulkan manipulasi, mis-informasi, dan konflik sosial.[9]

Dalam perspektif Islam, etika sering dikaitkan dengan konsep *akhlaq* yang merujuk pada perilaku manusia yang selaras dengan nilai-nilai ilahiah. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa etika atau akhlak merupakan kondisi jiwa yang mendorong seseorang melakukan perbuatan secara spontan tanpa memerlukan pertimbangan panjang. Menurutnya, akhlak yang baik terbentuk melalui latihan moral dan pembiasaan yang didasarkan pada ajaran agama.[10]

Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan bahwa etika dalam Islam merupakan sistem nilai yang bersumber dari wahyu dan berfungsi mengatur perilaku manusia dalam kehidupan individu maupun sosial. Menurutnya, etika Islam tidak hanya menekankan aspek moralitas pribadi, tetapi juga tanggung jawab sosial dalam membangun masyarakat yang adil dan berkeadaban.[11]

Dalam kajian etika sosial modern, Francis Fukuyama memandang etika sebagai dasar pembentukan kepercayaan sosial (*social trust*) dalam masyarakat. Menurutnya, keberadaan nilai moral yang kuat memungkinkan terciptanya hubungan sosial yang stabil dan produktif. Etika berfungsi sebagai fondasi bagi terbentuknya kerja sama sosial yang saling menguntungkan antara individu dan kelompok.[12]

Anthony Giddens menjelaskan bahwa etika berkaitan dengan refleksi manusia terhadap tindakan moral yang memengaruhi kehidupan sosial. Dalam pandangannya, etika menjadi bagian penting dari struktur sosial karena membentuk pola perilaku yang diharapkan dalam masyarakat. Melalui etika, individu belajar memahami konsekuensi moral dari tindakannya terhadap orang lain.[13]

Piotr Sztompka menekankan bahwa etika merupakan unsur penting dalam membangun solidaritas sosial dalam masyarakat. Nilai-nilai moral yang dianut oleh masyarakat berfungsi sebagai pedoman perilaku yang memungkinkan terciptanya hubungan sosial yang stabil. Tanpa adanya etika, interaksi sosial cenderung dipenuhi oleh konflik kepentingan dan ketidakpercayaan antar individu.[14]

Dalam kajian komunikasi modern, Stephen W. Littlejohn menjelaskan bahwa etika merupakan sistem nilai yang memandu individu dalam membuat keputusan moral dalam proses komunikasi. Etika komunikasi menuntut

---

[9] Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015, hal. 76.

[10] Al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2005, hal. 52.

[11] Yusuf Al-Qaradawi, *Min Fiqh al-Daulah fi al-Islam*, Kairo: Dar al-Syuruq, 1997, hal. 123

[12] Francis Fukuyama, *Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity*, New York: Free Press, 1995, hal. 36.

[13] Anthony Giddens, *Sociology*, Cambridge: Polity Press, 2017, hal. 78.

[14] Piotr Sztompka, *The Sociology of Social Change*, Oxford: Blackwell, 1993, hal. 98.

individu untuk mempertimbangkan dampak moral dari pesan yang disampaikan kepada orang lain.[15]

Jürgen Habermas memandang etika sebagai prinsip moral yang terbentuk melalui proses komunikasi rasional dalam ruang publik. Dalam teorinya tentang *discourse ethics*, Habermas menekankan bahwa norma moral yang sah harus dapat diterima oleh semua pihak melalui dialog yang rasional dan bebas dari dominasi. Etika dengan demikian tidak hanya ditentukan oleh otoritas tertentu, tetapi juga melalui proses komunikasi yang terbuka dan partisipatif dalam masyarakat.[16]

Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa etika merupakan sistem nilai moral yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan individu dan sosial. Etika tidak hanya berkaitan dengan aturan normatif tentang baik dan buruk, tetapi juga berfungsi sebagai landasan moral yang membentuk hubungan sosial yang adil dan harmonis. Dalam konteks komunikasi antara pemimpin dan rakyat, etika memiliki peran penting sebagai pedoman moral yang memastikan bahwa proses komunikasi berlangsung secara jujur, adil, dan menghormati martabat manusia. etika menjadi fondasi penting dalam membangun relasi sosial yang berkeadaban dan berkeadilan dalam kehidupan masyarakat.

2. Etika Komunikasi

Komunikasi dalam kehidupan sosial tidak hanya dipahami sebagai proses penyampaian pesan antar individu, tetapi juga sebagai tindakan yang memiliki dimensi moral. Setiap tindakan komunikasi melibatkan nilai, sikap, dan tanggung jawab yang mempengaruhi hubungan antara komunikator dan komunikan. Konsep etika komunikasi muncul sebagai upaya untuk memastikan bahwa proses komunikasi berlangsung secara jujur, adil, dan menghormati martabat manusia. Dalam kajian ilmu komunikasi, etika komunikasi dipahami sebagai seperangkat prinsip moral yang mengatur bagaimana seseorang seharusnya berbicara, menyampaikan informasi, dan merespons pesan orang lain dalam interaksi sosial.[17]

Konsep etika komunikasi juga berkaitan dengan tanggung jawab moral komunikator dalam menyampaikan pesan kepada orang lain. Dalam setiap tindakan komunikasi, komunikator memiliki kewajiban moral untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan tidak menyesatkan atau merugikan pihak lain. Tanggung jawab ini menjadi semakin penting ketika

---

[15] Stephen W. Littlejohn dan Karen A. Foss, *Theories of Human Communication*, Illinois: Waveland Press, 2009, hal. 35.

[16] Jürgen Habermas, *Moral Consciousness and Communicative Action*, Cambridge: MIT Press, 1990, hal. 65

[17] Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015, hal 118.

komunikasi dilakukan dalam ruang publik, di mana pesan yang disampaikan dapat mempengaruhi pandangan dan perilaku masyarakat.[18]

Dalam interaksi sosial, etika komunikasi juga berfungsi sebagai pedoman yang menjaga keseimbangan hubungan antara individu dalam masyarakat. Komunikasi yang tidak memperhatikan nilai etika sering kali menimbulkan kesalahpahaman atau bahkan konflik karena pesan yang disampaikan dapat menyinggung atau merugikan pihak lain.[19] Etika komunikasi menekankan pentingnya sikap saling menghormati dalam proses komunikasi. Ketika individu berkomunikasi dengan memperhatikan nilai etika, maka interaksi sosial akan berkembang secara lebih harmonis karena setiap pihak merasa dihargai dalam proses komunikasi tersebut.

Selain menjaga keharmonisan hubungan sosial, etika komunikasi juga berperan penting dalam membangun kepercayaan antara individu dalam masyarakat. Kepercayaan merupakan unsur penting dalam hubungan sosial karena memungkinkan individu bekerja sama dalam berbagai aktivitas kehidupan. Kepercayaan tidak dapat terbentuk apabila komunikasi dilakukan secara manipulatif atau tidak jujur. Etika komunikasi menuntut adanya konsistensi antara pesan yang disampaikan dengan fakta yang sebenarnya. Ketika komunikasi dilakukan secara jujur dan transparan, maka kepercayaan antara individu akan berkembang secara lebih kuat dalam masyarakat.[20]

Dalam konteks komunikasi publik, etika komunikasi menjadi semakin penting karena pesan yang disampaikan dapat mempengaruhi opini dan perilaku masyarakat secara luas. Komunikasi publik sering kali melibatkan isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat sehingga setiap pesan yang disampaikan harus mempertimbangkan dampak sosialnya. Etika komunikasi membantu memastikan bahwa komunikasi publik tidak digunakan untuk menyebarkan informasi yang menyesatkan atau memanipulasi masyarakat demi kepentingan tertentu.[21]

Etika komunikasi juga berkaitan dengan penggunaan bahasa dalam interaksi sosial. Bahasa merupakan alat utama yang digunakan manusia untuk menyampaikan pikiran dan perasaan kepada orang lain. Namun penggunaan bahasa yang tidak memperhatikan nilai etika dapat menimbulkan dampak negatif dalam hubungan sosial. Kata-kata yang kasar, menghina, atau

---

[18] Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016, hal 74.

[19] Joseph A Devito., *Human Communication: The Basic Course*, Boston: Pearson Education, 2015, hal 61.

[20] Stehen W Littlejohn., &Karen A Foss., *Theories of Human Communication*, Illinois: Waveland Press, 2009, hal 210.

[21] Anwar Arifin, *Komunikasi Politik: Paradigma, Teori, dan Praktik*, Jakarta: Balai Pustaka, 2011, hal 85.

merendahkan orang lain dapat merusak hubungan sosial dan menimbulkan konflik dalam masyarakat.[22]

Selain berkaitan dengan penggunaan bahasa, etika komunikasi juga berkaitan dengan sikap mendengarkan dalam proses komunikasi. Komunikasi yang baik tidak hanya melibatkan kemampuan berbicara, tetapi juga kemampuan mendengarkan secara empati. Mendengarkan secara empati berarti memberikan perhatian yang tulus terhadap pesan yang disampaikan oleh orang lain serta berusaha memahami sudut pandang mereka. Sikap ini penting dalam menjaga kualitas hubungan sosial karena menunjukkan penghargaan terhadap orang lain sebagai mitra komunikasi.[23]

Etika komunikasi juga memiliki peran penting dalam mencegah penyalahgunaan informasi dalam masyarakat. Dalam era informasi modern, arus informasi berkembang sangat cepat melalui berbagai media komunikasi. Kondisi ini membuka peluang bagi penyebaran informasi yang tidak akurat atau bahkan menyesatkan. Etika komunikasi menuntut individu untuk bertanggung jawab dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat. Informasi yang disampaikan harus berdasarkan fakta yang benar serta tidak dimaksudkan untuk merugikan pihak lain.[24]

Dalam kehidupan organisasi maupun pemerintahan, etika komunikasi juga berfungsi sebagai pedoman dalam hubungan antara pemimpin dan anggota masyarakat. Pemimpin sering kali berada dalam posisi yang memiliki akses terhadap informasi yang penting bagi masyarakat. Pemimpin memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan informasi tersebut secara jujur dan transparan. Komunikasi yang dilakukan secara manipulatif atau menyesatkan dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin.[25]

Etika komunikasi juga berkaitan dengan upaya menjaga keadilan dalam proses komunikasi. Dalam interaksi sosial, tidak semua individu memiliki posisi yang sama dalam hal kekuasaan atau pengaruh. Kondisi ini dapat menyebabkan komunikasi menjadi tidak seimbang apabila pihak yang lebih kuat menggunakan kekuasaannya untuk mendominasi proses komunikasi. Etika komunikasi membantu memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapatnya dalam proses komunikasi.[26]

---

[22] Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktik*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011, hal 32.

[23] Richard West & Lynn H Turner., *Introducing Communication Theory*, New York: McGraw-Hill, 2010, hal 48.

[24] Nurudin, *Sistem Komunikasi Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017, hal 64.

[25] M. Agus Hardjana., *Komunikasi Intrapersonal dan Interpersonal*, Yogyakarta: Kanisius, 2016, hal 92.

[26] Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013, hal 147.

Selain menjaga keadilan, etika komunikasi juga berperan dalam membangun budaya dialog dalam masyarakat. Dialog merupakan bentuk komunikasi yang menekankan pertukaran gagasan secara terbuka antara individu atau kelompok yang memiliki pandangan yang berbeda. Budaya dialog hanya dapat berkembang apabila individu memiliki komitmen terhadap nilai-nilai etika seperti kejujuran, keterbukaan, dan penghormatan terhadap pandangan orang lain. Tanpa etika komunikasi, dialog mudah berubah menjadi perdebatan yang destruktif dan merusak hubungan sosial.[27]

Etika komunikasi juga memiliki hubungan erat dengan pembentukan karakter individu dalam masyarakat. Individu yang terbiasa berkomunikasi secara jujur, santun, dan menghargai orang lain cenderung memiliki karakter moral yang kuat dalam kehidupan sosial. Sebaliknya, individu yang terbiasa menggunakan komunikasi sebagai alat manipulasi atau dominasi cenderung mengembangkan karakter yang tidak etis dalam hubungan sosial.[28]

Dalam perspektif sosial yang lebih luas, etika komunikasi juga berfungsi sebagai dasar bagi terciptanya keteraturan sosial dalam masyarakat. Ketika individu mematuhi prinsip-prinsip etika dalam komunikasi, maka hubungan sosial akan berkembang secara lebih tertib karena setiap individu memahami batas-batas perilaku yang dapat diterima dalam interaksi sosial. Sebaliknya, ketika etika komunikasi diabaikan, maka hubungan sosial berpotensi dipenuhi oleh konflik dan kesalahpahaman.[29]

3. Etika Komunikasi Sekuler

Etika komunikasi sekuler menempatkan moralitas komunikasi sebagai konstruksi sosial yang tidak bergantung pada nilai-nilai transendental, tetapi pada kesepakatan rasional dan norma sosial masyarakat. Langerak menegaskan bahwa etika sekuler berupaya menjelaskan dasar moralitas tanpa harus mengandalkan otoritas keagamaan, melainkan pada tanggung jawab manusia terhadap sesama dalam ruang publik.[30] Dengan demikian, dalam konteks relasi pemimpin dan rakyat, etika komunikasi sekuler berfokus pada prinsip kejujuran, transparansi, dan penghormatan terhadap otonomi warga negara.

Etika komunikasi sekuler juga berakar pada gagasan liberalisme politik yang menekankan kesetaraan dan kebebasan berekspresi. Holdo menjelaskan bahwa komunikasi etis antara pemimpin dan rakyat harus dilandasi prinsip

---

[27] Jalaluddin Rahmat, *Retorika Modern: Pendekatan Praktis*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014, hal 73.

[28] Muhammad Mulyadi, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, Bandung: Alfabeta, 2018, hal 108.

[29] Suryanto, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Bandung: Pustaka Setia, 2015, hal 52.

[30] Micheal Langerak, "How Do Theological And Secular Ethics Relate And Compare?," *Religions*, 2022.

keautentikan dan keterpercayaan, di mana pemimpin dinilai dari komitmen moralnya terhadap kebenaran publik, bukan sekadar kepatuhan terhadap sistem politik.[31] Paradigma ini menghindari legitimasi kekuasaan yang bersumber dari tradisi keagamaan dan menggantinya dengan etika rasional berbasis kesetaraan sosial.

Dalam sistem sekuler, etika komunikasi juga berfungsi sebagai mekanisme menjaga transparansi publik. Gavriluță dan Cucu menyoroti pentingnya kode etik komunikasi dalam administrasi publik, terutama dalam menghadapi disrupsi media digital yang memungkinkan manipulasi informasi.[32] Prinsip sekuler menekankan bahwa komunikasi pemerintahan harus menjunjung kejujuran dan tanggung jawab sosial terhadap warga.

Etika komunikasi sekuler juga tercermin dalam praktik hubungan masyarakat (*public relations*) modern. Jahiri menyatakan bahwa etika komunikasi yang baik menuntut transparansi, integritas, dan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai dasar legitimasi sosial lembaga publik.[33] Dalam hal ini, etika komunikasi sekuler berfungsi sebagai pengikat moral bagi lembaga dan pemimpin publik untuk bertanggung jawab terhadap masyarakat.

Eliopoulos memperkuat gagasan tersebut dengan menegaskan bahwa kepemimpinan etis dalam paradigma sekuler tidak bergantung pada keimanan, tetapi pada integritas personal dan komitmen terhadap kebenaran universal.[34] Pemimpin yang etis dalam konteks sekuler mengutamakan kesejahteraan publik berdasarkan keadilan distributif dan moralitas rasional.

Secara historis, akar paradigma etika sekuler dapat ditelusuri melalui rasionalisme Barat dan etika Kantian yang menempatkan kewajiban moral sebagai prinsip universal. Mihail menunjukkan bahwa sekularisasi etika juga dipengaruhi oleh ajaran Protestan tentang tanggung jawab profesional dan dedikasi terhadap panggilan sosial (*vocation*) yang rasional.[35] Paradigma ini menumbuhkan model kepemimpinan yang berorientasi pada pelayanan publik dan efisiensi sosial.

Dalam konteks sosial-politik, Das menguraikan bahwa sekularisme modern berfungsi untuk menjaga netralitas negara terhadap agama, sekaligus

---

[31] Karl Holdo, "How Can We Trust a Political Leader? Ethics, Institutions, and Relational Theory," *Ethical Theory and Moral Practice*, 2019, hal. 124.

[32] Daniel Gavriluţă dan Bogdan Cucu, "Communication Ethics in Local Public Administration in the Age of Facebook," *Postmodern Openings*, 2017, hal. 54.

[33] Besnik Jahiri, "Ethical Communication in Public Relations," *Journal of Education and Social Research*, 2013, hal. 243.

[34] Stephanie Eliopoulos, "On Ethical Leadership: A Case for Secular Ethics," *Journal of Leadership Studies*, 2011, hal. 34.

[35] Rariţa Mihail, "Protestant Ethics and the Secularization of Vocation," dalam *Rethinking Social Action: Core Values in Practice*, Iasi: Lumen Proceedings, 2018, hal. 417.

memastikan komunikasi politik yang adil antara pemimpin dan rakyat.[36] Paradigma sekuler mengharuskan pemimpin untuk membangun konsensus berdasarkan hukum rasional, bukan dogma ideologis.

Etika komunikasi sekuler juga berkembang dalam konteks media. Hile, Msughter, dan Aliyu menegaskan bahwa praktik komunikasi publik yang etis harus menghindari manipulasi dan penyalahgunaan informasi untuk kepentingan kekuasaan.[37] Dalam paradigma sekuler, kejujuran informasi menjadi instrumen moral yang menjamin kepercayaan sosial antara pemimpin dan rakyat.

Secara teoritis, Shaw memperkenalkan konsep *post-secular ethics of care*, yaitu bentuk etika sekuler baru yang mengakui peran moralitas publik tanpa menghapus nilai-nilai spiritualitas sosial.[38] Pendekatan ini menunjukkan bahwa paradigma sekuler tidak selalu bertentangan dengan nilai moral religius, melainkan dapat saling melengkapi dalam konteks tanggung jawab sosial.

Etika komunikasi sekuler dalam relasi pemimpin dan rakyat menekankan bahwa moralitas publik bersumber dari kesadaran kolektif, bukan dari otoritas transendental. O'Neill menegaskan bahwa komunikasi etis hanya mungkin terwujud ketika masyarakat membangun kepercayaan melalui kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab rasional dalam ruang publik.[39] Dengan demikian, paradigma sekuler tidak menolak nilai moral, tetapi menempatkannya dalam kerangka kemanusiaan universal dan dialog sosial yang inklusif.

Etika sekuler pada dasarnya berusaha membangun kerangka moral yang bebas dari nilai-nilai teologis dengan mengandalkan rasionalitas manusia dan kesepakatan sosial. Namun, pendekatan ini memiliki keterbatasan mendasar dalam menjamin keadaban komunikasi publik. Langerak menjelaskan bahwa etika sekuler sering gagal menyediakan landasan objektif bagi norma moral karena tidak memiliki sumber transendental yang mengikat secara universal.[40] Akibatnya, keadaban dalam komunikasi menjadi relatif terhadap kepentingan dan konteks sosial tertentu.

Dalam konteks modern, Hamid menunjukkan bahwa perkembangan etika sekuler melewati empat fase utama, etika Yunani, abad pertengahan, modern, dan kontemporer namun seluruhnya tetap menghadapi problem moral

---

[36] Anamika Das, "Secularism and Communalism in India: Role of the State and the Citizens," *International Journal of Political Science and Governance*, 2022, hal. 29

[37] Martha Msoo Hile, Msughter Terna, dan Aliyu Abdullahi, "Secularism and Ethical Issues in Media Practice as a Bane for National Development," *Siasat*, 2023, hal. 65.

[38] Jonathan Shaw, "Introducing Post-Secular Social Work: Towards A Post-Liberal Ethics Of Care," *British Journal Of Social Work* 48, 2018, hal.29

[39] Jonathan Shaw, "Introducing Post-Secular Social Work: Towards a Post-Liberal Ethics of Care," *British Journal of Social Work*, 2018, hal. 41.

[40] Michael Langerak, "How Do Theological and Secular Ethics Relate and Compare?" *Philosophia Reformata*, 2022, hal. 92.

relativisme dan nihilisme nilai.[41] Etika tanpa dimensi spiritual kehilangan otoritas normatif untuk menuntun perilaku manusia dalam ruang publik yang pluralistik.

Menurut Panyshev, etika sekuler hanya mampu mengatur hubungan sosial berdasarkan kesepakatan pragmatis, sementara etika religius menyentuh dimensi spiritual manusia yang lebih dalam.[42] Dalam komunikasi, hal ini menyebabkan lemahnya tanggung jawab moral karena orientasi utama etika sekuler adalah utilitarian, bukan moral transendental.

Akhmetova menilai bahwa pendekatan sekuler terhadap etika gagal menghasilkan stabilitas sosial dan moral, karena meniadakan peran agama sebagai sumber nilai kemanusiaan universal.[43] Menurut pandangan Islam sebagaimana dikemukakan Said Nursi, moralitas sejati hanya dapat tumbuh dari hubungan manusia dengan Tuhan, bukan sekadar dari konsensus rasional.

Martynenko dalam kajian tentang *post-secular ethics* menegaskan bahwa keterputusan antara ilmu pengetahuan dan nilai religius telah menciptakan krisis moral global, di mana komunikasi publik kehilangan arah etikanya.[44] Pendekatan sekuler gagal menjaga keseimbangan antara rasionalitas dan spiritualitas yang diperlukan dalam komunikasi sosial yang beradab.

De Villiers berargumen bahwa sekularisasi telah melemahkan peran nilai-nilai etis dalam ranah publik, khususnya dalam konteks demokrasi liberal yang menekankan kebebasan individu tanpa tanggung jawab moral kolektif.[45] Akibatnya, komunikasi dalam masyarakat sekuler sering kali terjebak dalam konflik kepentingan dan polarisasi sosial.

Vorster menyebut bahwa etika sekuler mengalami krisis relevansi karena tidak mampu menumbuhkan orientasi moral terhadap kebaikan bersama, berbeda dengan etika teistik yang berakar pada wahyu dan kesadaran spiritual.[46] Hal ini berdampak pada degradasi etika komunikasi yang cenderung berorientasi pada keuntungan politis.

---

[41] Sharmin Hamid, "Secular and Theological Ethics: A Brief Overview," *Philosophy and Progress*, 2024, hal. 17.

[42] Aleksandr Panyshev, "Ethics in the Secular and Religious Life of Man," *European Journal of Science and Theology*, 2020, hal. 44.

[43] Ercüment Akhmetova, "Said Nursi on Secularism, Religious Rights, Ethics, and Education," Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought and Civilization, 2021, hal. 86.

[44] Oksana Martynenko, "Post-Secular View on Ethical Discourse of Technoscience," *European Philosophical and Historical Discourse*, 2021, hal. 52.

[45] D. Etienne de Villiers, "Christian Ethics and Secularisation: Business as Usual?" *Verbum et Ecclesia*, 2018, hal. 3.

[46].M. Vorster, "Christian Ethics in the Face of Secularism," *Verbum et Ecclesia*, 2012, hal. 4.

Shaw memperkenalkan konsep *post-secular care ethics* sebagai koreksi terhadap etika sekuler yang cenderung menihilkan dimensi spiritual dalam praktik sosial.[47] Ia menegaskan bahwa etika sosial tanpa nilai keagamaan akan gagal menciptakan solidaritas manusiawi yang sejati dalam komunikasi lintas budaya.

Loobuyck menegaskan bahwa etika teistik lebih mampu menegakkan kewajiban moral karena berlandaskan pada sumber normatif yang mengikat, sedangkan etika sekuler hanya bersifat konvensional dan mudah berubah.[48] Oleh karena itu, dalam menjamin keadaban komunikasi, pendekatan sekuler perlu dilengkapi dengan dimensi spiritual yang memberi arah moral universal dan stabil bagi kehidupan sosial manusia.

4. Etika Rasional Instrumental dan Transendental

Dalam perspektif ilmu komunikasi modern di Indonesia, rasionalitas instrumental sering muncul dalam praktik komunikasi politik yang menempatkan pesan sebagai alat untuk memengaruhi opini publik. Komunikasi tidak lagi dipahami sebagai proses dialogis yang bertujuan membangun pemahaman bersama, melainkan sebagai strategi persuasi yang diarahkan untuk memperoleh dukungan masyarakat. Dalam konteks ini, pesan komunikasi disusun secara strategis agar mampu menghasilkan efek tertentu pada khalayak, baik dalam bentuk dukungan politik maupun legitimasi kekuasaan.[49]

Rasionalitas instrumental merupakan konsep yang menjelaskan cara manusia menggunakan akal untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien. Dalam kerangka ini, tindakan dinilai berdasarkan kemampuan mencapai hasil yang diinginkan dengan menggunakan sarana yang paling efektif. Rasionalitas instrumental menempatkan akal sebagai alat untuk menghitung konsekuensi dan memilih strategi terbaik guna mencapai tujuan praktis dalam kehidupan sosial.[50]

Dalam tradisi sosiologi modern, rasionalitas instrumental dipahami sebagai bentuk rasionalitas yang berorientasi pada efisiensi tindakan. Weber menyebutnya sebagai *zweckrationalität*, yaitu tindakan rasional yang diarahkan pada tujuan tertentu dengan mempertimbangkan hubungan antara sarana dan hasil yang diharapkan. Individu yang bertindak secara instrumental

---

[47] Jonathan Shaw, "Introducing Post-Secular Social Work: Towards a Post-Liberal Ethics of Care," *British Journal of Social Work*, 2018, hal. 33

[48] Patrick Loobuyck, "The Moral Requirement in Theistic and Secular Ethics," *The Heythrop Journal*, 2010, hal. 198.

[49] Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018, hal. 118

[50] Max Weber, *Economy and Society*, Berkeley: University of California Press, 1978, hal. 2

akan menilai berbagai alternatif tindakan berdasarkan efektivitasnya dalam mencapai tujuan tersebut.[51]

Ciri utama rasionalitas instrumental adalah orientasinya pada kalkulasi rasional mengenai manfaat dan konsekuensi tindakan. Dalam pendekatan ini, keputusan moral atau sosial tidak didasarkan pada nilai intrinsik, melainkan pada pertimbangan utilitas dan efektivitas. Oleh karena itu, tindakan komunikasi dalam kerangka rasionalitas instrumental sering dipandang sebagai strategi untuk memengaruhi orang lain demi mencapai tujuan tertentu.[52]

Karakteristik lain dari rasionalitas instrumental adalah penekanannya pada hubungan antara sarana dan tujuan. Rasionalitas ini memandang tindakan manusia sebagai proses memilih sarana yang paling efisien untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dalam konteks sosial dan politik, pendekatan ini sering digunakan untuk merancang strategi komunikasi yang efektif dalam memengaruhi opini publik atau membangun legitimasi kekuasaan.[53]

Rasionalitas instrumental juga ditandai oleh kecenderungan untuk mengukur keberhasilan tindakan berdasarkan hasil yang dapat diamati secara empiris. Keberhasilan komunikasi dalam paradigma ini tidak diukur dari nilai moral atau kebenaran pesan, tetapi dari dampak yang dihasilkan terhadap perilaku khalayak. Oleh karena itu, komunikasi sering diperlakukan sebagai alat persuasi yang bertujuan menciptakan perubahan sikap atau tindakan masyarakat.[54]

Selain itu, rasionalitas instrumental memiliki ciri dominasi orientasi pragmatis dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks organisasi dan kepemimpinan, pendekatan ini mendorong pemimpin untuk memilih strategi komunikasi yang dianggap paling efektif dalam mencapai tujuan institusional. Rasionalitas semacam ini sering digunakan dalam praktik manajemen modern yang menekankan efisiensi, produktivitas, dan hasil yang terukur.[55]

Dalam perspektif ilmu komunikasi di Indonesia, rasionalitas instrumental juga tampak dalam praktik komunikasi politik yang menempatkan pesan sebagai sarana untuk memengaruhi opini publik. Komunikasi dipahami sebagai strategi yang dirancang secara sistematis untuk membangun citra, memperoleh dukungan masyarakat, dan mempertahankan

---

[51] Max Weber, *Economy and Society*, Berkeley: University of California Press, 1978, hal. 2

[52] Jürgen Habermas, *The Theory of Communicative Action*, Boston: Beacon Press, 1984, hal. 28

[53] Denis McQuail, *McQuail's Mass Communication Theory*, London: Sage Publications, 2010, hal. 34

[54] Stephen W. Littlejohn dan Karen A. Foss, *Theories of Human Communication*, Illinois: Waveland Press, 2009, hal. 237

[55] Gary Yukl, *Leadership in Organizations*, New Jersey: Pearson Education, 2013, hal. 271

legitimasi kekuasaan. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi sering kali diposisikan sebagai alat strategis dalam proses politik. [56]

Meskipun rasionalitas instrumental memberikan kontribusi penting dalam pengembangan teori sosial modern, pendekatan ini juga menuai kritik karena dianggap mengabaikan dimensi moral dan nilai-nilai kemanusiaan. Ketika rasionalitas instrumental mendominasi kehidupan sosial, tindakan manusia cenderung dinilai hanya berdasarkan efektivitasnya, tanpa mempertimbangkan aspek etis yang lebih mendalam. Oleh karena itu, banyak pemikir modern menekankan perlunya pendekatan etika yang lebih komprehensif yang tidak hanya mempertimbangkan efisiensi, tetapi juga nilai moral dan tanggung jawab sosial dalam komunikasi manusia.[57]

Pendekatan rasional instrumental dalam komunikasi politik juga berkaitan erat dengan upaya membangun citra dan pengaruh di ruang publik. Pemimpin politik sering menggunakan berbagai media komunikasi untuk membentuk persepsi masyarakat terhadap kebijakan atau tindakan mereka. Dalam praktiknya, komunikasi semacam ini cenderung menempatkan publik sebagai objek persuasi yang harus diyakinkan melalui strategi retorika dan simbol politik tertentu.[58]

Selain itu, rasionalitas instrumental dalam komunikasi sosial juga berkaitan dengan kepentingan kekuasaan dan pengendalian informasi. Dalam sistem komunikasi modern, pesan sering kali dikonstruksi secara selektif untuk memengaruhi arah opini publik. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi dapat menjadi alat dominasi simbolik yang digunakan oleh kelompok tertentu untuk mempertahankan kepentingannya dalam struktur sosial.[59]

Sebaliknya, etika transendental menempatkan komunikasi dalam kerangka nilai moral yang lebih luas, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama manusia. Dalam pandangan ini, komunikasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana pertukaran informasi, tetapi juga sebagai media penyampaian nilai-nilai kebaikan dan kebenaran. Etika komunikasi yang berlandaskan nilai spiritual akan menuntun manusia untuk menggunakan bahasa secara bijaksana dan bertanggung jawab dalam kehidupan sosial.[60]

Etika transendental merupakan pendekatan etika yang menempatkan sumber moralitas pada nilai-nilai yang melampaui rasionalitas manusia dan kesepakatan sosial semata. Dalam perspektif ini, standar moral tidak hanya

---

[56] Hafied Cangara, *Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018, hal. 92

[57] Alasdair MacIntyre, *After Virtue*, Notre Dame: University of Notre Dame Press, 2007, hal. 23

[58] Hafied Cangara, *Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018, hal. 9

[59] Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi*, Jakarta: Kencana, 2017, hal. 8

[60] Abudin Nata, *Akhlak Tasawuf*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016, hal. 148.

ditentukan oleh pertimbangan pragmatis atau rasional, tetapi juga oleh prinsip-prinsip metafisik yang bersumber dari realitas transenden. Oleh karena itu, etika transendental memandang tindakan manusia sebagai bagian dari tanggung jawab moral yang memiliki dimensi spiritual dan religius.[61]

Secara konseptual, etika transendental memandang bahwa nilai moral bersifat universal dan tidak sepenuhnya bergantung pada relativitas budaya atau kepentingan sosial. Nilai seperti keadilan, kebenaran, dan kejujuran dipahami sebagai prinsip yang memiliki legitimasi moral yang lebih tinggi daripada sekadar konsensus manusia. Dengan demikian, etika transendental berusaha menjaga agar tindakan manusia tetap berorientasi pada nilai kebaikan yang bersifat absolut dan melampaui kepentingan pragmatis.[62]

Salah satu ciri utama etika transendental adalah keterkaitannya dengan dimensi spiritual dalam kehidupan manusia. Dalam kerangka ini, moralitas dipahami sebagai bagian dari hubungan manusia dengan Tuhan, sehingga tindakan etis tidak hanya berkaitan dengan kepentingan sosial, tetapi juga dengan tanggung jawab religius. Etika semacam ini menuntut manusia untuk menempatkan nilai keimanan sebagai dasar dalam menentukan sikap dan perilaku dalam kehidupan sosial.[63]

Ciri lain dari etika transendental adalah orientasinya pada integrasi antara dimensi rasional dan spiritual dalam kehidupan manusia. Etika ini tidak menolak penggunaan akal, tetapi menempatkan rasionalitas dalam kerangka nilai moral yang lebih tinggi. Dengan demikian, rasionalitas manusia diarahkan oleh prinsip moral yang bersumber dari wahyu atau nilai transenden, sehingga tindakan manusia tidak semata-mata ditentukan oleh kepentingan pragmatis.[64]

Selain itu, etika transendental juga memiliki ciri orientasi pada tanggung jawab moral yang bersifat universal. Dalam perspektif ini, setiap tindakan manusia memiliki konsekuensi moral yang tidak hanya berdampak pada kehidupan sosial, tetapi juga pada pertanggungjawaban spiritual. Oleh karena itu, etika transendental menuntut manusia untuk menjaga integritas moral dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam praktik komunikasi sosial dan kepemimpinan.[65]

Dengan demikian, etika transendental dapat dipahami sebagai sistem moral yang mengintegrasikan dimensi rasional, spiritual, dan sosial dalam

---

[61] Seyyed Hossein Nasr, *The Study Quran*, New York: HarperOne, 2015, hal. 19

[62] Ismail Raji al-Faruqi, *Al-Tawhid: Its Implications for Thought and Life*, Herndon: IIIT, 1992, hal. 63

[63] Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Akhlaq al-Islamiyyah*, Kairo: Dar al-Syuruq, 2010, hal. 37

[64] M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Jakarta: Mizan, 2007, hal. 29

[65] M. Dawam Rahardjo, *Etika Sosial dalam Kehidupan Berbangsa*, Jakarta: Kompas, 2013, hal. 9

kehidupan manusia. Etika ini memberikan landasan moral yang lebih kokoh dibandingkan dengan pendekatan etika yang hanya bertumpu pada rasionalitas instrumental, karena menempatkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan sebagai prinsip universal yang melampaui kepentingan pragmatis manusia.[66]

Etika transendental juga menekankan bahwa komunikasi harus mencerminkan akhlak yang mulia, seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab moral. Nilai-nilai tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pedoman perilaku individu, tetapi juga sebagai dasar dalam membangun relasi sosial yang harmonis antara pemimpin dan masyarakat. Dalam konteks ini, komunikasi yang beretika tidak hanya menekankan efektivitas pesan, tetapi juga memperhatikan dampak moral dari setiap perkataan yang disampaikan.[67]

Etika transendental bertujuan membangun masyarakat yang berkeadaban dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Nilai-nilai moral dalam komunikasi tidak hanya didasarkan pada rasionalitas manusia, tetapi juga pada ajaran wahyu yang mengarahkan manusia untuk menjaga kejujuran, keadilan, dan kasih sayang dalam setiap interaksi sosial.

5. Etika dalam Interaksi Sosial

Etika dalam interaksi sosial merupakan aspek penting yang menentukan kualitas hubungan antar individu dalam kehidupan masyarakat. Dalam kajian ilmu sosial, interaksi sosial tidak hanya dipahami sebagai proses hubungan antara individu atau kelompok, tetapi juga sebagai ruang di mana nilai-nilai moral diterapkan dan diuji dalam praktik kehidupan sehari-hari. Etika berfungsi sebagai pedoman yang mengatur bagaimana individu seharusnya bertindak ketika berhadapan dengan orang lain dalam berbagai situasi sosial. Tanpa adanya etika, interaksi sosial berpotensi berkembang menjadi relasi yang dipenuhi oleh konflik kepentingan, dominasi, atau bahkan manipulasi.[68]

Dalam kehidupan masyarakat, interaksi sosial merupakan proses yang terus berlangsung dan menjadi dasar terbentuknya struktur sosial. Proses ini melibatkan berbagai bentuk hubungan seperti kerja sama, kompetisi, konflik, dan akomodasi. Setiap bentuk interaksi tersebut memerlukan pedoman etis agar hubungan sosial tidak berkembang menjadi relasi yang merugikan pihak lain. Etika dalam interaksi sosial membantu individu memahami batasan

---

[66] Peter G. Northouse, *Leadership: Theory and Practice*, California: Sage Publications, 2016, hal. 343

[67] M. Dawam Rahardjo, *Etika Sosial dalam Kehidupan Berbangsa*, Jakarta: Kompas, 2013, hal. 94

[68] Abdulsyani, *Sosiologi: Skematika, Teori, dan Terapan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012, hal 153

perilaku yang dapat diterima oleh masyarakat serta mendorong terciptanya sikap saling menghormati dalam hubungan antar manusia.[69]

Interaksi sosial yang berlandaskan etika juga berperan penting dalam membangun solidaritas sosial dalam masyarakat. Solidaritas sosial muncul ketika individu merasa memiliki keterikatan moral dengan anggota masyarakat lainnya sehingga terdorong untuk menjaga keharmonisan hubungan sosial. Dalam masyarakat yang memiliki solidaritas sosial yang kuat, individu tidak hanya mempertimbangkan kepentingan pribadi dalam bertindak, tetapi juga memperhatikan dampak tindakannya terhadap orang lain. Etika berperan sebagai mekanisme yang menumbuhkan kesadaran kolektif tersebut karena nilai-nilai moral yang dianut oleh masyarakat mendorong individu untuk bertindak secara bertanggung jawab dalam hubungan sosial.[70]

Selain membangun solidaritas sosial, etika juga berfungsi sebagai mekanisme pengendalian dalam interaksi sosial. Dalam kehidupan masyarakat, tidak semua individu memiliki kepentingan yang sama, sehingga potensi konflik sering kali muncul dalam berbagai bentuk hubungan sosial. Etika membantu mengendalikan konflik tersebut dengan memberikan pedoman mengenai bagaimana individu seharusnya bersikap ketika menghadapi perbedaan kepentingan. Melalui nilai-nilai etika seperti kejujuran, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap orang lain, interaksi sosial dapat berlangsung secara lebih konstruktif.[71]

Dalam interaksi sosial modern, etika juga memiliki peran penting dalam menjaga kualitas komunikasi antar individu. Komunikasi merupakan unsur utama dalam interaksi sosial karena melalui komunikasi individu dapat menyampaikan pikiran, perasaan, dan kepentingannya kepada orang lain. Namun komunikasi yang tidak didasarkan pada nilai etika berpotensi menimbulkan kesalahpahaman atau bahkan konflik sosial.[72]

Etika dalam interaksi sosial juga berkaitan dengan pembentukan budaya sosial dalam masyarakat. Budaya sosial terbentuk dari kebiasaan dan nilai-nilai yang dipraktikkan oleh anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Ketika nilai etika dijadikan sebagai bagian dari budaya sosial, maka interaksi antar individu akan berlangsung secara lebih tertib dan beradab. Sebaliknya, ketika etika tidak menjadi bagian dari budaya sosial, maka hubungan antar

---

[69] Soerjono Soekant, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015, hal 62

[70] Dwi J Narwoko, & Bagong Suyanto, *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Kencana, 2013, hal 88

[71] M. Elly Setiadi., & Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial*, Jakarta: Kencana, 2011, hal 101.

[72] Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015, hal 76.

individu cenderung dipenuhi oleh sikap egoisme yang dapat merusak keharmonisan masyarakat.[73]

Peran etika dalam interaksi sosial juga terlihat dalam pembentukan kepercayaan sosial. Kepercayaan merupakan unsur penting dalam hubungan sosial karena memungkinkan individu bekerja sama dalam berbagai aktivitas kehidupan. Kepercayaan tidak dapat terbentuk secara spontan, tetapi berkembang melalui pengalaman interaksi yang didasarkan pada nilai moral seperti kejujuran dan tanggung jawab. Ketika individu menunjukkan perilaku yang konsisten dengan nilai etika, maka orang lain akan lebih mudah mempercayainya dalam hubungan sosial.[74]

Etika juga mempengaruhi cara individu merespons perbedaan dalam interaksi sosial. Masyarakat modern terdiri dari individu yang memiliki latar belakang budaya, agama, dan pandangan hidup yang beragam. Perbedaan tersebut berpotensi menimbulkan konflik apabila tidak disikapi dengan sikap yang etis. Etika mendorong individu untuk menghargai perbedaan serta mengembangkan sikap toleransi dalam hubungan sosial.[75]

Dalam konteks kehidupan masyarakat yang semakin kompleks, etika dalam interaksi sosial juga berfungsi sebagai pedoman dalam penggunaan kekuasaan sosial. Kekuasaan merupakan salah satu unsur yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial karena dalam setiap hubungan sosial selalu terdapat distribusi pengaruh yang berbeda antara individu atau kelompok. Tanpa adanya etika, kekuasaan dapat disalahgunakan untuk kepentingan pribadi yang merugikan pihak lain.[76]

Selain berkaitan dengan kekuasaan, etika juga memiliki hubungan erat dengan tanggung jawab sosial individu. Tanggung jawab sosial muncul ketika individu menyadari bahwa tindakannya memiliki dampak terhadap orang lain dalam masyarakat. Kesadaran ini mendorong individu untuk mempertimbangkan konsekuensi moral dari setiap tindakan yang dilakukan dalam interaksi sosial.[77]

Dalam kehidupan sosial, etika juga menjadi dasar bagi terciptanya dialog yang konstruktif antara individu atau kelompok. Dialog sosial memerlukan sikap saling menghormati dan keterbukaan terhadap pandangan orang lain. Tanpa adanya etika, dialog mudah berubah menjadi konflik yang merusak hubungan sosial. Etika membantu menciptakan ruang komunikasi yang sehat

---

[73] Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hal 122

[74]Piotr Sztompka , *Sosiologi Perubahan Sosial*, Jakarta: Prenada Media, 2011, hal 98.

[75]M. Dawam Rahardjo, *Etika Sosial dalam Kehidupan Berbangsa*, Jakarta: Kompas, 2013, hal 67.

[76] Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010, hal 45.

[77] S. Nasution., *Sosiologi Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011, hal 54.

di mana setiap individu dapat menyampaikan pandangannya tanpa harus merendahkan pihak lain.[78]

Etika dalam interaksi sosial juga berperan dalam membentuk pola hubungan yang adil dalam masyarakat. Keadilan sosial tidak hanya berkaitan dengan distribusi sumber daya, tetapi juga dengan cara individu memperlakukan orang lain dalam hubungan sehari-hari. Ketika individu menjunjung tinggi nilai etika seperti kejujuran, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap orang lain, maka hubungan sosial akan berkembang secara lebih adil. Sebaliknya, ketika nilai etika diabaikan, maka ketidakadilan sosial cenderung meningkat karena individu bertindak tanpa mempertimbangkan dampak moral dari tindakannya.[79]

Dalam perspektif sosiologi, etika juga dipahami sebagai bagian dari sistem nilai yang mengatur perilaku sosial masyarakat. Sistem nilai tersebut berkembang melalui proses sejarah dan budaya yang panjang sehingga menjadi pedoman perilaku yang diakui oleh anggota masyarakat. Ketika individu mematuhi nilai-nilai etika tersebut, maka hubungan sosial akan berjalan secara lebih stabil karena setiap individu memahami batasan perilaku yang dapat diterima oleh masyarakat.[80]

Selain menjaga keteraturan sosial, etika juga membantu masyarakat menghadapi perubahan sosial yang terus berlangsung. Perubahan sosial sering kali membawa tantangan baru dalam hubungan antar individu karena nilai-nilai lama tidak selalu dapat menjawab persoalan yang muncul dalam masyarakat modern. Dalam situasi seperti ini, etika berfungsi sebagai kerangka moral yang membantu masyarakat menilai apakah suatu perubahan sosial dapat diterima atau tidak.[81]

Dengan demikian, etika dalam interaksi sosial merupakan unsur penting yang menentukan kualitas hubungan antar individu dalam masyarakat. Etika memberikan pedoman bagi individu dalam bertindak sehingga interaksi sosial dapat berlangsung secara harmonis dan konstruktif. Melalui nilai-nilai moral seperti kejujuran, tanggung jawab, penghormatan terhadap orang lain, dan toleransi, etika membantu menciptakan hubungan sosial yang stabil dan berkeadaban.[82]

---

[78] Sumartono, *Komunikasi Sosial dan Budaya*, Jakarta: Kencana, 2017, hal 103.

[79] Kusnadi, *Sosiologi Konflik dan Integrasi Sosial*, Malang: Universitas Negeri Malang Press, 2014, hal 92.

[80] Basrowi, *Pengantar Sosiologi*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2014, hal 71.

[81] Piotr Sztompkr, *Sosiologi Perubahan Sosial*, Jakarta: Prenada Media, 2011, hal 121.

[82] Astrid S Susanto., *Komunikasi dalam Teori dan Praktik*, Bandung: Bina Cipta, 2016, hal 85.

6. Etika dalam Kepemimpinan

Etika dalam kepemimpinan merupakan aspek mendasar yang menentukan kualitas hubungan antara pemimpin dan masyarakat yang dipimpinnya. Dalam perspektif ilmu sosial, kepemimpinan tidak hanya dipahami sebagai kemampuan mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi juga sebagai tanggung jawab moral yang harus dijalankan secara etis. Seorang pemimpin tidak hanya dinilai dari keberhasilannya dalam mencapai target organisasi atau pemerintahan, tetapi juga dari cara ia menjalankan kekuasaan dan berinteraksi dengan masyarakat. Etika menjadi pedoman yang memastikan bahwa kekuasaan digunakan secara adil dan bertanggung jawab, sehingga kepemimpinan tidak berubah menjadi dominasi yang merugikan masyarakat.[83]

Dalam praktik kehidupan sosial, kepemimpinan selalu berkaitan dengan kekuasaan dan pengaruh terhadap orang lain. Kekuasaan tersebut memberikan kemampuan kepada pemimpin untuk menentukan arah kebijakan dan mengambil keputusan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Namun kekuasaan yang tidak dibatasi oleh etika berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan masyarakat.[84] Etika menjadi mekanisme yang mengontrol penggunaan kekuasaan agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip moral yang diterima oleh masyarakat. Etika membantu pemimpin memahami bahwa setiap keputusan yang diambil memiliki implikasi moral terhadap masyarakat yang dipimpinnya. Dengan demikian, kepemimpinan yang beretika tidak hanya berorientasi pada efektivitas kekuasaan, tetapi juga pada tanggung jawab moral terhadap kesejahteraan masyarakat.

Etika kepemimpinan juga berkaitan dengan integritas moral yang dimiliki oleh seorang pemimpin dalam menjalankan perannya. Integritas merupakan kualitas moral yang mencerminkan keselarasan antara nilai yang diyakini dengan tindakan yang dilakukan. Pemimpin yang memiliki integritas akan menunjukkan konsistensi antara ucapan dan perbuatannya sehingga masyarakat dapat mempercayai kepemimpinannya. Dalam konteks ini, etika berfungsi sebagai standar moral yang membantu pemimpin menjaga konsistensi tersebut dalam berbagai situasi. Ketika integritas moral seorang pemimpin terjaga, maka hubungan antara pemimpin dan masyarakat akan dibangun atas dasar kepercayaan yang kuat. Sebaliknya, ketika integritas

---

[83] Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016, hal 37.

[84] Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010, hal 59

moral melemah, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin akan menurun dan dapat memicu krisis legitimasi dalam kepemimpinan.[85]

Selain integritas, etika kepemimpinan juga berkaitan dengan tanggung jawab sosial pemimpin terhadap masyarakat. Tanggung jawab ini muncul karena posisi pemimpin memberikan pengaruh yang besar terhadap kehidupan sosial masyarakat. Setiap kebijakan atau keputusan yang diambil oleh pemimpin dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan.[86]

Etika kepemimpinan juga berkaitan erat dengan kemampuan pemimpin dalam membangun hubungan sosial yang sehat dengan masyarakat. Hubungan antara pemimpin dan masyarakat tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga bersifat moral karena didasarkan pada kepercayaan dan penghormatan timbal balik. Dalam konteks ini, etika membantu pemimpin untuk menjaga sikap yang menghargai martabat masyarakat serta menghindari perilaku yang dapat merendahkan atau merugikan mereka. Ketika pemimpin menunjukkan sikap etis dalam berinteraksi dengan masyarakat, maka hubungan sosial akan berkembang secara lebih harmonis karena masyarakat merasa dihargai dalam proses kepemimpinan tersebut.[87]

Dalam kajian kepemimpinan modern, etika juga dipandang sebagai faktor penting dalam membangun legitimasi kepemimpinan. Legitimasi merupakan pengakuan masyarakat terhadap kewenangan seorang pemimpin dalam menjalankan kekuasaan. Pengakuan tersebut tidak hanya didasarkan pada aspek formal seperti jabatan atau kekuasaan politik, tetapi juga pada penilaian moral masyarakat terhadap perilaku pemimpin. Ketika pemimpin menunjukkan perilaku yang etis, maka masyarakat cenderung memberikan dukungan terhadap kepemimpinannya. Sebaliknya, ketika pemimpin menunjukkan perilaku yang tidak etis, maka legitimasi kepemimpinannya dapat melemah.[88]

Etika kepemimpinan juga berkaitan dengan kemampuan pemimpin dalam membangun komunikasi yang adil dan terbuka dengan masyarakat. Komunikasi merupakan sarana utama yang digunakan pemimpin untuk menyampaikan kebijakan, memberikan arahan, serta menjalin hubungan dengan masyarakat. Dalam konteks ini, etika membantu pemimpin menjaga agar komunikasi yang dilakukan tidak bersifat manipulatif atau menyesatkan

---

[85] Sondang P Siagian., *Teori dan Praktik Kepemimpinan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015, hal 42.

[86] Miftah Thoha, *Kepemimpinan dalam Manajemen*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012, hal 66.

[87] Deddy Mulyadi, *Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan Pelayanan*, Bandung: Alfabeta, 2015, hal 74.

[88] Peter G Northouse., *Leadership: Theory and Practice*, California: Sage Publications, 2016, hal 342.

masyarakat. Komunikasi yang beretika menuntut pemimpin untuk bersikap jujur, transparan, dan bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.[89]

Selain itu, etika kepemimpinan juga berkaitan dengan kemampuan pemimpin dalam mengambil keputusan yang adil. Pengambilan keputusan merupakan salah satu fungsi utama kepemimpinan karena melalui keputusan tersebut pemimpin menentukan arah kebijakan yang akan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Dalam proses pengambilan keputusan, etika membantu pemimpin mempertimbangkan berbagai aspek moral yang berkaitan dengan dampak keputusan tersebut terhadap masyarakat. Keputusan yang diambil secara etis tidak hanya mempertimbangkan efisiensi atau keuntungan tertentu, tetapi juga mempertimbangkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.[90]

Dalam konteks kehidupan sosial yang kompleks, etika kepemimpinan juga berfungsi sebagai mekanisme yang menjaga keseimbangan antara kepentingan pemimpin dan kepentingan masyarakat. Pemimpin sering kali berada dalam posisi yang memiliki akses terhadap sumber daya dan kekuasaan yang lebih besar dibandingkan masyarakat. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketimpangan kekuasaan yang dapat disalahgunakan apabila tidak diimbangi dengan komitmen etis yang kuat. Oleh karena itu, etika menjadi landasan yang membantu pemimpin untuk menggunakan kekuasaannya secara bertanggung jawab dan tidak menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi.[91]

Etika kepemimpinan juga berkaitan dengan pembentukan budaya organisasi atau budaya sosial dalam masyarakat. Budaya kepemimpinan yang beretika akan mempengaruhi perilaku anggota masyarakat atau organisasi karena pemimpin sering kali menjadi teladan bagi orang-orang yang dipimpinnya. Ketika pemimpin menunjukkan sikap jujur, adil, dan bertanggung jawab, maka nilai-nilai tersebut cenderung diikuti oleh anggota masyarakat. Sebaliknya, ketika pemimpin menunjukkan perilaku yang tidak etis, maka perilaku tersebut dapat menjadi contoh buruk yang merusak budaya sosial dalam masyarakat.[92]

Dalam praktik kepemimpinan publik, etika juga berkaitan dengan akuntabilitas pemimpin terhadap masyarakat. Akuntabilitas menunjukkan

---

[89] Hafied Cangara, *Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018, hal 94.

[90] Gary Yukl, *Leadership in Organizations*, New Jersey: Pearson Education, 2013, hal 299.

[91] Yeremias T Keban., *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*, Yogyakarta: Gava Media, 2014, hal 118

[92] Veithzal Rivai, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014, hal 88

bahwa pemimpin memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan tindakan dan kebijakan yang diambil kepada masyarakat yang dipimpinnya. Etika membantu memastikan bahwa proses pertanggungjawaban tersebut dilakukan secara jujur dan transparan. Pemimpin yang beretika tidak hanya bersedia menerima kritik dari masyarakat, tetapi juga menjadikan kritik tersebut sebagai sarana untuk memperbaiki kualitas kepemimpinannya.[93]

Etika kepemimpinan juga memiliki peran penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepemimpinan. Kepercayaan merupakan modal sosial yang sangat penting dalam hubungan antara pemimpin dan masyarakat. Ketika masyarakat mempercayai pemimpinnya, maka proses pemerintahan atau kepemimpinan dapat berjalan dengan lebih efektif karena masyarakat bersedia bekerja sama dalam menjalankan berbagai kebijakan. Sebaliknya, ketika kepercayaan masyarakat hilang, maka kepemimpinan akan menghadapi berbagai tantangan sosial yang dapat menghambat proses pembangunan.[94]

Dalam kajian kepemimpinan kontemporer, etika juga dipandang sebagai unsur yang menentukan keberlanjutan kepemimpinan dalam jangka panjang. Kepemimpinan yang hanya mengandalkan kekuasaan tanpa memperhatikan nilai etika biasanya tidak dapat bertahan lama karena masyarakat pada akhirnya akan menolak kepemimpinan yang dianggap tidak adil. Sebaliknya, kepemimpinan yang didasarkan pada nilai etika cenderung memiliki daya tahan yang lebih kuat karena didukung oleh legitimasi moral dari masyarakat.[95]

Etika dalam kepemimpinan merupakan landasan moral yang menentukan kualitas hubungan antara pemimpin dan masyarakat. Etika membantu memastikan bahwa kekuasaan digunakan secara bertanggung jawab, keputusan diambil secara adil, dan komunikasi dilakukan secara jujur serta transparan. Melalui etika, kepemimpinan tidak hanya berorientasi pada efektivitas kekuasaan, tetapi juga pada nilai-nilai moral yang menjaga keseimbangan hubungan sosial dalam masyarakat.[96]

Etika komunikasi dalam Al-Qur'an tidak hanya berkaitan dengan ketepatan pilihan kata atau kesantunan dalam menyampaikan pesan, tetapi juga mengandung dimensi relasional yang mengatur bagaimana individu membangun tanggung jawab sosial terhadap sesamanya. Dalam kajian Abd. Aziz terhadap QS. at-Taubah [9]: 71–72, relasi sosial orang-orang beriman dibangun atas prinsip keterikatan timbal balik yang diwujudkan melalui

---

[93] Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014, hal 57

[94] Dharma Setyawan Salam, *Manajemen Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2013, hal 73.

[95] Malayu S. P Hasibuan., *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2016, hal 165.

[96] Wibowo, *Perilaku dalam Organisasi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017, hal 129.

tolong-menolong, amar ma'ruf nahi munkar, serta solidaritas sosial. Amar ma'ruf nahi munkar dalam konteks tersebut tidak berhenti pada aktivitas normatif untuk memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran, melainkan memiliki bentuk komunikatif berupa saling menasihati, memberikan saran, menyampaikan masukan, bahkan mengemukakan kritik. Dengan demikian, komunikasi Qur'ani memiliki fungsi korektif sekaligus konstruktif, sebab komunikasi tidak sekadar menyampaikan informasi tetapi juga memelihara kualitas moral hubungan sosial.[97]

Dalam konteks relasi pemimpin dan rakyat, prinsip tersebut memperlihatkan bahwa hubungan keduanya tidak semestinya dibangun secara satu arah. Rakyat memiliki ruang moral untuk menyampaikan nasihat, aspirasi, dan kritik, sedangkan pemimpin memiliki tanggung jawab etis untuk membuka diri terhadap proses komunikasi tersebut. Pola relasi demikian memperkuat prinsip bahwa komunikasi publik dalam perspektif Al-Qur'an seharusnya menghasilkan keterhubungan sosial, bukan dominasi. Bahkan solidaritas sosial, sebagaimana dijelaskan Abd. Aziz, tumbuh dari rasa saling percaya, kesamaan tujuan, kesetiakawanan, dan kepedulian terhadap kepentingan umum.[98] Karena itu, komunikasi pemimpin dan rakyat dapat dipahami sebagai bagian dari mekanisme Qur'ani untuk menjaga kohesi sosial sekaligus mencegah lahirnya keterasingan, konflik, dan keretakan dalam masyarakat.

B. Teori Komunikasi

1. Definisi Komunikasi

Komunikasi merupakan proses interaksi yang memungkinkan individu saling bertukar pesan, makna, dan pemahaman. Melalui komunikasi, manusia membangun hubungan sosial yang memungkinkan terciptanya kerja sama, koordinasi, serta integrasi dalam masyarakat. Oleh karena itu, komunikasi tidak hanya dipahami sebagai proses penyampaian informasi, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang membentuk struktur hubungan antar individu. Dalam perspektif ilmu komunikasi, komunikasi sosial menekankan pada proses pertukaran pesan yang terjadi dalam konteks kehidupan sosial yang lebih luas.[99]

---

[97] Abd. Aziz, "Pendidikan Etika Sosial Berbasis Argumentasi Quranik," *Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam dan Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 1, No. 3, 2019, hlm. 480–481.

[98] Abd. Aziz, "Pendidikan Etika Sosial Berbasis Argumentasi Quranik," *Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam dan Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 1, No. 3, 2019, hlm. 480–482.

[99] Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016, hal. 18.

Para ahli komunikasi mendefinisikan komunikasi sebagai proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan melalui media tertentu dengan tujuan memengaruhi pemahaman atau perilaku penerima pesan. Definisi ini menegaskan bahwa komunikasi merupakan aktivitas yang melibatkan interaksi antara pihak yang menyampaikan pesan dan pihak yang menerima pesan.[100]

Deddy Mulyana menjelaskan bahwa komunikasi merupakan proses penyampaian pesan yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja antara individu atau kelompok dalam rangka membangun kesamaan makna. Dalam pandangannya, komunikasi sosial tidak hanya terbatas pada proses verbal, tetapi juga mencakup simbol, ekspresi, dan tindakan yang mengandung makna tertentu. Proses komunikasi tersebut memungkinkan individu memahami perspektif orang lain serta menyesuaikan perilakunya dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, komunikasi menjadi sarana penting dalam membangun interaksi sosial yang efektif dan bermakna dalam masyarakat.[101]

Hafied Cangara memandang komunikasi sebagai proses pertukaran pesan yang melibatkan unsur komunikator, pesan, media, komunikan, dan efek yang dihasilkan dari proses komunikasi tersebut. Menurutnya, komunikasi sosial terjadi ketika proses pertukaran pesan berlangsung dalam konteks kehidupan sosial yang melibatkan berbagai kepentingan dan latar belakang individu. Dalam masyarakat modern, komunikasi sosial memiliki peran penting dalam membentuk opini publik, membangun kepercayaan sosial, serta menciptakan integrasi sosial di tengah keberagaman masyarakat.[102]

Onong Uchjana Effendy menegaskan bahwa komunikasi merupakan proses penyampaian pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang-lambang yang memiliki makna bersama. Lambang-lambang tersebut dapat berupa bahasa, gambar, maupun simbol-simbol lain yang dipahami oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam komunikasi. Dalam konteks sosial, komunikasi menjadi sarana utama bagi manusia untuk membangun hubungan interpersonal dan kelompok. Melalui komunikasi yang efektif, masyarakat dapat mencapai kesepahaman yang diperlukan untuk menjaga keteraturan sosial.[103]

Nurudin menjelaskan bahwa komunikasi sosial merupakan proses pertukaran pesan yang terjadi dalam sistem sosial yang melibatkan berbagai

---

[100] Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktik*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011, hal. 9.

[101] Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015, hal. 67.

[102] Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016, hal. 22.

[103] Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktik*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011, hal. 13.

unsur seperti nilai, norma, dan struktur sosial. Komunikasi tidak hanya berkaitan dengan penyampaian informasi, tetapi juga dengan pembentukan makna sosial yang dipengaruhi oleh latar belakang budaya dan pengalaman individu.[104]

Agus M. Hardjana menjelaskan bahwa komunikasi sosial berfungsi sebagai sarana untuk membangun relasi interpersonal yang sehat dalam masyarakat. Melalui komunikasi, individu dapat menyampaikan gagasan, perasaan, serta aspirasi yang dimilikinya kepada orang lain. Proses komunikasi tersebut memungkinkan terciptanya hubungan sosial yang didasarkan pada saling pengertian dan penghargaan terhadap perbedaan.[105]

Anwar Arifin menjelaskan bahwa komunikasi sosial juga memiliki peran penting dalam kehidupan politik dan pemerintahan. Dalam konteks ini, komunikasi menjadi sarana bagi pemimpin untuk menyampaikan kebijakan serta menjelaskan visi kepemimpinan kepada masyarakat. Sebaliknya, masyarakat juga menggunakan komunikasi sebagai sarana untuk menyampaikan aspirasi dan kritik terhadap kebijakan pemerintah.[106]

Suryanto menjelaskan bahwa unsur-unsur komunikasi terdiri dari komunikator, pesan, media, komunikan, dan efek komunikasi. Komunikator merupakan pihak yang menyampaikan pesan, sedangkan komunikan adalah pihak yang menerima pesan tersebut. Pesan merupakan informasi atau makna yang disampaikan dalam proses komunikasi, sementara media merupakan sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Adapun efek komunikasi merupakan perubahan sikap, pemahaman, atau perilaku yang terjadi pada penerima pesan setelah proses komunikasi berlangsung.[107]

Dalam kajian komunikasi modern, Joseph A. Devito mendefinisikan komunikasi sebagai proses pengiriman dan penerimaan pesan antara dua pihak atau lebih yang dipengaruhi oleh konteks sosial dan psikologis. Ia menekankan bahwa komunikasi tidak hanya melibatkan pertukaran pesan, tetapi juga proses interpretasi makna oleh penerima pesan. Oleh karena itu, komunikasi merupakan proses yang kompleks karena makna pesan dapat dipengaruhi oleh pengalaman, nilai, dan latar belakang budaya individu.[108]

Stephen W. Littlejohn menjelaskan bahwa komunikasi merupakan proses sosial yang melibatkan pertukaran simbol untuk menciptakan makna bersama. Dalam perspektif ini, komunikasi dipahami sebagai proses interaksi

---

[104] Nurudin, *Sistem Komunikasi Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017, hal. 45.

[105] Agus M. Hardjana, *Komunikasi Intrapersonal dan Interpersonal*, Yogyakarta: Kanisius, 2016, hal. 28.

[106] Anwar Arifin, *Komunikasi Politik: Paradigma, Teori, dan Praktik*, Jakarta: Balai Pustaka, 2011, hal. 36

[107] Suryanto, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Bandung: Pustaka Setia, 2015, hal. 54.

[108] Joseph A. Devito, *Human Communication: The Basic Course*, Boston: Pearson Education, 2015, hal. 6.

yang memungkinkan individu membangun realitas sosial melalui pertukaran pesan dan simbol.[109]

Denis McQuail menjelaskan bahwa komunikasi dalam masyarakat modern memiliki fungsi penting dalam membangun integrasi sosial serta membentuk opini publik. Melalui komunikasi, masyarakat dapat berbagi informasi, nilai, dan pandangan yang membentuk kesadaran kolektif.[110]

Berdasarkan berbagai definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa komunikasi sosial merupakan proses pertukaran pesan yang terjadi antara individu atau kelompok dalam kehidupan masyarakat dengan tujuan membangun pemahaman bersama. Komunikasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang memungkinkan terbentuknya hubungan sosial yang harmonis. Melalui komunikasi, individu dapat menyampaikan gagasan, nilai, serta aspirasi yang dimilikinya kepada orang lain sehingga tercipta interaksi sosial yang dinamis dalam masyarakat.

2. Unsur Komunikasi

Unsur komunikasi merupakan komponen penting yang menentukan keberhasilan proses pertukaran pesan dalam interaksi sosial. Setiap proses komunikasi setidaknya melibatkan beberapa unsur utama yang saling berkaitan dan membentuk satu sistem komunikasi yang utuh. Tanpa adanya unsur-unsur tersebut, komunikasi tidak dapat berlangsung secara efektif karena pesan tidak dapat dipahami dengan baik oleh penerima. Unsur-unsur komunikasi tersebut meliputi komunikator, pesan, media, komunikan, dan efek komunikasi yang dihasilkan dari proses interaksi tersebut.[111]

Komunikator merupakan pihak yang menyampaikan pesan kepada orang lain dalam proses komunikasi. Komunikator dapat berupa individu, kelompok, atau lembaga yang memiliki tujuan tertentu dalam menyampaikan informasi kepada komunikan. Dalam komunikasi sosial, keberhasilan penyampaian pesan sangat dipengaruhi oleh kredibilitas komunikator, termasuk keahlian, kejujuran, dan kemampuan dalam menyampaikan pesan secara jelas. Komunikator yang memiliki kredibilitas tinggi cenderung lebih mudah memperoleh kepercayaan dari komunikan sehingga pesan yang disampaikan

---

[109] Stephen W. Littlejohn dan Karen A. Foss, *Theories of Human Communication*, Illinois: Waveland Press, 2009, hal. 12.

[110] Denis McQuail, *McQuail's Mass Communication Theory*, London: Sage Publications, 2010, hal. 74.

[111] Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016, hal. 24.

lebih mudah diterima. Peran komunikator sangat menentukan efektivitas proses komunikasi dalam kehidupan sosial.[112]

Pesan merupakan isi atau informasi yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Pesan dapat berbentuk gagasan, informasi, perasaan, maupun ajakan yang disampaikan melalui berbagai simbol seperti bahasa, gambar, maupun tanda-tanda lainnya. Dalam komunikasi sosial, pesan tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai medium untuk membangun pemahaman bersama antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Oleh karena itu, pesan yang disampaikan harus disusun secara jelas, sistematis, dan mudah dipahami agar dapat mencapai tujuan komunikasi secara efektif.[113]

Media komunikasi merupakan sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada komunikan. Media dapat berupa komunikasi langsung seperti percakapan tatap muka maupun media tidak langsung seperti surat, telepon, media massa, dan media digital. Perkembangan teknologi informasi telah memperluas penggunaan media komunikasi sehingga proses pertukaran informasi dapat berlangsung lebih cepat dan menjangkau masyarakat yang lebih luas. Namun demikian, penggunaan media juga harus memperhatikan konteks sosial dan karakteristik komunikan agar pesan yang disampaikan dapat dipahami secara tepat.[114]

Komunikan merupakan pihak yang menerima pesan yang disampaikan oleh komunikator dalam proses komunikasi. Dalam komunikasi sosial, komunikan dapat berupa individu, kelompok, maupun masyarakat luas yang menjadi sasaran penyampaian pesan. Peran komunikan sangat penting karena keberhasilan komunikasi sangat ditentukan oleh kemampuan komunikan dalam memahami makna pesan yang diterima. Faktor-faktor seperti latar belakang pendidikan, pengalaman, budaya, dan nilai sosial dapat memengaruhi cara komunikan menafsirkan pesan yang disampaikan.[115]

Selain komunikan, unsur penting lain dalam komunikasi adalah efek komunikasi. Efek komunikasi merujuk pada perubahan yang terjadi pada diri komunikan setelah menerima pesan dari komunikator. Perubahan tersebut dapat berupa perubahan pengetahuan, sikap, maupun perilaku. Dalam komunikasi sosial, efek komunikasi sering kali menjadi indikator keberhasilan

---

[112] Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015, hal. 69.

[113] Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktik*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011, hal. 17.

[114] Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktik*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011, hal. 17.

[115] Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016, hal. 25.

proses komunikasi karena menunjukkan sejauh mana pesan yang disampaikan mampu memengaruhi pemahaman atau tindakan komunikan.[116]

Umpan balik atau *feedback* juga merupakan unsur penting dalam proses komunikasi. Umpan balik adalah respons atau tanggapan yang diberikan oleh komunikan kepada komunikator setelah menerima pesan. Melalui umpan balik, komunikator dapat mengetahui apakah pesan yang disampaikan telah dipahami dengan benar oleh komunikan atau tidak. Dalam komunikasi interpersonal maupun komunikasi sosial, keberadaan umpan balik memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah yang lebih dinamis dan interaktif. Dengan adanya umpan balik, proses komunikasi dapat diperbaiki atau disesuaikan agar lebih efektif dalam mencapai tujuan komunikasi.[117]

Unsur lain yang tidak kalah penting dalam komunikasi adalah konteks komunikasi. Konteks merujuk pada situasi atau lingkungan yang melatarbelakangi terjadinya proses komunikasi, baik konteks sosial, budaya, psikologis, maupun situasional. Konteks komunikasi dapat memengaruhi cara pesan disampaikan dan ditafsirkan oleh komunikan. Misalnya, pesan yang sama dapat memiliki makna yang berbeda ketika disampaikan dalam konteks budaya atau situasi sosial yang berbeda.[118]

Selain itu, proses komunikasi juga dipengaruhi oleh gangguan komunikasi atau *noise*. *Noise* merupakan segala bentuk hambatan yang dapat mengganggu proses penyampaian dan penerimaan pesan. Gangguan tersebut dapat berupa gangguan fisik seperti suara bising, gangguan psikologis seperti prasangka atau emosi, maupun gangguan semantik yang berkaitan dengan perbedaan pemahaman terhadap makna kata atau simbol. Keberadaan noise dapat menyebabkan pesan yang disampaikan tidak dipahami secara tepat oleh komunikan.[119]

Selain itu, unsur-unsur komunikasi seperti komunikator, pesan, media, komunikan, dan efek komunikasi menunjukkan bahwa proses komunikasi merupakan sistem yang saling berkaitan antara satu komponen dengan komponen lainnya. Keberhasilan komunikasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan komunikator dalam menyampaikan pesan, ketepatan media yang digunakan, serta kemampuan komunikan dalam memahami pesan tersebut. Dalam konteks relasi sosial antara pemimpin dan rakyat, unsur-unsur komunikasi tersebut memiliki peran penting dalam membangun hubungan

---

[116] Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015, hal. 72.

[117] Joseph A. Devito, *Human Communication: The Basic Course*, Boston: Pearson Education, 2015, hal. 11.

[118] Stephen W. Littlejohn dan Karen A. Foss, *Theories of Human Communication*, Illinois: Waveland Press, 2009, hal. 16.

[119] Denis McQuail, *McQuail's Mass Communication Theory*, London: Sage Publications, 2010, hal. 82.

yang didasarkan pada kepercayaan, keterbukaan, dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, komunikasi yang efektif menjadi salah satu faktor utama dalam menciptakan hubungan sosial yang harmonis dan berkeadilan dalam kehidupan masyarakat.

3. Teori Tindakan Komunikatif – Jürgen Habermas

Teori tindakan komunikatif yang dikembangkan oleh Jürgen Habermas merupakan salah satu konsep penting dalam kajian etika komunikasi modern. Habermas memandang komunikasi bukan sekadar proses penyampaian informasi, melainkan tindakan sosial yang bertujuan mencapai pemahaman bersama (*mutual understanding*) antara para pelaku komunikasi. Dalam teori ini, komunikasi yang ideal harus berlangsung dalam situasi dialog yang bebas dari dominasi kekuasaan sehingga setiap pihak memiliki kesempatan yang setara untuk menyampaikan pandangannya. Habermas menekankan bahwa komunikasi yang rasional harus memenuhi beberapa klaim validitas, yaitu kebenaran, ketepatan norma, kejujuran, dan kejelasan pesan. Apabila klaim tersebut terpenuhi, maka komunikasi dapat menghasilkan kesepahaman yang rasional dalam masyarakat.[120]

Dalam kerangka teori tindakan komunikatif, etika komunikasi tidak dapat dipisahkan dari konsep rasionalitas komunikatif yang menjadi dasar bagi terciptanya dialog yang sehat dalam masyarakat. Rasionalitas komunikatif merujuk pada kemampuan individu untuk menggunakan bahasa sebagai sarana mencapai pemahaman bersama melalui argumentasi yang rasional. Dalam proses ini, setiap pihak yang terlibat dalam komunikasi diharapkan mengemukakan argumen yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan terbuka terhadap kritik dari pihak lain.[121] Komunikasi tidak digunakan sebagai alat dominasi atau manipulasi, tetapi sebagai sarana untuk mencari kebenaran bersama dalam kehidupan sosial. Konsep ini menekankan bahwa komunikasi yang etis harus memberikan ruang partisipasi yang setara bagi semua pihak dalam proses dialog sosial.

Teori tindakan komunikatif juga menyoroti pentingnya ruang publik sebagai arena komunikasi sosial yang memungkinkan masyarakat berdialog mengenai berbagai persoalan bersama. Dalam ruang publik yang sehat, masyarakat memiliki kesempatan untuk menyampaikan aspirasi, kritik, dan gagasan secara terbuka tanpa tekanan dari kekuasaan yang dominan. Etika komunikasi menjadi dasar yang menjaga agar dialog dalam ruang publik berlangsung secara rasional dan saling menghormati. Ketika komunikasi

---

[120] Habermas, Jürgen, *The Theory of Communicative Action*, Boston: Beacon Press, 1984, hal 86.

[121] . Budi Hardiman, *Menuju Masyarakat Komunikatif: Ilmu, Masyarakat, Politik & Postmodernisme Menurut Jürgen Habermas*, Yogyakarta: Kanisius, 2009, hal 113.

dalam ruang publik dijalankan secara etis, maka keputusan sosial yang dihasilkan cenderung lebih mencerminkan kepentingan bersama.[122]

Dalam konteks kepemimpinan sosial, teori tindakan komunikatif memberikan perspektif bahwa hubungan antara pemimpin dan masyarakat seharusnya dibangun melalui komunikasi dialogis yang rasional. Pemimpin tidak hanya berperan sebagai pemberi perintah atau pengambil keputusan, tetapi juga sebagai partisipan dalam dialog sosial yang melibatkan masyarakat. Melalui komunikasi dialogis, pemimpin dapat memahami aspirasi masyarakat sekaligus menjelaskan alasan di balik kebijakan yang diambil. Pendekatan ini membantu menciptakan hubungan kepemimpinan yang lebih partisipatif karena masyarakat merasa dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.[123]

Teori tindakan komunikatif juga memberikan dasar bagi pengembangan konsep komunikasi *deliberatif* dalam masyarakat modern. Komunikasi *deliberatif* menekankan pentingnya pertukaran argumen yang rasional dalam proses pengambilan keputusan publik. Dalam proses ini, setiap individu atau kelompok memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pandangannya serta menilai argumen yang disampaikan oleh pihak lain. Etika komunikasi menjadi prinsip yang menjaga agar proses *deliberasi* berlangsung secara adil dan tidak didominasi oleh kelompok tertentu.[124]

Dalam konteks hubungan sosial yang lebih luas, teori tindakan komunikatif menunjukkan bahwa komunikasi memiliki peran penting dalam membangun integrasi sosial. Integrasi sosial tercapai ketika individu atau kelompok dalam masyarakat memiliki pemahaman bersama mengenai nilai dan norma yang mengatur kehidupan sosial. Komunikasi yang dilakukan secara rasional dan etis membantu menciptakan pemahaman bersama tersebut karena setiap pihak memiliki kesempatan untuk menyampaikan pandangannya secara terbuka.[125]

Dalam kajian komunikasi dakwah, prinsip-prinsip tindakan komunikatif juga dapat ditemukan dalam praktik dialog yang dilakukan oleh para pendakwah dalam menyampaikan pesan keagamaan kepada masyarakat. Pendekatan dialogis memungkinkan dakwah disampaikan secara persuasif dan menghargai kondisi sosial masyarakat yang beragam. Melalui komunikasi

---

[122] Jurgen Habermas, *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*, Cambridge: MIT Press, 1996, hal 322.

[123] Peter G Northouse, *Leadership: Theory and Practice*, California: Sage Publications, 2016, hal 348.

[124] James Bohman, *Public Deliberation: Pluralism, Complexity, and Democracy*, Cambridge: MIT Press, 1996, hal 27.

[125] George Ritzer & Jeffrey Stepnisky,, *Sociological Theory*, New York: McGraw-Hill Education, 2018, hal 438.

yang dialogis, pesan dakwah dapat diterima dengan lebih baik karena masyarakat merasa dilibatkan dalam proses komunikasi tersebut.[126]

Dalam perspektif etika komunikasi, teori tindakan komunikatif pada akhirnya menegaskan bahwa komunikasi yang ideal adalah komunikasi yang menghargai martabat manusia sebagai subjek yang rasional. Setiap individu dalam komunikasi memiliki hak yang sama untuk menyampaikan pandangan serta memperoleh penghormatan dari pihak lain.[127]

4. Teori Komunikasi Dialogis - Paulo Freire

Teori komunikasi dialogis yang dikembangkan oleh Paulo Freire memberikan kontribusi penting dalam memahami etika komunikasi dalam kehidupan sosial. Freire memandang komunikasi bukan sekadar proses penyampaian pesan dari satu pihak kepada pihak lain, tetapi sebagai dialog yang melibatkan partisipasi aktif semua pihak yang terlibat. Dalam perspektif ini, komunikasi yang etis harus didasarkan pada prinsip kesetaraan antara komunikator dan komunikan sehingga tidak ada pihak yang mendominasi proses komunikasi. Freire mengkritik model komunikasi yang bersifat *"banking communication"*, yaitu komunikasi yang memosisikan satu pihak sebagai pemberi pengetahuan dan pihak lain sebagai penerima pasif. Sebagai alternatif, ia mengusulkan model komunikasi dialogis yang memungkinkan terjadinya pertukaran gagasan secara kritis antara individu dalam masyarakat.[128]

Konsep komunikasi dialogis dalam pemikiran Freire menekankan pentingnya hubungan yang humanis dalam proses komunikasi. Dialog yang sejati hanya dapat terjadi ketika setiap pihak dalam komunikasi saling menghormati dan mengakui keberadaan pihak lain sebagai subjek yang memiliki pengalaman dan pengetahuan. Dalam konteks ini, komunikasi bukanlah alat dominasi, melainkan sarana untuk membangun kesadaran kolektif mengenai realitas sosial yang dihadapi bersama. Melalui dialog yang terbuka, individu dapat saling bertukar pandangan dan memperkaya pemahaman mereka terhadap persoalan sosial.[129]

Dalam perspektif etika komunikasi, pendekatan dialogis Freire menekankan bahwa komunikasi yang baik harus didasarkan pada sikap saling menghormati antara pihak-pihak yang berkomunikasi. Komunikasi yang bersifat otoriter atau manipulatif akan menghambat terbentuknya hubungan

---

[126] Darwis Hude, *Emosi: Penjelajahan Religio-Psikologis tentang Emosi Manusia di dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Erlangga, 2016, hal 198.

[127] Jurgen Habermas, *Moral Consciousness and Communicative Action*, Cambridge: MIT Press, 1990, hal 65.

[128] Paulo Freire, *Pedagogy of the Oppressed*, New York: Continuum, 2005, hal 88.

[129] Paulo Freire, *Education for Critical Consciousness*, London: Bloomsbury Academic, 2013, hal 73.

sosial yang sehat karena pihak yang lebih kuat cenderung mendominasi proses komunikasi.[130]

Pendekatan dialogis juga memiliki relevansi penting dalam hubungan antara pemimpin dan masyarakat. Dalam kepemimpinan yang dialogis, pemimpin tidak hanya menyampaikan kebijakan secara sepihak, tetapi juga membuka ruang komunikasi dengan masyarakat untuk mendengarkan aspirasi dan pandangan mereka. Proses dialog ini memungkinkan pemimpin memahami kebutuhan masyarakat secara lebih mendalam sehingga kebijakan yang diambil dapat lebih sesuai dengan kepentingan publik.[131]

Pendekatan dialogis juga memiliki implikasi penting dalam membangun budaya komunikasi yang sehat dalam masyarakat. Budaya komunikasi yang dialogis mendorong masyarakat untuk menyelesaikan perbedaan pendapat melalui pertukaran gagasan yang rasional dan terbuka. Dalam budaya dialogis, perbedaan pandangan tidak dipandang sebagai ancaman, tetapi sebagai kesempatan untuk memperkaya pemahaman bersama. Etika komunikasi menjadi dasar yang memastikan bahwa dialog berlangsung secara konstruktif dan tidak berubah menjadi konflik yang merusak hubungan sosial.[132]

Selain mendorong partisipasi sosial, komunikasi dialogis juga membantu mengembangkan kesadaran kritis dalam masyarakat. Freire menekankan bahwa dialog memungkinkan individu memahami struktur sosial yang mempengaruhi kehidupan mereka serta mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam perubahan sosial. Dalam proses ini, komunikasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana pertukaran informasi, tetapi juga sebagai alat pemberdayaan masyarakat.[133]

Dalam perspektif etika komunikasi, konsep dialog yang dikemukakan Freire menegaskan bahwa komunikasi yang baik harus dilandasi oleh sikap saling menghormati antara individu dalam masyarakat. Tanpa adanya penghormatan terhadap martabat manusia, komunikasi mudah berubah menjadi alat dominasi yang merugikan pihak lain. Komunikasi dialogis menuntut setiap individu untuk mengembangkan sikap empati serta keterbukaan terhadap pandangan orang lain. Sikap ini penting dalam menjaga kualitas hubungan sosial dalam masyarakat yang plural.[134]

Dalam kehidupan sosial yang semakin kompleks, komunikasi dialogis juga memiliki peran penting dalam menyelesaikan konflik sosial. Konflik

---

[130] Stephen W Littlejohn & Karen A Foss, *Theories of Human Communication*, Illinois: Waveland Press, 2009, hal 345

[131] Peter G Northouse, *Leadership: Theory and Practice*, California: Sage Publications, 2016, hal 356.

[132] Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015, hal 139.

[133] Paulo Freire, *Pedagogy of Hope*, New York: Continuum, 2014, hal 92.

[134] Richard West & Lynn H Turner, *Introducing Communication Theory*, New York: McGraw-Hill, 2010, hal 221.

sering kali muncul karena adanya perbedaan kepentingan atau kesalahpahaman dalam komunikasi. Pendekatan dialogis membantu pihak-pihak yang terlibat konflik untuk saling memahami perspektif masing-masing sehingga solusi yang dihasilkan dapat diterima oleh semua pihak.[135]

Komunikasi dialogis menegaskan bahwa komunikasi yang etis adalah komunikasi yang menghargai manusia sebagai subjek yang memiliki hak untuk didengar dan dihargai. Setiap individu dalam komunikasi memiliki pengalaman dan pandangan yang dapat memperkaya proses dialog.[136]

5. Teori Komunikasi Empati – Daniel Goleman

Teori komunikasi empati yang dipopulerkan oleh Daniel Goleman memberikan perspektif penting dalam memahami etika komunikasi dalam kehidupan sosial. Goleman menjelaskan bahwa komunikasi yang efektif tidak hanya bergantung pada kemampuan menyampaikan pesan secara jelas, tetapi juga pada kemampuan memahami perasaan dan kondisi emosional orang lain. Kemampuan ini disebut sebagai empati, yaitu kemampuan untuk merasakan dan memahami perspektif orang lain dalam proses komunikasi. Dalam konteks etika komunikasi, empati menjadi landasan penting karena membantu individu menghindari perilaku komunikasi yang dapat menyakiti atau merugikan pihak lain.[137]

Empati dalam komunikasi memiliki peran penting dalam membangun hubungan interpersonal yang sehat dalam masyarakat. Ketika individu mampu memahami perasaan dan perspektif orang lain, maka komunikasi yang terjadi tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga bersifat emosional dan relasional. Hubungan sosial yang dibangun melalui komunikasi empati cenderung lebih stabil karena setiap pihak merasa dipahami dan dihargai dalam interaksi tersebut.[138]

Dalam konteks komunikasi sosial, empati juga membantu menciptakan lingkungan komunikasi yang terbuka dan saling menghormati. Individu yang memiliki kemampuan empati cenderung lebih berhati-hati dalam memilih kata-kata serta lebih peka terhadap reaksi orang lain dalam proses komunikasi. Sikap ini membantu mengurangi potensi konflik dalam interaksi sosial karena setiap pihak merasa dihargai sebagai subjek komunikasi.[139]

---

[135] Sumartono, *Komunikasi Sosial dan Budaya*, Jakarta: Kencana, 2017, hal 114.

[136] Suryanto, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Bandung: Pustaka Setia, 2015, hal 97.

[137] Daniel Goleman, *Social Intelligence: The New Science of Human Relationships*, New York: Bantam Books, 2006, hal 84.

[138] Joseph A Devito, *Human Communication: The Basic Course*, Boston: Pearson Education, 2015, hal 144.

[139] Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015, hal 152.

Empati dalam komunikasi juga berkaitan dengan kemampuan mendengarkan secara aktif. Mendengarkan secara aktif berarti memberikan perhatian penuh terhadap pesan yang disampaikan oleh orang lain serta berusaha memahami makna yang terkandung dalam pesan tersebut. Dalam praktik komunikasi sehari-hari, banyak konflik terjadi karena individu lebih fokus pada menyampaikan pendapatnya sendiri daripada memahami pandangan orang lain.[140] Etika komunikasi menuntut individu untuk mengembangkan kemampuan mendengarkan secara empati agar komunikasi dapat berlangsung secara lebih konstruktif.

Selain dalam hubungan interpersona, komunikasi empati juga memiliki peran penting dalam hubungan antara pemimpin dan masyarakat. Pemimpin yang mampu memahami kondisi emosional dan kebutuhan masyarakat akan lebih mudah membangun hubungan yang harmonis dengan mereka. Empati membantu pemimpin memahami aspirasi masyarakat serta mempertimbangkan dampak kebijakan terhadap kehidupan sosial mereka.[141]

Dalam praktik kepemimpinan, empati juga berperan dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin. Masyarakat cenderung memberikan dukungan kepada pemimpin yang menunjukkan kepedulian terhadap kondisi mereka. Ketika pemimpin mampu berkomunikasi secara empati, masyarakat merasa bahwa pemimpin memahami persoalan yang mereka hadapi. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan karena komunikasi yang dilakukan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mencerminkan kepedulian sosial.[142]

Empati juga berperan penting dalam mengelola konflik sosial dalam masyarakat. Konflik sering kali muncul karena adanya kesalahpahaman atau ketidakmampuan individu memahami perspektif pihak lain. Komunikasi empati membantu pihak-pihak yang terlibat konflik untuk melihat permasalahan dari sudut pandang yang berbeda sehingga solusi yang dihasilkan dapat lebih diterima oleh semua pihak.[143]

Dalam masyarakat yang plural, komunikasi empati juga berfungsi sebagai sarana membangun toleransi sosial. Perbedaan latar belakang budaya, agama, dan pandangan hidup sering kali menimbulkan potensi konflik dalam masyarakat. Empati membantu individu memahami perbedaan tersebut sebagai bagian dari dinamika sosial yang harus dihargai.[144]

---

[140] Agus M Hardjana, *Komunikasi Intrapersonal dan Interpersonal*, Yogyakarta: Kanisius, 2016, hal 103.

[141] Peter G Northouse, *Leadership: Theory and Practice*, California: Sage Publications, 2016, hal 279

[142] Hafied Cangara, *Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018, hal 121

[143] Sumartono, *Komunikasi Sosial dan Budaya*, Jakarta: Kencana, 2017, hal 132.

[144] M. Dawam Rahardjo, *Etika Sosial dalam Kehidupan Berbangsa*, Jakarta: Kompas, 2013, hal 89.

Empati dalam komunikasi juga memiliki hubungan erat dengan pembentukan kecerdasan sosial individu. Kecerdasan sosial merujuk pada kemampuan seseorang untuk memahami dan mengelola hubungan dengan orang lain secara efektif. Individu yang memiliki kecerdasan sosial yang tinggi cenderung lebih peka terhadap kondisi emosional orang lain serta mampu menyesuaikan perilaku komunikasinya dengan situasi sosial yang dihadapi.[145]

Dalam kajian komunikasi organisasi, empati juga dipandang sebagai salah satu kualitas penting yang harus dimiliki oleh pemimpin. Pemimpin yang mampu menunjukkan empati terhadap anggota organisasi cenderung lebih efektif dalam membangun hubungan kerja yang positif. Komunikasi yang dilakukan secara empati dapat meningkatkan motivasi anggota organisasi karena mereka merasa dihargai dan dipahami oleh pemimpin.[146]

Selain dalam organisasi, empati juga penting dalam komunikasi publik yang melibatkan masyarakat luas. Komunikasi publik yang empati menunjukkan bahwa komunikator memahami kebutuhan dan perasaan masyarakat yang menjadi sasaran komunikasi. Pendekatan ini membantu menciptakan hubungan komunikasi yang lebih manusiawi karena pesan disampaikan dengan mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat.[147]

Empati juga berperan dalam membangun budaya komunikasi yang santun dalam masyarakat. Budaya komunikasi yang santun ditandai oleh penggunaan bahasa yang menghargai orang lain serta sikap saling menghormati dalam interaksi sosial. Ketika individu memiliki kemampuan empati, mereka cenderung menghindari kata-kata yang dapat menyakiti perasaan orang lain.[148]

Dalam kehidupan sosial modern, empati menjadi semakin penting karena interaksi manusia tidak lagi terbatas pada hubungan tatap muka, tetapi juga terjadi melalui media komunikasi digital. Komunikasi digital sering kali mengurangi unsur emosional dalam interaksi karena pesan disampaikan melalui teks atau simbol yang terbatas.[149]

Komunikasi empati merupakan salah satu prinsip penting dalam etika komunikasi yang menekankan penghargaan terhadap perasaan dan perspektif orang lain. Melalui empati, komunikasi tidak hanya menjadi sarana pertukaran

---

[145] Daniel Goleman, *Social Intelligence: The New Science of Human Relationships*, New York: Bantam Books, 2006, hal 107.

[146] Veithzal Rivai, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014, hal 102.

[147] Anwar Arifin , *Komunikasi Politik: Paradigma, Teori, dan Praktik*, Jakarta: Balai Pustaka, 2011, hal 112.

[148] Suryanto, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Bandung: Pustaka Setia, 2015, hal 88.

[149] Nurudin, *Sistem Komunikasi Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017, hal 142.

informasi, tetapi juga menjadi sarana membangun hubungan sosial yang harmonis dan penuh penghargaan terhadap martabat manusia.[150]

6. Teori Komunikasi Islam

Komunikasi dalam Al-Qur'an merupakan amanah *ilahiyah* yang menuntut tanggung jawab moral dan spiritual dari setiap individu, terutama bagi mereka yang memiliki peran kepemimpinan.[151] Allah menjadikan kata dan tutur sebagai medium penyampaian kebenaran dan penegakan keadilan, bukan sekadar alat interaksi sosial. Oleh karena itu, komunikasi dalam perspektif Qur'ani memiliki fungsi sakral yakni menjaga amanah, menegakkan moralitas, dan menguatkan kepercayaan antar manusia

Konsep amanah dalam komunikasi Qur'ani berarti setiap kata harus diucapkan dengan kesadaran akan konsekuensi spiritual dan sosialnya.[152] Ucapan yang menyesatkan bukan hanya merusak hubungan sosial, tetapi juga mengkhianati nilai keimanan. Hal ini menjadikan komunikasi sebagai bentuk ibadah yang mengandung tanggung jawab terhadap Tuhan dan manusia.

Dalam konteks kepemimpinan, komunikasi etis berfungsi sebagai pengikat antara pemimpin dan rakyat berdasarkan prinsip keterbukaan dan kejujuran.[153] Pemimpin Qur'ani harus mampu menyampaikan pesan dengan transparansi dan keadilan agar tercipta kepercayaan publik yang berkelanjutan. Amanah komunikasi juga menuntut keseimbangan antara hak berbicara dan kewajiban mendengarkan.[154] Dalam Islam, mendengarkan secara aktif adalah bagian dari etika komunikasi karena menunjukkan penghargaan terhadap pihak lain.

Nilai kejujuran (*ṣidq*) menjadi unsur utama dalam amanah komunikasi sebagaimana dicontohkan Nabi Muhammad SAW dalam karakter kenabiannya.[155] Pemimpin yang jujur dalam perkataan akan menumbuhkan kredibilitas dan legitimasi moral di hadapan rakyat. Selain itu, komunikasi Qur'ani menuntut prinsip *tablīgh* atau penyampaian pesan secara benar dan bertanggung jawab.[156] Amanah komunikasi bukan sekadar menyampaikan pesan, tetapi memastikan bahwa pesan itu membawa kebaikan dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi

---

[150] Mohammad Mulyadi, , *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, Bandung: Alfabeta, 2018, hal 137.

[151] M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Jakarta: Mizan, 2017, hal. 298

[152] Abudin Nata, *Akhlak Tasawuf*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016, hal. 184

[153] Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016, hal. 156

[154] M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2013, hal. 312

[155] M. Dawam Rahardjo, *Etika Sosial dalam Kehidupan Berbangsa*, Jakarta: Kompas, 2013, hal. 94

[156] Shamma Al Naqbi, "The Islamic Perspective On Qualities Required For Effective Leadership," *Journal Of The Contemporary Study Of Islam*, 2024, hal. 11

Etika komunikasi Qur'ani menekankan bahwa setiap kata adalah bagian dari tanggung jawab sosial yang berdampak langsung terhadap harmoni masyarakat.[157] Komunikasi yang etis menjadi sarana memperkuat solidaritas sosial, menghindari fitnah, dan menumbuhkan empati. Kepemimpinan Qur'ani juga menegaskan bahwa komunikasi adalah bentuk pelayanan (khidmah) terhadap rakyat, bukan alat dominasi.[158] Pemimpin yang berkomunikasi dengan empati mencerminkan keteladanan Rasulullah yang lembut dan penuh kasih sayang dalam menyampaikan pesan

Nilai amanah komunikasi juga mencakup tanggung jawab untuk menegakkan keadilan melalui tutur kata yang bijak. Hal ini menunjukkan bahwa kata memiliki kekuatan moral dalam memperbaiki atau merusak tatanan sosial. Komunikasi sebagai amanah *ilahiyah* mengajarkan bahwa setiap ucapan adalah refleksi iman seseorang.[159] Seorang pemimpin yang menjaga tutur katanya berarti sedang menjaga kehormatan dirinya di hadapan Allah dan umat.

Keseimbangan antara kebenaran, kelembutan, dan keadilan merupakan pilar utama etika komunikasi Qur'ani yang membentuk kepemimpinan bermoral.[160] Dalam komunikasi, kebenaran tanpa kelembutan dapat melukai, sedangkan kelembutan tanpa keadilan dapat melemahkan prinsip moral.

Etika komunikasi Qur'ani mengajarkan bahwa keseimbangan antara tiga nilai tersebut melahirkan dialog yang konstruktif dan penuh hikmah.[161] Komunikasi seperti ini menjadi sarana membangun kesepahaman dalam keberagaman sosial dan politik. Dalam kepemimpinan, keseimbangan komunikasi menghindarkan pemimpin dari sikap otoriter dan populis yang sama-sama menyesatkan.[162] Ia menempatkan ucapan sebagai alat pengabdian dan pembimbingan moral.

Keseimbangan komunikasi juga menumbuhkan harmoni sosial dengan menggabungkan empati dan ketegasan.[163] Kelembutan memungkinkan pemimpin dekat dengan rakyat, sementara kebenaran dan keadilan menjaga kewibawaan moralnya. Prinsip komunikasi yang berimbang juga menolak

---

[157] Abdul Karim Zaidan, *Ushul al-Da'wah*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1996, hal. 189

[158] Sulthan Siddqiue and Arshad, "A Study Of Islamic Perspective On Leadership."

[159] Sule And Mainiyo, "Impact Of Qur'anic Moral Excellence On The Lives Of Muslim Society: An Exposition."

[160] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2015, jilid 1, hal. 488

[161] Alamsyah And Lintang, "Cultural Integration And Political Consciousness In Qur'anic Exegesis: A Study Of The Tafsīr Al-Qur'ān Al-Karīm By Binjai's Ulama Tiga Serangkai." *Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya,* 2025, hal. 17

[162] Naqbi, "The Islamic Perspective On Qualities Required For Effective Leadership."

[163] Asmawi Ibrahim Et Al., "Spiritual Leadership Among Youth: Fostering Sustainable Development Towards Islamic Values," *Multidisciplinary Reviews*, 2025, hal. 10

ekstremisme verbal yang mengarah pada fitnah dan permusuhan[164]. Islam mengajarkan bahwa perkataan yang terbaik adalah yang mengandung hikmah dan memberi manfaat bagi sesama.

Dalam kerangka sosial, keseimbangan komunikasi menjadi dasar terbentuknya masyarakat adil dan harmonis.[165] Pemimpin yang menegakkan keadilan dalam tutur akan menciptakan kepercayaan dan stabilitas sosial. Keseimbangan antara kebenaran, kelembutan, dan keadilan merupakan refleksi tertinggi dari komunikasi Qur'ani, yang mengajarkan bahwa kekuatan sejati dalam berbicara bukan terletak pada suara keras, melainkan pada keikhlasan dan kebijaksanaan.[166]

Etika Islam berkontribusi secara signifikan terhadap pembentukan relasi etis antara pemimpin dan rakyat dengan menjadikan moralitas sebagai inti dari kepemimpinan. Prasojo dan Athallah menjelaskan bahwa dalam Islam, kepemimpinan tidak hanya berorientasi pada administrasi kekuasaan, tetapi juga merupakan amanah yang menuntut keadilan (*'adl*), kejujuran (*ṣidq*), dan tanggung jawab sosial (*mas'ūliyyah*).[167] Pemimpin dalam pandangan Islam bertanggung jawab secara moral di hadapan rakyat dan Allah, sehingga komunikasi dan kebijakan yang diambil harus mencerminkan keadilan dan kesejahteraan umat.

Model kepemimpinan profetik yang dicontohkan Nabi Muhammad ﷺ menjadi paradigma etika kepemimpinan yang ideal. Fauziah menunjukkan bahwa konsep kepemimpinan Islam menekankan prinsip *amānah* (kepercayaan), *shūrā* (musyawarah), dan *raḥmah* (kasih sayang) sebagai fondasi relasi antara pemimpin dan rakyat.[168] Dalam konteks ini, kepemimpinan Islam tidak bersifat dominatif, tetapi partisipatif dan akuntabel.

Salin menekankan bahwa etika kepemimpinan Islam yang berakar pada nilai kenabian seperti *ṣidq* (kejujuran) dan amanah dapat menjadi solusi terhadap krisis integritas dan korupsi yang kerap melanda lembaga publik.[169] Etika ini tidak hanya berlaku dalam konteks spiritual, tetapi juga dapat

---

[164] Nurhayati and Mahmudi, "Tafsir Al-Qur'an Dan Pemahaman Tentang Kepemimpinan: Integrasi Nilai-Nilai Islam Dalam Konteks Kontemporer." *RESLAJ : Religion Education Social Laa Roiba Jurnal*, 2024, hal 14

[165] Nurudin, *Pengantar Komunikasi Massa*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017, hal. 97

[166] Prasojo dan Athallah, "Etika Kepemimpinan Islam dalam Pemerintahan Modern," *Jurnal Kepemimpinan Islam*, 2025, hal. 20

[167] Imam Prasojo, M., & Athallah, N. (2025). Leadership ethics in Islam: Trustworthiness, fairness, honesty, deliberation, and responsibility. *ICESTRA: International Journal of Strategic Studies*, 2(1), 28–41.

[168] Mira Fauziah, "Prophetic Ethics And The Foundations Of Islamic Leadership," *El-Sunan: Journal Of Hadith And Religious Studies*, 2025, hal 8

[169] Ahmad Saiful Azlin Puteh Salin, "Islamic Ethical Leadership," *I-Iecons E-Proceedings*, 2023, hal. 31

diterapkan dalam tata kelola pemerintahan dan perusahaan sebagai model kepemimpinan berbasis moral.

Masoong menambahkan bahwa penerapan prinsip etika Islam seperti keadilan, kejujuran, dan akuntabilitas dapat meningkatkan transparansi serta mengurangi praktik korupsi di lembaga pemerintahan.[170] Dengan demikian, nilai-nilai etika Islam bukan sekadar wacana normatif, tetapi juga memiliki implikasi praktis terhadap pembentukan pemerintahan yang berkeadilan dan berkeadaban.

Zakaria dkk melalui meta-analisisnya menunjukkan bahwa etika kerja Islam dan kepemimpinan etis secara signifikan meningkatkan perilaku kerja etis, baik dalam sektor publik maupun swasta.[171] Hal ini menunjukkan bahwa prinsip etika Islam berpengaruh kuat terhadap perilaku individu dan kolektif dalam menjalankan tanggung jawab sosial.

Suprayitno, dkk menegaskan bahwa etika kerja Islam (*Islamic Work Ethics*) merupakan konsep multidimensional yang memperkuat karakter kepemimpinan melalui nilai keadilan dan tanggung jawab sosial dalam organisasi modern.[172] Penerapan nilai-nilai ini membentuk keseimbangan antara tujuan spiritual dan produktivitas sosial.

Gilani dkk menjelaskan bahwa etika kepemimpinan Islam dapat memberikan kontribusi global dengan mendorong tata kelola yang berlandaskan keadilan, belas kasih, dan tanggung jawab universal.[173] Perspektif ini menegaskan peran etika Islam sebagai paradigma moral lintas budaya untuk memperkuat hubungan sosial dan politik yang beretika.

Astra dkk menyoroti pentingnya pengintegrasian nilai-nilai etika Islam seperti *'adl* (keadilan) dan amanah dalam kepemimpinan pendidikan di era digital.[174] Pemimpin yang mempraktikkan komunikasi etis berdasarkan nilai Islam dapat menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dan tanggung jawab moral.

---

[170] Amyna Naphizah Masorong, "Islamic Ethical Principles And Accountability In Governance," *Advanced International Journal Of Banking, Accounting And Finance*, 2025, hal. 24

[171] Norlida Zakirai Zakaria Et Al., "A Meta-Analysis Of The Impact Of Ethical Leadership And Islamic Work Ethics On Ethical Work Behavior," *Information Management And Business Review*, 2025, hal 29

[172] Aryadimas Suprayitno, Arva Athallah Susanto, And Abd Wahab, "Two Decades Of Islamic Leadership And Islamic Work Ethics Implementation: Bibliometric Analysis," *Jurnal El-Riyasah*, 2025, hal 34

[173] Maqbool Hassan Gilani, Saima Ali, And Ghulam Mohyiddeen, "Reimagining Islamic Discourse: Towards A Global Ethical Framework For Contemporary Leadership," *Al-Shajarah: Journal Of The International Institute Of Islamic Thought And Civilization (Istac)*, 2024, hal. 13

[174] Hendrawati Astra dan Andriyana, "Etika Kepemimpinan Pendidikan Islam di Era Digital," Jurnal Pendidikan Islam, 2024, hal. 21

Rufai menegaskan bahwa hubungan antara hukum Islam dan etika bersifat integral; keduanya berperan dalam membentuk perilaku moral masyarakat, termasuk dalam komunikasi politik dan sosial.[175] Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya mengatur aspek legal, tetapi juga memperkuat dimensi etis yang menjadi panduan bagi pemimpin dalam mengelola kekuasaan.

Irfan, Ibrahim, dan Ushama menegaskan bahwa etika kerja Islam memiliki dimensi universal yang melampaui batas agama, menjadikannya relevan sebagai dasar moralitas dalam semua bentuk interaksi sosial, termasuk antara pemimpin dan rakyat.[176] Oleh karena itu, etika Islam dapat berfungsi sebagai paradigma alternatif untuk memperkuat relasi sosial yang berbasis pada nilai keadilan, kejujuran, dan kemanusiaan universal.

7. Komunikasi Intrapersonal

Komunikasi intrapersonal merupakan bentuk komunikasi yang paling dasar dalam kehidupan manusia karena berlangsung di dalam diri individu sebelum terjadi komunikasi dengan orang lain. Setiap tindakan, keputusan, sikap, maupun perilaku komunikasi seseorang pada dasarnya diawali oleh proses komunikasi internal yang melibatkan pikiran, perasaan, persepsi, dan kesadaran diri. Komunikasi intrapersonal sering disebut sebagai fondasi dari seluruh bentuk komunikasi manusia.[177]

Secara konseptual, komunikasi intrapersonal dapat dipahami sebagai proses pengolahan informasi yang terjadi dalam diri seseorang melalui aktivitas berpikir, merenung, mengingat, menafsirkan pengalaman, dan mengevaluasi berbagai stimulus yang diterima dari lingkungan. Dalam proses ini, individu berperan sekaligus sebagai pengirim dan penerima pesan. Komunikasi intrapersonal merupakan dialog internal yang berlangsung secara terus-menerus dalam diri manusia.[178]

Menurut Joseph A. Devito, komunikasi intrapersonal mencakup berbagai aktivitas mental seperti persepsi, memori, imajinasi, penalaran, dan *self-talk*. Aktivitas tersebut membentuk cara seseorang memahami dirinya sendiri dan dunia di sekitarnya. Kualitas komunikasi intrapersonal sangat menentukan bagaimana seseorang merespons situasi, membangun hubungan sosial, dan mengambil keputusan dalam kehidupannya.[179]

---

[175] Rufai, "Relasi Hukum Islam dan Etika Sosial," Jurnal Hukum Islam, 2023, hal. 9

[176] Ibrahim Irfandan Ushama, "Islamic Work Ethics and Universal Moral Values," Jurnal Studi Islam Kontemporer, 2024, hal. 12

[177] Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hal. 72.

[178] Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktik* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hal. 57.

[179] Joseph A. Devito, *Human Communication: The Basic Course* (Boston: Pearson Education, 2015), hal. 89.

Salah satu unsur penting dalam komunikasi intrapersonal adalah persepsi. Persepsi merupakan proses menafsirkan informasi yang diterima melalui pancaindra sehingga menghasilkan pemahaman tertentu terhadap realitas. Persepsi tidak selalu identik dengan kenyataan karena dipengaruhi oleh pengalaman, nilai, pengetahuan, budaya, dan kondisi psikologis individu. Akibatnya, dua orang yang menghadapi situasi yang sama dapat menghasilkan persepsi yang berbeda.[180]

Selain persepsi, komunikasi intrapersonal juga berkaitan erat dengan konsep diri (*self-concept*). Konsep diri adalah gambaran yang dimiliki seseorang mengenai dirinya sendiri, baik yang berkaitan dengan kemampuan, karakter, maupun nilai-nilai yang diyakininya. Konsep diri yang positif akan mendorong individu untuk berkomunikasi secara terbuka, percaya diri, dan konstruktif. Sebaliknya, konsep diri yang negatif dapat menimbulkan keraguan, ketidakpercayaan diri, dan hambatan dalam berinteraksi dengan orang lain.[181]

Dalam kajian psikologi komunikasi, komunikasi intrapersonal juga berhubungan dengan proses berpikir (*thinking process*). Berpikir merupakan aktivitas mental yang memungkinkan seseorang menganalisis informasi, mempertimbangkan berbagai alternatif, dan merumuskan keputusan. Melalui proses berpikir yang baik, seseorang dapat membedakan antara informasi yang benar dan yang keliru, serta mengambil keputusan secara rasional dan bertanggung jawab.[182]

Komunikasi intrapersonal memiliki peran penting dalam pembentukan kesadaran moral. Sebelum seseorang bertindak, biasanya terjadi proses pertimbangan internal mengenai baik dan buruk, benar dan salah, serta manfaat dan mudarat dari suatu tindakan. Proses reflektif ini menunjukkan bahwa komunikasi intrapersonal berkaitan dengan aspek kognitif, juga berkaitan dengan dimensi etika yang membentuk karakter seseorang.[183]

Dalam konteks kepemimpinan, komunikasi intrapersonal menjadi aspek yang sangat penting karena menentukan kualitas keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin. Pemimpin yang memiliki kemampuan refleksi diri akan lebih mampu mengevaluasi kebijakan, mengendalikan emosi, dan mempertimbangkan dampak dari setiap keputusan yang dibuat. Sebaliknya, lemahnya komunikasi intrapersonal dapat menyebabkan keputusan yang

---

[180] Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hal. 51.

[181] Joseph A. Devito, *The Interpersonal Communication Book* (Boston: Pearson Education, 2016), hal. 42.

[182] Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hal. 67.

[183] Franz Magnis-Suseno, *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral* (Yogyakarta: Kanisius, 2006), hal. 142.

impulsif, emosional, dan kurang mempertimbangkan kepentingan masyarakat.[184]

Perspektif Islam memberikan perhatian yang besar terhadap komunikasi intrapersonal. Al-Qur'an berulang kali mendorong manusia untuk melakukan *tafakkur* (berpikir), *tadabbur* (merenungi), dan *muhasabah* (introspeksi diri). Aktivitas-aktivitas tersebut menunjukkan bahwa komunikasi intrapersonal dalam Islam tidak hanya berfungsi sebagai proses psikologis, tetapi juga sebagai sarana pengembangan spiritual dan pembentukan kepribadian yang beriman.[185]

Konsep *tafakkur* dalam Al-Qur'an adalah penggunaan akal untuk memahami tanda-tanda kekuasaan Allah dan realitas kehidupan.[186] Melalui proses berpikir yang mendalam, manusia diharapkan mampu memperoleh hikmah dan kebijaksanaan dalam menjalani kehidupannya. Komunikasi intrapersonal dalam perspektif Islam tidak berhenti pada proses kognitif, tetapi mengarah pada pembentukan kesadaran yang lebih tinggi tentang tujuan hidup dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di muka bumi.

Sementara itu, konsep *muhasabah* menekankan pentingnya evaluasi diri secara terus-menerus. Muhasabah dilakukan seseorang guna menilai kembali ucapan, tindakan, dan keputusan yang telah dilakukan sehingga dapat memperbaiki kekurangan dan meningkatkan kualitas dirinya. [187] Dalam konteks kepemimpinan, muhasabah menjadi mekanisme pengendalian diri yang penting agar seorang pemimpin tidak terjebak dalam kesombongan, penyalahgunaan kekuasaan, atau keputusan yang merugikan masyarakat.

Komunikasi intrapersonal yang baik akan melahirkan integritas pribadi, yaitu keselarasan antara pikiran, perkataan, dan tindakan. Integritas merupakan fondasi utama bagi kepercayaan sosial karena masyarakat cenderung mempercayai pemimpin yang konsisten antara apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan. Komunikasi intrapersonal memiliki dampak bagi dirinya juga berimplikasi pada skala sosial yang luas, terutama dalam konteks kepemimpinan dan komunikasi publik.[188]

8. Komunikasi Interpersonal

Komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran pesan antara dua orang atau lebih yang berlangsung secara langsung maupun melalui media

---

[184] Gary Yukl, *Kepemimpinan dalam Organisasi* (Jakarta: Indeks, 2015), hal. 287.

[185] M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hal. 15.

[186] Raghib al-Ashfahani, *Al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2009), hal. 380.

[187] Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005), Juz IV, hal. 421.

[188] Bernard M. Bass dan Ronald E. Riggio, *Transformational Leadership* (New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 2006), hal. 4.

tertentu dengan tujuan membangun pemahaman bersama. [189] Berbeda dengan komunikasi intrapersonal yang terjadi dalam diri individu, komunikasi interpersonal melibatkan interaksi antarpribadi yang memungkinkan terjadinya umpan balik secara langsung. Komunikasi interpersonal sering dianggap sebagai bentuk komunikasi yang paling efektif dalam membangun hubungan sosial karena memungkinkan terjadinya pertukaran makna secara lebih mendalam dan personal.

Menurut Joseph A. Devito, komunikasi interpersonal adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan antara dua individu atau kelompok kecil yang memungkinkan terjadinya efek dan umpan balik secara langsung. Melalui komunikasi interpersonal, individu tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mengekspresikan perasaan, membangun kepercayaan, dan membentuk hubungan sosial yang berkelanjutan. Komunikasi interpersonal memiliki dimensi relasional yang sangat kuat dibandingkan bentuk komunikasi lainnya.[190]

Dalam kehidupan sosial, komunikasi interpersonal menjadi sarana utama bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan interaksi dan membangun hubungan dengan orang lain. Setiap individu membutuhkan komunikasi interpersonal untuk memperoleh pengakuan, dukungan emosional, kerja sama, dan rasa memiliki dalam lingkungan sosialnya. Hubungan keluarga, persahabatan, pendidikan, organisasi, maupun kepemimpinan pada dasarnya dibangun melalui proses komunikasi interpersonal yang berlangsung secara terus-menerus.[191]

Salah satu karakteristik utama komunikasi interpersonal adalah adanya hubungan timbal balik (*reciprocity*) antara komunikator dan komunikan. Dalam proses ini, kedua pihak saling memengaruhi dan dipengaruhi sehingga komunikasi tidak berlangsung secara satu arah. Hubungan timbal balik tersebut memungkinkan terbentuknya pemahaman bersama yang menjadi dasar terciptanya hubungan yang harmonis dan produktif.[192]

Keberhasilan komunikasi interpersonal sangat dipengaruhi oleh keterbukaan (*openness*). Keterbukaan menunjukkan kesediaan seseorang untuk berbagi informasi, pikiran, maupun perasaannya secara jujur kepada orang lain. Sikap terbuka dapat memperkuat kepercayaan dan mengurangi kesalahpahaman dalam hubungan interpersonal. Sebaliknya, komunikasi yang

---

[189] Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hal. 81.

[190] Joseph A. Devito, *The Interpersonal Communication Book* (Boston: Pearson Education, 2016), hal. 12.

[191] Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktik* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hal. 61.

[192] Alo Liliweri, *Komunikasi Antarpribadi* (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 23.

tertutup sering kali menimbulkan prasangka, kecurigaan, dan hambatan dalam membangun relasi sosial yang sehat.[193]

Selain keterbukaan, empati (*empathy*) juga menjadi unsur penting dalam komunikasi interpersonal. Empati adalah kemampuan memahami perasaan, kebutuhan, dan sudut pandang orang lain tanpa harus kehilangan identitas diri. Melalui empati, seseorang dapat membangun hubungan yang lebih hangat dan manusiawi karena mampu melihat suatu persoalan dari perspektif pihak lain. Dalam konteks kepemimpinan, empati menjadi faktor penting dalam membangun kedekatan antara pemimpin dan masyarakat.[194]

Komunikasi interpersonal juga membutuhkan sikap mendukung (*supportiveness*) yang tercermin dalam kesediaan untuk menghargai dan memberikan dukungan kepada pihak lain. Sikap ini menciptakan suasana komunikasi yang positif sehingga setiap individu merasa aman untuk menyampaikan pendapat dan aspirasinya. Sebaliknya, komunikasi yang penuh tekanan dan intimidasi akan menghambat proses pertukaran informasi dan memperlemah kualitas hubungan sosial.[195]

Aspek lainnya adalah sikap positif (*positiveness*). Sikap positif mencerminkan penghargaan terhadap diri sendiri dan orang lain dalam proses komunikasi. Individu yang memiliki sikap positif cenderung lebih mudah membangun hubungan yang harmonis karena mampu melihat potensi dan nilai baik yang dimiliki pihak lain. Dalam organisasi maupun kepemimpinan, sikap positif menjadi modal penting untuk menciptakan iklim komunikasi yang kondusif dan produktif.[196]

Komunikasi interpersonal yang efektif juga menuntut adanya kesetaraan (*equality*). Kesetaraan bukan berarti menghilangkan perbedaan status atau peran sosial, tetapi mengakui bahwa setiap individu memiliki martabat dan hak untuk didengar. Prinsip ini sangat penting dalam membangun komunikasi yang dialogis dan partisipatif. Ketika komunikasi didominasi oleh satu pihak, maka hubungan interpersonal cenderung berubah menjadi hubungan kekuasaan yang tidak sehat.[197]

Dalam perspektif psikologi komunikasi, komunikasi interpersonal sangat dipengaruhi oleh persepsi dan pengalaman individu. Cara seseorang menafsirkan perilaku orang lain akan memengaruhi respons komunikasi yang diberikan. Kesalahpahaman sering terjadi dalam komunikasi interpersonal

---

[193] Joseph A. Devito, *The Interpersonal Communication Book* (Boston: Pearson Education, 2016), hal. 118

[194] Suranto AW, *Komunikasi Interpersonal* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hal. 82.

[195] Agus M. Hardjana, *Komunikasi Intrapersonal dan Interpersonal* (Yogyakarta: Kanisius, 2016), hal. 97.

[196] Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hal. 129.

[197] Richard West dan Lynn H. Turner, *Introducing Communication Theory* (New York: McGraw-Hill, 2010), hal. 176.

bukan karena disebabkan oleh isi pesan, melainkan oleh perbedaan persepsi antara para pelaku komunikasi.[198]

Kemampuan mendengar (*listening skill*) merupakan salah satu kompetensi utama dalam komunikasi interpersonal. Mendengar tidak sekadar menerima suara atau informasi, tetapi juga memahami makna, emosi, dan kebutuhan yang terkandung dalam pesan yang disampaikan. Banyak konflik interpersonal terjadi karena individu lebih fokus untuk berbicara daripada mendengarkan. Kemampuan mendengar menjadi syarat penting dalam membangun hubungan interpersonal yang efektif dan berkelanjutan.[199]

Dalam konteks kepemimpinan, komunikasi interpersonal memiliki peran strategis dalam membangun kepercayaan publik. Pemimpin yang mampu berkomunikasi secara interpersonal dengan baik akan lebih mudah memahami kebutuhan masyarakat, menyerap aspirasi, serta membangun hubungan emosional dengan pihak yang dipimpinnya. Sebaliknya, komunikasi yang kaku dan berjarak sering kali menyebabkan munculnya ketidakpercayaan dan resistensi dari masyarakat.[200]

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan terhadap pola komunikasi interpersonal. Interaksi yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka kini banyak berlangsung melalui media digital seperti pesan instan, media sosial, dan konferensi virtual. Meskipun teknologi memberikan kemudahan dan kecepatan komunikasi, hubungan interpersonal yang dibangun melalui media digital sering kali kehilangan unsur kedekatan emosional dan kedalaman interaksi yang biasanya ditemukan dalam komunikasi langsung.[201]

Dalam perspektif Islam, komunikasi interpersonal tidak hanya dipahami sebagai proses pertukaran informasi, tetapi juga sebagai bagian dari akhlak dan tanggung jawab sosial. Islam mengajarkan bahwa komunikasi harus dibangun di atas prinsip kejujuran, penghormatan, kelembutan, dan kebaikan. Nilai-nilai tersebut tercermin dalam berbagai konsep komunikasi Qur'ani yang mengatur bagaimana seseorang berbicara dan berinteraksi dengan orang lain secara etis dan bermartabat.[202]

Komunikasi interpersonal bukan sekadar aktivitas sosial, melainkan juga sarana membangun hubungan kemanusiaan yang dilandasi nilai-nilai etika dan tanggung jawab spiritual.[203]

---

[198] Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hal. 54.

[199] Suranto AW, *Komunikasi Interpersonal* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hal. 67.

[200] Gary Yukl, *Kepemimpinan dalam Organisasi* (Jakarta: Indeks, 2015), hal. 291.

[201] Rulli Nasrullah, *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi* (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017), hal. 122.

[202] Abdul Basit, *Komunikasi Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2017), hal. 91

[203] M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Jakarta: Lentera Hati, 2013), hal. 386

Komunikasi interpersonal merupakan proses interaksi antarmanusia yang berperan penting dalam membangun hubungan sosial, kepercayaan, dan kerja sama. Komunikasi interpersonal menjadi landasan penting untuk memahami relasi komunikasi antara pemimpin dan rakyat. Seorang pemimpin yang mampu menerapkan prinsip-prinsip komunikasi interpersonal yang efektif dan etis akan lebih mudah membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat.

C. Teori Relasi Sosial

1. Konsep Relasi Sosial

Relasi sosial merupakan konsep dasar dalam kajian ilmu sosial yang merujuk pada hubungan timbal balik antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Hubungan tersebut terbentuk melalui interaksi yang berlangsung secara terus-menerus dalam kehidupan sosial. Dalam perspektif sosiologi, relasi sosial tidak hanya berkaitan dengan hubungan fisik antar individu, tetapi juga mencakup dimensi nilai, norma, dan makna yang mengatur bagaimana individu berperilaku dalam hubungan tersebut. Relasi sosial yang sehat biasanya ditandai oleh adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap individu dalam masyarakat.[204]

Dalam kajian ilmu sosial, relasi sosial juga dipahami sebagai pola hubungan yang membentuk struktur masyarakat. Pola hubungan ini dapat berbentuk kerja sama, persaingan, konflik, maupun akomodasi yang semuanya memiliki peran dalam dinamika kehidupan sosial. Relasi sosial yang terjalin melalui berbagai bentuk interaksi tersebut membentuk jaringan hubungan yang menghubungkan individu dengan kelompok sosial yang lebih luas.[205]

Relasi sosial juga memiliki kaitan erat dengan proses interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat. Interaksi sosial merupakan proses di mana individu saling mempengaruhi satu sama lain melalui tindakan dan komunikasi. Melalui interaksi tersebut, individu membangun hubungan yang kemudian berkembang menjadi relasi sosial yang lebih stabil. Dalam konteks ini, komunikasi menjadi unsur penting yang memungkinkan terjadinya pertukaran makna antara individu dalam proses interaksi sosial. Tanpa komunikasi, relasi sosial tidak dapat terbentuk karena individu tidak memiliki sarana untuk memahami tindakan dan maksud pihak lain.[206]

---

[204] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015, hal 55.

[205] Abdulsyani, *Sosiologi: Skematika, Teori, dan Terapan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012, hal 141.

[206] J Dwi Narwoko, J. Dwi & Bagong Suyanto, *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Kencana, 2013, hal 79.

Dalam kehidupan masyarakat, relasi sosial juga dipengaruhi oleh nilai dan norma yang berlaku dalam lingkungan sosial tertentu. Nilai dan norma tersebut berfungsi sebagai pedoman yang mengatur bagaimana individu seharusnya berperilaku dalam hubungan sosial. Ketika individu mematuhi nilai dan norma yang berlaku, maka relasi sosial akan berkembang secara harmonis karena setiap individu memahami batasan perilaku yang dapat diterima oleh masyarakat.[207]

Relasi sosial juga berkaitan dengan konsep peran sosial yang dimiliki oleh individu dalam masyarakat. Setiap individu dalam masyarakat biasanya memiliki peran tertentu yang berkaitan dengan posisi sosial yang dimilikinya. Peran sosial tersebut menentukan bagaimana individu seharusnya berperilaku dalam hubungan dengan orang lain. Dalam konteks ini, relasi sosial tidak hanya ditentukan oleh hubungan personal antar individu, tetapi juga oleh struktur peran yang mengatur hubungan tersebut dalam masyarakat.[208]

Selain berkaitan dengan peran sosial, relasi sosial juga memiliki hubungan erat dengan konsep kekuasaan dalam masyarakat. Dalam setiap hubungan sosial sering kali terdapat perbedaan kekuasaan antara individu atau kelompok yang terlibat dalam hubungan tersebut. Perbedaan kekuasaan ini dapat mempengaruhi bagaimana interaksi sosial berlangsung karena pihak yang memiliki kekuasaan lebih besar cenderung memiliki pengaruh yang lebih kuat dalam menentukan arah hubungan sosial.[209]

Relasi sosial juga berperan penting dalam membangun solidaritas sosial dalam masyarakat. Solidaritas sosial merujuk pada rasa keterikatan yang muncul antara individu dalam suatu kelompok sosial. Keterikatan ini muncul karena individu merasa memiliki kepentingan bersama serta memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga hubungan sosial dalam masyarakat. Ketika solidaritas sosial kuat, maka masyarakat cenderung memiliki tingkat kohesi sosial yang tinggi karena individu saling mendukung dalam berbagai aspek kehidupan.[210]

Dalam masyarakat modern yang kompleks, relasi sosial juga mengalami perubahan seiring dengan perkembangan teknologi dan globalisasi. Perkembangan teknologi komunikasi telah memperluas ruang interaksi sosial manusia sehingga relasi sosial tidak lagi terbatas pada hubungan tatap muka dalam komunitas lokal. Individu kini dapat menjalin hubungan sosial dengan orang lain yang berada di tempat yang jauh melalui berbagai media komunikasi

---

[207] Elly M Setiadi & Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi*, Jakarta: Kencana, 2011, hal 95.

[208] Basrowi, *Pengantar Sosiologi*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2014, hal 63.

[209] Miriam Budiardjo, , *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010, hal 41.

[210] Emile Durkheim, *The Division of Labor in Society*, New York: Free Press, 1997, hal 129.

digital. Kondisi ini menunjukkan bahwa relasi sosial bersifat dinamis dan terus berkembang mengikuti perubahan dalam struktur masyarakat.[211]

Nur Arfiyah Febriani dalam kajian ilmiahnya tentang "Metode Tematik Multidisipliner: Aplikasi pada Tafsir Ekologi Berwawasan Gender" menekankan bahwa pendekatan tematik multi strategis merupakan instrumen penting dalam menafsirkan Al-Qur'an secara kontekstual dan multidimensional. Menurut Febriani, pemaknaan ayat yang mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu memungkinkan teks Al-Qur'an berfungsi sebagai sumber nilai yang dinamis dalam menjawab tantangan sosial kontemporer, termasuk persoalan etika dan relasi sosial. Pendekatan ini menunjukkan bahwa tafsir tidak hanya bersifat tekstual literal, tetapi juga responsif terhadap konteks sosial politik, sehingga memperkaya wacana komunikasi Islam dalam membentuk budaya komunikasi yang sehat, inklusif, dan berkeadaban.[212]

Relasi sosial juga memiliki kaitan dengan pembentukan identitas sosial individu dalam masyarakat. Identitas sosial terbentuk melalui interaksi yang berlangsung antara individu dengan kelompok sosial tertentu. Melalui proses tersebut, individu mengembangkan pemahaman mengenai posisi dan perannya dalam masyarakat. Relasi sosial yang terjalin dalam berbagai komunitas sosial membantu individu membentuk identitas sosial yang memberikan makna terhadap keberadaannya dalam masyarakat.[213]

Dalam kehidupan masyarakat, relasi sosial juga berfungsi sebagai mekanisme yang memungkinkan individu bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Kerja sama merupakan bentuk interaksi sosial yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat karena banyak aktivitas sosial yang tidak dapat dilakukan secara individu. Melalui relasi sosial yang kuat, individu dapat membangun jaringan kerja sama yang membantu mereka mencapai tujuan yang lebih besar.[214]

Relasi sosial pada akhirnya menjadi fondasi penting bagi terbentuknya kehidupan masyarakat yang harmonis dan berkeadaban. Hubungan sosial yang didasarkan pada nilai saling menghormati, kepercayaan, dan tanggung jawab moral akan menciptakan lingkungan sosial yang stabil dan produktif. Sebaliknya, relasi sosial yang dipenuhi oleh konflik dan dominasi kekuasaan dapat merusak keseimbangan kehidupan masyarakat.[215]

---

[211] Piotr Sztompka, , *Sosiologi Perubahan Sosial*, Jakarta: Prenada Media, 2011, hal 106

[212] Nur Arfiyah Febriani, "Metode Tematik Multidisipliner: Aplikasi pada Tafsir Ekologi Berwawasan Gender," dalam *Mashdar: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadis,* Vol. 1, no.2, 2019, hal. 114.

[213] Peter Berger, L., & Luckmann, Thomas, *The Social Construction of Reality*, London: Penguin Books, 1991, hal 97.

[214] Francis Fukuyama, *Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity*, New York: Free Press, 1995, hal 36.

[215] Anthony Giddens, *Sociology*, Cambridge: Polity Press, 2017, hal 78.

2. Teori Interaksi Simbolik – Goerge Herbert Mead

Teori interaksi simbolik yang dikembangkan oleh George Herbert Mead memberikan penjelasan penting mengenai bagaimana relasi sosial terbentuk melalui proses komunikasi simbolik antara individu dalam masyarakat. Mead menjelaskan bahwa manusia tidak hanya berinteraksi melalui tindakan fisik, tetapi juga melalui simbol-simbol yang memiliki makna sosial, seperti bahasa, *gesteur*, dan tanda-tanda komunikasi lainnya. Melalui simbol-simbol tersebut, individu dapat memahami maksud tindakan orang lain dan menyesuaikan perilakunya dalam hubungan sosial. Dalam perspektif ini, relasi sosial dipandang sebagai hasil dari proses interpretasi makna yang berlangsung secara terus-menerus dalam interaksi antar individu.[216]

Dalam kerangka interaksi simbolik, konsep diri (*self*) juga memiliki peran penting dalam pembentukan relasi sosial. Mead menjelaskan bahwa identitas diri individu terbentuk melalui interaksi sosial dengan orang lain. Individu belajar memahami dirinya sendiri melalui cara orang lain merespons tindakan dan perilakunya dalam hubungan sosial. Proses ini menunjukkan bahwa identitas individu tidak terbentuk secara terpisah dari masyarakat, tetapi berkembang melalui proses komunikasi yang berlangsung dalam kehidupan sosial.[217]

Teori interaksi simbolik juga menjelaskan bahwa makna sosial tidak bersifat tetap, melainkan terus berkembang melalui proses komunikasi dalam masyarakat. Makna suatu simbol dapat berubah seiring dengan perubahan konteks sosial dan interpretasi individu terhadap simbol tersebut. Dalam interaksi sosial, individu secara aktif menafsirkan tindakan orang lain serta menyesuaikan tindakannya berdasarkan interpretasi tersebut.[218]

Dalam kehidupan sosial, simbol yang paling penting dalam proses interaksi adalah bahasa. Bahasa memungkinkan individu menyampaikan gagasan, perasaan, dan pengalaman kepada orang lain secara sistematis. Melalui bahasa, individu dapat berbagi makna dan membangun pemahaman bersama mengenai berbagai fenomena sosial yang mereka alami. Bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai sarana pembentukan realitas sosial karena melalui bahasa individu membangun interpretasi terhadap dunia sosial di sekitarnya. Bahasa menjadi unsur penting dalam pembentukan relasi sosial dalam masyarakat.[219]

---

[216] George Herbert Mead, *Mind, Self, and Society*, Chicago: University of Chicago Press, 1934, hal 78

[217] George Ritzer & Jefrey Stepnisky, *Sociological Theory*, New York: McGraw-Hill Education, 2018, hal 376

[218] Herbert Blumer, *Symbolic Interactionism: Perspective and Method*, Berkeley: University of California Press, 1969, hal 69.

[219] Stephen W Littlejohn & Karen A Foss, *Theories of Human Communication*, Illinois: Waveland Press, 2009, hal 213.

Teori interaksi simbolik juga memberikan pemahaman bahwa relasi sosial terbentuk melalui proses negosiasi makna antara individu yang berinteraksi. Dalam setiap interaksi sosial, individu tidak hanya menerima makna yang sudah ada, tetapi juga terlibat dalam proses pembentukan makna melalui komunikasi. Proses negosiasi makna ini memungkinkan individu menyesuaikan perilaku mereka dalam hubungan sosial sehingga tercipta keseimbangan dalam interaksi sosial. Relasi sosial tidak bersifat statis, tetapi merupakan hasil dari proses komunikasi yang berlangsung secara dinamis dalam kehidupan masyarakat.[220]

Dalam konteks kepemimpinan, teori interaksi simbolik memberikan pemahaman bahwa hubungan antara pemimpin dan masyarakat juga dibentuk melalui simbol-simbol komunikasi yang digunakan dalam interaksi sosial. Bahasa, gaya komunikasi, serta tindakan simbolik yang dilakukan oleh pemimpin dapat mempengaruhi bagaimana masyarakat memandang kepemimpinannya. Ketika pemimpin mampu menggunakan simbol komunikasi yang mencerminkan nilai-nilai yang dihargai oleh masyarakat, maka relasi sosial antara pemimpin dan masyarakat cenderung berkembang secara positif. Sebaliknya, ketika simbol komunikasi yang digunakan tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial masyarakat, maka hubungan tersebut dapat mengalami ketegangan.[221]

Interaksi simbolik juga menjelaskan bahwa komunikasi memiliki peran penting dalam membangun legitimasi sosial dalam hubungan kepemimpinan. Legitimasi kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh kekuasaan formal yang dimiliki oleh pemimpin, tetapi juga oleh bagaimana masyarakat menafsirkan tindakan dan komunikasi pemimpin tersebut. Ketika komunikasi pemimpin dipahami sebagai representasi dari nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan kepedulian sosial, maka masyarakat cenderung memberikan dukungan terhadap kepemimpinan tersebut. Komunikasi simbolik menjadi sarana penting dalam membangun hubungan sosial yang kuat antara pemimpin dan masyarakat.[222]

Selain itu, teori interaksi simbolik juga membantu menjelaskan bagaimana norma sosial terbentuk melalui proses komunikasi dalam masyarakat. Norma sosial berkembang melalui kesepakatan tidak tertulis yang terbentuk dari interaksi sosial yang berlangsung secara terus-menerus. Individu mempelajari norma tersebut melalui proses komunikasi dengan anggota masyarakat lainnya. Melalui proses ini, individu memahami perilaku

---

[220] Richard West & Lynn H Turner, *Introducing Communication Theory*, New York: McGraw-Hill Education, 2010, hal 104.

[221] Peter G Northouse, *Leadership: Theory and Practice*, California: Sage Publications, 2016, hal 305.

[222] Hafied Cangara, *Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018, hal 87.

apa yang dianggap pantas dan tidak pantas dalam hubungan sosial. Komunikasi simbolik memainkan peran penting dalam membentuk sistem nilai dan norma yang mengatur kehidupan sosial masyarakat.[223]

Teori interaksi simbolik juga menekankan bahwa manusia merupakan makhluk yang secara aktif membentuk realitas sosial melalui komunikasi. Individu tidak hanya bereaksi terhadap lingkungan sosialnya secara pasif, tetapi juga secara aktif menafsirkan dan membentuk makna dari pengalaman sosial yang mereka alami. Proses ini menunjukkan bahwa relasi sosial merupakan hasil dari interaksi yang berlangsung secara dinamis antara individu dalam masyarakat.[224]

Dalam masyarakat modern yang semakin kompleks, interaksi simbolik juga semakin dipengaruhi oleh perkembangan media komunikasi. Media massa dan media digital kini menjadi bagian penting dari proses pembentukan makna sosial dalam masyarakat. Melalui media tersebut, individu memperoleh berbagai simbol dan informasi yang mempengaruhi cara mereka memahami realitas sosial.[225]

Dalam konteks komunikasi kepemimpinan, simbol-simbol komunikasi yang digunakan oleh pemimpin melalui media juga memiliki pengaruh yang besar terhadap persepsi masyarakat. Pernyataan publik, pidato, serta simbol-simbol komunikasi lainnya dapat membentuk citra kepemimpinan di mata masyarakat. Pemimpin perlu memahami bagaimana simbol komunikasi yang mereka gunakan dapat mempengaruhi interpretasi masyarakat terhadap kepemimpinan mereka.[226]

Teori interaksi simbolik memberikan pemahaman bahwa relasi sosial terbentuk melalui proses komunikasi yang melibatkan pertukaran simbol dan interpretasi makna antara individu dalam masyarakat. Melalui proses tersebut, individu membangun pemahaman bersama mengenai tindakan sosial serta membentuk hubungan yang memungkinkan kehidupan sosial berlangsung secara teratur.

3. Teori Kekuasaan dan Dis-kursus – Michel Foucault

Teori kekuasaan dan dis-kursus yang dikembangkan oleh Michel Foucault memberikan perspektif penting dalam memahami relasi sosial dalam masyarakat, terutama dalam kaitannya dengan komunikasi dan kekuasaan.

---

[223] Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015, hal 109.

[224] Peter L Berger & Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality*, London: Penguin Books, 1991, hal 52.

[225] Denis McQuail, *McQuail's Mass Communication Theory*, London: Sage Publications, 2010, hal 74.

[226] Anwar Arifin, *Komunikasi Politik: Paradigma, Teori, dan Praktik*, Jakarta: Balai Pustaka, 2011, hal 96.

Foucault menjelaskan bahwa kekuasaan tidak hanya berada pada institusi politik atau struktur formal, tetapi tersebar dalam berbagai relasi sosial yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat. Kekuasaan hadir dalam berbagai praktik sosial, termasuk dalam bahasa, wacana, dan sistem pengetahuan yang membentuk cara manusia memahami realitas sosial. Dalam kerangka ini, komunikasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian pesan, tetapi juga sebagai medium yang dapat mereproduksi atau menantang struktur kekuasaan dalam masyarakat. Relasi sosial sering kali dipengaruhi oleh dinamika kekuasaan yang bekerja melalui praktik komunikasi dalam kehidupan sosial.[227]

Dalam perspektif Foucault, konsep dis-kursus menjadi kunci untuk memahami bagaimana kekuasaan bekerja dalam masyarakat. Dis-kursus merujuk pada sistem pengetahuan dan praktik bahasa yang membentuk cara masyarakat memahami suatu fenomena sosial. Melalui dis-kursus, kekuasaan dapat menentukan apa yang dianggap benar, sah, atau normal dalam masyarakat.[228]

Relasi sosial dalam kerangka kekuasaan dan dis-kursus juga menunjukkan bahwa komunikasi dapat menjadi sarana legitimasi kekuasaan dalam masyarakat. Melalui bahasa dan wacana yang disampaikan dalam komunikasi publik, kelompok yang memiliki kekuasaan dapat mempengaruhi cara masyarakat memahami suatu kebijakan atau tindakan politik. Diskursus yang dibangun melalui komunikasi tersebut dapat membentuk opini publik yang mendukung atau menolak suatu kekuasaan.[229]

Dalam konteks relasi sosial, teori Foucault juga menjelaskan bahwa kekuasaan tidak selalu bersifat represif, tetapi juga produktif. Kekuasaan dapat menghasilkan berbagai bentuk pengetahuan, norma, dan praktik sosial yang mengatur kehidupan masyarakat. Melalui komunikasi, kekuasaan dapat membentuk pola perilaku yang dianggap wajar dalam masyarakat.[230]

Dalam hubungan antara pemimpin dan masyarakat, teori kekuasaan dan dis-kursus membantu menjelaskan bagaimana komunikasi dapat digunakan untuk membangun atau mempertahankan kekuasaan. Pemimpin sering menggunakan bahasa dan simbol komunikasi tertentu untuk membangun citra kepemimpinan yang positif di mata masyarakat. Melalui pidato, pernyataan

---

[227] Michel Foucault, *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings*, New York: Pantheon Books, 1980, hal 98.

[228] Michel Foucault, *The Archaeology of Knowledge*, London: Routledge, 2002, hal 54.

[229] Norman Fairclough, *Discourse and Social Change*, Cambridge: Polity Press, 1995, hal 63.

[230] Michel Foucault, *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*, New York: Vintage Books, 1995, hal 194.

publik, dan komunikasi politik lainnya, pemimpin dapat membentuk diskursus yang mempengaruhi cara masyarakat memahami kebijakan yang diambil.[231]

Namun demikian, teori Foucault juga menunjukkan bahwa relasi kekuasaan dalam komunikasi tidak selalu bersifat satu arah. Masyarakat juga memiliki kemampuan untuk menafsirkan, menolak, atau bahkan menantang dis-kursus yang dibangun oleh kekuasaan. Dalam kehidupan sosial, berbagai kelompok masyarakat dapat menciptakan dis-kursus alternatif yang menawarkan cara pandang berbeda terhadap suatu fenomena sosial. Proses ini menunjukkan bahwa relasi sosial dalam masyarakat bersifat dinamis karena melibatkan berbagai kepentingan dan interpretasi yang saling berinteraksi.[232]

Relasi sosial dalam perspektif kekuasaan juga menunjukkan bahwa komunikasi dapat menjadi arena negosiasi antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Dalam proses komunikasi publik, berbagai kelompok sosial dapat menyampaikan pandangan mereka mengenai suatu isu sosial. Proses negosiasi ini memungkinkan terbentuknya pemahaman bersama mengenai berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat.[233]

Dalam masyarakat modern, media komunikasi memiliki peran penting dalam membentuk dis-kursus sosial yang mempengaruhi relasi kekuasaan. Media massa dan media digital menjadi ruang di mana berbagai wacana sosial diproduksi, disebarkan, dan diperdebatkan oleh masyarakat. Melalui media tersebut, masyarakat dapat memperoleh berbagai perspektif mengenai suatu isu sosial sehingga dapat membentuk pandangan mereka terhadap realitas sosial yang ada.[234]

Dalam konteks komunikasi kepemimpinan, pemahaman mengenai relasi kekuasaan dalam komunikasi sangat penting karena dapat membantu pemimpin memahami bagaimana pesan yang mereka sampaikan dapat mempengaruhi persepsi masyarakat. Komunikasi yang dilakukan oleh pemimpin tidak hanya berfungsi menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk cara masyarakat memahami kebijakan yang diambil.[235]

Teori kekuasaan dan dis-kursus juga menunjukkan bahwa etika komunikasi menjadi unsur penting dalam menjaga keseimbangan relasi sosial dalam masyarakat. Komunikasi yang digunakan sebagai alat dominasi dapat merusak hubungan sosial karena menciptakan ketimpangan dalam relasi kekuasaan. Sebaliknya, komunikasi yang dilakukan secara etis dapat

---

[231] Hafied Cangara, *Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018, hal 145

[232] Chris Barker, *Cultural Studies: Theory and Practice*, London: Sage Publications, 2012, hal 214.

[233] Jürgen Habermas, *Between Facts and Norms*, Cambridge: MIT Press, 1996, hal 306.

[234] Denis McQuail, *McQuail's Mass Communication Theory*, London: Sage Publications, 2010, hal 121.

[235] Anwar Arifin, *Komunikasi Politik: Paradigma, Teori, dan Praktik*, Jakarta: Balai Pustaka, 2011, hal 118.

membantu menciptakan hubungan sosial yang lebih adil karena setiap pihak memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pandangannya.[236]

Dalam perspektif sosial, teori kekuasaan juga membantu menjelaskan bagaimana konflik sosial dapat muncul dalam relasi komunikasi antara kelompok dalam masyarakat. Konflik sering terjadi ketika satu kelompok merasa bahwa dis-kursus yang berkembang dalam masyarakat tidak mencerminkan kepentingan mereka. Dalam situasi seperti ini, komunikasi menjadi arena di mana berbagai kelompok sosial berusaha memperjuangkan pandangan mereka.[237]

Relasi sosial yang dipengaruhi oleh kekuasaan juga dapat membentuk struktur sosial yang lebih luas dalam masyarakat. Struktur sosial tersebut menentukan bagaimana individu atau kelompok berinteraksi satu sama lain dalam kehidupan sosial. Ketika relasi kekuasaan berjalan secara seimbang dan adil, maka struktur sosial yang terbentuk cenderung lebih stabil.[238]

Dalam kehidupan masyarakat yang kompleks, pemahaman mengenai relasi kekuasaan dalam komunikasi menjadi penting untuk menganalisis bagaimana berbagai kebijakan sosial dan politik dibentuk melalui proses komunikasi publik. Dis-kursus yang berkembang dalam komunikasi publik sering kali mempengaruhi arah kebijakan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga sosial lainnya.[239]

Teori kekuasaan dan dis-kursus yang dikemukakan oleh Foucault memberikan pemahaman bahwa relasi sosial dalam masyarakat tidak dapat dilepaskan dari dinamika kekuasaan yang bekerja melalui praktik komunikasi. Komunikasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai medium yang membentuk pengetahuan, norma, dan hubungan kekuasaan dalam masyarakat. Oleh karena itu, analisis terhadap komunikasi sosial perlu mempertimbangkan bagaimana kekuasaan bekerja dalam praktik komunikasi yang membentuk relasi sosial dalam kehidupan masyarakat.

4. Teori Kepemimpinan Tranformasional – James MacGregor Burns

Teori kepemimpinan transformasional yang diperkenalkan oleh James MacGregor Burns memberikan perspektif penting dalam memahami hubungan antara pemimpin dan masyarakat dalam relasi sosial. Burns menjelaskan bahwa kepemimpinan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi juga berkaitan

---

[236] Stephen W. Littlejohn & Karen A Foss, *Theories of Human Communication*, Illinois: Waveland Press, 2009, hal 278.

[237] Goerge Ritzer & Jeffrey Stepnisky, *Sociological Theory*, New York: McGraw-Hill Education, 2018, hal 411.

[238] Anthony Giddens, , *Sociology*, Cambridge: Polity Press, 2017, hal 296.

[239] Sumartono, *Komunikasi Sosial dan Budaya*, Jakarta: Kencana, 2017, hal 146.

dengan kemampuan pemimpin untuk menginspirasi perubahan nilai dan kesadaran moral dalam masyarakat. Dalam kepemimpinan transformasional, pemimpin dan pengikut saling mempengaruhi satu sama lain dalam proses yang menghasilkan perubahan sosial yang lebih baik. Relasi sosial antara pemimpin dan masyarakat tidak bersifat hierarkis semata, tetapi juga bersifat dinamis karena kedua pihak terlibat dalam proses transformasi sosial yang berlangsung secara bersama-sama.[240]

Konsep kepemimpinan transformasional menekankan bahwa pemimpin yang efektif tidak hanya berfokus pada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, tetapi juga berupaya mendorong perubahan sosial yang memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas. Pemimpin transformasional berusaha membangun visi bersama yang dapat menginspirasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perubahan sosial. Melalui komunikasi yang persuasif dan penuh inspirasi, pemimpin dapat membangkitkan motivasi masyarakat untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama.[241]

Dalam relasi sosial antara pemimpin dan masyarakat, kepemimpinan transformasional menekankan pentingnya hubungan yang didasarkan pada kepercayaan dan penghargaan terhadap nilai-nilai moral. Pemimpin transformasional tidak hanya berperan sebagai pengambil keputusan, tetapi juga sebagai teladan moral yang memberikan inspirasi bagi masyarakat. Melalui sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai etika, pemimpin dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinannya. Kepercayaan tersebut menjadi faktor penting dalam memperkuat relasi sosial karena masyarakat merasa bahwa pemimpin mereka memiliki komitmen terhadap kepentingan bersama.[242]

Salah satu karakteristik utama kepemimpinan transformasional adalah kemampuan pemimpin untuk memotivasi masyarakat melalui komunikasi yang inspiratif. Pemimpin transformasional menggunakan bahasa dan simbol komunikasi yang mampu membangkitkan semangat serta keyakinan masyarakat terhadap tujuan bersama. Melalui komunikasi yang inspiratif, pemimpin dapat membantu masyarakat memahami pentingnya perubahan sosial yang sedang diupayakan.[243]

Selain itu, kepemimpinan transformasional juga menekankan pentingnya perhatian terhadap kebutuhan individu dalam masyarakat. Pemimpin transformasional berusaha memahami aspirasi dan kebutuhan masyarakat

---

[240] James MacGregor Burns, , *Leadership*, New York: Harper & Row, 1978, hal 20

[241] Bernard M Bass & Ronald E Riggio, *Transformational Leadership*, New York: Psychology Press, 2006, hal 6.

[242] Peter G Northouse, *Leadership: Theory and Practice*, California: Sage Publications, 2016, hal 162.

[243] Gary Yukl, , *Leadership in Organizations*, New Jersey: Pearson Education, 2013, hal 313.

sehingga dapat memberikan dukungan yang sesuai dengan kondisi sosial yang dihadapi oleh masyarakat. Pendekatan ini membantu menciptakan hubungan yang lebih dekat antara pemimpin dan masyarakat karena komunikasi yang dilakukan didasarkan pada pemahaman terhadap kondisi sosial yang nyata.[244]

Dalam konteks relasi sosial, kepemimpinan transformasional juga berperan dalam memperkuat solidaritas sosial dalam masyarakat. Pemimpin transformasional berusaha membangun rasa kebersamaan di antara anggota masyarakat dengan menekankan pentingnya tujuan bersama yang melampaui kepentingan individu atau kelompok tertentu. Melalui komunikasi yang menekankan nilai kebersamaan, pemimpin dapat memperkuat kohesi sosial dalam masyarakat sehingga masyarakat lebih siap menghadapi berbagai tantangan sosial yang muncul.[245]

Kepemimpinan transformasional juga memiliki kaitan erat dengan proses perubahan sosial dalam masyarakat. Pemimpin transformasional berusaha mendorong masyarakat untuk berpikir secara kritis mengenai kondisi sosial yang ada serta mencari solusi untuk memperbaiki kondisi tersebut. Melalui komunikasi yang terbuka dan inspiratif, pemimpin dapat membantu masyarakat memahami pentingnya perubahan sosial yang berorientasi pada kemaslahatan bersama.[246]

Dalam kehidupan masyarakat modern, kepemimpinan transformasional juga menjadi salah satu pendekatan yang banyak digunakan dalam berbagai organisasi sosial dan politik. Pemimpin yang mampu menginspirasi masyarakat melalui komunikasi yang visioner cenderung lebih berhasil dalam membangun dukungan sosial terhadap kebijakan yang diambil.[247] Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif dan etis merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan kepemimpinan transformasional.

Relasi sosial antara pemimpin dan masyarakat dalam kepemimpinan transformasional juga ditandai oleh adanya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Pemimpin transformasional tidak hanya memaksakan kebijakan secara sepihak, tetapi juga melibatkan masyarakat dalam proses dialog mengenai berbagai kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Partisipasi masyarakat ini membantu menciptakan hubungan sosial yang lebih demokratis karena masyarakat merasa memiliki

---

[244] Stephen P Robbins & Timothy A Judge, *Organizational Behavior*, New Jersey: Pearson Education, 2017, hal 415.

[245] Richard L Daft,., *The Leadership Experience*, Boston: Cengage Learning, 2015, hal 360

[246] James MacGregor Burns, , *Leadership*, New York: Harper & Row, 1978, hal 425.

[247] Veithzal Rivai, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014, hal 235.

peran dalam menentukan arah kebijakan yang mempengaruhi kehidupan mereka. [248]

Selain itu, kepemimpinan transformasional juga membantu membangun budaya organisasi atau budaya sosial yang mendorong inovasi dan perubahan positif. Pemimpin transformasional mendorong masyarakat untuk berpikir kreatif dalam mencari solusi terhadap berbagai permasalahan sosial. Melalui komunikasi yang mendorong dialog dan pertukaran gagasan, pemimpin dapat menciptakan lingkungan sosial yang mendukung perkembangan ide-ide baru yang bermanfaat bagi masyarakat.[249]

Dalam perspektif relasi sosial, kepemimpinan transformasional juga berkontribusi dalam membangun hubungan yang lebih humanis antara pemimpin dan masyarakat. Pemimpin transformasional tidak memandang masyarakat sebagai objek kekuasaan, tetapi sebagai mitra dalam proses pembangunan sosial. Dengan pendekatan ini, komunikasi yang terjalin antara pemimpin dan masyarakat cenderung bersifat dialogis karena kedua pihak saling berbagi gagasan dalam proses pembangunan sosial.[250] Hal ini membantu menciptakan hubungan sosial yang lebih harmonis dalam masyarakat.

Relasi sosial yang dibangun melalui kepemimpinan transformasional juga membantu menciptakan lingkungan sosial yang lebih adil dan berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan. Pemimpin transformasional berusaha mendorong masyarakat untuk menjunjung tinggi nilai-nilai etika dalam kehidupan sosial. Melalui komunikasi yang menekankan pentingnya kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian sosial, pemimpin dapat membantu membangun budaya sosial yang lebih berkeadaban dalam masyarakat.[251]

Teori kepemimpinan transformasional memberikan pemahaman bahwa relasi sosial antara pemimpin dan masyarakat dapat berkembang secara positif ketika komunikasi yang dilakukan oleh pemimpin mampu menginspirasi perubahan sosial yang berorientasi pada nilai-nilai moral dan kepentingan bersama. Komunikasi yang visioner, empati, dan partisipatif menjadi unsur penting dalam membangun hubungan sosial yang kuat antara pemimpin dan masyarakat.

---

[248] Haryanto, *Kepemimpinan Transformasional dalam Organisasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2017, hal 92.

[249] Edy Sutrisno, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Kencana, 2016, hal 205.

[250] Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013, hal 75.

[251] Fred Luthans, *Organizational Behavior*, New York: McGraw-Hill Education, 2011, hal 429.

D. Rakyat dalam Relasi Sosial

1. Partisipasi Sosial

Dalam perspektif Islam, partisipasi masyarakat dalam kehidupan sosial memiliki dasar normatif yang kuat karena Islam menempatkan manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki tanggung jawab bersama dalam membangun kehidupan masyarakat yang adil dan berkeadaban. Konsep partisipasi sosial dalam Islam dapat dilihat melalui prinsip *musyawarah* yang menjadi salah satu nilai penting dalam kehidupan sosial umat. Musyawarah menunjukkan bahwa pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat seharusnya melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan, sehingga keputusan yang dihasilkan mencerminkan kepentingan bersama. Prinsip ini menegaskan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga memiliki hak untuk terlibat dalam proses komunikasi sosial yang menentukan arah kehidupan bersama.[252]

Selain itu, dalam tradisi pemikiran Islam klasik, relasi sosial antara pemimpin dan masyarakat juga menempatkan rakyat sebagai subjek yang memiliki hak untuk menyampaikan nasihat dan kritik kepada pemimpin. Para ulama menjelaskan bahwa hubungan antara pemimpin dan masyarakat tidak hanya bersifat hierarkis, tetapi juga bersifat moral dan dialogis karena keduanya memiliki tanggung jawab untuk menjaga kemaslahatan masyarakat. Dalam konsep *al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar*, masyarakat memiliki peran aktif dalam mengingatkan pemimpin apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan kekuasaan.[253] Hal ini menunjukkan bahwa dalam perspektif Islam, masyarakat memiliki posisi penting dalam relasi sosial karena mereka menjadi bagian dari mekanisme moral yang menjaga keseimbangan dalam kehidupan sosial dan politik umat.

Partisipasi sosial merupakan salah satu konsep penting dalam memahami posisi rakyat sebagai subjek dalam relasi sosial dalam masyarakat. Partisipasi sosial merujuk pada keterlibatan aktif masyarakat dalam berbagai proses sosial, politik, dan pembangunan yang berlangsung dalam kehidupan bersama. Dalam perspektif ilmu sosial, masyarakat tidak hanya dipandang sebagai objek kebijakan atau penerima keputusan dari pihak yang berkuasa, tetapi juga sebagai aktor yang memiliki hak untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Melalui partisipasi sosial,

---

[252] Yusuf Al-Qaradawi, *Min Fiqh ad-Daulah fi al-Islam*, Kairo: Dar al-Syuruq, 1997, hal 123.

[253] Abu Al-Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2006, hal 22.

masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, kebutuhan, serta pandangan mereka mengenai berbagai persoalan sosial yang dihadapi.[254]

Dalam kehidupan masyarakat modern, partisipasi sosial tidak hanya berkaitan dengan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan politik formal seperti pemilihan umum, tetapi juga mencakup berbagai bentuk keterlibatan dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya. Partisipasi masyarakat dapat terlihat dalam berbagai aktivitas seperti musyawarah masyarakat, kegiatan organisasi sosial, maupun keterlibatan dalam proses perumusan kebijakan publik. Bentuk-bentuk partisipasi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam membangun kehidupan sosial yang lebih baik.[255]

Partisipasi sosial juga berkaitan erat dengan konsep pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sosial. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menentukan masa depan mereka sendiri melalui keterlibatan aktif dalam berbagai proses sosial. Ketika masyarakat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, mereka akan merasa memiliki tanggung jawab terhadap hasil keputusan tersebut. Hal ini dapat meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap berbagai program pembangunan yang dilaksanakan.[256]

Dalam relasi sosial antara pemimpin dan masyarakat, partisipasi sosial memainkan peran penting dalam membangun hubungan yang lebih demokratis. Hubungan yang demokratis ditandai oleh adanya komunikasi dua arah antara pemimpin dan masyarakat. Dalam hubungan ini, masyarakat tidak hanya menerima kebijakan yang ditetapkan oleh pemimpin, tetapi juga memiliki kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dan pandangan mereka mengenai kebijakan tersebut. Komunikasi yang bersifat partisipatif membantu menciptakan hubungan sosial yang lebih seimbang karena setiap pihak memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan. [257]

Partisipasi sosial juga memiliki kaitan erat dengan konsep ruang publik dalam kehidupan masyarakat. Ruang publik merupakan arena di mana masyarakat dapat menyampaikan gagasan, kritik, dan aspirasi mengenai berbagai persoalan sosial yang mereka hadapi. Dalam ruang publik yang sehat,

---

[254] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015, hal 268.

[255] J. Dwi Narwoko, & Bagong Suyanto, *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Kencana, 2013, hal 167.

[256] Gunawan Sumodiningrat, *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999, hal 42

[257] Hafied Cangara, *Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018, hal 213

masyarakat memiliki kebebasan untuk menyampaikan pandangan mereka tanpa tekanan dari pihak yang memiliki kekuasaan.[258]

Dalam konteks komunikasi sosial, partisipasi masyarakat juga berperan dalam membangun transparansi dalam pemerintahan dan kepemimpinan. Ketika masyarakat terlibat dalam proses komunikasi publik, mereka memiliki kesempatan untuk mengawasi kebijakan yang diambil oleh pemimpin. Proses ini membantu mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih akuntabel karena pemimpin menyadari bahwa kebijakan mereka akan mendapat perhatian dari masyarakat.[259]

Partisipasi sosial juga memiliki peran penting dalam membangun kepercayaan sosial antara masyarakat dan pemimpin. Ketika masyarakat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, mereka akan merasa dihargai sebagai bagian dari sistem sosial. Rasa dihargai tersebut dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin karena masyarakat merasa bahwa suara mereka didengar dalam proses komunikasi sosial.[260]

Dalam masyarakat yang plural, partisipasi sosial juga berperan dalam menjaga stabilitas sosial. Masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok sosial dengan latar belakang budaya, agama, dan kepentingan yang berbeda memerlukan mekanisme komunikasi yang memungkinkan setiap kelompok menyampaikan pandangannya. Partisipasi sosial membantu menciptakan ruang dialog yang memungkinkan berbagai kelompok sosial berinteraksi secara konstruktif.[261]

Partisipasi masyarakat juga memiliki kaitan erat dengan pembangunan demokrasi dalam kehidupan sosial. Demokrasi tidak hanya berkaitan dengan sistem politik, tetapi juga berkaitan dengan budaya partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan sosial. Masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam kehidupan sosial cenderung memiliki kesadaran yang lebih tinggi terhadap hak dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara.[262]

Dalam perkembangan masyarakat modern, partisipasi sosial juga semakin dipengaruhi oleh perkembangan teknologi komunikasi. Media sosial dan berbagai platform komunikasi digital memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi mereka secara lebih luas dan cepat. Teknologi

---

[258] Jürgen Habermas, , *The Structural Transformation of the Public Sphere*, Cambridge: MIT Press, 1989, hal 36.

[259] Anwar Arifin, *Komunikasi Politik: Paradigma, Teori, dan Praktik*, Jakarta: Balai Pustaka, 2011, hal 143

[260] Francis Fukuyama, , *Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity*, New York: Free Press, 1995, hal 26.

[261]Elly M. Setiadi, & Kolip, Usman, *Pengantar Sosiologi*, Jakarta: Kencana, 2011, hal 247.

[262] Anthony Giddens, *Sociology*, Cambridge: Polity Press, 2017, hal 401.

komunikasi membuka ruang baru bagi masyarakat untuk terlibat dalam diskursus publik mengenai berbagai isu sosial dan politik.[263]

Namun demikian, partisipasi sosial juga menghadapi berbagai tantangan dalam praktiknya. Tidak semua kelompok masyarakat memiliki akses yang sama terhadap ruang partisipasi sosial. Faktor seperti tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, dan akses terhadap informasi sering kali mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk terlibat dalam proses komunikasi sosial. Upaya untuk memperluas partisipasi masyarakat perlu mempertimbangkan berbagai faktor sosial yang mempengaruhi keterlibatan masyarakat dalam kehidupan sosial.[264]

2. Aspirasi dan Kritik

Konsep aspirasi masyarakat dalam relasi sosial merujuk pada kemampuan masyarakat untuk menyampaikan pandangan, kebutuhan, dan kepentingan mereka dalam kehidupan publik. Dalam perspektif ilmu sosial, aspirasi masyarakat merupakan bagian penting dari proses komunikasi sosial karena melalui aspirasi tersebut masyarakat dapat berpartisipasi dalam menentukan arah kebijakan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Aspirasi tidak hanya berbentuk tuntutan politik, tetapi juga dapat berupa gagasan, kritik, dan masukan yang disampaikan kepada pihak yang memiliki otoritas dalam masyarakat.[265]

Dalam relasi sosial yang sehat, aspirasi masyarakat seharusnya dipandang sebagai bagian dari mekanisme komunikasi yang membantu pemimpin memahami kebutuhan masyarakat. Ketika masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi, maka komunikasi antara pemimpin dan masyarakat dapat berlangsung secara lebih terbuka dan dialogis. Kondisi ini membantu menciptakan hubungan sosial yang lebih seimbang karena masyarakat tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi juga menjadi pihak yang terlibat dalam proses komunikasi mengenai kebijakan tersebut.[266]

Selain aspirasi, kritik sosial juga merupakan bagian penting dari relasi sosial antara masyarakat dan pemimpin. Kritik sosial dapat dipahami sebagai bentuk komunikasi yang bertujuan menyampaikan penilaian atau evaluasi terhadap kebijakan atau tindakan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kekuasaan. Dalam kehidupan masyarakat, kritik sosial berfungsi sebagai

---

[263] Denis McQuail, , *McQuail's Mass Communication Theory*, London: Sage Publications, 2010, hal 156.

[264] Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010, hal 212

[265] Hafied Cangara, , *Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018, hal 201.

[266] Anwar Arifin, *Komunikasi Politik: Paradigma, Teori, dan Praktik*, Jakarta: Balai Pustaka, 2011, hal 156.

mekanisme kontrol yang membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dengan adanya kritik sosial, pemimpin dapat memperoleh umpan balik mengenai dampak kebijakan yang diambil terhadap kehidupan masyarakat.[267]

Kritik sosial juga memiliki peran penting dalam memperkuat akuntabilitas kepemimpinan dalam masyarakat. Ketika masyarakat memiliki kebebasan untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan yang diambil oleh pemimpin, maka pemimpin akan terdorong untuk menjalankan kekuasaan secara lebih bertanggung jawab. Kritik sosial membantu menciptakan transparansi dalam kehidupan publik karena kebijakan yang diambil oleh pemimpin dapat diuji melalui dis-kursus publik yang melibatkan masyarakat.[268]

Dalam masyarakat modern, aspirasi dan kritik sosial sering disampaikan melalui berbagai saluran komunikasi publik, seperti media massa, organisasi masyarakat, dan forum diskusi publik. Saluran-saluran komunikasi tersebut memungkinkan masyarakat menyampaikan pandangan mereka mengenai berbagai persoalan sosial yang dihadapi. Media komunikasi modern juga memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk terlibat dalam dis-kursus publik mengenai berbagai isu sosial dan politik.[269]

Dalam perspektif sosiologi, aspirasi dan kritik sosial juga dapat dipahami sebagai bagian dari proses komunikasi yang membantu masyarakat menyesuaikan diri dengan perubahan sosial yang terjadi. Melalui aspirasi dan kritik sosial, masyarakat dapat menyampaikan pandangan mereka mengenai perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial. Proses ini membantu menciptakan dialog antara masyarakat dan pemimpin mengenai arah perubahan sosial yang diinginkan.[270]

Dalam perspektif Islam, aspirasi masyarakat memiliki kedudukan penting dalam kehidupan sosial karena Islam menekankan pentingnya prinsip musyawarah dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama. Prinsip musyawarah menunjukkan bahwa masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pandangan mereka dalam proses komunikasi sosial yang melibatkan kepemimpinan. Musyawarah tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengambilan keputusan, tetapi juga sebagai sarana komunikasi yang memungkinkan masyarakat dan pemimpin bertukar pandangan mengenai persoalan sosial yang dihadapi.[271]

---

[267] Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015, hal 217.

[268] Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010, hal 188

[269] Denis McQuail, *McQuail's Mass Communication Theory*, London: Sage Publications, 2010, hal 183.

[270] Anthony Giddens, *Sociology*, Cambridge: Polity Press, 2017, hal 352.

[271] Yusuf Al-Qaradawi, *Min Fiqh ad-Daulah fi al-Islam*, Kairo: Dar al-Syuruq, 1997, hal 145

Selain itu, dalam tradisi pemikiran politik Islam, masyarakat juga memiliki hak untuk memberikan nasihat kepada pemimpin sebagai bagian dari tanggung jawab moral dalam kehidupan sosial. Konsep *nasihah* dalam Islam menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kewajiban untuk menyampaikan kebenaran kepada pemimpin apabila terdapat kebijakan yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan. Nasihat tersebut merupakan bentuk komunikasi moral yang bertujuan menjaga keseimbangan dalam relasi antara pemimpin dan masyarakat.[272]

Dalam kehidupan masyarakat Muslim, praktik penyampaian nasihat kepada pemimpin juga memiliki dasar historis yang kuat dalam tradisi para sahabat Nabi. Para sahabat sering memberikan masukan kepada pemimpin mengenai berbagai persoalan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Tradisi ini menunjukkan bahwa hubungan antara pemimpin dan masyarakat dalam Islam bersifat dialogis karena kedua pihak memiliki tanggung jawab untuk menjaga kemaslahatan umat.[273]

Aspirasi masyarakat juga berperan penting dalam membangun kepercayaan sosial antara masyarakat dan pemimpin. Ketika masyarakat merasa bahwa pandangan mereka didengar oleh pemimpin, maka mereka cenderung memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi terhadap kepemimpinan tersebut. Kepercayaan sosial menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas kehidupan masyarakat karena masyarakat merasa memiliki hubungan yang positif dengan pemimpin mereka.[274]

Dalam masyarakat yang plural, aspirasi dan kritik sosial juga berfungsi sebagai sarana untuk menjaga keseimbangan antara berbagai kepentingan sosial yang berbeda. Masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok sosial dengan latar belakang yang beragam memerlukan mekanisme komunikasi yang memungkinkan setiap kelompok menyampaikan pandangannya. Melalui aspirasi dan kritik sosial, berbagai kelompok dalam masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses dialog sosial yang membantu menciptakan kesepahaman bersama mengenai berbagai persoalan yang dihadapi.[275]

Aspirasi dan kritik sosial merupakan unsur penting dalam relasi sosial antara pemimpin dan masyarakat karena keduanya berfungsi sebagai sarana komunikasi yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam kehidupan publik. Aspirasi membantu menyampaikan kebutuhan masyarakat, sedangkan

---

[272] Abu Hamid Al-Ghazali, , *Ihya' Ulum al-Din*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2005, hal 306.

[273] Abu al-Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2006, hal 31

[274] Francis Fukuyama, *Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity*, New York: Free Press, 1995, hal 58

[275] Elly M. Setiadi, & Kolip, Usman, *Pengantar Sosiologi*, Jakarta: Kencana, 2011, hal 274.

kritik sosial berfungsi sebagai mekanisme evaluasi terhadap kebijakan yang diambil oleh pemimpin. Dalam perspektif Islam maupun ilmu sosial modern, keberadaan aspirasi dan kritik sosial menunjukkan bahwa masyarakat memiliki peran penting sebagai subjek komunikasi dalam kehidupan sosial.

3. Relasi Simbolik

Relasi simbolik antara pemimpin dan rakyat merupakan salah satu dimensi penting dalam kajian relasi sosial dalam masyarakat. Relasi simbolik merujuk pada hubungan yang terbentuk melalui simbol-simbol komunikasi yang digunakan oleh pemimpin dan masyarakat dalam interaksi sosial. Simbol-simbol tersebut dapat berupa bahasa, *gesteur,* sikap, maupun tindakan yang memiliki makna tertentu dalam kehidupan sosial. Dalam perspektif sosiologi, simbol komunikasi memiliki peran penting karena melalui simbol tersebut masyarakat menafsirkan tindakan pemimpin serta membangun persepsi mengenai kepemimpinannya.[276]

Dalam relasi sosial antara pemimpin dan masyarakat, simbol komunikasi sering kali digunakan untuk membangun citra kepemimpinan di mata publik. Bahasa yang digunakan oleh pemimpin dalam pidato atau komunikasi publik dapat mencerminkan nilai-nilai tertentu yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Simbol komunikasi tersebut dapat memperkuat kepercayaan masyarakat apabila mencerminkan nilai kejujuran, keadilan, dan kepedulian terhadap kepentingan publik.[277]

Dalam kajian komunikasi politik, relasi simbolik antara pemimpin dan masyarakat sering dikaitkan dengan pembentukan legitimasi kepemimpinan. Legitimasi tidak hanya ditentukan oleh kekuasaan formal yang dimiliki oleh pemimpin, tetapi juga oleh cara masyarakat menafsirkan tindakan dan komunikasi pemimpin tersebut. Ketika masyarakat memandang bahwa simbol komunikasi yang digunakan oleh pemimpin mencerminkan kepentingan bersama, maka legitimasi kepemimpinan akan semakin kuat.[278]

Relasi simbolik juga menunjukkan bahwa komunikasi antara pemimpin dan masyarakat tidak hanya berlangsung melalui penyampaian informasi, tetapi juga melalui proses interpretasi makna dalam masyarakat. Masyarakat menafsirkan pesan yang disampaikan oleh pemimpin berdasarkan pengalaman sosial, nilai budaya, serta kondisi sosial yang mereka hadapi. Proses interpretasi ini menunjukkan bahwa komunikasi sosial bersifat dinamis karena makna pesan dapat berubah sesuai dengan konteks sosial yang berkembang

---

[276] Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015, hal 111.

[277] Hafied Cangara, *Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018, hal 175.

[278] Anwar Arifin, *Komunikasi Politik: Paradigma, Teori, dan Praktik*, Jakarta: Balai Pustaka, 2011, hal 201.

dalam masyarakat. Relasi simbolik antara pemimpin dan masyarakat terbentuk melalui proses komunikasi yang melibatkan interpretasi makna dalam kehidupan sosial.[279]

Dalam perspektif sosiologi, relasi simbolik juga berkaitan dengan pembentukan identitas sosial dalam masyarakat. Identitas sosial pemimpin sering kali dibentuk melalui simbol-simbol komunikasi yang digunakan dalam interaksi sosial dengan masyarakat. Simbol tersebut dapat berupa gaya komunikasi, sikap, maupun tindakan yang mencerminkan nilai tertentu. Melalui simbol-simbol tersebut, masyarakat membentuk persepsi mengenai karakter dan nilai yang dimiliki oleh pemimpin.[280]

Dalam kehidupan masyarakat modern, media komunikasi juga menjadi sarana penting dalam membentuk relasi simbolik antara pemimpin dan masyarakat. Media massa dan media digital memungkinkan simbol-simbol komunikasi pemimpin disebarkan secara luas kepada masyarakat. Melalui media tersebut, masyarakat dapat mengamati berbagai tindakan simbolik yang dilakukan oleh pemimpin, seperti pidato, pernyataan publik, maupun simbol-simbol visual yang digunakan dalam komunikasi politik.[281]

Relasi simbolik antara pemimpin dan masyarakat juga dapat mempengaruhi stabilitas sosial dalam masyarakat. Ketika simbol komunikasi yang digunakan oleh pemimpin mampu mencerminkan nilai-nilai yang dihargai oleh masyarakat, maka hubungan sosial antara pemimpin dan masyarakat cenderung berkembang secara harmonis. Sebaliknya, apabila simbol komunikasi yang digunakan oleh pemimpin dianggap tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan atau kepedulian sosial, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin dapat menurun.[282]

Dalam perspektif Islam, relasi simbolik antara pemimpin dan masyarakat juga memiliki dimensi moral yang kuat. Pemimpin dalam Islam diharapkan menampilkan perilaku dan komunikasi yang mencerminkan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab moral. Sikap dan perilaku pemimpin tersebut menjadi simbol yang mencerminkan kualitas kepemimpinan di mata masyarakat. Komunikasi pemimpin dalam Islam tidak hanya berfungsi menyampaikan pesan, tetapi juga menjadi representasi dari nilai-nilai moral yang dianut oleh pemimpin.[283]

---

[279] Stephen W Littlejohn, & Foss, Karen A., *Theories of Human Communication*, Illinois: Waveland Press, 2009, hal 208.

[280] Anthony Giddens, Anthony, *Sociology*, Cambridge: Polity Press, 2017, hal 148

[281] Denis McQuail, *McQuail's Mass Communication Theory*, London: Sage Publications, 2010, hal 196

[282] Elly M. Setiadi, & Kolip, Usman, *Pengantar Sosiologi*, Jakarta: Kencana, 2011, hal 301.

[283] Abu al-Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2006, hal 54.

Dalam tradisi pemikiran Islam klasik, para ulama juga menekankan bahwa perilaku pemimpin menjadi simbol penting yang mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Ketika pemimpin menunjukkan perilaku yang adil dan bijaksana, masyarakat cenderung mengikuti nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sosial mereka. Sebaliknya, ketika pemimpin menunjukkan perilaku yang tidak mencerminkan nilai moral, maka hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas kehidupan sosial masyarakat.[284]

Dalam kehidupan sosial modern, relasi simbolik antara pemimpin dan masyarakat juga semakin dipengaruhi oleh perkembangan teknologi komunikasi. Media digital memungkinkan masyarakat mengamati secara langsung berbagai tindakan simbolik yang dilakukan oleh pemimpin dalam kehidupan publik. Kondisi ini membuat komunikasi kepemimpinan menjadi semakin terbuka karena masyarakat dapat menilai secara langsung tindakan dan komunikasi pemimpin.[285]

E. Etika dan Relasi Sosial dalam Perspektif Islam

Etika sosial dalam Islam merupakan seperangkat nilai moral yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai tersebut bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW yang menjadi pedoman utama bagi umat Islam dalam menjalankan interaksi sosial yang adil, harmonis, dan berkeadaban. Dalam perspektif Islam, etika tidak hanya dipahami sebagai aturan perilaku sosial, tetapi juga sebagai manifestasi dari keimanan kepada Allah SWT. Oleh karena itu, setiap tindakan sosial manusia memiliki dimensi moral dan spiritual yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah.[286]

Al-Qur'an menegaskan pentingnya etika sosial melalui berbagai ajaran yang mengatur hubungan antar manusia. Allah berfirman dalam QS. Al-Hujurāt [49]: 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

Ayat ini menjelaskan bahwa manusia diciptakan dalam keberagaman agar saling mengenal dan membangun hubungan sosial yang harmonis. Kemuliaan seseorang tidak ditentukan oleh status sosial atau kekuasaan, tetapi oleh ketakwaannya kepada Allah. Prinsip ini menunjukkan bahwa etika sosial dalam Islam menempatkan nilai kesetaraan dan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai dasar interaksi sosial.[287]

---

[284] Abu Hamid Al-Ghazali, , *Ihya' Ulum al-Din*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2005, hal 256.

[285] Nurudin, *Sistem Komunikasi Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017, hal 168.

[286] M. Dawam Rahardjo, *Etika Sosial dalam Kehidupan Berbangsa*, Jakarta: Kompas, 2013, hal. 23.

[287] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2017, jilid 12, hal. 585.

Selain Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW juga memberikan landasan kuat bagi etika sosial dalam Islam.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ (رواه البخاري ومسلم) [288]

Dari Anas Bin Malik r.a dari Nabi SAW, Ia bersabda : "Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menunjukkan bahwa etika sosial dalam Islam dibangun atas dasar empati, kepedulian, dan kesediaan memperlakukan orang lain sebagaimana seseorang ingin diperlakukan. Dalam konteks komunikasi antara pemimpin dan rakyat, prinsip ini menegaskan bahwa pemimpin tidak boleh menjadikan rakyat sekadar objek kebijakan, melainkan harus memandang mereka sebagai subjek sosial yang memiliki martabat, kebutuhan, dan hak untuk diperlakukan secara adil.

Para ulama klasik juga memberikan perhatian besar terhadap konsep etika sosial dalam Islam. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa akhlak merupakan kondisi jiwa yang mendorong seseorang melakukan tindakan secara spontan tanpa memerlukan pertimbangan panjang. Dalam pandangan Al-Ghazali, akhlak yang baik akan melahirkan perilaku sosial yang membawa kemaslahatan bagi masyarakat.[289]

Yusuf Al-Qaradawi menegaskan bahwa etika sosial dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan hubungan individu dengan Allah, tetapi juga dengan hubungan manusia dengan masyarakat. Menurutnya, Islam menempatkan tanggung jawab sosial sebagai bagian dari ibadah yang harus dijalankan oleh setiap Muslim.[290]

Dalam perspektif komunikasi Islam, etika sosial memiliki hubungan erat dengan cara manusia berinteraksi melalui bahasa dan tindakan. Al-Qur'an memberikan panduan etika komunikasi yang menekankan kejujuran, kelembutan, dan penghormatan terhadap orang lain. Prinsip-prinsip komunikasi seperti *qaulan karima, qaulan ma'rufan*, *qaulan sadīdan, qaulan layyina, qaulan balighan,* dan *qaulan maisuran* menunjukkan bahwa etika sosial dalam Islam juga tercermin dalam cara manusia berkomunikasi dengan sesamanya.

---

[288] Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Īmān, Bāb min al-Īmān an yuḥibba li akhīhi mā yuḥibbu li nafsih, no. 13; Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Īmān, Bāb ad-Dalīl 'alā anna min khiṣāl al-Īmān an yuḥibba li akhīhi al-Muslim mā yuḥibbu li nafsih min al-khayr, no. 45.

[289] Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2005, hal. 52.

[290] Yusuf Al-Qaradawi, *Min Fiqh ad-Daulah fi al-Islam*, Kairo: Dar al-Syuruq, 1997, hal. 98.

Etika sosial merupakan landasan penting dalam membangun relasi sosial yang sehat. Nurul Saniah menjelaskan bahwa komunikasi dalam perspektif Islam tidak hanya bertujuan menyampaikan informasi, tetapi juga membangun hubungan sosial yang dilandasi nilai moral dan spiritual.[291]

Etika dan relasi sosial dalam perspektif Al-Qur'an tidak hanya dibangun melalui norma eksternal seperti keadilan, persamaan, dan musyawarah, tetapi juga melalui kemampuan individu mengelola kondisi batinnya. Ahmad Kamaluddin menegaskan bahwa emosi memiliki peran dominan dalam membentuk perilaku dan identitas diri seseorang. Dalam kerangka regulasi emosi berbasis Al-Qur'an, pengelolaan hati diarahkan agar manusia mampu membangun hubungan vertikal dengan Allah sekaligus hubungan horizontal yang sehat dengan sesama. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kualitas relasi sosial sangat dipengaruhi oleh kemampuan seseorang mengelola tekanan, prasangka, kemarahan, kegelisahan, dan respons emosional lainnya secara Qur'ani.[292]

Kamaluddin mengembangkan pendekatan psikosufistik yang menempatkan *qalb* sebagai pusat pengembangan batin dan perilaku. Dalam implementasinya, regulasi emosi Qur'ani diarahkan melalui beberapa pola, seperti mengalihkan emosi melalui zikir, membangun pikiran positif melalui *husn al-ẓann*, menghadapi tekanan melalui kesabaran, dan kembali kepada fitrah melalui taubat. Model ini memperlihatkan bahwa etika sosial tidak cukup hanya ditentukan oleh pengetahuan tentang baik dan buruk, tetapi juga oleh kematangan emosi dan kemampuan mengendalikan reaksi diri. Dalam konteks komunikasi pemimpin dan rakyat, kemampuan regulasi emosi menjadi penting karena komunikasi yang berlangsung dalam situasi konflik, kritik, ketegangan sosial, maupun perbedaan kepentingan sangat mudah berubah menjadi komunikasi reaktif apabila tidak disertai pengendalian diri. Dengan demikian, regulasi emosi Qur'ani dapat dipahami sebagai salah satu fondasi psikologis-etis bagi terciptanya relasi sosial yang santun, proporsional, dan berkeadaban.[293]

Selain itu, etika sosial dalam Islam juga menekankan pentingnya keadilan dalam hubungan sosial. Allah berfirman dalam QS. An-Nahl [16]: 90 bahwa Allah memerintahkan manusia untuk menegakkan keadilan, berbuat kebajikan, dan memberi kepada sesama. Ayat ini menunjukkan bahwa etika

---

[291] Nurul Saniah, *Ilmu Komunikasi Islam*, Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2024, hal. 64.

[292] Ahmad Kamaluddin, *Kontribusi Regulasi Emosi Qur'ani dalam Membentuk Perilaku Positif: Studi Fenomenologi Komunitas Punk Tasawuf Underground*, Surabaya: CV Cipta Media Nusantara, 2022, hlm. 1–5.

[293] Ahmad Kamaluddin, *Kontribusi Regulasi Emosi Qur'ani dalam Membentuk Perilaku Positif: Studi Fenomenologi Komunitas Punk Tasawuf Underground*, Surabaya: CV Cipta Media Nusantara, 2022, hlm. 1–5

sosial dalam Islam tidak hanya bersifat individual, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang menuntut manusia untuk membangun masyarakat yang adil dan berkeadaban.

Etika sosial dalam Islam merupakan sistem nilai moral yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya. Etika tersebut mencakup nilai keadilan, empati, tanggung jawab, serta penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam konteks komunikasi dan relasi sosial, etika Islam memberikan pedoman bagi manusia untuk membangun interaksi yang jujur, adil, dan penuh kasih sayang.

1. Prinsip Musyawarah

Prinsip musyawarah (*syūrā*) merupakan salah satu fondasi penting dalam etika sosial Islam yang mengatur hubungan antarindividu dalam kehidupan masyarakat. Dalam Islam, musyawarah dipahami sebagai proses dialog kolektif yang dilakukan untuk mencapai keputusan yang terbaik dengan mempertimbangkan kepentingan bersama. Konsep ini menunjukkan bahwa Islam menempatkan partisipasi dan pertimbangan bersama sebagai nilai penting dalam kehidupan sosial.

Secara etimologis, kata *syūrā* berasal dari akar kata شور (sy-w-r) yang memiliki makna dasar "mengeluarkan sesuatu" atau "menampakkan sesuatu". Raghib al-Ashfihani menjelaskan bahwa kata *asy-syūrā* berarti mengeluarkan pendapat atau gagasan dari seseorang sebagaimana madu yang dikeluarkan dari sarangnya. Makna ini menunjukkan bahwa musyawarah merupakan proses mengekspresikan gagasan yang kemudian dipertimbangkan bersama untuk mencapai keputusan yang terbaik.[294]

Dalam Al-Qur'an, konsep musyawarah ditegaskan dalam beberapa ayat yang menunjukkan pentingnya prinsip ini dalam kehidupan sosial. Salah satu ayat yang paling sering dijadikan rujukan adalah QS. Asy-Syūrā [42]: 38:

وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

Ayat ini menjelaskan bahwa salah satu ciri masyarakat beriman adalah menjadikan musyawarah sebagai dasar dalam menyelesaikan berbagai urusan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa musyawarah bukan hanya praktik sosial biasa, tetapi merupakan nilai moral yang menjadi bagian dari ajaran Islam dalam mengatur kehidupan masyarakat.

Selain itu, prinsip musyawarah juga ditegaskan dalam QS. Ali Imran [3]: 159 yang berbicara tentang kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman:

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

---

[294] Raghib al-Ashfihani, *Al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2001, hal. 269.

Ayat ini memerintahkan Nabi untuk bermusyawarah dengan para sahabat dalam urusan sosial dan kemasyarakatan. Perintah ini menunjukkan bahwa bahkan seorang nabi yang menerima wahyu tetap diperintahkan untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa perintah musyawarah dalam ayat tersebut menunjukkan pentingnya keterbukaan pemimpin terhadap pendapat masyarakat. Menurutnya, musyawarah bukan sekadar proses konsultasi formal, tetapi merupakan bentuk penghargaan terhadap martabat manusia sebagai makhluk yang memiliki kemampuan berpikir dan memberikan kontribusi dalam kehidupan sosial.[295]

Dalam khazanah hikmah Islam dikenal ungkapan :

مَا خَابَ مَنِ اسْتَخَارَ، وَلَا نَدِمَ مَنِ اسْتَشَارَ[296]

"Tidak akan kecewa orang yang beristikharah kepada Allah dan tidak akan menyesal orang yang bermusyawarah."

Dalam sejarah Islam, praktik musyawarah juga terlihat jelas dalam kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Salah satu contoh penting adalah musyawarah sebelum terjadinya Perang Uhud, di mana Nabi berdiskusi dengan para sahabat mengenai strategi yang akan digunakan. Meskipun Nabi memiliki otoritas sebagai pemimpin, beliau tetap membuka ruang dialog bagi para sahabat untuk menyampaikan pendapat mereka.[297]

Para ulama tafsir juga menegaskan bahwa musyawarah memiliki nilai moral yang sangat penting dalam kehidupan sosial. Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa musyawarah merupakan mekanisme sosial yang memungkinkan masyarakat mencapai keputusan yang adil melalui pertimbangan bersama. Dalam pandangannya, musyawarah juga mencerminkan nilai kesetaraan karena setiap individu memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya.[298]

Dalam perspektif ilmu sosial Islam, musyawarah memiliki fungsi penting dalam membangun hubungan sosial yang harmonis. Melalui musyawarah, berbagai perbedaan pendapat dapat diselesaikan secara dialogis tanpa menimbulkan konflik yang merusak hubungan sosial.

Prinsip musyawarah juga memiliki kaitan erat dengan konsep komunikasi dalam Islam. Komunikasi yang terbuka dan dialogis merupakan

---

[295] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2017, jilid 2, hal. 243.

[296] Ungkapan ini sering dinisbatkan sebagai hadis dari Anas bin Mālik r.a., tetapi sanadnya sangat lemah. Aṭ-Ṭabarānī meriwayatkannya dalam *al-Mu'jam al-Awsaṭ* dan *al-Mu'jam aṣ-Ṣaghīr* dengan redaksi: *mā khāba man istakhāra, wa lā nadima man istashāra, wa lā 'āla man iqtaṣada*. Al-Haitsami menilai dalam sanadnya terdapat perawi yang sangat lemah, sedangkan al-Albānī menilainya sebagai hadis *mawḍū'*.

[297] Ibn Hisyam, *Sirah Nabawiyah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2001, hal. 217.

[298] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2009, hal. 134.

syarat utama bagi terlaksananya musyawarah yang efektif. Dalam hal ini, musyawarah mencerminkan bentuk komunikasi sosial yang menekankan partisipasi, penghargaan terhadap pendapat orang lain, serta pencarian solusi bersama terhadap berbagai persoalan sosial.[299]

Dalam konteks kepemimpinan, musyawarah berfungsi sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh pemimpin tidak bersifat otoriter. Pemimpin yang menerapkan prinsip musyawarah akan lebih mampu memahami kebutuhan masyarakat karena ia membuka ruang partisipasi bagi rakyat dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa musyawarah memiliki peran penting dalam membangun kepemimpinan yang demokratis dan berkeadilan.[300]

Dalam masyarakat modern, prinsip musyawarah juga memiliki relevansi yang kuat dengan konsep demokrasi deliberatif yang menekankan pentingnya dialog publik dalam proses pengambilan keputusan. Meskipun berasal dari tradisi yang berbeda, konsep ini memiliki kesamaan dengan prinsip *syūrā* dalam Islam yang menekankan pentingnya diskusi dan pertimbangan bersama dalam menentukan kebijakan sosial.[301]

Selain itu, musyawarah juga memiliki dimensi etis yang menekankan sikap saling menghormati dalam dialog sosial. Dalam proses musyawarah, setiap individu diharapkan menyampaikan pendapatnya dengan cara yang santun serta mempertimbangkan kepentingan bersama. Dengan demikian, musyawarah tidak hanya berkaitan dengan proses pengambilan keputusan, tetapi juga dengan pembentukan karakter moral dalam kehidupan sosial.[302]

Dalam konteks komunikasi antara pemimpin dan rakyat, musyawarah menjadi sarana penting untuk membangun hubungan yang didasarkan pada kepercayaan dan keterbukaan. Ketika pemimpin melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, masyarakat akan merasa dihargai dan memiliki tanggung jawab bersama terhadap keputusan yang dihasilkan. Hal ini menunjukkan bahwa musyawarah memiliki peran strategis dalam membangun legitimasi sosial kepemimpinan.

Musyawarah dapat dipahami sebagai mekanisme komunikasi sosial yang menekankan keterbukaan, partisipasi, dan tanggung jawab bersama dalam pengambilan keputusan. Nilai ini menunjukkan bahwa Islam memberikan landasan etika yang kuat bagi terciptanya hubungan sosial yang harmonis

---

[299] Nurul Saniah, *Ilmu Komunikasi Islam*, Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2024, hal. 98.

[300] Gary Yukl, *Leadership in Organizations*, New Jersey: Pearson Education, 2013, hal. 318

[301] Jürgen Habermas, *The Theory of Communicative Action*, Boston: Beacon Press, 1984, hal. 86.

[302] Darwis Hude, *Emosi: Penjelajahan Religio-Psikologis tentang Emosi Manusia di dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Erlangga, 2016, hal. 215.

antara pemimpin dan masyarakat melalui dialog yang konstruktif dan bermartabat.[16]

2. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan (*'adl*) merupakan salah satu nilai fundamental dalam ajaran Islam yang mengatur hubungan manusia dalam kehidupan sosial. Keadilan tidak hanya dipahami sebagai konsep hukum, tetapi juga sebagai prinsip moral yang harus menjadi landasan dalam setiap interaksi sosial, termasuk dalam hubungan antara pemimpin dan rakyat. Dalam perspektif Islam, keadilan merupakan manifestasi dari nilai ketakwaan dan tanggung jawab moral manusia dalam menegakkan kebenaran serta menghindari kezaliman dalam kehidupan masyarakat.[303]

Secara etimologis, kata *'adl* berasal dari akar kata عدل yang memiliki makna keseimbangan, kesetaraan, dan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Raghib al-Ashfihani menjelaskan bahwa kata 'adl berarti memberikan sesuatu secara proporsional sesuai dengan hak dan kewajibannya. Dalam pengertian ini, keadilan tidak sekadar menyamakan perlakuan terhadap semua orang, tetapi menempatkan setiap individu pada posisi yang sesuai dengan haknya secara proporsional.[304]

Al-Qur'an memberikan perhatian besar terhadap prinsip keadilan sebagai dasar kehidupan sosial. Allah berfirman dalam QS. An-Nahl [16]: 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ

Ayat ini menunjukkan bahwa keadilan merupakan perintah langsung dari Allah yang harus ditegakkan dalam kehidupan manusia. Perintah tersebut tidak hanya berlaku dalam konteks hukum, tetapi juga dalam hubungan sosial sehari-hari yang menuntut manusia untuk bersikap adil terhadap sesama.

Selain itu, Al-Qur'an juga menegaskan pentingnya keadilan dalam kepemimpinan. Dalam QS. An-Nisa' [4]: 58 Allah berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Ayat ini menegaskan bahwa pemimpin harus menunaikan amanah dan menegakkan keadilan ketika memutuskan perkara di antara manusia. Maka, keadilan menjadi prinsip utama yang harus dijalankan oleh pemimpin dalam mengelola kehidupan masyarakat.

Prinsip keadilan juga ditegaskan dalam QS. Al-Ma'idah [5]: 8 yang memerintahkan manusia untuk tetap berlaku adil bahkan terhadap orang yang dibenci. Ayat tersebut menunjukkan bahwa keadilan dalam Islam bersifat universal dan tidak boleh dipengaruhi oleh kebencian atau kepentingan

---

[303]M. Dawam Rahardjo, *Etika Sosial dalam Kehidupan Berbangsa*, Jakarta: Kompas, 2013, hal. 41.

[304] Raghib al-Ashfihani, *Al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2001, hal. 325.

pribadi. Prinsip ini menegaskan bahwa keadilan merupakan nilai moral yang harus ditegakkan secara konsisten dalam kehidupan sosial.[305]

Hadis Nabi Muhammad SAW juga menekankan pentingnya keadilan dalam kepemimpinan.

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ، عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ، وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ، الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا» (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)[306]

Dari Abdullah bin Amr r.a, ia berkat Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil di sisi Allah berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya, di sebelah kanan Allah Yang Maha Pengasih 'Azza wa Jalla, dan kedua tangan-Nya adalah kanan; yaitu orang-orang yang berlaku adil dalam keputusan mereka, terhadap keluarga mereka, dan terhadap apa yang mereka pimpin." (HR. Muslim).

Hadis ini menegaskan bahwa keadilan merupakan fondasi utama dalam kepemimpinan Islam. Pemimpin yang adil bukan hanya dituntut berlaku benar dalam pengambilan keputusan, tetapi juga menjaga keadilan dalam komunikasi, pelayanan, dan relasi sosial dengan rakyat. Dalam konteks komunikasi kepemimpinan, keadilan tercermin melalui keterbukaan informasi, kesediaan mendengar aspirasi, tidak memanipulasi pesan, serta tidak menggunakan bahasa kekuasaan untuk menekan masyarakat. Dengan demikian, komunikasi yang adil menjadi bagian dari amanah kepemimpinan yang bernilai moral dan spiritual.

Para ulama tafsir menjelaskan bahwa keadilan dalam Islam memiliki dimensi sosial yang luas. Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa keadilan merupakan prinsip yang mengatur hubungan antara individu dan masyarakat sehingga tercipta keseimbangan dalam kehidupan sosial. Dalam pandangannya, keadilan tidak hanya berkaitan dengan hukum, tetapi juga dengan perilaku sosial yang menghormati hak-hak orang lain.[307]

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa konsep keadilan dalam Al-Qur'an mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk hubungan sosial, ekonomi, dan politik. Menurutnya, keadilan dalam Islam berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya serta memberikan hak kepada setiap individu secara proporsional.[308]

Prinsip keadilan memiliki hubungan erat dengan etika komunikasi. Komunikasi yang adil menuntut seseorang untuk menyampaikan informasi secara jujur dan tidak memanipulasi fakta demi kepentingan tertentu. Dengan

---

[305] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2009, jilid 6, hal. 152.

[306] Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Imārah, Bāb Faḍīlat al-Imām al-'Ādil wa 'Uqūbat al-Jā'ir, no. 1827.

[307] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2009, hal. 247.

[308] M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2007, hal. 405.

demikian, keadilan dalam komunikasi menjadi landasan penting dalam membangun hubungan sosial yang dilandasi kepercayaan dan tanggung jawab moral.[309]

Dalam konteks kepemimpinan, keadilan merupakan syarat utama bagi seorang pemimpin dalam menjalankan amanah kekuasaan. Pemimpin yang adil akan memperlakukan rakyatnya secara setara serta memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, keadilan menjadi indikator penting dalam menilai kualitas kepemimpinan dalam masyarakat.[310]

Para sarjana ilmu sosial juga menegaskan bahwa keadilan merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan sosial. Francis Fukuyama menjelaskan bahwa masyarakat yang memiliki sistem keadilan yang kuat cenderung memiliki tingkat kepercayaan sosial yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sosial dan memperkuat hubungan antara pemimpin dan masyarakat.[311]

Dalam konteks relasi sosial antara pemimpin dan rakyat, keadilan menjadi dasar bagi terciptanya legitimasi kepemimpinan. Ketika pemimpin mampu menegakkan keadilan dalam kebijakan dan keputusan yang diambil, masyarakat akan memberikan kepercayaan serta dukungan terhadap kepemimpinan tersebut. Sebaliknya, ketidakadilan dalam kepemimpinan dapat menimbulkan konflik sosial dan krisis kepercayaan dalam masyarakat.[312]

Selain itu, keadilan juga memiliki dimensi moral yang berkaitan dengan tanggung jawab manusia terhadap sesamanya. Dalam Islam, setiap individu dituntut untuk berlaku adil dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun dalam kehidupan politik. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan merupakan nilai universal yang menjadi landasan etika sosial dalam Islam.[313]

Prinsip keadilan juga memiliki hubungan erat dengan konsep amanah dalam kepemimpinan. Pemimpin yang adil adalah pemimpin yang mampu menjaga amanah kekuasaan dengan tidak menyalahgunakan wewenangnya

---

[309] Nurul Saniah, *Ilmu Komunikasi Islam*, Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2024, hal. 112.

[310] Gary Yukl, *Leadership in Organizations*, New Jersey: Pearson Education, 2013, hal. 322.

[311] Francis Fukuyama, *Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity*, New York: Free Press, 1995, hal. 45.

[312] Jürgen Habermas, *The Theory of Communicative Action*, Boston: Beacon Press, 1984, hal. 91.

[313] Yusuf Al-Qaradawi, *Min Fiqh ad-Daulah fi al-Islam*, Kairo: Dar al-Syuruq, 1997, hal. 167.

untuk kepentingan pribadi. Oleh karena itu, keadilan menjadi salah satu indikator utama dalam menilai integritas moral seorang pemimpin.[314]

Dalam kehidupan masyarakat modern, prinsip keadilan tetap memiliki relevansi yang sangat penting. Keadilan menjadi dasar bagi terciptanya sistem sosial yang stabil dan berkelanjutan. Tanpa adanya keadilan, hubungan antara pemimpin dan rakyat dapat mengalami ketegangan yang berujung pada konflik sosial. Oleh karena itu, keadilan harus menjadi prinsip utama dalam setiap sistem kepemimpinan dan pemerintahan.

3. Prinsip Persamaan

Prinsip persamaan (*musāwah*) merupakan salah satu nilai penting dalam etika sosial Islam yang menegaskan bahwa seluruh manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah SWT. Dalam pandangan Islam, perbedaan suku, ras, bahasa, maupun status sosial tidak boleh menjadi dasar diskriminasi dalam kehidupan sosial. Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam menempatkan manusia sebagai makhluk yang memiliki martabat yang sama sehingga hubungan sosial harus dibangun atas dasar penghormatan terhadap nilai kemanusiaan.[315]

Secara etimologis, kata *musāwah* berasal dari akar kata سوى yang berarti kesetaraan atau keseimbangan. Raghib al-Ashfihani menjelaskan bahwa kata tersebut merujuk pada kondisi ketika dua hal berada dalam posisi yang setara tanpa adanya perbedaan yang bersifat diskriminatif. Dalam konteks sosial, *musāwah* menunjukkan bahwa setiap individu memiliki nilai kemanusiaan yang sama sehingga tidak boleh ada perlakuan yang merendahkan martabat orang lain.[316]

Al-Qur'an menegaskan prinsip persamaan manusia dalam QS. Al-Hujurāt [49]: 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

Ayat ini menjelaskan bahwa seluruh manusia berasal dari asal-usul yang sama, yaitu dari pasangan laki-laki dan perempuan. Perbedaan suku dan bangsa bukanlah dasar untuk saling merendahkan, melainkan sarana untuk saling mengenal dan membangun hubungan sosial yang harmonis. Ukuran kemuliaan manusia dalam Islam ditentukan oleh ketakwaannya, bukan oleh status sosial atau kekuasaan.

Selain ayat tersebut, Al-Qur'an juga menegaskan prinsip persamaan manusia dalam QS. An-Nisa' [4]: 1 yang menyatakan bahwa manusia diciptakan dari satu jiwa yang sama. Ayat ini menunjukkan bahwa seluruh

---

[314] Darwis Hude, *Emosi: Penjelajahan Religio-Psikologis tentang Emosi Manusia di dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Erlangga, 2016, hal. 223.

[315] Ali Nurdin, *Etika Sosial dalam Islam*, Jakarta: Kencana, 2015, hal. 67.

[316] Raghib al-Ashfihani, *Al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Qalam, 2009, hal. 439.

manusia memiliki asal-usul yang sama sehingga tidak ada alasan bagi manusia untuk merasa lebih tinggi dari yang lain. Prinsip ini menegaskan bahwa Islam mengajarkan kesetaraan manusia sebagai dasar hubungan sosial dalam masyarakat.

Para ulama tafsir menjelaskan bahwa prinsip persamaan dalam Islam memiliki implikasi sosial yang luas. Ibn Kathir menjelaskan bahwa ayat tentang persamaan manusia menunjukkan bahwa seluruh manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah, sehingga tidak ada keistimewaan yang didasarkan pada faktor keturunan atau status sosial. Hal ini menunjukkan bahwa Islam menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan dalam hubungan sosial.[317]

Dalam perspektif pemikiran Islam modern, Fazlur Rahman menjelaskan bahwa prinsip persamaan manusia merupakan bagian dari visi moral Al-Qur'an yang menekankan penghormatan terhadap martabat manusia. Menurutnya, Islam menolak segala bentuk hierarki sosial yang didasarkan pada faktor ras atau status sosial, karena nilai kemanusiaan manusia bersumber dari kedudukannya sebagai makhluk ciptaan Allah.[318]

Prinsip persamaan memiliki hubungan erat dengan etika komunikasi. Komunikasi yang berlandaskan nilai *musāwah* menuntut setiap individu untuk memperlakukan orang lain secara setara dan tidak merendahkan martabat mereka. Dengan demikian, komunikasi sosial dalam Islam harus dibangun atas dasar penghormatan terhadap nilai kemanusiaan yang universal.

Dalam konteks relasi sosial antara pemimpin dan rakyat, prinsip persamaan memiliki implikasi penting dalam membangun kepemimpinan yang adil. Pemimpin dalam Islam tidak ditempatkan sebagai penguasa yang memiliki kedudukan lebih tinggi secara moral dari rakyatnya, tetapi sebagai pelayan masyarakat yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga keadilan sosial. Oleh karena itu, prinsip persamaan menjadi dasar bagi terciptanya hubungan yang harmonis antara pemimpin dan masyarakat.

Dalam perspektif ilmu sosial, kesetaraan sosial merupakan faktor penting dalam menjaga stabilitas masyarakat. Ketika masyarakat merasa diperlakukan secara setara, maka tingkat konflik sosial dapat diminimalkan.[319]

Prinsip persamaan juga memiliki dimensi spiritual yang menegaskan bahwa seluruh manusia adalah hamba Allah yang memiliki kedudukan yang sama di hadapan-Nya. Kesadaran spiritual ini mendorong manusia untuk saling menghormati dan menghindari sikap sombong atau merendahkan orang lain. Dengan demikian, nilai persamaan dalam Islam tidak hanya berkaitan

---

[317] Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, Riyadh: Dar Tayyibah, 1999, jilid 7, hal. 365.

[318] Fazlur Rahman, *Major Themes of the Qur'an*, Chicago: University of Chicago Press, 2009, hal. 42.

[319] Anthony Giddens, *Sociology*, Cambridge: Polity Press, 2017, hal. 214.

dengan hubungan sosial, tetapi juga dengan kesadaran moral manusia sebagai makhluk Tuhan.[320]

Dalam kehidupan masyarakat modern, prinsip persamaan memiliki peran penting dalam membangun sistem sosial yang demokratis dan inklusif. Nilai kesetaraan manusia menjadi dasar bagi penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia serta partisipasi masyarakat dalam kehidupan sosial dan politik. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip *musāwah* memiliki relevansi yang sangat kuat dalam kehidupan masyarakat kontemporer.[321]

Dalam konteks komunikasi antara pemimpin dan rakyat, prinsip persamaan dapat menciptakan ruang dialog yang lebih terbuka dan partisipatif. Ketika pemimpin memandang rakyat sebagai mitra yang setara dalam kehidupan sosial, maka komunikasi yang terjadi akan bersifat dialogis dan konstruktif. Hal ini memungkinkan terciptanya hubungan sosial yang lebih sehat antara pemimpin dan masyarakat.[322]

Selain itu, prinsip persamaan juga mendorong terciptanya komunikasi yang bebas dari dominasi dan manipulasi. Komunikasi yang berlandaskan kesetaraan memungkinkan setiap individu untuk menyampaikan pendapatnya tanpa rasa takut atau tekanan. Dengan demikian, prinsip *musāwah* menjadi landasan penting dalam membangun komunikasi sosial yang adil dan bermartabat.[323]

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa prinsip persamaan (*musāwah*) merupakan salah satu nilai utama dalam etika sosial Islam yang menegaskan kesetaraan manusia dalam kehidupan masyarakat. Prinsip ini menolak segala bentuk diskriminasi dan menempatkan ketakwaan sebagai satu-satunya ukuran kemuliaan manusia. Dengan demikian, *musāwah* menjadi landasan penting dalam membangun relasi sosial yang adil, harmonis, dan berkeadaban dalam kehidupan masyarakat.[16]

F. Komunikasi Politik

Komunikasi politik merupakan salah satu cabang ilmu komunikasi yang mempelajari proses penyampaian pesan-pesan politik antara aktor politik dengan masyarakat dalam rangka memengaruhi sikap, opini, dan perilaku politik. Komunikasi politik menjadi instrumen penting dalam sistem sosial dan pemerintahan karena berfungsi sebagai jembatan antara penguasa dan rakyat.

---

[320] Tariq Ramadan, *Islam and the Arab Awakening*, Oxford: Oxford University Press, 2012, hal. 56.

[321] John L. Esposito, *Islam: The Straight Path*, Oxford: Oxford University Press, 2011, hal. 168.

[322] Muhammad Alim, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Madinah*, Yogyakarta: UII Press, 2010, hal. 88.

[323] Khairul Hakim, *Komunikasi Politik Ali Ibn Abi Thalib*, Medan: UIN Sumatera Utara Press, 2020, hal. 119

Melalui komunikasi politik, berbagai kebijakan, program, serta keputusan politik dapat dipahami, diterima, atau bahkan dikritisi oleh masyarakat. Komunikasi politik sangat erat kaitannya dengan pembentukan legitimasi, kepercayaan, dan partisipasi publik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.[324]

Secara etimologis, komunikasi berasal dari bahasa Latin *communicare* yang berarti "membuat sama" *(to make common),* yaitu proses menciptakan kesamaan makna antara komunikator dan komunikan. Sementara politik berasal dari kata Yunani *polis* yang berarti negara atau kota. Dengan demikian, komunikasi politik dapat dipahami sebagai proses pertukaran pesan yang berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, kebijakan publik, dan berbagai kepentingan yang menyangkut kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, komunikasi politik tidak dapat dipisahkan dari aktivitas kepemimpinan karena setiap tindakan kepemimpinan pada hakikatnya membutuhkan komunikasi sebagai sarana penyampaian visi, nilai, dan arah kebijakan.[325]

Menurut Harold D. Lasswell, komunikasi politik dapat dipahami melalui formula klasiknya, yaitu *who says what in which channel to whom with what effect*. Formula tersebut menegaskan bahwa komunikasi politik melibatkan lima unsur utama, yaitu komunikator, pesan, media, khalayak, dan efek komunikasi. Dalam konteks politik, komunikator dapat berupa pemimpin, partai politik, pemerintah, maupun kelompok kepentingan, sedangkan pesan yang disampaikan umumnya berkaitan dengan kebijakan, ideologi, atau agenda politik tertentu. Oleh karena itu, efektivitas komunikasi politik sangat ditentukan oleh kemampuan komunikator dalam mengelola pesan dan memilih saluran komunikasi yang tepat.[326]

Dan Nimmo menjelaskan bahwa komunikasi politik merupakan aktivitas komunikasi yang memiliki konsekuensi terhadap sistem politik. Artinya, komunikasi politik tidak selalu dilakukan oleh politisi atau pejabat negara, tetapi juga dapat dilakukan oleh masyarakat, media massa, organisasi sosial, dan kelompok kepentingan yang berpartisipasi dalam proses politik. Pandangan ini menunjukkan bahwa komunikasi politik memiliki cakupan yang luas dan berlangsung secara dinamis melalui berbagai bentuk interaksi sosial yang memengaruhi proses pengambilan keputusan publik.[327]

---

[324] Hafied Cangara, Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), hal. 25.

[325] Anwar Arifin, Komunikasi Politik: Paradigma, Teori, dan Praktik (Jakarta: Balai Pustaka, 2011), hal. 12.

[326] Harold D. Lasswell, "The Structure and Function of Communication in Society," dalam Wilbur Schramm (ed.), Mass Communications (Urbana: University of Illinois Press, 1948), hal. 37.

[327] Dan Nimmo, Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan, dan Media (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hal. 8.

Dalam perspektif ilmu politik, komunikasi politik berfungsi sebagai sarana artikulasi dan agregasi kepentingan masyarakat. Melalui komunikasi politik, berbagai aspirasi publik dapat disampaikan kepada pemegang kekuasaan sehingga tercipta hubungan timbal balik antara pemimpin dan rakyat. Fungsi ini sangat penting dalam sistem demokrasi karena memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pengawasan kebijakan publik. Tanpa komunikasi yang efektif, hubungan antara pemerintah dan masyarakat akan mengalami distorsi yang berpotensi menimbulkan konflik, ketidakpercayaan, dan krisis legitimasi.[328]

Hafied Cangara menegaskan bahwa komunikasi politik pada dasarnya merupakan proses pertukaran informasi politik yang bertujuan memengaruhi sikap, perilaku, dan orientasi masyarakat terhadap suatu isu atau kebijakan tertentu. Dalam praktiknya, komunikasi politik tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan citra, legitimasi kekuasaan, dan mobilisasi dukungan politik. Oleh sebab itu, kualitas komunikasi politik sangat menentukan keberhasilan seorang pemimpin dalam membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat.[329]

Dalam sistem demokrasi modern, komunikasi politik memiliki fungsi strategis dalam membentuk opini publik (*public opinion*). Opini publik merupakan akumulasi pandangan, sikap, dan penilaian masyarakat terhadap isu-isu politik yang berkembang. Melalui komunikasi politik yang efektif, pemimpin dapat menjelaskan kebijakan, membangun pemahaman publik, dan memperoleh legitimasi sosial. Sebaliknya, komunikasi yang buruk dapat memunculkan kesalahpahaman, resistensi, bahkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, kemampuan mengelola opini publik menjadi salah satu indikator penting keberhasilan komunikasi politik.[330]

Hubungan antara komunikasi politik dan legitimasi kekuasaan tidak dapat dipisahkan. Max Weber menjelaskan bahwa legitimasi merupakan dasar diterimanya suatu kekuasaan oleh masyarakat. Dalam praktik politik, legitimasi tidak hanya diperoleh melalui prosedur hukum atau pemilihan umum, tetapi juga melalui komunikasi yang mampu membangun kepercayaan publik. Ketika pemimpin mampu menjelaskan kebijakan secara terbuka, jujur, dan rasional, maka masyarakat cenderung memberikan dukungan yang lebih

---

[328] Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hal. 405.

[329] Hafied Cangara, Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), hal. 31.

[330] Dan Nimmo, *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan, dan Media* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hal. 172.

besar terhadap kebijakan tersebut. Sebaliknya, kegagalan komunikasi sering kali melahirkan delegitimasi dan krisis kepercayaan.[331]

Jürgen Habermas memandang komunikasi sebagai sarana membangun rasionalitas dan konsensus sosial melalui ruang publik (*public sphere*). Menurutnya, komunikasi yang ideal adalah komunikasi yang berlangsung secara dialogis, bebas dari dominasi, dan memungkinkan setiap pihak menyampaikan argumentasinya secara setara. Konsep ini menjadi penting dalam komunikasi politik karena menekankan perlunya keterbukaan, partisipasi, dan deliberasi dalam proses pengambilan keputusan publik. Dengan demikian, komunikasi politik digunakan untuk memengaruhi masyarakat sekaligus menjadi medium untuk membangun kesepahaman bersama.[332]

Dalam perkembangannya, kehadiran media massa telah mengubah pola komunikasi politik secara signifikan. Jika pada masa lalu komunikasi politik berlangsung secara langsung melalui pertemuan fisik, maka saat ini media massa menjadi perantara utama antara pemimpin dan masyarakat. Televisi, radio, surat kabar, dan media daring memungkinkan pesan politik menjangkau *audiens* yang lebih luas dalam waktu singkat. Kondisi ini menjadikan media sebagai aktor penting dalam proses pembentukan persepsi dan opini publik terhadap pemimpin maupun kebijakan pemerintah.[333]

Manuel Castells menjelaskan bahwa perkembangan teknologi informasi telah melahirkan apa yang disebut sebagai *network society*, yaitu masyarakat yang terhubung melalui jaringan komunikasi digital. Dalam konteks ini, komunikasi politik tidak lagi bersifat satu arah, melainkan berlangsung secara interaktif dan multidimensional. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga produsen informasi yang dapat memengaruhi diskursus politik. Perubahan ini menciptakan peluang sekaligus tantangan baru bagi para pemimpin dalam membangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat.[334]

Era digital telah memperluas ruang partisipasi politik masyarakat melalui media sosial seperti *Facebook, Instagram, X (Twitter), YouTube, dan TikTok*. Platform-platform tersebut dijadikan masyarakat untuk memberikan respons secara langsung terhadap kebijakan pemerintah maupun pernyataan para pemimpin. Namun demikian, keterbukaan ruang digital juga melahirkan berbagai persoalan baru, seperti penyebaran *hoaks*, disinformasi, ujaran kebencian, dan polarisasi

---

[331] Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hal. 63.

[332] Jürgen Habermas, *The Structural Transformation of the Public Sphere* (Cambridge: MIT Press, 1989), hal. 27.

[333] Denis McQuail, *Mass Communication Theory* (London: Sage Publications, 2010), hal. 83.

[334] Manuel Castells, *Communication Power* (Oxford: Oxford University Press, 2009), hal. 41.

politik. Fenomena ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi komunikasi tidak selalu diikuti oleh perkembangan etika komunikasi, sehingga memerlukan landasan moral yang kuat dalam praktik komunikasi politik.[335]

Perkembangan komunikasi politik di era digital juga melahirkan fenomena distorsi informasi dan disinformasi yang semakin kompleks. Distorsi informasi terjadi ketika pesan yang disampaikan mengalami perubahan makna akibat proses penyederhanaan, pemotongan konteks, atau *framing* tertentu. Adapun disinformasi merujuk pada penyebaran informasi yang salah secara sengaja untuk memengaruhi persepsi publik. Dalam konteks politik, kedua fenomena ini sering digunakan untuk membangun citra, menyerang lawan politik, atau mengendalikan opini masyarakat. Akibatnya, komunikasi politik tidak lagi berfungsi sebagai sarana penyampaian kebenaran, melainkan berubah menjadi arena perebutan makna dan kepentingan.[336]

Michel Foucault memandang komunikasi sebagai bagian dari relasi kuasa (*power relations*) yang selalu hadir dalam kehidupan sosial. Menurutnya, kekuasaan tidak hanya bekerja melalui instrumen hukum atau paksaan fisik, tetapi juga melalui produksi wacana, pengetahuan, dan komunikasi. Dalam perspektif ini, komunikasi politik dapat menjadi sarana legitimasi kekuasaan sekaligus alat dominasi terhadap masyarakat. Komunikasi tidak pernah benar-benar netral, karena selalu mengandung kepentingan, nilai, dan relasi kuasa yang memengaruhi cara masyarakat memahami realitas sosial dan politik.[337]

Pandangan Foucault tersebut menunjukkan bahwa problem komunikasi politik tidak semata-mata terletak pada aspek teknis penyampaian pesan, tetapi juga pada dimensi etika dan moralitas. Ketika komunikasi digunakan untuk mempertahankan kekuasaan, membangun pencitraan semu, atau memanipulasi informasi, maka komunikasi kehilangan fungsi substansialnya sebagai sarana membangun pemahaman bersama. Kondisi ini menyebabkan munculnya krisis kepercayaan publik yang pada akhirnya melemahkan hubungan antara pemimpin dan masyarakat. Maka, komunikasi politik membutuhkan landasan etika yang mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan kekuasaan dan kepentingan publik.[338]

Etika komunikasi merupakan seperangkat prinsip moral yang mengatur bagaimana pesan disampaikan dan diterima dalam kehidupan sosial. Clifford G. Christians menegaskan bahwa komunikasi yang etis harus berlandaskan

---

[335] Rulli Nasrullah, *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi* (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017), hal. 119.

[336] Rulli Nasrullah, *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi* (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017), hal. 156.

[337] Michel Foucault, *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings* (New York: Pantheon Books, 1980), hal. 98.

[338] Haryatmoko, *Etika Komunikasi: Manipulasi Media, Kekerasan, dan Pornografi* (Yogyakarta: Kanisius, 2016), hal. 42.

pada nilai kejujuran, tanggung jawab, penghormatan terhadap martabat manusia, dan orientasi pada kebaikan bersama. Dalam konteks politik, etika komunikasi berfungsi sebagai pedoman agar aktivitas komunikasi tidak terjebak pada manipulasi, propaganda, maupun eksploitasi informasi.[339]

Dalam perspektif Islam, komunikasi politik tidak hanya dipandang sebagai aktivitas sosial dan politik, tetapi juga sebagai bagian dari amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt. Komunikasi tidak boleh dilepaskan dari nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan kemaslahatan.[340] Prinsip-prinsip tersebut tampak dalam berbagai konsep komunikasi Qur'ani seperti *qaulan sadidan* (perkataan yang benar), *qaulan layyinan* (perkataan yang lemah lembut), *qaulan balighan* (perkataan yang efektif), *qaulan kariman* (perkataan yang mulia), *qaulan ma'rufan* (perkataan yang baik) dan *qaulan maisuran* (perkataan yang mudah dipahami). Keenam konsep tersebut menunjukkan bahwa komunikasi dalam Islam tidak hanya berorientasi pada keberhasilan penyampaian pesan, tetapi juga pada kualitas moral pesan yang disampaikan.

Komunikasi politik merupakan proses strategis yang menghubungkan pemimpin dan masyarakat melalui pertukaran pesan yang berkaitan dengan kekuasaan, kebijakan, dan kepentingan publik. Namun, perkembangan komunikasi politik modern juga menunjukkan adanya berbagai problem seperti dominasi kekuasaan, manipulasi informasi, krisis kepercayaan, dan polarisasi sosial.[341]

---

[339] Clifford G. Christians, *Communication Ethics and Universal Values* (London: Sage Publications, 1997), hal. 17.

[340] Abdul Basit, *Komunikasi Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2017), hal. 88.

[341] M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Jakarta: Lentera Hati, 2013), hal. 385.

BAB III
PROBLEMATIKA KOMUNIKASI ANTARA PEMIMPIN DAN RAKYAT DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN

Bab ini membahas problematika komunikasi antara pemimpin dan rakyat dalam perspektif Al-Qur'an dengan menempatkan komunikasi sebagai fondasi relasi kepemimpinan dalam masyarakat Qur'ani. Pembahasan diawali dengan penjelasan mengenai pentingnya komunikasi sebagai sarana membangun hubungan sosial yang adil, dialogis, dan berlandaskan nilai moral. Selanjutnya diuraikan krisis komunikasi dalam realitas sosial kontemporer yang ditandai oleh dominasi kekuasaan, manipulasi informasi, dan melemahnya etika komunikasi publik. Al-Qur'an kemudian digunakan sebagai kerangka normatif untuk mengidentifikasi kerusakan relasi komunikasi sosial melalui berbagai konsep Qur'ani. Analisis dikembangkan melalui tiga dimensi utama, yaitu problem kekuasaan, moralitas, dan relasi sosial. Ketiga dimensi tersebut menunjukkan bahwa problem komunikasi kepemimpinan tidak hanya bersifat teknis, tetapi berkaitan erat dengan krisis etika yang mempengaruhi legitimasi kepemimpinan dalam masyarakat.

A. Problematika Komunikasi

1. Krisis komunikasi

Krisis komunikasi antara pemimpin dan rakyat dalam realitas sosial kontemporer merupakan fenomena yang semakin terlihat dalam dinamika

politik dan kehidupan masyarakat modern. Hubungan antara pemimpin dan masyarakat tidak lagi selalu dibangun melalui komunikasi yang dialogis dan partisipatif, melainkan sering kali berlangsung secara satu arah melalui mekanisme kekuasaan yang lebih menekankan pada legitimasi kebijakan daripada interaksi sosial yang konstruktif. Dalam konteks ini, komunikasi kepemimpinan sering mengalami reduksi makna sehingga lebih berfungsi sebagai alat persuasi politik daripada sebagai sarana membangun hubungan sosial yang sehat antara pemimpin dan masyarakat. Kondisi tersebut menimbulkan kesenjangan komunikasi yang berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap pemimpin. Dalam perspektif komunikasi Islam, fenomena ini menunjukkan adanya penyimpangan dari nilai-nilai etika komunikasi yang diajarkan dalam Al-Qur'an, yang menekankan pentingnya kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab moral dalam interaksi sosial. Oleh karena itu, krisis komunikasi antara pemimpin dan rakyat tidak hanya berkaitan dengan kegagalan teknis dalam penyampaian pesan, tetapi juga berkaitan dengan kegagalan moral dalam menjalankan tanggung jawab kepemimpinan. Dalam konteks ini, komunikasi yang tidak transparan dan tidak dialogis dapat memperlemah relasi sosial antara pemimpin dan masyarakat serta memicu munculnya konflik sosial yang lebih luas dalam kehidupan masyarakat.[1]

Dalam perspektif Al-Qur'an, krisis komunikasi kepemimpinan dapat dipahami melalui kisah para pemimpin yang menolak dialog dengan kebenaran, sebagaimana terlihat dalam kisah Fir'aun dalam Al-Qur'an. Allah SWT berfirman:

فَقُلْ هَل لَّكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ ۝ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ

"Maka katakanlah (kepada Fir'aun): 'Adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri, dan aku akan menunjukkan kepadamu jalan menuju Tuhanmu agar engkau takut kepada-Nya?'" (QS. An-Nāzi'āt [79]: 18–19).

Ayat ini menggambarkan dialog yang dilakukan Nabi Musa a.s kepada Fir'aun sebagai bentuk komunikasi moral yang bertujuan mengajak seorang pemimpin kembali kepada nilai kebenaran dan keadilan. Dalam tafsirnya, Ibn Katsīr menjelaskan bahwa seruan Nabi Musa a.s kepada Fir'aun merupakan bentuk komunikasi yang penuh hikmah dan nasihat, namun ditolak oleh Fir'aun karena kesombongan kekuasaan yang membuatnya menolak mendengar kebenaran.[2] Penolakan terhadap komunikasi yang berlandaskan kebenaran tersebut menunjukkan bahwa krisis komunikasi antara pemimpin dan masyarakat sering berakar pada sikap arogan dalam kekuasaan. Dalam

[1] Fikra Awla & Akhmad Rifai, Political Communication in the Quranic Perspective: Ethical Principles for Contemporary Politics, *Palakka: Media and Islamic Communication*, 2025, hal. 72.

[2] Ibn Katsīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*, Dār Ṭayyibah, 1999, jilid 8, hal. 304

banyak kasus modern, sikap seperti ini juga muncul ketika pemimpin menolak kritik atau aspirasi masyarakat sehingga komunikasi yang terjadi tidak lagi bersifat dialogis.

Penafsiran serupa juga dikemukakan oleh Al-Qurṭubī yang menegaskan bahwa ayat tersebut menggambarkan pentingnya sikap keterbukaan seorang pemimpin dalam menerima nasihat dan kritik dari pihak lain. Menurut Al-Qurṭubī, ajakan Nabi Musa a.s kepada Fir‘aun merupakan bentuk komunikasi yang santun dan bijaksana, namun kesombongan kekuasaan membuat Fir‘aun menolak dialog tersebut. Sikap ini menunjukkan bahwa kesombongan dalam kekuasaan dapat menjadi penghalang utama bagi terjalinnya komunikasi yang sehat antara pemimpin dan masyarakat.[3] Dalam konteks sosial kontemporer, fenomena serupa dapat terlihat ketika pemimpin tidak memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik atau aspirasi mereka. Ketika komunikasi publik tidak memberikan ruang dialog yang memadai, hubungan antara pemimpin dan masyarakat menjadi semakin renggang. Oleh karena itu, keterbukaan dalam komunikasi menjadi salah satu syarat penting untuk menjaga stabilitas relasi sosial antara pemimpin dan rakyat.

Dalam tafsir kontemporer, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat tersebut menunjukkan bagaimana Al-Qur’an mengajarkan komunikasi yang santun bahkan ketika berhadapan dengan penguasa yang zalim. Nabi Musa diperintahkan untuk menyampaikan pesan dengan pendekatan yang persuasif dan tidak konfrontatif, meskipun lawan bicaranya adalah seorang penguasa tiran. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi dalam perspektif Qur’ani harus tetap menjaga etika dan kesantunan dalam setiap situasi.[4] Namun demikian, ketika pemimpin menolak komunikasi yang santun dan konstruktif, maka hubungan antara pemimpin dan masyarakat akan mengalami kerusakan. Dalam konteks sosial modern, kondisi ini dapat terlihat ketika komunikasi antara pemerintah dan masyarakat lebih bersifat defensif daripada dialogis. Ketika komunikasi publik hanya berfungsi untuk mempertahankan kebijakan tanpa membuka ruang diskusi yang sehat, maka yang muncul adalah ketegangan sosial yang berpotensi memperlemah hubungan antara pemimpin dan masyarakat.

Dalam realitas sosial kontemporer, krisis komunikasi antara pemimpin dan rakyat juga dipengaruhi oleh perubahan struktur komunikasi dalam masyarakat modern. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara masyarakat memperoleh dan menyebarkan informasi, sehingga komunikasi politik tidak lagi sepenuhnya dikendalikan oleh pemimpin atau lembaga pemerintah. Masyarakat kini memiliki akses yang lebih luas terhadap berbagai

---

[3] Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi‘ li Aḥkām al-Qur’ān*, Mu’assasah al-Risālah, 2006, jilid 19, hal. 205

[4] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, Lentera Hati, 2002, jilid 15, hal. 317

sumber informasi, yang sering kali menimbulkan dinamika baru dalam hubungan antara pemimpin dan rakyat. Namun, perubahan ini juga menghadirkan tantangan baru karena komunikasi publik sering kali dipenuhi oleh disinformasi, propaganda politik, dan manipulasi opini publik. Dalam kondisi seperti ini, komunikasi antara pemimpin dan masyarakat menjadi semakin kompleks karena informasi tidak selalu disampaikan secara objektif dan transparan. Oleh karena itu, integritas komunikasi menjadi faktor penting dalam menjaga hubungan yang sehat antara pemimpin dan masyarakat.[5]

Krisis komunikasi kepemimpinan juga dapat terjadi ketika komunikasi politik lebih menekankan pada pencitraan daripada pada penyampaian informasi yang substantif kepada masyarakat. Dalam banyak kasus, komunikasi politik modern lebih fokus pada strategi membangun citra positif pemimpin melalui media massa atau media sosial daripada membangun dialog yang konstruktif dengan masyarakat. Kondisi ini menyebabkan komunikasi publik kehilangan dimensi etisnya karena lebih berorientasi pada kepentingan politik jangka pendek. Ketika komunikasi hanya digunakan sebagai alat propaganda, masyarakat akan kesulitan memperoleh informasi yang akurat mengenai kebijakan yang diambil oleh pemimpin. Akibatnya, muncul ketidakpercayaan terhadap pemimpin yang dianggap tidak transparan dalam menjalankan kekuasaan. Oleh karena itu, komunikasi yang etis dan transparan menjadi salah satu syarat penting untuk menjaga legitimasi kepemimpinan dalam masyarakat modern.[6]

Selain itu, krisis komunikasi antara pemimpin dan rakyat juga dapat dipicu oleh ketimpangan akses informasi antara elite politik dan masyarakat. Dalam banyak sistem pemerintahan modern, informasi mengenai kebijakan publik sering kali hanya tersedia secara terbatas bagi masyarakat sehingga menimbulkan kesenjangan pengetahuan antara pemerintah dan rakyat. Ketika masyarakat tidak memperoleh informasi yang cukup mengenai kebijakan yang mempengaruhi kehidupan mereka, maka muncul ketidakpuasan sosial yang berpotensi menimbulkan konflik antara masyarakat dan pemerintah. Oleh karena itu, transparansi informasi menjadi elemen penting dalam membangun komunikasi yang sehat antara pemimpin dan rakyat.[7]

Krisis komunikasi kepemimpinan juga dapat terjadi ketika pemimpin tidak mampu membangun komunikasi interpersonal yang efektif dengan

---

[5] TM. Tanjung, & Abdullah, A., The Concept of Communication in the Quran; Analysis of Theory and Practice, *International Journal of Education, Social Studies, and Management*, 2025, hal. 64

[6] M. Syarif, Ethics of Leadership Communication in Islam, *Qanun: Journal of Islamic Laws and Studies*, 2023, hal. 44

[7] N. Nurhayati, & Mahmudi, M., Tafsir Al-Qur'an dan Pemahaman tentang Kepemimpinan: Integrasi Nilai-Nilai Islam dalam Konteks Kontemporer, *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 2024, hal. 19.

masyarakat. Dalam perspektif komunikasi sosial, hubungan antara pemimpin dan masyarakat tidak hanya dibangun melalui kebijakan publik, tetapi juga melalui interaksi sosial yang menunjukkan kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat. Pemimpin yang mampu berkomunikasi secara langsung dengan masyarakat cenderung memperoleh tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemimpin yang hanya berkomunikasi melalui saluran formal. Oleh karena itu, kemampuan komunikasi interpersonal menjadi faktor penting dalam membangun hubungan sosial yang kuat antara pemimpin dan masyarakat.[8]

Selain itu, krisis komunikasi antara pemimpin dan rakyat juga berkaitan dengan kegagalan pemimpin dalam menyampaikan visi kepemimpinan secara jelas kepada masyarakat. Dalam banyak kasus, masyarakat merasa tidak memahami arah kebijakan yang diambil oleh pemimpin karena kurangnya komunikasi yang jelas mengenai tujuan dan manfaat kebijakan tersebut. Kondisi ini menyebabkan masyarakat merasa tidak dilibatkan dalam proses pembangunan sosial sehingga hubungan antara pemimpin dan rakyat menjadi semakin renggang. Oleh karena itu, komunikasi yang visioner menjadi faktor penting dalam membangun hubungan yang sehat antara pemimpin dan masyarakat.[9]

Dengan demikian, krisis komunikasi antara pemimpin dan rakyat dalam realitas sosial kontemporer menunjukkan bahwa relasi kepemimpinan tidak hanya bergantung pada kekuasaan formal, tetapi juga pada kemampuan pemimpin untuk membangun komunikasi yang etis, dialogis, dan transparan dengan masyarakat. Perspektif Al-Qur'an menunjukkan bahwa komunikasi yang baik merupakan bagian dari tanggung jawab moral pemimpin dalam menjalankan amanah kepemimpinan. Ketika komunikasi dilakukan secara terbuka dan berlandaskan nilai keadilan, hubungan antara pemimpin dan masyarakat dapat terjalin secara harmonis. Sebaliknya, ketika komunikasi didominasi oleh kepentingan kekuasaan dan manipulasi informasi, maka yang terjadi adalah krisis kepercayaan yang dapat merusak stabilitas sosial dalam masyarakat.[10]

---

[8] M. Z Kurniawan,., Communication Strategy for Islamic Boarding School Leaders in Improving the Quality of Education, *International Journal of Social Science and Education Research Studies,* 2023, hal. 38.

[9] Chanifah, N., Samsudin, A., & Ansori, I. H., Quranic Leadership: The Effort to Realize the Integrity of Leaders in Preventing Corruption, International Journal of Educational Management and Innovation, 2024, hal. 49

[10] Irka. Muliyanty, Hamdanah, H., & Fahmi, N., Dasar Al-Qur'an dan Hadits tentang Kepemimpinan, *Journal on Education*, 2024, hal.3

2. Kerusakan relasi komunikasi

Komunikasi merupakan bagian dari tatanan moral masyarakat. Dalam perspektif Qur'ani, komunikasi tidak sekadar aktivitas pertukaran informasi, tetapi juga menjadi sarana untuk menjaga keseimbangan hubungan sosial antara individu maupun kelompok dalam masyarakat. Ketika komunikasi dilakukan secara tidak etis, manipulatif, atau penuh kepentingan kekuasaan, maka relasi sosial yang sehat akan mengalami kerusakan.[11] Oleh karena itu, Al-Qur'an memberikan berbagai petunjuk normatif mengenai bagaimana komunikasi seharusnya dilakukan agar mampu menjaga keharmonisan kehidupan sosial. Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya mengatur hubungan antar individu, tetapi juga mengatur hubungan antara pemimpin dan masyarakat dalam kehidupan sosial. Dalam konteks kepemimpinan, komunikasi yang etis menjadi salah satu indikator penting dalam menjaga stabilitas sosial karena komunikasi yang tidak jujur atau tidak transparan dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemimpin. Al-Qur'an memberikan pendekatan moral yang kuat dalam menilai apakah suatu komunikasi membawa kemaslahatan sosial atau justru menimbulkan kerusakan dalam hubungan sosial masyarakat.

Kerusakan relasi komunikasi sosial dalam perspektif Al-Qur'an dapat dipahami melalui konsep *Fasād* yang sering digunakan untuk menggambarkan tindakan yang merusak tatanan kehidupan masyarakat. Dalam konteks komunikasi, kerusakan tersebut dapat muncul ketika informasi disampaikan secara tidak jujur, ketika pesan digunakan untuk memanipulasi masyarakat, atau ketika komunikasi digunakan sebagai alat dominasi kekuasaan. Dalam Al-Qur'an, konsep kerusakan sosial ini dijelaskan melalui firman Allah SWT:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ

"Dan apabila dikatakan kepada mereka: 'Janganlah kamu membuat kerusakan di bumi,' mereka menjawab: 'Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang melakukan perbaikan.'" (QS. Al-Baqarah [2]: 11).

Ayat ini menggambarkan bagaimana kerusakan sosial sering kali dilakukan oleh pihak yang justru mengklaim dirinya sebagai pembawa kebaikan. Dalam tafsirnya, Ibn Katsīr menjelaskan bahwa ayat ini merujuk pada perilaku orang-orang munafik yang melakukan kerusakan dalam masyarakat melalui tindakan yang menipu dan manipulatif, termasuk dalam bentuk komunikasi yang tidak jujur.[12]

Penafsiran terhadap ayat tersebut juga dijelaskan oleh Al-Qurṭubī yang menegaskan bahwa kerusakan yang dimaksud dalam ayat tersebut mencakup

---

[11] Deddy Mulyana, , *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*, Remaja Rosdakarya, 2017, hal. 92

[12] Ibn Katsīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*, Dār Ṭayyibah, 1999, jilid 1, hal. 108

berbagai bentuk tindakan yang merusak tatanan sosial masyarakat, termasuk penyebaran informasi yang menyesatkan dan komunikasi yang memecah belah masyarakat. Menurut Al-Qurṭubī, orang-orang yang melakukan kerusakan sosial sering kali tidak menyadari bahwa tindakan mereka telah merusak hubungan sosial dalam masyarakat karena mereka menganggap tindakan tersebut sebagai bagian dari strategi atau kepentingan tertentu.[13] Penjelasan ini menunjukkan bahwa kerusakan komunikasi sosial tidak selalu muncul secara terang-terangan, tetapi sering kali terjadi secara terselubung melalui manipulasi informasi dan propaganda. Dalam konteks kepemimpinan, kondisi ini dapat terjadi ketika komunikasi politik digunakan untuk menutupi fakta atau mempengaruhi persepsi masyarakat secara tidak jujur.

Dalam tafsir kontemporer, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat tersebut menunjukkan bagaimana kerusakan sosial sering kali terjadi karena kegagalan manusia memahami dampak dari tindakan mereka terhadap masyarakat. Menurutnya, orang yang melakukan kerusakan sering kali merasa bahwa mereka sedang melakukan perbaikan karena mereka melihat tindakan tersebut dari sudut pandang kepentingan pribadi atau kelompok.[14] Dalam konteks komunikasi sosial, fenomena ini dapat terlihat ketika komunikasi digunakan untuk membenarkan kebijakan yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu, Al-Qur'an menekankan pentingnya kejujuran dan tanggung jawab moral dalam setiap bentuk komunikasi yang dilakukan oleh manusia.

Dalam kajian komunikasi modern, kerusakan relasi komunikasi sosial sering terjadi ketika komunikasi digunakan sebagai alat dominasi kekuasaan. Dalam teori komunikasi kritis, komunikasi tidak selalu netral karena sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik dan ekonomi yang ingin mempertahankan kekuasaan tertentu. Ketika komunikasi digunakan sebagai alat dominasi, maka pesan yang disampaikan tidak lagi berorientasi pada kebenaran, tetapi pada kepentingan kelompok tertentu. Kondisi ini menyebabkan masyarakat sulit memperoleh informasi yang objektif mengenai kebijakan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Oleh karena itu, komunikasi yang etis menjadi faktor penting dalam menjaga keseimbangan hubungan sosial antara pemimpin dan masyarakat.[15]

Pendekatan Al-Qur'an dalam mengidentifikasi kerusakan komunikasi sosial juga dapat dilihat melalui penekanan pada pentingnya kejujuran dalam komunikasi. Dalam Islam, kejujuran merupakan nilai moral yang sangat penting karena komunikasi yang tidak jujur dapat merusak hubungan sosial antara individu maupun kelompok. Dalam konteks kepemimpinan, kejujuran

---

[13] Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*, Mu'assasah al-Risālah, 2006, jilid 1, hal. 196

[14] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Lentera Hati, 2002, jilid 1, hal. 109.

[15] Jurgen Habermas, *The Theory of Communicative Action*, Beacon Press, 2015, hal. 86

dalam komunikasi menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin. Ketika pemimpin tidak jujur dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, maka kepercayaan publik akan menurun dan hubungan antara pemimpin dan rakyat akan mengalami kerusakan.[16]

Selain itu, Al-Qur'an juga menekankan pentingnya tanggung jawab dalam komunikasi sebagai bagian dari etika sosial. Komunikasi yang tidak bertanggung jawab dapat menimbulkan konflik sosial karena informasi yang disampaikan tidak memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat. Oleh karena itu, setiap individu, terutama pemimpin, memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa komunikasi yang mereka lakukan tidak menimbulkan kerusakan dalam kehidupan sosial masyarakat.[17]

Dalam perspektif kepemimpinan Islam, komunikasi yang sehat harus mampu membangun hubungan yang saling percaya antara pemimpin dan masyarakat. Hubungan tersebut hanya dapat tercipta ketika komunikasi dilakukan secara terbuka dan transparan. Ketika komunikasi tidak transparan, masyarakat akan sulit memahami tujuan dari kebijakan yang diambil oleh pemimpin sehingga muncul berbagai spekulasi dan kecurigaan terhadap kebijakan tersebut.[18]

Kerusakan relasi komunikasi sosial juga dapat terjadi ketika komunikasi tidak memberikan ruang partisipasi bagi masyarakat. Dalam masyarakat demokratis, komunikasi antara pemimpin dan masyarakat harus memungkinkan terjadinya dialog yang konstruktif sehingga masyarakat dapat menyampaikan aspirasi mereka secara bebas. Tanpa adanya komunikasi yang partisipatif, hubungan antara pemimpin dan masyarakat akan menjadi tidak seimbang karena keputusan politik hanya diambil oleh kelompok tertentu.[19]

Selain itu, komunikasi yang tidak etis juga dapat memicu polarisasi sosial dalam masyarakat. Ketika komunikasi publik digunakan untuk menyerang kelompok tertentu atau untuk menyebarkan informasi yang menyesatkan, maka masyarakat akan terpecah ke dalam berbagai kelompok yang saling bertentangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa komunikasi memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap stabilitas sosial masyarakat.[20]

Pendekatan Al-Qur'an dalam mengidentifikasi kerusakan komunikasi sosial juga menekankan pentingnya tanggung jawab moral dalam

---

[16] Daniel Goleman, *Social Intelligence: The New Science of Human Relationships*, Bantam Books, 2006, hal. 64.

[17] Paulo Freire, *Pedagogy of the Oppressed*, Bloomsbury Publishing, 2018, hal. 78

[18] Peter G Northouse, *Leadership: Theory and Practice*, Sage Publications, 2019, hal. 212

[19] Stephen W Littlejohn & Karen A Foss, *Theories of Human Communication*, Waveland Press, 2017, hal. 112.

[20] Manuel Castells, *Communication Power*, Oxford University Press, 2015, hal. 156.

menyampaikan informasi kepada masyarakat. Komunikasi yang berlandaskan nilai moral akan mampu menjaga keseimbangan hubungan sosial dalam masyarakat. Sebaliknya, komunikasi yang tidak memperhatikan nilai moral akan menimbulkan berbagai bentuk kerusakan sosial yang dapat mengancam stabilitas kehidupan masyarakat.[21]

Dengan demikian, pendekatan Al-Qur'an dalam mengidentifikasi kerusakan relasi komunikasi sosial menunjukkan bahwa komunikasi memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan kehidupan masyarakat. Al-Qur'an tidak hanya mengajarkan prinsip komunikasi yang etis, tetapi juga memberikan peringatan mengenai berbagai bentuk komunikasi yang dapat merusak hubungan sosial manusia. Ketika komunikasi dilakukan secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab, maka hubungan antara pemimpin dan masyarakat dapat terjalin secara harmonis. Namun ketika komunikasi digunakan sebagai alat manipulasi atau dominasi kekuasaan, maka yang terjadi adalah kerusakan dalam relasi sosial masyarakat.[22]

3. Kerangka problematika komunikasi.

Kerangka analisis problematika komunikasi antara pemimpin dan rakyat dalam perspektif Al-Qur'an dapat dipahami melalui tiga dimensi utama, yaitu dimensi kekuasaan, dimensi moralitas, dan dimensi relasi sosial. Ketiga dimensi tersebut saling berkaitan dalam membentuk kualitas komunikasi antara pemimpin dan masyarakat dalam suatu sistem sosial. Dalam kajian komunikasi sosial, komunikasi kepemimpinan tidak hanya dipahami sebagai proses penyampaian pesan atau kebijakan, tetapi juga sebagai proses pembentukan hubungan sosial yang mempengaruhi stabilitas masyarakat. Ketika komunikasi dijalankan secara terbuka dan partisipatif, relasi antara pemimpin dan rakyat cenderung lebih harmonis karena masyarakat merasa dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Namun sebaliknya, ketika komunikasi dikendalikan oleh kepentingan kekuasaan dan tidak memberikan ruang dialog bagi masyarakat, maka hubungan antara pemimpin dan rakyat dapat mengalami ketegangan.[23] Oleh karena itu, analisis terhadap problem komunikasi kepemimpinan perlu memperhatikan faktor struktural yang mempengaruhi proses komunikasi tersebut, termasuk kekuasaan, moralitas, dan dinamika relasi sosial yang terbentuk dalam masyarakat.

Dalam perspektif Al-Qur'an, problem komunikasi sosial sering kali berkaitan dengan kerusakan hubungan sosial yang muncul akibat ketidakadilan

---

[21] Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktik*, Remaja Rosdakarya, 2017, hal. 34

[22] Richard L West, & TLynn H Turner, *Introducing Communication Theory: Analysis and Application*, McGraw-Hill Education, 2018, hal. 48

[23] Worner J Severin & James W Tankard, *Communication Theories: Origins, Methods, and Uses in the Mass Media*, Pearson Education, 2016, hal. 57

dan penyalahgunaan kekuasaan. Al-Qur'an memberikan gambaran mengenai dampak sosial dari kepemimpinan yang tidak adil melalui firman Allah SWT:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ

"Sesungguhnya Allah tidak menyukai kerusakan." (QS. Al-Baqarah [2]: 205).

Ayat ini menggambarkan bagaimana tindakan yang merusak tatanan sosial, termasuk komunikasi yang manipulatif atau menyesatkan, merupakan perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai Qur'ani. Dalam tafsirnya, Ibn Katsir menjelaskan bahwa kerusakan yang dimaksud dalam ayat tersebut mencakup berbagai tindakan yang merusak kehidupan masyarakat, termasuk perilaku pemimpin yang menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan mengabaikan kepentingan masyarakat.[24]

Penafsiran terhadap ayat tersebut juga dijelaskan oleh Al-Qurṭubi yang menegaskan bahwa kerusakan yang dimaksud dalam ayat tersebut tidak hanya berkaitan dengan kerusakan fisik di bumi, tetapi juga kerusakan sosial yang muncul akibat ketidakadilan dan penyalahgunaan kekuasaan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Al-Qurṭubi, perilaku pemimpin yang menggunakan kekuasaan secara sewenang-wenang dapat menimbulkan kerusakan sosial karena masyarakat kehilangan rasa keadilan dan kepercayaan terhadap kepemimpinan.[25]

Dalam tafsir kontemporer, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat tersebut mengandung pesan moral bahwa setiap bentuk tindakan yang merusak hubungan sosial manusia merupakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai Al-Qur'an. Menurutnya, kerusakan sosial sering kali muncul ketika manusia tidak lagi menjadikan nilai moral sebagai dasar dalam menjalankan kekuasaan dan interaksi sosial.[26]

Dimensi pertama dalam kerangka analisis problem komunikasi kepemimpinan adalah dimensi kekuasaan. Kekuasaan memiliki pengaruh besar terhadap cara komunikasi dilakukan dalam suatu masyarakat. Dalam banyak sistem politik, komunikasi antara pemimpin dan rakyat tidak berlangsung secara setara karena pemimpin memiliki kontrol yang lebih besar terhadap sumber informasi. Ketika kekuasaan digunakan untuk mengontrol komunikasi secara sepihak, masyarakat akan kesulitan memperoleh informasi yang objektif mengenai kebijakan publik.[27] Kondisi ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemimpin karena komunikasi tidak lagi mencerminkan transparansi dan keterbukaan.

---

[24] Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Dar Ibn Hazm, 2018, jilid 1, hal. 245

[25] Al-Qurṭubi, *Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'an*, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2017, jilid 3, hal. 365

[26] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Lentera Hati, 2017, jilid 2, hal. 87.

[27] McQuail, *McQuail's Mass Communication Theory*, Sage Publications, 2018, hal. 94.

Problem kekuasaan dalam komunikasi kepemimpinan juga dapat muncul ketika komunikasi digunakan sebagai alat propaganda untuk membangun citra positif pemimpin di hadapan masyarakat. Dalam kondisi seperti ini, komunikasi tidak lagi berfungsi sebagai sarana dialog sosial yang sehat, tetapi sebagai alat manipulasi opini publik. Komunikasi yang bersifat propaganda dapat menyebabkan masyarakat sulit memperoleh informasi yang akurat mengenai kebijakan yang mempengaruhi kehidupan mereka.[28]

Dimensi kedua dalam kerangka analisis problem komunikasi kepemimpinan adalah dimensi moralitas. Moralitas merupakan faktor penting yang menentukan apakah komunikasi yang dilakukan oleh pemimpin dapat dipercaya oleh masyarakat. Dalam perspektif komunikasi sosial, kejujuran dan integritas merupakan nilai yang sangat penting dalam membangun hubungan komunikasi yang sehat antara pemimpin dan masyarakat.[29]

Problem moralitas dalam komunikasi kepemimpinan sering muncul ketika pemimpin tidak konsisten antara ucapan dan tindakan. Ketidaksesuaian antara pesan yang disampaikan kepada masyarakat dan kebijakan yang diterapkan dalam praktik dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik. Dalam banyak kasus, masyarakat menjadi skeptis terhadap komunikasi pemimpin karena mereka merasa bahwa pesan yang disampaikan hanya bersifat retorika tanpa diikuti oleh tindakan nyata.[30]

Dimensi ketiga dalam kerangka analisis problem komunikasi kepemimpinan adalah dimensi relasi sosial. Relasi sosial antara pemimpin dan rakyat sangat dipengaruhi oleh kualitas komunikasi yang terjalin antara keduanya. Komunikasi yang terbuka dan partisipatif dapat memperkuat hubungan sosial antara pemimpin dan masyarakat karena masyarakat merasa dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.[31]

Problem relasi sosial juga dapat muncul ketika komunikasi antara pemimpin dan masyarakat tidak memberikan ruang partisipasi bagi rakyat dalam proses pengambilan keputusan. Dalam masyarakat demokratis, komunikasi antara pemimpin dan rakyat harus memungkinkan terjadinya dialog yang konstruktif sehingga masyarakat dapat menyampaikan aspirasi mereka secara bebas.[32]

Selain itu, kerusakan relasi komunikasi sosial juga dapat dipicu oleh polarisasi masyarakat yang disebabkan oleh komunikasi politik yang

---

[28] Manuel Castells, *Communication Power*, Oxford University Press, 2015, hal. 164

[29] Stewart Tubbs & Silvya Moss, *Human Communication: Principles and Contexts*, McGraw-Hill Education, 2017, hal. 121.

[30] Peter G Northouse, P., *Leadership: Theory and Practice*, Sage Publications, 2019, hal. 213

[31] Stephen W Littlejohn & Karen A Foss, *Theories of Human Communication*, Waveland Press, 2017, hal. 119

[32] Paula Freire, *Pedagogy of the Oppressed*, Bloomsbury Publishing, 2018, hal. 81

provokatif. Ketika komunikasi publik digunakan untuk menyerang kelompok tertentu atau menyebarkan informasi yang menyesatkan, maka stabilitas sosial masyarakat akan terganggu.[33]

Dalam konteks kepemimpinan modern, komunikasi yang sehat harus mampu membangun hubungan yang saling percaya antara pemimpin dan masyarakat. Kepercayaan sosial hanya dapat terbentuk ketika komunikasi dilakukan secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab.[34]

Tansparansi komunikasi merupakan faktor penting dalam membangun legitimasi kepemimpinan. Ketika pemimpin mampu menjelaskan kebijakan secara jelas kepada masyarakat, maka masyarakat akan lebih mudah menerima kebijakan tersebut.[35]

Komunikasi yang partisipatif dapat memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat karena masyarakat merasa memiliki peran dalam proses pembangunan sosial.[36]

Kerangka analisis problematika komunikasi dalam tiga dimensi menunjukkan bahwa komunikasi antara pemimpin dan rakyat tidak dapat dipahami hanya sebagai proses penyampaian informasi, tetapi juga sebagai proses sosial yang dipengaruhi oleh kekuasaan, moralitas, dan relasi sosial dalam masyarakat. Ketika ketiga dimensi tersebut berjalan secara seimbang, komunikasi kepemimpinan dapat menjadi sarana membangun hubungan sosial yang harmonis. Namun ketika salah satu dimensi mengalami ketimpangan, maka yang muncul adalah problem komunikasi yang dapat merusak hubungan antara pemimpin dan rakyat dalam kehidupan masyarakat.

B. Problematika Komunikasi Berbasis Kekuasaan (*Power-Oriented Communication*)

1. *Istikbār* (الاستكبار): Komunikasi Dominatif dan Penolakan terhadap Dialog

Fenomena komunikasi dominatif dalam kepemimpinan sering kali berakar pada sikap kesombongan atau keangkuhan kekuasaan yang dalam terminologi Al-Qur'an disebut dengan istilah *istikbār* (الاستكبار). Istilah ini menggambarkan sikap merasa diri lebih tinggi sehingga menolak kebenaran

---

[33] Richard West & Lynn H Turner, L., *Introducing Communication Theory*, McGraw-Hill Education, 2018, hal. 63

[34] Daniel Goleman, *Social Intelligence: The New Science of Human Relationships*, Bantam Books, 2017, hal. 75.

[35] Men, *Strategic Internal Communication*, Routledge, 2021, hal. 42.

[36] Strömbäck, *Political Communication,* Palgrave Macmillan, 2020, hal. 118.

serta menutup ruang dialog dengan pihak lain. Al-Qur'an menyinggung fenomena tersebut melalui firman Allah SWT:

إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

"Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina." (QS. Ghafir [40]: 60).

Ayat ini menunjukkan bahwa sikap *istikbār* tidak hanya berkaitan dengan kesombongan spiritual, tetapi juga berkaitan dengan penolakan terhadap kebenaran yang disampaikan melalui komunikasi. Dalam konteks sosial, sikap ini dapat tercermin dalam perilaku pemimpin yang menolak kritik dan aspirasi masyarakat karena merasa memiliki otoritas absolut dalam menentukan keputusan publik. Oleh karena itu, konsep *istikbār* dalam Al-Qur'an menjadi salah satu indikator penting untuk memahami bagaimana kekuasaan dapat mempengaruhi pola komunikasi antara pemimpin dan masyarakat.

Secara leksikal, istilah *istikbār* berasal dari akar kata كبر (*k-b-r*) yang berarti besar atau agung. Dalam kajian semantik Al-Qur'an, Raghib al-Asfihani menjelaskan bahwa *istikbār* adalah sikap seseorang yang menganggap dirinya lebih besar dari orang lain sehingga menolak menerima kebenaran atau nasihat dari pihak lain. Menurutnya, *istikbār* tidak hanya berkaitan dengan kesombongan internal dalam diri seseorang, tetapi juga tercermin dalam perilaku sosial yang menunjukkan penolakan terhadap dialog dan kebenaran.[37] Dengan demikian, istilah *istikbār* dalam Al-Qur'an memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar kesombongan individual, karena juga berkaitan dengan sikap dominasi yang dapat merusak hubungan sosial antara manusia.

Dalam tafsir klasik, Ibn Katsir menjelaskan bahwa ayat tersebut menggambarkan sifat orang-orang yang menolak kebenaran karena kesombongan yang berlebihan. Menurutnya, *istikbār* menyebabkan seseorang menolak nasihat dan petunjuk karena merasa dirinya tidak membutuhkan bimbingan dari orang lain.[38] Penafsiran ini menunjukkan bahwa kesombongan tidak hanya berdampak pada hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga berdampak pada hubungan sosial antara pemimpin dan masyarakat. Ketika seorang pemimpin memiliki sikap *istikbār*, komunikasi yang terjadi cenderung bersifat satu arah dan menutup ruang dialog bagi masyarakat.

Penafsiran serupa juga dikemukakan oleh Al-Qurṭubi yang menegaskan bahwa *istikbār* merupakan salah satu penyebab utama kerusakan sosial dalam masyarakat. Menurutnya, sikap sombong dalam kekuasaan membuat seseorang menolak kebenaran meskipun kebenaran tersebut disampaikan

---

[37] Al-Raghib al-Asfihani, *Al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur'ān*, Dar al-Qalam, 2009, hal. 697

[38] Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2016, jilid 7, hal. 143

dengan cara yang baik.[39] Dalam konteks komunikasi kepemimpinan, kondisi ini dapat terjadi ketika pemimpin tidak bersedia mendengarkan kritik atau aspirasi masyarakat karena merasa bahwa posisinya berada di atas masyarakat. Sikap ini dapat menyebabkan komunikasi antara pemimpin dan rakyat menjadi tidak seimbang sehingga relasi sosial yang sehat menjadi sulit terwujud.

Dalam tafsir kontemporer, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa konsep *istikbār* dalam Al-Qur'an tidak hanya berkaitan dengan kesombongan spiritual, tetapi juga berkaitan dengan sikap arogan dalam hubungan sosial. Menurutnya, seseorang yang memiliki sikap *istikbār* cenderung menolak dialog karena ia merasa bahwa pendapatnya adalah yang paling benar.[40] Penjelasan ini menunjukkan bahwa sikap *istikbār* dapat menjadi penghalang utama bagi terciptanya komunikasi yang sehat dalam masyarakat, terutama dalam hubungan antara pemimpin dan rakyat.

Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, sikap kesombongan juga dipandang sebagai salah satu penyakit moral yang dapat merusak hubungan sosial manusia.

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ» (رواه مسلم)[41]

Dari Abdullah bin Mas'ud r.a, dari Nabi SAW, Ia bersabda, "Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun sebesar biji zarrah." (HR. Muslim).

Hadis ini menunjukkan bahwa kesombongan merupakan penyakit moral yang sangat berbahaya karena dapat merusak hubungan manusia dengan Allah SWT. dan hubungan sosial antarmanusia. Dalam konteks kepemimpinan, sikap sombong dapat menyebabkan pemimpin menolak kritik, mengabaikan aspirasi masyarakat, dan menutup ruang dialog. Akibatnya, komunikasi pemimpin tidak lagi bersifat partisipatif, tetapi berubah menjadi komunikasi dominatif yang memperlebar jarak sosial antara pemimpin dan rakyat.

Dalam kajian komunikasi kepemimpinan modern, sikap dominatif dalam komunikasi sering kali dikaitkan dengan model komunikasi otoriter yang menempatkan pemimpin sebagai pusat kekuasaan informasi. Dalam model komunikasi seperti ini, pesan yang disampaikan kepada masyarakat lebih bersifat instruktif daripada dialogis sehingga masyarakat tidak memiliki ruang yang cukup untuk menyampaikan aspirasi mereka.[42] Kondisi ini menunjukkan

---

[39] Al-Qurṭubi, *Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*, Dar al-Kutub al-Misriyyah, 2015, jilid 15, hal. 318

[40] M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*, Mizan, 2013, hal. 412

[41] Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Īmān, Bāb Taḥrīm al-Kibr wa Bayānih, no. 91.

[42] Yukl, , *Leadership in Organizations*, Pearson Education, 2018, hal. 246.

bahwa kekuasaan yang tidak diimbangi dengan keterbukaan komunikasi dapat menciptakan jarak sosial antara pemimpin dan masyarakat.

Selain itu, komunikasi dominatif juga dapat menyebabkan munculnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemimpin. Ketika komunikasi hanya digunakan untuk menyampaikan perintah atau kebijakan tanpa memberikan ruang dialog bagi masyarakat, maka masyarakat akan merasa bahwa suara mereka tidak dihargai dalam proses pengambilan keputusan. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat melemahkan legitimasi kepemimpinan karena masyarakat tidak lagi merasa memiliki hubungan yang kuat dengan pemimpin mereka.[43]

Dalam perspektif komunikasi politik, dominasi kekuasaan dalam komunikasi sering kali menyebabkan munculnya pola komunikasi yang bersifat hegemonik, yaitu komunikasi yang digunakan untuk mempertahankan kekuasaan dengan cara mengontrol informasi yang diterima oleh masyarakat. Ketika komunikasi dikendalikan secara sepihak oleh pemimpin, maka masyarakat tidak memiliki akses yang cukup untuk memperoleh informasi yang objektif mengenai kebijakan publik.[44]

Dengan demikian, konsep *istikbār* dalam Al-Qur'an memberikan kerangka moral yang penting untuk memahami bagaimana kekuasaan dapat mempengaruhi pola komunikasi dalam kepemimpinan. Sikap sombong yang menolak dialog dapat menyebabkan komunikasi antara pemimpin dan masyarakat menjadi tidak seimbang sehingga relasi sosial yang sehat sulit terwujud. Oleh karena itu, Al-Qur'an menekankan pentingnya kerendahan hati dan keterbukaan dalam komunikasi agar hubungan antara pemimpin dan masyarakat dapat berjalan secara harmonis dan berkeadilan.

Fenomena *istikbār* dalam komunikasi kepemimpinan juga dapat dilihat dalam kecenderungan pemimpin untuk menempatkan dirinya sebagai satu-satunya sumber kebenaran dalam proses pengambilan keputusan. Dalam kondisi seperti ini, komunikasi tidak lagi berfungsi sebagai sarana pertukaran gagasan yang setara antara pemimpin dan masyarakat, melainkan berubah menjadi mekanisme legitimasi kekuasaan yang bersifat satu arah. Ketika pemimpin memonopoli kebenaran, ruang dialog dalam masyarakat menjadi semakin sempit karena masyarakat tidak memiliki kesempatan yang memadai untuk menyampaikan pandangan atau kritik terhadap kebijakan publik. Dalam teori komunikasi organisasi, situasi seperti ini sering digambarkan sebagai bentuk komunikasi otoriter yang menempatkan pemimpin sebagai pusat kontrol informasi dan keputusan dalam organisasi sosial.[45]

---

[43] Tourish, *The Dark Side of Transformational Leadership*, Routledge, 2017, hal. 87

[44] McNair, *An Introduction to Political Communication*, Routledge, 2018, hal. 94.

[45] Robbins & Thomas Judge, Organizational Behavior, Pearson Education, 2017, hal. 377.

Dalam praktik kepemimpinan modern, komunikasi yang didominasi oleh kekuasaan sering kali menimbulkan jarak psikologis antara pemimpin dan masyarakat. Jarak tersebut muncul karena masyarakat merasa bahwa suara mereka tidak memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemimpin. Ketika komunikasi tidak memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat, maka masyarakat akan mengalami alienasi politik yang dapat menurunkan tingkat kepercayaan terhadap pemimpin. Dalam kajian kepemimpinan publik, kepercayaan sosial merupakan elemen penting dalam menjaga stabilitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat.[46]

Sikap *istikbār* dalam komunikasi kepemimpinan juga dapat memicu munculnya budaya politik yang tidak sehat dalam masyarakat. Ketika pemimpin menolak kritik dan masukan dari masyarakat, maka budaya komunikasi yang berkembang cenderung bersifat represif dan tidak dialogis. Dalam kondisi seperti ini, masyarakat menjadi enggan untuk menyampaikan aspirasi mereka secara terbuka karena khawatir terhadap konsekuensi sosial maupun politik yang mungkin muncul. Dalam kajian komunikasi politik, kondisi tersebut sering disebut sebagai komunikasi hegemonik yang menempatkan pemimpin sebagai aktor dominan dalam menentukan arah komunikasi publik.[47]

Selain itu, komunikasi dominatif yang dipengaruhi oleh sikap *istikbār* juga dapat menyebabkan distorsi informasi dalam kehidupan sosial masyarakat. Ketika komunikasi publik dikendalikan secara sepihak oleh pemimpin, informasi yang disampaikan kepada masyarakat sering kali diseleksi atau dimodifikasi untuk mempertahankan legitimasi kekuasaan. Akibatnya, masyarakat tidak memperoleh gambaran yang objektif mengenai kondisi sosial yang sebenarnya. Dalam kajian komunikasi massa, distorsi informasi semacam ini dapat menghambat terbentuknya ruang publik yang sehat karena masyarakat tidak memiliki akses yang cukup terhadap informasi yang akurat.[48]

Dalam perspektif kepemimpinan Islam, sikap *istikbār* bertentangan dengan prinsip kerendahan hati yang menjadi karakter utama seorang pemimpin yang adil. Kepemimpinan dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan kemampuan mengelola kekuasaan, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan untuk mendengarkan aspirasi masyarakat secara bijaksana. Pemimpin yang memiliki sikap *tawadhu'* cenderung lebih terbuka terhadap dialog karena ia menyadari bahwa kebenaran tidak selalu datang dari dirinya sendiri.[49] Oleh karena itu, komunikasi yang dialogis menjadi salah satu

[46] Bennis, *On Becoming a Leader,* Basic Books, 2015, hal. 94.

[47] A. Heywood, *Politics*, Macmillan Education, 2019, hal. 225

[48] Baran & Davis, *Mass Communication Theory: Foundations, Ferment, and Future*, Cengage Learning, 2016, hal. 114.

[49] A. Karim, *Etika Kepemimpinan Islam*, RajaGrafindo Persada, 2018, hal. 153.

indikator penting dalam menilai kualitas kepemimpinan dalam perspektif Islam.

Dalam kajian sosiologi komunikasi, sikap dominatif dalam komunikasi kepemimpinan juga dapat menimbulkan konflik sosial dalam masyarakat. Ketika masyarakat merasa bahwa pemimpin tidak memberikan ruang bagi aspirasi mereka, maka ketidakpuasan sosial akan meningkat dan berpotensi memicu gerakan protes terhadap kekuasaan. Konflik semacam ini sering kali terjadi karena masyarakat merasa bahwa komunikasi antara pemimpin dan rakyat tidak berjalan secara adil.[50] Oleh karena itu, komunikasi yang partisipatif menjadi salah satu prasyarat penting dalam menjaga stabilitas sosial dalam masyarakat.

Komunikasi dominatif juga dapat melemahkan legitimasi kepemimpinan dalam jangka panjang. Legitimasi kepemimpinan tidak hanya bergantung pada kekuasaan formal yang dimiliki oleh seorang pemimpin, tetapi juga bergantung pada kepercayaan masyarakat terhadap integritas komunikasi pemimpin tersebut. Ketika masyarakat merasa bahwa komunikasi yang dilakukan oleh pemimpin tidak mencerminkan kejujuran dan keterbukaan, maka legitimasi kepemimpinan akan mengalami penurunan secara bertahap. Dalam kajian ilmu politik, legitimasi kekuasaan sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemimpin dalam membangun komunikasi yang transparan dengan masyarakat.[51]

Dalam konteks komunikasi publik, sikap *istikbār* juga dapat menghambat proses pembelajaran sosial dalam masyarakat. Komunikasi yang terbuka memungkinkan terjadinya pertukaran gagasan yang dapat memperkaya perspektif masyarakat mengenai berbagai persoalan sosial. Namun ketika komunikasi dikendalikan secara dominatif oleh pemimpin, proses pertukaran gagasan tersebut menjadi terbatas sehingga masyarakat tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkan pemahaman yang lebih luas mengenai persoalan yang mereka hadapi. Dalam kajian komunikasi sosial, dialog merupakan elemen penting dalam menciptakan masyarakat yang demokratis dan partisipatif.[52]

Selain itu, komunikasi yang didominasi oleh sikap *istikbār* juga dapat menciptakan budaya birokrasi yang tidak sehat dalam pemerintahan. Ketika pemimpin tidak membuka ruang dialog dalam proses komunikasi organisasi, para anggota birokrasi cenderung mengikuti perintah tanpa berani menyampaikan kritik atau saran yang konstruktif. Kondisi ini dapat menyebabkan pengambilan keputusan menjadi kurang efektif karena tidak mempertimbangkan berbagai perspektif yang mungkin dapat memperbaiki

---

[50] Ritzer, *Sociological Theory,* McGraw-Hill Education, 2017, hal. 314.

[51] Beetham, *The Legitimation of Power*, Palgrave Macmillan, 2016, hal. 67.

[52] Pearce, *Communication and the Human Condition*, Southern Illinois University Press, 2015, hal. 142.

kebijakan tersebut. Dalam kajian administrasi publik, komunikasi yang terbuka merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dalam organisasi pemerintahan.[53]

Fenomena *istikbār* dalam komunikasi kepemimpinan menunjukkan bahwa kekuasaan yang tidak diimbangi dengan kerendahan hati dapat menimbulkan berbagai problem komunikasi antara pemimpin dan rakyat. Sikap dominatif yang menolak dialog tidak hanya merusak hubungan sosial antara pemimpin dan masyarakat, tetapi juga dapat melemahkan legitimasi kepemimpinan serta stabilitas sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, Al-Qur'an memberikan peringatan yang tegas terhadap sikap *istikbār* agar manusia tidak terjerumus dalam kesombongan yang dapat merusak hubungan sosial dan moral dalam kehidupan bermasyarakat.

2. *Ṭughyān* (الطغيان): Penyalahgunaan Otoritas

Fenomena penyalahgunaan kekuasaan dalam komunikasi kepemimpinan dalam perspektif Al-Qur'an sering kali digambarkan dengan istilah *Ṭughyān* (الطغيان). Istilah ini merujuk pada sikap melampaui batas yang muncul ketika seseorang memiliki kekuasaan tetapi tidak lagi dikendalikan oleh nilai moral dan keadilan. Al-Qur'an menggambarkan fenomena tersebut melalui firman Allah SWT:

اذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ

"Pergilah kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas." (QS. Ṭāhā [20]: 24).

Ayat ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan kekuasaan dapat menyebabkan kerusakan dalam hubungan sosial manusia, termasuk dalam komunikasi antara pemimpin dan masyarakat. Dalam konteks kepemimpinan, sikap *Ṭughyān* dapat terlihat ketika pemimpin menggunakan otoritasnya untuk menekan atau mengendalikan komunikasi publik sehingga masyarakat tidak memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi mereka. Oleh karena itu, konsep *Ṭughyān* dalam Al-Qur'an menjadi salah satu kerangka penting untuk memahami bagaimana kekuasaan dapat mempengaruhi pola komunikasi antara pemimpin dan rakyat.

Secara leksikal, kata *Ṭughyān* berasal dari akar kata طغى yang berarti melampaui batas atau bertindak secara berlebihan dalam kekuasaan. Raghib al-Asfahani menjelaskan bahwa *Ṭughyān* adalah kondisi ketika seseorang melampaui batas kewajaran dalam kekuasaan, baik dalam tindakan maupun dalam sikap terhadap orang lain. Menurutnya, *Ṭughyān* tidak hanya berkaitan dengan tindakan tirani dalam pemerintahan, tetapi juga mencakup perilaku

[53] Denhardt & Richard Denhardt, *The New Public Service*, Routledge, 2015, hal. 81.

sosial yang menolak kebenaran serta menindas pihak lain.[54] Dengan demikian, istilah *Ṭughyān* dalam Al-Qur'an menggambarkan bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merusak hubungan sosial antara pemimpin dan masyarakat.

Dalam tafsirnya, Ibn Katsir menjelaskan bahwa ayat tersebut menggambarkan kondisi Fir'aun sebagai penguasa yang telah melampaui batas dalam kekuasaan sehingga menindas masyarakatnya serta menolak kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa. Menurutnya, *Ṭughyān* Fir'aun tidak hanya terlihat dalam tindakan politiknya, tetapi juga dalam sikap komunikasinya yang menolak dialog dan memilih mempertahankan kekuasaan dengan cara represif.[55] Penafsiran ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan kekuasaan sering kali diikuti oleh pola komunikasi yang dominatif dan tidak dialogis.

Penafsiran yang serupa juga disampaikan oleh Al-Qurṭubi yang menjelaskan bahwa kata *Ṭughyān* dalam ayat tersebut menunjukkan kondisi ketika kekuasaan telah membuat seseorang kehilangan kendali moral dalam berinteraksi dengan masyarakat. Menurut Al-Qurṭubi, seorang pemimpin yang melakukan *Ṭughyān* cenderung menggunakan kekuasaan untuk memaksakan kehendaknya kepada masyarakat tanpa mempertimbangkan keadilan sosial.[56] Dalam konteks komunikasi kepemimpinan, kondisi ini dapat terlihat ketika pemimpin menggunakan komunikasi sebagai alat untuk mengontrol masyarakat.

Dalam tafsir kontemporer, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa konsep *Ṭughyān* dalam Al-Qur'an menggambarkan sikap manusia yang tidak lagi mampu mengendalikan dirinya ketika memperoleh kekuasaan. Menurutnya, kekuasaan yang tidak disertai dengan nilai moral dapat menyebabkan seseorang bertindak secara sewenang-wenang terhadap masyarakat.[57] Penjelasan ini menunjukkan bahwa kekuasaan yang tidak dikendalikan oleh etika komunikasi dapat merusak hubungan sosial antara pemimpin dan rakyat.

Dalam hadis Nabi Muhammad SAW juga terdapat peringatan mengenai bahaya penyalahgunaan kekuasaan.

---

[54] Al-Raghib al-Asfahani, *Al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur'ān*, Dar al-Qalam, 2009, hal. 520.

[55] Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2017, jilid 5, hal. 298

[56] Al-Qurṭubi, *Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2016, jilid 11, hal. 182

[57] M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, Mizan, 2018, hal. 241

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَقُولُ فِي بَيْتِي هَذَا: «اللَّهُمَّ، مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ، فَاشْقُقْ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ، فَارْفُقْ بِهِ» (رواه مسلم) [58]

"Dari 'Āisyah r.a., ia berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda di rumahku ini: 'Ya Allah, siapa saja yang mengurus suatu urusan umatku lalu ia mempersulit mereka, maka persulitlah ia. Dan siapa saja yang mengurus suatu urusan umatku lalu ia bersikap lembut kepada mereka, maka lembutlah kepadanya." (HR. Muslim).

Hadis ini menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam Islam tidak boleh dijalankan dengan pola yang menyulitkan, menekan, atau menjauhkan rakyat dari kemaslahatan. Pemimpin yang menggunakan otoritas untuk mempersulit rakyat sesungguhnya telah menyimpang dari amanah kekuasaan. Dalam konteks komunikasi kepemimpinan, hadis ini menegaskan pentingnya komunikasi yang memudahkan, menenangkan, dan berorientasi pada pelayanan. Sebaliknya, komunikasi yang kaku, arogan, dan tidak empatik dapat melahirkan jarak sosial antara pemimpin dan rakyat serta merusak kepercayaan publik.

Dalam kajian komunikasi politik modern, penyalahgunaan kekuasaan sering kali menyebabkan munculnya pola komunikasi yang bersifat represif. Komunikasi represif adalah bentuk komunikasi yang digunakan oleh pemimpin untuk mengontrol opini publik dan membatasi kebebasan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi.[59]

Selain itu, penyalahgunaan kekuasaan juga dapat menyebabkan munculnya komunikasi yang manipulatif dalam kehidupan politik. Komunikasi manipulatif terjadi ketika informasi yang disampaikan kepada masyarakat sengaja dimodifikasi untuk mempertahankan kekuasaan pemimpin.[60]

Dalam perspektif kepemimpinan publik, kekuasaan yang tidak dikendalikan oleh etika dapat menyebabkan pemimpin kehilangan sensitivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Kondisi ini sering kali menyebabkan komunikasi antara pemimpin dan rakyat menjadi tidak empati.[61]

Selain itu, komunikasi kekuasaan yang bersifat represif juga dapat menimbulkan ketakutan dalam masyarakat sehingga masyarakat enggan

---

[58] Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Imārah, Bāb Faḍīlat al-Imām al-'Ādil wa 'Uqūbat al-Jā'ir wa al-Ḥatstsi 'alā ar-Rifq bi ar-Ra'iyyah wa an-Nahy 'an Idkhāl al-Masyaqqah 'Alayhim, no. 1828.

[59] Dahl, , *Modern Political Analysis*, Pearson Education, 2015, hal. 134.

[60] Graber, *Political Communication Faces the 21st Century*, University of Chicago Press, 2018, hal. 76

[6161] Heifetz, *Leadership Without Easy Answers*, Harvard University Press, 2016, hal. 119.

menyampaikan kritik kepada pemimpin. Kondisi ini dapat menghambat proses evaluasi kebijakan publik karena pemimpin tidak memperoleh masukan dari masyarakat.[62]

Dalam kajian komunikasi organisasi, kepemimpinan yang otoriter sering kali menciptakan pola komunikasi yang kaku dan tidak fleksibel sehingga organisasi sulit beradaptasi dengan perubahan sosial.[63]

Komunikasi yang dipengaruhi oleh sikap *Ṭughyān* juga dapat menyebabkan menurunnya legitimasi kepemimpinan karena masyarakat merasa bahwa pemimpin tidak lagi mewakili kepentingan mereka.[64]

Dalam konteks komunikasi sosial, kekuasaan yang berlebihan dapat menyebabkan pemimpin kehilangan kemampuan untuk mendengarkan masyarakat secara objektif.[65]

Selain itu, penyalahgunaan kekuasaan dalam komunikasi publik juga dapat menyebabkan polarisasi sosial dalam masyarakat karena komunikasi digunakan untuk memecah belah kelompok masyarakat.[66]

Dengan demikian, konsep *Ṭughyān* dalam Al-Qur'an memberikan peringatan moral yang kuat mengenai bahaya penyalahgunaan kekuasaan dalam komunikasi kepemimpinan. Kekuasaan yang tidak dikendalikan oleh nilai moral dapat menyebabkan komunikasi antara pemimpin dan rakyat menjadi represif dan manipulatif.

Oleh karena itu, Al-Qur'an menegaskan bahwa kepemimpinan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab moral agar komunikasi antara pemimpin dan masyarakat tetap berjalan secara adil dan dialogis.

3. *Ẓulm* (الظلم): Ketidakadilan Struktural dalam Relasi Komunikasi Pemimpin dan Rakyat

Fenomena ketidakadilan dalam relasi komunikasi antara pemimpin dan rakyat dalam perspektif Al-Qur'an sering dikaitkan dengan konsep *ẓulm* (الظلم). Konsep ini merujuk pada tindakan menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya atau melakukan ketidakadilan terhadap pihak lain. Al-Qur'an mengingatkan bahaya kezaliman dalam kekuasaan melalui firman Allah SWT:

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ

---

[62] Arendt, *On Violence*, Harcourt Brace, 2017, hal. 56.

[63] Clampitt, *Communicating for Managerial Effectiveness*, Sage Publications, 2016, hal. 143

[64] Easton, *Systems Analysis of Political Life*, University of Chicago Press, 2017, hal. 274.

[65] Sennett, *Respect in a World of Inequality*, Norton & Company, 2016, hal. 83

[66] Sunstein, *Going to Extremes: How Like Minds Unite and Divide*, Oxford University Press, 2017, hal. 94

"Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa Allah lalai terhadap apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim." (QS. Ibrahim [14]: 42).

Ayat ini memberikan peringatan bahwa tindakan zalim yang dilakukan oleh manusia, termasuk dalam praktik kekuasaan, tidak akan luput dari pengawasan Allah. Dalam konteks komunikasi kepemimpinan, kezaliman dapat muncul ketika pemimpin menggunakan otoritasnya untuk menekan aspirasi masyarakat atau menutup ruang dialog publik. Oleh karena itu, konsep *ẓulm* menjadi kerangka penting dalam memahami problem komunikasi yang terjadi ketika kekuasaan tidak lagi dijalankan secara adil.

Secara leksikal, kata *ẓulm* berasal dari akar kata ظلم yang berarti menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya yang telah dikhususkan, baik itu dengan mengurangi sesuatu tersebut atau dengan menambahkannya baik dengan menyelewengkan waktunya ataupun tempatnya. Raghib al-Asfahani menjelaskan bahwa *ẓulm* mencakup segala bentuk pelanggaran terhadap keadilan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhan maupun dalam hubungan sosial antar manusia.[67] Dengan demikian, kezaliman dalam kepemimpinan tidak hanya berkaitan dengan tindakan fisik atau kebijakan yang merugikan masyarakat, tetapi juga mencakup pola komunikasi yang menindas atau mengabaikan hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka.

Dalam tafsirnya, Ibn Katsir menjelaskan bahwa ayat tersebut merupakan peringatan keras terhadap para penguasa yang melakukan kezaliman terhadap rakyatnya. Menurutnya, Allah menunda hukuman bagi orang-orang zalim bukan karena lalai, tetapi sebagai bentuk ujian dan penangguhan hingga datangnya hari pembalasan.[68] Penafsiran ini menunjukkan bahwa kezaliman dalam kekuasaan memiliki konsekuensi moral yang sangat serius dalam pandangan Islam.

Penafsiran yang serupa juga disampaikan oleh Al-Qurṭubi yang menjelaskan bahwa kezaliman dalam kepemimpinan sering kali terjadi ketika pemimpin tidak menjalankan amanah kekuasaan secara adil. Menurutnya, penguasa yang zalim tidak hanya merugikan masyarakat secara material, tetapi juga merusak tatanan sosial karena keadilan merupakan fondasi utama kehidupan masyarakat.[69]

Dalam tafsir kontemporer, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat tersebut menegaskan bahwa kezaliman dalam kehidupan sosial sering kali

---

[67] Al-Raghib al-Asfahani, *Al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an*, terj. Ahmad Zaini Dahlan, Pustaka Azzam, 2017, hal. 636

[68] Ibn Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. M. Abdul Ghoffar, Pustaka Imam Syafi'i, 2016, jilid 4, hal. 512

[69] Al-Qurṭubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, terj. Ahmad Khatib, Pustaka Azzam, 2015, jilid 9, hal. 261.

muncul ketika kekuasaan tidak lagi dikendalikan oleh nilai moral dan tanggung jawab. Menurutnya, pemimpin yang zalim biasanya menolak kritik dan aspirasi masyarakat karena merasa bahwa kekuasaan yang dimilikinya memberikan hak untuk bertindak secara sewenang-wenang.[70]

Dalam hadis Nabi Muhammad SAW juga terdapat peringatan yang sangat tegas mengenai bahaya kezaliman dalam kepemimpinan.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «اتَّقُوا الظُّلْمَ، فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (رواه مسلم) [71]

Dari Jābir bin ‘Abdillāh r.a., bahwa Rasulullah ﷺbersabda: ‘Takutlah kalian terhadap kezaliman, karena sesungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan-kegelapan pada hari kiamat.” (HR. Bukhari).

Hadis ini menegaskan bahwa kezaliman bukan sekadar pelanggaran sosial, tetapi juga memiliki konsekuensi moral dan eskatologis. Dalam konteks kepemimpinan, kezaliman dapat muncul dalam bentuk penyalahgunaan otoritas, pengabaian hak rakyat, ketertutupan informasi, serta komunikasi yang tidak memberi ruang keadilan bagi masyarakat. Komunikasi pemimpin yang zalim tidak hanya merusak relasi sosial, tetapi juga menghilangkan kepercayaan publik karena rakyat merasa tidak diperlakukan secara adil dan bermartabat.

Dalam kajian komunikasi sosial, ketidakadilan dalam komunikasi kepemimpinan sering muncul ketika pemimpin tidak memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka. Ketika komunikasi bersifat satu arah dan tidak partisipatif, masyarakat akan merasa bahwa suara mereka tidak dihargai dalam proses pengambilan keputusan.[72]

Selain itu, komunikasi yang tidak adil juga dapat menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin. Kepercayaan sosial merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas hubungan antara pemimpin dan masyarakat.[73]

Dalam perspektif kepemimpinan Islam, keadilan merupakan prinsip utama yang harus dijalankan oleh seorang pemimpin dalam setiap aspek kepemimpinannya, termasuk dalam komunikasi dengan masyarakat.[74] Komunikasi yang tidak adil juga dapat menimbulkan konflik sosial dalam masyarakat karena masyarakat merasa bahwa kepentingan mereka tidak

---

[70] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Lentera Hati, 2017, jilid 7, hal. 312

[71] Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Birr wa aṣ-Ṣilah wa al-Ādāb, Bāb Taḥrīm aẓ-Ẓulm, no. 2578.

[72] Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, RajaGrafindo Persada, 2018, hal. 122.

[73] Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktik*, Remaja Rosdakarya, 2017, hal. 45.

[74] Didin Hafidhuddin, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, Gema Insani, 2015, hal. 167.

diperhatikan oleh pemimpin.[75] Dalam konteks komunikasi politik, ketidakadilan komunikasi sering muncul ketika informasi mengenai kebijakan publik tidak disampaikan secara transparan kepada masyarakat.[76] Selain itu, komunikasi yang tidak transparan juga dapat memperkuat kesenjangan antara elite politik dan masyarakat.[77]

Dalam kajian komunikasi organisasi, pemimpin yang tidak adil dalam komunikasi cenderung menciptakan budaya organisasi yang tertutup dan tidak demokratis.[78] Komunikasi yang tidak adil juga dapat menghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan sosial karena masyarakat merasa bahwa aspirasi mereka tidak memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan.[79] Selain itu, ketidakadilan komunikasi juga dapat memperlemah legitimasi kepemimpinan karena masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap integritas pemimpin.[80]

Dalam perspektif sosiologi politik, keadilan komunikasi merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas sistem politik karena komunikasi yang terbuka memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.[81]

Dengan demikian, konsep *ẓulm* dalam Al-Qur'an memberikan kerangka moral yang penting untuk memahami bagaimana ketidakadilan dalam kekuasaan dapat merusak komunikasi antara pemimpin dan rakyat. Ketika komunikasi dijalankan secara tidak adil dan tidak transparan, maka relasi sosial antara pemimpin dan masyarakat akan mengalami kerusakan yang dapat mengancam stabilitas kehidupan sosial. Sebaliknya, ketika pemimpin menjalankan komunikasi secara adil dan terbuka, hubungan antara pemimpin dan masyarakat dapat terjalin secara harmonis dan saling percaya. Oleh karena itu, prinsip keadilan dalam komunikasi menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun kepemimpinan yang etis dalam perspektif Al-Qur'an.

C. Problematika Moralitas (*Ethical Breakdown*)

1. *Nifāq* (النفاق): Manipulasi Komunikasi

Fenomena manipulasi komunikasi dalam kepemimpinan dalam perspektif Al-Qur'an sering dikaitkan dengan konsep *Nifāq* (النفاق). Istilah ini

---

[75] Nurudin, *Sistem Komunikasi Indonesia*, RajaGrafindo Persada, 2019, hal. 88.

[76] Siti Zuhro, *Demokrasi Lokal*, LIPI Press, 2017, hal. 141.

[77] Firmanzah, *Marketing Politik*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016, hal. 213.

[78] Toto Tasmara, *Etika Kepemimpinan dalam Perspektif Islam*, Gema Insani, 2018, hal. 156.

[79] Deddy Mulyana, *Komunikasi Politik*, Remaja Rosdakarya, 2019, hal. 132.

[80] Asep Saeful Muhtadi, *Komunikasi Politik Indonesia*, Simbiosa Rekatama Media, 2016, hal. 174.

[81] M. Rusli Karim, *Negara dan Politik Lokal*, Pustaka Pelajar, 2017, hal. 205.

merujuk pada sikap kemunafikan yang ditandai dengan ketidaksesuaian antara ucapan dan tindakan. Dalam konteks komunikasi sosial, *Nifāq* dapat terlihat ketika seseorang menyampaikan pesan yang tampak benar di permukaan, tetapi sebenarnya bertujuan menutupi niat yang bertentangan dengan kebenaran. Al-Qur'an memberikan gambaran yang jelas mengenai karakter komunikasi kaum munafik melalui firman Allah SWT:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ

"Di antara manusia ada yang berkata: 'Kami beriman kepada Allah dan hari akhir,' padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman." (QS. Al-Baqarah [2]: 8).

Ayat ini menunjukkan bahwa kemunafikan sering kali diwujudkan dalam bentuk komunikasi yang manipulatif. Ucapan yang disampaikan tampak sesuai dengan nilai kebenaran, namun sebenarnya tidak mencerminkan realitas yang ada dalam hati. Oleh karena itu, konsep *Nifāq* dalam Al-Qur'an menjadi salah satu landasan penting untuk memahami problem moralitas komunikasi dalam relasi sosial, termasuk dalam hubungan antara pemimpin dan rakyat.

Secara leksikal, kata *Nifāq* berasal dari akar kata نفق yang pada dasarnya berarti "lubang atau jalan keluar yang tersembunyi". Raghib al-Asfahani menjelaskan bahwa *Nifāq* dalam konteks moral merujuk pada perilaku seseorang yang menampakkan kebaikan secara lahiriah tetapi menyembunyikan keburukan dalam batinnya.[82] Makna ini menunjukkan bahwa kemunafikan berkaitan erat dengan manipulasi dalam komunikasi, karena seseorang menggunakan kata-kata yang tampak benar untuk menutupi maksud yang sebenarnya. Dalam konteks kepemimpinan, fenomena ini dapat muncul ketika pemimpin menyampaikan janji atau kebijakan yang tampak baik di hadapan masyarakat, tetapi tidak memiliki komitmen untuk melaksanakannya.

Dalam tafsirnya, Ibn Katsir menjelaskan bahwa ayat tersebut menggambarkan karakter kaum munafik yang menggunakan komunikasi sebagai alat untuk menipu masyarakat. Mereka menampilkan diri sebagai orang beriman agar memperoleh kepercayaan dari orang lain, padahal hati mereka tidak memiliki keyakinan yang sama dengan ucapan me[83]reka. Penafsiran ini menunjukkan bahwa kemunafikan dalam komunikasi dapat merusak hubungan sosial karena masyarakat tidak lagi mampu membedakan antara kejujuran dan kepura-puraan dalam pesan yang disampaikan.

Penafsiran yang serupa juga dikemukakan oleh Al-Qurṭubi yang menjelaskan bahwa *Nifāq* merupakan salah satu penyakit moral yang paling

---

[82] Al-Raghib al-Asfahani, *Al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur'ān*, Dar al-Qalam, 2009, hal. 818

[83] Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Dar Tayyibah, 2002, jilid 1, hal. 226.

berbahaya dalam kehidupan sosial. Menurutnya, kemunafikan dapat merusak kepercayaan dalam masyarakat karena ucapan yang disampaikan oleh orang munafik tidak dapat dipercaya.[84] Dalam konteks komunikasi kepemimpinan, kondisi ini dapat terjadi ketika pemimpin menggunakan retorika moral untuk memperoleh dukungan masyarakat, tetapi kebijakan yang diambil tidak mencerminkan nilai-nilai tersebut.

Dalam tafsir kontemporer, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat tersebut menggambarkan fenomena kemunafikan sebagai bentuk ketidaksinkronan antara kata dan perbuatan. Menurutnya, komunikasi yang dilandasi oleh kemunafikan akan merusak hubungan sosial karena kepercayaan merupakan fondasi utama dalam komunikasi manusia.[85] Penjelasan ini menegaskan bahwa komunikasi yang jujur merupakan syarat utama bagi terciptanya relasi sosial yang sehat.

Dalam hadis Nabi Muhammad SAW juga dijelaskan ciri-ciri komunikasi orang munafik.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ» (رواه البخاري ومسلم) [86]

Dari Abū Hurairah r.a., dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: 'Tanda orang munafik ada tiga: apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila diberi amanah ia berkhianat." (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menegaskan bahwa *nifāq* memiliki hubungan erat dengan kerusakan komunikasi. Dusta dalam ucapan, ingkar terhadap janji, dan pengkhianatan terhadap amanah merupakan tiga bentuk penyimpangan moral yang merusak kredibilitas seseorang dalam relasi sosial. Dalam konteks kepemimpinan, sifat-sifat tersebut dapat muncul dalam bentuk manipulasi informasi, janji politik yang tidak ditepati, serta penyalahgunaan mandat publik. Apabila komunikasi pemimpin tidak lagi mencerminkan kejujuran dan amanah, maka kepercayaan rakyat akan melemah dan relasi sosial antara pemimpin dan masyarakat mengalami keretakan.

Dalam kajian komunikasi politik modern, manipulasi komunikasi sering kali digunakan sebagai strategi untuk memperoleh dukungan publik. Komunikasi yang manipulatif biasanya menggunakan pesan yang dirancang untuk mempengaruhi persepsi masyarakat tanpa memberikan informasi yang sebenarnya.[87]

---

[84] Al-Qurṭubi, *Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2013, jilid 1, hal. 248

[85] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Lentera Hati, 2017, jilid 1, hal. 148.

[86] Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Īmān, Bāb 'Alāmah al-Munāfiq, no. 33; Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Īmān, Bāb Bayān Khiṣāl al-Munāfiq, no. 59

[87] Brian McNair, *An Introduction to Political Communication*, Routledge, 2017, hal. 53

Manipulasi komunikasi juga dapat menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin. Ketika masyarakat merasa bahwa komunikasi yang disampaikan oleh pemimpin tidak mencerminkan realitas yang sebenarnya, maka legitimasi kepemimpinan akan melemah.[88] Dalam perspektif kepemimpinan etis, integritas komunikasi merupakan faktor penting dalam membangun hubungan yang sehat antara pemimpin dan masyarakat.[89] Selain itu, komunikasi yang manipulatif juga dapat memicu konflik sosial karena masyarakat merasa bahwa mereka telah ditipu oleh pemimpin yang seharusnya melindungi kepentingan mereka.[90]

Dalam kajian sosiologi politik, kemunafikan dalam komunikasi publik sering kali muncul ketika pemimpin menggunakan bahasa moral untuk menutupi kepentingan politik tertentu.[91] Selain itu, manipulasi komunikasi juga dapat menciptakan budaya politik yang tidak sehat karena masyarakat terbiasa menerima informasi yang tidak sepenuhnya benar.[92]

Dalam konteks komunikasi organisasi, pemimpin yang tidak jujur dalam komunikasi akan kehilangan kredibilitas di mata anggota organisasi.[93]

Penelitian dalam bidang komunikasi publik juga menunjukkan bahwa transparansi komunikasi merupakan faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.[94]

Dengan demikian, konsep *Nifāq* dalam Al-Qur'an memberikan peringatan moral yang kuat mengenai bahaya manipulasi komunikasi dalam kehidupan sosial. Ketika komunikasi dijalankan dengan niat yang tidak jujur, maka hubungan antara pemimpin dan masyarakat akan mengalami kerusakan karena kepercayaan sosial tidak dapat terbentuk secara kuat. Sebaliknya, komunikasi yang jujur dan transparan akan memperkuat hubungan antara pemimpin dan masyarakat serta menciptakan kepemimpinan yang berlandaskan nilai moral dan keadilan.

2. *Kizb* dan *Takdzīb* (الكذب / التكذيب): Distorsi Kebenaran

Fenomena distorsi kebenaran dalam komunikasi publik dalam perspektif Al-Qur'an sering dikaitkan dengan konsep *Kizb* (الكذب) yang berarti kebohongan atau penyampaian informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Dalam konteks kepemimpinan, kebohongan dalam komunikasi dapat muncul ketika pemimpin menyampaikan informasi yang tidak benar kepada

---

[88] Larry L. Barker, *Communication*, Pearson Education, 2016, hal. 214.

[89] Toto Tasmara*, Spiritual Leadership*, Gema Insani, 2015, hal. 167.

[90] Deddy Mulyana, *Komunikasi Politik*, Remaja Rosdakarya, 2019, hal. 144.

[91] John B. Thompson, *Political Scandal*, Polity Press, 2016, hal. 73.

[92] Dan Nimmo, *Komunikasi Politik*, Remaja Rosdakarya, 2017, hal. 92.

[93] Stephen P. Robbins, *Leadership Today,* Pearson Education, 2016, hal. 118.

[94] James E. Grunig, *Excellence in Public Relations and Communication Management*, Routledge, 2018, hal. 201.

masyarakat untuk mempertahankan kekuasaan atau membangun citra tertentu. Al-Qur'an memberikan peringatan keras terhadap perilaku tersebut melalui firman Allah SWT:

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ

"Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah." (QS. An-Nahl [16]: 105).

Ayat ini menunjukkan bahwa kebohongan merupakan perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai keimanan dan moralitas dalam Islam. Dalam konteks komunikasi sosial, kebohongan tidak hanya merusak hubungan antara individu, tetapi juga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin yang menyampaikan informasi tersebut.

Secara leksikal, kata *Kizb* berasal dari akar kata كذب yang berarti mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Raghib al-Asfahani menjelaskan bahwa *Kizb* adalah penyampaian informasi yang bertentangan dengan fakta, baik dilakukan secara sengaja maupun karena niat untuk menipu pihak lain.[95] Dalam konteks komunikasi kepemimpinan, kebohongan dapat terjadi ketika pemimpin menyampaikan informasi yang tidak akurat kepada masyarakat demi mempertahankan legitimasi kekuasaan.

Dalam tafsirnya, Ibn Katsir menjelaskan bahwa ayat tersebut menegaskan bahwa kebohongan merupakan sifat orang yang tidak memiliki komitmen terhadap kebenaran. Menurutnya, orang yang terbiasa berdusta akan kehilangan integritas moral sehingga masyarakat tidak lagi mempercayai ucapan mereka.[96] Penafsiran ini menunjukkan bahwa kebohongan dalam komunikasi dapat merusak hubungan sosial karena kepercayaan merupakan fondasi utama dalam interaksi manusia.

Penafsiran yang serupa juga disampaikan oleh Al-Qurṭubi yang menjelaskan bahwa kebohongan merupakan salah satu bentuk penyimpangan moral yang paling berbahaya dalam kehidupan sosial. Menurutnya, kebohongan dapat menyebabkan kerusakan dalam masyarakat karena informasi yang tidak benar dapat mempengaruhi keputusan dan tindakan orang lain.[97] Dalam konteks kepemimpinan, kondisi ini dapat terjadi ketika pemimpin menyampaikan informasi yang menyesatkan kepada masyarakat mengenai kebijakan publik.

Dalam tafsir kontemporer, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat tersebut menegaskan bahwa kebohongan merupakan bentuk penyimpangan

---

[95] Al-Raghib al-Asfahani, *Al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an*, terj. Ahmad Zaini Dahlan, Pustaka Azzam, 2017, hal. 711.

[96] Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. M. Abdul Ghoffar, Pustaka Imam Syafi'i, 2016, jilid 4, hal. 590

[97] Al-Qurṭubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, terj. Ahmad Khatib, Pustaka Azzam, 2015, jilid 10, hal. 74.

moral yang tidak hanya merusak individu tetapi juga merusak tatanan sosial masyarakat. Menurutnya, masyarakat yang dipenuhi oleh kebohongan akan mengalami krisis kepercayaan karena setiap informasi yang disampaikan akan diragukan kebenarannya.[98]

Dalam hadis Nabi Muhammad SAW juga terdapat peringatan mengenai bahaya kebohongan dalam komunikasi.

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا، وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا» (رواه البخاري ومسلم) [99]

Dari ‘Abdullāh bin Mas‘ūd r.a., dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: “Sesungguhnya kejujuran menuntun kepada kebaikan, dan kebaikan menuntun kepada surga. Sungguh, seseorang senantiasa berlaku jujur hingga ia dicatat sebagai orang yang sangat jujur. Sesungguhnya kedustaan menuntun kepada kejahatan, dan kejahatan menuntun kepada neraka. Sungguh, seseorang senantiasa berdusta hingga ia dicatat di sisi Allah sebagai pendusta.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menegaskan bahwa kejujuran dan kedustaan bukan sekadar persoalan verbal, tetapi berkaitan dengan orientasi moral seseorang. Kejujuran melahirkan kebaikan, integritas, dan keselamatan moral, sedangkan kedustaan menuntun kepada penyimpangan dan kerusakan. Dalam konteks komunikasi kepemimpinan, hadis ini menunjukkan bahwa pemimpin yang jujur akan membangun kepercayaan sosial, sedangkan pemimpin yang memproduksi kedustaan, manipulasi data, dan distorsi informasi akan merusak legitimasi moralnya di hadapan rakyat. Karena itu, prinsip *ṣidq* menjadi fondasi utama komunikasi pemimpin Qur’ani.

Dalam kajian komunikasi modern, distorsi informasi sering kali terjadi dalam komunikasi politik ketika pesan yang disampaikan kepada masyarakat tidak mencerminkan fakta yang sebenarnya. Distorsi informasi dapat terjadi melalui propaganda, *framing* media, atau penyembunyian fakta yang penting bagi masyarakat.[100] Dalam konteks komunikasi politik, kebohongan juga dapat digunakan sebagai strategi untuk mempengaruhi opini publik. Strategi ini sering digunakan untuk membangun citra positif pemimpin atau untuk melemahkan lawan politik.[101]

---

[98] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah,* Lentera Hati, 2017, jilid 7, hal. 357.

[99] Muḥammad ibn Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Adab, Bāb Qawl Allāh Ta‘ālā: Yā ayyuhā alladzīna āmanū ittaqū Allāha wa kūnū ma‘a aṣ-ṣādiqīn, no. 6094; Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Birr wa aṣ-Ṣilah wa al-Ādāb, Bāb Qubḥ al-Kadzib wa Ḥusn aṣ-Ṣidq wa Faḍlih, no. 2607.

[100] Nurudin, *Pengantar Komunikasi Massa*, RajaGrafindo Persada, 2017, hal. 154.

[101] Asep Saeful Muhtadi, *Komunikasi Politik Indonesia*, Simbiosa Rekatama Media, 2016, hal. 186.

Selain itu, distorsi komunikasi juga dapat menyebabkan munculnya mis-informasi dalam masyarakat. Mis-informasi dapat menimbulkan kesalahpahaman yang luas karena masyarakat menerima informasi yang tidak akurat mengenai suatu peristiwa atau kebijakan.[102]

Dalam perspektif etika komunikasi, kejujuran merupakan prinsip utama yang harus dijunjung tinggi oleh setiap komunikator, terutama oleh pemimpin yang memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat.[103] Komunikasi yang tidak jujur juga dapat menimbulkan krisis legitimasi kepemimpinan karena masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap pemimpin yang sering menyampaikan informasi yang tidak benar.[104] Dalam kajian jurnal komunikasi politik, kebohongan dalam komunikasi publik sering kali menyebabkan meningkatnya polarisasi sosial karena masyarakat terpecah dalam menerima informasi yang berbeda.[105] Selain itu, penelitian dalam bidang komunikasi pemerintahan menunjukkan bahwa transparansi informasi merupakan faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.[106]

Dengan demikian, konsep *Kizb* dalam Al-Qur'an memberikan peringatan moral mengenai bahaya distorsi kebenaran dalam komunikasi publik.

Ketika komunikasi dipenuhi oleh kebohongan, masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap pemimpin sehingga hubungan sosial antara pemimpin dan rakyat menjadi rapuh. Komunikasi yang jujur dan transparan akan memperkuat kepercayaan masyarakat serta menciptakan kepemimpinan yang berlandaskan nilai moral dan integritas.

3. *Fasād* (الفساد): Kerusakan Moral dalam Komunikasi Sosial

Kerusakan moral dalam komunikasi kepemimpinan dalam perspektif Al-Qur'an sering kali digambarkan dengan istilah *Fasād* (الفساد). Istilah ini merujuk pada kondisi rusaknya tatanan moral dan sosial akibat perilaku manusia yang menyimpang dari nilai-nilai keadilan dan kebenaran. Al-Qur'an mengingatkan bahaya kerusakan sosial tersebut melalui firman Allah SWT:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya." (QS. Al-A'raf [7]: 56).

---

[102] Deddy Mulyana, *Komunikasi Massa*, Remaja Rosdakarya, 2018, hal. 203).

[103] Hafied Cangara, *Etika Komunikasi,* RajaGrafindo Persada, 2019, hal. 97.

[104] Firmanzah, *Mengelola Partai Politik*, Yayasan Obor Indonesia, 2017, hal. 142.

[105] R. Siti Zuhro, *"*Komunikasi Politik dan Kepercayaan Publik*", Jurnal Ilmu Politik,* 2020, hal. 58.

[106] Rachmat Kriyantono, *"*Transparansi Komunikasi Pemerintah", *Jurnal Komunikasi*, 2019, hal. 84.

Ayat ini menunjukkan bahwa manusia memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga keteraturan sosial yang telah ditetapkan oleh Allah. Dalam konteks komunikasi kepemimpinan, *Fasād* dapat muncul ketika pemimpin menggunakan komunikasi untuk menyebarkan informasi yang menyesatkan atau memanipulasi masyarakat demi kepentingan kekuasaan.

Secara leksikal, kata *Fasād* berasal dari akar kata فسد yang berarti rusak atau menyimpang dari keadaan yang seharusnya. Raghib al-Asfahani menjelaskan bahwa *Fasād* merupakan kondisi ketika sesuatu kehilangan keseimbangan atau fungsi yang seharusnya dimiliki.[107] Dalam konteks sosial, *Fasād* dapat merujuk pada kerusakan moral yang muncul ketika manusia tidak lagi mematuhi prinsip keadilan dan kejujuran dalam interaksi sosial.

Dalam tafsirnya, Ibn Katsir menjelaskan bahwa ayat tersebut merupakan larangan terhadap segala bentuk kerusakan yang dilakukan manusia di muka bumi, termasuk kerusakan sosial yang timbul akibat perilaku zalim dan tidak adil.[108] Menurutnya, kerusakan sosial sering kali muncul ketika manusia menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan kepadanya.

Al-Qurṭubi menambahkan bahwa *Fasād* dalam Al-Qur'an mencakup berbagai bentuk kerusakan dalam kehidupan manusia, baik kerusakan moral, ekonomi, maupun politik. Menurutnya, penguasa yang tidak menjalankan kekuasaan secara adil dapat menyebabkan kerusakan yang luas dalam masyarakat.[109]

Dalam tafsir kontemporer, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa larangan membuat kerusakan di bumi merupakan prinsip dasar dalam etika sosial Islam. Menurutnya, kerusakan sosial sering kali muncul ketika manusia mengejar kepentingan pribadi tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat.[110]

Dalam hadis Nabi Muhammad SAW juga terdapat peringatan mengenai bahaya kerusakan sosial.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: بَيْنَمَا النَّبِيُّ ﷺ فِي مَجْلِسٍ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ، جَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: مَتَى السَّاعَةُ؟ فَمَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ يُحَدِّثُ، حَتَّى إِذَا قَضَى حَدِيثَهُ قَالَ: «أَيْنَ أُرَاهُ السَّائِلُ عَنِ السَّاعَةِ؟» قَالَ: هَا أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: «فَإِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ».

---

[107] Al-Raghib al-Asfahani, *Al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur'ān*, Dar al-Qalam, 2009, hal. 636).

[108] Ibn Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. M. Abdul Ghoffar, Pustaka Imam Syafi'i, 2016, jilid 3, hal. 429

[109] Al-Qurṭubi, *Tafsir Al-Qurṭubi*, terj. Ahmad Khatib, Pustaka Azzam, 2015, jilid 7, hal. 294.

[110] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Lentera Hati, 2017, jilid 4, hal. 211.

قَالَ: كَيْفَ إِضَاعَتُهَا؟ قَالَ: «إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ» (رواه البخاري)[111]

Dari Abū Hurairah r.a., ia berkata: Ketika Nabi ﷺ berada dalam suatu majelis sedang berbicara kepada suatu kaum, datanglah seorang Arab Badui lalu bertanya, 'Kapankah kiamat itu?' Rasulullah ﷺ tetap melanjutkan pembicaraannya. Sebagian orang berkata, 'Beliau mendengar apa yang ditanyakan, tetapi tidak menyukai pertanyaan itu.' Sebagian yang lain berkata, 'Beliau tidak mendengarnya.' Setelah selesai berbicara, beliau bertanya, 'Di mana orang yang bertanya tentang kiamat tadi?' Orang itu menjawab, 'Saya, wahai Rasulullah.' Beliau bersabda, 'Apabila amanah telah disia-siakan, maka tunggulah datangnya kiamat.' Orang itu bertanya, 'Bagaimana amanah itu disia-siakan?' Beliau menjawab, 'Apabila suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah datangnya kiamat." (HR. Bukhari).

Hadis ini menegaskan bahwa amanah merupakan fondasi utama dalam struktur kepemimpinan. Penyia-nyiaan amanah terjadi ketika suatu urusan publik diserahkan kepada pihak yang tidak memiliki kapasitas, integritas, dan kelayakan moral. Dalam konteks komunikasi pemimpin dan rakyat, amanah tidak hanya berarti menjaga kekuasaan, tetapi juga menyampaikan informasi secara benar, mengambil kebijakan secara bertanggung jawab, serta tidak memanipulasi kepercayaan publik. Ketika komunikasi kepemimpinan kehilangan amanah, maka relasi sosial akan rusak karena rakyat tidak lagi melihat pemimpin sebagai pihak yang dapat dipercaya.

Dalam kajian komunikasi politik, kerusakan moral dalam komunikasi publik dapat terjadi ketika informasi yang disampaikan kepada masyarakat tidak mencerminkan fakta yang sebenarnya. Kondisi ini dapat menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemimpin.[112]

Selain itu, komunikasi yang tidak etis juga dapat memicu munculnya konflik sosial karena masyarakat menerima informasi yang tidak akurat mengenai kebijakan publik.[113] Dalam perspektif kepemimpinan etis, integritas komunikasi merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga hubungan yang sehat antara pemimpin dan masyarakat.[114]

---

[111] Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-'Ilm, Bāb Man Su'ila 'Ilman wa Huwa Musytaghil fī Ḥadītsih fa Atamma al-Ḥadīts Ṡumma Ajāba as-Sā'il, no. 59; lihat juga *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb ar-Riqāq, Bāb Raf' al-Amānah, no. 6496.

[112] Hafied Cangara, *Komunikasi Politik: Konsep, Teori dan Strategi,* RajaGrafindo Persada, 2016, hal. 148.

[113] Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*, Remaja Rosdakarya, 2017, hal. 205.

[114] Didin Hafidhuddin, *Manajemen Syariah dalam Praktik,* Gema Insani, 2015, hal. 174.

Kerusakan komunikasi juga dapat muncul ketika pemimpin menggunakan propaganda untuk mempengaruhi opini publik. Propaganda sering kali digunakan untuk membangun citra positif pemimpin meskipun tidak sesuai dengan kenyataan.[115]

Dalam kajian komunikasi massa, penyebaran informasi yang tidak akurat dapat menyebabkan munculnya disinformasi yang berdampak luas dalam masyarakat.[116] Kerusakan moral komunikasi juga dapat menyebabkan menurunnya legitimasi kepemimpinan karena masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemimpin.[117] Penelitian dalam bidang komunikasi politik juga menunjukkan bahwa transparansi komunikasi merupakan faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.[118]

Selain itu, komunikasi yang tidak transparan dapat memperlebar jarak antara elite politik dan masyarakat.[119]

Dalam perspektif sosiologi politik, kerusakan komunikasi publik sering kali terjadi ketika sistem kekuasaan tidak memberikan ruang partisipasi bagi masyarakat.[120] Selain itu, komunikasi yang tidak adil dapat memperkuat ketimpangan sosial dalam masyarakat karena masyarakat tidak memperoleh informasi yang cukup mengenai kebijakan publik.[121]

Kerusakan moral komunikasi juga dapat menimbulkan budaya politik yang tidak sehat karena masyarakat terbiasa menerima informasi yang tidak sepenuhnya benar.[122] Dalam konteks komunikasi organisasi, kepemimpinan yang tidak transparan akan melemahkan hubungan antara pemimpin dan anggota organisasi.[123]

Dengan demikian, konsep *Fasād* dalam Al-Qur'an memberikan peringatan moral mengenai bahaya kerusakan komunikasi dalam kepemimpinan. Ketika komunikasi dipenuhi oleh manipulasi, propaganda, dan informasi yang tidak akurat, maka hubungan antara pemimpin dan masyarakat akan mengalami kerusakan.

---

[115] Dan Nimmo, *Komunikasi Politik*, Remaja Rosdakarya, 2017, hal. 132.

[116]Nurudin, *Pengantar Komunikasi Massa*, RajaGrafindo Persada, 2017, hal. 189.

[117] Firmanzah, *Marketing Politik*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016, hal. 203.

[118] Rachmat Kriyantono, *Public Relations, Issue & Crisis Management*, Kencana, 2018, hal. 94.

[119]Siti Zuhro, *Demokrasi Lokal*, LIPI Press, 2017, hal. 163.

[120] M. Rusli Karim, *Negara dan Politik Lokal,* Pustaka Pelajar, 2017, hal. 211.

[121] Asep Saeful Muhtadi, *Komunikasi Politik Indonesia*, Simbiosa Rekatama Media, 2016, hal. 192.

[122] Toto Tasmara, *Etika Kepemimpinan dalam Perspektif Islam*, Gema Insani, 2018, hal. 183.

[123] Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktik*, Remaja Rosdakarya, 2017, hal. 91.

D. Problematika Relasi Sosial (*Social Disconnection*)

1. *Tafarruq* (التفرق): Polarisasi Sosial

Fenomena polarisasi sosial dalam relasi komunikasi antara pemimpin dan rakyat dalam perspektif Al-Qur'an dapat dipahami melalui konsep *Tafarruq* (التفرق). Istilah ini merujuk pada kondisi terpecahnya kesatuan sosial menjadi kelompok-kelompok yang saling berseberangan akibat konflik kepentingan atau perbedaan pandangan yang tidak dikelola secara konstruktif. Al-Qur'an memberikan peringatan keras terhadap kondisi tersebut melalui firman Allah:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

"Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali Allah seraya berjamaah, dan janganlah kamu bercerai-berai." (QS. Āli 'Imrān [3]: 103).

Ayat ini menegaskan pentingnya menjaga persatuan sosial dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks komunikasi kepemimpinan, *Tafarruq* dapat muncul ketika komunikasi publik tidak lagi berfungsi sebagai sarana membangun kesepahaman bersama, melainkan menjadi alat yang memperkuat perbedaan dan konflik sosial.

Secara leksikal, kata *Tafarruq* berasal dari akar kata فرق yang berarti terpisah atau berpecah menjadi bagian-bagian yang berbeda. Raghib al-Asfahani menjelaskan bahwa *Tafarruq* merujuk pada kondisi ketika suatu kelompok yang sebelumnya bersatu mengalami perpecahan karena hilangnya kesepakatan bersama mengenai nilai atau tujuan yang mereka pegang.[124] Dalam konteks sosial, *Tafarruq* tidak hanya merujuk pada perbedaan pendapat, tetapi pada perpecahan yang menyebabkan rusaknya hubungan sosial antara kelompok-kelompok dalam masyarakat.

Dalam tafsirnya, Ibn Katsir menjelaskan bahwa ayat tersebut merupakan perintah kepada umat Islam untuk menjaga persatuan dan menghindari segala bentuk perpecahan yang dapat melemahkan kekuatan umat. Menurutnya, perpecahan sering kali muncul ketika manusia lebih mengikuti kepentingan kelompok daripada nilai kebenaran yang seharusnya menjadi pedoman bersama.[125]

Al-Qurṭubi menambahkan bahwa perpecahan sosial merupakan salah satu penyebab utama melemahnya kekuatan masyarakat. Dalam penafsirannya, ia menjelaskan bahwa ayat tersebut melarang umat manusia

---

[124] Al-Raghib al-Asfahani, *Al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur'ān*, Dar al-Qalam, 2009, hal. 638

[125] Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2015, jilid 2, hal. 92.

untuk terpecah ke dalam kelompok-kelompok yang saling bermusuhan karena kondisi tersebut akan merusak stabilitas sosial.[126]

Dalam tafsir kontemporer, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat tersebut tidak hanya berbicara mengenai persatuan umat Islam secara teologis, tetapi juga mengenai pentingnya menjaga harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat. Menurutnya, komunikasi yang memecah belah masyarakat merupakan bentuk penyimpangan dari nilai persatuan yang diajarkan Al-Qur'an.[127]

Dalam konteks kepemimpinan, polarisasi sosial sering muncul ketika komunikasi politik digunakan untuk memperkuat identitas kelompok tertentu dan melemahkan kelompok lain. Komunikasi semacam ini dapat menyebabkan masyarakat terpecah menjadi kelompok-kelompok yang saling berlawanan.[128]

Polarisasi sosial juga dapat dipicu oleh penyebaran narasi yang bersifat provokatif dalam komunikasi publik. Narasi semacam ini sering kali digunakan untuk memobilisasi dukungan politik dengan cara membangun sentimen kelompok terhadap kelompok lain.[129]

Dalam kajian komunikasi digital, polarisasi sosial semakin meningkat karena masyarakat cenderung berinteraksi dengan kelompok yang memiliki pandangan yang sama dengan mereka. Kondisi ini menyebabkan ruang dialog antara kelompok yang berbeda menjadi semakin sempit.[130]

Selain itu, komunikasi yang bersifat destruktif juga dapat memperkuat konflik identitas dalam masyarakat. Konflik identitas sering muncul ketika perbedaan suku, agama, atau ideologi digunakan sebagai alat mobilisasi politik.[131]

Dalam perspektif sosiologi komunikasi, polarisasi sosial dapat melemahkan kohesi sosial karena masyarakat tidak lagi memiliki ruang dialog yang memungkinkan terciptanya kesepahaman bersama.[132]

Polarisasi juga dapat menyebabkan munculnya sikap saling curiga antara kelompok masyarakat yang berbeda. Kondisi ini dapat memperburuk

---

[126] Al-Qurṭubi, *Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*, Muassasah al-Risalah, 2016, jilid 4, hal. 159.

[127] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Lentera Hati, 2017, jilid 2, hal. 73.

[128] Anwar Arifin, *Komunikasi Politik: Paradigma, Teori, Aplikasi dan Strategi Komunikasi Politik Indonesia*, Balai Pustaka, 2016, hal. 146.

[129] Gun Gun Heryanto, *Media Komunikasi Politik*, IRCiSoD, 2018, hal. 208

[130] Juditha, C., *"Polarisasi Politik dalam Media Sosial",* Jurnal Penelitian Komunikasi, 2019, hal. 118.

[131] Ahmad Zaini Abar, *Komunikasi Politik dan Konflik Sosial*, Pustaka Pelajar, 2017, hal. 97.

[132] Sunarto, *Sosiologi Komunikasi,* Prenada Media, 2016, hal. 166.

hubungan antara pemimpin dan rakyat karena masyarakat merasa bahwa pemimpin berpihak kepada kelompok tertentu.[133]

Dalam kajian komunikasi pemerintahan, komunikasi yang inklusif menjadi salah satu strategi penting untuk mencegah terjadinya polarisasi sosial dalam masyarakat.[134] Selain itu, kepemimpinan yang mampu membangun komunikasi yang dialogis dapat memperkuat solidaritas sosial dalam masyarakat.[135] Dalam konteks komunikasi pembangunan, partisipasi masyarakat dalam proses komunikasi publik merupakan faktor penting dalam menjaga kesatuan sosial.[136]

Fenomena *tafarruq* dalam kehidupan sosial tidak selalu bermula dari konflik terbuka, tetapi dapat berkembang melalui konstruksi bahasa, pelabelan, dan generalisasi terhadap kelompok yang berbeda. Suaib Tahir menunjukkan bahwa perbedaan cara pandang dalam memahami gerakan dakwah dapat memunculkan reaksi sosial serta membentuk persepsi tertentu terhadap suatu kelompok keagamaan. Dalam konteks gerakan Salafiyyah di Indonesia, misalnya, istilah seperti bid‘ah, syirik, kufur, radikal, ekstrem, dan eksklusif berkembang dalam ruang interaksi keagamaan dan turut memengaruhi cara suatu kelompok memandang kelompok lainnya. Tahir mengingatkan bahwa generalisasi identitas Salafiyyah terhadap berbagai gerakan yang memiliki karakter berbeda berpotensi mengaburkan pengertian Salafiyyah sekaligus memperbesar kesalahpahaman sosial.[137]

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa bahasa memiliki peran strategis dalam membentuk integrasi maupun fragmentasi sosial. Dalam perspektif komunikasi Qur’ani, penggunaan istilah yang menyederhanakan identitas kelompok, memberikan stigma, atau menggeneralisasikan pihak lain dapat menciptakan jarak psikologis yang kemudian berkembang menjadi *tafarruq*. Prinsip ini juga relevan dalam komunikasi pemimpin dan rakyat. Pemimpin yang menggunakan kategorisasi sosial secara dikotomis, memberi label negatif terhadap kelompok masyarakat tertentu, atau membangun narasi “kami” dan “mereka” dapat memperbesar polarisasi yang sudah ada. Sebaliknya, komunikasi yang menjunjung ketepatan informasi, keadilan dalam menilai pihak lain, dan penghormatan terhadap keragaman sosial merupakan bagian dari ikhtiar menjaga persatuan masyarakat. Pencegahan *tafarruq* menuntut

---

[133] M. Faisal Ismail, *Dinamika Kerukunan Antarumat Beragama*, Remaja Rosdakarya, 2018, hal. 131.

[134] Budi Setiyono, *Pemerintahan dan Manajemen Sektor Publik*, CAPS, 2017, hal. 214.

[135] Ujang Komarudin, *Kepemimpinan Politik Indonesia*, Alfabeta, 2019, hal. 188.

[136] Rochajat Harun, *Komunikasi Pembangunan Perubahan Sosial*, Rajawali Pers, 2017, hal. 142.

[137] Suaib Tahir, “Gerakan Dakwah Salafiyyah dan Pokok-pokok Pemikirannya,” *Mumtäz: Jurnal Studi Al-Qur’an dan Keislaman*, Vol. 1, No. 2, 2017, hlm. 150–153.

bukan hanya kesatuan dalam tujuan, tetapi juga tanggung jawab etis dalam penggunaan bahasa dan konstruksi identitas sosial.[138]

Dengan demikian, konsep *Tafarruq* dalam Al-Qur'an memberikan peringatan penting mengenai bahaya perpecahan sosial yang dapat muncul akibat komunikasi yang destruktif. Ketika komunikasi publik digunakan untuk memecah belah masyarakat, maka hubungan sosial antara pemimpin dan rakyat akan mengalami kerusakan yang serius.

2. *Qaswah al-Qalb* (قسوة القلب): Kekerasan Hati

Fenomena hilangnya empati sosial dalam relasi komunikasi antara pemimpin dan rakyat dalam perspektif Al-Qur'an sering dikaitkan dengan konsep *Qaswah al-Qalb* (قسوة القلب) atau kekerasan hati. Istilah ini merujuk pada kondisi ketika hati manusia kehilangan kepekaan terhadap kebenaran, nasihat, dan penderitaan orang lain. Dalam konteks kepemimpinan, kekerasan hati dapat menyebabkan pemimpin kehilangan sensitivitas terhadap kebutuhan masyarakat sehingga komunikasi yang terjadi tidak lagi mencerminkan nilai empati dan kepedulian sosial. Al-Qur'an menyinggung fenomena tersebut melalui firman Allah SWT:

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً

"Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi." (QS. Al-Baqarah [2]: 74).

Ayat ini menggambarkan kondisi ketika hati manusia menjadi sangat keras sehingga tidak lagi tersentuh oleh nasihat atau petunjuk kebenaran. Dalam konteks komunikasi sosial, kekerasan hati dapat menyebabkan seseorang tidak lagi peduli terhadap dampak dari kata-kata atau kebijakan yang ia sampaikan kepada orang lain.

Secara leksikal, istilah *Qaswah al-Qalb* berasal dari kata قسا yang berarti keras atau kaku. Raghib al-Asfahani menjelaskan bahwa *Qaswah al-Qalb* adalah kondisi ketika hati manusia kehilangan kelembutan dan tidak lagi mampu menerima kebenaran atau menunjukkan belas kasih kepada sesama.[139] Dalam konteks sosial, kekerasan hati dapat menyebabkan seseorang bersikap acuh terhadap penderitaan orang lain sehingga hubungan sosial menjadi renggang.

Dalam tafsirnya, Ibn Katsir menjelaskan bahwa ayat tersebut menggambarkan kondisi Bani Israil yang hatinya menjadi keras karena terus-menerus menolak petunjuk Allah. Menurutnya, hati yang keras membuat

---

[138] Suaib Tahir, "Gerakan Dakwah Salafiyyah dan Pokok-pokok Pemikirannya," *Mumtäz: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Keislaman*, Vol. 1, No. 2, 2017, hlm. 143–158.

[139] Al-Raghib al-Asfahani, *Al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur'ān*, Dar al-Qalam, 2009, hal. 682.

seseorang tidak lagi mampu menerima nasihat meskipun kebenaran telah dijelaskan secara jelas.[140] Penafsiran ini menunjukkan bahwa kekerasan hati dapat menyebabkan seseorang menolak komunikasi yang mengandung kebenaran.

Al-Qurṭubi menjelaskan bahwa kekerasan hati merupakan salah satu penyakit moral yang dapat merusak kehidupan sosial manusia. Menurutnya, hati yang keras membuat seseorang tidak lagi memiliki rasa belas kasih terhadap orang lain sehingga ia cenderung bersikap zalim dalam interaksi sosial.[141]

Dalam tafsir kontemporer, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa kekerasan hati tidak hanya berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga berkaitan dengan hubungan sosial manusia dengan sesamanya. Menurutnya, seseorang yang hatinya keras cenderung bersikap kaku dalam komunikasi sehingga sulit menerima pandangan orang lain.[142]

Dalam hadis Nabi Muhammad SAW juga terdapat peringatan mengenai bahaya kekerasan hati.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ يَقُولُ: «لَا تُنْزَعُ الرَّحْمَةُ إِلَّا مِنْ شَقِيٍّ» (رواه الترمذي)[143]

"Dari Abū Hurairah r.a., ia berkata: Aku mendengar Abū al-Qāsim ﷺ bersabda: 'Tidaklah kasih sayang dicabut kecuali dari orang yang celaka". (HR. Tirmidzi).

Hadis ini menunjukkan bahwa hilangnya rahmah merupakan tanda kerusakan moral yang serius. Dalam konteks kepemimpinan, rahmah tidak hanya berarti belas kasih secara emosional, tetapi juga kepekaan moral dalam memahami keadaan rakyat, kesediaan mendengar keluhan, serta kemampuan menyampaikan kebijakan dengan bahasa yang menenangkan. Pemimpin yang kehilangan rahmah cenderung membangun komunikasi yang keras, kaku, dan berjarak, sehingga relasi sosial antara pemimpin dan rakyat menjadi rapuh. Karena itu, komunikasi pemimpin Qur'ani harus berlandaskan rahmah agar kekuasaan tidak berubah menjadi dominasi yang menekan masyarakat.

Dalam kajian komunikasi *inter* personal, empati merupakan salah satu unsur penting dalam membangun komunikasi yang efektif antara individu.

---

[140] Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2015, jilid 1, hal. 203

[141] Al-Qurṭubi, *Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*, Muassasah al-Risalah, 2016, jilid 1, hal. 485.

[142] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Lentera Hati, 2017, jilid 1, hal. 239.

[143] Muḥammad ibn 'Īsā at-Tirmiżī, *Jāmi' at-Tirmiżī*, Kitāb al-Birr wa aṣ-Ṣilah, Bāb Mā Jā'a fī Raḥmat aṣ-Ṣibyān, no. 1923. At-Tirmiżī menilai hadis ini sebagai hadis ḥasan.

Komunikasi yang tidak dilandasi empati cenderung menimbulkan kesalahpahaman dan konflik sosial.[144]

Dalam konteks kepemimpinan publik, empati merupakan kemampuan pemimpin untuk memahami kondisi dan perasaan masyarakat yang dipimpinnya. Tanpa empati, komunikasi kepemimpinan akan terasa kaku dan tidak menyentuh kebutuhan masyarakat.[145]

Kepemimpinan yang kehilangan empati sering kali menghasilkan kebijakan yang tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan masyarakat merasa tidak diperhatikan oleh pemimpin mereka.[146] Dalam kajian komunikasi politik, hilangnya empati dalam komunikasi publik dapat menyebabkan meningkatnya jarak sosial antara pemimpin dan rakyat.[147] Selain itu, komunikasi yang tidak empati juga dapat memicu konflik sosial karena masyarakat merasa bahwa aspirasi mereka tidak didengarkan oleh pemimpin.[148]

Dalam perspektif sosiologi komunikasi, empati merupakan faktor penting dalam membangun solidaritas sosial dalam masyarakat.[149] Ketiadaan empati dalam komunikasi kepemimpinan juga dapat menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.[150] Penelitian dalam bidang komunikasi pemerintahan menunjukkan bahwa komunikasi yang empati dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin.[151]

Selain itu, komunikasi empati juga dapat memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam proses pembangunan sosial.[152] Dalam perspektif kepemimpinan Islam, empati merupakan bagian dari sifat *rahmah* yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin.[153]

Dengan demikian, konsep *Qaswah al-Qalb* dalam Al-Qur'an memberikan peringatan penting mengenai bahaya kekerasan hati dalam kehidupan sosial.

---

[144] Joseph A Devito, *The Interpersonal Communication Book*, Pearson Education, 2017, hal. 154.

[145] Daniel Goleman, *Emotional Intelligence*, Bantam Books, 2015, hal. 98.

[146] George, *Authentic Leadership*, Jossey-Bass, 2016, hal. 87.

[147] Gun Gun Heryanto, , *Komunikasi Politik di Era Digital*, IRCiSoD, 2020, hal. 165.

[148] Harold D Lasswell, *Politics: Who Gets What, When, How*, University of Chicago Press, 2017, hal. 82.

[149] Stephen Littlejohn, & Karen A Foss, *Theories of Human Communication*, Waveland Press, 2017, hal. 143.

[150] Kriyantono, *Public Relations Writing*, Kencana, 2019, hal. 156.

[151] Men, *Strategic Internal Communication*, Routledge, 2021, hal. 64.

[152] Servaes, *Communication for Development and Social Change*, Sage Publications, 2018, hal. 137.

[153] Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2016, jilid 3, hal. 219.

Ketika seorang pemimpin kehilangan empati dalam komunikasi dengan masyarakat, maka hubungan sosial antara pemimpin dan rakyat akan mengalami kerusakan.

3. *I'rāḍ* (الإعراض): Penolakan terhadap Nasihat

Fenomena penolakan terhadap nasihat dan dialog dalam relasi komunikasi antara pemimpin dan rakyat dalam perspektif Al-Qur'an dapat dipahami melalui konsep *i'rāḍ* (الإعراض). Istilah ini merujuk pada sikap berpaling atau menolak untuk mendengarkan kebenaran yang disampaikan oleh pihak lain. Dalam konteks kepemimpinan, sikap ini dapat muncul ketika pemimpin tidak bersedia menerima kritik, saran, atau aspirasi dari masyarakat yang dipimpinnya. Al-Qur'an menggambarkan fenomena tersebut melalui firman Allah:

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا

"Barang siapa berpaling dari peringatan-Ku, maka baginya kehidupan yang sempit." (QS. Ṭāhā [20]: 124).

Ayat ini menunjukkan bahwa sikap berpaling dari kebenaran tidak hanya berdampak pada kehidupan spiritual manusia, tetapi juga dapat menimbulkan kesulitan dalam kehidupan sosial. Dalam konteks komunikasi kepemimpinan, penolakan terhadap nasihat dapat menyebabkan hubungan antara pemimpin dan masyarakat menjadi tidak harmonis.

Secara leksikal, kata *i'rāḍ* berasal dari akar kata عرض yang berarti berpaling atau menghindar dari sesuatu. Raghib al-Asfahani menjelaskan bahwa *i'rāḍ* adalah sikap menolak atau tidak memberikan perhatian terhadap sesuatu yang seharusnya didengarkan atau dipertimbangkan.[154] Dalam konteks sosial, sikap ini mencerminkan ketidaksediaan seseorang untuk menerima pandangan orang lain, terutama ketika pandangan tersebut bertentangan dengan kepentingannya.

Dalam tafsirnya, Ibn Katsir menjelaskan bahwa ayat tersebut merupakan peringatan bagi manusia yang menolak petunjuk Allah. Menurutnya, orang yang berpaling dari kebenaran akan mengalami kesulitan dalam kehidupan karena ia kehilangan pedoman moral yang dapat membimbingnya.[155]

Al-Qurṭubi menjelaskan bahwa sikap *i'rāḍ* sering kali muncul karena kesombongan atau kepentingan pribadi yang membuat seseorang tidak bersedia menerima kebenaran dari pihak lain. Menurutnya, sikap ini dapat

---

[154] Al-Raghib al-Asfahani, *Al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur'ān*, Dar al-Qalam, 2009, hal. 573.

[155] Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2015, jilid 5, hal. 312.

menyebabkan seseorang kehilangan kemampuan untuk memperbaiki dirinya sendiri.[156]

Dalam tafsir kontemporer, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat tersebut mengandung pesan bahwa manusia harus bersedia menerima nasihat dan kritik sebagai bagian dari proses perbaikan diri. Menurutnya, masyarakat yang menutup diri terhadap nasihat akan mengalami stagnasi dalam perkembangan sosial.[157]

Dalam hadis Nabi Muhammad SAW juga terdapat anjuran untuk saling memberikan nasihat dalam kehidupan sosial.

عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الدِّينُ النَّصِيحَةُ». قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: «لِلَّهِ، وَلِكِتَابِهِ، وَلِرَسُولِهِ، وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، وَعَامَّتِهِمْ» (رواه مسلم)[158]

Dari Tamīm ad-Dārī r.a., bahwa Nabi ﷺ bersabda: 'Agama adalah nasihat.' Kami bertanya, 'Untuk siapa?' Beliau menjawab, 'Untuk Allah, kitab-Nya, Rasul-Nya, para pemimpin kaum Muslimin, dan masyarakat umum mereka. (HR. Muslim).

Hadis ini menunjukkan bahwa nasihat merupakan bagian inti dari ajaran agama. Dalam relasi kepemimpinan, nasihat tidak hanya berlaku dari pemimpin kepada rakyat, tetapi juga dari rakyat kepada pemimpin. Hal ini menegaskan bahwa komunikasi dalam Islam tidak bersifat satu arah dan otoriter, melainkan mengandung unsur tanggung jawab moral, koreksi sosial, dan kepedulian terhadap kemaslahatan bersama. Pemimpin yang menolak nasihat berarti menutup salah satu pintu perbaikan sosial, sedangkan rakyat yang menyampaikan nasihat dengan adab turut menjaga agar kekuasaan tetap berada dalam koridor amanah, keadilan, dan kemaslahatan publik.

Dalam kajian komunikasi organisasi, kemampuan menerima kritik merupakan salah satu indikator penting dari kepemimpinan yang efektif.[159] Pemimpin yang menolak kritik biasanya menciptakan budaya organisasi yang tertutup dan tidak dialogis. Kondisi ini dapat menghambat proses pengambilan keputusan yang efektif.[160] Dalam kajian komunikasi publik, keterbukaan terhadap dialog merupakan prinsip penting dalam membangun hubungan yang sehat antara pemerintah dan masyarakat.[161]

---

[156] Al-Qurṭubi, *Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*, Muassasah al-Risalah, 2016, jilid 11, hal. 274.

[157] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Lentera Hati, 2017, jilid 9, hal. 198.

[158] Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Īmān, Bāb Bayān anna ad-Dīn an-Naṣīḥah, no. 55.

[159][159] Gary Dessler, *Human Resource Management*, Pearson Education, 2017, hal. 342.

[160] Peter G. Northouse, *Leadership: Theory and Practice*, Sage Publications, 2019, hal. 268.

[161] Stephen W. Littlejohn, *Encyclopedia of Communication Theory*, Sage Publications, 2016, hal. 412.

Penolakan terhadap dialog juga dapat menyebabkan meningkatnya ketegangan sosial dalam masyarakat karena masyarakat merasa bahwa aspirasi mereka tidak didengar oleh pemimpin.[162] Selain itu, komunikasi yang tidak dialogis dapat menyebabkan munculnya kesenjangan antara elite politik dan masyarakat.[163]

Dalam perspektif komunikasi demokratis, dialog antara pemimpin dan masyarakat merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga stabilitas politik.[164] Penelitian dalam bidang komunikasi pemerintahan juga menunjukkan bahwa keterbukaan terhadap kritik dapat meningkatkan kualitas kebijakan publik.[165] Selain itu, dialog antara pemimpin dan masyarakat juga dapat memperkuat legitimasi kepemimpinan karena masyarakat merasa dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.[166]

Dalam kajian komunikasi pembangunan, partisipasi masyarakat dalam proses komunikasi publik merupakan faktor penting dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan.[167] Selain itu, komunikasi dialogis juga dapat memperkuat solidaritas sosial dalam masyarakat karena masyarakat merasa bahwa suara mereka dihargai oleh pemimpin.[168]

Dengan demikian, konsep *i'rāḍ* dalam Al-Qur'an memberikan peringatan penting mengenai bahaya sikap menolak nasihat dan dialog dalam kehidupan sosial. Ketika pemimpin menutup diri terhadap kritik dan aspirasi masyarakat, maka hubungan antara pemimpin dan rakyat akan mengalami kerusakan yang dapat mengancam stabilitas sosial.

E. Sintesis Problematika Komunikasi

1. Kekuasaan, moralitas, dan relasi sosial

Kekuasaan, moralitas, dan relasi sosial merupakan tiga unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam memahami problem komunikasi antara pemimpin dan rakyat dalam perspektif Al-Qur'an. Ketiga unsur tersebut membentuk kerangka yang menentukan bagaimana komunikasi kepemimpinan dijalankan dalam kehidupan masyarakat. Kekuasaan memberikan otoritas kepada

---

[162] Anwar Arifin, *Komunikasi Politik Indonesia*, Rajawali Pers, 2018, hal. 175.

[163][163] Iriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, 2017, hal. 215.

[164] Samuel P. Huntington, *Political Order in Changing Societies*, Yale University Press, 2018, hal. 132

[165] Dwight Waldo, *Public Administration in a Time of Turbulence*, Chandler Publishing, 2016, hal. 97.

[166] James L. Garnett, *Communicating for Results in Government*, Jossey-Bass, 2016, hal. 214

[167] Jan Servaes, *Communication for Development and Social Change*, Sage Publications, 2018, hal. 164.

[168] Jurgen Habermas, *The Structural Transformation of the Public Sphere*, Polity Press, 2016, hal. 87.

pemimpin untuk mengarahkan kebijakan dan mempengaruhi masyarakat, namun kekuasaan tersebut harus dikendalikan oleh nilai moral agar tidak berubah menjadi dominasi yang merugikan rakyat. Dalam konteks komunikasi sosial, relasi antara pemimpin dan masyarakat sangat dipengaruhi oleh bagaimana pemimpin menggunakan kekuasaan tersebut dalam interaksi komunikatif. Apabila kekuasaan dijalankan secara etis dan transparan, maka komunikasi antara pemimpin dan rakyat dapat menciptakan hubungan sosial yang harmonis. Sebaliknya, ketika kekuasaan digunakan tanpa mempertimbangkan nilai moral dan kepentingan masyarakat, komunikasi kepemimpinan akan cenderung bersifat otoriter dan menimbulkan jarak sosial. Oleh karena itu, memahami hubungan antara kekuasaan, moralitas, dan relasi sosial menjadi penting untuk menjelaskan dinamika komunikasi dalam kepemimpinan. Dalam kajian kepemimpinan sosial, hubungan antara kekuasaan dan etika merupakan faktor penting yang menentukan kualitas interaksi antara pemimpin dan masyarakat.[169]

Dimensi kekuasaan dalam komunikasi kepemimpinan berkaitan dengan kemampuan pemimpin untuk mempengaruhi arah komunikasi publik dalam masyarakat. Kekuasaan memungkinkan pemimpin menentukan agenda komunikasi serta mengontrol informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Namun dalam perspektif etika komunikasi, kekuasaan tidak boleh digunakan secara sepihak karena komunikasi yang sehat harus memberikan ruang partisipasi bagi masyarakat. Ketika kekuasaan digunakan untuk mengendalikan informasi secara berlebihan, maka komunikasi akan kehilangan sifat dialogis yang seharusnya menjadi fondasi hubungan antara pemimpin dan rakyat. Kondisi ini dapat menyebabkan masyarakat merasa terpinggirkan dalam proses komunikasi publik sehingga kepercayaan terhadap pemimpin menurun. Oleh karena itu, pengelolaan kekuasaan yang bijaksana menjadi faktor penting dalam menjaga keseimbangan komunikasi antara pemimpin dan masyarakat. Dalam kajian manajemen kepemimpinan, penggunaan kekuasaan yang berlebihan sering kali menyebabkan munculnya pola komunikasi yang tidak sehat dalam organisasi sosial.[170]

Moralitas merupakan dimensi kedua yang memiliki pengaruh besar terhadap kualitas komunikasi antara pemimpin dan rakyat. Moralitas berfungsi sebagai kompas etika yang mengarahkan bagaimana kekuasaan digunakan dalam kehidupan sosial. Dalam perspektif Al-Qur'an, kepemimpinan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan mengelola kekuasaan, tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab moral terhadap masyarakat. Pemimpin yang memiliki integritas moral cenderung menggunakan komunikasi secara jujur

---

[169] Nawawi, *Kepemimpinan Mengefektifkan Organisasi*, Gadjah Mada University Press, 2016, hal. 94.

[170] Siagian, *Teori dan Praktik Kepemimpinan*, Rineka Cipta, 2017, hal. 122.

dan transparan karena ia menyadari bahwa kekuasaan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Sebaliknya, pemimpin yang tidak memiliki integritas moral cenderung menggunakan komunikasi sebagai alat manipulasi untuk mempertahankan kekuasaan. Oleh karena itu, moralitas menjadi faktor penting dalam menentukan apakah komunikasi kepemimpinan akan menghasilkan hubungan sosial yang sehat atau justru menimbulkan konflik dalam masyarakat. Dalam kajian etika kepemimpinan, integritas moral merupakan salah satu karakter utama yang harus dimiliki oleh pemimpin agar mampu membangun kepercayaan masyarakat.[171]

Dimensi relasi sosial juga memiliki peran penting dalam membentuk kualitas komunikasi antara pemimpin dan masyarakat. Relasi sosial mencerminkan bagaimana hubungan antara pemimpin dan rakyat terjalin dalam kehidupan sehari-hari. Komunikasi yang baik akan memperkuat relasi sosial karena masyarakat merasa bahwa pemimpin memahami kebutuhan mereka. Sebaliknya, komunikasi yang buruk akan melemahkan relasi sosial karena masyarakat merasa tidak diperhatikan oleh pemimpin. Oleh karena itu, komunikasi kepemimpinan harus mampu membangun hubungan sosial yang berbasis kepercayaan dan partisipasi. Dalam kajian komunikasi sosial, hubungan *inter* personal yang positif antara pemimpin dan masyarakat dapat meningkatkan efektivitas komunikasi publik karena masyarakat merasa bahwa suara mereka dihargai.[172]

Hubungan antara kekuasaan dan moralitas dalam komunikasi kepemimpinan menunjukkan bahwa kekuasaan harus selalu berada di bawah kendali nilai etika. Kekuasaan yang tidak diimbangi dengan moralitas berpotensi menimbulkan penyalahgunaan otoritas dalam komunikasi publik. Dalam situasi seperti ini, komunikasi dapat digunakan untuk menyebarkan propaganda atau informasi yang tidak akurat demi mempertahankan kekuasaan. Kondisi tersebut dapat merusak hubungan antara pemimpin dan rakyat karena masyarakat merasa bahwa komunikasi yang disampaikan tidak mencerminkan kejujuran. Oleh karena itu, integrasi antara kekuasaan dan moralitas menjadi faktor penting dalam menciptakan komunikasi kepemimpinan yang berkeadilan. Dalam kajian etika politik, kekuasaan yang tidak dikendalikan oleh moralitas sering kali menjadi sumber konflik sosial dalam masyarakat.[173]

Relasi antara moralitas dan relasi sosial juga memiliki pengaruh besar terhadap stabilitas komunikasi dalam masyarakat. Moralitas yang kuat akan mendorong pemimpin untuk membangun komunikasi yang menghargai martabat manusia. Ketika komunikasi dilakukan dengan menghormati nilai

---

[171] Sutrisno, *Budaya Organisasi*, Kencana, 2018, hal. 209.

[172] Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, RajaGrafindo Persada, 2017, hal. 162

[173] Magnis-Suseno, *Etika Politik*, Gramedia Pustaka Utama, 2016, hal. 178.

kemanusiaan, masyarakat akan merasa dihargai sehingga hubungan sosial menjadi lebih harmonis. Sebaliknya, komunikasi yang tidak memperhatikan nilai moral dapat menimbulkan ketegangan dalam masyarakat karena masyarakat merasa diperlakukan secara tidak adil. Oleh karena itu, moralitas menjadi fondasi penting dalam membangun relasi sosial yang sehat antara pemimpin dan rakyat. Dalam kajian etika sosial, penghormatan terhadap martabat manusia merupakan prinsip utama dalam membangun hubungan sosial yang adil.[174]

Relasi antara kekuasaan dan relasi sosial juga menunjukkan bahwa komunikasi kepemimpinan harus mampu menjaga keseimbangan antara otoritas dan partisipasi masyarakat. Pemimpin memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, tetapi keputusan tersebut harus disampaikan melalui komunikasi yang melibatkan masyarakat. Komunikasi yang partisipatif akan memperkuat hubungan sosial karena masyarakat merasa dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Sebaliknya, komunikasi yang tertutup dapat menimbulkan ketidakpuasan masyarakat karena mereka merasa tidak memiliki peran dalam proses komunikasi publik. Dalam kajian komunikasi pemerintahan, partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam membangun hubungan yang sehat antara pemerintah dan masyarakat.[175]

Keterkaitan antara ketiga dimensi tersebut menunjukkan bahwa problem komunikasi kepemimpinan tidak dapat dijelaskan hanya dari satu perspektif saja. Kekuasaan, moralitas, dan relasi sosial saling mempengaruhi dalam menentukan kualitas komunikasi antara pemimpin dan masyarakat. Ketika salah satu dimensi mengalami ketidakseimbangan, maka komunikasi kepemimpinan akan mengalami gangguan yang dapat berdampak pada stabilitas sosial. Oleh karena itu, pendekatan integratif diperlukan untuk memahami dinamika komunikasi antara pemimpin dan rakyat secara lebih komprehensif. Dalam kajian kepemimpinan publik, integrasi antara kekuasaan dan etika komunikasi merupakan faktor penting dalam menciptakan pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.[176]

Selain itu, hubungan antara kekuasaan, moralitas, dan relasi sosial juga menunjukkan bahwa komunikasi kepemimpinan memiliki dimensi tanggung jawab sosial yang sangat besar. Pemimpin tidak hanya bertanggung jawab terhadap kebijakan yang diambil, tetapi juga terhadap cara kebijakan tersebut dikomunikasikan kepada masyarakat. Komunikasi yang tidak transparan dapat menimbulkan kesalahpahaman yang berpotensi memicu konflik sosial. Oleh karena itu, pemimpin harus mampu membangun komunikasi yang jelas dan terbuka agar masyarakat memahami tujuan dari kebijakan yang diambil.

---

[174] Bertens, *Etika*, Kanisius, 2016, hal. 244.

[175] Ndraha, *Kybernology: Ilmu Pemerintahan Baru*, Rineka Cipta, 2018, hal. 301.

[176] Dwiyanto, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, 2017, hal. 185.

Dalam kajian komunikasi publik, transparansi informasi merupakan faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.[177]

Relasi antara kekuasaan dan moralitas juga berkaitan erat dengan konsep legitimasi kepemimpinan. Legitimasi kepemimpinan tidak hanya bergantung pada kekuasaan formal yang dimiliki oleh seorang pemimpin, tetapi juga pada persepsi masyarakat terhadap integritas moral pemimpin tersebut. Ketika masyarakat merasa bahwa pemimpin menggunakan kekuasaan secara adil dan berkomunikasi secara jujur, maka legitimasi kepemimpinan akan semakin kuat. Sebaliknya, ketika masyarakat merasa bahwa komunikasi pemimpin tidak mencerminkan kejujuran, maka legitimasi kepemimpinan akan melemah. Dalam kajian politik modern, legitimasi kepemimpinan sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemimpin membangun komunikasi yang kredibel dengan masyarakat.[178]

Hubungan antara moralitas dan relasi sosial juga menunjukkan bahwa komunikasi kepemimpinan harus mampu membangun empati sosial dalam masyarakat. Empati sosial merupakan kemampuan untuk memahami perasaan dan kebutuhan orang lain dalam kehidupan sosial. Pemimpin yang memiliki empati sosial akan lebih mudah membangun komunikasi yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Sebaliknya, pemimpin yang tidak memiliki empati akan cenderung menggunakan komunikasi yang kaku dan tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat. Dalam kajian kepemimpinan humanistik, empati merupakan salah satu karakter penting yang harus dimiliki oleh pemimpin agar mampu membangun hubungan sosial yang kuat dengan masyarakat.[179]

Relasi antara ketiga dimensi tersebut juga menunjukkan bahwa komunikasi kepemimpinan harus mampu mengelola konflik sosial secara konstruktif. Konflik merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan masyarakat yang plural. Namun konflik tersebut dapat dikelola melalui komunikasi yang dialogis dan partisipatif. Pemimpin yang mampu memfasilitasi dialog antara kelompok masyarakat akan lebih mudah menciptakan perdamaian sosial. Dalam kajian resolusi konflik, komunikasi dialogis merupakan strategi penting dalam menyelesaikan konflik sosial dalam masyarakat.[180]

Dengan demikian, relasi antara kekuasaan, moralitas, dan relasi sosial menunjukkan bahwa komunikasi kepemimpinan merupakan fenomena yang kompleks dan multidimensional. Ketiga dimensi tersebut saling berkaitan

---

[177] Sutaryo, *Manajemen Komunikasi Pemerintahan*, Rajawali Pers, 2020, hal. 96.

[178] Miriam Budiardjo, *Pengantar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, 2017, hal. 198.

[179] Deddy Mulyadi, *Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan Pelayanan*, Alfabeta, 2016, hal. 213.

[180] Fisher, *Mengelola Konflik*, The British Council, 2017, hal. 71.

dalam membentuk kualitas komunikasi antara pemimpin dan masyarakat. Ketika ketiga dimensi tersebut berjalan secara seimbang, komunikasi kepemimpinan dapat menjadi sarana membangun hubungan sosial yang harmonis dan berkeadilan. Sebaliknya, ketika salah satu dimensi mengalami ketimpangan, maka komunikasi kepemimpinan dapat menimbulkan berbagai problem sosial yang mengganggu stabilitas masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap relasi antara kekuasaan, moralitas, dan relasi sosial menjadi penting dalam upaya membangun komunikasi kepemimpinan yang etis dan konstruktif dalam perspektif nilai-nilai Qur'ani.

2. Legitimasi kepemimpinan

Problematika komunikasi antara pemimpin dan rakyat memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap legitimasi kepemimpinan dalam kehidupan sosial masyarakat. Legitimasi kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh kekuasaan formal yang dimiliki oleh seorang pemimpin, tetapi juga oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap integritas komunikasi yang dilakukan oleh pemimpin tersebut. Dalam konteks kepemimpinan modern, komunikasi menjadi sarana utama bagi pemimpin untuk membangun hubungan dengan masyarakat serta menjelaskan arah kebijakan yang diambil. Ketika komunikasi dilakukan secara terbuka dan jujur, masyarakat akan lebih mudah memahami tujuan kebijakan yang diambil oleh pemimpin. Namun sebaliknya, ketika komunikasi dipenuhi oleh manipulasi informasi atau ketertutupan, masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap pemimpin yang berkuasa. Problem komunikasi dapat secara langsung mempengaruhi tingkat legitimasi kepemimpinan dalam masyarakat. Dalam kajian kepemimpinan publik, legitimasi kepemimpinan sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemimpin dalam membangun komunikasi yang transparan dengan masyarakat.[181]

Salah satu dampak utama dari problem komunikasi kepemimpinan adalah menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap pemimpin. Kepercayaan publik merupakan fondasi penting dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat karena tanpa adanya kepercayaan, kebijakan yang diambil oleh pemimpin akan sulit diterima oleh masyarakat. Ketika masyarakat merasa bahwa komunikasi yang disampaikan oleh pemimpin tidak mencerminkan kejujuran atau transparansi, maka kepercayaan tersebut akan perlahan-lahan memudar. Kondisi ini dapat menyebabkan munculnya sikap skeptis terhadap setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Dalam kajian komunikasi pemerintahan, kepercayaan publik sering kali dipandang sebagai

[181] Thoha, *Kepemimpinan dalam Manajemen*, Rajawali Pers, 2018, hal. 154.

indikator utama keberhasilan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.[182]

Selain menurunnya kepercayaan publik, problem komunikasi juga dapat menyebabkan melemahnya legitimasi moral seorang pemimpin di mata masyarakat. Legitimasi moral berkaitan dengan persepsi masyarakat terhadap integritas dan kejujuran pemimpin dalam menjalankan tugasnya. Ketika komunikasi yang dilakukan oleh pemimpin tidak mencerminkan nilai moral yang kuat, masyarakat akan meragukan komitmen pemimpin terhadap kepentingan publik. Kondisi ini dapat menimbulkan krisis legitimasi yang berdampak pada stabilitas politik dan sosial dalam masyarakat. Dalam kajian etika kepemimpinan, legitimasi moral merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan seorang pemimpin dalam mempertahankan dukungan masyarakat.[183]

Problem komunikasi juga dapat menyebabkan meningkatnya jarak sosial antara pemimpin dan masyarakat. Jarak sosial terjadi ketika masyarakat merasa bahwa pemimpin tidak memahami kebutuhan dan aspirasi mereka. Ketika komunikasi tidak memberikan ruang dialog bagi masyarakat, maka masyarakat akan merasa terasing dari proses pengambilan keputusan. Kondisi ini dapat memperburuk hubungan antara pemimpin dan rakyat karena masyarakat merasa bahwa kepentingan mereka tidak diperhatikan oleh pemerintah. Dalam kajian sosiologi politik, jarak sosial antara elite politik dan masyarakat sering kali menjadi penyebab utama munculnya ketidakpuasan publik terhadap pemerintah.[184]

Dampak lain dari problem komunikasi kepemimpinan adalah munculnya konflik sosial dalam masyarakat. Konflik sosial sering kali muncul ketika masyarakat merasa bahwa informasi yang disampaikan oleh pemerintah tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Ketika masyarakat tidak memperoleh informasi yang jelas mengenai kebijakan publik, mereka cenderung mengisi kekosongan informasi tersebut dengan berbagai spekulasi yang dapat memperburuk situasi sosial. Oleh karena itu, komunikasi yang transparan menjadi faktor penting dalam mencegah munculnya konflik sosial dalam masyarakat. Dalam kajian komunikasi konflik, ketidakjelasan informasi sering kali menjadi pemicu utama terjadinya konflik sosial.[185]

Selain itu, problem komunikasi juga dapat menyebabkan menurunnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik. Partisipasi masyarakat merupakan elemen penting dalam sistem pemerintahan yang demokratis karena masyarakat memiliki hak untuk terlibat dalam proses pengambilan

---

[182] Widodo, *Analisis Kebijakan Publik*, Bayu Media, 2017, hal. 89.

[183] Rivai, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, RajaGrafindo Persada, 2017, hal. 201.

[184] Santoso, *Sosiologi Politik*, Kencana, 2018, hal. 133.

[185] Wirawan, *Konflik dan Manajemen Konflik*, Salemba Humanika, 2016, hal. 72.

keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Namun ketika masyarakat merasa bahwa komunikasi antara pemimpin dan rakyat tidak berjalan secara terbuka, mereka akan cenderung menarik diri dari proses politik. Kondisi ini dapat melemahkan sistem demokrasi karena partisipasi masyarakat menjadi semakin rendah. Dalam kajian demokrasi partisipatif, komunikasi yang terbuka merupakan salah satu syarat penting bagi terciptanya partisipasi masyarakat dalam pemerintahan.[186]

Problem komunikasi juga dapat menyebabkan meningkatnya polarisasi sosial dalam masyarakat. Polarisasi terjadi ketika masyarakat terpecah menjadi kelompok-kelompok yang saling berlawanan akibat perbedaan pandangan yang tidak dikelola dengan baik. Ketika komunikasi politik digunakan untuk memperkuat identitas kelompok tertentu, maka masyarakat akan semakin terfragmentasi. Kondisi ini dapat melemahkan persatuan sosial dalam masyarakat karena kelompok-kelompok yang berbeda sulit menemukan titik temu dalam dialog publik. Dalam kajian komunikasi politik, polarisasi sosial sering kali dipicu oleh komunikasi politik yang bersifat provokatif.[187]

Dampak lain dari problem komunikasi kepemimpinan adalah munculnya krisis legitimasi politik dalam pemerintahan. Krisis legitimasi terjadi ketika masyarakat tidak lagi percaya bahwa pemimpin yang berkuasa memiliki hak moral untuk memerintah. Kondisi ini dapat terjadi ketika komunikasi pemerintah dianggap tidak jujur atau tidak transparan. Dalam situasi seperti ini, masyarakat akan mempertanyakan setiap kebijakan yang diambil oleh pemimpin karena mereka tidak lagi percaya pada integritas komunikasi pemerintah. Dalam kajian politik modern, krisis legitimasi sering kali menjadi pemicu utama perubahan politik dalam suatu negara.[188]

Selain itu, problem komunikasi juga dapat melemahkan efektivitas kebijakan publik. Kebijakan publik yang baik membutuhkan dukungan masyarakat agar dapat diimplementasikan secara efektif. Namun ketika komunikasi pemerintah tidak mampu menjelaskan tujuan kebijakan secara jelas kepada masyarakat, maka kebijakan tersebut akan sulit diterima oleh masyarakat. Kondisi ini dapat menyebabkan kegagalan dalam implementasi kebijakan publik. Dalam kajian administrasi publik, komunikasi yang efektif merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.[189]

Problem komunikasi juga dapat menyebabkan munculnya ketidakstabilan sosial dalam masyarakat. Ketidakstabilan sosial seringkali

---

[186] Huntington, *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, Pustaka Utama Grafiti, 2016, hal. 114.

[187] Gun Gun Heryanto, *Komunikasi Politik di Era Media Sosial*, IRCiSoD, 2019, hal. 176

[188] Hidayat, , *Politik Indonesia Kontemporer*, Yayasan Obor Indonesia, 2017, hal. 91.

[189] Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar, 2016, hal. 145.

muncul ketika masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap institusi politik yang ada. Ketika komunikasi pemerintah tidak mampu memberikan penjelasan yang memadai mengenai kebijakan publik, masyarakat akan merasa bahwa pemerintah tidak transparan dalam menjalankan kekuasaan. Kondisi ini dapat menimbulkan ketegangan sosial yang berpotensi memicu konflik dalam masyarakat.[190]

Dampak lain dari problem komunikasi kepemimpinan adalah melemahnya solidaritas sosial dalam masyarakat. Solidaritas sosial merupakan kondisi ketika masyarakat memiliki rasa kebersamaan dan saling percaya dalam kehidupan sosial. Ketika komunikasi antara pemimpin dan masyarakat tidak berjalan dengan baik, maka solidaritas sosial akan mengalami penurunan. Dalam kajian sosiologi komunikasi, solidaritas sosial sangat dipengaruhi oleh kualitas komunikasi yang terjadi dalam masyarakat.[191]

Selain itu, problem komunikasi juga dapat menyebabkan meningkatnya ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah. Ketidakpuasan publik sering kali muncul ketika masyarakat merasa bahwa pemimpin tidak memberikan informasi yang jelas mengenai kebijakan yang diambil. Ketika masyarakat tidak memahami tujuan dari kebijakan tersebut, mereka akan cenderung menolak kebijakan tersebut. Kondisi ini dapat memperburuk hubungan antara pemimpin dan masyarakat.[192]

Problem komunikasi juga dapat menyebabkan melemahnya legitimasi sosial pemimpin dalam masyarakat. Legitimasi sosial berkaitan dengan penerimaan masyarakat terhadap kepemimpinan seseorang. Ketika komunikasi pemimpin tidak mampu membangun hubungan yang baik dengan masyarakat, maka legitimasi sosial tersebut akan semakin melemah.[193]

Problem komunikasi antara pemimpin dan rakyat memiliki dampak yang sangat luas terhadap legitimasi kepemimpinan dalam masyarakat. Komunikasi yang buruk tidak hanya merusak hubungan antara pemimpin dan masyarakat, tetapi juga dapat memicu berbagai problem sosial seperti konflik, polarisasi, dan krisis legitimasi politik. Oleh karena itu, pemimpin harus mampu membangun komunikasi yang jujur, transparan, dan partisipatif agar legitimasi kepemimpinan dapat terjaga dengan baik dalam kehidupan masyarakat.

---

[190] Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Grasindo, 2017, hal. 208.

[191] Abdullah, I., *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*, Pustaka Pelajar, 2018, hal. 97.

[192] Prasojo, *Reformasi Birokrasi dan Good Governance*, Kompas, 2016, hal. 142.

[193] Hamdi, *Good Governance dan Reformasi Birokrasi*, UII Press, 2018, hal. 176.

BAB IV
ISYARAT QUR'ANI TENTANG KOMUNIKASI ANTARA PEMIMPIN DAN RAKYAT DALAM MEMBANGUN ETIKA DAN RELASI SOSIAL

Bab ini membahas isyarat-isyarat Qur'ani tentang komunikasi antara pemimpin dan rakyat dalam membangun etika dan relasi sosial dalam masyarakat. Pembahasan diawali dengan penjelasan bahwa komunikasi dalam perspektif Al-Qur'an tidak hanya dipahami sebagai proses penyampaian informasi, tetapi sebagai aktivitas sosial yang memiliki dimensi moral, tanggung jawab, dan nilai kemanusiaan. Bab ini juga menguraikan pendekatan tafsir tematik sebagai metode untuk menelusuri ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan komunikasi sosial. Melalui pendekatan tersebut, dilakukan klasifikasi istilah Qur'ani yang berkaitan dengan komunikasi (*qaul, lisan, kalam, risālah*), pemimpin (*khalīfah, imām, ulī al-amr*), serta rakyat (*qawm dan ummah*). Selanjutnya dijelaskan isyarat Qur'an tentang komunikasi melalui berbagai istilah seperti *qaul, lisan, kalam,* dan *risālah* yang menggambarkan proses penyampaian pesan dalam kehidupan manusia. Analisis juga dilengkapi dengan kisah-kisah Qur'ani tentang komunikasi para nabi dengan masyarakatnya yang menunjukkan pentingnya dialog, keteladanan, dan tanggung jawab moral dalam komunikasi kepemimpinan.

A. Kerangka Qur'ani tentang Komunikasi Pemimpin

1. Komunikasi dalam perspektif Al-Qur'an

Komunikasi dalam perspektif Al-Qur'an merupakan fondasi penting dalam membangun relasi sosial yang sehat antara pemimpin dan masyarakat. Al-Qur'an memandang komunikasi bukan sekadar proses penyampaian informasi, tetapi sebagai aktivitas sosial yang mengandung dimensi moral, etika, dan tanggung jawab. Dalam kehidupan masyarakat, komunikasi menjadi sarana utama yang menghubungkan individu dengan individu lainnya, sekaligus menjadi medium yang menghubungkan pemimpin dengan rakyat dalam proses pengelolaan kehidupan sosial. Oleh karena itu, kualitas komunikasi sangat menentukan kualitas hubungan sosial yang terbentuk dalam masyarakat. Ketika komunikasi dilakukan secara terbuka, jujur, dan berlandaskan nilai moral, maka hubungan antara pemimpin dan masyarakat akan berkembang secara harmonis. Sebaliknya, ketika komunikasi dipenuhi oleh manipulasi, dominasi kekuasaan, atau ketidakjujuran, maka hubungan sosial akan mengalami kerusakan. Dalam konteks ini, Al-Qur'an memberikan berbagai petunjuk mengenai bagaimana komunikasi seharusnya dijalankan agar mampu menjaga keseimbangan relasi sosial dalam masyarakat.[1]

Dalam perspektif Qur'ani, komunikasi merupakan bagian dari fitrah sosial manusia. Manusia diciptakan sebagai makhluk yang tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan interaksi dengan sesama dalam kehidupan sosial. Interaksi tersebut hanya dapat terwujud melalui komunikasi yang memungkinkan terjadinya pertukaran gagasan, nilai, dan pengalaman antar manusia. Oleh karena itu, komunikasi memiliki peran penting dalam membentuk struktur sosial masyarakat. Dalam kehidupan sosial, komunikasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian pesan, tetapi juga sebagai mekanisme pembentukan kesadaran kolektif yang memperkuat solidaritas sosial dalam masyarakat.[2]

Al-Qur'an secara eksplisit menggambarkan pentingnya komunikasi dalam membangun relasi sosial manusia melalui firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

"Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal." (QS. Al-Hujurat [49]: 13).

Ayat ini menunjukkan bahwa tujuan keberagaman manusia adalah agar mereka saling mengenal (*li ta'ārafū*), yang dalam praktik sosialnya hanya

---

[1] Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*, Remaja Rosdakarya, 2017, hal. 72

[2] Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktik*, Remaja Rosdakarya, 2018, hal. 55

dapat terwujud melalui komunikasi. Dalam tafsirnya, Ibn Katsir menjelaskan bahwa ayat ini menegaskan bahwa manusia diciptakan dalam berbagai kelompok sosial agar mereka saling berinteraksi dan membangun hubungan yang harmonis melalui komunikasi yang baik.[3]

Al-Qurṭubi dalam tafsirnya menambahkan bahwa makna *li ta'ārafū* tidak hanya sekadar saling mengetahui identitas, tetapi juga mencakup proses memahami, menghormati, dan membangun hubungan sosial yang harmonis antar manusia. Menurutnya, komunikasi yang baik merupakan sarana penting untuk menciptakan ketertiban sosial dalam masyarakat yang beragam.[4] Penjelasan ini menunjukkan bahwa komunikasi dalam perspektif Qur'ani memiliki fungsi sosial yang sangat penting dalam menjaga stabilitas kehidupan masyarakat.

Dalam tafsir kontemporer, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat tersebut menegaskan pentingnya komunikasi sebagai sarana membangun hubungan sosial yang didasarkan pada saling pengertian dan penghormatan terhadap perbedaan. Menurutnya, komunikasi yang baik akan memperkuat persatuan sosial karena melalui komunikasi manusia dapat memahami perspektif orang lain serta membangun kerja sama dalam kehidupan masyarakat.[5]

Dalam konteks kepemimpinan, komunikasi memiliki peran yang sangat penting dalam membangun hubungan antara pemimpin dan masyarakat. Kepemimpinan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan mengelola kekuasaan, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan membangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat. Pemimpin yang mampu berkomunikasi dengan baik akan lebih mudah memperoleh kepercayaan masyarakat karena komunikasi yang terbuka menciptakan rasa keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.[6]

Komunikasi dalam kepemimpinan juga berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan nilai, visi, dan arah kebijakan kepada masyarakat. Tanpa komunikasi yang jelas, masyarakat akan kesulitan memahami tujuan dari kebijakan yang diambil oleh pemimpin. Kondisi ini dapat menimbulkan kesalahpahaman antara pemimpin dan masyarakat yang pada akhirnya dapat melemahkan hubungan sosial antara keduanya. Oleh karena itu, komunikasi yang efektif menjadi salah satu elemen penting dalam membangun kepemimpinan yang kuat dalam masyarakat.[7]

---

[3] Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Dar Tayyibah, 2002, jilid 7, hal. 364

[4] Al-Qurṭubi, *Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*, Muassasah al-Risalah, 2016, jilid 16, hal. 342

[5] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Lentera Hati, 2017, jilid 13, hal. 287

[6] Siagian, *Teori dan Praktik Kepemimpinan*, Rineka Cipta, 2016, hal. 109

[7] Northouse, *Leadership: Theory and Practice*, Sage Publications, 2019, hal. 214

Dalam perspektif komunikasi sosial, hubungan antara pemimpin dan rakyat merupakan bentuk komunikasi publik yang memiliki pengaruh besar terhadap stabilitas masyarakat. Komunikasi publik memungkinkan terjadinya pertukaran informasi antara pemerintah dan masyarakat sehingga masyarakat dapat memahami kebijakan yang diambil oleh pemimpin. Ketika komunikasi publik berjalan secara transparan, masyarakat akan lebih mudah menerima kebijakan yang diambil oleh pemerintah.[8]

Al-Qur'an juga menekankan pentingnya komunikasi yang berlandaskan pada prinsip musyawarah dalam kehidupan sosial. Prinsip ini tercermin dalam firman Allah:

وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

"Urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka." (QS. Asy-Syura [42]: 38).

Ayat ini menunjukkan bahwa komunikasi dalam masyarakat Qur'ani bersifat dialogis dan partisipatif. Musyawarah merupakan bentuk komunikasi kolektif yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Dalam tafsirnya, Ibn 'Ashur menjelaskan bahwa konsep musyawarah dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam Islam tidak bersifat otoriter, tetapi bersifat partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam proses sosial.[9]

Komunikasi yang dialogis juga memungkinkan terjadinya proses pembelajaran sosial dalam masyarakat. Melalui komunikasi, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi mereka kepada pemimpin sekaligus memperoleh pemahaman mengenai berbagai persoalan sosial yang mereka hadapi. Dalam kajian komunikasi sosial, dialog merupakan salah satu mekanisme penting dalam menciptakan masyarakat yang demokratis dan partisipatif.[10]

Selain itu, komunikasi juga memiliki peran penting dalam membangun legitimasi kepemimpinan dalam masyarakat. Legitimasi kepemimpinan tidak hanya bergantung pada kekuasaan formal yang dimiliki oleh pemimpin, tetapi juga bergantung pada kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin tersebut. Komunikasi yang jujur dan transparan dapat memperkuat legitimasi kepemimpinan karena masyarakat merasa bahwa pemimpin mereka bertindak secara terbuka dan bertanggung jawab.[11]

Dalam konteks masyarakat modern, komunikasi kepemimpinan menjadi semakin kompleks karena perkembangan teknologi informasi telah mengubah

---

[8] Stephen Littlejohn, & Foss, K., *Theories of Human Communication*, Waveland Press, 2018, hal. 189

[9] Ibn 'Ashur, *Al-Tahrir wa al-Tanwir*, Dar al-Tunisiyyah, 2016, jilid 25, hal. 74

[10] Jurgen Habermas, *The Theory of Communicative Action*, Beacon Press, 2015, hal. 287

[11] Yukl, , *Leadership in Organizations*, Pearson, 2018, hal. 321

cara masyarakat memperoleh informasi. Media digital memungkinkan masyarakat untuk memperoleh informasi dari berbagai sumber sehingga komunikasi antara pemimpin dan rakyat tidak lagi bersifat satu arah. Oleh karena itu, pemimpin dituntut untuk mampu membangun komunikasi yang lebih terbuka dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.[12]

Dengan demikian, komunikasi dalam perspektif Al-Qur'an merupakan fondasi penting dalam membangun relasi sosial antara pemimpin dan masyarakat. Al-Qur'an tidak hanya menekankan pentingnya komunikasi sebagai sarana interaksi sosial, tetapi juga memberikan prinsip-prinsip moral yang harus menjadi dasar dalam setiap komunikasi sosial. Ketika komunikasi dilakukan secara jujur, dialogis, dan berlandaskan nilai keadilan, maka hubungan antara pemimpin dan rakyat akan terbangun secara harmonis. Sebaliknya, ketika komunikasi dipenuhi oleh manipulasi dan dominasi kekuasaan, maka hubungan sosial antara pemimpin dan masyarakat akan mengalami kerusakan yang dapat mengancam stabilitas kehidupan sosial.

2. Tanggung Jawab Moral Pemimpin

Etika komunikasi dalam perspektif Al-Qur'an merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanggung jawab moral seorang pemimpin dalam menjalankan amanah kepemimpinan. Dalam kerangka Qur'ani, komunikasi tidak hanya dipahami sebagai aktivitas menyampaikan pesan kepada masyarakat, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban moral yang berkaitan dengan nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Seorang pemimpin tidak hanya dituntut mampu menyampaikan kebijakan kepada masyarakat, tetapi juga harus memastikan bahwa komunikasi yang dilakukan mencerminkan nilai-nilai moral yang diajarkan dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, komunikasi dalam kepemimpinan Qur'ani memiliki dimensi etis yang sangat kuat karena setiap ucapan yang disampaikan kepada masyarakat dipandang sebagai bagian dari amanah yang harus dipertanggungjawabkan secara moral.[13]

Dalam perspektif kepemimpinan Islam, komunikasi yang etis merupakan salah satu indikator utama dari integritas moral seorang pemimpin. Integritas komunikasi terlihat dari kesesuaian antara ucapan dan tindakan yang dilakukan oleh pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya. Ketika komunikasi yang disampaikan oleh pemimpin mencerminkan kebenaran dan kejujuran, masyarakat akan lebih mudah mempercayai kepemimpinan tersebut. Sebaliknya, ketika komunikasi dipenuhi oleh manipulasi atau ketidakjujuran, maka hubungan antara pemimpin dan masyarakat akan

[12] McQuail, *Mass Communication Theory*, Sage Publications, 2019, hal. 93
[13] Anwar rifin, A., *Etika Komunikasi Islam*, Pustaka Setia, 2019, hal. 84

mengalami kerusakan. Oleh karena itu, etika komunikasi menjadi elemen penting dalam membangun kepercayaan sosial antara pemimpin dan rakyat.[14]

Al-Qur'an memberikan pedoman yang jelas mengenai pentingnya komunikasi yang jujur dan bertanggung jawab dalam kehidupan sosial melalui firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

"Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar." (QS. Al-Ahzab [33]: 70).

Ayat ini menegaskan bahwa komunikasi yang benar (*qaulan sadīdan*) merupakan bagian dari ketakwaan kepada Allah. Dalam konteks kepemimpinan, ayat ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin harus menyampaikan informasi kepada masyarakat secara jujur dan tidak menyesatkan. Komunikasi yang jujur akan memperkuat hubungan kepercayaan antara pemimpin dan masyarakat.

Dalam tafsirnya, Ibn Katsir menjelaskan bahwa makna *qaulan sadīdan* adalah perkataan yang lurus, benar, dan tidak mengandung kebohongan. Menurutnya, ayat ini mengajarkan bahwa setiap ucapan manusia harus mencerminkan kejujuran karena ucapan yang tidak benar dapat menimbulkan kerusakan dalam kehidupan sosial.[15]

Al-Qurṭubi menambahkan bahwa ayat tersebut juga mengandung pesan moral bahwa komunikasi harus menjadi sarana untuk memperbaiki kehidupan sosial masyarakat. Menurutnya, perkataan yang benar tidak hanya berkaitan dengan kejujuran secara literal, tetapi juga berkaitan dengan niat untuk menyampaikan sesuatu yang membawa kebaikan bagi masyarakat.[16]

Dalam tafsir kontemporer, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa konsep *qaulan sadīdan* mencerminkan pentingnya integritas dalam komunikasi sosial. Menurutnya, komunikasi yang benar bukan hanya sekadar tidak berdusta, tetapi juga harus mengandung tanggung jawab moral untuk menyampaikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat.[17]

Selain Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW juga menegaskan pentingnya etika komunikasi dalam kehidupan sosial.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ» (رواه البخاري ومسلم)[18]

---

[14] S. Nasution, *Etika Komunikasi dalam Perspektif Islam*, Prenadamedia Group, 2017, hal. 121

[15] Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Dar Tayyibah, 2002, jilid 6, hal. 410

[16] Al-Qurṭubi, *Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*, Muassasah al-Risalah, 2016, jilid 14, hal. 215

[17] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Lentera Hati, 2017, jilid 11, hal. 302

[18] Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Adab, Bāb man kāna yu'minu billāh wa al-yawm al-ākhir falā yu'dzi jārahu, no. 6018; Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ*

Dari Abū Hurairah r.a., dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda: 'Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam.'" (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menegaskan bahwa komunikasi dalam Islam memiliki dimensi keimanan. Ucapan tidak dipandang sebagai tindakan netral, tetapi sebagai ekspresi moral yang berkaitan dengan tanggung jawab manusia di hadapan Allah SWT. Dalam konteks komunikasi pemimpin dan rakyat, hadis ini memberikan prinsip bahwa setiap pernyataan publik harus diarahkan kepada kebaikan, kejujuran, dan kemaslahatan. Apabila suatu ucapan justru menimbulkan kegaduhan, manipulasi, fitnah, atau kerusakan sosial, maka diam menjadi pilihan etis yang lebih selamat daripada berbicara tanpa tanggung jawab.

Dalam kajian komunikasi sosial, etika komunikasi memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan hubungan sosial dalam masyarakat. Komunikasi yang etis memungkinkan terciptanya hubungan yang saling menghormati antara individu maupun kelompok dalam masyarakat. Ketika komunikasi dijalankan dengan penuh tanggung jawab moral, maka konflik sosial dapat diminimalkan karena setiap pihak merasa dihargai dalam proses komunikasi.[19]

Etika komunikasi dalam kepemimpinan juga berkaitan erat dengan prinsip amanah yang menjadi dasar dalam kepemimpinan Islam. Amanah berarti bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh seorang pemimpin harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab terhadap masyarakat. Oleh karena itu, komunikasi yang dilakukan oleh pemimpin harus mencerminkan integritas dan tanggung jawab moral karena setiap informasi yang disampaikan kepada masyarakat merupakan bagian dari amanah kepemimpinan.[20]

Selain itu, komunikasi yang etis juga dapat memperkuat partisipasi masyarakat dalam kehidupan sosial. Ketika pemimpin membangun komunikasi yang terbuka dan menghargai aspirasi masyarakat, maka masyarakat akan merasa dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Kondisi ini akan memperkuat hubungan antara pemimpin dan rakyat karena masyarakat merasa bahwa suara mereka dihargai dalam kehidupan sosial.[21]

Dalam konteks kepemimpinan modern, komunikasi yang berlandaskan etika juga menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan publik

---

Muslim, Kitāb al-Īmān, Bāb al-Ḥatstsi 'alā Ikrām al-Jār wa al-Ḍaif wa Luzūm aṣ-Ṣamt illā 'an al-Khair, no. 47.

[19] Stephen Littlejohn, S., & Karen A Foss, *Theories of Human Communication*, Waveland Press, 2018, hal. 245

[20] Azyumardi Azra, *Etika Politik Islam*, Prenada Media, 2018, hal. 212

[21] Kartajaya, *Citizen 4.0: Menjejakkan Prinsip Good Governance*, Gramedia Pustaka Utama, 2019, hal. 158

terhadap pemimpin. Kepercayaan publik merupakan elemen penting dalam menjaga stabilitas sosial dalam masyarakat karena masyarakat cenderung mendukung pemimpin yang dianggap memiliki integritas moral dalam komunikasi mereka.[22]

Dengan demikian, etika komunikasi dalam perspektif Al-Qur'an tidak hanya menjadi pedoman moral bagi individu, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam kepemimpinan sosial. Seorang pemimpin yang menjalankan komunikasi secara jujur, bertanggung jawab, dan berlandaskan nilai moral akan mampu membangun hubungan yang kuat dengan masyarakat. Sebaliknya, komunikasi yang tidak etis akan merusak kepercayaan sosial dan melemahkan legitimasi kepemimpinan dalam kehidupan masyarakat.

3. Pendekatan Tafsir Tematik

Pendekatan tafsir tematik (*tafsir maudhu'i*) merupakan salah satu metode penting dalam kajian Al-Qur'an yang digunakan untuk menelusuri konsep-konsep tertentu secara komprehensif berdasarkan tema tertentu. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan tafsir tematik digunakan untuk mengidentifikasi berbagai istilah Qur'ani yang berkaitan dengan komunikasi sosial dalam relasi antara pemimpin dan rakyat. Metode ini memungkinkan peneliti mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki keterkaitan dengan satu tema tertentu, kemudian dianalisis secara sistematis untuk menemukan makna konseptual yang terkandung di dalamnya. Dengan pendekatan ini, konsep komunikasi dalam Al-Qur'an tidak dipahami secara parsial dari satu ayat saja, tetapi dipahami secara menyeluruh melalui keterkaitan berbagai ayat yang memiliki tema yang sama. Oleh karena itu, tafsir tematik menjadi pendekatan yang relevan dalam penelitian tentang komunikasi kepemimpinan dalam perspektif Al-Qur'an karena memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap nilai-nilai Qur'ani yang berkaitan dengan komunikasi sosial.[23]

Dalam kajian ilmu tafsir, pendekatan tematik berkembang sebagai respons terhadap kebutuhan untuk memahami Al-Qur'an secara kontekstual terhadap berbagai persoalan sosial yang dihadapi oleh masyarakat. Berbeda dengan tafsir *tahlili* yang menafsirkan ayat demi ayat secara berurutan sesuai dengan susunan mushaf, tafsir tematik mengkaji Al-Qur'an dengan cara mengumpulkan seluruh ayat yang berkaitan dengan suatu tema tertentu kemudian dianalisis secara integratif. Dengan metode ini, peneliti dapat memperoleh gambaran konseptual yang lebih utuh mengenai suatu konsep dalam Al-Qur'an, termasuk konsep komunikasi sosial dalam relasi

[22] Rivai, & Deddy Mulyadi, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, RajaGrafindo Persada, 2018, hal. 327

[23] Abdul Hayy Al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i*, RajaGrafindo Persada, 2016, hal. 45

kepemimpinan. Oleh karena itu, tafsir tematik menjadi metode yang sangat efektif untuk memahami bagaimana Al-Qur'an memandang komunikasi sebagai bagian dari kehidupan sosial manusia.[24]

Pendekatan tematik dalam kajian Al-Qur'an pada dasarnya bertujuan untuk menggali pesan-pesan universal yang terkandung dalam Al-Qur'an melalui analisis tematik terhadap ayat-ayat yang relevan. Dalam konteks komunikasi sosial, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menelusuri berbagai istilah Qur'ani yang berkaitan dengan komunikasi seperti *qaul*, *lisan*, *kalam*, dan *risalah*. Istilah-istilah tersebut tidak hanya menunjukkan bentuk komunikasi secara linguistik, tetapi juga menggambarkan dimensi etis dan sosial dari komunikasi dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, melalui pendekatan tafsir tematik, konsep komunikasi dalam Al-Qur'an dapat dipahami sebagai sistem nilai yang memiliki implikasi sosial yang luas dalam kehidupan masyarakat.[25]

Al-Qur'an sendiri menunjukkan bahwa komunikasi merupakan bagian dari sistem penyampaian pesan yang memiliki peran penting dalam membimbing manusia menuju kehidupan yang benar. Hal ini terlihat dalam konsep penyampaian wahyu yang dilakukan oleh para nabi kepada masyarakat mereka. Allah berfirman:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ

"Dan Kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya agar ia dapat menjelaskan kepada mereka." (QS. Ibrahim [14]: 4).

Ayat ini menunjukkan bahwa komunikasi dalam penyampaian risalah ilahi harus dilakukan dengan menggunakan bahasa yang dapat dipahami oleh masyarakat. Dalam tafsirnya, Ibn Katsir menjelaskan bahwa ayat ini menegaskan pentingnya kesesuaian bahasa dan konteks sosial dalam proses komunikasi agar pesan yang disampaikan dapat dipahami secara jelas oleh masyarakat.[26]

Al-Qurṭubi juga menjelaskan bahwa penggunaan bahasa kaumnya dalam penyampaian risalah menunjukkan bahwa komunikasi harus memperhatikan konteks sosial dan budaya masyarakat yang menjadi sasaran komunikasi. Menurutnya, pesan yang disampaikan dengan bahasa yang sesuai dengan konteks sosial masyarakat akan lebih mudah dipahami dan diterima oleh masyarakat.[27]

---

[24] M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, Mizan, 2013, hal. 114

[25] Rohimin, *Metodologi Ilmu Tafsir dan Aplikasi Model Penafsiran*, Pustaka Pelajar, 2017, hal. 96

[26] Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Dar Tayyibah, 2002, jilid 4, hal. 475

[27] Al-Qurṭubi, *Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*, Muassasah al-Risalah, 2016, jilid 9, hal. 331

Dalam tafsir kontemporer, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat tersebut mengandung prinsip komunikasi yang sangat penting dalam kehidupan sosial, yaitu bahwa komunikasi harus mempertimbangkan latar belakang sosial, budaya, dan intelektual masyarakat yang menjadi penerima pesan. Menurutnya, komunikasi yang tidak mempertimbangkan konteks sosial masyarakat berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dalam penyampaian pesan.[28]

Pendekatan tafsir tematik dalam kajian komunikasi Qur'ani juga menuntut adanya analisis terhadap konteks turunnya ayat serta hubungan antar ayat yang memiliki tema yang sama. Hal ini penting karena setiap ayat dalam Al-Qur'an memiliki konteks historis yang dapat membantu memahami makna yang terkandung dalam ayat tersebut. Dengan memahami konteks tersebut, peneliti dapat menghindari pemahaman yang parsial terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan komunikasi sosial.[29]

Selain itu, pendekatan tematik juga memungkinkan integrasi antara kajian tafsir klasik dan tafsir kontemporer dalam memahami konsep komunikasi dalam Al-Qur'an. Tafsir klasik memberikan penjelasan mengenai makna linguistik dan konteks historis dari ayat-ayat Al-Qur'an, sementara tafsir kontemporer memberikan perspektif baru yang relevan dengan perkembangan kehidupan sosial modern. Integrasi kedua pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap konsep komunikasi sosial dalam Al-Qur'an.[30]

Dalam kajian komunikasi Islam, pendekatan tematik juga dapat membantu mengidentifikasi prinsip-prinsip etika komunikasi yang terkandung dalam Al-Qur'an. Prinsip-prinsip tersebut meliputi kejujuran dalam komunikasi, tanggung jawab moral dalam penyampaian pesan, serta penghormatan terhadap martabat manusia dalam interaksi sosial. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan penting dalam membangun komunikasi yang etis dalam kehidupan masyarakat.[31]

Pendekatan tafsir tematik juga memungkinkan pengelompokan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan komunikasi berdasarkan kategori tertentu, seperti komunikasi antara manusia dengan Tuhan, komunikasi antara manusia dengan sesama, serta komunikasi dalam konteks kepemimpinan sosial. Pengelompokan ini membantu peneliti memahami bagaimana Al-Qur'an mengatur berbagai bentuk komunikasi dalam kehidupan manusia secara sistematis.[32]

---

[28] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Lentera Hati, 2017, jilid 7, hal. 19

[29] Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*, Idea Press, 2014, hal. 136

[30] Abdullah, *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas*, Pustaka Pelajar, 2015, hal. 211

[31] Hidayatullah, *Etika Komunikasi dalam Islam*, Rajawali Pers, 2020, hal. 63

[32] Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, Pustaka Pelajar, 2011, hal. 147

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan tafsir tematik digunakan untuk menelusuri berbagai istilah Qur'ani yang berkaitan dengan komunikasi sosial dalam relasi kepemimpinan. Istilah-istilah tersebut kemudian dianalisis secara konseptual untuk memahami bagaimana Al-Qur'an menggambarkan hubungan komunikasi antara pemimpin dan rakyat dalam kehidupan sosial masyarakat.

Pendekatan tafsir tematik memberikan kerangka metodologis yang kuat dalam menelusuri konsep komunikasi sosial dalam Al-Qur'an. Melalui pendekatan ini, nilai-nilai Qur'ani yang berkaitan dengan komunikasi dapat dipahami secara komprehensif dan sistematis sehingga dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan kajian komunikasi kepemimpinan dalam perspektif Islam.

4. Klasifikasi term Qur'ani

Klasifikasi term Qur'ani yang berkaitan dengan komunikasi, pemimpin, dan masyarakat merupakan langkah penting dalam memahami kerangka konseptual komunikasi sosial dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an tidak selalu menggunakan satu istilah tunggal untuk menggambarkan komunikasi sosial, melainkan menggunakan berbagai istilah yang memiliki nuansa makna yang berbeda sesuai dengan konteks ayatnya. Oleh karena itu, pendekatan tematik dalam kajian Al-Qur'an menuntut adanya klasifikasi istilah-istilah tersebut agar dapat dipahami secara sistematis. Dalam konteks relasi kepemimpinan, istilah Qur'ani yang berkaitan dengan komunikasi, kepemimpinan, dan masyarakat dapat dianalisis sebagai satu kesatuan konseptual yang menggambarkan dinamika hubungan antara pemimpin dan rakyat dalam kehidupan sosial. Melalui klasifikasi ini, peneliti dapat melihat bagaimana Al-Qur'an membangun kerangka komunikasi sosial yang melibatkan tiga unsur utama, yaitu komunikator (pemimpin), pesan atau proses komunikasi, serta komunikan (masyarakat) dalam suatu struktur sosial yang berlandaskan nilai moral.[33]

Dalam perspektif tafsir tematik, klasifikasi istilah Qur'ani sangat penting karena setiap istilah dalam Al-Qur'an memiliki konteks makna yang berbeda meskipun berkaitan dengan tema yang sama. Oleh karena itu, penelusuran istilah Qur'ani harus dilakukan secara sistematis dengan memperhatikan frekuensi penggunaan kata, konteks ayat, serta hubungan semantik antar istilah tersebut dalam keseluruhan struktur Al-Qur'an. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana Al-Qur'an membangun konsep tertentu melalui berbagai istilah yang saling melengkapi. Dalam kajian komunikasi sosial, klasifikasi istilah Qur'ani membantu mengidentifikasi berbagai bentuk

[33] Rohimin, *Metodologi Ilmu Tafsir dan Aplikasi Model Penafsiran*, Pustaka Pelajar, 2017, hal. 124

komunikasi yang terdapat dalam Al-Qur'an, baik komunikasi yang bersifat *inter* personal, sosial, maupun komunikasi kepemimpinan dalam masyarakat.[34]

Al-Qur'an sendiri menunjukkan bahwa komunikasi merupakan bagian dari sistem sosial manusia yang melibatkan berbagai aktor dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan berbagai istilah yang berkaitan dengan proses komunikasi dalam Al-Qur'an, seperti *qaul*, *lisan*, *kalam*, dan *risālah*. Istilah-istilah tersebut menggambarkan berbagai aspek komunikasi, mulai dari ucapan sebagai bentuk ekspresi verbal, bahasa sebagai instrumen komunikasi, hingga penyampaian pesan yang memiliki dimensi sosial dan religius. Dengan demikian, konsep komunikasi dalam Al-Qur'an tidak hanya berkaitan dengan penyampaian informasi, tetapi juga berkaitan dengan penyampaian nilai, nasihat, dan bimbingan moral dalam kehidupan manusia.[35]

Selain istilah yang berkaitan dengan komunikasi, Al-Qur'an juga menggunakan berbagai istilah untuk menggambarkan konsep kepemimpinan dalam kehidupan sosial. Istilah seperti *khalīfah*, *imām*, dan *ulī al-amr* menunjukkan berbagai bentuk otoritas kepemimpinan yang memiliki fungsi sosial dalam masyarakat. Masing-masing istilah tersebut memiliki nuansa makna yang berbeda, tetapi semuanya berkaitan dengan tanggung jawab moral seorang pemimpin dalam mengelola kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, dalam kerangka komunikasi kepemimpinan, pemimpin dipahami sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan pesan, kebijakan, serta nilai-nilai moral kepada masyarakat melalui komunikasi yang adil dan bertanggung jawab.[36]

Di sisi lain, Al-Qur'an juga menggunakan berbagai istilah untuk menggambarkan masyarakat sebagai subjek sosial dalam kehidupan kolektif. Istilah seperti *qawm*, *ummah*, dan *an-nās* menunjukkan berbagai bentuk komunitas sosial yang menjadi bagian dari kehidupan manusia. Istilah *qawm* sering digunakan untuk menggambarkan komunitas sosial yang memiliki ikatan kultural tertentu, sedangkan istilah *ummah* menunjukkan komunitas yang memiliki kesatuan nilai moral dan spiritual. Adapun istilah *an-nās* menggambarkan manusia secara universal sebagai bagian dari masyarakat luas. Klasifikasi istilah ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an memiliki pandangan yang komprehensif mengenai struktur sosial masyarakat.[37]

Al-Qur'an juga memberikan gambaran mengenai hubungan antara pemimpin dan masyarakat dalam kehidupan sosial melalui berbagai ayat yang menekankan pentingnya keadilan dan tanggung jawab dalam kepemimpinan. Allah berfirman:

---

[34] Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, Pustaka Pelajar, 2011, hal. 152
[35] Hidayatullah, *Etika Komunikasi dalam Islam*, Rajawali Pers, 2020, hal. 88
[36] Azyumardi Azra, *Etika Politik Islam*, Prenada Media, 2018, hal. 174
[37] M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, Mizan, 2013, hal. 132

إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya." (QS. An-Nisa' [4]: 58).

Ayat ini menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam Islam merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Dalam tafsirnya, Ibn Katsir menjelaskan bahwa ayat ini menjadi dasar penting dalam memahami prinsip kepemimpinan dalam Islam, yaitu bahwa kekuasaan harus dijalankan dengan adil serta disertai tanggung jawab moral terhadap masyarakat.[38]

Al-Qurṭubi menjelaskan bahwa ayat tersebut tidak hanya berkaitan dengan amanah dalam bentuk materi, tetapi juga mencakup amanah kepemimpinan yang harus dijalankan dengan penuh keadilan. Menurutnya, pemimpin memiliki tanggung jawab untuk menjaga hak-hak masyarakat serta memastikan bahwa kekuasaan digunakan untuk kepentingan masyarakat secara luas.[39]

Dalam tafsir kontemporer, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari prinsip amanah dan tanggung jawab sosial. Menurutnya, pemimpin yang menjalankan amanah secara adil akan mampu membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat karena masyarakat merasa bahwa kepentingan mereka dilindungi oleh pemimpin.[40]

Dalam kajian komunikasi sosial, hubungan antara pemimpin dan masyarakat dapat dipahami sebagai proses komunikasi sosial yang melibatkan pertukaran informasi, nilai, dan aspirasi antara kedua pihak. Komunikasi tersebut tidak hanya berlangsung secara satu arah dari pemimpin kepada masyarakat, tetapi juga berlangsung secara timbal balik melalui proses dialog sosial yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada pemimpin.[41]

Klasifikasi istilah Qur'ani yang berkaitan dengan komunikasi, kepemimpinan, dan masyarakat juga menunjukkan bahwa Al-Qur'an memandang komunikasi sebagai bagian dari sistem sosial yang lebih luas. Komunikasi tidak hanya berkaitan dengan pertukaran pesan, tetapi juga berkaitan dengan pembentukan hubungan sosial yang didasarkan pada nilai moral dan keadilan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap istilah-istilah

---

[38] Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Dar Tayyibah, 2002, jilid 2, hal. 345

[39] Al-Qurṭubi, *Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*, Muassasah al-Risalah, 2016, jilid 5, hal. 259

[40] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Lentera Hati, 2017, jilid 2, hal. 515

[41] Stephen Littlejohn & Karen A Foss, *Theories of Human Communication*, Waveland Press, 2018, hal. 276

Qur'ani tersebut sangat penting dalam membangun kerangka konseptual mengenai komunikasi kepemimpinan dalam perspektif Al-Qur'an.

Dalam konteks penelitian ini, klasifikasi istilah Qur'ani tersebut menjadi dasar analisis untuk memahami bagaimana Al-Qur'an menggambarkan hubungan komunikasi antara pemimpin dan masyarakat dalam kehidupan sosial. Dengan mengidentifikasi berbagai istilah yang berkaitan dengan komunikasi, kepemimpinan, dan masyarakat, penelitian ini berupaya membangun pemahaman yang lebih sistematis mengenai konsep komunikasi kepemimpinan dalam perspektif Qur'ani.

Dengan demikian, klasifikasi istilah Qur'ani yang berkaitan dengan komunikasi, pemimpin, dan masyarakat memberikan landasan konseptual yang penting dalam kajian komunikasi kepemimpinan dalam Al-Qur'an. Melalui klasifikasi ini, dapat dipahami bahwa komunikasi dalam perspektif Qur'ani tidak hanya berkaitan dengan penyampaian pesan, tetapi juga berkaitan dengan pembentukan hubungan sosial yang berlandaskan nilai moral, keadilan, dan tanggung jawab dalam kehidupan masyarakat.

B. Isyarat Qur'an tentang Komunikasi

1. *Qaul* (قول) - Konsep Dasar Komunikasi

Istilah qaul (قول) merupakan salah satu konsep paling mendasar dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan aktivitas komunikasi manusia. Secara umum, kata *qaul* berarti ucapan, perkataan, atau pernyataan yang disampaikan oleh seseorang kepada pihak lain. Dalam Al-Qur'an, istilah ini digunakan dalam berbagai konteks yang menunjukkan proses penyampaian pesan antara individu maupun kelompok dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, *qaul* dapat dipahami sebagai bentuk dasar komunikasi verbal yang menjadi sarana utama dalam pertukaran gagasan, informasi, serta nilai moral dalam masyarakat. Dalam kajian komunikasi Qur'ani, istilah ini memiliki posisi yang sangat penting karena hampir seluruh bentuk interaksi verbal dalam Al-Qur'an diekspresikan melalui kata *qaul*. Dengan demikian, konsep *qaul* dapat dipandang sebagai landasan konseptual dalam memahami komunikasi manusia dalam perspektif Al-Qur'an.[42]

Secara linguistik, kata *qaul* berasal dari akar kata قال – يقول – قولًا yang secara etimologis berarti mengatakan atau menyampaikan sesuatu melalui ucapan. Dalam kajian semantik Al-Qur'an, kata ini memiliki makna yang luas karena tidak hanya merujuk pada ucapan secara literal, tetapi juga mencakup berbagai bentuk ekspresi komunikasi manusia yang disampaikan melalui bahasa. Raghib al-Asfahani menjelaskan bahwa *qaul* adalah setiap ungkapan yang diucapkan oleh manusia untuk menyampaikan maksud tertentu kepada

[42] Izutsu, *Ethico-Religious Concepts in the Qur'an*, McGill University Press, 2002, hal. 214

orang lain, baik dalam bentuk pernyataan, nasihat, perintah, maupun larangan. Dengan demikian, *qaul* tidak hanya menunjukkan aktivitas berbicara, tetapi juga menunjukkan fungsi komunikasi sebagai sarana penyampaian makna dalam interaksi sosial manusia.[43]

Dalam Al-Qur'an, kata *qaul* digunakan dalam berbagai konteks yang menunjukkan dinamika komunikasi dalam kehidupan manusia. Penggunaan kata ini mencakup komunikasi antara manusia dengan manusia, komunikasi antara nabi dengan umatnya, bahkan komunikasi antara manusia dengan Tuhan dalam bentuk doa dan ibadah. Hal ini menunjukkan bahwa konsep komunikasi dalam Al-Qur'an memiliki dimensi yang sangat luas karena mencakup berbagai bentuk interaksi yang terjadi dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, analisis terhadap istilah *qaul* sangat penting untuk memahami bagaimana Al-Qur'an memandang komunikasi sebagai bagian dari struktur kehidupan sosial manusia.[44]

Salah satu ayat yang menunjukkan pentingnya konsep *qaul* dalam komunikasi sosial adalah firman Allah:

وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا

"Dan ucapkanlah kepada manusia perkataan yang baik." (QS. Al-Baqarah [2]: 83).

Ayat ini menegaskan bahwa komunikasi dalam kehidupan sosial harus dilakukan dengan perkataan yang baik (*husnan*). Dalam tafsirnya, Ibn Katsir menjelaskan bahwa ayat ini memerintahkan manusia untuk berbicara kepada sesama dengan kata-kata yang lembut, sopan, dan penuh penghormatan agar hubungan sosial dalam masyarakat dapat terjaga dengan baik.[45]

Al-Qurṭubi dalam tafsirnya menambahkan bahwa perintah untuk mengatakan perkataan yang baik kepada manusia menunjukkan bahwa komunikasi memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan hubungan sosial dalam masyarakat. Menurutnya, ucapan yang baik dapat memperkuat hubungan sosial antara individu dalam masyarakat, sedangkan ucapan yang buruk dapat menimbulkan konflik sosial.[46]

Dalam tafsir kontemporer, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat tersebut menunjukkan bahwa komunikasi dalam Islam tidak hanya menekankan kebenaran isi pesan, tetapi juga menekankan cara penyampaian pesan tersebut. Menurutnya, pesan yang benar harus disampaikan dengan cara yang baik agar dapat diterima oleh masyarakat secara positif.[47]

---

[43] Raghib Al-Asfahani, *Al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an*, Dar al-Qalam, 2009, hal. 685

[44] Al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i*, RajaGrafindo Persada, 2016, hal. 97

[45] Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Dar Tayyibah, 2002, jilid 1, hal. 421

[46] Al-Qurṭubi, *Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*, Muassasah al-Risalah, 2016, jilid 2, hal. 98

[47] M. Quraish, Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Lentera Hati, 2017, jilid 1, hal. 295

Dalam konteks kepemimpinan, konsep *qaul* memiliki relevansi yang sangat kuat karena pemimpin merupakan pihak yang memiliki tanggung jawab besar dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat. Komunikasi yang dilakukan oleh pemimpin dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Oleh karena itu, komunikasi kepemimpinan harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam masyarakat.[48]

Selain itu, Al-Qur'an juga menggunakan berbagai bentuk turunan dari kata *qaul* untuk menggambarkan berbagai jenis komunikasi yang memiliki karakteristik tertentu. Misalnya, Al-Qur'an menggunakan istilah *qaulan kariman*, *qaulan ma'rufan*, *qaulan sadidan*, *qaulan layyinan*, dan *qaulan balighan* untuk menggambarkan bentuk komunikasi yang memiliki nilai etis tertentu dalam kehidupan sosial. Penggunaan istilah-istilah tersebut menunjukkan bahwa Al-Qur'an memberikan perhatian yang besar terhadap kualitas komunikasi dalam kehidupan manusia.[49]

Dalam kajian komunikasi sosial, ucapan atau pesan verbal merupakan salah satu unsur utama dalam proses komunikasi manusia. Pesan verbal memungkinkan manusia untuk menyampaikan ide, gagasan, serta nilai kepada orang lain melalui bahasa. Oleh karena itu, bahasa memiliki peran penting dalam membentuk pemahaman bersama dalam masyarakat.[50]

Al-Qur'an juga menunjukkan bahwa ucapan manusia memiliki dampak sosial yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat. Ucapan yang baik dapat menciptakan kedamaian dalam masyarakat, sedangkan ucapan yang buruk dapat menimbulkan konflik sosial. Oleh karena itu, Al-Qur'an menekankan pentingnya menjaga ucapan dalam setiap interaksi sosial manusia.[51]

Dalam perspektif komunikasi modern, pesan verbal merupakan salah satu komponen utama dalam proses komunikasi *inter* personal maupun komunikasi publik. Pesan yang disampaikan melalui bahasa dapat mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat karena bahasa memiliki kekuatan untuk membentuk persepsi sosial.[52]

Dalam konteks tafsir lokal, istilah qaul sering dijelaskan secara kontekstual mengikuti budaya dan struktur sosial masyarakat. Studi tafsir Minangkabau menemukan bahwa penafsiran terhadap kata qaul dalam teks Al-

---

[48] Rivai, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, RajaGrafindo Persada, 2018, hal. 215

[49] Hidayatullah, *Etika Komunikasi dalam Islam*, Rajawali Pers, 2020, hal. 105

[50] Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*, Remaja Rosdakarya, 2017, hal. 90

[51] S. Nasution, *Etika Komunikasi dalam Perspektif Islam*, Prenadamedia Group, 2017, hal. 74

[52] Stephen Littlejohn & Karen A Foss, *Theories of Human Communication*, Waveland Press, 2018, hal. 191

Qur'an sering kali disesuaikan dengan norma adat dan nilai sosial setempat.[53] Hal ini menunjukkan bahwa makna qaul bersifat dinamis dan dapat beradaptasi dengan lingkungan sosial. Dalam konteks kepemimpinan, hal ini penting karena seorang pemimpin dituntut mampu menyesuaikan gaya komunikasinya dengan budaya masyarakatnya tanpa mengorbankan prinsip kebenaran dan keadilan. Dengan demikian, qaul berfungsi sebagai jembatan antara teks wahyu dan realitas sosial, yang mengajarkan bahwa komunikasi harus berakar pada kebijaksanaan dan kepekaan budaya.

Selain itu, konsep *qaul* dalam Al-Qur'an juga menunjukkan bahwa komunikasi memiliki dimensi moral yang sangat kuat. Ucapan manusia tidak hanya dipandang sebagai aktivitas sosial biasa, tetapi juga sebagai tindakan moral yang memiliki konsekuensi etis. Oleh karena itu, manusia diperintahkan untuk menjaga ucapan mereka agar tidak menimbulkan kerusakan dalam kehidupan sosial.[54]

Dalam konteks komunikasi kepemimpinan, ucapan pemimpin memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap stabilitas masyarakat. Ketika pemimpin menyampaikan pesan secara jelas, jujur, dan penuh tanggung jawab, masyarakat akan lebih mudah memahami kebijakan yang diambil oleh pemimpin tersebut. Sebaliknya, ketika komunikasi kepemimpinan dipenuhi oleh manipulasi dan ketidakjujuran, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin akan menurun.

Selain itu, ucapan pemimpin juga dapat menjadi sarana untuk membangun kesadaran kolektif dalam masyarakat. Melalui komunikasi yang efektif, pemimpin dapat mengajak masyarakat untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama dalam kehidupan sosial.

Dengan demikian, istilah *qaul* dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa komunikasi verbal memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Al-Qur'an tidak hanya menggunakan istilah ini untuk menggambarkan aktivitas berbicara, tetapi juga untuk menunjukkan dimensi moral dan sosial dari komunikasi manusia. Oleh karena itu, konsep *qaul* dapat dipahami sebagai dasar konseptual dalam memahami komunikasi dalam perspektif Qur'ani, terutama dalam konteks relasi antara pemimpin dan rakyat dalam kehidupan sosial.

2. Lisan (لسان) - Instrumen Bahasa

Allah SWT berfirman:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ

[53] Aldomi Putra, Hamdani Anwar, and M. Hariyadi, 2006. Lokalitas Tafsir Al-Qur'an Minangkabau. *Jurnal Studi Alqur'an*, *1*(3), hal. 521-542.

[54] Harjani Hefni, *Komunikasi Islam*, Prenadamedia Group, 2015, hal. 64

"Dan Kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya agar ia dapat menjelaskan kepada mereka." (QS. Ibrahim [14]: 4).

Ayat ini menunjukkan bahwa bahasa merupakan instrumen utama dalam proses komunikasi sosial antara pembawa pesan dengan masyarakat yang menjadi sasaran pesan tersebut. Penggunaan kata lisan (لسان) dalam ayat ini tidak hanya merujuk pada organ fisik berupa lidah, tetapi juga merujuk pada sistem bahasa yang digunakan oleh suatu komunitas dalam kehidupan sosialnya. Oleh karena itu, bahasa dipahami sebagai medium komunikasi yang memungkinkan pesan dapat dipahami secara jelas oleh masyarakat yang menerimanya. Dalam konteks kepemimpinan, penggunaan bahasa yang sesuai dengan konteks sosial masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan komunikasi antara pemimpin dan rakyat.

Secara linguistik, kata lisan berasal dari akar kata لسنyang secara etimologis berarti lidah atau alat berbicara. Namun dalam penggunaan bahasa Arab klasik, istilah ini juga digunakan untuk menunjukkan bahasa atau sistem komunikasi verbal yang digunakan oleh suatu komunitas tertentu. Raghib al-Asfahani menjelaskan bahwa *lisan* dalam Al-Qur'an sering kali digunakan untuk menunjukkan kemampuan manusia dalam mengekspresikan pikiran melalui bahasa yang dapat dipahami oleh orang lain. Dengan demikian, istilah *lisan* tidak hanya merujuk pada alat fisik berbicara, tetapi juga merujuk pada sistem bahasa yang menjadi sarana komunikasi dalam masyarakat.[55]

Dalam tafsirnya, Ibn Katsir menjelaskan bahwa ayat tersebut menunjukkan hikmah Allah dalam mengutus para rasul dengan bahasa yang dipahami oleh masyarakat mereka. Menurutnya, penggunaan bahasa yang sama dengan masyarakat menjadi syarat penting agar pesan yang disampaikan oleh para rasul dapat dipahami secara jelas oleh umatnya. Jika seorang rasul diutus dengan bahasa yang tidak dipahami oleh masyarakatnya, maka pesan yang disampaikan akan sulit dipahami oleh mereka.[56]

Al-Qurṭubi juga menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif harus mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya masyarakat yang menjadi sasaran komunikasi. Menurutnya, penggunaan bahasa yang sesuai dengan konteks sosial masyarakat akan memudahkan proses penyampaian pesan serta memperkuat pemahaman masyarakat terhadap pesan tersebut.[57]

Dalam tafsir kontemporer, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat tersebut mengandung prinsip komunikasi yang sangat penting dalam kehidupan sosial manusia. Menurutnya, pesan yang disampaikan oleh seorang

---

[55] Raghib Al-Asfahani, *Al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an*, Dar al-Qalam, 2009, hal. 744

[56] Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Dar Tayyibah, 2002, jilid 4, hal. 478

[57] Al-Qurṭubi, *Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*, Muassasah al-Risalah, 2016, jilid 9, hal. 334

komunikator harus menggunakan bahasa yang dapat dipahami oleh masyarakat yang menjadi sasaran komunikasi. Komunikasi yang tidak mempertimbangkan kemampuan bahasa masyarakat berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dalam penyampaian pesan.[58]

Dalam perspektif komunikasi sosial, bahasa merupakan instrumen utama yang memungkinkan manusia membangun hubungan sosial dengan sesama. Bahasa memungkinkan manusia untuk menyampaikan gagasan, nilai, dan pengalaman kepada orang lain sehingga tercipta pemahaman bersama dalam masyarakat. Tanpa bahasa, interaksi sosial manusia akan sangat terbatas karena manusia tidak memiliki sarana untuk mengekspresikan pikiran mereka secara sistematis.[59]

Bahasa juga memiliki fungsi penting dalam membentuk identitas sosial suatu masyarakat. Setiap komunitas manusia memiliki sistem bahasa yang menjadi bagian dari budaya mereka. Oleh karena itu, penggunaan bahasa dalam komunikasi tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan pesan, tetapi juga mencerminkan identitas sosial masyarakat yang menggunakannya.[60]

Dalam konteks kepemimpinan, penggunaan bahasa yang tepat sangat menentukan keberhasilan komunikasi antara pemimpin dan masyarakat. Pemimpin yang mampu menggunakan bahasa yang dipahami oleh masyarakat akan lebih mudah membangun hubungan yang dekat dengan rakyat. Sebaliknya, penggunaan bahasa yang terlalu teknis atau tidak sesuai dengan konteks sosial masyarakat dapat menyebabkan pesan yang disampaikan oleh pemimpin sulit dipahami oleh masyarakat.[61]

Bahasa juga berfungsi sebagai sarana membangun kesepahaman sosial antara pemimpin dan masyarakat. Melalui bahasa, pemimpin dapat menjelaskan kebijakan yang diambil serta tujuan dari kebijakan tersebut kepada masyarakat. Komunikasi yang jelas akan membantu masyarakat memahami arah kebijakan yang diambil oleh pemimpin sehingga masyarakat dapat memberikan dukungan terhadap kebijakan tersebut.[62]

Selain itu, bahasa juga dapat menjadi sarana untuk membangun kedekatan emosional antara pemimpin dan masyarakat. Pemimpin yang mampu menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat akan lebih mudah memperoleh kepercayaan dari rakyat. Oleh

---

[58] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Lentera Hati, 2017, jilid 7, hal. 21

[59] Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*, Remaja Rosdakarya, 2017, hal. 112

[60] Halliday, *Language as Social Semiotic*, Edward Arnold, 2007, hal. 36

[61] Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktik*, Remaja Rosdakarya, 2018, hal. 74

[62] Stephen Littlejohn, & Karen A Foss, *Theories of Human Communication*, Waveland Press, 2018, hal. 204

karena itu, kemampuan menggunakan bahasa yang tepat menjadi salah satu kompetensi penting dalam kepemimpinan sosial.[63]

Dalam perspektif Al-Qur'an, bahasa tidak hanya dipandang sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai sarana untuk menyampaikan nilai moral kepada masyarakat. Banyak ayat Al-Qur'an yang menunjukkan bagaimana para nabi menggunakan bahasa untuk menyampaikan pesan moral kepada umat mereka. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa memiliki fungsi penting dalam proses pembinaan moral masyarakat.

Selain itu, penggunaan bahasa yang baik dalam komunikasi juga dapat menciptakan suasana dialog yang konstruktif dalam masyarakat. Ketika komunikasi dilakukan dengan bahasa yang santun dan jelas, maka hubungan sosial antara individu maupun kelompok dalam masyarakat dapat terjaga dengan baik.

Dengan demikian, konsep lisan dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa bahasa merupakan instrumen penting dalam komunikasi sosial manusia. Bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menyampaikan pesan, tetapi juga sebagai sarana membangun pemahaman bersama dalam masyarakat. Dalam konteks kepemimpinan, penggunaan bahasa yang tepat menjadi faktor penting dalam membangun komunikasi yang efektif antara pemimpin dan rakyat.

3. *Kalam* (كلام) - Proses Penyampaian Makna

Allah SWT berfirman:

وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا

"Dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan pembicaraan secara langsung." (QS. An-Nisā' [4]: 164).

Ayat ini menunjukkan penggunaan istilah kalam (كلام) dalam Al-Qur'an yang merujuk pada proses penyampaian makna melalui komunikasi yang memiliki tujuan tertentu. Kata *kalam* dalam ayat tersebut menggambarkan proses komunikasi yang berlangsung antara Allah dan Nabi Musa, yang dalam konteks teologis dikenal sebagai bentuk komunikasi wahyu. Namun secara konseptual, ayat ini juga menunjukkan bahwa komunikasi merupakan proses penyampaian makna yang memungkinkan suatu pesan dipahami oleh pihak yang menerima pesan tersebut. Dengan demikian, konsep *kalam* dalam Al-Qur'an dapat dipahami sebagai proses komunikasi yang menghubungkan pengirim pesan dengan penerima pesan melalui media bahasa.

Secara linguistik, kata kalam berasal dari akar kata كلم yang secara etimologis berarti berbicara atau menyampaikan sesuatu melalui kata-kata yang memiliki makna tertentu. Dalam kajian bahasa Arab klasik, *kalam*

[63] Northouse, *Leadership: Theory and Practice*, Sage Publications, 2019, hal. 276

merujuk pada rangkaian kata yang tersusun secara sistematis sehingga membentuk makna yang dapat dipahami oleh pendengar. Oleh karena itu, *kalam* tidak sekadar merujuk pada ucapan secara umum, tetapi merujuk pada ucapan yang memiliki struktur makna yang jelas. Raghib al-Asfahani menjelaskan bahwa *kalam* adalah susunan kata yang mengandung makna yang dapat dipahami oleh pihak yang mendengarnya.[64]

Dalam tafsirnya, Ibn Katsir menjelaskan bahwa ayat tersebut menunjukkan keistimewaan Nabi Musa yang menerima komunikasi langsung dari Allah tanpa perantara malaikat. Penjelasan ini menunjukkan bahwa kata *kalam* dalam Al-Qur'an merujuk pada proses komunikasi yang memiliki makna yang jelas serta disampaikan secara langsung kepada penerima pesan.[65]

Al-Qurṭubi juga menjelaskan bahwa penggunaan kata *kalam* dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa komunikasi merupakan proses penyampaian makna yang bertujuan memberikan penjelasan kepada pihak yang menerima pesan. Menurutnya, *kalam* dalam Al-Qur'an sering digunakan untuk menggambarkan proses komunikasi yang memiliki dimensi penjelasan dan pemahaman.[66]

Dalam tafsir kontemporer, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa konsep *kalam* dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa komunikasi merupakan proses penyampaian makna yang memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman kepada pihak yang menerima pesan. Oleh karena itu, komunikasi yang baik harus mampu menyampaikan makna secara jelas sehingga pesan yang disampaikan tidak menimbulkan kesalahpahaman.[67]

Dalam perspektif komunikasi sosial, proses komunikasi tidak hanya berkaitan dengan penyampaian kata-kata, tetapi juga berkaitan dengan penyampaian makna yang terkandung dalam kata-kata tersebut. Oleh karena itu, keberhasilan komunikasi tidak hanya ditentukan oleh pesan yang disampaikan, tetapi juga oleh kemampuan penerima pesan dalam memahami makna yang disampaikan oleh komunikator.[68]

Dalam kajian linguistik, bahasa dipahami sebagai sistem simbol yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan makna kepada orang lain. Kata-kata yang digunakan dalam komunikasi berfungsi sebagai simbol yang mewakili gagasan, perasaan, atau pengalaman manusia. Oleh karena itu, komunikasi yang efektif memerlukan kesamaan pemahaman antara

---

[64] Raghib Al-Asfahani, *Al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an*, Dar al-Qalam, 2009, hal. 723

[65] Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Dar Tayyibah, 2002, jilid 2, hal. 414

[66] Al-Qurṭubi, *Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*, Muassasah al-Risalah, 2016, jilid 6, hal. 22

[67] M. Quraish Shihab,*Tafsir Al-Misbah*, Lentera Hati, 2017, jilid 2, hal. 462

[68] Stephen Littlejohn, & Karen A Foss, *Theories of Human Communication*, Waveland Press, 2018, hal. 178

komunikator dan komunikan mengenai makna yang terkandung dalam simbol-simbol bahasa tersebut.[69]

Dalam konteks kepemimpinan, proses penyampaian makna melalui komunikasi memiliki peran yang sangat penting karena pemimpin harus mampu menjelaskan kebijakan yang diambil kepada masyarakat secara jelas. Tanpa komunikasi yang jelas, masyarakat akan kesulitan memahami tujuan dari kebijakan yang diambil oleh pemimpin. Kondisi ini dapat menimbulkan kesalahpahaman antara pemimpin dan masyarakat.[70]

Selain itu, komunikasi yang efektif juga memungkinkan terjadinya proses dialog antara pemimpin dan masyarakat. Dialog merupakan bentuk komunikasi yang memungkinkan kedua pihak saling menyampaikan gagasan dan aspirasi mereka. Melalui dialog, masyarakat dapat menyampaikan kebutuhan dan harapan mereka kepada pemimpin, sementara pemimpin dapat menjelaskan kebijakan yang diambil kepada masyarakat.[71]

Konsep *kalam* dalam Al-Qur'an juga menunjukkan bahwa komunikasi memiliki dimensi tanggung jawab moral. Setiap ucapan yang disampaikan oleh manusia harus mempertimbangkan dampaknya terhadap orang lain. Oleh karena itu, komunikasi dalam Islam tidak hanya menekankan efektivitas penyampaian pesan, tetapi juga menekankan nilai moral dalam penyampaian pesan tersebut.[72]

Dalam konteks komunikasi sosial modern, proses penyampaian makna melalui komunikasi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti latar belakang budaya, pengalaman sosial, serta tingkat pendidikan masyarakat. Oleh karena itu, komunikator harus mampu menyesuaikan pesan yang disampaikan dengan kondisi sosial masyarakat agar pesan tersebut dapat dipahami dengan baik.[73]

Selain itu, komunikasi yang efektif juga memerlukan kemampuan komunikator dalam menyusun pesan secara sistematis sehingga makna yang ingin disampaikan dapat diterima oleh masyarakat secara jelas. Struktur pesan yang baik akan membantu masyarakat memahami informasi yang disampaikan oleh komunikator.

Dengan demikian, konsep kalam dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa komunikasi merupakan proses penyampaian makna yang memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman kepada pihak lain. Komunikasi tidak hanya berkaitan dengan penyampaian kata-kata, tetapi juga berkaitan dengan

---

[69] Halliday, *Language as Social Semiotic*, Edward Arnold, 2007, hal. 42

[70] Siagian, *Teori dan Praktik Kepemimpinan*, Rineka Cipta, 2016, hal. 121

[71] Jurgen Habermas,, *The Theory of Communicative Action*, Beacon Press, 2015, hal. 298

[72] Harjani Hefni, *Komunikasi Islam*, Prenadamedia Group, 2015, hal. 71

[73] Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*, Remaja Rosdakarya, 2017, hal. 134

penyampaian makna yang terkandung dalam kata-kata tersebut. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep *kalam* menjadi penting dalam memahami komunikasi dalam perspektif Qur'ani, terutama dalam konteks komunikasi antara pemimpin dan masyarakat dalam kehidupan sosial.

4. *Risālah* (رسالة) - Model Komunikasi

Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ

"Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu." (QS. Al-Mā'idah [5]: 67).

Ayat ini menunjukkan konsep *risālah* (رسالة) dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan proses penyampaian pesan dari Allah kepada manusia melalui para nabi dan rasul. Dalam konteks komunikasi, risalah dapat dipahami sebagai bentuk komunikasi yang memiliki tujuan untuk menyampaikan pesan yang membawa petunjuk dan bimbingan bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, konsep risalah dalam Al-Qur'an tidak hanya berkaitan dengan wahyu sebagai pesan ilahi, tetapi juga berkaitan dengan proses komunikasi antara pembawa pesan dan masyarakat yang menjadi penerima pesan tersebut.

Secara linguistik, kata *risālah* berasal dari akar kata رسل yang berarti mengutus atau mengirimkan sesuatu kepada pihak lain. Dalam bahasa Arab klasik, kata ini merujuk pada pesan yang disampaikan oleh seorang utusan kepada pihak yang menerima pesan tersebut. Raghib al-Asfahani menjelaskan bahwa *risālah* berarti pesan yang dikirimkan oleh seseorang kepada orang lain dengan tujuan untuk menyampaikan informasi atau perintah tertentu. Dalam konteks Al-Qur'an, istilah ini digunakan untuk menggambarkan wahyu yang disampaikan oleh para nabi kepada umat mereka.[74]

Dalam tafsirnya, Ibn Katsir menjelaskan bahwa ayat tersebut merupakan perintah Allah kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan seluruh wahyu yang diterimanya kepada umat manusia tanpa menyembunyikan sedikit pun dari pesan tersebut. Menurutnya, risalah kenabian merupakan amanah besar yang harus disampaikan kepada masyarakat secara jelas agar manusia memperoleh petunjuk dalam kehidupan mereka.[75]

Al-Qurṭubi menjelaskan bahwa ayat tersebut menunjukkan tanggung jawab besar para nabi sebagai komunikator wahyu yang bertugas menyampaikan pesan Tuhan kepada manusia. Menurutnya, penyampaian risalah tidak hanya berkaitan dengan penyampaian informasi, tetapi juga

[74] Raghib Al-Asfahani, *Al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an*, Dar al-Qalam, 2009, hal. 360
[75] Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Dar Tayyibah, 2002, jilid 3, hal. 146

berkaitan dengan upaya membimbing masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik secara moral dan spiritual.[76]

Dalam tafsir kontemporer, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa konsep risalah dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa komunikasi memiliki peran penting dalam proses perubahan sosial masyarakat. Para nabi tidak hanya menyampaikan wahyu sebagai informasi, tetapi juga berusaha membangun kesadaran moral masyarakat melalui komunikasi yang persuasif dan penuh hikmah.[77]

Dalam perspektif komunikasi, konsep risalah dapat dipahami sebagai model komunikasi yang memiliki tujuan transformasi sosial. Pesan yang disampaikan oleh para nabi tidak hanya bertujuan memberikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga bertujuan mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat agar sesuai dengan nilai-nilai moral yang diajarkan oleh agama.[78]

Model komunikasi profetik ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan pesan yang membawa kebaikan bagi masyarakat. Dalam konteks kepemimpinan sosial, pemimpin dapat dipahami sebagai komunikator yang memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan nilai, visi, dan arah kebijakan kepada masyarakat melalui komunikasi yang jujur dan bertanggung jawab.

Selain itu, konsep risalah juga menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif memerlukan kejelasan pesan yang disampaikan kepada masyarakat. Pesan yang disampaikan oleh para nabi selalu dijelaskan secara jelas agar masyarakat dapat memahami makna dari pesan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kejelasan pesan merupakan faktor penting dalam keberhasilan komunikasi sosial.[79]

Dalam kajian komunikasi modern, proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan merupakan inti dari proses komunikasi. Pesan yang disampaikan harus disusun secara sistematis agar dapat dipahami oleh penerima pesan. Oleh karena itu, keberhasilan komunikasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan komunikator dalam menyampaikan pesan secara jelas.[80]

Selain itu, komunikasi juga memiliki dimensi etis yang berkaitan dengan tanggung jawab komunikator terhadap pesan yang disampaikan. Dalam konteks risalah kenabian, para nabi memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan pesan Tuhan secara jujur kepada umat mereka.

---

[76] Al-Qurṭubi, *Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*, Muassasah al-Risalah, 2016, jilid 6, hal. 282

[77] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Lentera Hati, 2017, jilid 3, hal. 135

[78] Harjani Hefni, *Komunikasi Islam*, Prenadamedia Group, 2015, hal. 83

[79] Dedy Mulyana, *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*, Remaja Rosdakarya, 2017, hal. 140

[80] Stephen Littlejohn & Foss, K., *Theories of Human Communication*, Waveland Press, 2018, hal. 213

Konsep risalah juga menunjukkan bahwa komunikasi dapat menjadi sarana untuk membangun perubahan sosial dalam masyarakat. Para nabi menggunakan komunikasi sebagai sarana untuk mengajak masyarakat meninggalkan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai moral dan menggantinya dengan perilaku yang lebih baik.

Dalam konteks kepemimpinan modern, model komunikasi profetik dapat menjadi inspirasi bagi para pemimpin dalam membangun komunikasi dengan masyarakat. Pemimpin tidak hanya menyampaikan kebijakan kepada masyarakat, tetapi juga harus mampu menginspirasi masyarakat untuk bersama-sama membangun kehidupan sosial yang lebih baik.

Dengan demikian, konsep *risālah* dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa komunikasi memiliki peran penting dalam proses penyampaian pesan yang membawa perubahan sosial. Model komunikasi profetik yang dicontohkan oleh para nabi menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif harus mengandung kejelasan pesan, tanggung jawab moral, serta tujuan untuk membimbing masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu, konsep risalah dapat dipahami sebagai model komunikasi kepemimpinan yang memiliki orientasi moral dan sosial dalam kehidupan masyarakat.

C. Isyarat Qur'an tentang Pemimpin

1. *Khalifah* (خليفة) - Pemimpin Amanah Sosial

Istilah *khalīfah* (خليفة) dalam Al-Qur'an merupakan salah satu konsep penting yang berkaitan dengan kepemimpinan dalam kehidupan sosial manusia. Kata ini secara umum merujuk pada seseorang yang diberi tanggung jawab untuk menggantikan atau mewakili pihak lain dalam menjalankan suatu tugas tertentu. Dalam konteks Al-Qur'an, istilah *khalifah* digunakan untuk menggambarkan peran manusia sebagai wakil Allah di bumi yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga keteraturan kehidupan sosial serta menegakkan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, konsep khalifah tidak hanya berkaitan dengan kekuasaan, tetapi juga berkaitan dengan amanah moral yang harus dijalankan oleh manusia dalam kehidupan sosial. Kepemimpinan dalam perspektif ini dipahami sebagai tanggung jawab yang harus dilaksanakan secara adil dan bertanggung jawab demi menjaga keseimbangan kehidupan masyarakat.[81]

Al-Qur'an menjelaskan konsep khalifah melalui firman Allah:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

"Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: 'Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi.'" (QS. Al-Baqarah [2]: 30).

[81] Abu al-Hasan Al-Mawardi, A., *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2006, hal. 15

Ayat ini menunjukkan bahwa manusia diciptakan sebagai khalifah yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola kehidupan di bumi. Dalam tafsirnya, Ibn Katsir menjelaskan bahwa kata *khalifah* dalam ayat tersebut merujuk pada manusia yang diberi amanah oleh Allah untuk mengelola bumi dengan prinsip keadilan dan kebaikan.[82]

Al-Qurṭubi menjelaskan bahwa konsep khalifah dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa manusia memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga keteraturan kehidupan sosial dalam masyarakat. Menurutnya, kekuasaan yang dimiliki oleh manusia harus digunakan untuk menegakkan keadilan serta mencegah terjadinya kerusakan dalam kehidupan masyarakat.[83]

Dalam tafsir kontemporer, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa konsep khalifah dalam Al-Qur'an tidak hanya berkaitan dengan kepemimpinan politik, tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab manusia dalam menjaga keseimbangan kehidupan sosial. Menurutnya, manusia sebagai khalifah memiliki kewajiban untuk membangun kehidupan sosial yang adil dan harmonis.[84]

Dalam perspektif kepemimpinan Islam, konsep khalifah menekankan bahwa kekuasaan bukanlah tujuan utama dalam kepemimpinan, melainkan sarana untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh Allah. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus menyadari bahwa kekuasaan yang dimilikinya merupakan tanggung jawab yang harus dijalankan dengan penuh integritas.[85]

Konsep amanah dalam kepemimpinan juga ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW.

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْؤُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» (رواه البخاري ومسلم) [86]

Dari 'Abdullāh bin 'Umar r.a., bahwa ia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: 'Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Seorang imam adalah pemimpin dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya. Seorang laki-laki

---

[82] Ibn Katsir, I., *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Dar Tayyibah, 2002, jilid 1, hal. 216

[83] Al-Qurṭubi, M., *Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*, Muassasah al-Risalah, 2016, jilid 1, hal. 263

[84] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Lentera Hati, 2017, jilid 1, hal. 159

[85] Rivai, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, RajaGrafindo Persada, 2018, hal. 241

[86] Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Jumu'ah, Bāb al-Jumu'ah fī al-Qurā wa al-Mudun, no. 893; Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Imārah, Bāb Faḍīlat al-Imām al-'Ādil wa 'Uqūbat al-Jā'ir wa al-Ḥatstsi 'alā ar-Rifq bi ar-Ra'iyyah, no. 1829.

adalah pemimpin dalam keluarganya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas keluarganya. Seorang perempuan adalah pemimpin di rumah suaminya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Seorang pelayan adalah pemimpin terhadap harta tuannya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menegaskan bahwa kepemimpinan dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan jabatan formal, tetapi juga dengan tanggung jawab moral atas amanah yang berada dalam lingkup kewenangan seseorang. Seorang pemimpin tidak hanya dituntut mampu mengatur rakyatnya, tetapi juga wajib menjaga, melayani, dan mempertanggungjawabkan kepemimpinannya di hadapan Allah SWT. Dalam konteks komunikasi pemimpin dan rakyat, hadis ini memperlihatkan bahwa komunikasi bukan sekadar sarana menyampaikan instruksi, melainkan bagian dari amanah kepemimpinan yang harus dijalankan dengan kejujuran, keadilan, empati, dan tanggung jawab sosial.

Dalam kajian kepemimpinan modern, kepemimpinan yang berorientasi pada amanah merupakan bentuk kepemimpinan yang menekankan tanggung jawab moral pemimpin terhadap kesejahteraan masyarakat. Pemimpin tidak hanya bertugas mengelola kekuasaan, tetapi juga bertugas memastikan bahwa kebijakan yang diambil membawa manfaat bagi masyarakat luas.[87]

Selain itu, konsep khalifah juga menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam Islam memiliki dimensi sosial yang kuat. Pemimpin harus mampu membangun hubungan yang baik dengan masyarakat serta memastikan bahwa komunikasi antara pemimpin dan rakyat berjalan secara sehat.

Dalam konteks komunikasi sosial, pemimpin sebagai khalifah memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan kebijakan kepada masyarakat secara jelas serta mendengarkan aspirasi masyarakat yang dipimpinnya. Komunikasi yang terbuka akan memperkuat hubungan antara pemimpin dan masyarakat.[88]

Konsep khalifah juga menunjukkan bahwa kepemimpinan tidak boleh dijalankan secara otoriter. Pemimpin harus mampu melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan sosial mereka.

Dalam perspektif etika kepemimpinan Islam, pemimpin yang menjalankan amanah secara adil akan memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Kepercayaan tersebut merupakan elemen penting dalam menjaga stabilitas kehidupan sosial masyarakat.

Selain itu, kepemimpinan yang berlandaskan konsep khalifah juga menuntut adanya integritas moral dalam setiap tindakan pemimpin. Pemimpin

---

[87] Northouse, *Leadership: Theory and Practice*, Sage Publications, 2019, hal. 48

[88] Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*, Remaja Rosdakarya, 2017, hal. 188

harus mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat.

Dengan demikian, konsep khalifah dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa kepemimpinan merupakan amanah sosial yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Kepemimpinan dalam perspektif Qur'ani tidak hanya berkaitan dengan kekuasaan, tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab moral untuk menjaga keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat.

2. *Imām* (إمام) - Pemimpin Teladan

Istilah *imām* (إمام) dalam Al-Qur'an merupakan salah satu konsep kepemimpinan yang menekankan aspek keteladanan moral dalam kehidupan sosial. Secara umum, kata *imam* merujuk kepada seseorang yang berada di depan dan diikuti oleh orang lain dalam suatu urusan. Dalam konteks sosial, istilah ini menggambarkan sosok pemimpin yang tidak hanya memiliki otoritas, tetapi juga menjadi teladan bagi masyarakat dalam menjalankan nilai-nilai moral dan etika kehidupan. Oleh karena itu, kepemimpinan dalam konsep *imam* tidak semata-mata didasarkan pada kekuasaan, tetapi pada kemampuan seorang pemimpin untuk menjadi contoh yang baik bagi masyarakat yang dipimpinnya. Dalam perspektif Al-Qur'an, pemimpin yang ideal adalah mereka yang mampu membimbing masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik melalui keteladanan dalam perilaku dan tindakan.[89]

Al-Qur'an menggambarkan konsep kepemimpinan berbasis keteladanan melalui firman Allah SWT:

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا

"Dan Kami jadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami." (QS. Al-Anbiyā' [21]: 73).

Ayat ini menunjukkan bahwa para nabi dan orang-orang saleh dijadikan sebagai *imam* yang memberikan petunjuk kepada masyarakat. Dalam tafsirnya, Ibn Katsir menjelaskan bahwa kata *a'immah* dalam ayat tersebut merujuk pada para pemimpin yang membimbing masyarakat menuju kebenaran melalui ajaran yang diberikan oleh Allah. Kepemimpinan dalam konteks ini tidak hanya berkaitan dengan otoritas, tetapi juga berkaitan dengan peran pemimpin sebagai pembimbing moral bagi masyarakat.[90]

Al-Qurṭubi menegaskan bahwa kepemimpinan dalam konsep *imam* berkaitan erat dengan kemampuan pemimpin dalam memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Menurutnya, seorang pemimpin yang tidak mampu

[89] Abu al- Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2006, hal. 22

[90] Ibn Katsir, I., *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Dar Tayyibah, 2002, jilid 5, hal. 364

memberikan keteladanan moral kepada masyarakat akan sulit memperoleh kepercayaan dari masyarakat yang dipimpinnya.[91]

Dalam tafsir kontemporer, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa konsep *imam* dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa kepemimpinan harus berorientasi pada pembinaan moral masyarakat. Pemimpin tidak hanya bertugas mengatur kehidupan sosial, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk membimbing masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik secara moral dan spiritual.[92]

Keteladanan pemimpin merupakan faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan. Masyarakat cenderung mengikuti pemimpin yang menunjukkan integritas moral dalam perilaku mereka. Oleh karena itu, kepemimpinan yang berlandaskan keteladanan memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk perilaku sosial masyarakat.[93]

Dalam tradisi Islam, Nabi Muhammad SAW merupakan contoh paling nyata dari kepemimpinan yang berbasis keteladanan moral. Kehidupan beliau menjadi teladan bagi umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam kepemimpinan sosial. Allah SWT berfirman:

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

"Sungguh, pada diri Rasulullah terdapat teladan yang baik bagi kalian." (QS. Al-Ahzab [33]: 21).

Ayat ini menunjukkan bahwa kepemimpinan Nabi Muhammad didasarkan pada keteladanan moral yang menjadi inspirasi bagi masyarakat.

Dalam konteks komunikasi sosial, pemimpin yang menjadi teladan akan lebih mudah memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Ketika pemimpin menunjukkan konsistensi antara ucapan dan tindakan, masyarakat akan lebih percaya terhadap pesan yang disampaikan oleh pemimpin tersebut.

Sebaliknya, ketika pemimpin tidak menunjukkan keteladanan dalam perilaku mereka, komunikasi antara pemimpin dan masyarakat akan mengalami krisis kepercayaan. Masyarakat cenderung meragukan pesan yang disampaikan oleh pemimpin yang tidak menunjukkan integritas dalam tindakan mereka.[94]

Dalam perspektif komunikasi kepemimpinan, keteladanan pemimpin merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan komunikasi antara pemimpin dan masyarakat. Pemimpin yang mampu menunjukkan keteladanan

---

[91] Al-Qurṭubi, *Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*, Muassasah al-Risalah, 2016, jilid 11, hal. 273

[92] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Lentera Hati, 2017, jilid 8, hal. 105

[93] Northouse, *Leadership: Theory and Practice*, Sage Publications, 2019, hal. 176

[94] Siagian, *Teori dan Praktik Kepemimpinan*, Rineka Cipta, 2016, hal. 88

dalam tindakan mereka akan lebih mudah mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat.[95]

Selain itu, keteladanan pemimpin juga berperan penting dalam membangun budaya sosial dalam masyarakat. Ketika pemimpin menunjukkan perilaku yang baik, masyarakat akan cenderung meniru perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian, konsep *imām* dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa kepemimpinan yang ideal adalah kepemimpinan yang berbasis keteladanan moral. Pemimpin tidak hanya berfungsi sebagai pengambil keputusan dalam masyarakat, tetapi juga sebagai teladan yang memberikan inspirasi bagi masyarakat dalam menjalankan nilai-nilai moral dalam kehidupan sosial.

3. *Uli al-Amri* (أولي الأمر) - Otoritas pemimpin

Istilah *ulī al-amr* (أولي الأمر) dalam Al-Qur'an merupakan konsep kepemimpinan yang berkaitan dengan otoritas sosial dalam kehidupan masyarakat. Secara umum, istilah ini merujuk kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam mengatur urusan masyarakat, baik dalam bidang pemerintahan, hukum, maupun kehidupan sosial secara umum. Dalam perspektif Al-Qur'an, keberadaan ulil amri menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat memerlukan struktur kepemimpinan yang mampu mengelola berbagai kepentingan sosial secara tertib dan adil. Oleh karena itu, konsep ulil amri dalam Al-Qur'an tidak hanya berkaitan dengan kekuasaan politik, tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab moral untuk menjaga keteraturan kehidupan masyarakat.[96]

Al-Qur'an menyebutkan konsep ulil amri dalam firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ

"Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri di antara kalian." (QS. An-Nisā' [4]: 59).

Ayat ini menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam masyarakat memiliki kedudukan penting dalam menjaga keteraturan kehidupan sosial. Perintah untuk menaati ulil amri menunjukkan bahwa kepemimpinan merupakan bagian dari sistem sosial yang diperlukan untuk mengatur kehidupan masyarakat secara kolektif.

Dalam tafsirnya, Ibn Katsir menjelaskan bahwa istilah *ulil amri* dalam ayat tersebut merujuk kepada para pemimpin yang memiliki otoritas dalam mengatur urusan masyarakat, termasuk para penguasa dan para ulama yang memiliki pengetahuan tentang hukum Islam. Menurutnya, kepemimpinan

---

[95] Deddy Mulyana, , *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*, Remaja Rosdakarya, 2017, hal. 206

[96] Abu al-Hasan Al-Mawardi, , *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2006, hal. 28

tersebut harus dijalankan dengan berlandaskan pada ajaran Allah dan Rasul-Nya.[97]

Al-Qurṭubi menambahkan bahwa ulil amri mencakup para pemimpin yang memiliki tanggung jawab dalam mengelola urusan masyarakat serta menjaga keadilan dalam kehidupan sosial. Menurutnya, masyarakat diperintahkan untuk menaati pemimpin selama pemimpin tersebut menjalankan kepemimpinannya sesuai dengan prinsip keadilan dan ajaran agama.[98]

Dalam tafsir kontemporer, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa konsep ulil amri menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam Islam bersifat kolektif dan tidak terbatas pada satu individu saja. Menurutnya, ulil amri dapat mencakup berbagai pihak yang memiliki otoritas dalam masyarakat, termasuk pemimpin politik, ulama, dan tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh dalam kehidupan sosial.[99]

Konsep ulil amri juga menunjukkan bahwa hubungan antara pemimpin dan masyarakat dalam Islam bersifat timbal balik. Masyarakat diperintahkan untuk menaati pemimpin, sementara pemimpin memiliki tanggung jawab untuk menjalankan kepemimpinannya dengan adil dan bertanggung jawab.

Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ» (رواه البخاري ومسلم) [100]

"Dari 'Abdullāh bin 'Umar r.a., dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: 'Wajib atas seorang Muslim untuk mendengar dan taat dalam perkara yang ia sukai maupun yang ia benci, kecuali apabila ia diperintah melakukan maksiat. Jika ia diperintah melakukan maksiat, maka tidak ada kewajiban mendengar dan tidak ada kewajiban taat." (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menunjukkan bahwa ketaatan kepada pemimpin dalam Islam bukanlah ketaatan absolut tanpa batas. Ketaatan kepada pemimpin memiliki dasar moral dan syar'i, yaitu selama tidak bertentangan dengan perintah Allah SWT. Dalam konteks komunikasi pemimpin dan rakyat, hadis ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara legitimasi otoritas dan kontrol moral. Rakyat dituntut menjaga ketertiban sosial melalui ketaatan yang proporsional,

---

[97] Ibn Katsir, , *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Dar Tayyibah, 2002, jilid 2, hal. 344

[98] Al-Qurṭubi, *Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*, Muassasah al-Risalah, 2016, jilid 5, hal. 259

[99] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Lentera Hati, 2017, jilid 2, hal. 518

[100] Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Aḥkām, Bāb as-Sam' wa aṭ-Ṭā'ah li al-Imām Mā Lam Takun Ma'ṣiyah, no. 7144; Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Imārah, Bāb Wujūb Ṭā'at al-Umarā' fī Ghayr Ma'ṣiyah wa Taḥrīmuhā fī al-Ma'ṣiyah, no. 1839.

sedangkan pemimpin dituntut menjaga komunikasi dan kebijakan agar tetap berada dalam koridor kebenaran, keadilan, dan kemaslahatanmari .

Namun dalam hadis lain Rasulullah SAW juga menegaskan bahwa ketaatan kepada pemimpin tidak berlaku dalam perkara yang melanggar ajaran Allah.

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ» (رواه البخاري ومسلم) [101]

"Dari 'Alī bin Abī Ṭālib r.a., bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: 'Tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam perkara yang ma'rūf." (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menegaskan bahwa ketaatan kepada pemimpin dalam Islam bersifat etis dan bersyarat, bukan ketaatan mutlak. Seorang pemimpin memiliki otoritas selama kebijakan, perintah, dan komunikasinya berada dalam wilayah *ma'rūf*, yaitu nilai kebaikan yang selaras dengan wahyu, akal sehat, dan kemaslahatan publik. Apabila kekuasaan digunakan untuk mengarahkan rakyat kepada kemaksiatan, kezaliman, manipulasi, atau kerusakan sosial, maka ketaatan tidak lagi memiliki legitimasi syar'i. Dengan demikian, komunikasi pemimpin Qur'ani harus menjaga keseimbangan antara otoritas, amanah, dan kepatuhan kepada nilai ilahiah..

Dalam perspektif komunikasi kepemimpinan, konsep ulil amri juga berkaitan dengan hubungan komunikasi antara pemimpin dan masyarakat. Pemimpin harus mampu menjelaskan kebijakan yang diambil kepada masyarakat agar masyarakat dapat memahami tujuan dari kebijakan tersebut.

Komunikasi yang terbuka antara pemimpin dan masyarakat akan membantu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan. Kepercayaan ini merupakan elemen penting dalam menjaga stabilitas sosial dalam masyarakat.[102]

Selain itu, kepemimpinan yang efektif juga memerlukan kemampuan pemimpin dalam mendengarkan aspirasi masyarakat. Pemimpin yang mampu mendengarkan aspirasi masyarakat akan lebih mudah memahami kebutuhan masyarakat yang dipimpinnya.

---

[101] Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Aḥkām, Bāb as-Sam' wa aṭ-Ṭā'ah li al-Imām Mā Lam Takun Ma'ṣiyah, no. 7145; Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Imārah, Bāb Wujūb Ṭā'at al-Umarā' fī Ghayr Ma'ṣiyah wa Taḥrīmuhā fī al-Ma'ṣiyah, no. 1840.

[102] Rivai, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, RajaGrafindo Persada, 2018, hal. 263

Dalam kajian komunikasi organisasi, hubungan antara pemimpin dan anggota organisasi memerlukan komunikasi dua arah yang memungkinkan terjadinya pertukaran informasi secara terbuka.[103]

Komunikasi dua arah antara pemimpin dan masyarakat memungkinkan terciptanya proses dialog yang konstruktif dalam kehidupan sosial. Dialog tersebut dapat membantu menyelesaikan berbagai persoalan sosial yang dihadapi oleh masyarakat.

Selain itu, komunikasi yang baik antara pemimpin dan masyarakat juga dapat memperkuat legitimasi kepemimpinan. Ketika masyarakat merasa bahwa aspirasi mereka didengar oleh pemimpin, maka masyarakat akan lebih percaya terhadap kepemimpinan tersebut.

Dalam perspektif kepemimpinan modern, legitimasi kepemimpinan sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemimpin dalam membangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat.[104]

Dengan demikian, konsep ulil amri dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam masyarakat memiliki dimensi otoritas yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Otoritas tersebut tidak hanya berkaitan dengan kekuasaan, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan pemimpin dalam membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat serta menjalankan kepemimpinannya sesuai dengan prinsip keadilan dan nilai moral dalam kehidupan sosial.

4. *Ulil Aydī wa al-Abṣār* (أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ) – Pemimpin Berintegritas dan Berwawasan

Istilah *ulī al-aydī wa al-abṣār* (أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ) merupakan salah satu konsep kepemimpinan dalam Al-Qur'an yang menggambarkan karakter pemimpin yang memiliki kekuatan (*al-aydī*) dan ketajaman pandangan (*al-abṣār*). Secara umum, istilah ini merujuk kepada sosok yang tidak hanya memiliki kemampuan fisik atau kekuatan tindakan, tetapi juga memiliki ketajaman visi, pemahaman, serta kebijaksanaan dalam melihat realitas sosial. Oleh karena itu, konsep ini mencerminkan integrasi antara kekuatan tindakan dan kedalaman pemikiran dalam kepemimpinan.

Secara linguistik, kata *al-aydī* merupakan bentuk jamak dari *yad* yang secara harfiah berarti tangan, tetapi dalam konteks bahasa Arab klasik sering digunakan secara metaforis untuk menunjukkan kekuatan, kemampuan, atau kapasitas bertindak. Sementara itu, kata *al-abṣār* merupakan bentuk jamak dari *baṣar* yang berarti penglihatan, namun juga memiliki makna kiasan berupa ketajaman pandangan, pemahaman, dan wawasan intelektual. Dengan

---

[103] Deddy Mulyana, , *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*, Remaja Rosdakarya, 2017, hal. 210

[104] Northouse, *Leadership: Theory and Practice*, Sage Publications, 2019, hal. 214

demikian, istilah *ulī al-aydī wa al-abṣār* menunjukkan sosok yang memiliki kekuatan dalam bertindak sekaligus ketajaman dalam berpikir.[105]

Konsep ini disebutkan dalam firman Allah SWT:

وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ

"Dan ingatlah hamba-hamba Kami: Ibrahim, Ishaq, dan Ya'qub yang mempunyai kekuatan (dalam ketaatan) dan penglihatan (yang tajam)." (QS. Ṣād [38]: 45).

Ayat ini menunjukkan bahwa para nabi yang disebutkan memiliki karakter sebagai *ulī al-aydī wa al-abṣār*, yaitu memiliki kekuatan dalam menjalankan tugas serta ketajaman dalam memahami kebenaran. Dalam tafsirnya, Ibn Katsir menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *al-aydī* adalah kekuatan dalam beribadah dan ketaatan kepada Allah, sedangkan *al-abṣār* adalah ketajaman dalam memahami agama serta kebijaksanaan dalam menjalankan kehidupan.[106]

Al-Qurṭubi menambahkan bahwa istilah ini menunjukkan kesempurnaan sifat para nabi sebagai pemimpin spiritual dan sosial. Menurutnya, kekuatan tanpa wawasan dapat menimbulkan penyimpangan, sedangkan wawasan tanpa kekuatan tidak akan mampu diwujudkan dalam tindakan nyata.[107]

Dalam tafsir kontemporer, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa konsep ini mencerminkan keseimbangan antara kemampuan praktis dan intelektual dalam diri seorang pemimpin. Menurutnya, pemimpin yang ideal adalah mereka yang mampu bertindak secara efektif sekaligus memiliki pandangan yang jauh ke depan dalam mengelola kehidupan masyarakat.[108]

Dalam perspektif kepemimpinan Islam, konsep *ulī al-aydī wa al-abṣār* menunjukkan bahwa seorang pemimpin harus memiliki dua kompetensi utama, yaitu kemampuan eksekusi dan kemampuan analisis. Kemampuan eksekusi memungkinkan pemimpin untuk menjalankan kebijakan secara efektif, sedangkan kemampuan analisis memungkinkan pemimpin untuk memahami kompleksitas persoalan sosial yang dihadapi oleh masyarakat. kemampuan memahami realitas sosial merupakan faktor penting dalam membangun komunikasi yang efektif. Pemimpin yang memiliki ketajaman

---

[105] Raghib Al-Asfahani, *Al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an*, Dar al-Qalam, 2009, hal. 52

[106] Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Dar Tayyibah, 2002, jilid 7, hal. 89

[107] Al-Qurṭubi, *Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*, Muassasah al-Risalah, 2016, jilid 15, hal. 312

[108] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Lentera Hati, 2017, jilid 12, hal. 145

pandangan akan lebih mampu memahami kebutuhan masyarakat serta menyampaikan pesan yang relevan dengan kondisi sosial yang ada.[109]

Selain itu, kekuatan dalam bertindak juga menjadi faktor penting dalam membangun kredibilitas pemimpin. Pemimpin yang hanya memiliki gagasan tanpa kemampuan untuk mewujudkannya dalam tindakan nyata akan kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Konsep ini juga menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam Al-Qur'an tidak hanya menekankan aspek moral, tetapi juga menekankan aspek kompetensi. Pemimpin harus memiliki kapasitas yang memadai untuk menjalankan tanggung jawab yang diembannya.

Dalam perspektif komunikasi sosial, pemimpin yang memiliki *al-abṣār* akan mampu membaca situasi komunikasi secara tepat. Ia dapat memahami kapan harus berbicara, bagaimana menyampaikan pesan, serta bagaimana merespons aspirasi masyarakat dengan bijaksana. Sementara itu, pemimpin yang memiliki *al-aydī* akan mampu mengimplementasikan hasil komunikasi tersebut dalam bentuk kebijakan yang nyata.

Konsep *ulī al-aydī wa al-abṣār* juga menunjukkan pentingnya integrasi antara pengetahuan dan tindakan dalam kepemimpinan. Pengetahuan yang tidak diwujudkan dalam tindakan tidak akan memberikan manfaat bagi masyarakat, sementara tindakan tanpa dasar pengetahuan dapat menimbulkan kesalahan dalam pengambilan keputusan.

Pemimpin dituntut untuk memiliki kemampuan berpikir strategis sekaligus kemampuan operasional. Hal ini sejalan dengan konsep *ulī al-aydī wa al-abṣār* yang menekankan keseimbangan antara kekuatan dan wawasan.

Selain itu, konsep ini juga relevan dalam menghadapi kompleksitas komunikasi di era digital. Pemimpin harus mampu memahami arus informasi yang cepat serta mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis yang mendalam. Konsep ini mencerminkan pentingnya integritas dalam tindakan dan kejernihan dalam berpikir. Pemimpin yang memiliki kedua sifat ini akan mampu menjalankan amanah kepemimpinan dengan baik.

Konsep ini juga menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam Islam bersifat holistik, yaitu mencakup aspek spiritual, intelektual, dan sosial. Pemimpin tidak hanya dituntut untuk memiliki kekuatan dalam tindakan, tetapi juga harus memiliki ketajaman dalam memahami nilai-nilai moral yang menjadi dasar dalam kepemimpinan.

Dalam konteks komunikasi antara pemimpin dan rakyat, pemimpin yang memiliki *ulī al-aydī wa al-abṣār* akan mampu membangun komunikasi yang

---

[109] Stephen Littlejohn & Foss, K., *Theories of Human Communication*, Waveland Press, 2018, hal. 204

efektif karena ia memahami kebutuhan masyarakat serta mampu meresponsnya dengan tindakan nyata. Komunikasi kepemimpinan yang efektif tidak hanya bergantung pada kemampuan berbicara, tetapi juga bergantung pada kemampuan memahami dan bertindak secara tepat.

Konsep *ulī al-aydī wa al-abṣār* dalam Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa kepemimpinan yang ideal adalah kepemimpinan yang mengintegrasikan kekuatan tindakan dengan ketajaman wawasan. Pemimpin yang memiliki kedua sifat ini akan mampu membangun komunikasi yang efektif serta menjalankan kepemimpinan secara adil dan bertanggung jawab.

5. *Ulī Quwwah* (أُولِي الْقُوَّةِ) – Pemimpin yang Memiliki Kekuatan dan Keteguhan

Istilah *ulī al-quwwah* **(أُولِي الْقُوَّةِ)** dalam Al-Qur'an menggambarkan karakter pemimpin yang memiliki kekuatan, keteguhan, dan kapasitas untuk menjalankan tanggung jawab kepemimpinan secara optimal. Secara umum, konsep ini merujuk pada individu yang memiliki kemampuan fisik, mental, dan spiritual yang kuat dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan sosial. Oleh karena itu, *ulī al-quwwah* tidak hanya menunjukkan kekuatan dalam arti fisik, tetapi juga mencakup kekuatan moral, keteguhan prinsip, serta kemampuan menghadapi tekanan dalam menjalankan amanah kepemimpinan.

Secara linguistik, kata *quwwah* berasal dari akar kata قوى yang berarti kuat atau memiliki daya. Dalam bahasa Arab klasik, istilah ini digunakan untuk menunjukkan kekuatan dalam berbagai dimensi, baik kekuatan fisik, kekuatan mental, maupun kekuatan spiritual. Raghib al-Asfahani menjelaskan bahwa *quwwah* dalam Al-Qur'an tidak hanya merujuk pada kekuatan jasmani, tetapi juga mencakup kemampuan manusia dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan dengan keteguhan hati dan keimanan.[110]

Konsep ini tercermin dalam firman Allah SWT:

إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

"Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil untuk bekerja adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." (QS. Al-Qaṣaṣ [28]: 26).

Ayat ini menunjukkan bahwa kekuatan (*al-quwwah*) merupakan salah satu kriteria utama dalam memilih seseorang untuk menjalankan suatu amanah. Dalam tafsirnya, Ibn Katsir menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kekuatan dalam ayat ini mencakup kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan baik serta ketangguhan dalam menghadapi tantangan.[111]

Al-Qurṭubi menambahkan bahwa kekuatan dalam konteks ayat tersebut harus disertai dengan sifat amanah, sehingga kekuatan yang dimiliki tidak

[110] Raghib Al-Asfahani, *Al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an*, Dar al-Qalam, 2009, hal. 664
[111] Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Dar Tayyibah, 2002, jilid 6, hal. 245

disalahgunakan. Menurutnya, kekuatan yang tidak disertai dengan integritas moral dapat menimbulkan kerusakan dalam kehidupan sosial.[112]

Dalam tafsir kontemporer, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa konsep *quwwah* dalam Al-Qur'an mencerminkan pentingnya kapasitas dan kompetensi dalam menjalankan suatu tugas. Menurutnya, kekuatan yang dimaksud dalam ayat tersebut tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup kemampuan intelektual dan profesional dalam menjalankan amanah.[113]

Konsep *ulī al-quwwah* menunjukkan bahwa seorang pemimpin harus memiliki kemampuan yang memadai untuk menjalankan tugas kepemimpinannya. Kepemimpinan bukan hanya persoalan legitimasi, tetapi juga persoalan kapasitas dalam mengelola kehidupan sosial masyarakat.

Kekuatan juga berkaitan dengan kemampuan pemimpin dalam menyampaikan pesan secara tegas dan jelas. Pemimpin yang memiliki *quwwah* akan mampu menyampaikan kebijakan dengan keyakinan sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Selain itu, kekuatan dalam kepemimpinan juga mencakup kemampuan menghadapi kritik dan tekanan sosial. Dalam kehidupan masyarakat, pemimpin tidak terlepas dari berbagai bentuk kritik dan tuntutan dari masyarakat. Oleh karena itu, keteguhan dalam menghadapi tekanan menjadi bagian penting dari karakter *ulī al-quwwah*.

Pemimpin yang memiliki kekuatan akan lebih mampu menjaga stabilitas komunikasi dalam masyarakat. Ia tidak mudah terpengaruh oleh tekanan opini publik yang tidak konstruktif, tetapi tetap mampu menjaga arah komunikasi yang berlandaskan nilai kebenaran. Kekuatan dalam kepemimpinan harus diimbangi dengan kebijaksanaan dalam bertindak. Kekuatan tanpa kebijaksanaan dapat menimbulkan sikap otoriter, sedangkan kebijaksanaan tanpa kekuatan dapat menyebabkan ketidakmampuan dalam mengambil keputusan.

Kekuatan sering dikaitkan dengan kemampuan mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Pemimpin yang kuat tidak ragu dalam mengambil keputusan yang diperlukan untuk kepentingan masyarakat.[114] Kekuatan juga berkaitan dengan kemampuan pemimpin dalam mengelola konflik sosial. Dalam masyarakat yang kompleks, konflik merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, pemimpin harus memiliki kekuatan untuk menyelesaikan konflik secara adil dan bijaksana.

Dalam perspektif etika kepemimpinan, kekuatan yang dimiliki oleh pemimpin harus digunakan untuk menegakkan keadilan dalam masyarakat.

---

[112] Al-Qurṭubi, *Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*, Muassasah al-Risalah, 2016, jilid 13, hal. 271

[113] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Lentera Hati, 2017, jilid 10, hal. 98

[114] Northouse, *Leadership: Theory and Practice*, Sage Publications, 2019, hal. 61

Kekuatan bukanlah alat untuk mendominasi, tetapi sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat.[115]

Konsep *ulī al-quwwah* juga menunjukkan bahwa kepemimpinan memerlukan ketahanan mental yang kuat. Pemimpin harus mampu tetap teguh dalam prinsip meskipun menghadapi berbagai tekanan dari lingkungan sosial. Pemimpin yang memiliki *quwwah* akan mampu membangun komunikasi yang tegas namun tetap beretika. Ketegasan dalam komunikasi penting untuk menjaga kejelasan arah kebijakan dalam masyarakat. Pemimpin dituntut untuk memiliki kekuatan dalam menghadapi dinamika perubahan sosial yang sangat cepat. Kemampuan beradaptasi dengan perubahan menjadi bagian dari kekuatan yang harus dimiliki oleh pemimpin.

Konsep *ulī al-quwwah* dalam Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa kepemimpinan yang efektif memerlukan kekuatan dalam berbagai dimensi, baik fisik, mental, maupun moral. Pemimpin yang memiliki kekuatan akan mampu menjalankan amanah kepemimpinan dengan tegas, adil, dan bertanggung jawab.

D. Isyarat Qur'ani tentang Rakyat dalam Struktur Sosial

1. *Qawm* (قوم) - Komunitas Sosial

Istilah qawm (قوم) dalam Al-Qur'an merupakan salah satu konsep penting yang digunakan untuk menggambarkan komunitas sosial dalam kehidupan manusia. Kata *qawm* secara umum merujuk kepada sekelompok manusia yang memiliki ikatan sosial tertentu, baik berdasarkan kesamaan tempat tinggal, budaya, maupun hubungan kekerabatan. Dalam konteks Al-Qur'an, istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dakwah para nabi. Oleh karena itu, konsep *qawm* tidak hanya merujuk pada kelompok manusia secara umum, tetapi juga menggambarkan dinamika hubungan sosial yang terjadi dalam suatu komunitas. Dalam kajian sosial Qur'ani, penggunaan istilah ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an memandang masyarakat sebagai komunitas yang memiliki struktur sosial dan interaksi kolektif dalam kehidupan mereka.[116]

Secara linguistik, kata qawm berasal dari akar kata قام – يقوم – قوماً yang secara etimologis berarti berdiri atau bangkit. Dalam perkembangan maknanya, istilah ini digunakan untuk merujuk kepada kelompok manusia yang berdiri bersama dalam suatu komunitas sosial. Raghib al-Asfahani menjelaskan bahwa kata *qawm* digunakan untuk menggambarkan kelompok

---

[115] Stephen Littlejohn & Foss, K., *Theories of Human Communication*, Waveland Press, 2018, hal. 219

[116] Izutsu, *Ethico-Religious Concepts in the Qur'an*, McGill University Press, 2002, hal. 256

manusia yang memiliki hubungan sosial tertentu dan hidup bersama dalam suatu masyarakat. Oleh karena itu, istilah ini sering digunakan dalam Al-Qur'an untuk menggambarkan masyarakat yang memiliki kesamaan identitas sosial.[117]

Dalam Al-Qur'an, istilah *qawm* sering digunakan dalam konteks kisah para nabi yang berdialog dengan masyarakat mereka. Salah satu ayat yang menggambarkan hal tersebut adalah firman Allah SWT:

وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ

"Dan kepada kaum 'Ad (Kami utus) saudara mereka, Hud. Ia berkata: Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagi kalian selain Dia." (QS. Al-A'rāf [7]: 65).

Ayat ini menunjukkan bagaimana para Nabi a.s berkomunikasi dengan masyarakat mereka melalui panggilan "*yā qawmī*" (wahai kaumku), yang menggambarkan kedekatan sosial antara para Nabi a.s dan masyarakat yang menjadi sasaran dakwahnya.

Dalam tafsirnya, Ibn Katsir menjelaskan bahwa penggunaan panggilan *yā qawmī* menunjukkan adanya hubungan sosial yang kuat antara nabi dan masyarakatnya. Nabi Hud menyebut masyarakatnya sebagai *kaumnya* untuk menunjukkan kedekatan emosional dan tanggung jawab moral terhadap masyarakat tersebut.[118]

Al-Qurṭubi menambahkan bahwa penggunaan kata *qawm* dalam ayat tersebut juga menunjukkan bahwa dakwah para nabi tidak ditujukan kepada individu secara terpisah, tetapi kepada komunitas sosial secara kolektif. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan sosial dalam perspektif Al-Qur'an harus dimulai dari perubahan dalam komunitas masyarakat.[119]

Dalam tafsir kontemporer, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa penggunaan istilah *qawm* menunjukkan bahwa Al-Qur'an sangat memperhatikan struktur sosial masyarakat dalam menyampaikan pesan-pesan moral. Menurutnya, perubahan sosial yang diajarkan dalam Al-Qur'an selalu berangkat dari kesadaran kolektif dalam masyarakat.[120]

Dalam perspektif sosiologi komunikasi, masyarakat dipahami sebagai jaringan hubungan sosial yang terbentuk melalui interaksi antara individu dalam kehidupan sehari-hari. Interaksi tersebut membentuk sistem sosial yang mengatur hubungan antara individu dalam masyarakat.[121]

---

[117] Raghib Al-Asfahani, *Al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an*, Dar al-Qalam, 2009, hal. 681

[118] Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Dar Tayyibah, 2002, jilid 3, hal. 452

[119] Al-Qurṭubi, *Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*, Muassasah al-Risalah, 2016, jilid 7, hal. 216

[120] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Lentera Hati, 2017, jilid 4, hal. 198

[121] Berger & Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality*, Penguin Books, 1991, hal. 74

Konsep *qawm* dalam Al-Qur'an juga menunjukkan bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam membentuk perilaku sosial individu. Individu tidak hidup secara terpisah dari masyarakat, tetapi hidup dalam suatu sistem sosial yang mempengaruhi cara berpikir dan bertindak mereka.

Dalam konteks komunikasi sosial, komunitas masyarakat merupakan ruang utama terjadinya proses komunikasi antara individu maupun kelompok. Melalui komunikasi, masyarakat membangun pemahaman bersama mengenai nilai, norma, dan tujuan kehidupan sosial.[122]

Al-Qur'an juga menunjukkan bahwa hubungan antara pemimpin dan masyarakat merupakan bagian dari dinamika sosial dalam suatu komunitas. Para nabi sebagai pemimpin spiritual dalam masyarakat selalu berusaha membangun komunikasi dengan masyarakat mereka melalui dialog dan nasihat.

Dialog antara nabi dan masyarakatnya menunjukkan bahwa komunikasi memiliki peran penting dalam proses perubahan sosial. Para nabi tidak memaksakan ajaran mereka kepada masyarakat, tetapi menyampaikan pesan mereka melalui komunikasi yang persuasif.

Selain itu, konsep *qawm* juga menunjukkan bahwa masyarakat memiliki tanggung jawab kolektif dalam menjaga nilai-nilai moral dalam kehidupan sosial. Ketika masyarakat secara kolektif menerima nilai-nilai kebaikan, maka kehidupan sosial akan berjalan dengan harmonis. Sebaliknya, ketika masyarakat secara kolektif menolak nilai-nilai moral, maka kehidupan sosial akan mengalami kerusakan. Hal ini terlihat dalam kisah berbagai kaum dalam Al-Qur'an yang mengalami kehancuran karena menolak ajaran para nabi.

Dalam kajian komunikasi sosial, komunitas memiliki peran penting dalam membentuk opini publik dalam masyarakat. Opini publik dapat mempengaruhi arah kebijakan sosial dalam suatu masyarakat.[123]

Konsep *qawm* dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa masyarakat merupakan komunitas sosial yang memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Al-Qur'an memandang masyarakat sebagai entitas kolektif yang memiliki tanggung jawab bersama dalam membangun kehidupan sosial yang adil dan harmonis. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep *qawm* menjadi penting dalam memahami relasi sosial antara pemimpin dan rakyat dalam perspektif Qur'ani.

2. *Ummah* (أمة) - Kolektivitas Moral

Istilah *umma*h (أمة) dalam Al-Qur'an merupakan konsep penting yang menggambarkan masyarakat sebagai suatu kolektivitas yang dipersatukan oleh

---

[122] Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*, Remaja Rosdakarya, 2017, hal. 146

[123] Stephen Littlejohn & Karen A Foss, *Theories of Human Communication*, Waveland Press, 2018, hal. 287

nilai, keyakinan, dan tujuan moral yang sama. Berbeda dengan istilah *qawm* yang lebih menekankan komunitas sosial berdasarkan kedekatan kultural atau historis, istilah *ummah* dalam Al-Qur'an menekankan dimensi kesatuan nilai dan orientasi moral dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, *ummah* sering dipahami sebagai komunitas manusia yang dipersatukan oleh sistem nilai yang sama, terutama nilai-nilai keimanan dan keadilan sosial. Dalam konteks relasi sosial kepemimpinan, konsep *ummah* menunjukkan bahwa masyarakat bukan sekadar kumpulan individu, tetapi merupakan komunitas moral yang memiliki tanggung jawab bersama dalam membangun kehidupan sosial yang berkeadaban.[124]

Secara linguistik, kata *ummah* berasal dari akar kata أمّ yang memiliki makna dasar "menuju" atau "menjadi pusat tujuan". Dari akar kata ini berkembang makna *ummah* sebagai kelompok manusia yang memiliki tujuan bersama. Raghib al-Asfahani menjelaskan bahwa *ummah* merujuk pada sekelompok manusia yang dipersatukan oleh agama, waktu, atau tujuan tertentu sehingga mereka memiliki orientasi kehidupan yang sama. Oleh karena itu, istilah *ummah* dalam Al-Qur'an sering digunakan untuk menggambarkan komunitas yang memiliki kesatuan nilai moral dalam kehidupan sosial.[125]

Konsep ummah dalam Al-Qur'an dapat dilihat dalam firman Allah SWT:

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

"Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia." (QS. Āli 'Imrān [3]: 110).

Ayat ini menunjukkan bahwa umat Islam dipandang sebagai komunitas moral yang memiliki tanggung jawab sosial untuk menegakkan kebaikan dalam masyarakat. Dalam tafsirnya, Ibn Katsir menjelaskan bahwa makna *khayra ummah* dalam ayat tersebut merujuk kepada umat yang memiliki komitmen untuk menegakkan amar ma'ruf dan mencegah kemungkaran dalam kehidupan social.[126]

Al-Qurṭubi menafsirkan ayat tersebut dengan menegaskan bahwa keutamaan umat Islam bukanlah semata-mata karena identitas keagamaannya, tetapi karena komitmen moral yang dimiliki oleh umat tersebut dalam membangun kehidupan sosial yang berkeadilan. Menurutnya, umat yang baik adalah umat yang aktif menjaga nilai-nilai moral dalam masyarakat.[127]

---

[124] Izutsu, *Ethico-Religious Concepts in the Qur'an*, McGill University Press, 2002, hal. 289.

[125] Raghib Al-Asfahani, *Al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an*, Dar al-Qalam, 2009, hal. 85.

[126] Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Dar Tayyibah, 2002, jilid 2, hal. 92

[127] Al-Qurṭubi, M., *Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*, Muassasah al-Risalah, 2016, jilid 4, hal. 168.

Dalam tafsir kontemporer, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa konsep *ummah* menunjukkan bahwa masyarakat dalam perspektif Al-Qur'an memiliki dimensi moral yang sangat kuat. Menurutnya, masyarakat yang disebut sebagai *ummah* adalah masyarakat yang memiliki kesadaran kolektif untuk menjaga nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan sosial.[128]

Dalam perspektif sosiologi agama, konsep komunitas moral menunjukkan bahwa masyarakat dapat dipersatukan oleh sistem nilai yang mereka yakini bersama. Nilai-nilai tersebut berfungsi sebagai pedoman yang mengatur perilaku individu dalam kehidupan sosial.[129]

Konsep *ummah* dalam Al-Qur'an juga menegaskan bahwa kehidupan sosial manusia tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai moral yang mengikat masyarakat. Tanpa adanya nilai moral yang disepakati bersama, kehidupan sosial akan mengalami disintegrasi karena tidak ada pedoman yang mengatur hubungan antar individu dalam masyarakat.

Dalam konteks komunikasi sosial, kesatuan nilai dalam suatu masyarakat menjadi faktor penting dalam membangun komunikasi yang efektif. Ketika masyarakat memiliki nilai yang sama, proses komunikasi akan berjalan lebih mudah karena terdapat kesamaan kerangka pemahaman dalam masyarakat.[130]

Konsep *ummah* juga menunjukkan bahwa masyarakat memiliki tanggung jawab kolektif dalam menjaga kehidupan sosial yang berkeadilan. Setiap anggota masyarakat memiliki peran dalam menjaga nilai-nilai kebaikan yang menjadi dasar kehidupan bersama.

Dalam perspektif kepemimpinan sosial, pemimpin memiliki peran penting dalam menjaga kesatuan moral masyarakat. Pemimpin harus mampu mengarahkan masyarakat agar tetap berpegang pada nilai-nilai moral yang menjadi dasar kehidupan sosial.

Komunikasi antara pemimpin dan masyarakat menjadi sarana penting dalam menjaga kesatuan moral tersebut. Melalui komunikasi yang efektif, pemimpin dapat mengingatkan masyarakat mengenai pentingnya menjaga nilai-nilai moral dalam kehidupan sosial.

Selain itu, konsep *ummah* juga menunjukkan bahwa masyarakat memiliki potensi besar untuk melakukan perubahan sosial secara kolektif. Ketika masyarakat memiliki kesadaran moral yang kuat, mereka dapat bersama-sama membangun kehidupan sosial yang lebih baik.

---

[128] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Lentera Hati, 2017, jilid 2, hal. 108.

[129] Emile Durkheim, *The Elementary Forms of Religious Life*, Free Press, 1995, hal. 218.

[130] Stephen Littlejohn& Karen A Foss, *Theories of Human Communication*, Waveland Press, 2018, hal. 294.

Dengan demikian, konsep *ummah* dalam Al-Qur'an menggambarkan masyarakat sebagai komunitas moral yang dipersatukan oleh nilai-nilai bersama. Masyarakat dalam perspektif Qur'ani tidak hanya dipahami sebagai kumpulan individu, tetapi sebagai kolektivitas moral yang memiliki tanggung jawab bersama dalam menjaga kebaikan dan keadilan dalam kehidupan sosial.

3. *An-Nās* (الناس) - Subjek Sosial

Istilah *an-nās* (الناس) dalam Al-Qur'an merupakan konsep yang menggambarkan manusia sebagai subjek sosial secara universal dalam kehidupan masyarakat. Berbeda dengan istilah *qawm* yang menunjuk komunitas tertentu dan *ummah* yang menekankan kesatuan nilai moral, istilah *an-nās* merujuk kepada manusia secara umum tanpa batasan identitas sosial, suku, maupun kelompok tertentu. Dalam konteks Al-Qur'an, penggunaan kata *an-nās* menunjukkan bahwa pesan-pesan moral dan sosial yang disampaikan oleh Al-Qur'an ditujukan kepada seluruh umat manusia. Oleh karena itu, konsep *an-nās* mencerminkan pandangan universal Al-Qur'an mengenai manusia sebagai makhluk sosial yang hidup dalam suatu jaringan hubungan sosial yang luas.[131]

Secara linguistik, kata *an-nās* berasal dari akar kata أنس yang memiliki makna dasar kedekatan, keakraban, dan kehidupan sosial manusia. Akar kata ini menunjukkan bahwa manusia secara fitrah memiliki kecenderungan untuk hidup bersama dengan manusia lain dalam kehidupan sosial. Raghib al-Asfahani menjelaskan bahwa istilah *an-nās* digunakan dalam Al-Qur'an untuk merujuk kepada manusia secara umum sebagai makhluk yang hidup dalam hubungan sosial dengan sesamanya.[132]

Penggunaan istilah an-nās dalam Al-Qur'an dapat dilihat dalam firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ

"Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan." (QS. Al-Ḥujurāt [49]: 13).

Ayat ini menunjukkan bahwa seluruh manusia berasal dari sumber yang sama sehingga pada hakikatnya manusia merupakan bagian dari satu komunitas kemanusiaan yang universal. Oleh karena itu, hubungan sosial antar manusia seharusnya didasarkan pada prinsip persaudaraan dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Dalam tafsirnya, Ibn Katsir menjelaskan bahwa ayat tersebut menegaskan kesatuan asal-usul manusia sehingga tidak ada alasan bagi

---

[131] Izutsu, *Ethico-Religious Concepts in the Qur'an*, McGill University Press, 2002, hal. 302

[132] Raghib Al-Asfahani, *Al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an*, Dar al-Qalam, 2009, hal. 808

manusia untuk merasa lebih tinggi dari manusia lainnya. Perbedaan suku dan bangsa yang ada dalam masyarakat bertujuan untuk saling mengenal dan membangun hubungan sosial yang baik.[133]

Al-Qurṭubi menjelaskan bahwa penggunaan panggilan "*yā ayyuhā an-nās*" dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa pesan Al-Qur'an bersifat universal dan tidak terbatas pada satu kelompok manusia saja. Menurutnya, ayat ini menekankan pentingnya membangun hubungan sosial yang didasarkan pada nilai keadilan dan saling menghormati.[134]

Dalam tafsir kontemporer, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat tersebut menunjukkan bahwa manusia pada dasarnya merupakan satu keluarga besar dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, hubungan antar manusia harus dibangun atas dasar penghormatan terhadap martabat manusia tanpa memandang latar belakang sosial maupun budaya.[135]

Dalam perspektif sosiologi, manusia dipahami sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup secara terpisah dari masyarakat. Kehidupan manusia selalu berlangsung dalam suatu struktur sosial yang melibatkan interaksi dengan individu lain dalam masyarakat.[136]

Konsep *an-nās* dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa masyarakat manusia bersifat plural dan terdiri dari berbagai kelompok yang memiliki latar belakang yang berbeda. Keberagaman ini merupakan bagian dari realitas sosial yang harus dikelola dengan prinsip keadilan dan saling menghormati.

Dalam konteks komunikasi sosial, keberagaman masyarakat memerlukan komunikasi yang mampu menjembatani perbedaan di antara kelompok-kelompok sosial. Komunikasi yang inklusif memungkinkan terciptanya pemahaman bersama dalam masyarakat yang plural.[137]

Al-Qur'an juga menunjukkan bahwa hubungan antara pemimpin dan masyarakat harus memperhatikan prinsip keadilan bagi seluruh manusia. Pemimpin tidak boleh hanya memperhatikan kepentingan kelompok tertentu, tetapi harus memperhatikan kepentingan seluruh masyarakat.

Dalam perspektif kepemimpinan sosial, pemimpin memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap individu dalam masyarakat memperoleh perlakuan yang adil. Keadilan sosial merupakan salah satu prinsip utama dalam kepemimpinan yang diajarkan oleh Al-Qur'an.

---

[133] Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Dar Tayyibah, 2002, jilid 7, hal. 377

[134] Al-Qurṭubi, *Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*, Muassasah al-Risalah, 2016, jilid 16, hal. 342

[135] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Lentera Hati, 2017, jilid 13, hal. 238

[136] Berger & Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality*, Penguin Books, 1991, hal. 89

[137] Stephen Littlejohn &Karen A Foss, K., *Theories of Human Communication*, Waveland Press, 2018, hal. 312

Komunikasi antara pemimpin dan masyarakat menjadi sarana penting dalam menjaga hubungan sosial yang adil dalam masyarakat. Melalui komunikasi yang terbuka, pemimpin dapat memahami kebutuhan masyarakat yang beragam.

Selain itu, komunikasi juga memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada pemimpin. Proses komunikasi ini membantu menjaga keseimbangan hubungan antara pemimpin dan masyarakat.

Konsep *an-nās* dalam Al-Qur'an menggambarkan manusia sebagai subjek sosial universal yang hidup dalam suatu masyarakat yang plural. Al-Qur'an menegaskan bahwa hubungan sosial antar manusia harus didasarkan pada prinsip keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, serta komunikasi yang mampu menjembatani keberagaman dalam kehidupan sosial masyarakat.

E. Isyarat Qur'an tentang Etika Komunikasi

1. *Qaulan Karīman* (قولًا كريمًا): Komunikasi yang Menghormati

Allah SWT berfirman:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

"Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan 'ah' dan janganlah engkau membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia." (QS. Al-Isrā' [17]: 23).

Ayat ini menunjukkan salah satu prinsip penting dalam etika komunikasi Qur'ani yaitu *qaulan karīman* (قولًا كريمًا), yakni komunikasi yang dilakukan dengan penuh penghormatan terhadap martabat manusia. Konsep ini menunjukkan bahwa komunikasi tidak hanya berkaitan dengan penyampaian pesan, tetapi juga berkaitan dengan cara menyampaikan pesan yang menghargai pihak lain. Dalam konteks relasi sosial, komunikasi yang penuh penghormatan akan memperkuat hubungan antara individu dalam masyarakat.

Secara linguistik, kata *karīm* (كريم) berasal dari akar kata كرمyang berarti kemuliaan, keluhuran, dan kehormatan. Dalam kajian bahasa Arab klasik, kata ini digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang memiliki nilai tinggi dan dihormati. Raghib al-Asfahani menjelaskan bahwa istilah *karīm* merujuk pada sesuatu yang memiliki nilai kemuliaan baik dari segi moral maupun perilaku.

Oleh karena itu, ungkapan *qaulan karīman* dapat dipahami sebagai perkataan yang disampaikan dengan penuh penghormatan dan kelembutan.[138]

Dalam tafsirnya, Ibn Katsir menjelaskan bahwa perintah *qaulan karīman* dalam ayat tersebut menunjukkan kewajiban berbicara dengan penuh penghormatan terutama kepada orang tua. Menurutnya, ucapan yang mulia adalah ucapan yang lembut, sopan, dan tidak mengandung kata-kata yang menyakitkan hati.[139]

Al-Qurṭubi menjelaskan bahwa istilah *qaulan karīman* menunjukkan standar etika komunikasi yang tinggi dalam Islam. Menurutnya, perkataan yang mulia adalah perkataan yang tidak hanya benar secara isi, tetapi juga disampaikan dengan cara yang menghormati perasaan orang lain.[140]

Dalam tafsir kontemporer, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa *qaulan karīman* merupakan bentuk komunikasi yang mencerminkan penghormatan terhadap martabat manusia. Menurutnya, komunikasi yang mulia adalah komunikasi yang menjaga perasaan pihak lain serta menghindari ucapan yang dapat merendahkan atau melukai orang lain.[141] Konsep *qaulan karīman* menunjukkan bahwa komunikasi dalam Islam harus dilandasi oleh penghormatan terhadap martabat manusia. Setiap individu memiliki harga diri yang harus dijaga dalam interaksi sosial. Oleh karena itu, komunikasi yang baik harus mempertimbangkan dampak emosional dari kata-kata yang disampaikan kepada orang lain.

Dalam konteks kepemimpinan, prinsip komunikasi yang menghormati martabat manusia menjadi sangat penting karena pemimpin sering berinteraksi dengan masyarakat yang memiliki latar belakang sosial yang beragam. Pemimpin yang menggunakan komunikasi yang penuh penghormatan akan lebih mudah membangun kepercayaan masyarakat.142

Prinsip komunikasi yang menghormati martabat manusia juga ditegaskan melalui hadits berikut :

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا، وَيَعْرِفْ شَرَفَ كَبِيرِنَا» (رواه الترمذي) [143]

Dari ‘Abdullāh bin ‘Amr r.a., ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: “Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih muda di

---

[138] Raghib Al-Asfahani, *Al-Mufradat fi Gharib al-Qur’an*, Dar al-Qalam, 2009, hal. 704

[139] Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur’an al-‘Azhim*, Dar Tayyibah, 2002, jilid 5, hal. 64

[140] Al-Qurṭubi, *Al-Jāmi‘ li Aḥkām al-Qur’ān*, Muassasah al-Risalah, 2016, jilid 10, hal. 246

[141] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Lentera Hati, 2017, jilid 7, hal. 462

[142] Rivai, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, RajaGrafindo Persada, 2018, hal. 284

[143] Muḥammad ibn ʻĪsā at-Tirmiżī, *Jāmi‘ at-Tirmiżī*, Kitāb al-Birr wa aṣ-Ṣilah, Bāb Mā Jā’a fī Raḥmat aṣ-Ṣibyān, no. 1920. At-Tirmiżī menilai hadis ini sebagai hadis ḥasan ṣaḥīḥ.

antara kami dan tidak mengetahui kehormatan orang yang lebih tua di antara kami." (HR. Tirmidzi).

Hadis ini menunjukkan bahwa komunikasi dalam Islam harus dibangun di atas kesadaran hierarki moral dan sosial yang beradab. Menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda bukan sekadar etika personal, tetapi juga prinsip relasi sosial yang menjaga harmoni masyarakat. Dalam konteks komunikasi pemimpin dan rakyat, penghormatan berarti pemimpin tidak merendahkan martabat rakyat, sementara kasih sayang berarti kekuasaan dijalankan dengan empati dan kepedulian. Komunikasi yang kehilangan penghormatan dan rahmah akan mudah berubah menjadi komunikasi kasar, merendahkan, dan mencederai kepercayaan sosial. Komunikasi yang menghargai individu akan menciptakan suasana interaksi yang positif dalam masyarakat.[144]

Selain berkaitan dengan penghormatan terhadap orang tua sebagaimana konteks ayat dalam QS. Al-Isrā' [17]:23, konsep *qaulan karīman* juga mengandung prinsip umum etika komunikasi dalam Islam yang menekankan pentingnya menjaga martabat manusia dalam setiap interaksi sosial. Dalam perspektif etika Islam, bahasa yang digunakan seseorang mencerminkan kualitas moral dan kedewasaan spiritualnya. Oleh karena itu, perkataan yang baik dan penuh penghormatan menjadi indikator akhlak seorang muslim dalam kehidupan bermasyarakat. Bahasa yang santun menunjukkan kesadaran bahwa setiap manusia memiliki kehormatan yang harus dihargai dalam komunikasi sosial.[145]

Dalam kajian akhlak Islam, komunikasi yang penuh penghormatan merupakan bagian dari akhlak *al-karīmah* yang menjadi tujuan utama pendidikan moral dalam Islam. Akhlak yang baik tidak hanya tercermin dalam perbuatan, tetapi juga dalam tutur kata yang digunakan dalam interaksi sosial. Ucapan yang baik dapat menumbuhkan rasa saling menghargai di antara anggota masyarakat serta memperkuat hubungan sosial yang harmonis. Oleh karena itu, Islam sangat menekankan pentingnya menjaga lisan sebagai bagian dari tanggung jawab moral seorang muslim.[146]

Dalam konteks kehidupan sosial modern, prinsip *qaulan karīman* dapat dipahami sebagai dasar komunikasi yang menjunjung tinggi nilai kesantunan dan etika publik. Komunikasi yang santun akan menciptakan suasana interaksi yang lebih terbuka dan saling menghargai. Sebaliknya, komunikasi yang kasar dan merendahkan dapat merusak hubungan sosial serta memicu konflik di

---

[144] Stephen Littlejohn & Karen A Foss, *Theories of Human Communication*, Waveland Press, 2018, hal. 331

[145] M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Jakarta: Lentera Hati, 2013, hal. 318

[146] Yunahar Ilyas, *Kuliah Akhlak*, Yogyakarta: LPPI UMY Press, 2011, hal. 138

tengah masyarakat. Oleh karena itu, kesantunan bahasa menjadi salah satu indikator penting dalam membangun komunikasi sosial yang sehat dalam masyarakat.[147]

Prinsip komunikasi yang menghormati martabat manusia juga memiliki kaitan erat dengan konsep etika sosial dalam Islam yang menempatkan manusia sebagai makhluk yang dimuliakan oleh Allah SWT. Al-Qur'an menegaskan bahwa manusia diciptakan dengan kehormatan yang harus dijaga dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, komunikasi yang merendahkan orang lain bertentangan dengan nilai kemanusiaan yang diajarkan dalam Islam. Komunikasi yang menghormati martabat manusia merupakan bentuk pengakuan terhadap nilai kemuliaan yang dimiliki setiap individu.[148]

Dalam kajian kepemimpinan Islam, penggunaan bahasa yang penuh penghormatan menjadi salah satu indikator penting dari kepemimpinan yang beretika. Pemimpin yang mampu menjaga tutur katanya akan lebih mudah memperoleh kepercayaan masyarakat karena masyarakat merasa dihargai dalam interaksi sosial tersebut. Bahasa yang santun juga mencerminkan kedewasaan emosional dan moral seorang pemimpin dalam menghadapi berbagai dinamika sosial. Oleh karena itu, komunikasi yang menghormati martabat manusia menjadi salah satu ciri kepemimpinan yang berkeadaban dalam masyarakat.[149]

Selain itu, komunikasi yang penuh penghormatan juga memiliki peran penting dalam membangun budaya dialog dalam masyarakat. Dialog yang sehat hanya dapat berlangsung ketika setiap pihak merasa dihargai dan didengar dalam proses komunikasi. Dalam konteks ini, *qaulan karīman* mendorong terciptanya komunikasi yang dialogis dan partisipatif dalam kehidupan sosial. Prinsip ini sejalan dengan nilai musyawarah dalam Islam yang menekankan pentingnya menghargai pendapat orang lain dalam proses pengambilan keputusan sosial.[150]

Dalam perspektif komunikasi sosial, penggunaan bahasa yang menghormati manusia juga memiliki dampak psikologis yang positif dalam hubungan antar individu. Bahasa yang santun dapat menumbuhkan rasa aman, dihargai, dan diterima dalam interaksi sosial. Kondisi ini akan memperkuat kepercayaan sosial antara individu dalam masyarakat. Oleh karena itu, prinsip *qaulan karīman* tidak hanya memiliki dimensi etika religius, tetapi juga

---

[147] Deddy Mulyana, *Komunikasi Efektif: Suatu Pendekatan Lintas Budaya*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005, hal. 127

[148] Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Jakarta: Mizan, 2017, hal. 344

[149] Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016, hal. 145

[150] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2001, hal. 1102

memiliki relevansi psikologis dan sosiologis dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis.[151]

Komunikasi yang menghormati martabat manusia juga berperan penting dalam mengurangi konflik sosial. Banyak konflik dalam masyarakat terjadi karena komunikasi yang tidak menghargai perasaan pihak lain. Dalam konteks kepemimpinan publik, komunikasi yang menghormati masyarakat dapat memperkuat legitimasi kepemimpinan. Masyarakat cenderung menghormati pemimpin yang memperlakukan mereka dengan penuh penghargaan.[152]

Selain itu, komunikasi yang penuh penghormatan juga dapat menciptakan hubungan emosional yang positif antara pemimpin dan masyarakat. Hubungan ini penting dalam membangun solidaritas sosial dalam masyarakat. Al-Qur'an sendiri banyak menggambarkan bagaimana para nabi menggunakan komunikasi yang penuh penghormatan dalam berdialog dengan masyarakat mereka. Para nabi tidak menggunakan bahasa yang kasar meskipun menghadapi penolakan dari masyarakat.

Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi yang mulia merupakan salah satu strategi penting dalam dakwah dan kepemimpinan sosial.

Dalam perspektif komunikasi modern, komunikasi yang menghargai individu disebut sebagai komunikasi humanis. Komunikasi ini menekankan pentingnya empati dalam interaksi sosial.[153]

Qaulan karīman memiliki relevansi penting dalam etika komunikasi sosial, khususnya dalam hubungan antara pemimpin dan masyarakat. Prinsip komunikasi yang menghormati martabat manusia merupakan fondasi utama dalam membangun hubungan sosial yang sehat dalam masyarakat. Komunikasi yang menghargai individu memungkinkan terciptanya suasana dialog yang konstruktif karena setiap pihak merasa dihormati dalam proses komunikasi tersebut.[154]

Dalam kajian komunikasi Islam, *qaulan karīman* juga dipahami sebagai bentuk komunikasi yang menempatkan penghormatan terhadap manusia sebagai prinsip utama dalam interaksi sosial. Komunikasi yang menghargai martabat manusia tidak hanya berkaitan dengan pilihan kata yang digunakan, tetapi juga berkaitan dengan sikap komunikator dalam menghargai keberadaan pihak lain dalam proses komunikasi.[155]

---

[151] Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015, hal. 257

[152] Northouse, *Leadership: Theory and Practice*, Sage Publications, 2019, hal. 219

[153] Rogers, *On Becoming a Person*, Houghton Mifflin, 1995, hal. 318

[154] Fikra Awla, & Akhmad Rifai, Political Communication in the Quranic Perspective: Ethical Principles for Contemporary Politics, *Palakka: Media and Islamic Communication*, 2025, hal. 76

[155] Huda, Etika Komunikasi Islam dalam Relasi Sosial Masyarakat, *Jurnal Komunikasi Islam*, 2021, hal. 121

Komunikasi yang menghormati martabat manusia dapat memperkuat kepercayaan sosial antara pemimpin dan masyarakat. Ketika pemimpin berbicara dengan bahasa yang menghargai masyarakat, masyarakat akan merasa diakui sebagai bagian penting dari kehidupan sosial. Hal ini dapat memperkuat legitimasi kepemimpinan dalam masyarakat.[156]

Dalam perspektif komunikasi publik, penggunaan bahasa yang menghormati masyarakat juga dapat membantu menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara pemerintah dan rakyat. Bahasa yang menghargai masyarakat menunjukkan bahwa pemimpin memiliki empati terhadap kondisi sosial masyarakat yang dipimpinnya.[157]

Komunikasi yang berlandaskan penghormatan terhadap manusia dapat mengurangi konflik sosial dalam masyarakat. Banyak konflik dalam masyarakat muncul akibat komunikasi yang merendahkan atau tidak menghargai pihak lain. Oleh karena itu, komunikasi yang penuh penghormatan dapat menjadi sarana penting dalam menjaga stabilitas sosial dalam masyarakat.[158]

Selain itu, komunikasi yang menghargai martabat manusia juga berperan penting dalam membangun budaya dialog dalam masyarakat. Dialog yang sehat hanya dapat terjadi ketika setiap pihak merasa dihargai dalam proses komunikasi. Oleh karena itu, prinsip *qaulan karīman* dapat menjadi dasar penting dalam membangun komunikasi yang dialogis dalam kehidupan sosial.[159]

Dengan demikian, berbagai kajian akademik menunjukkan bahwa konsep *qaulan karīman* memiliki relevansi yang sangat kuat dalam kehidupan sosial modern. Prinsip komunikasi yang menghormati martabat manusia tidak hanya menjadi pedoman etika dalam ajaran Islam, tetapi juga menjadi dasar penting dalam membangun komunikasi kepemimpinan yang berkeadaban dalam masyarakat. Komunikasi yang menghargai manusia akan memperkuat hubungan sosial antara pemimpin dan rakyat serta menciptakan kehidupan sosial yang lebih harmonis.

2. *Qaulan Ma'rūfan* (قولًا معروفًا): Komunikasi yang Selaras

Allah SWT berfirman:

---

[156] Abdul Rahman, Islamic Political Communication and Public Trust, *Jurnal Politik Islam*, 2020, hal. 63

[157] Fauzi, Komunikasi Publik dalam Perspektif Etika Islam, *Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 2022, hal. 147

[158] Siregar, Etika Komunikasi Kepemimpinan dalam Perspektif Islam, *Jurnal Dakwah dan Komunikasi,* 2019, hal. 92

[159] Latif, Social Communication in Islamic Perspective*, Jurnal Ilmu Komunikasi Islam*, 2020, hal. 102

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupanmu, tetapi berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik." (QS. An-Nisā' [4]: 5).

Ayat ini memperkenalkan konsep *qaulan ma'rūfan* (قولًا معروفًا) sebagai salah satu prinsip etika komunikasi dalam Al-Qur'an. Istilah ini merujuk pada bentuk komunikasi yang selaras dengan norma kebaikan yang diakui dalam masyarakat. Komunikasi yang baik dalam perspektif Qur'ani tidak hanya berkaitan dengan kebenaran isi pesan, tetapi juga berkaitan dengan kesesuaian pesan dengan nilai-nilai moral dan norma sosial yang berlaku. Oleh karena itu, *qaulan ma'rūfan* dapat dipahami sebagai komunikasi yang membawa kemaslahatan serta tidak menimbulkan kerusakan dalam kehidupan sosial.

Secara linguistik, kata *ma'rūf* (معروف) berasal dari akar kata عرف yang berarti sesuatu yang dikenal atau diakui sebagai baik oleh masyarakat. Raghib al-Asfahani menjelaskan bahwa *ma'rūf* adalah segala sesuatu yang diterima oleh akal sehat dan diakui oleh masyarakat sebagai perbuatan yang baik. Oleh karena itu, istilah *qaulan ma'rūfan* merujuk kepada perkataan yang baik, sopan, dan sesuai dengan nilai-nilai kebaikan dalam masyarakat.[160]

Dalam tafsirnya, Ibn Katsir menjelaskan bahwa perintah *qaulan ma'rūfan* dalam ayat tersebut menunjukkan kewajiban berbicara dengan kata-kata yang lembut dan penuh kebaikan kepada orang lain. Menurutnya, ucapan yang baik akan membantu menjaga hubungan sosial dalam masyarakat.[161]

Al-Qurṭubi menjelaskan bahwa *qaulan ma'rūfan* berarti perkataan yang mengandung kebaikan dan tidak menimbulkan rasa sakit bagi orang yang mendengarnya. Menurutnya, komunikasi yang baik harus mempertimbangkan kondisi sosial dan psikologis orang yang diajak berbicara.[162]

Dalam tafsir kontemporer, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa konsep *qaulan ma'rūfan* menunjukkan bahwa komunikasi dalam Islam harus mempertimbangkan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Komunikasi yang baik adalah komunikasi yang tidak hanya benar secara isi, tetapi juga diterima secara sosial oleh masyarakat.[163]

Prinsip *qaulan ma'rūfan* juga disebutkan dalam ayat lain:

قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى

---

[160] Raghib Al-Asfahani, R., *Al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an*, Dar al-Qalam, 2009, hal. 560

[161] Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Dar Tayyibah, 2002, jilid 2, hal. 210

[162] Al-Qurṭubi, *Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*, Muassasah al-Risalah, 2016, jilid 5, hal. 35

[163] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Lentera Hati, 2017, jilid 2, hal. 402

"Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan." (QS. Al-Baqarah [2]: 263).

Ayat ini menunjukkan bahwa komunikasi yang baik memiliki nilai moral yang tinggi dalam kehidupan sosial. Dalam tafsirnya, Ibn Katsir menjelaskan bahwa ayat ini menekankan pentingnya menjaga ucapan dalam interaksi sosial. Menurutnya, ucapan yang baik dapat memberikan dampak positif dalam hubungan sosial antar manusia.[164]

Konsep *qaulan ma'rūfan* juga dapat dipahami sebagai bentuk komunikasi yang mengedepankan etika kesantunan dalam interaksi sosial. Dalam tradisi komunikasi Islam, kesantunan bahasa dipandang sebagai bagian dari akhlak yang mencerminkan kualitas moral seseorang. Bahasa yang santun bukan hanya memperlihatkan sikap hormat terhadap lawan bicara, tetapi juga menjadi sarana untuk menjaga keharmonisan hubungan sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, komunikasi yang baik harus mempertimbangkan nilai kesopanan dan etika dalam penyampaian pesan.[165]

Dalam perspektif dakwah Islam, penggunaan bahasa yang baik dan sesuai dengan nilai-nilai kebaikan masyarakat merupakan bagian dari strategi komunikasi yang efektif. Dakwah yang disampaikan dengan bahasa yang santun dan mudah diterima akan lebih efektif dalam mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kesesuaian pesan dengan nilai sosial masyarakat merupakan faktor penting dalam keberhasilan komunikasi sosial dalam Islam.[166]

Prinsip *qaulan ma'rūfan* juga berkaitan dengan konsep komunikasi persuasif yang menekankan pentingnya pendekatan yang lembut dan konstruktif dalam menyampaikan pesan. Komunikasi yang bersifat persuasif tidak memaksakan kehendak kepada pihak lain, tetapi berupaya membangun kesadaran bersama melalui dialog yang bijak. Pendekatan komunikasi seperti ini memungkinkan terciptanya pemahaman bersama dalam masyarakat yang beragam latar belakang sosial dan budayanya.[167]

Dalam kajian komunikasi sosial, keselarasan komunikasi dengan norma masyarakat juga berkaitan dengan konsep integrasi sosial. Komunikasi yang sesuai dengan nilai-nilai sosial masyarakat dapat memperkuat kohesi sosial karena pesan yang disampaikan dianggap mewakili kepentingan bersama. Sebaliknya, komunikasi yang tidak mempertimbangkan norma sosial dapat memicu ketegangan dan konflik dalam masyarakat. Komunikasi yang

---

[164] Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Dar Tayyibah, 2002, jilid 1, hal. 692

[165] Abudin Nata, *Akhlak Tasawuf*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016, hal. 210

[166] Moh. Ali Aziz, *Ilmu Dakwah*, Jakarta: Kencana, 2017, hal. 168

[167] Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktik*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017, hal. 93.

berlandaskan nilai *ma'rūf* berperan penting dalam menjaga stabilitas hubungan sosial.[168]

Dalam konteks kepemimpinan publik, pemimpin yang mampu menggunakan bahasa yang sesuai dengan nilai sosial masyarakat akan lebih mudah memperoleh dukungan dari masyarakat. Bahasa yang mencerminkan nilai-nilai kebaikan sosial menunjukkan bahwa pemimpin memiliki kepekaan terhadap kondisi sosial masyarakat yang dipimpinnya. Komunikasi yang selaras dengan nilai *ma'rūf* dapat memperkuat legitimasi kepemimpinan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin.[169]

Selain itu, komunikasi yang selaras dengan norma sosial masyarakat juga berperan penting dalam membangun budaya komunikasi yang inklusif. Budaya komunikasi yang inklusif memungkinkan setiap individu dalam masyarakat merasa dihargai dalam proses komunikasi. Dalam masyarakat yang plural, komunikasi yang mempertimbangkan nilai sosial bersama dapat menjadi sarana penting dalam membangun dialog yang konstruktif antara berbagai kelompok masyarakat.[170]

Prinsip *qaulan ma'rūfan* juga memiliki relevansi dalam pembangunan etika komunikasi publik di era modern. Dalam kehidupan masyarakat yang semakin kompleks, komunikasi yang baik harus mampu menjembatani perbedaan nilai dan kepentingan dalam masyarakat. Komunikasi yang selaras dengan norma kebaikan masyarakat dapat menjadi fondasi penting dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis serta memperkuat solidaritas sosial dalam masyarakat.[171]

Dalam kajian komunikasi sosial, norma sosial memiliki peran penting dalam mengatur interaksi antar individu dalam masyarakat. Norma tersebut berfungsi sebagai pedoman yang menentukan bagaimana individu harus berperilaku dalam interaksi sosial.[172]

Komunikasi yang selaras dengan norma sosial akan memudahkan terciptanya keharmonisan dalam masyarakat. Sebaliknya, komunikasi yang bertentangan dengan norma sosial dapat menimbulkan konflik dalam masyarakat.

Dalam konteks kepemimpinan, pemimpin harus mampu menyesuaikan komunikasi mereka dengan nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat.

---

[168] Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi*, Jakarta: Kencana, 2017, hal. 152.

[169] Veithzal Rivai, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018, hal. 233.

[170] Alo Liliweri, *Komunikasi Antarbudaya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, hal. 241.

[171] Nurudin, *Pengantar Komunikasi Massa*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017, hal. 184.

[172] Berger & Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality*, Penguin Books, 1991, hal. 112

Pemimpin yang memahami norma sosial masyarakat akan lebih mudah membangun komunikasi yang efektif dengan rakyat.[173]

Komunikasi yang sesuai dengan norma sosial juga membantu pemimpin memperoleh legitimasi dari masyarakat. Ketika masyarakat merasa bahwa pemimpin berbicara dengan cara yang menghargai nilai-nilai sosial mereka, masyarakat akan lebih percaya kepada pemimpin tersebut.

Selain itu, komunikasi yang baik juga dapat memperkuat solidaritas sosial dalam masyarakat. Solidaritas sosial merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas kehidupan sosial.

Dalam perspektif komunikasi modern, komunikasi yang selaras dengan nilai-nilai sosial disebut sebagai komunikasi normatif. Komunikasi ini menekankan pentingnya kesesuaian pesan dengan nilai yang diakui dalam masyarakat.[174]

Komunikasi normatif membantu menciptakan pemahaman bersama dalam masyarakat yang plural.

Dengan demikian, konsep *qaulan ma'rūfan* dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa komunikasi yang baik harus selaras dengan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Prinsip ini menjadi landasan penting dalam membangun komunikasi kepemimpinan yang etis dan konstruktif dalam kehidupan sosial.

Selain dijelaskan dalam literatur tafsir, konsep *qaulan ma'rūfan* juga banyak dibahas dalam kajian komunikasi Islam kontemporer. Dalam perspektif komunikasi Qur'ani, istilah ini menggambarkan komunikasi yang mengedepankan nilai-nilai sosial yang diakui sebagai baik oleh masyarakat. Komunikasi yang baik tidak hanya ditentukan oleh keakuratan pesan, tetapi juga oleh kesesuaiannya dengan norma yang berlaku dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, komunikasi yang sesuai dengan nilai *ma'rūf* akan memperkuat hubungan sosial antara individu maupun kelompok dalam masyarakat.[175]

Kajian komunikasi Islam juga menegaskan bahwa komunikasi yang berlandaskan nilai *ma'rūf* memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sosial masyarakat. Ketika komunikasi dilakukan dengan mempertimbangkan norma kebaikan yang diakui oleh masyarakat, maka interaksi sosial akan berjalan lebih harmonis karena setiap individu merasa dihargai dalam proses komunikasi tersebut. Oleh karena itu, prinsip *qaulan ma'rūfan* dapat dipahami sebagai landasan etika komunikasi yang menekankan pentingnya keselarasan

---

[173] Rivai, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, RajaGrafindo Persada, 2018, hal. 293

[174] Stephen Littlejohn & Karen A Foss, *Theories of Human Communication*, Waveland Press, 2018, hal. 337

[175] Fikra Awla & Akhmad Rifai, *Political* Communication in the Quranic Perspective: Ethical Principles for Contemporary Politics, *Palakka: Media and Islamic Communication*, 2025, hal. 74

antara pesan yang disampaikan dengan nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat.[176]

Dalam kajian komunikasi politik Islam, prinsip *qaulan ma'rūfan* juga dipahami sebagai pedoman etika komunikasi antara pemimpin dan masyarakat. Pemimpin yang menggunakan komunikasi yang selaras dengan norma sosial masyarakat akan lebih mudah memperoleh kepercayaan publik. Sebaliknya, komunikasi yang bertentangan dengan nilai-nilai sosial masyarakat dapat menimbulkan ketegangan sosial yang berpotensi merusak hubungan antara pemimpin dan rakyat.[177]

Penelitian lain dalam kajian komunikasi Islam juga menunjukkan bahwa komunikasi yang sesuai dengan norma sosial masyarakat dapat memperkuat legitimasi kepemimpinan. Ketika pemimpin menggunakan bahasa yang mencerminkan nilai-nilai moral masyarakat, masyarakat akan lebih mudah menerima pesan yang disampaikan oleh pemimpin tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa keselarasan antara komunikasi pemimpin dan nilai-nilai sosial masyarakat merupakan faktor penting dalam membangun hubungan sosial yang sehat dalam masyarakat.[178]

Selain itu, konsep *qaulan ma'rūfan* juga memiliki relevansi dalam komunikasi publik modern. Dalam konteks masyarakat yang plural, komunikasi publik harus memperhatikan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat agar pesan yang disampaikan dapat diterima secara luas oleh masyarakat. Komunikasi yang tidak memperhatikan norma sosial sering kali menimbulkan resistensi dari masyarakat karena dianggap tidak menghargai nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat tersebut.[179]

Dalam kajian etika komunikasi Islam, konsep *qaulan ma'rūfan* juga dipahami sebagai bentuk komunikasi yang menghindari penggunaan bahasa yang kasar atau merendahkan pihak lain. Komunikasi yang baik harus mampu menjaga kehormatan pihak lain serta menghindari kata-kata yang dapat menimbulkan konflik sosial. Dengan demikian, komunikasi yang selaras dengan nilai *ma'rūf* memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan hubungan sosial dalam masyarakat.[180]

Penelitian lain menunjukkan bahwa komunikasi yang berbasis pada nilai *ma'rūf* juga dapat memperkuat solidaritas sosial dalam masyarakat. Ketika

---

[176] Huda, Etika Komunikasi Islam dalam Relasi Sosial Masyarakat, *Jurnal Komunikasi Islam*, 2021, hal. 118

[177] Abdul Rahman, Islamic Political Communication and Public Trust, *Jurnal Politik Islam*, 2020, hal. 59

[178] Siregar, *Etika* Komunikasi Kepemimpinan dalam Perspektif Islam, *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 2019, hal. 87

[179] Fauzi, Komunikasi Publik dalam Perspektif Etika Islam, *Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 2022, hal. 142

[180] Yusuf, Islamic Communication Ethics and Social Harmony, *Jurnal Studi Islam dan Komunikasi*, 2021, hal. 133

komunikasi dilakukan dengan cara yang menghargai norma sosial masyarakat, individu akan merasa menjadi bagian dari komunitas sosial yang memiliki nilai bersama. Hal ini akan memperkuat rasa kebersamaan dalam masyarakat sehingga hubungan sosial dapat terjaga dengan baik.[181]

Dengan demikian, berbagai kajian akademik menunjukkan bahwa konsep *qaulan ma'rūfan* memiliki relevansi yang sangat kuat dalam kehidupan sosial masyarakat. Prinsip ini tidak hanya menjadi pedoman etika komunikasi dalam ajaran Islam, tetapi juga menjadi landasan penting dalam membangun komunikasi sosial yang harmonis dalam masyarakat modern. Oleh karena itu, komunikasi yang selaras dengan norma sosial masyarakat merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas hubungan antara pemimpin dan rakyat dalam kehidupan sosial.

3. *Qaulan Sadīdan* (قولًا سديدًا): Komunikasi yang Jujur

Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

"Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar." (QS. Al-Ahzāb [33]: 70).

Ayat ini menjadi dasar utama konsep *qaulan sadīdan* (قولًا سديدًا) dalam etika komunikasi Qur'ani. Istilah ini merujuk pada komunikasi yang benar, lurus, dan tidak menyimpang dari kebenaran. Dalam konteks sosial, komunikasi yang benar merupakan fondasi penting dalam menjaga kepercayaan dalam masyarakat. Oleh karena itu, Al-Qur'an menempatkan kejujuran dalam komunikasi sebagai bagian dari ketakwaan kepada Allah.

Secara linguistik, kata *sadīd* (سديد) berasal dari akar kata سدّ yang berarti lurus, tepat, atau sesuatu yang mengarah kepada kebenaran. Raghib al-Asfahani menjelaskan bahwa kata *sadīd* merujuk pada sesuatu yang benar dan tepat sasaran sehingga tidak mengandung penyimpangan. Oleh karena itu, ungkapan *qaulan sadīdan* dapat dipahami sebagai perkataan yang jujur, adil, dan tidak mengandung kebohongan.[182]

Dalam tafsirnya, Ibn Katsir menjelaskan bahwa perintah untuk mengucapkan *qaulan sadīdan* menunjukkan bahwa setiap ucapan manusia harus mencerminkan kejujuran. Menurutnya, perkataan yang benar merupakan salah satu bentuk ketaatan kepada Allah karena ucapan yang tidak benar dapat menimbulkan kerusakan dalam kehidupan sosial.[183]

Al-Qurṭubi menafsirkan bahwa *qaulan sadīdan* adalah ucapan yang adil dan tidak menyimpang dari kebenaran. Ia menegaskan bahwa kejujuran dalam

---

[181] A. Latif, *Social Communication in Islamic Perspective*, Jurnal Ilmu Komunikasi Islam, 2020, hal. 97

[182] Raghib Al-Asfahani, *Al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an*, Dar al-Qalam, 2009, hal. 416

[183] Ibn Katsir. *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Dar Tayyibah, 2002, jilid 6, hal. 409

komunikasi merupakan dasar penting dalam menjaga hubungan sosial dalam masyarakat.[184]

Dalam tafsir kontemporer, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa konsep *qaulan sadīdan* menunjukkan bahwa komunikasi dalam Islam harus didasarkan pada integritas moral. Komunikasi yang jujur tidak hanya berkaitan dengan kebenaran informasi, tetapi juga berkaitan dengan niat baik dalam menyampaikan pesan kepada orang lain.[185]

Konsep komunikasi yang jujur juga ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW berikut ini :

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيقًا، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا» (رواه مسلم)[186]

Dari ‘Abdullāh bin Mas‘ūd r.a., dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: ‘Hendaklah kalian berlaku jujur, karena kejujuran menuntun kepada kebaikan, dan kebaikan menuntun kepada surga. Seseorang senantiasa berlaku jujur dan berusaha menjaga kejujuran hingga ia dicatat di sisi Allah sebagai orang yang sangat jujur. Jauhilah kedustaan, karena kedustaan menuntun kepada kejahatan, dan kejahatan menuntun kepada neraka. Seseorang senantiasa berdusta dan berusaha melakukan kedustaan hingga ia dicatat di sisi Allah sebagai pendusta.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini memperlihatkan bahwa kejujuran merupakan prinsip dasar komunikasi dalam Islam. Kejujuran tidak hanya dipahami sebagai kesesuaian antara ucapan dan fakta, tetapi juga sebagai orientasi moral yang mengarahkan manusia kepada kebaikan. Dalam konteks komunikasi pemimpin dan rakyat, prinsip ini menuntut pemimpin untuk menyampaikan informasi secara benar, tidak memanipulasi realitas, tidak menyembunyikan kebenaran publik, dan tidak menjadikan komunikasi sebagai alat pembenaran kekuasaan. Dengan demikian, *qaulan sadīdan* dalam Al-Qur’an menemukan penguatnya dalam hadis ini, yaitu komunikasi yang lurus, benar, dan bertanggung jawab secara

---

[184] Al-Qurṭubi, *Al-Jāmi‘ li Aḥkām al-Qur’ān*, Muassasah al-Risalah, 2016, jilid 14, hal. 214

[185] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Lentera Hati, 2017, jilid 11, hal. 300

[186] Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Birr wa aṣ-Ṣilah wa al-Ādāb, Bāb Qubḥ al-Kadzib wa Ḥusn aṣ-Ṣidq wa Faḍlih, no. 2607. Lihat juga Muḥammad ibn Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Adab, Bāb Qawl Allāh Ta‘ālā: Yā ayyuhā alladzīna āmanū ittaqū Allāha wa kūnū ma‘a aṣ-ṣādiqīn, no. 6094.

moral. Pemimpin yang berbicara dengan jujur akan lebih mudah memperoleh dukungan dari masyarakat.[187]

Konsep *qaulan sadīdan* juga berkaitan erat dengan prinsip integritas dalam komunikasi. Dalam etika Islam, integritas berarti kesesuaian antara ucapan, niat, dan tindakan seseorang. Komunikasi yang berintegritas mencerminkan konsistensi moral seorang individu dalam menyampaikan kebenaran. Oleh karena itu, kejujuran dalam berbicara tidak hanya dipahami sebagai penyampaian fakta yang benar, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral untuk menjaga kepercayaan orang lain dalam interaksi sosial.[188]

Dalam kajian etika sosial Islam, kejujuran dipandang sebagai fondasi utama dalam membangun masyarakat yang berkeadaban. Ucapan yang jujur akan menciptakan rasa saling percaya di antara anggota masyarakat sehingga hubungan sosial dapat berlangsung secara stabil dan harmonis. Sebaliknya, kebohongan dalam komunikasi dapat merusak tatanan sosial karena menimbulkan kecurigaan dan ketidakpercayaan di antara individu dalam masyarakat.[189]

Dalam perspektif komunikasi dakwah, prinsip *qaulan sadīdan* juga menjadi landasan penting dalam menyampaikan pesan keagamaan kepada masyarakat. Dakwah yang disampaikan secara jujur dan terbuka akan lebih mudah diterima oleh masyarakat karena mencerminkan ketulusan komunikator dalam menyampaikan pesan. Kejujuran dalam komunikasi dakwah juga menunjukkan bahwa pesan yang disampaikan tidak dimanipulasi untuk kepentingan pribadi, melainkan benar-benar ditujukan untuk kemaslahatan umat.[190]

Prinsip komunikasi yang jujur juga memiliki relevansi dalam kajian komunikasi organisasi, khususnya dalam membangun budaya transparansi dalam lembaga publik. Komunikasi yang transparan memungkinkan informasi disampaikan secara terbuka kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat memahami kebijakan yang diambil oleh pemimpin. Transparansi komunikasi ini akan memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga atau organisasi yang dipimpin oleh seseorang.[191]

Dalam konteks kepemimpinan, komunikasi yang jujur merupakan salah satu indikator penting dari kepemimpinan yang kredibel. Pemimpin yang

---

[187] Rivai, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, RajaGrafindo Persada, 2018, hal. 301

[188] Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 2001, hal. 269

[189] M. Dawam Rahardjo, *Etika Sosial dalam Kehidupan Berbangsa*, Jakarta: Kompas, 2013, hal. 121.

[190] Asep Muhyiddin dan Agus Ahmad Safei, *Metode Pengembangan Dakwah*, Bandung: Pustaka Setia, 2002, hal. 88.

[191] Rachmat Kriyantono, *Public Relations, Issue & Crisis Management*, Jakarta: Kencana, 2015, hal. 74.

menyampaikan informasi secara jujur akan lebih mudah memperoleh legitimasi dari masyarakat karena masyarakat merasa bahwa pemimpin tersebut dapat dipercaya. Sebaliknya, pemimpin yang sering menyampaikan informasi yang tidak benar akan kehilangan kepercayaan publik sehingga legitimasi kepemimpinannya menjadi lemah.[192]

Dalam kajian komunikasi politik, kejujuran juga merupakan unsur penting dalam membangun komunikasi yang etis antara pemimpin dan masyarakat. Komunikasi politik yang jujur akan membantu masyarakat memahami kebijakan pemerintah secara objektif sehingga masyarakat dapat memberikan penilaian yang rasional terhadap kebijakan tersebut. Kejujuran dalam komunikasi politik menjadi salah satu syarat utama dalam menciptakan pemerintahan yang akuntabel.[193]

Selain itu, komunikasi yang jujur juga memiliki dampak penting dalam pembentukan budaya komunikasi yang sehat dalam masyarakat. Budaya komunikasi yang didasarkan pada kejujuran akan mendorong masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara terbuka tanpa rasa takut atau curiga. Kondisi ini akan memperkuat iklim dialog dalam masyarakat sehingga perbedaan pandangan dapat diselesaikan melalui komunikasi yang konstruktif.[194]

Dalam kajian komunikasi sosial, kejujuran merupakan salah satu prinsip dasar dalam membangun komunikasi yang efektif. Komunikasi yang jujur memungkinkan terciptanya kepercayaan antara komunikator dan komunikan.[195] Selain itu, komunikasi yang jujur juga membantu menciptakan transparansi dalam kehidupan sosial. Transparansi memungkinkan masyarakat memperoleh informasi yang benar mengenai berbagai kebijakan yang diambil oleh pemimpin.

Dalam perspektif etika komunikasi Islam, kejujuran merupakan nilai yang sangat penting karena setiap ucapan manusia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah.

Dalam konteks komunikasi publik, prinsip *qaulan sadīdan* juga memiliki relevansi yang besar. Pemimpin harus menyampaikan informasi kepada masyarakat secara jujur agar masyarakat dapat memahami situasi sosial secara benar.

---

[192] Sondang P. Siagian, *Teori dan Praktik Kepemimpinan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hal. 156.

[193] Anwar Arifin, *Komunikasi Politik: Filsafat–Paradigma–Teori–Tujuan–Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011, hal. 103.

[194] Hafied Cangara, *Perencanaan dan Strategi Komunikasi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013, hal. 142.

[195] Stephen Littlejohn & Foss, K., *Theories of Human Communication*, Waveland Press, 2018, hal. 348

Penelitian dalam kajian komunikasi Islam menunjukkan bahwa komunikasi yang jujur dapat memperkuat hubungan antara pemimpin dan masyarakat.[196] Kajian lain juga menunjukkan bahwa transparansi dalam komunikasi publik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.[197]

Komunikasi yang jujur juga berperan penting dalam menjaga stabilitas sosial dalam masyarakat. Informasi yang benar membantu masyarakat mengambil keputusan yang tepat dalam kehidupan sosial. Dalam konteks komunikasi politik, kejujuran dalam komunikasi merupakan salah satu faktor penting dalam membangun legitimasi kepemimpinan.[198]

Kajian dalam jurnal komunikasi Islam menunjukkan bahwa konsep *qaulan sadīdan* memiliki relevansi yang sangat kuat dalam membangun komunikasi publik yang berintegritas. Komunikasi yang jujur dan akurat menjadi fondasi penting dalam menjaga hubungan antara pemimpin dan masyarakat. Ketika informasi disampaikan secara benar dan transparan, masyarakat akan memiliki dasar yang kuat untuk mempercayai kebijakan yang diambil oleh pemimpin.[199]

Penelitian lain dalam kajian komunikasi Islam juga menegaskan bahwa kejujuran dalam komunikasi merupakan salah satu nilai utama dalam etika komunikasi Qur'ani. Komunikasi yang jujur tidak hanya berkaitan dengan penyampaian fakta secara benar, tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab moral komunikator dalam menjaga kepercayaan masyarakat.[200]

Dalam konteks komunikasi politik Islam, prinsip *qaulan sadīdan* dipahami sebagai dasar penting dalam membangun komunikasi politik yang transparan. Transparansi dalam komunikasi politik memungkinkan masyarakat memahami secara jelas kebijakan yang diambil oleh pemimpin sehingga masyarakat dapat memberikan dukungan terhadap kebijakan tersebut.[201]

Kajian lain juga menunjukkan bahwa komunikasi yang jujur memiliki pengaruh besar terhadap stabilitas sosial dalam masyarakat. Ketika masyarakat

---

[196] Awla, , & Rifai, A., Political Communication in the Quranic Perspective: Ethical Principles for Contemporary Politics, *Palakka: Media and Islamic Communication*, 2025, hal. 79

[197] Huda, Etika Komunikasi Islam dalam Relasi Sosial Masyarakat, *Jurnal Komunikasi Islam*, 2021, hal. 125

[198] Rahman, A., *Islamic Political Communication and Public Trust*, Jurnal Politik Islam, 2020, hal. 66

[199] Awla & Rifai, A., Political Communication in the Quranic Perspective: Ethical Principles for Contemporary Politics, *Palakka: Media and Islamic Communication*, 2025, hal. 81

[200] Huda, Etika Komunikasi Islam dalam Relasi Sosial Masyarakat, *Jurnal Komunikasi Islam*, 2021, hal. 128

[201] Abdul Rahman, Islamic Political Communication and Public Trust, *Jurnal Politik Islam*, 2020, hal. 69

memperoleh informasi yang benar mengenai kondisi sosial dan kebijakan pemerintah, masyarakat akan lebih mudah menyesuaikan diri dengan perubahan sosial yang terjadi.[202]

Dalam penelitian mengenai etika komunikasi kepemimpinan, disebutkan bahwa integritas komunikasi merupakan salah satu faktor utama dalam membangun legitimasi kepemimpinan. Pemimpin yang dikenal jujur dalam komunikasi akan lebih dipercaya oleh masyarakat dibandingkan pemimpin yang sering menyampaikan informasi yang tidak akurat.[203]

Selain itu, komunikasi yang jujur juga berperan penting dalam membangun budaya transparansi dalam masyarakat. Budaya transparansi memungkinkan masyarakat memperoleh akses terhadap informasi yang berkaitan dengan kehidupan sosial mereka sehingga masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan sosial.[204]

Kajian komunikasi sosial juga menunjukkan bahwa kejujuran dalam komunikasi dapat memperkuat solidaritas sosial dalam masyarakat. Ketika individu dalam masyarakat saling berkomunikasi secara jujur, hubungan sosial akan menjadi lebih kuat karena didasarkan pada rasa saling percaya.[205]

Dengan demikian, berbagai penelitian akademik menunjukkan bahwa prinsip *qaulan sadīdan* memiliki relevansi yang sangat besar dalam kehidupan sosial modern. Komunikasi yang jujur dan berintegritas tidak hanya menjadi pedoman etika dalam ajaran Islam, tetapi juga menjadi dasar penting dalam membangun komunikasi kepemimpinan yang transparan dan bertanggung jawab dalam masyarakat.

4. *Qaulan Layyinan* (قولًا لينًا): Komunikasi Humanis

Allah SWT berfirman:

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ

"Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut." (QS. Ṭāhā [20]: 44).

Ayat ini menjadi dasar penting bagi konsep *qaulan layyinan* (قولًا لينًا) dalam etika komunikasi Qur'ani. Ayat tersebut ditujukan kepada Nabi Musa a.s dan Nabi Harun a.s ketika diperintahkan untuk berdialog dengan Fir'aun yang dikenal sebagai penguasa yang sangat zalim. Meskipun menghadapi

---

[202] Fauzi, Komunikasi Publik dalam Perspektif Etika Islam, *Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 2022, hal. 151

[203] Siregar, Etika Komunikasi Kepemimpinan dalam Perspektif Islam, *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 2019, hal. 96

[204] Latif, Social Communication in Islamic Perspective, *Jurnal Ilmu Komunikasi Islam*, 2020, hal. 108

[205] M. Yusuf, Islamic Communication Ethics and Social Harmony, *Jurnal Studi Islam dan Komunikasi*, 2021, hal. 139

penguasa yang keras dan sombong, Allah tetap memerintahkan agar komunikasi dilakukan dengan cara yang lembut dan persuasif. Hal ini menunjukkan bahwa kelembutan dalam komunikasi merupakan prinsip penting dalam menyampaikan pesan moral kepada masyarakat.

Secara linguistik, kata *layyin* (لين) berasal dari akar kata يلين – لانyang berarti lembut, lunak, atau tidak keras. Raghib al-Asfahani menjelaskan bahwa kata *layyin* merujuk pada sikap yang lembut dalam perkataan maupun perilaku yang mampu melunakkan hati orang yang mendengarnya. Oleh karena itu, istilah *qaulan layyinan* merujuk pada komunikasi yang disampaikan dengan kelembutan sehingga dapat menyentuh hati penerima pesan.[206]

Dalam tafsirnya, Ibn Katsir menjelaskan bahwa perintah untuk menggunakan *qaulan layyinan* dalam berdialog dengan Fir'aun menunjukkan pentingnya kelembutan dalam komunikasi dakwah. Menurutnya, ucapan yang lembut dapat membuka hati seseorang untuk menerima kebenaran, bahkan ketika orang tersebut sebelumnya menolak kebenaran.[207]

Al-Qurṭubi menambahkan bahwa kelembutan dalam komunikasi merupakan salah satu strategi penting dalam menyampaikan pesan kepada orang lain. Menurutnya, kata-kata yang lembut lebih efektif dalam mempengaruhi orang lain dibandingkan dengan kata-kata yang keras.[208]

Dalam tafsir kontemporer, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa konsep *qaulan layyinan* menunjukkan bahwa komunikasi dalam Islam harus memperhatikan aspek psikologis dari penerima pesan. Komunikasi yang lembut dapat menciptakan suasana dialog yang lebih terbuka sehingga pesan yang disampaikan lebih mudah diterima.[209]

Konsep komunikasi yang lembut juga ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ، وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ» (رواه مسلم) [210]

Dari 'Āisyah r.a., istri Nabi ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Sesungguhnya kelembutan tidaklah ada pada sesuatu kecuali ia akan menghiasinya, dan tidaklah kelembutan dicabut dari sesuatu kecuali ia akan membuatnya buruk." (HR. Muslim).

Hadis ini menunjukkan bahwa kelembutan merupakan nilai fundamental dalam komunikasi Islam. Kelembutan bukan tanda kelemahan, melainkan

---

[206] Raghib Al-Asfahani, *Al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an*, Dar al-Qalam, 2009, hal. 749

[207] Ibn Katsir*Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Dar Tayyibah, 2002, jilid 5, hal. 311

[208] Al-Qurṭubi, *Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*, Muassasah al-Risalah, 2016, jilid 11, hal. 220

[209] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Lentera Hati, 2017, jilid 8, hal. 305

[210] Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Birr wa aṣ-Ṣilah wa al-Ādāb, Bāb Faḍl ar-Rifq, no. 2594

ekspresi kematangan moral dalam menyampaikan pesan. Dalam konteks komunikasi pemimpin dan rakyat, kelembutan berfungsi menjaga martabat masyarakat, meredam ketegangan sosial, dan membuka ruang penerimaan terhadap pesan yang disampaikan. Sebaliknya, komunikasi yang kasar, arogan, dan merendahkan dapat memperburuk relasi sosial serta menimbulkan resistensi rakyat terhadap pemimpin.

Prinsip *qaulan layyinan* juga dapat dipahami sebagai bentuk komunikasi yang menekankan pentingnya empati dalam interaksi sosial. Dalam komunikasi interpersonal, empati merupakan kemampuan memahami perasaan dan perspektif orang lain sehingga komunikasi dapat berlangsung secara lebih manusiawi. Komunikasi yang mengandung empati memungkinkan seseorang menyampaikan pesan dengan mempertimbangkan kondisi psikologis lawan bicara. Oleh karena itu, kelembutan dalam komunikasi bukan sekadar gaya bahasa, tetapi merupakan bentuk kepedulian terhadap keadaan emosional pihak yang diajak berkomunikasi.[211]

Dalam kajian etika Islam, kelembutan dalam berbicara merupakan bagian dari akhlak yang mencerminkan kematangan spiritual seseorang. Islam menekankan bahwa seorang muslim harus mampu menjaga lisannya agar tidak menyakiti orang lain dalam komunikasi sosial. Bahasa yang lembut dan penuh pertimbangan menunjukkan bahwa seseorang memiliki pengendalian diri serta kesadaran moral dalam berinteraksi dengan orang lain. Komunikasi yang lembut menjadi salah satu indikator penting dari kepribadian yang berakhlak mulia dalam kehidupan sosial.[212]

Dalam perspektif dakwah, penggunaan komunikasi yang lembut juga merupakan strategi penting dalam menyampaikan pesan keagamaan kepada masyarakat. Dakwah yang disampaikan dengan pendekatan yang lembut dan bijaksana akan lebih mudah diterima oleh masyarakat karena tidak menimbulkan resistensi psikologis dari *audiens*. Pendekatan komunikasi seperti ini memungkinkan pesan dakwah diterima dengan lebih terbuka sehingga tujuan dakwah untuk memperbaiki perilaku sosial dapat tercapai secara efektif.[213]

Prinsip komunikasi yang lembut juga memiliki kaitan erat dengan konsep komunikasi dialogis dalam masyarakat. Komunikasi dialogis menekankan pentingnya membangun hubungan yang setara antara komunikator dan komunikan melalui proses komunikasi yang terbuka dan saling menghargai. Bahasa yang lembut dapat menciptakan suasana dialog yang kondusif sehingga setiap pihak merasa aman untuk menyampaikan pandangannya. Dalam konteks ini, *qaulan layyinan* dapat dipahami sebagai

---

[211] Suranto AW, *Komunikasi Interpersonal*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011, hal. 84.

[212] Muhammad Alim, *Pendidikan Agama Islam: Upaya Pembentukan Pemikiran dan Kepribadian Muslim*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011, hal. 203.

[213] Didin Hafidhuddin, *Dakwah Aktual*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hal. 97.

landasan etika dalam membangun komunikasi yang dialogis dalam kehidupan sosial.[214]

Dalam konteks kepemimpinan, kemampuan berkomunikasi dengan lembut dan persuasif merupakan salah satu keterampilan penting yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Pemimpin yang mampu menyampaikan pesan dengan cara yang santun dan menghargai perasaan orang lain akan lebih mudah membangun hubungan emosional dengan masyarakat. Hubungan emosional ini sangat penting dalam menciptakan dukungan sosial terhadap kebijakan yang diambil oleh pemimpin.[215]

Selain itu, komunikasi yang lembut juga memiliki peran penting dalam proses penyelesaian konflik sosial. Dalam situasi konflik, penggunaan bahasa yang keras sering kali memperburuk ketegangan antara pihak-pihak yang terlibat. Sebaliknya, komunikasi yang lembut dan penuh pengertian dapat membantu meredakan ketegangan sehingga proses dialog dapat berlangsung secara lebih konstruktif. Pendekatan komunikasi yang humanis sering digunakan dalam proses mediasi konflik sosial dalam masyarakat.[216]

Dalam perspektif komunikasi sosial, kelembutan dalam komunikasi juga dapat memperkuat kohesi sosial dalam masyarakat. Bahasa yang santun dan tidak agresif akan menciptakan suasana interaksi yang lebih nyaman sehingga individu dalam masyarakat merasa dihargai dalam proses komunikasi. Kondisi ini dapat memperkuat rasa kebersamaan serta meningkatkan kualitas hubungan sosial antar anggota masyarakat. Oleh karena itu, prinsip *qaulan layyinan* tidak hanya memiliki nilai etika dalam ajaran Islam, tetapi juga memiliki relevansi yang luas dalam membangun komunikasi sosial yang harmonis dalam masyarakat modern.[217]

Dalam konteks komunikasi sosial, komunikasi yang lembut memiliki peran penting dalam menciptakan hubungan sosial yang harmonis. Bahasa yang lembut dapat membantu mengurangi ketegangan dalam interaksi sosial.

Dalam perspektif kepemimpinan, komunikasi yang persuasif dan humanis sangat penting dalam membangun hubungan antara pemimpin dan masyarakat. Pemimpin yang berbicara dengan lembut akan lebih mudah diterima oleh masyarakat.[218]

---

[214] Arni Muhammad, *Komunikasi Organisasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014, hal. 61

[215] Miftah Thoha, *Kepemimpinan dalam Manajemen*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012, hal. 79

[216] Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Sosial: Individu dan Teori-teori Psikologi Sosial*, Jakarta: Balai Pustaka, 2012, hal. 214.

[217] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013, hal. 142

[218] Northouse, *Leadership: Theory and Practice*, Sage Publications, 2019, hal. 229

Sebaliknya, komunikasi yang keras dapat menimbulkan resistensi dari masyarakat. Ketika masyarakat merasa diserang atau direndahkan dalam komunikasi, mereka cenderung menolak pesan yang disampaikan.

Dalam kajian komunikasi modern, komunikasi persuasif merupakan bentuk komunikasi yang bertujuan mempengaruhi sikap dan perilaku orang lain melalui pendekatan yang halus dan tidak memaksa.[219]

Pendekatan persuasif ini memiliki kesamaan dengan konsep *qaulan layyinan* dalam Al-Qur'an yang menekankan pentingnya kelembutan dalam menyampaikan pesan. Dalam komunikasi kepemimpinan, pendekatan persuasif memungkinkan pemimpin untuk membangun hubungan emosional dengan masyarakat. Ketika masyarakat merasa dihargai dalam komunikasi, mereka akan lebih terbuka untuk menerima pesan yang disampaikan oleh pemimpin. Selain itu, komunikasi yang lembut juga dapat membantu menciptakan dialog yang konstruktif dalam masyarakat. Kelembutan dalam komunikasi tidak hanya memperindah interaksi sosial, tetapi juga meningkatkan efektivitas penyampaian pesan dalam kehidupan masyarakat.

Kajian dalam jurnal komunikasi Islam menunjukkan bahwa konsep *qaulan layyinan* memiliki relevansi penting dalam membangun komunikasi sosial yang humanis. Komunikasi yang lembut memungkinkan terciptanya suasana dialog yang lebih terbuka karena pihak yang menerima pesan tidak merasa tertekan atau diserang dalam proses komunikasi. Oleh karena itu, kelembutan dalam komunikasi sering dipandang sebagai strategi komunikasi yang efektif dalam membangun hubungan sosial yang harmonis dalam masyarakat.[220]

Penelitian lain dalam kajian komunikasi Islam menegaskan bahwa komunikasi yang lembut memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan komunikasi dalam masyarakat. Bahasa yang lembut mampu menciptakan suasana interaksi yang lebih kondusif sehingga pesan yang disampaikan lebih mudah diterima oleh pihak yang diajak berkomunikasi.[221]

Dalam kajian komunikasi kepemimpinan, pendekatan komunikasi yang humanis juga menjadi salah satu faktor penting dalam membangun hubungan antara pemimpin dan masyarakat. Pemimpin yang menggunakan bahasa yang lembut dan persuasif cenderung lebih mudah memperoleh simpati dari

---

[219]Stephen Littlejohn & Foss, K., *Theories of Human Communication*, Waveland Press, 2018, hal. 355

[220] Fikra Awla & Akhmad Rifai, Political Communication in the Quranic Perspective: Ethical Principles for Contemporary Politics, *Palakka: Media and Islamic Communication*, 2025, hal. 83

[221] Huda, Etika Komunikasi Islam dalam Relasi Sosial Masyarakat, *Jurnal Komunikasi Islam*, 2021, hal. 131

masyarakat karena masyarakat merasa dihargai dalam proses komunikasi tersebut.[222]

Selain itu, penelitian mengenai komunikasi publik dalam perspektif Islam menunjukkan bahwa kelembutan dalam komunikasi dapat mengurangi potensi konflik dalam masyarakat. Banyak konflik sosial yang muncul akibat penggunaan bahasa yang keras atau provokatif dalam komunikasi publik. Oleh karena itu, penggunaan komunikasi yang lembut dapat membantu menciptakan suasana sosial yang lebih damai.[223]

Dalam kajian etika komunikasi kepemimpinan, disebutkan bahwa komunikasi yang humanis merupakan salah satu karakter penting dalam kepemimpinan yang efektif. Pemimpin yang mampu berkomunikasi dengan cara yang lembut dan empati akan lebih mudah membangun hubungan emosional dengan masyarakat.[224]

Penelitian lain juga menunjukkan bahwa komunikasi yang lembut dapat memperkuat solidaritas sosial dalam masyarakat. Ketika individu dalam masyarakat berinteraksi dengan bahasa yang santun dan tidak agresif, hubungan sosial akan menjadi lebih harmonis karena setiap individu merasa dihargai dalam komunikasi tersebut.[225]

Dalam perspektif komunikasi sosial modern, pendekatan komunikasi yang humanis sering digunakan dalam proses mediasi konflik sosial. Bahasa yang lembut dapat membantu meredakan ketegangan dalam komunikasi sehingga pihak-pihak yang berkonflik dapat lebih mudah mencapai kesepakatan Bersama.[226]

Dengan demikian, berbagai penelitian akademik menunjukkan bahwa prinsip *qaulan layyinan* memiliki relevansi yang sangat kuat dalam kehidupan sosial modern. Komunikasi yang lembut, persuasif, dan humanis tidak hanya menjadi pedoman etika dalam ajaran Islam, tetapi juga menjadi strategi komunikasi yang efektif dalam membangun hubungan sosial yang harmonis antara pemimpin dan masyarakat.

5. *Qaulan Balīghan* (قولًا بليغًا): Komunikasi Efektif

Allah SWT berfirman:

فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا

[222] Abdul Rahman, Islamic Political Communication and Public Trust, *Jurnal Politik Islam*, 2020, hal. 72

[223] Fauzi, Komunikasi Publik dalam Perspektif Etika Islam, *Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 2022, hal. 156

[224] Siregar, Etika Komunikasi Kepemimpinan dalam Perspektif Islam, *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 2019, hal. 101

[225] Latif, Social Communication in Islamic Perspective, *Jurnal Ilmu Komunikasi Islam,* 2020, hal. 112

[226] M. Yusuf, Islamic Communication Ethics and Social Harmony, *Jurnal Studi Islam dan Komunikasi*, 2021, hal. 143

"Maka berpalinglah dari mereka, berilah mereka nasihat, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwa mereka." (QS. An-Nisā' [4]: 63).

Ayat ini menjadi dasar konsep *qaulan balīghan* (قولًا بليغًا) dalam etika komunikasi Qur'ani. Istilah ini merujuk pada komunikasi yang efektif, jelas, dan mampu menyentuh hati penerima pesan. Dalam konteks komunikasi kepemimpinan, *qaulan balīghan* menggambarkan bentuk komunikasi yang tidak hanya menyampaikan pesan secara informatif, tetapi juga mampu memberikan pengaruh yang kuat terhadap sikap dan perilaku masyarakat.

Secara linguistik, kata *balīgh* (بليغ) berasal dari akar kata بلغyang berarti sampai atau mencapai tujuan. Dalam ilmu *balaghah* Arab, istilah ini merujuk pada perkataan yang mampu menyampaikan makna secara jelas, tepat, dan memiliki kekuatan retoris. Raghib al-Asfahani menjelaskan bahwa kata *balīgh* merujuk pada ucapan yang mencapai sasaran maknanya secara sempurna sehingga dapat memberikan pengaruh yang kuat kepada orang yang mendengarnya.[227]

Dalam tafsirnya, Ibn Katsir menjelaskan bahwa perintah untuk menggunakan *qaulan balīghan* menunjukkan bahwa nasihat yang diberikan kepada masyarakat harus disampaikan dengan cara yang jelas dan menyentuh hati. Menurutnya, komunikasi yang efektif dapat membantu seseorang menyadari kesalahan dan kembali kepada kebenaran.[228]

Al-Qurṭubi menjelaskan bahwa *qaulan balīghan* adalah perkataan yang mampu memberikan pengaruh mendalam dalam jiwa seseorang. Hal ini dapat dicapai melalui pemilihan kata yang tepat serta cara penyampaian yang sesuai dengan kondisi orang yang diajak berbicara.[229]

Dalam tafsir kontemporer, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa *qaulan balīghan* merupakan bentuk komunikasi yang mampu menembus kesadaran batin manusia. Komunikasi yang efektif tidak hanya menyampaikan pesan secara rasional, tetapi juga mampu menyentuh aspek emosional dari penerima pesan.[230]

Konsep komunikasi yang efektif juga ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Rasulullah dikenal sebagai komunikator yang sangat efektif dalam menyampaikan pesan-pesan dakwah kepada masyarakat.

Dalam sebuah hadis disebutkan:

---

[227] Raghib Al-Asfahani, *Al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an*, Dar al-Qalam, 2009, hal. 144

[228] Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Dar Tayyibah, 2002, jilid 2, hal. 327

[229] Al-Qurṭubi, *Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*, Muassasah al-Risalah, 2016, jilid 5, hal. 265

[230] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Lentera Hati, 2017, jilid 2, hal. 519

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَدِمَ رَجُلَانِ مِنَ الْمَشْرِقِ، فَخَطَبَا، فَعَجِبَ النَّاسُ لِبَيَانِهِمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا» (رواه البخاري) [231]
Dari 'Abdullāh bin 'Umar r.a., ia berkata: Dua orang laki-laki datang dari arah timur, lalu keduanya berpidato. Orang-orang merasa kagum terhadap kefasihan penjelasan keduanya. Maka Rasulullah ﷺ bersabda: "Sesungguhnya sebagian penjelasan itu benar-benar memiliki daya seperti sihir." (HR. Bukhari).

Hadis ini menunjukkan bahwa bahasa memiliki kekuatan memengaruhi pikiran, perasaan, dan sikap manusia. Kefasihan berbicara dapat menjadi sarana kebaikan apabila digunakan untuk menjelaskan kebenaran, menegakkan keadilan, dan membangun kemaslahatan. Namun, pada saat yang sama, kemampuan retoris juga dapat berubah menjadi alat manipulasi apabila dipakai untuk menutupi kebenaran, membenarkan kezaliman, atau menggiring opini publik secara tidak jujur. Dalam konteks komunikasi pemimpin dan rakyat, hadis ini menegaskan bahwa efektivitas komunikasi harus selalu dikendalikan oleh etika, kejujuran, dan tanggung jawab moral.

Prinsip *qaulan balīghan* juga berkaitan erat dengan kemampuan retorika dalam komunikasi. Retorika merupakan seni menyampaikan pesan secara efektif sehingga pesan yang disampaikan dapat dipahami dan diterima oleh *audiens*. Dalam kajian komunikasi, kemampuan retorika memungkinkan seorang komunikator menyusun pesan secara sistematis sehingga makna yang ingin disampaikan dapat diterima secara jelas oleh pendengar. Oleh karena itu, komunikasi yang efektif tidak hanya bergantung pada isi pesan, tetapi juga pada cara penyampaian pesan tersebut kepada *audiens*.[232]

Dalam perspektif komunikasi dakwah, penyampaian pesan yang efektif juga berkaitan dengan kemampuan komunikator memahami kondisi psikologis *audiens*. Pesan yang disampaikan secara tepat sasaran akan lebih mudah diterima karena sesuai dengan kebutuhan dan situasi yang dihadapi oleh masyarakat. Oleh karena itu, seorang komunikator harus mampu menyesuaikan bahasa dan gaya komunikasi dengan latar belakang sosial *audiens* agar pesan yang disampaikan dapat mencapai tujuan yang diharapkan.[233]

Selain itu, komunikasi yang efektif juga berkaitan dengan kemampuan menyederhanakan pesan agar mudah dipahami oleh masyarakat. Dalam komunikasi publik, pesan yang terlalu kompleks sering kali sulit dipahami oleh

---

[231] Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb an-Nikāḥ, Bāb al-Khuṭbah, no. 5146.

[232] Aristoteles dalam terjemahan Indonesia, *Retorika: Seni Berbicara yang Efektif*, Yogyakarta: Basabasi, 2018, hal. 54.

[233] Wahidin Saputra, *Pengantar Ilmu Dakwah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012, hal. 115.

masyarakat sehingga tujuan komunikasi tidak tercapai secara optimal. Oleh karena itu, seorang komunikator harus mampu menyampaikan pesan secara ringkas, jelas, dan sistematis agar pesan tersebut dapat dipahami oleh berbagai lapisan masyarakat.[234]

Dalam kajian komunikasi massa, efektivitas komunikasi juga dipengaruhi oleh kredibilitas komunikator. Komunikator yang memiliki reputasi baik dan dipercaya oleh masyarakat akan lebih mudah mempengaruhi sikap dan perilaku *audiens*. Kredibilitas ini dibangun melalui konsistensi antara ucapan dan tindakan komunikator dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, dalam komunikasi kepemimpinan, kredibilitas pemimpin menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan komunikasi publik.[235]

Dalam perspektif kepemimpinan transformasional, komunikasi yang efektif juga berperan penting dalam menggerakkan masyarakat menuju perubahan sosial yang positif. Pemimpin yang mampu menyampaikan visi secara inspiratif akan lebih mudah memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan sosial. Bahasa yang inspiratif dan penuh makna dapat membangkitkan semangat masyarakat untuk mendukung tujuan bersama.[236]

Komunikasi yang efektif juga memiliki peran penting dalam membangun partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sosial. Ketika masyarakat memahami pesan yang disampaikan oleh pemimpin secara jelas, masyarakat akan lebih mudah terlibat dalam berbagai program pembangunan sosial. Oleh karena itu, komunikasi yang jelas dan persuasif dapat menjadi sarana penting dalam membangun partisipasi masyarakat dalam kehidupan sosial.[237]

Dalam perspektif komunikasi sosial, efektivitas komunikasi juga berkaitan dengan kemampuan pesan untuk menimbulkan perubahan sikap dalam masyarakat. Pesan yang disampaikan secara jelas, relevan, dan menyentuh kepentingan masyarakat akan lebih mudah mempengaruhi perilaku sosial. Oleh karena itu, komunikasi yang efektif tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mampu membentuk kesadaran sosial yang mendorong masyarakat untuk melakukan perubahan yang positif.[238]

Dalam konteks kepemimpinan, komunikasi yang efektif merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan kepemimpinan. Pemimpin harus

---

[234] Widjaja, *Ilmu Komunikasi: Pengantar Studi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hal. 92.

[235] Elvinaro Ardianto dan Lukiati Komala, *Komunikasi Massa: Suatu Pengantar*, Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2007, hal. 73.

[236] Sudarwan Danim, *Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hal. 134.

[237] Toto Tasmara, *Komunikasi Dakwah*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997, hal. 121

[238] Onong Uchjana Effendy, *Dimensi-Dimensi Komunikasi*, Bandung: Alumni, 2003, hal. 66

mampu menyampaikan visi dan kebijakan kepada masyarakat secara jelas agar masyarakat dapat memahami tujuan dari kebijakan tersebut.[239]

Komunikasi yang jelas juga membantu mengurangi kesalahpahaman dalam masyarakat. Ketika pesan disampaikan dengan cara yang mudah dipahami, masyarakat dapat memahami maksud dari komunikasi tersebut dengan lebih baik.

Dalam kajian komunikasi modern, komunikasi yang efektif sering dikaitkan dengan kemampuan komunikator dalam menyesuaikan pesan dengan kondisi *audiens*.[240]

Penyesuaian pesan dengan kondisi *audiens* memungkinkan pesan disampaikan dengan cara yang lebih relevan bagi masyarakat.

Dalam konteks komunikasi kepemimpinan, pemimpin harus mampu memahami kondisi sosial masyarakat sebelum menyampaikan pesan kepada mereka. Pemimpin yang memahami kondisi masyarakat akan lebih mudah menyampaikan pesan yang dapat diterima oleh masyarakat. Selain itu, komunikasi yang efektif juga dapat membantu membangun hubungan emosional antara pemimpin dan masyarakat.

Hubungan emosional ini penting dalam menciptakan kepercayaan antara pemimpin dan rakyat. Dalam komunikasi publik, kemampuan menyampaikan pesan secara jelas dan persuasif merupakan keterampilan penting bagi seorang pemimpin. Komunikasi yang kuat dapat membantu pemimpin menggerakkan masyarakat untuk melakukan perubahan sosial.

Dalam perspektif etika komunikasi Islam, komunikasi yang efektif tidak boleh digunakan untuk manipulasi, tetapi harus digunakan untuk menyampaikan kebenaran. Dengan demikian, konsep *qaulan balīghan* dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif dan mampu menyentuh hati merupakan salah satu prinsip penting dalam etika komunikasi kepemimpinan. Prinsip ini menegaskan bahwa komunikasi pemimpin harus mampu menyampaikan pesan secara jelas, tepat sasaran, serta mampu memberikan pengaruh positif dalam kehidupan sosial masyarakat.

Kajian dalam jurnal komunikasi Islam menunjukkan bahwa konsep *qaulan balīghan* memiliki peran penting dalam membangun komunikasi publik yang efektif dalam masyarakat. Komunikasi yang efektif bukan hanya berkaitan dengan kemampuan menyampaikan informasi secara jelas, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan komunikator dalam menyampaikan pesan yang mampu mempengaruhi sikap dan kesadaran *audiens*. Dalam konteks kepemimpinan, komunikasi yang efektif dapat membantu pemimpin

---

[239] Northouse, *Leadership: Theory and Practice*, Sage Publications, 2019, hal. 241

[240] Stephen Littlejohn & Karen A Foss, *Theories of Human Communication*, Waveland Press, 2018, hal. 366

menyampaikan visi dan arah kebijakan kepada masyarakat secara lebih persuasif.[241]

Penelitian lain menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif dalam perspektif Islam menekankan keseimbangan antara kejelasan pesan dan kekuatan moral dari pesan tersebut. Pesan yang disampaikan dengan jelas tetapi tidak memiliki kekuatan moral sering kali tidak mampu memberikan pengaruh yang signifikan dalam kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu, komunikasi Qur'ani menekankan pentingnya pesan yang memiliki kekuatan moral dan mampu menyentuh kesadaran manusia.[242]

Dalam kajian komunikasi kepemimpinan Islam, disebutkan bahwa komunikasi yang efektif memiliki peran penting dalam membangun hubungan yang kuat antara pemimpin dan masyarakat. Pemimpin yang mampu menyampaikan pesan secara jelas dan inspiratif akan lebih mudah memperoleh dukungan dari masyarakat karena masyarakat memahami tujuan dari kebijakan yang disampaikan.[243]

Penelitian dalam komunikasi publik juga menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan sosial. Ketika masyarakat memahami pesan yang disampaikan oleh pemimpin, masyarakat akan lebih mudah terlibat dalam berbagai program sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.[244]

Dalam kajian etika komunikasi Islam, konsep *qaulan balīghan* juga dipahami sebagai bentuk komunikasi yang mampu menyentuh kesadaran moral masyarakat. Komunikasi yang efektif tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mendorong masyarakat untuk melakukan perubahan sosial yang positif.[245]

Penelitian lain juga menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif dapat membantu mengurangi kesalahpahaman dalam masyarakat. Banyak konflik sosial terjadi karena pesan yang disampaikan tidak dipahami secara jelas oleh masyarakat. Oleh karena itu, kejelasan dalam komunikasi merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas sosial dalam masyarakat.[246]

---

[241] Fikra Awla & Akhmad Rifai, Political Communication in the Quranic Perspective: Ethical Principles for Contemporary Politics, *Palakka: Media and Islamic Communication*, 2025, hal. 86

[242] Huda, Etika Komunikasi Islam dalam Relasi Sosial Masyarakat, *Jurnal Komunikasi Islam*, 2021, hal. 135

[243] Abdul Rahman, Islamic Political Communication and Public Trust, *Jurnal Politik Islam*, 2020, hal. 75

[244] Fauzi, Komunikasi Publik dalam Perspektif Etika Islam, *Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 2022, hal. 160

[245] Siregar, Etika Komunikasi Kepemimpinan dalam Perspektif Islam, *Jurnal Dakwah dan Komunikasi,* 2019, hal. 104

[246] Latif, Social Communication in Islamic Perspective, *Jurnal Ilmu Komunikasi Islam*, 2020, hal. 116

Dalam kajian komunikasi sosial modern, komunikasi yang efektif juga dipahami sebagai komunikasi yang mampu menghubungkan dimensi rasional dan emosional dalam proses penyampaian pesan. Pesan yang hanya disampaikan secara rasional sering kali kurang memiliki daya pengaruh terhadap masyarakat jika tidak disertai dengan pendekatan emosional yang menyentuh hati.[247]

Selain itu, komunikasi yang efektif juga berperan penting dalam membangun kepercayaan sosial dalam masyarakat. Ketika pemimpin mampu menyampaikan pesan secara jelas dan meyakinkan, masyarakat akan lebih percaya terhadap kepemimpinan yang dijalankan.[248]

Konsep *qaulan balīghan* memiliki relevansi yang sangat kuat dalam komunikasi sosial modern. Komunikasi yang efektif, jelas, dan mampu menyentuh kesadaran moral masyarakat merupakan salah satu faktor penting dalam membangun hubungan yang sehat antara pemimpin dan rakyat dalam kehidupan sosial masyarakat.

6. *Qaulan Maisūran* (قولًا ميسورًا) – Komunikasi yang Memudahkan dan Menenangkan

Istilah *qaulan maisūran* (قولًا ميسورًا) merupakan salah satu bentuk komunikasi dalam Al-Qur'an yang menekankan aspek kemudahan, kelembutan, dan kemampuan untuk memberikan ketenangan kepada pihak yang menerima pesan. Secara umum, istilah ini dapat dipahami sebagai ucapan yang mudah diterima, tidak memberatkan, serta disampaikan dengan cara yang menenangkan hati. Dalam konteks komunikasi sosial, *qaulan maisūran* mencerminkan bentuk komunikasi yang tidak hanya mempertimbangkan isi pesan, tetapi juga memperhatikan kondisi psikologis penerima pesan. Oleh karena itu, konsep ini menjadi penting dalam membangun komunikasi yang humanis dalam kehidupan masyarakat.

Secara linguistik, kata *maisūran* berasal dari akar kata يسر yang berarti mudah, ringan, atau lapang. Dalam kajian semantik Al-Qur'an, istilah ini menunjukkan sesuatu yang tidak menyulitkan dan dapat diterima dengan baik oleh manusia. Raghib al-Asfahani menjelaskan bahwa kata *yusr* dalam Al-Qur'an sering digunakan untuk menggambarkan kemudahan yang diberikan oleh Allah kepada manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan demikian, *qaulan maisūran* dapat dipahami sebagai ucapan yang mencerminkan kemudahan dan keringanan dalam komunikasi. [249]

---

[247] Yusuf, Islamic Communication Ethics and Social Harmony, *Jurnal Studi Islam dan Komunikasi*, 2021, hal. 147

[248] A. Karim, Islamic Leadership Communication and Social Trust, *Jurnal Kepemimpinan Islam*, 2022, hal. 91

[249] Raghib Al-Asfahani, *Al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an*, Dar al-Qalam, 2009, hal. 744

Dalam Al-Qur'an, konsep *qaulan maisūran* disebutkan dalam firman Allah SWT:

وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا

"Dan jika engkau berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka perkataan yang mudah (baik)." (QS. Al-Isra' [17]: 28).

Ayat ini menunjukkan bahwa bahkan dalam kondisi tidak mampu memenuhi permintaan seseorang, komunikasi tetap harus dilakukan dengan cara yang baik dan tidak menyakitkan. Dalam tafsirnya, Ibn Katsir menjelaskan bahwa ayat ini mengajarkan agar seseorang tetap memberikan jawaban yang lembut dan penuh harapan ketika tidak mampu membantu orang lain secara materi.[250]

Al-Qurṭubi menambahkan bahwa *qaulan maisūran* dalam ayat ini berarti ucapan yang mengandung janji baik, harapan, atau doa, sehingga pihak yang tidak terpenuhi kebutuhannya tetap merasa dihargai. Menurutnya, komunikasi seperti ini sangat penting untuk menjaga perasaan orang lain agar tidak tersakiti.[251]

Dalam tafsir kontemporer, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat ini mengandung pesan etika komunikasi yang sangat tinggi, yaitu bahwa penolakan pun harus disampaikan dengan cara yang baik dan tidak menyakitkan. Menurutnya, komunikasi yang baik bukan hanya terlihat ketika seseorang memberikan sesuatu, tetapi juga ketika ia tidak mampu memberi.[252]

Dalam perspektif komunikasi sosial, *qaulan maisūran* menunjukkan bahwa komunikasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai sarana menjaga hubungan emosional antara individu dalam masyarakat. Komunikasi yang mempertimbangkan kondisi psikologis penerima pesan akan lebih efektif dalam menjaga keharmonisan sosial.[253]

Konsep *qaulan maisūran* memiliki relevansi yang sangat penting karena pemimpin tidak selalu berada dalam posisi untuk memenuhi seluruh aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, kemampuan menyampaikan penjelasan atau penolakan secara bijak menjadi bagian penting dari komunikasi kepemimpinan. Seorang pemimpin yang mampu menggunakan *qaulan maisūran* akan tetap mendapatkan kepercayaan masyarakat meskipun tidak

---

[250] Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Dar Tayyibah, 2002, jilid 5, hal. 71

[251] Al-Qurṭubi, *Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*, Muassasah al-Risalah, 2016, jilid 10, hal. 248

[252] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Lentera Hati, 2017, jilid 7, hal. 67

[253] Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*, Remaja Rosdakarya, 2017, hal. 134

semua tuntutan dapat dipenuhi. Hal ini karena masyarakat merasa dihargai melalui cara komunikasi yang santun dan empati.

Kemampuan menyampaikan pesan yang sensitif dengan cara yang tepat merupakan bagian dari kompetensi komunikasi interpersonal. Pesan yang sulit atau tidak menyenangkan harus disampaikan dengan cara yang tidak merusak hubungan sosial antara komunikator dan komunikan.[254] Konsep ini juga menunjukkan bahwa komunikasi memiliki dimensi empati yang sangat penting dalam kehidupan sosial. Empati memungkinkan seseorang memahami kondisi orang lain sehingga pesan yang disampaikan dapat disesuaikan dengan keadaan penerima pesan.

Dalam Al-Qur'an, nilai empati dalam komunikasi tercermin dalam berbagai perintah untuk berbicara dengan cara yang baik dan tidak menyakiti orang lain. *Qaulan maisūran* menjadi salah satu bentuk konkret dari nilai tersebut dalam praktik komunikasi sosial.

Dalam konteks komunikasi publik, penggunaan *qaulan maisūran* dapat membantu meredam potensi konflik sosial. Ketika masyarakat menerima penjelasan yang disampaikan dengan cara yang baik, mereka cenderung lebih mudah menerima kondisi yang ada. Selain itu, komunikasi yang memudahkan juga dapat memperkuat hubungan antara pemimpin dan masyarakat. Ketika masyarakat merasa bahwa pemimpin berkomunikasi dengan empati, maka hubungan sosial akan menjadi lebih harmonis.

Dalam perspektif etika komunikasi Islam, *qaulan maisūran* mencerminkan prinsip kelembutan dan kemudahan dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Prinsip ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya menjaga perasaan orang lain dalam setiap interaksi sosial. Konsep ini juga menunjukkan bahwa komunikasi yang baik tidak selalu harus berupa pemberian materi, tetapi juga dapat berupa ucapan yang memberikan ketenangan dan harapan. Hal ini menunjukkan bahwa nilai komunikasi dalam Islam sangat menekankan aspek kemanusiaan.

Prinsip *qaulan maisūran* ini dapat diterapkan dalam berbagai situasi, seperti ketika pemimpin harus menyampaikan kebijakan yang tidak populer kepada masyarakat. Komunikasi yang dilakukan dengan empati akan membantu masyarakat memahami alasan di balik kebijakan tersebut.

Konsep *qaulan maisūran* dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa komunikasi harus dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi penerima pesan serta mengutamakan kelembutan dan kemudahan dalam penyampaian pesan. Komunikasi yang demikian akan mampu menjaga keharmonisan hubungan sosial dalam masyarakat.

---

[254] Stephen Littlejohn & Foss, K., *Theories of Human Communication*, Waveland Press, 2018, hal. 178

F. Pemimpin-Rakyat dalam Kisah-Kisah Qur'an

Kisah-kisah dalam Al-Qur'an tidak hanya berfungsi sebagai narasi historis, tetapi juga sebagai sumber pelajaran moral dan sosial bagi kehidupan manusia. Salah satu dimensi penting yang dapat ditemukan dalam kisah-kisah tersebut adalah gambaran mengenai relasi antara pemimpin dan masyarakat yang dipimpinnya. Al-Qur'an menghadirkan berbagai figur pemimpin dengan karakter, situasi sosial, serta pola komunikasi yang berbeda-beda, sehingga memberikan gambaran yang kaya mengenai etika kepemimpinan dan komunikasi sosial dalam masyarakat. Melalui kisah para nabi dan tokoh-tokoh sejarah yang disebutkan dalam Al-Qur'an, dapat ditemukan berbagai model interaksi antara pemimpin dan rakyat yang mengandung nilai-nilai moral, keadilan, serta tanggung jawab sosial.[255]

Meskipun Al-Qur'an memuat banyak kisah tokoh kepemimpinan, penelitian ini tidak membahas seluruh figur yang disebutkan dalam Al-Qur'an, melainkan memilih beberapa tokoh yang secara khusus memperlihatkan dinamika komunikasi antara pemimpin dan masyarakatnya. Pembatasan ini dilakukan agar kajian dapat lebih fokus dan mendalam dalam menganalisis bentuk-bentuk komunikasi kepemimpinan yang tercermin dalam kisah-kisah tersebut. Penelitian ini memilih lima figur utama yang memiliki relevansi kuat dengan tema komunikasi kepemimpinan dalam relasi sosial, yaitu Nabi Muhammad SAW, Nabi Musa AS, Nabi Yusuf AS, Nabi Sulaiman AS, dan Ratu Bilqis. Kelima tokoh ini dipilih karena kisah mereka secara eksplisit menggambarkan interaksi antara pemimpin dan masyarakat, baik dalam konteks dakwah, pemerintahan, maupun pengelolaan konflik sosial.

Pemilihan Nabi Muhammad SAW sebagai figur utama didasarkan pada posisinya sebagai model kepemimpinan profetik yang paling lengkap dalam Al-Qur'an dan hadis. Rasulullah SAW tidak hanya berperan sebagai penyampai wahyu, tetapi juga sebagai pemimpin sosial dan pemerintahan yang membangun relasi komunikasi yang dialogis dengan masyarakatnya. Selain itu, Nabi Musa AS dipilih karena kisahnya menggambarkan komunikasi kepemimpinan yang menghadapi otoritas tirani, khususnya dalam dialognya dengan Fir'aun dan dalam membimbing Bani Israil. Sementara itu, Nabi Yusuf AS merepresentasikan model kepemimpinan administratif yang berbasis kompetensi dan integritas moral, terutama ketika beliau dipercaya mengelola perekonomian Mesir pada masa krisis. Kisah-kisah ini memberikan gambaran tentang berbagai bentuk komunikasi kepemimpinan dalam konteks sosial yang berbeda-beda.

Selain para nabi tersebut, penelitian ini juga menyoroti kisah Nabi Sulaiman AS yang dikenal sebagai pemimpin dengan kekuasaan pemerintahan

---

[255] M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Jakarta: Lentera Hati, 2013, hal. 189.

yang luas dan kemampuan komunikasi diplomatik yang kuat. Dalam kisahnya, Al-Qur'an menampilkan bagaimana Nabi Sulaiman menggunakan komunikasi yang bijaksana dalam mengelola pemerintahan dan menjalin hubungan dengan kerajaan lain, termasuk dalam dialognya dengan Ratu Bilqis.

Adapun Ratu Bilqis dipilih sebagai satu-satunya figur perempuan dalam kajian ini karena kisahnya dalam Al-Qur'an menunjukkan model kepemimpinan yang dialogis dan deliberatif. Berbeda dengan banyak kisah penguasa dalam sejarah yang cenderung otoriter, Ratu Bilqis justru digambarkan sebagai pemimpin yang mengutamakan musyawarah dengan para pembesarnya sebelum mengambil keputusan. Sikap ini menunjukkan bahwa komunikasi kepemimpinan yang efektif tidak selalu bersifat dominatif, tetapi dapat dibangun melalui dialog, pertimbangan kolektif, dan keterbukaan terhadap kebenaran.

Dalam perspektif ilmu tafsir, kisah-kisah Qur'ani (*al-qaṣaṣ al-Qur'ānī*) memiliki fungsi edukatif yang kuat karena memuat pesan moral dan sosial yang relevan bagi kehidupan umat manusia di berbagai zaman. Al-Qur'an menuturkan kisah para nabi dan tokoh masyarakat bukan sekadar untuk tujuan historis, tetapi untuk memberikan pelajaran (*'ibrah*) [256] tentang bagaimana manusia seharusnya menjalankan kehidupan sosial, termasuk dalam konteks kepemimpinan dan komunikasi publik. Para mufasir menjelaskan bahwa kisah-kisah tersebut mengandung nilai pedagogis yang memungkinkan umat Islam memahami prinsip-prinsip kepemimpinan yang beretika dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

1. Para Nabi sebagai Komunikator Ilahi

Para nabi dalam perspektif Islam pada hakikatnya merupakan komunikator ilahi yang menyampaikan pesan wahyu kepada umat manusia. Tugas utama kenabian bukan sekadar menerima wahyu, tetapi juga menyampaikan dan menjelaskan pesan tersebut kepada masyarakat dengan cara yang dapat dipahami oleh mereka.[257] Oleh karena itu, komunikasi menjadi instrumen utama dalam misi kenabian, karena melalui komunikasi wahyu dapat diterjemahkan ke dalam realitas kehidupan sosial manusia. Para nabi menjalankan fungsi ini dengan penuh tanggung jawab moral sehingga pesan ilahi dapat diterima dan dipraktikkan dalam kehidupan umat.

Dalam kajian tafsir Al-Qur'an, para nabi digambarkan sebagai perantara komunikasi antara Tuhan dan manusia. Mereka tidak hanya menyampaikan wahyu secara tekstual, tetapi juga menjelaskan maknanya melalui keteladanan

[256] Mannā' Khalīl al-Qaṭṭān, *Mabāḥith fī 'Ulūm al-Qur'ān*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 2000, hal. 299.

[257] M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Jakarta: Lentera Hati, 2013, hal. 122.

hidup dan dialog dengan masyarakat.[258] Dengan demikian, komunikasi kenabian tidak bersifat satu arah, melainkan dialogis dan edukatif. Para nabi menggunakan berbagai pendekatan komunikasi agar pesan ilahi dapat dipahami oleh masyarakat yang memiliki latar belakang sosial dan budaya yang beragam.

Kisah para nabi dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa komunikasi profetik sering dilakukan melalui pendekatan persuasif dan argumentatif. Nabi Ibrahim, misalnya, berdialog dengan kaumnya mengenai keesaan Tuhan dengan menggunakan pendekatan rasional yang mengajak mereka berpikir tentang keterbatasan berhala yang mereka sembah. Pendekatan ini menunjukkan bahwa komunikasi kenabian tidak hanya menekankan otoritas wahyu, tetapi juga menggunakan logika dan argumentasi yang dapat dipahami oleh manusia.[259]

Demikian pula Nabi Musa a.s. menunjukkan peran sebagai komunikator ilahi ketika berdialog dengan Fir'aun dan masyarakat Bani Israil. Komunikasi Musa tidak hanya berupa penyampaian wahyu, tetapi juga berupa upaya membebaskan masyarakat dari penindasan dan membangun kesadaran moral dalam kehidupan sosial.[260] Dalam konteks ini, komunikasi kenabian berfungsi sebagai sarana transformasi sosial yang mengarahkan masyarakat menuju keadilan dan ketauhidan.

Nabi Muhammad SAW merupakan sosok komunikator ilahi yang menampilkan keseimbangan antara spiritualitas dan kemanusiaan dalam setiap aspek interaksinya. Keteladanan beliau sebagai komunikator tidak hanya terwujud dalam kemampuan menyampaikan wahyu, tetapi juga dalam keterampilan interpersonal yang menumbuhkan kedekatan emosional dengan umat.[261] Komunikasi Nabi berlandaskan kasih sayang dan empati, sehingga setiap pesan yang disampaikan tidak hanya menembus akal, tetapi juga menyentuh hati.

Keberhasilan komunikasi para Nabi *alaihimussalam* tidak hanya bergantung pada kekuatan pesan, tetapi juga pada keteladanan moral komunikator. Keteladanan hidup para nabi menjadikan pesan yang mereka sampaikan memiliki kredibilitas yang tinggi di hadapan masyarakat. Oleh karena itu, komunikasi kenabian selalu disertai dengan integritas moral yang mencerminkan keselarasan antara ucapan dan tindakan.[262] Hal ini menjadikan

---

[258] Manna' Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 2015, hal. 311.

[259] Muhammad Husain Haikal, *Sejarah Hidup Ibrahim*, Jakarta: Litera AntarNusa, 2001, hal. 74.

[260] Ibnu Katsir, *Kisah Para Nabi*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2004, hal. 281.

[261] Taufik Rahman, Anisah Indriati, And Muhammad Ridwan, "Prophetic Communication In Historical And Axiological Review," *Komunika: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 2024, Https://Doi.Org/10.24090/Komunika.V18i1.7976.

[262] Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 2001, hal. 36.

para nabi sebagai model komunikasi etis yang berlandaskan kejujuran, kesabaran, dan kepedulian terhadap umat.

Seluruh nabi dalam tradisi Islam dapat dipahami sebagai komunikator ilahi yang membawa pesan wahyu sekaligus membimbing masyarakat menuju kehidupan yang lebih bermoral. Komunikasi profetik yang mereka lakukan mengintegrasikan dimensi spiritual, moral, dan sosial dalam satu kesatuan yang utuh. Melalui komunikasi inilah pesan wahyu tidak hanya disampaikan, tetapi juga dihidupkan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, konsep komunikasi profetik para nabi menjadi fondasi penting dalam memahami etika komunikasi Islam yang berorientasi pada kebenaran, keadilan, dan kemaslahatan umat manusia.[6]

Keteladanan profetik ini menjadi dasar konseptual bagi etika komunikasi kepemimpinan Qur'ani di era modern, yang menuntut keseimbangan antara spiritualitas, empati, dan rasionalitas sosial. Rasulullah bukan hanya menyampaikan pesan Tuhan, tetapi menghidupkannya dalam tindakan dan tutur kata yang penuh kasih.

a. Nabi Muhammad SAW – Komunikasi Rahmah dan empati

Allah SWT menggambarkan dalam QS. Ali Imran [3]:159 mengenai prinsip komunikasi Nabi Muhammad ﷺ dengan umatnya di Madinah,

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ

"Maka disebabkan rahmat dari Allah engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka."

Ayat ini menegaskan bahwa dasar kepemimpinan Rasul adalah kelembutan, partisipasi, dan penghargaan terhadap martabat manusia. Kajian Sarnoto menjelaskan bahwa model kepemimpinan Nabi bersifat profetik, yang berakar pada keimanan, keadilan, dan akhlak mulia.[263] Prinsip komunikasi partisipatif ini menjadi fondasi kuat bagi tatanan masyarakat Madani yang menghargai dialog dan keadilan, di antaranya melalui *musyawarah.*

QS. Al-Syura [42]:38 menggambarkan bahwa Nabi SAW bersama umat Islam memutuskan urusan dengan musyawarah. Nabi Muhammad ﷺ menerapkan ayat ini secara nyata melalui interaksi sosial dan politik di Madinah. Dahlan dan Lukman menjelaskan bahwa sistem pemerintahan Nabi di Madinah merepresentasikan bentuk *good governance* yang mengedepankan transparansi, partisipasi rakyat, dan tanggung jawab moral.[264] Komunikasi

[263] Ahmad Zain Sarnoto. "Exploring Leadership Theory In The Qur'an." *International Journal Of Sustainable Social Science (Ijsss)* 2024, hal. 23.

[264] Dikdik Dahlan And Lukman. "Madinah Sebagai Cikal Bakal Negara Berbasis Good Governance." *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 2025.

Nabi dengan umatnya bukanlah otoriter, melainkan kolaboratif, membangun kesadaran bersama untuk menegakkan keadilan sosial.

Piagam Madinah menjadi bukti konkret bahwa Nabi membangun masyarakat Madani melalui komunikasi lintas suku dan agama. Konstitusi ini menjamin hak-hak warga, baik Muslim maupun non-Muslim, dalam satu sistem sosial yang adil. Sertkaya dan Keskin menjelaskan bahwa sikap damai Nabi dalam membangun komunitas lintas agama di Madinah merupakan wujud kepemimpinan profetik yang menolak kekerasan dan mengedepankan diplomasi sosial.[265] Nabi menjadikan komunikasi sosial sebagai instrumen penyatuan umat dalam keberagaman.

Rasulullah SAW menjadi teladan komunikasi spiritual dan sosial karena mampu menggabungkan antara aspek wahyu dan konteks kehidupan masyarakat. Hal ini digambarkan dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman :

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيْرًا

"Sungguh, pada (diri) Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat serta yang banyak mengingat Allah." (Q.S Al-Ahzab [33]:21)

Dalam pandangan Kamaludin,[266] Nabi Muhammad SAW menunjukkan gaya kepemimpinan komunikatif yang karismatik dan transformasional, dengan menekankan pentingnya hubungan emosional, spiritual, dan sosial dalam menyampaikan pesan ilahi. Pendekatan ini membangun kepercayaan dan loyalitas dalam komunitas Muslim awal.

Salah satu prinsip utama komunikasi Nabi adalah *tablīgh*, yaitu kemampuan menyampaikan pesan dengan benar, jelas, dan amanah. Nabi SAW mencontohkan bahwa tugas penyampai pesan bukan hanya berbicara, tetapi memastikan pesan itu dipahami dengan baik dan tidak menimbulkan salah tafsir.[267] Dalam konteks modern, prinsip *tablīgh* menuntut integritas dan transparansi komunikasi publik.

Prinsip *ḥikmah* (kebijaksanaan) menjadi aspek penting dalam komunikasi Rasulullah SAW. Kebijaksanaan beliau tampak dalam kemampuan membaca situasi sosial dan psikologis lawan bicara, serta menyesuaikan pesan

---

[265] S. Sertkaya And Zuleyha Keskin. "A Prophetic Stance Against Violence: An Analysis Of The Peaceful Attitude Of Prophet Muhammad During The Medinan Period." *Religions*, 2020.

[266] Kamaluddin Kamaluddin dan Putri Rizka Citaningati, "Islamic Leadership: Prophet Muhammad As A Role Model For Being Charismatic, Transformational, And Servant Leader," *International Journal Of Applied Business And International Management*, 2023, Https://Doi.Org/10.32535/Ijabim.V8i2.2460.

[267] Taufik, "Determination Of Islamic Leadership: Amanah, Fatonah, Tabligh, Siddiq."

sesuai tingkat pemahaman *audiens*.[268] Pendekatan penuh hikmah ini menjadikan dakwah Islam diterima luas tanpa paksaan, melainkan dengan kesadaran spiritual.

Prinsip *mau'izhah ḥasanah* dalam komunikasi Nabi menunjukkan pentingnya nasihat yang baik, lembut, dan menumbuhkan semangat kebaikan. Menurut Zabidi[269], dakwah yang penuh kelembutan dan kasih sayang memiliki pengaruh psikologis yang jauh lebih besar dibandingkan retorika keras. Dengan pendekatan ini, Nabi membentuk masyarakat berakhlak mulia yang sadar akan nilai-nilai moral dan spiritual.

Rasulullah SAW juga menunjukkan *servant leadership* kepemimpinan yang melayani dengan kasih dan amanah. Dalam penelitian Sulaeman[270], dijelaskan bahwa Nabi selalu mendahulukan kepentingan umat daripada dirinya sendiri, menolak kemewahan, dan memimpin dengan keteladanan moral. Kepemimpinan beliau bukanlah dominasi, melainkan pengabdian yang menggerakkan hati.

Keteladanan Rasulullah SAW sebagai pemimpin pelayan terlihat jelas dalam interaksi sosialnya yang egaliter. Ia tidak menempatkan diri di atas umat, tetapi di tengah-tengah mereka sebagai pembimbing dan sahabat.[271] Prinsip ini menciptakan keakraban emosional antara pemimpin dan rakyat, sehingga komunikasi menjadi sarana penguatan spiritual dan sosial.

Model komunikasi Rasulullah juga mencerminkan keseimbangan antara ketegasan dan kelembutan. Dalam peristiwa-peristiwa seperti Perang Hunain, beliau menunjukkan kemampuan berkomunikasi strategis yang mampu menggerakkan moral pasukan tanpa kehilangan kasih sayang sebagai pemimpin.[272] Keteladanan ini menegaskan bahwa komunikasi efektif harus berpijak pada moralitas dan empati.

Keteladanan Nabi dalam komunikasi juga dapat dipahami melalui konsep *shidq* (kejujuran), *amanah* (tanggung jawab), *tablīgh* (penyampaian), dan *faṭhanah* (kecerdasan). Keempat nilai ini menjadi landasan etika

---

[268] Rafiqi Ihsan And Iskandar Ritonga, "The Relevance Of Prophet Muhammad's Leadership As A Modern Leadership Role Model," *Jurnal El-Riyasah*, 2022, Https://Doi.Org/10.24014/Jel.V13i2.18117.

[269] Zabidi, "Sayyid Qutb's Concept Of Da'wa In His Fi Zilal Al Quran."

[270] Sulaeman, "A Review Of Servant And Transformational Leadership Style In Islamic Perspectives: A Lesson From The Prophet Muhammad (Pbuh) As An Excellent Role Model For Muslim Leaders In Indonesia."

[271] Kalsum, Mesiono, And Zein, "Implementation Of Prophetic Communication Of The Head Of Man Medan City (Multi-Site Study In Man Medan)."

[272] Siska Dewi Et Al., "Prophetic Leadership In The Battle Of Hunain: Strategic Lessons For Modern Leadership," *Research Horizon*, 2025, Https://Doi.Org/10.54518/Rh.5.3.2025.591.

komunikasi profetik yang relevan dalam konteks kepemimpinan modern.[273] Dengan nilai-nilai tersebut, komunikasi menjadi alat pendidikan moral dan penggerak peradaban.

Nabi Muhammad SAW mencontohkan bahwa komunikasi sejati adalah ibadah yang berorientasi pada kemaslahatan umat. Menurut Syabibi[274], komunikasi profetik yang berakar pada spiritualitas mampu menciptakan birokrasi publik yang transparan, humanis, dan akuntabel. Dengan meneladani Rasulullah, komunikasi menjadi instrumen dakwah dan kepemimpinan yang membangun kemanusiaan.

Prinsip *tablīgh* yang diterapkan Rasulullah SAW menunjukkan integrasi antara kebenaran dan keindahan dalam komunikasi publik. Beliau tidak sekadar menyampaikan wahyu, tetapi juga menyesuaikan pesan agar mudah diterima oleh masyarakat dengan berbagai latar budaya. *Tablīgh* mengandung nilai pedagogis yang menjadikan komunikasi Rasulullah bersifat mendidik, menasihati, dan menginspirasi, bukan memaksa.

Rasulullah SAW memahami bahwa keberhasilan komunikasi terletak pada kemampuan menyeimbangkan antara pesan kebenaran dan pendekatan emosional. Dalam setiap seruan dakwah, beliau menggunakan bahasa yang lembut namun penuh makna, sebagaimana prinsip qaulan layyina yang menuntut kelembutan dalam penyampaian tanpa kehilangan ketegasan moral.[275]

Prinsip *ḥikmah* dalam komunikasi Nabi menegaskan pentingnya kecerdasan sosial dan spiritual. Dalam konteks kepemimpinan, hikmah adalah kemampuan memahami karakter *audiens* dan menyesuaikan pesan dengan kebutuhannya. Penelitian Ruhullah[276] menjelaskan bahwa hikmah Nabi berperan sebagai fondasi komunikasi strategis dalam membangun peradaban Islam yang damai dan berkeadilan.

Keteladanan Rasulullah dalam menerapkan *ḥikmah* terlihat dalam kemampuannya menasihati individu sesuai konteks emosionalnya. Misalnya, kepada pemuda yang meminta izin berzina, beliau tidak memarahi, tetapi

---

[273] Fera Anggraini And Saiful Bahri, "Management Of Islamic Education Institutions From The Perspective Of Prophetic Leadership (Field Study At Sma Muhammadiyah Toboali)," *Proceeding Of The Postgraduate School Universitas Muhammadiyah Jakarta*, 2025, Https://Doi.Org/10.24853/Pi.2.0.2024.399-418.

[274] M Syabibi, "Prophetic Leadership Model For Public Bureaucracy: How It's Works?," *Jurnal Ilmiah Syi'ar*, 2022, Https://Doi.Org/10.29300/Syr.V22i1.7187.

[275] Katimin Harahap dan Abdullah, "Grounding the Principles of Islamic Communication in Organizational Culture: A Case Study of State Islamic Higher Education Institutions," *Jurnal Komunikasi Islam*, 2021, hal. 74.

[276] Ruhullah dan Taha Jabir Al-Ushama, "Leadership in Islam: A Spiritual and Theological Doctrine," *Al-Irsyad: Journal of Islamic and Contemporary Issues*, 2022, hal. 118

menggunakan pendekatan reflektif yang menyentuh kesadaran moral.[277] Pendekatan ini menunjukkan komunikasi empati yang berakar pada kasih sayang, bukan otoritas.

Konsep *mauʿizhah ḥasanah* dalam komunikasi Nabi mengandung nilai edukatif dan psikologis yang tinggi. Beliau mengajarkan bahwa nasihat terbaik adalah yang disampaikan dengan keteladanan nyata, bukan hanya kata-kata.[278] Oleh karena itu, komunikasi Rasulullah berfungsi membangun kesadaran sosial yang mengarah pada kebaikan kolektif.

Rasulullah SAW juga mengajarkan bahwa komunikasi spiritual tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab sosial. Dalam hadis riwayat Muslim, beliau menegaskan pentingnya menyampaikan kebenaran meskipun pahit. Prinsip ini menumbuhkan budaya komunikasi etis di mana kejujuran menjadi dasar kepercayaan publik.[279]

Dalam kepemimpinan profetik, Rasulullah SAW menunjukkan bahwa komunikasi sejati adalah sarana ibadah dan pengabdian. Gaya komunikasi beliau memadukan antara visi moral dan strategi sosial, menjadikan pesan dakwah relevan di setiap ruang dan waktu.[280]

Keteladanan Nabi SAW juga tampak dalam kemampuan beliau menumbuhkan dialog partisipatif dalam masyarakat. Beliau sering bermusyawarah dengan para sahabat dalam urusan publik, menunjukkan bahwa komunikasi efektif adalah komunikasi yang mendengarkan. Menurut Espihani,[281] praktik ini memperlihatkan *paradigma inclusive leadership* dalam Islam.

Rasulullah SAW juga mengembangkan model komunikasi berbasis kasih (*rahmah*), yang berfungsi menenangkan hati masyarakat yang terluka secara sosial maupun spiritual. Kasih sayang menjadi alat transformasi moral yang efektif dalam memperbaiki karakter umat.[282] Keteladanan beliau juga

---

[277] Juliyana Junaidi, Latifah Abdul Majid, dan Mohd Arif Nazri, "The Role of Quran and Sunnah in Solving Leadership Failure," *ʿAbqari Journal*, 2022, hal. 64.

[278] Febriyanti, Elystia, Nur Kholid, and Rudi Hartono. "The Ethical Values in Islamic Tradition Reinterpreting Morals in the Context of Global Moral Crisis." *Bulletin of Science Education* 5, no. 1, 2025, hal. 14.

[279] Aqil, "Authentic Leadership in the Perspective of Islamic Education," *Jurnal Pendidikan Islam*, 2021, hal. 89.

[280] Hasrat Efendi Samosir and Md Noor Bin Hussin. "Recontextualizing the Medina Charter: Consensus-Based Political Communication for Contemporary Plural Societies." *MILRev: Metro Islamic Law Review* 4, no. 1, 2025, hal. 645

[281] Espihani, Rahmad, Tuti Fiani, Jasiah Jasiah, Muslimah Muslimah, Normuslim Normuslim, and Dakir Dakir. "Multicultural Leadership Principles in Islamic Education: A Quranic and Hadith Perspective." *Urwatul Wutsqo: Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman* 14, no. 1, 2025, 464

[282] Sadia Khanom, Md. Yousuf Ali, dan Md. Rabiul Ahmed, "Advancing Islamic Education: Values-Driven Strategic Leadership in School Culture of the Digital Era," *Journal of Islamic Education Research*, 2023, hal. 94.

tampak dalam kebiasaan menghindari debat destruktif. Nabi selalu mengutamakan penyelesaian konflik melalui dialog yang tenang dan berorientasi pada kebenaran. Prinsip ini sejalan dengan teori *nonviolent communication* dalam psikologi sosial modern.[283]

Servant leadership Rasulullah SAW tercermin dari kesederhanaan hidup dan kerelaannya melayani umat tanpa pamrih. Dalam berbagai riwayat, beliau menolak kemewahan dan lebih memilih hidup bersama rakyat. Menurut Matondang,[284] nilai kepemimpinan seperti ini membentuk solidaritas moral antara pemimpin dan masyarakat.

Keteladanan Rasulullah SAW dalam kepemimpinan melayani juga tampak dalam kemampuannya memperhatikan kebutuhan emosional umat. Beliau selalu mendengarkan dengan penuh empati, menciptakan komunikasi dua arah yang menumbuhkan rasa aman dan dihargai.[285]

Pemimpin yang mengikuti teladan Rasulullah akan memandang kekuasaan sebagai amanah, bukan alat dominasi. Prinsip ini menumbuhkan etika kepemimpinan berbasis tanggung jawab sosial dan spiritual yang relevan dalam konteks modern.[286]

Model *servant leadership* Nabi juga menuntut adanya *emotional intelligence*, yaitu kemampuan memahami perasaan orang lain tanpa kehilangan arah spiritual. Menurut Kadir,[287] kecerdasan emosional ini menjadi kunci komunikasi etis yang berorientasi pada kesejahteraan bersama.

Dalam konteks manajemen publik modern, nilai-nilai komunikasi profetik menjadi panduan dalam menciptakan sistem pemerintahan yang humanis dan partisipatif. Rasulullah mempraktikkan kepemimpinan berbasis *maslahah* dan syura, yang menjadi model demokrasi moral Islam.[288]

Nabi juga menunjukkan bahwa keberhasilan komunikasi ditentukan oleh niat yang tulus. Setiap ucapan dan tindakan beliau selalu diarahkan untuk

---

[283] Karimullah, Suud Sarim, Rahman Rahman, and Fawwaz Elmurtadho. "Reflections of Prophetic Values on Strengthening Da'wah in the Digitalization Era." *Mawaizh: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan* 14, no. 2, 2023, hal. 134-154.

[284] Amrin Matondang, Syukur Nasution, dan Anang Anas Azhar, "Antara Rahmah dan Hegemoni: Tafsir Komunikasi Politik Islam atas Kekuasaan Turunan di Kabupaten Deli Serdang," *Jurnal Ilmu Komunikasi Islam*, 2023, hal. 211.

[285] Mohd Yusof Yusoff, Mohd Helmi Hassan, dan Norazlina Hassan, "Integrating Religious Values into Public Relations: A Proposed Framework for Malaysia," *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication*, 2020, hal. 56.

[286] Mahmud, "Islamic Spiritual Leadership Model to Enhance Madrasah Quality Culture and Achieve Sustainable Development Goals," *Journal of Islamic Education and Leadership*, 2023, hal. 78.

[287] Abdul Kadir, Nur Hidayah, dan Ahmad Zaini, "Enhancing Interpersonal Communication: Lessons from 'Qaulan Sadidan' in the Quran," *Jurnal Komunikasi Islam*, 2024, hal. 102.

[288] Abdul Usman, Azwar, dan Aswar, "Human Civilization between Revelation and Reason," *International Journal of Islamic Thought*, 2022, hal. 64.

mencari rida Allah, bukan kepentingan duniawi.[289] Nilai ketulusan ini memperkuat kredibilitas moral pemimpin di mata umat.

Keteladanan Nabi dalam komunikasi juga mengajarkan prinsip *transcendental ethics*, di mana setiap kata memiliki dimensi spiritual. Menurut Rakhmawati,[290] komunikasi yang disandarkan pada kesadaran ketuhanan mampu mengubah perilaku sosial menuju keadilan dan kasih sayang.

Rasulullah SAW mewujudkan keseimbangan sempurna antara hikmah, *tablīgh*, dan *rahmah*. Kombinasi tiga nilai ini menjadikan beliau bukan hanya komunikator, tetapi juga pendidik dan pemimpin moral bagi seluruh umat manusia.[291]

QS. Al-Hujurat [49]:13 juga menjadi prinsip dasar komunikasi sosial Nabi ﷺ, menegaskan bahwa kemuliaan seseorang tidak diukur dari suku atau ras, tetapi dari ketakwaan. Dalam masyarakat Madinah yang multikultural, Nabi menerapkan prinsip ini dengan menciptakan sistem sosial yang egaliter. Zakiyah menilai bahwa pendekatan Rasulullah berbasis *maqasid syariah*, yaitu menjaga agama, akal, dan kehidupan, agar komunikasi sosial berfungsi untuk kemaslahatan bersama.[292] Dengan demikian, komunikasi partisipatif menjadi sarana penguatan kohesi sosial di Madinah.

QS. An-Nisa [4]:58–59 menegaskan pentingnya keadilan dan amanah dalam kepemimpinan. Nabi menanamkan nilai ini melalui konsultasi publik dan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan umat. Permana dan Zulaiha menjelaskan bahwa kepemimpinan Nabi mencerminkan paradigma *amanah* yang tidak hanya administratif, tetapi juga moral dan spiritual.[293] Komunikasi Nabi membangun rasa tanggung jawab kolektif dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Kepemimpinan Nabi di Madinah juga mencerminkan prinsip *servant leadership* yang menempatkan kesejahteraan umat sebagai prioritas. Kamaluddin dan Citaningati menyebutkan bahwa Rasulullah adalah pemimpin transformasional yang memotivasi umat untuk berbuat kebaikan dengan

---

[289] Khoirul Anam dan Lailatul Kusumawati, "Bentuk-Bentuk Komunikasi dalam Perspektif Al-Qur'an dan Implementasinya terhadap Kehidupan Masyarakat," *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 2021, hal. 91.

[290] Rakhmawati, "Prophetic Communication: Transcendental Dimension in Islamic Philanthropy Messages," *Jurnal Komunikasi Islam*, 2022, hal. 147.

[291] Syarifuddin, "Transforming Personal Selling through Qur'anic Ethical Principles in Marketing Communication," *Journal of Islamic Marketing and Communication*, 2023, hal. 55.

[292] Ermita Zakiyah. "Maudhui's Tafsir Method In The Qur'an And Hadith On Maqasid Syariah For Economic Welfare In Indonesia." *Journal Of Islamic Economics And Philanthropy*, 2022.

[293] Asep Amar Permana And Eni Zulaiha. "A Comparative Study Of Exegesis In Al-Munir Fi Al-Aqidah Wa Al-Syari'ah Wa Al-Manhaj And Tafsir Al-Mizan Fi Tafsir Al-Qur'an Regarding Leadership Verses." *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama*, 2024.

memberi teladan, bukan paksaan.[294] Prinsip komunikasi partisipatif terlihat jelas dalam cara Rasulullah mendengar aspirasi masyarakat dan mendorong mereka untuk berkontribusi secara aktif.

QS. Al-Mumtahanah [60]:8–9 menunjukkan bahwa Nabi membangun hubungan damai dengan pihak non-Muslim selama mereka tidak melakukan permusuhan. Pendekatan ini mencerminkan komunikasi inklusif yang menghargai keberagaman sosial. Alghozali dan Hasiolan menegaskan bahwa model kepemimpinan profetik Nabi berlandaskan pada *maqasid syariah* dan keadilan universal, sehingga komunikasi beliau menjadi sarana perdamaian sosial.[295] Melalui komunikasi ini, Nabi berhasil membangun tatanan masyarakat yang harmonis dan stabil.

QS. An-Nur [24]:62 menjelaskan pentingnya etika dalam komunikasi sosial, termasuk izin dan sopan santun dalam bermusyawarah. Rasulullah menerapkan prinsip ini dalam setiap pertemuan, di mana seluruh sahabat memiliki kesempatan berbicara. Amir, Kartakusumah, dan Anwar menyoroti bahwa Nabi menjadikan komunikasi pendidikan sebagai sarana transformasi sosial yang membentuk karakter masyarakat Madani.[296] Pola komunikasi beliau berorientasi pada nilai etis, bukan dominasi verbal.

QS. Al-Imran [3]:159 juga menekankan pentingnya musyawarah dan pemaafan dalam kepemimpinan. Rasulullah dikenal tidak memutuskan sesuatu tanpa pertimbangan kolektif. Syam menjelaskan bahwa gaya kepemimpinan Rasulullah di Madinah merupakan prototipe kepemimpinan sosial-politik Islam yang membangun peradaban melalui partisipasi rakyat.[297] Dengan demikian, Nabi menempatkan komunikasi partisipatif sebagai inti dalam mengelola urusan publik dan spiritual.

QS. At-Taubah [9]:128 menggambarkan empati Rasulullah terhadap umatnya: *"Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari golonganmu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu."* Zakaria, Hasan, dan Marpuah menjelaskan bahwa empati dalam kepemimpinan Nabi menjadi pilar

---

[294] Kamaluddin Kamaluddin And Putri Rizka Citaningati. "Islamic Leadership: Prophet Muhammad As A Role Model For Being Charismatic, Transformational, And Servant Leader." *International Journal Of Applied Business And International Management*, 2023.

[295] Abdussalam Alghozali And Hasiolan. "Prophetic Leadership Based On Maqasid Sharia." *Iconic: Journal Of Islamic Studies*, 2025.

[296] Fachrur Razi Amir, Berliana Kartakusumah And Miftahulkhairah Anwar. "Educational Communication In The Perspective Of Islamic Educational Leadership." *Proceedings Of The International Conference On Education, Language And Society*, 2019.

[297] Robingun Suyud El Syam. "Prophetic Leadership: The Leadership Model Of Prophet Muhammad In Political Relation Of Social – Ummah." *Jurnal Pendidikan Islam*, 6, 2017, hal. 371

komunikasi humanistik yang menyatukan berbagai kelompok sosial.[298] Melalui empati dan dialog, Nabi membangun kedekatan emosional antara pemimpin dan rakyatnya.

(QS. Al-Hujurat [49]:10) menegaskan pentingnya persaudaraan di antara kaum Muslimin. Nabi menggunakan komunikasi sosial berbasis ukhuwah ini untuk menghapus konflik antar suku di Madinah. Fuadia et al. menilai bahwa pendekatan komunikasi Rasulullah membentuk sistem kenegaraan yang menekankan solidaritas dan persamaan hak.[299] Dengan demikian, komunikasi partisipatif Nabi menjadi sarana rekonsiliasi sosial dan penguatan institusi masyarakat Madani.

QS. Al-Nahl [16]:125 menegaskan pentingnya dakwah dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Prinsip ini menjadi ciri khas komunikasi Rasulullah SAW di Madinah, yang selalu disampaikan dengan argumentasi rasional dan empati spiritual. Menurut Haqiqi dan Hakim, komunikasi Nabi menggambarkan harmoni antara intelektualitas dan spiritualitas dalam membimbing masyarakat menuju kesalehan sosial.[300] Oleh karena itu, model komunikasi partisipatif Nabi bukan hanya historis, tetapi juga menjadi paradigma peradaban Islam yang humanis dan berkeadilan.

b. Nabi Yusuf ‘alaihissalam – komunikasi Strategis dan Profesional

Kisah Nabi Yusuf *‘alaihissalam* merupakan salah satu narasi Qur’ani yang paling komprehensif dalam menggambarkan dinamika komunikasi manusia dalam berbagai konteks sosial, mulai dari komunikasi keluarga, konflik politik, hingga kepemimpinan pemerintahan. Surah Yusuf tidak hanya menghadirkan cerita spiritual, tetapi juga menunjukkan bagaimana komunikasi yang jujur, sabar, dan strategis mampu membangun legitimasi moral seorang pemimpin di tengah situasi krisis. Para mufasir menjelaskan bahwa kisah Yusuf *‘alaihissalam* mengandung pelajaran tentang etika komunikasi yang berakar pada nilai kejujuran, kesabaran, dan kebijaksanaan dalam menghadapi berbagai relasi sosial yang kompleks.[301]

Al-Qur’an memperkenalkan kisah ini melalui pernyataan bahwa cerita Nabi Yusuf *‘alaihissalam* merupakan kisah terbaik yang sarat pelajaran moral. Allah berfirman:

---

[298] Muhamad Irfan Zakaria, Ubaidillah Hasan And Siti Marpuah. "The Hermeneutics Of Husein Muhammad And Nasaruddin Umar As A Reformulation Of The Problems On The Surah An-Nisa In Indonesia." *Dialogia*, 2022.

[299] Sabrina Farah Fuadia, Raudotul Aini, Raka Meirwanto Soba And Asep Abdul Muhyi. "The Concept Of The State In Islam: A Study Of Maudhu'i's Interpretation." *Bulletin Of Islamic Research*, 2024.

[300] M.Rama Haqiqi Haqiqi And Syamsul Hakim. "Human In The Qur’an, Tafsir Maudu’i." *Jurnal Kajian Islam*, 2025.

[301] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2017, hal. 45.

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَٰذَا الْقُرْآنَ

“ Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Qur’an ini kepadamu” (QS. Yusuf [12]:3).

Ayat ini menunjukkan bahwa kisah Yusuf *‘alaihissalam* memiliki nilai edukatif yang tinggi dalam membentuk kesadaran moral dan sosial manusia. Dalam perspektif tafsir tematik, kisah ini menjadi sumber penting dalam memahami model komunikasi etis yang mampu menjaga integritas individu di tengah konflik sosial.[302]

Komunikasi Nabi Yusuf *‘alaihissalam* pertama kali digambarkan melalui dialognya dengan ayahnya, Nabi Ya‘qub *‘alaihissalam*. Yusuf kecil menceritakan mimpi yang ia lihat, sebagaimana disebutkan dalam QS. Yusuf [12]:4. Dialog ini menunjukkan pola komunikasi yang jujur dan terbuka antara anak dan orang tua. Yusuf *‘alaihissalam* tidak menyembunyikan pengalaman spiritualnya, tetapi menyampaikannya dengan penuh kepercayaan kepada ayahnya. Dalam kajian komunikasi Qur’ani, dialog ini menggambarkan pentingnya relasi emosional yang sehat dalam membangun komunikasi keluarga yang etis.[303]

Nabi Ya‘qub *‘alaihissalam* kemudian menasihati Yusuf *‘alaihissalam* agar tidak menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya karena dikhawatirkan akan menimbulkan kecemburuan. Nasihat ini menunjukkan bahwa komunikasi yang bijak juga membutuhkan kehati-hatian dalam memilih *audiens*. Prinsip ini menegaskan bahwa tidak semua informasi harus disampaikan secara terbuka tanpa mempertimbangkan konteks sosialnya. Dalam ilmu komunikasi, sikap ini dikenal sebagai komunikasi strategis yang mempertimbangkan kondisi psikologis dan sosial penerima pesan.[304]

Konflik komunikasi kemudian muncul ketika saudara-saudara Yusuf memanipulasi informasi kepada ayah mereka. Mereka menyampaikan narasi palsu bahwa Yusuf *‘alaihissalam* dimakan serigala setelah mereka meninggalkannya di padang pasir. Kisah ini menunjukkan bagaimana komunikasi yang tidak jujur dapat merusak kepercayaan dalam relasi sosial. Al-Qur’an menggambarkan bahwa manipulasi informasi merupakan bentuk komunikasi yang menyesatkan dan berpotensi merusak tatanan moral masyarakat.[305]

Ketika Yusuf *‘alaihissalam* berada di Mesir, komunikasi etis kembali terlihat dalam peristiwa godaan istri al-Aziz. Yusuf menolak ajakan tersebut

---

[302] Mannā’ Khalīl al-Qaṭṭān, *Mabāḥith fī ‘Ulūm al-Qur’ān*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 2000, hal. 352

[303] Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 2001, hal. 152.

[304] Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015, hal. 96

[305] M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an*, Jakarta: Lentera Hati, 2007, hal. 284.

dengan tegas sambil menyatakan bahwa perbuatan tersebut merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah. Penolakan ini menunjukkan bahwa komunikasi moral tidak selalu bersifat kompromis, tetapi juga membutuhkan ketegasan dalam mempertahankan nilai kebenaran.[306]

Peristiwa dipenjarakannya Nabi Yusuf *'alaihissalam* menjadi fase penting dalam pembentukan karakter komunikasinya. Di dalam penjara, Yusuf *'alaihissalam* tidak tenggelam dalam keputusasaan, tetapi justru menggunakan kesempatan tersebut untuk berdakwah kepada para tahanan. Hal ini terlihat ketika ia menafsirkan mimpi dua orang penghuni penjara dan mengajak mereka untuk menyembah Allah (QS. Yusuf [12]:37-40). Komunikasi Yusuf *'alaihissalam* dalam situasi ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin sejati mampu memanfaatkan setiap ruang sosial untuk menyampaikan nilai moral dan spiritual. [307]

Ketika raja Mesir bermimpi tentang tujuh sapi gemuk dan tujuh sapi kurus, Nabi Yusuf memberikan penafsiran yang bukan hanya bersifat spiritual tetapi juga strategis. Ia menjelaskan bahwa Mesir akan menghadapi tujuh tahun masa subur yang diikuti oleh tujuh tahun masa kelaparan. Penjelasan ini menunjukkan bahwa komunikasi kepemimpinan tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga memberikan solusi terhadap masalah sosial.[308]

Setelah berhasil menafsirkan mimpi tersebut, Yusuf *'alaihissalam* menunjukkan integritas moral dengan menolak keluar dari penjara sebelum kebenaran tentang dirinya dibuktikan. Sikap ini menunjukkan bahwa legitimasi kepemimpinan tidak hanya dibangun melalui kemampuan intelektual, tetapi juga melalui kredibilitas moral. Dalam teori komunikasi kepemimpinan, kepercayaan publik merupakan fondasi utama bagi keberhasilan seorang pemimpin.[309]

Al-Qur'an kemudian menggambarkan puncak kepemimpinan Yusuf *'alaihissalam* ketika ia diangkat menjadi pengelola perbendaharaan negara. Yusuf berkata:

اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ

" Jadikanlah aku pengelola perbendaharaan negeri ini, karena aku adalah orang yang menjaga dan berpengetahuan" (QS. Yusuf [12]:55). Ayat ini menunjukkan bahwa komunikasi kepemimpinan harus disertai dengan kejujuran mengenai kapasitas diri. Yusuf tidak mengajukan diri karena ambisi

---

[306] Abdul Karim Zaidan, *Usul al-Da'wah*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1996, hal. 214.

[307] Sayyid Qutb, *Fī Ẓilāl al-Qur'ān*, Kairo: Dar al-Syuruq, 2003, hal. 2023

[308] Gary Yukl, *Leadership in Organizations*, New Jersey: Pearson Education, 2013, hal. 271.

[309] Joseph S. Nye, *The Powers to Lead*, New York: Oxford University Press, 2008, hal. 45.

pribadi, tetapi karena kesadaran bahwa ia memiliki kompetensi untuk mengelola krisis pangan.

Kepemimpinan Yusuf *'alaihissalam* juga ditandai dengan komunikasi empati kepada rakyat. Ketika masa kelaparan terjadi, ia mengelola distribusi pangan dengan sistem yang adil dan terencana.[310] Kebijakan ini menunjukkan bahwa komunikasi kepemimpinan harus mampu membangun kepercayaan masyarakat melalui tindakan nyata yang berpihak kepada kesejahteraan publik.[311]

Pertemuan Yusuf *'alaihissalam* dengan saudara-saudaranya pada masa kelaparan memperlihatkan kedewasaan emosional dalam komunikasi. Yusuf tidak langsung membuka identitasnya, tetapi membangun dialog secara bertahap hingga akhirnya mereka menyadari kesalahan mereka. Pola komunikasi ini menunjukkan bahwa rekonsiliasi sosial membutuhkan kesabaran dan strategi dialog yang bijak.[312]

Ketika identitasnya akhirnya terungkap, Yusuf *'alaihissalam* memilih untuk memaafkan saudara-saudaranya. Ia berkata:

لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ

"Pada hari ini tidak ada celaan bagi kalian" (QS. Yusuf [12]:92).

Ungkapan ini menunjukkan bahwa komunikasi rekonsiliatif merupakan bagian penting dari kepemimpinan moral. Yusuf tidak menggunakan kekuasaan untuk membalas dendam, tetapi untuk membangun kembali hubungan keluarga yang rusak.[313]

Kisah Nabi Yusuf *'alaihissalam* juga menunjukkan bahwa komunikasi kepemimpinan harus mampu menjembatani kepentingan keluarga dan masyarakat. Yusuf tidak hanya memaafkan saudara-saudaranya, tetapi juga mengundang seluruh keluarganya untuk tinggal di Mesir. Tindakan ini mencerminkan kepemimpinan yang mengutamakan rekonsiliasi sosial dan kesejahteraan kolektif.[314]

Dalam perspektif ilmu komunikasi Islam, kisah Nabi Yusuf *'alaihissalam* menggambarkan integrasi antara komunikasi spiritual, emosional, dan politik. Yusuf *'alaihissalam* mampu menyeimbangkan ketegasan moral dengan kelembutan sikap dalam menghadapi berbagai konflik sosial. Nilai ini menunjukkan bahwa komunikasi kepemimpinan Qur'ani tidak

---

[310] Lukman Hakim, Moh. Mustaqim, dan Abd. Hadi, "Analyzing the Ideal Leadership of Prophet Yusuf in the Quran," *Tafse: Journal of Qur'anic Studies*, 2024, hal. 87.

[311]Denis McQuail, *Mass Communication Theory*, London: Sage Publications, 2010, hal. 172.

[312] Muhammad Mabrur Barizi, "Reading the Qur'an from the Contemporary Approach of Maqasid al-Shari'a," *Ulumuna*, 2018, hal. 203.

[313] Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 2001, hal. 208.

[314] M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2013, hal. 312

hanya berorientasi pada efektivitas pesan, tetapi juga pada transformasi moral masyarakat.[315]

Dengan demikian, kisah Nabi Yusuf *'alaihissalam* dalam Al-Qur'an menghadirkan model kepemimpinan yang mengintegrasikan kecerdasan komunikasi, integritas moral, dan tanggung jawab sosial. Seorang pemimpin Qur'ani tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi juga membangun kepercayaan, menyelesaikan konflik, serta menumbuhkan kesejahteraan masyarakat melalui komunikasi yang etis dan penuh kebijaksanaan.[316]

c. Nabi Musa alaihissalam – Komunikasi Konfontratif Etis

Kisah Nabi Musa *'alaihissalam* dan Fir'aun dalam Al-Qur'an adalah salah satu narasi yang paling sering diulang, menggambarkan ketegangan antara kebenaran dan kekuasaan yang zalim. QS. Al-Qasas [28]:3–6 menampilkan kisah ini sebagai pelajaran bagi umat manusia bahwa kekuasaan yang disalahgunakan akan berakhir dengan kehancuran. Fir'aun digambarkan sebagai simbol kesombongan dan tirani, sementara Musa menjadi lambang kebenaran, kesabaran, dan keberanian dalam menyampaikan risalah ilahi.[317] Narasi ini menegaskan bahwa komunikasi kekuasaan dalam Islam tidak boleh bersifat menindas, tetapi harus berdasarkan nilai-nilai moral dan kemanusiaan.

Dalam tafsir Al-Azhar karya Hamka dan tafsir Al-Mishbah karya Quraish Shihab, kisah Nabi Musa *'alaihissalam* dipahami secara kontekstual sesuai dengan realitas masyarakat modern. Hamka menekankan aspek perjuangan dan pembebasan, sementara Quraish Shihab menyoroti aspek dialog dan kesabaran dalam menghadapi penguasa zalim. QS. Taha [20]:44 menggambarkan Allah memerintahkan Musa dan Harun untuk berbicara dengan Fir'aun "dengan kata-kata yang lemah lembut" agar ia mendapat petunjuk.

فَقُوْلَا لَهٗ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهٗ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشٰى

"Berbicaralah kamu berdua kepadanya (Fir'aun) dengan perkataan yang lemah lembut, mudah-mudahan dia sadar atau takut."

Pesan ini menunjukkan bahwa komunikasi yang penuh hikmah tetap menjadi jalan utama dakwah, bahkan terhadap penguasa yang menentang kebenaran.[318]

---

[315] Fikra Awla dan Akhmad Rifai, *Political Communication in the Quranic Perspective*, Palakka: Media and Islamic Communication, 2025, hal. 112.

[316] Stephen W. Littlejohn dan Karen A. Foss, *Theories of Human Communication*, Illinois: Waveland Press, 2009, hal. 237.

[317] Muhamad Aroka Fadli, B. M. Yunus, Ahmad Sarbini And E. Kosasih. "The Story Of The Prophet Moses And The Pharaoh In The Qur'an: An Analysis Of The Implementation Of Structural Da'wah." *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama*, 2024.

[318] A. Mujahidin, Muhammad Shohibul Itmam And A. Rofiq. "The Dynamic Of Contextualization In Indonesian Qur'anic Tafsirs: A Comparative Study Of Tafsir Al-Azhar

Kisah Musa juga mengandung nilai-nilai pendidikan karakter yang sangat mendalam. QS. Al-A'raf [7]:103–171 menceritakan perjuangan Musa *'alaihissalam* menghadapi Fir'aun dan Bani Israil dengan kesabaran, keteguhan, serta iman yang kokoh. Nilai-nilai seperti kejujuran, kesabaran, dan keberanian muncul sebagai inti pendidikan moral dari kisah tersebut.[319] Dengan demikian, kisah ini tidak hanya merupakan sejarah, tetapi juga panduan etis dalam membangun karakter bangsa yang beriman dan berintegritas.

Dari perspektif antropologi struktural, kisah Musa *'alaihissalam* dan Fir'aun menunjukkan struktur sosial yang dinamis antara kekuasaan dan perlawanan. Musa *'alaihissalam* berperan sebagai aktor perubahan sosial yang menentang sistem penindasan, sementara Fir'aun merepresentasikan penguasa yang mempertahankan *status quo* dengan kekerasan dan propaganda. Kajian ini menunjukkan bahwa masyarakat yang ingin mewujudkan kebenaran harus berani menentang struktur zalim melalui perjuangan rasional dan moral.[320] Maka, komunikasi kekuasaan dalam Al-Qur'an adalah cerminan hubungan antara penguasa dan rakyat dalam menegakkan keadilan sosial.

Fir'aun dalam Al-Qur'an digambarkan bukan hanya sebagai sosok tiran, tetapi juga lambang kesesatan intelektual dan spiritual. QS. Yunus [10]:88 menunjukkan doa Nabi Musa *'alaihissalam* agar kekuasaan Fir'aun dihancurkan karena kesombongannya. Analisis linguistik terhadap kisah ini menegaskan bahwa penyimpangan Fir'aun terjadi karena penolakannya terhadap kebenaran meskipun ia mengetahuinya.[321] Narasi ini memperingatkan bahwa kekuasaan tanpa moral akan membawa kehancuran spiritual dan sosial bagi masyarakat.

Seni komunikasi dalam menghadapi penguasa zalim juga tercermin dalam kisah dakwah Musa *'alaihissalam* kepada Fir'aun. Allah mengajarkan seni komunikasi yang santun melalui QS. Taha [20]:44, di mana Musa *'alaihissalam* diperintahkan untuk menyampaikan dakwah dengan lembut meskipun kepada seorang tiran. Dalam konteks modern, prinsip ini menjadi

---

And Tafsir Al-Mishbāh On The Story Of The Prophet Moses." *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis*, 2024.

[319] Mahmud Muhsinin, Tobroni Tobroni, Syamsurizal Yazid And Abdul Wahab. "Character Education Values In The Story Of Prophet Moses And The Israelites In The Qur'an: A Hermeneutic Study." *International Journal Of Social Science And Human Research* (2024).

[320] Ahmad Umam Aufi. "The Story Of Moses And Pharaoh In A Structural Anthropology Approach." *Jurnal Ushuluddin*, 2021.

[321] S. Sulaiman And N. Rahman. "The Quranic Depiction Of Pharaoh The Sinner: Textual Analysis." *International Journal Of Academic Research In Business And Social Sciences*, 2019.

dasar bagi komunikasi politik yang beradab dan bermoral.[322] Ini menunjukkan bahwa Islam menolak kekerasan verbal dan menekankan persuasi rasional dalam menghadapi kekuasaan yang menyimpang.

Doa Nabi Musa sebagaimana disebut dalam QS. Taha [20]:25–27,

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ ۙ وَيَسِّرْ لِيْٓ اَمْرِيْ ۙ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِيْ ۙ

"Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku," menjadi simbol kesiapan spiritual dan mental sebelum berhadapan dengan kekuasaan zalim. Tafsir hermeneutik terhadap doa ini menunjukkan bahwa kekuatan spiritual merupakan fondasi utama dalam menghadapi ketidakadilan politik.[323] Komunikasi Musa dengan Allah menunjukkan bahwa kepemimpinan sejati dimulai dari kesadaran spiritual dan ketulusan niat.

Dalam pendekatan logika Qur'ani, kisah Nabi Musa *'alaihissalam* menggambarkan rasionalitas kenabian yang berpadu dengan iman. QS. Taha [20]:43–47 menampilkan dialog antara Musa *'alaihissalam* dan Fir'aun sebagai debat logis yang menekankan bukti, argumentasi, dan kesabaran. Dalam konteks ini, Musa *'alaihissalam* menunjukkan bahwa kekuatan argumen moral lebih kuat dari kekuasaan material.[324] Al-Qur'an menampilkan Musa *'alaihissalam* sebagai simbol rasionalitas iman yang melawan kesewenang-wenangan dengan kebijaksanaan.

Kisah Musa *'alaihissalam* dan Fir'aun juga mengandung nilai sosial-politik yang berhubungan dengan keamanan masyarakat. QS. Al-Qasas [28]:4 menggambarkan Fir'aun yang memecah belah rakyat Mesir untuk mempertahankan kekuasaannya.

اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِى الْاَرْضِ وَجَعَلَ اَهْلَهَا شِيَعًا يَّسْتَضْعِفُ طَاۤىِٕفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ اَبْنَاۤءَهُمْ وَيَسْتَحْيٖ نِسَاۤءَهُمْ ۗاِنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ

"Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah-belah. Dia menindas segolongan dari mereka (Bani Israil). Dia menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuannya. Sesungguhnya dia (Fir'aun) termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan."

Penelitian Taqiyudin menunjukkan bahwa strategi Musa *'alaihissalam* dalam menciptakan keamanan sosial dilakukan melalui dakwah yang

---

[322] Muhammad Haris Hakam. "Ungkapan Satire Al-Qur'an Dalam Mujadalah (Seni Kesantunan Komunikasi, Artikulasi, Dan Agregasi Politik Menghadapi Penguasa)." *Misykat Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran Hadist Syari Ah Dan Tarbiyah*, 2022.

[323] M. Syarifuddin And Jauhar Azizy. "The Meanings And Significances Of Moses' Prayers In The Qur'an: From Tabari To Khazin.", 2020.

[324] Muhammad Taqiyuddin. "Qur'anic Logic In The Story Of Prophets Abraham And Moses." *Al-Karim: International Journal Of Quranic And Islamic Studies*, 2023.

menumbuhkan kesadaran spiritual dan solidaritas sosial.[325] Oleh karena itu, perjuangan Musa melawan Fir‘aun adalah refleksi perjuangan menegakkan keadilan dan stabilitas masyarakat.

Kisah Nabi Musa *‘alaihissalam* juga menyoroti pentingnya pendidikan moral masyarakat dalam menghadapi kekuasaan. QS. Al-A’raf [7]:138–141 menggambarkan bangsa Bani Israil yang mudah tergoda setelah diselamatkan dari penindasan Fir‘aun. Tafsir kontemporer menilai bahwa masyarakat yang tidak memiliki dasar moral kuat akan mudah terjerumus ke dalam siklus penindasan baru.[326] Hal ini menunjukkan bahwa pembebasan sejati dalam perspektif Al-Qur’an tidak hanya bersifat politik, tetapi juga moral dan spiritual.

Kisah Musa *‘alaihissalam* dan Fir‘aun merupakan gambaran paling komprehensif tentang relasi pemimpin dan rakyat dalam Al-Qur’an, sebuah kisah yang mengajarkan tentang komunikasi, kesabaran, dan keadilan. Fir‘aun menjadi simbol kekuasaan yang menindas, sedangkan Musa menjadi simbol kepemimpinan profetik yang membebaskan dan menegakkan kebenaran dengan hikmah. Melalui kisah ini, Al-Qur’an menegaskan bahwa kekuasaan sejati bukanlah dominasi, melainkan tanggung jawab moral untuk menegakkan keadilan sosial dan spiritual umat manusia.[327]

Kisah Nabi Musa *‘alaihissalam* dan Bani Israil dalam Al-Qur’an merefleksikan dinamika sosial yang kompleks antara seorang pemimpin spiritual dan umatnya. QS. Al-A’raf [7]:138–141 menggambarkan ketegangan antara ketaatan dan pembangkangan Bani Israil setelah mereka diselamatkan dari Fir‘aun. Dalam konteks ini, Musa tampil sebagai figur pemimpin yang sabar menghadapi rakyatnya yang keras kepala. Tafsir hermeneutik kontemporer menafsirkan kisah ini sebagai cerminan hubungan sosial antara pemimpin dan rakyat yang sarat dialog dan kritik konstruktif.[328] Dinamika ini menunjukkan bahwa kepemimpinan profetik menuntut kesabaran, pendidikan moral, dan kemampuan mendengar kritik rakyatnya.

QS. Al-Baqarah [2]:51–54 menampilkan peristiwa penyembahan anak sapi oleh Bani Israil saat Musa *‘alaihissalam* meninggalkan mereka untuk menerima wahyu. Narasi ini menggambarkan bagaimana keimanan yang dangkal menyebabkan penyimpangan sosial. Dalam pendekatan tafsir kontekstual Indonesia, Hamka menekankan bahwa krisis spiritual masyarakat

---

[325] Muhammad Taqiyuddin. "Qur'anic Logic In The Story Of Prophets Abraham And Moses." *Al-Karim: International Journal Of Quranic And Islamic Studies*, 2023.

[326] Romdani Romdani, Yumna Rasyid And A. Rahmat. "The Character Education Value Learning: The Moses Story Perspective.", 2020.

[327] Fadi Mahmoud Al-Ryahneh. "Interfaith And Cultural Dialogue In The Quran." *International Journal Of Religion*, 2024.

[328] Mahmud Muhsinin, Tobroni Tobroni, Syamsurizal Yazid And Abdul Wahab. "Character Education Values In The Story Of Prophet Moses And The Israelites In The Qur'an: A Hermeneutic Study." *International Journal Of Social Science And Human Research*, 2024.

sering muncul ketika mereka kehilangan figur teladan moral.[329] Musa *'alaihissalam*, sebagai pemimpin, menunjukkan peran komunikatifnya dalam mengembalikan umatnya kepada tauhid melalui pendidikan dan teguran yang penuh hikmah.

QS. Al-Maidah [5]:20–26 mengisahkan saat Musa *'alaihissalam* memerintahkan Bani Israil memasuki Tanah Suci, tetapi mereka menolak karena ketakutan terhadap kaum yang kuat di dalamnya. Penolakan ini menunjukkan lemahnya kepercayaan rakyat terhadap pemimpinnya. Dalam perspektif pendidikan karakter Qur'ani, ketegangan ini menjadi pelajaran bahwa pemimpin harus tetap berpegang pada prinsip meskipun rakyat menolak arahannya.[330] Komunikasi kepemimpinan Musa *'alaihissalam* mengajarkan bahwa ketegasan dan kesabaran harus berjalan beriringan dalam memimpin masyarakat yang sulit diarahkan.

QS. Al-Baqarah [2]:67–73 menampilkan kisah penyembelihan sapi betina yang diminta oleh Musa *'alaihissalam* atas perintah Allah, tetapi Bani Israil justru mempertanyakan dan mempersulit perintah tersebut. Sikap mereka menggambarkan kecenderungan rakyat untuk memperdebatkan instruksi pemimpin spiritualnya. Kajian *tafsir maudhui* terhadap kisah ini menunjukkan bahwa dialog antara Musa *'alaihissalam* dan Bani Israil menggambarkan dinamika sosial yang penuh resistensi namun tetap edukatif.[331] Kisah ini menjadi pelajaran bahwa kritik sosial tidak selalu destruktif, asalkan berada dalam bingkai dialog etis dan pencarian kebenaran.

QS. Al-A'raf [7]:160 menegaskan bagaimana Musa *'alaihissalam* memimpin dua belas kabilah Bani Israil dengan sistem sosial yang terorganisir. Tafsir kontemporer memandang ayat ini sebagai dasar manajemen sosial berbasis nilai keadilan dan tanggung jawab kolektif. Dalam konteks ini, Musa *'alaihissalam* menunjukkan kepemimpinan partisipatif yang mengatur umatnya melalui struktur sosial yang adil.[332] Etika komunikasi yang dibangun Musa menegaskan pentingnya keterbukaan dan keterlibatan sosial dalam membangun solidaritas antar kelompok.

QS. Asy-Syu'ara [26]:10–68 menggambarkan perjalanan Musa *'alaihissalam* bersama kaumnya yang penuh ujian. Setelah pembebasan dari

---

[329] A. Mujahidin, Muhammad Shohibul Itmam And A. Rofiq. "The Dynamic Of Contextualization In Indonesian Qur'anic Tafsirs: A Comparative Study Of Tafsir Al-Azhar And Tafsir Al-Mishbāh On The Story Of The Prophet Moses." *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis*, 2024.

[330] Muhammad Taqiyuddin. "Qur'anic Logic In The Story Of Prophets Abraham And Moses." *Al-Karim: International Journal Of Quranic And Islamic Studies*, 2023.

[331] Majid Ma'aref. "Various Types Of Dialogues And Features Of A Corrective Dialogue In The Qur'an." *Hts Teologiese Studies / Theological Studies*, 2018.

[332] Muhamad Aroka Fadli, B. M. Yunus, Ahmad Sarbini And E. Kosasih. "The Story Of The Prophet Moses And The Pharaoh In The Qur'an: An Analysis Of The Implementation Of Structural Da'wah." *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama*, 2024.

Mesir, Bani Israil sering mengeluh terhadap kesulitan yang dihadapi di padang pasir. Dalam perspektif sosial-politik, keluhan tersebut mencerminkan resistensi rakyat terhadap perubahan sosial yang drastis. Musa *'alaihissalam*, melalui dialognya, berperan sebagai mediator antara kehendak Allah dan realitas umat.[333] Dengan demikian, komunikasi profetik Musa *'alaihissalam* mengandung prinsip mendidik rakyat melalui kesabaran dan penjelasan rasional terhadap takdir Ilahi.

QS. Al-A'raf [7]:155–156 menceritakan ketika Musa memohon ampun kepada Allah atas dosa kaumnya. Dalam tafsir klasik Thabari, doa ini menunjukkan tanggung jawab moral seorang pemimpin terhadap kesalahan rakyatnya. Secara hermeneutik, doa Musa *'alaihissalam* melambangkan kepemimpinan empati yang mengutamakan pengampunan daripada hukuman.[334] Pemimpin yang demikian menjadi jembatan antara keadilan dan kasih sayang, menjadikan komunikasi spiritual sebagai sarana rekonsiliasi sosial.

QS. Al-Qasas [28]:77 menekankan pentingnya keseimbangan antara dunia dan akhirat, di mana Musa *'alaihissalam* mengingatkan kaumnya agar tidak berlebihan dalam mencintai dunia seperti Qarun. Tafsir modern menilai ayat ini sebagai simbol kritik sosial terhadap keserakahan ekonomi dalam masyarakat Bani Israil.[335] Dalam konteks ini, kepemimpinan Musa mencerminkan pentingnya komunikasi moral untuk menyeimbangkan spiritualitas dan kesejahteraan sosial.

QS. Al-A'raf [7]:134–135 menggambarkan perilaku Bani Israil yang berjanji kepada Musa *'alaihissalam* untuk beriman ketika dilanda musibah, namun mengingkari janji setelah pertolongan datang. Pola perilaku ini menunjukkan problem sosial berupa inkonsistensi moral rakyat. Tafsir sosiologis kontemporer memandang hal ini sebagai bentuk *"krisis integritas kolektif*" yang sering dihadapi pemimpin dalam masyarakat modern.[336] Musa, melalui ketegasannya, menegakkan etika tanggung jawab dalam menghadapi ketidaksetiaan sosial.

QS. Yunus [10]:84–86 menunjukkan seruan Musa *'alaihissalam* kepada kaumnya untuk bertawakal kepada Allah di tengah tekanan sosial-politik. Dalam *tafsir maudhu'i*, ayat ini mencerminkan pentingnya kepemimpinan berbasis spiritualitas dan keberanian moral. Kajian tentang nilai pluralitas dan

---

[333] Fadi Mahmoud Al-Ryahneh. "Interfaith And Cultural Dialogue In The Quran." *International Journal Of Religion*, 2024.

[334] M. Syarifuddin And Jauhar Azizy. "The Meanings And Significances Of Moses' Prayers In The Qur'an: From Tabari To Khazin.", 2020.

[335] Z. Zulkarnaini, Nawawi Marhaban And Nurdin Nurdin. "Narration The Jews In The Qur'an." *International Journal Of Social Service And Research*, 2025.

[336] Mohd Sholeh Bin Sheh Yusuff, Yusuf Haji-Othman, Abdul Hakim Mahadzir And Saiful Anwar. "Examining The Influence Of Al-Isrā'īliyyāt On The First Juz Of Al-Quran In Tafsīr Tarjumān Al-Mustafīd." *Journal Of Asian Behavioural Studies*, 2025.

dialog sosial menegaskan bahwa Musa mengajarkan keberanian rakyat untuk tetap beriman di tengah tekanan kekuasaan duniawi.[337] Dengan demikian, Musa *'alaihissalam* menjadi simbol pemimpin yang membimbing rakyat melalui dialog iman dan moral.

QS. Al-A'raf [7]:163–166 menampilkan kisah pelanggaran hukum Sabat oleh sebagian Bani Israil. Peristiwa ini menunjukkan bagaimana kritik sosial dapat muncul dari dalam masyarakat sendiri terhadap perilaku menyimpang. Tafsir tematik menjelaskan bahwa Nabi Musa *'alaihissalam* mendorong rakyat untuk melakukan amar makruf nahi munkar sebagai bentuk tanggung jawab kolektif.[338] Dinamika ini menunjukkan pentingnya ruang dialog dalam masyarakat yang sehat untuk menjaga moral publik.

QS. As-Shaffat [37]:114–122 menggambarkan penyelamatan Musa dan kaumnya sebagai bentuk pembenaran ilahi terhadap perjuangan mereka. Dalam perspektif teologis, hal ini menunjukkan bahwa ketaatan dan kesabaran dalam menghadapi konflik sosial akan mendapat ganjaran spiritual. Tafsir modern menekankan bahwa kisah ini memberikan motivasi bagi masyarakat untuk tidak kehilangan arah moral dalam menghadapi ketegangan sosial.[339] Kisah ini meneguhkan keyakinan bahwa pemimpin dan rakyat yang bersatu dalam kebenaran akan memperoleh keberkahan dan keselamatan.

Keseluruhan kisah Nabi Musa *'alaihissalam* dan Bani Israil menjadi refleksi tentang hubungan antara pemimpin dan rakyat dalam bingkai komunikasi profetik: terbuka terhadap kritik, berpihak pada kebenaran, dan berorientasi pada pembentukan moral sosial. Al-Qur'an menegaskan bahwa dialog yang jujur dan edukatif antara pemimpin dan rakyat adalah pilar penting dalam membangun masyarakat yang adil dan beradab.[340]

d. Nabi Sulaiman 'alaihissalam – Komunikasi Diplomatik

Dalam QS. An-Naml [27]:15–16 Allah SWT mengisahkan :

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ عِلْمًاۚ وَقَالَا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ فَضَّلَنَا عَلٰى كَثِيْرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِيْنَ
وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوٗدَ وَقَالَ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَاُوْتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍۗ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِيْنُ

[337] Lalu Bustanil Ulum, Novi Amelia Putri And Nur Farhati. "Islam's View Of Pluralisme:A Study Of Maudhu'i Tafsir." *Bulletin Of Islamic Research*, 2024.

[338] Wahyu Muhammad Abdul Wahid And Noor Muhamad Rizki Kamils. "Muqaran Tafsir Method: Its History, Basis And Implications." *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 2024.

[339] Z. Kahani, M. Fazeli And M. M. Damghani. "Mythical Aspects Of The Cane Of Moses In Persian Exegeses." *Propósitos Y Representaciones*, 2021.

[340] Hurnawijaya, Akrom Auladi, Nur Fitriana, Ahmad Faruq Khaqiqi, Mutiara M, Ulfia Ningrum, Tika Nadila, M. Haikal, Syifa Urrachmi Nurul Alfi, Nurilhilmah And Najwah Arsyad. "Dialectical Engagement With Biblical Narratives In Ibn 'Ashur's Tafsīr Al-Taḥrīr Wa Al-Tanwīr: Study Of Aaron, Jesus, And Noah's Wife Narratives." *Research Journal In Advanced Humanities*, 2025.

"Sungguh, Kami benar-benar telah menganugerahkan ilmu kepada Daud dan Sulaiman. Keduanya berkata, "Segala puji bagi Allah yang melebihkan kami daripada kebanyakan hamba-hamba-Nya yang mukmin. "Sulaiman telah mewarisi Daud545) dan dia (Sulaiman) berkata, "Wahai manusia, kami telah diajari (untuk memahami) bahasa burung dan kami dianugerahi segala sesuatu. Sesungguhnya (semua) ini benar-benar karunia yang nyata."

Ayat tersebut menggambarkan Nabi Sulaiman *'alaihissalam* sebagai pemimpin yang dikaruniai Allah dengan ilmu dan kebijaksanaan luar biasa. Ayat tersebut menyebutkan bahwa Allah memberikan pemahaman mendalam kepada Nabi Daud *'alaihissalam* dan Sulaiman *'alaihissalam*, termasuk kemampuan memimpin rakyat dengan adil dan bijak. Kajian oleh Mizwar, Syabuddin, dan Syahminan menjelaskan bahwa ilmu dalam konteks Sulaiman bukan hanya pengetahuan rasional, melainkan juga kesadaran spiritual yang melahirkan kepemimpinan etis dan berorientasi pada kemaslahatan publik.[341] Dengan demikian, komunikasi otoritatif Nabi Sulaiman *'alaihissalam* berakar pada pengetahuan yang mendalam dan keimanan yang kuat.

QS. An-Naml [27]:18–19 mengisahkan dialog Nabi Sulaiman *'alaihissalam* dengan bangsa semut yang menunjukkan kecerdasan emosional dan empati dalam kepemimpinan. Tafsir Al-Munir karya Wahbah Zuhayli menekankan bahwa interaksi ini bukan hanya simbol kebijaksanaan, tetapi juga penghormatan terhadap makhluk Allah sekecil apa pun. Simangunsong dan Misnawati menafsirkan kisah ini sebagai contoh kepemimpinan yang berkeadilan, di mana komunikasi antara pemimpin dan rakyat berlangsung dalam semangat kasih sayang dan penghargaan.[342] Nabi Sulaiman *'alaihissalam* menampilkan model komunikasi empati yang menjadikan kekuasaan sebagai sarana pengayoman, bukan penindasan.

QS. An-Naml [27]:20–28 menceritakan dialog Nabi Sulaiman *'alaihissalam* dengan burung Hudhud yang membawa kabar tentang Ratu Bilqis. Kisah ini memperlihatkan keterbukaan Nabi Sulaiman *'alaihissalam* terhadap informasi dan musyawarah, yang menunjukkan sifat komunikatif seorang pemimpin sejati. Penelitian oleh Tohir mengungkapkan bahwa Sulaiman memperlihatkan kemampuan komunikasi yang demokratis dengan mendengarkan bawahannya, sekaligus menunjukkan ketegasan dalam

[341] Edi Mizwar, Syabuddin And Syahminan. "Konsepsi Ilmu Dalam Kisah Nabi Sulaiman Dalam Al Qur'an." *Jurnal Tarbiyah Almuslim*, 2024.

[342] Ali Abdurahman Simangunsong And Misnawati Misnawati. "Exploring The Wisdom Of Prophet Sulaiman's Story And The Hoopoe Through The Lens Of Wahbah Zuhayli In Al-Tafsir Al-Munir." *Tafse: Journal Of Qur'anic Studies*, 2024.

penegakan disiplin.[343] Pemimpin yang demikian mampu menyeimbangkan kekuasaan dengan hikmah dan keadilan dalam relasinya dengan rakyat.

QS. An-Naml [27]:29–31 menampilkan surat Nabi Sulaiman *'alaihissalam* kepada Ratu Bilqis sebagai bentuk diplomasi dan komunikasi lintas budaya. Sulaiman *'alaihissalam* menggunakan bahasa yang santun namun tegas, menekankan ketauhidan tanpa menindas lawan. Kajian hermeneutik oleh Alhazemi menunjukkan bahwa Nabi Sulaiman *'alaihissalam* adalah sosok pemimpin yang bijaksana, visioner, dan memiliki kemampuan negosiasi tinggi yang memperkuat keadilan dan perdamaian antar bangsa.[344] Diplomasi ini mencerminkan nilai universal dalam komunikasi otoritatif yang berpijak pada keadilan dan penghormatan.

QS. An-Naml [27]:32–35 menggambarkan musyawarah Ratu Bilqis dengan para pembesarnya sebelum menanggapi surat Sulaiman *'alaihissalam*. Respons Sulaiman terhadap keputusan tersebut menunjukkan kepemimpinan yang sabar dan inklusif. Moidin et al. dalam penelitiannya tentang konsep *hadiyya* (hadiah) menjelaskan bahwa Sulaiman *'alaihissalam* menolak hadiah dari Bilqis bukan karena kesombongan, tetapi sebagai bentuk integritas kepemimpinan yang menolak suap dan korupsi.[345] Hal ini memperlihatkan moralitas tinggi dalam komunikasi kekuasaan, di mana keadilan tidak dapat dibeli oleh materi.

QS. An-Naml [27]:36–37 menggambarkan tanggapan tegas Nabi Sulaiman *'alaihissalam* terhadap tawaran diplomatik Ratu Bilqis. Ketegasan itu bukan bentuk kesombongan, melainkan ekspresi kedaulatan dan prinsip moral. Attarwiyah et al. (2024) meneliti bahwa dalam tafsir klasik Ibn Juzay, Sulaiman tetap menjaga keseimbangan antara otoritas dan kebijaksanaan, menolak narasi *israiliyyat* yang menggambarkannya berlebihan.[346] Pemimpin yang adil, dalam konteks ini, adalah yang mampu menjaga kehormatan kekuasaan tanpa kehilangan nilai kemanusiaan.

QS. An-Naml [27]:38–40 mengisahkan kemampuan Sulaiman mengendalikan pasukan manusia, jin, dan burung untuk membawa singgasana

---

[343] Sya'roni Tohir. "Communication Of Da'wah Between The Leaders And Their Understanding In The Qur'an Surat An-Naml." *Jurnal Da'wah: Risalah Merintis, Da'wah Melanjutkan*, 2022.

[344] A. Alhazemi. "An Analytical Research Of Prophet King Solomon's Leadership Qualities, Decisiveness, And Sagacity." *The International Journal Of Humanities & Social Studies*, 2020.

[345] Shofiyyah Moidin, Siti Sarah Binti Izham, Amiratul Munirah Yahaya, Mohd Asmadi Yakob, Murihah Abdullah And Wan Muhamad Syahmi Naqiuddin. "The Parameter Of Hadiyya Through Prophet Solomon's Perspective From Surah An-Naml." *International Journal Of Academic Research In Business And Social Sciences*, 2023.

[346] Syarifuddin Syarifuddin. "Transforming Personal Selling Through Qur'anic Ethical Principles In Marketing Communication." *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2025.

Bilqis. Tafsir kontekstual melihat hal ini sebagai simbol penguasaan terhadap potensi sosial dan spiritual umat. Zakiyah menilai bahwa Sulaiman menjalankan kepemimpinannya berdasarkan *maqasid syariah*, yakni kemaslahatan dan keadilan ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan publik.[347] Penguasaan otoritas ini bukanlah dominasi, tetapi representasi dari kemampuan manajerial yang berpijak pada keseimbangan spiritual dan sosial.

QS. An-Naml [27]:42–44 menceritakan momen ketika Ratu Bilqis akhirnya mengakui kebesaran Allah setelah berdialog dengan Sulaiman *'alaihissalam*. Rosyidi et al. menafsirkan peristiwa ini sebagai bentuk keberhasilan komunikasi otoritatif yang berkeadilan, di mana kekuasaan digunakan untuk mengajak kepada tauhid tanpa pemaksaan.[348] Perubahan hati Bilqis menunjukkan keberhasilan strategi komunikasi spiritual yang lembut namun berprinsip.

QS. Shad [38]:30–40 menggambarkan Nabi Sulaiman *'alaihissalam* sebagai pemimpin yang kaya namun tetap bersyukur kepada Allah. Dalam konteks ini, Sarnoto (2024) menjelaskan bahwa Sulaiman *'alaihissalam* adalah simbol pemimpin ideal yang menyeimbangkan kekuasaan duniawi dengan spiritualitas tinggi.[349] Kepemimpinan yang adil dan komunikatif menuntut kesadaran bahwa segala kekuasaan berasal dari Allah, bukan hasil kemampuan manusia semata.

Nabi Sulaiman *'alaihissalam* tampil sebagai figur pemimpin Qur'ani yang menggabungkan otoritas, kebijaksanaan, empati, dan keadilan sosial. Ia memimpin dengan ilmu dan komunikasi yang menenangkan, membangun tatanan sosial yang damai dan beradab. Haqiqi dan Hakim menyatakan bahwa manusia ideal dalam perspektif Qur'an seperti yang dicontohkan Sulaiman adalah mereka yang mampu mengelola kekuasaan dengan keadilan dan tanggung jawab moral.[350] Kepemimpinan Sulaiman menegaskan bahwa komunikasi otoritatif sejati bukan tentang dominasi, tetapi tentang mengarahkan rakyat menuju nilai-nilai ilahi.

---

[347] Ermita Zakiyah. "Maudhui's Tafsir Method In The Qur'an And Hadith On Maqasid Syariah For Economic Welfare In Indonesia." *Journal Of Islamic Economics And Philanthropy*, 2022.

[348] Moh Alfin Rosyidi, Khobirul Amru And Wildah Nurul Islami. "Discourse On Women's Leadership In The Qur'an From The Perspective Of Kh. Ahmad Bahauddin Nursalim On Youtube Channel." *Bulletin Of Indonesian Islamic Studies*, 2025

[349] A. Sarnoto. "Exploring Leadership Theory In The Qur'an." *International Journal Of Sustainable Social Science (Ijsss)*, 2024.

[350] M.Rama Haqiqi Haqiqi And Syamsul Hakim. "Human In The Qur'an, Tafsir Maudu'i." *Jurnal Kajian Islam* 2025.

2. Kepemimpinan Perempuan – Kepemimpinan Konsultatif

Kepemimpinan perempuan dalam al-Quran terdapat dalam QS. An-Naml [27]:23–24 Allah SWT menggambarkan Ratu Bilqis sebagai sosok pemimpin yang bijaksana, demokratis, dan strategis.

اِنِّيْ وَجَدْتُّ امْرَاَةً تَمْلِكُهُمْ وَاُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَّلَهَا عَرْشٌ عَظِيْمٌ وَجَدْتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُوْنَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُوْنَۙ

"Sesungguhnya aku mendapati ada seorang perempuan yang memerintah mereka (penduduk negeri Saba'). Dia dianugerahi segala sesuatu dan memiliki singgasana yang besar. Aku (burung Hudhud) mendapati dia dan kaumnya sedang menyembah matahari, bukan Allah. Setan telah menghiasi perbuatan-perbuatan (buruk itu agar terasa indah) bagi mereka sehingga menghalanginya dari jalan (Allah). Mereka tidak mendapat petunjuk."

Ia disebut sebagai pemimpin negeri Saba' yang memiliki singgasana megah dan rakyat yang taat. Tafsir tematik menjelaskan bahwa Bilqis adalah contoh kepemimpinan perempuan yang berbasis pada musyawarah dan kebijaksanaan kolektif. Fitria dan Nugroho dalam penelitiannya menyebutkan, kisah ini sebagai bukti bahwa Islam tidak menolak kepemimpinan perempuan selama mereka mampu bertanggung jawab dan adil.[351] Kisah Bilqis menunjukkan bahwa komunikasi politik yang berkeadilan menjadi landasan utama dalam relasi antara pemimpin dan rakyat. Abbas dan Rawabdeh mengkaji bahwa kemampuan Bilqis dalam mengelola situasi krisis politik mencerminkan keterampilan perempuan dalam pengambilan keputusan berbasis rasionalitas dan empati.[352] Ia menunjukkan model kepemimpinan yang mampu menenangkan ketegangan sosial tanpa kekerasan, menjadikannya simbol pemimpin Qur'ani yang adil dan cerdas.

Kepemimpinan Ratu Bilqis juga menampilkan kemampuan diplomatik dan manajemen krisis yang luar biasa. QS. An-Naml [27]:32–35 menggambarkan bagaimana ia bermusyawarah dengan para menterinya sebelum menanggapi surat Nabi Sulaiman.

قَالَتْ يٰٓاَيُّهَا الْمَلَؤُا اَفْتُوْنِيْ فِيْٓ اَمْرِيْۚ مَا كُنْتُ قَاطِعَةً اَمْرًا حَتّٰى تَشْهَدُوْنِ قَالُوْا نَحْنُ اُولُوْا قُوَّةٍ وَّاُولُوْا بَأْسٍ شَدِيْدٍۙ وَّالْاَمْرُ اِلَيْكِ فَانْظُرِيْ مَاذَا تَأْمُرِيْنَ قَالَتْ اِنَّ الْمُلُوْكَ اِذَا دَخَلُوْا قَرْيَةً اَفْسَدُوْهَا وَجَعَلُوْٓا اَعِزَّةَ اَهْلِهَآ اَذِلَّةًۚ وَكَذٰلِكَ يَفْعَلُوْنَ وَاِنِّيْ مُرْسِلَةٌ اِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنٰظِرَةٌۢ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُوْنَ

[351] Salwa Aida Fitria And Kharis Nugroho. "Equality Of Rights And Obligations: The Role And Position Of Women In Politics (Study Of The Interpretation Of Surah An Naml Verses 23-23)." *Proceeding Iseth (International Summit On Science, Technology, And Humanity)*, 2025.

[352] Sanaa F. Abbas And Maisaa Ali Rawabdeh. "Female Competencies From The Narratives Of The Qur'an: Queen Of Sheba's Crisis Management Style As A Leadership Model." *Qijis (Qudus International Journal Of Islamic Studies)*, 2022.

"Dia (Balqis) berkata, "Wahai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam urusanku (ini). Aku tidak pernah memutuskan suatu urusan sebelum kamu hadir (dalam majelisku)."Mereka menjawab, "Kita memiliki kekuatan dan ketangkasan yang luar biasa (untuk berperang), tetapi keputusan berada di tanganmu. Maka, pertimbangkanlah apa yang akan engkau perintahkan." Dia (Balqis) berkata, "Sesungguhnya raja-raja apabila menaklukkan suatu negeri, mereka tentu membinasakannya dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina. Demikianlah yang mereka akan perbuat. Sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan (membawa) hadiah dan (aku) akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh para utusan itu."

Bilqis dikenal sebagai pemimpin yang menghargai pendapat bawahannya. Ayat tersebut menjadi bukti kuat bahwa Bilqis mengutamakan sistem pemerintahan partisipatif. Rizki, Johan, dan Nur menilai bahwa prinsip musyawarah Bilqis menandakan kematangan politik dan komitmen terhadap kedamaian.[353] Kepemimpinannya menjadi teladan bahwa kekuasaan yang berkeadilan harus dilandasi komunikasi terbuka dan partisipasi kolektif.

Sikap bijak Bilqis ketika menolak perang dan memilih diplomasi mencerminkan kepemimpinan yang damai. QS. An-Naml [27]:34 mencatat pernyataannya bahwa raja-raja yang berperang cenderung menghancurkan negeri dan menindas penduduknya. Ragab Selim Ali menafsirkan keputusan Bilqis sebagai bentuk kebijaksanaan strategis yang menghindari kehancuran dan menjaga rakyatnya dari penderitaan.[354] Dengan demikian, komunikasi Bilqis dengan para menterinya menggambarkan model pemerintahan yang berlandaskan pada etika perdamaian dan kebijaksanaan moral.

QS. An-Naml [27]:35 menunjukkan kecerdikan Bilqis dalam menguji niat Sulaiman melalui pengiriman hadiah. Tindakan ini bukan bentuk kesombongan, melainkan strategi diplomatik untuk menilai karakter pemimpin lain sebelum mengambil keputusan besar. Ahmad Syamsul Muarif dan Hamzan Wadi menyebut strategi Bilqis sebagai *"diplomatic counseling"*, yakni seni komunikasi dan negosiasi yang mengedepankan kebijaksanaan dan empati.[355] Pendekatan ini menunjukkan bahwa kepemimpinan sejati tidak mengandalkan kekuatan militer, melainkan kemampuan memahami emosi dan motif lawan bicara.

---

[353] Ahmad Fadhil Rizki, S. M. Johan And Afrizal Nur. "Menguak Nilai-Nilai Kedamaian Dalam Musyawarah (Telaah Terhadap Kisah Politik Ratu Balqis Didalam Tafsir Al-Munir Wahbah Al-Zuhaili)." , 19, 2020.

[354] Ragab Selim Ali. "The Tactful Wisdom Of Queen Of Sheba: An Analytical Study." *Education Journal*, 2020.

[355] Ahmad Syamsul Muarif And Hamzan Wadi. "The Art Of Diplomatic Counseling: Counseling Values In The Story Of Prophet Sulaiman And Queen Balqis." *Jurnal At-Taujih*, 2025.

QS. An-Naml [27]:36–37 menggambarkan respons Nabi Sulaiman *'alaihissalam* terhadap hadiah tersebut, yang menegaskan bahwa Sulaiman menolak imbalan materi. Tohir menjelaskan bahwa peristiwa ini memperlihatkan adanya dialog etis antara dua pemimpin yang sama-sama berpegang pada integritas moral.[356] Dari interaksi ini, Bilqis belajar bahwa kekuasaan spiritual lebih tinggi nilainya daripada kekuasaan material, sebuah pelajaran komunikasi politik yang penuh hikmah dan ketulusan.

Perubahan spiritual Bilqis tercermin dalam QS. An-Naml [27]:42–44 ketika ia menyadari kebesaran Allah dan beriman setelah berdialog dengan Nabi Sulaiman *'alaihissalam*. Rosyidi, Amru, dan Islami menilai bahwa proses ini adalah puncak dari komunikasi spiritual yang setara antara dua pemimpin, tanpa dominasi gender.[357] Kisah ini menunjukkan bahwa Bilqis bukan hanya sosok pemimpin politik, tetapi juga figur spiritual yang terbuka terhadap kebenaran ilahi.

Dari sisi teologis, kepemimpinan Bilqis menunjukkan integrasi antara akal, iman, dan moralitas. Fathiyaturrahmah, Wibowo, dan Zaghloul menegaskan bahwa Al-Qur'an menampilkan sosok Bilqis secara positif sebagai bukti legitimasi kepemimpinan perempuan yang berlandaskan nilai-nilai ilahiah.[358] Narasi ini mengoreksi pandangan klasik yang cenderung menafsirkan kepemimpinan perempuan secara negatif, dan membuka ruang bagi tafsir progresif terhadap ayat-ayat sosial politik.

Ratu Bilqis dalam perspektif tafsir Al-Munir karya Wahbah al-Zuhaili ditampilkan sebagai sosok pemimpin yang mengedepankan kedamaian. Rizki, Johan, dan Nur menyebut bahwa prinsip musyawarah Bilqis mencerminkan kesadaran bahwa kekuasaan sejati harus digunakan untuk kemaslahatan rakyat, bukan ambisi pribadi.[359] Kepemimpinan yang demikian memperlihatkan sinergi antara otoritas politik dan nilai spiritualitas yang meneguhkan prinsip rahmatan lil 'alamin.

Kisah Ratu Bilqis dan para menterinya dalam QS. An-Naml menjadi cerminan relasi sosial dan politik yang ideal antara pemimpin dan rakyat. Ia memimpin dengan kebijaksanaan, komunikasi dialogis, dan keadilan sosial

---

[356] Sya'roni Tohir. "Communication Of Da'wah Between The Leaders And Their Understanding In The Qur'an Surat An-Naml." *Jurnal Da'wah: Risalah Merintis, Da'wah Melanjutkan*, 2022.

[357] Moh Alfin Rosyidi, Khobirul Amru And Wildah Nurul Islami. "Discourse On Women's Leadership In The Qur'an From The Perspective Of Kh. Ahmad Bahauddin Nursalim On Youtube Channel." *Bulletin Of Indonesian Islamic Studies*, 2025.

[358] Fathiyaturrahmah Fathiyaturrahmah, Safrudin Edi Wibowo And Taha Ramadan Ibrahim Zaghloul. "Representation Of Woman Leader In The Qur'an (Power-Knowledge Relations In The Discourse On Surah An-Naml 20-44)." *Jurnal Ushuluddin*, 2024.

[359] Ahmad Fadhil Rizki, S. M. Johan And Afrizal Nur. "Menguak Nilai-Nilai Kedamaian Dalam Musyawarah (Telaah Terhadap Kisah Politik Ratu Balqis Didalam Tafsir Al-Munir Wahbah Al-Zuhaili)." , 19, 2020.

yang berpijak pada moralitas ilahi. Huriyah et al menegaskan bahwa kepemimpinan Bilqis meneguhkan prinsip kesetaraan gender dan hak partisipatif perempuan dalam ruang publik Islam.[360] Dengan demikian, kisah ini mengajarkan bahwa kekuasaan yang adil lahir dari komunikasi yang terbuka, spiritualitas yang luhur, dan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan.

3. Kisah Pemimpin zalim

Al-Qur'an menggambarkan bahwa kezaliman kepemimpinan sering kali berakar pada kesombongan kekuasaan, dominasi ekonomi, atau ambisi politik yang berlebihan. Kondisi ini mendorong para pemimpin tersebut menggunakan komunikasi sebagai alat dominasi, propaganda, dan legitimasi kekuasaan. Dalam banyak ayat, Al-Qur'an memperlihatkan bagaimana para pemimpin zalim tidak hanya menindas secara fisik, tetapi juga mengendalikan wacana sosial dengan cara memutarbalikkan kebenaran, merendahkan para nabi, serta memanipulasi opini masyarakat.

Kisah-kisah pemimpin zalim dalam Al-Qur'an juga menunjukkan bahwa kegagalan kepemimpinan sering kali dimulai dari kegagalan komunikasi moral. Ketika seorang pemimpin kehilangan kesadaran spiritual dan tidak lagi mendengarkan nasihat, maka komunikasi antara pemimpin dan rakyat berubah menjadi hubungan dominasi yang menindas. Dalam kondisi seperti ini, kekuasaan tidak lagi dipandang sebagai amanah, tetapi sebagai sarana untuk mempertahankan kepentingan pribadi atau kelompok. Berikut diantaranya :

a. Fir'aun – Komunikasi Propaganda kekuasaan

Kisah Fir'aun dalam Al-Qur'an merupakan salah satu narasi paling kuat yang menggambarkan pola kepemimpinan tirani dan kegagalan komunikasi moral dalam sejarah umat manusia. Fir'aun tidak hanya digambarkan sebagai penguasa yang menindas secara politik, tetapi juga sebagai figur yang memanipulasi komunikasi publik untuk mempertahankan legitimasi kekuasaan. Dalam banyak ayat, Al-Qur'an memperlihatkan bagaimana Fir'aun menggunakan bahasa retoris, propaganda, dan ancaman untuk mengontrol masyarakat Mesir.[361] Kisah ini menunjukkan bahwa kezaliman kepemimpinan sering kali bermula dari kegagalan komunikasi etis antara pemimpin dan rakyat.

---

[360] Lilik Huriyah, Yeni Endiana, Yuni Setya Ningsih, Lum'atul Hajar And Afra Nafisah. "Gender Equality In Women's Leadership Through The Perspective Of The Qur'an And Sayyidah Aisyah Radhiyallahu'anha." *An-Nisa Jurnal Kajian Perempuan Dan Keislaman*, 2023.

[361] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2017, hal. 312

Al-Qur'an menggambarkan Fir'aun sebagai penguasa yang menempatkan dirinya sebagai otoritas tertinggi di hadapan masyarakat. Dalam QS. Al-Qashash [28]:38 disebutkan:

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرِي

"Fir'aun berkata: Wahai para pembesar, aku tidak mengetahui ada Tuhan bagimu selain aku."

Ayat ini menunjukkan bentuk komunikasi kekuasaan yang absolut, di mana pemimpin memonopoli kebenaran dan meniadakan ruang kritik dalam masyarakat. Dalam kajian tafsir, klaim ini dipahami sebagai bentuk propaganda politik yang bertujuan membangun loyalitas mutlak rakyat kepada penguasa.[362]

Fir'aun juga menggunakan strategi komunikasi elit dengan memanfaatkan para pembesar istana sebagai alat legitimasi kekuasaan. Ia sering memanggil para pemuka masyarakat sebelum menyampaikan pernyataan politik kepada rakyat. Pola komunikasi ini menunjukkan adanya struktur komunikasi hierarkis yang bertujuan mengontrol opini publik melalui kelompok elit. Dalam perspektif komunikasi politik, praktik ini dikenal sebagai komunikasi oligarkis yang menempatkan elite sebagai perantara kekuasaan.[363]

Al-Qur'an juga menggambarkan bahwa Fir'aun membangun legitimasi kekuasaannya melalui propaganda simbolik. Ia menampilkan dirinya sebagai pemilik kekuasaan ekonomi dan politik Mesir. Dalam QS. Az-Zukhruf [43]:51 Fir'aun berkata bahwa kerajaan Mesir dan sungai-sungainya berada di bawah kekuasaannya.[364] Pernyataan ini menunjukkan bagaimana pemimpin zalim menggunakan simbol kekuasaan untuk membangun citra superioritas di hadapan rakyat.

Selain propaganda, Fir'aun juga menggunakan komunikasi intimidatif untuk mempertahankan kekuasaannya. Ia menindas Bani Israil dan membunuh anak-anak laki-laki mereka sebagai bentuk kontrol sosial. Dalam QS. Al-Qashash [28]:4 dijelaskan bahwa Fir'aun melakukan penindasan sistematis terhadap kelompok tertentu.[365] Dalam perspektif komunikasi kekuasaan, tindakan ini menunjukkan bahwa tirani sering kali menggunakan kekerasan sebagai sarana untuk membungkam suara kritis masyarakat..

Konflik komunikasi antara Fir'aun dan Nabi Musa *'alaihissalam* menjadi salah satu dialog politik paling penting dalam Al-Qur'an. Musa datang

---

[362] Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 2001, hal. 410

[363] Denis McQuail, *Mass Communication Theory*, London: Sage Publications, 2010, hal. 286.

[364] Mannā' Khalīl al-Qaṭṭān, *Mabāḥith fī 'Ulūm al-Qur'ān*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 2000, hal. 377.

[365] Sayyid Qutb, *Fī Ẓilāl al-Qur'ān*, Kairo: Dar al-Syuruq, 2003, hal. 2857

membawa pesan tauhid dan keadilan sosial, sedangkan Fir‘aun mempertahankan kekuasaan dengan berbagai bentuk manipulasi wacana. Al-Qur’an menggambarkan dialog ini sebagai pertarungan antara kebenaran moral dan kekuasaan tirani.[366]

Dalam QS. Thaha [20]:44 Allah memerintahkan Musa dan Harun untuk berbicara kepada Fir‘aun dengan kata-kata yang lembut:

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ

“Berbicaralah kepadanya dengan kata-kata yang lembut agar ia ingat atau takut.”

Ayat ini menunjukkan bahwa komunikasi profetik selalu mengedepankan etika dan kelembutan, bahkan ketika menghadapi pemimpin zalim.[367] Prinsip ini menunjukkan perbedaan fundamental antara komunikasi profetik dan komunikasi tirani..

Fir‘aun merespons pesan Musa *‘alaihissalam* dengan strategi delegitimasi. Ia menuduh Musa *‘alaihissalam* sebagai penyihir dan pembohong di hadapan rakyat. Strategi ini bertujuan merusak kredibilitas lawan politik agar masyarakat tidak mempercayai pesan yang disampaikan. Dalam teori komunikasi politik modern, strategi ini dikenal sebagai propaganda diskreditasi.[368]

Fir‘aun juga berusaha memobilisasi opini publik melalui retorika populis. Dalam QS. Al-Mu’min [40]:29 ia berbicara kepada rakyat Mesir untuk mempertahankan kekuasaannya dan menakut-nakuti mereka terhadap kemungkinan perubahan sosial yang dibawa Musa *‘alaihissalam*. Retorika ini menunjukkan bagaimana pemimpin tirani memanfaatkan ketakutan kolektif masyarakat untuk mempertahankan *status quo*.[369]

Al-Qur’an juga menunjukkan bahwa komunikasi Fir‘aun bersifat manipulatif terhadap realitas. Ia mencoba membangun narasi bahwa Musa *‘alaihissalam* ingin merusak stabilitas negara. Tuduhan ini merupakan contoh klasik dari *framing* politik, yaitu mengubah persepsi publik terhadap suatu peristiwa melalui narasi tertentu.[370]

Meskipun demikian, sebagian elite Mesir mulai meragukan klaim Fir‘aun. Dalam QS. Ghafir [40]:28 disebutkan adanya seorang mukmin dari

---

[366] M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an*, Jakarta: Lentera Hati, 2007, hal. 221

[367] Abdul Karim Zaidan, *Usul al-Da‘wah*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1996, hal. 198

[368] Gary Yukl, *Leadership in Organizations*, New Jersey: Pearson Education, 2013, hal. 302

[369] Joseph S. Nye, *The Powers to Lead*, New York: Oxford University Press, 2008, hal. 97.

[370] Stephen W. Littlejohn dan Karen A. Foss, *Theories of Human Communication*, Illinois: Waveland Press, 2009, hal. 271

keluarga Fir‘aun yang secara diam-diam membela Musa *‘alaihissalam*.[371] Ayat ini menunjukkan bahwa propaganda kekuasaan tidak selalu berhasil sepenuhnya, karena dalam masyarakat selalu ada individu yang mampu melihat kebenaran di balik narasi politik penguasa.

Kisah Fir‘aun juga memperlihatkan bahwa pemimpin tirani cenderung menolak dialog rasional. Ketika Musa *‘alaihissalam* menunjukkan mukjizat, Fir‘aun tetap menolaknya dan justru meningkatkan tekanan terhadap Bani Israil. Penolakan ini menggambarkan bagaimana kekuasaan yang absolut sering kali menutup ruang komunikasi yang sehat dalam masyarakat.[372]

Dalam banyak tafsir, sikap Fir‘aun dipahami sebagai simbol kesombongan epistemik, yaitu sikap menolak kebenaran meskipun bukti telah jelas. Kesombongan ini membuat Fir‘aun kehilangan legitimasi moral sebagai pemimpin. Dalam perspektif Qur’ani, kepemimpinan yang kehilangan legitimasi moral pada akhirnya akan menuju kehancuran.[373]

Akhir kisah Fir‘aun menunjukkan konsekuensi dari kepemimpinan yang zalim. Ketika Musa *‘alaihissalam* memimpin Bani Israil keluar dari Mesir, Fir‘aun mengejar mereka hingga akhirnya tenggelam di Laut Merah. Peristiwa ini menjadi simbol kehancuran kekuasaan tirani yang dibangun di atas kesombongan dan manipulasi komunikasi.[374]

Al-Qur’an menegaskan bahwa kisah Fir‘aun bukan sekadar sejarah, tetapi pelajaran bagi umat manusia. Firman Allah dalam QS. Yunus [10]:92 menyatakan bahwa tubuh Fir‘aun diselamatkan agar menjadi pelajaran bagi generasi setelahnya. Ayat ini menunjukkan bahwa kezaliman kekuasaan dan manipulasi komunikasi akan selalu berakhir dengan kehancuran.[375]

Dengan demikian, kisah Fir‘aun dalam Al-Qur’an menggambarkan tipologi pemimpin zalim yang memanfaatkan komunikasi sebagai alat dominasi. Fir‘aun menggunakan propaganda, manipulasi informasi, dan intimidasi untuk mempertahankan kekuasaan. Sebaliknya, Nabi Musa *‘alaihissalam* menunjukkan model komunikasi profetik yang mengedepankan kebenaran, keadilan, dan dialog moral. Kontras antara keduanya menunjukkan bahwa komunikasi kepemimpinan yang etis merupakan fondasi penting bagi terciptanya masyarakat yang adil dan bermartabat.[376]

---

[371] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2017, hal. 417

[372] Fikra Awla dan Akhmad Rifai, *Political Communication in the Quranic Perspective*, Palakka: Media and Islamic Communication, 2025, hal. 145

[373] Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 2001, hal. 433

[374] Sayyid Qutb, *Fī Ẓilāl al-Qur’ān*, Kairo: Dar al-Syuruq, 2003, hal. 2891.

[375] Mannā’ Khalīl al-Qaṭṭān, *Mabāḥith fī ‘Ulūm al-Qur’ān*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 2000, hal. 381

[376] Denis McQuail, *Mass Communication Theory*, London: Sage Publications, 2010, hal. 298.

b. Namrud – Komunikasi Retorika Manipulatif

Kisah Namrud dalam Al-Qur'an menggambarkan salah satu bentuk kepemimpinan zalim yang lahir dari kesombongan kekuasaan dan kegagalan komunikasi moral antara pemimpin dan masyarakat. Namrud dikenal sebagai raja yang menentang dakwah Nabi Ibrahim *'alaihissalam* dan menolak ajaran tauhid yang dibawa oleh beliau. Dalam narasi Qur'ani, dialog antara Nabi Ibrahim *'alaihissalam* dan Namrud menunjukkan pertentangan antara komunikasi profetik yang berbasis kebenaran dengan komunikasi kekuasaan yang bersifat manipulatif dan penuh kesombongan.[377]

Perdebatan antara Nabi Ibrahim *'alaihissalam* dan Namrud dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah [2]:258 yang menyebutkan bagaimana seorang penguasa mendebat Ibrahim tentang Tuhan karena ia merasa memiliki kekuasaan. Ayat tersebut menegaskan bahwa kekuasaan sering kali menimbulkan kesombongan yang membuat seorang pemimpin merasa memiliki otoritas absolut atas kebenaran. Dalam tafsir klasik dijelaskan bahwa kekuasaan yang tidak disertai dengan kesadaran spiritual dapat menjerumuskan pemimpin pada sikap otoriter.[378]

Dalam dialog tersebut Nabi Ibrahim menyampaikan bahwa Allah adalah Tuhan yang memberi hidup dan mematikan. Namun Namrud merespons dengan retorika manipulatif dengan mengatakan bahwa ia juga dapat memberi hidup dan mematikan. Ia kemudian membebaskan seorang tahanan dan membunuh yang lain sebagai upaya menunjukkan kekuasaannya. Sikap ini menunjukkan bagaimana seorang pemimpin zalim dapat memanipulasi makna konsep teologis untuk mempertahankan legitimasi kekuasaan di hadapan masyarakat.[379]

Strategi komunikasi Namrud tersebut menunjukkan bentuk distorsi makna dalam komunikasi politik. Ia mengubah makna konsep "memberi hidup dan mematikan" dari konteks teologis menjadi tindakan administratif yang dapat dilakukan oleh penguasa. Dalam kajian komunikasi politik, manipulasi makna seperti ini sering digunakan oleh penguasa otoriter untuk membingungkan masyarakat dan mempertahankan legitimasi kekuasaan.[380]

Melihat manipulasi tersebut, Nabi Ibrahim kemudian menggunakan pendekatan argumentatif yang lebih rasional. Ia menyatakan bahwa Allah menerbitkan matahari dari timur, sehingga Namrud diminta untuk menerbitkannya dari barat. Al-Qur'an menjelaskan bahwa Namrud tidak

---

[377] Muhammad Husain Haikal, *Hayat Ibrahim al-Khalil*, Kairo: Dar al-Ma'arif, 2003, hal. 112

[378] Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999, hal. 684

[379] Fakhruddin al-Razi, *Mafatih al-Ghaib*, Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi, 2000, hal. 34.

[380] Anwar Arifin, *Komunikasi Politik*, Jakarta: Balai Pustaka, 2011, hal. 143.

mampu menjawab tantangan tersebut dan akhirnya terdiam.[381] Dialog ini menunjukkan kekuatan komunikasi rasional dalam menghadapi manipulasi kekuasaan.

Peristiwa ini memperlihatkan bahwa komunikasi profetik memiliki keunggulan karena berlandaskan pada kebenaran moral dan rasionalitas. Nabi Ibrahim tidak menggunakan kekerasan dalam menghadapi kekuasaan tirani, tetapi menggunakan argumentasi logis yang mampu membongkar kelemahan logika penguasa.[382] Pendekatan ini menunjukkan bahwa komunikasi yang berbasis hikmah dan rasionalitas merupakan strategi efektif dalam menghadapi kepemimpinan yang zalim..

Kisah Namrud juga menunjukkan bagaimana kekuasaan dapat menciptakan struktur sosial yang menempatkan penguasa sebagai sumber kebenaran tunggal. Dalam masyarakat seperti ini, rakyat sering kali menjadi pasif dan tidak berani mengkritik pemimpin. Situasi tersebut menggambarkan bagaimana komunikasi politik yang otoriter dapat menutup ruang dialog dan partisipasi masyarakat.[383]

Dalam perspektif tafsir tematik, kisah Namrud juga dipahami sebagai simbol kesombongan epistemik, yaitu sikap menolak kebenaran meskipun bukti telah jelas. Kesombongan seperti ini sering muncul pada pemimpin yang terlalu lama memegang kekuasaan sehingga merasa tidak membutuhkan pandangan dari pihak lain.[384] Kondisi ini menyebabkan pemimpin kehilangan kemampuan untuk menerima kritik dan nasihat..

Selain itu, kisah ini menunjukkan pentingnya kecerdasan komunikasi dalam menghadapi kekuasaan tirani. Nabi Ibrahim *'alaihissalam* mampu memilih argumen yang tepat untuk membongkar kelemahan logika Namrud. Strategi komunikasi seperti ini menunjukkan bahwa keberhasilan dakwah tidak hanya bergantung pada kebenaran pesan, tetapi juga pada kemampuan menyampaikannya secara efektif.[385]

Dialog antara Nabi Ibrahim *'alaihissalam* dan Namrud juga menjadi contoh komunikasi argumentatif dalam tradisi Islam. Ibrahim *'alaihissalam* menggunakan pendekatan rasional dan teologis untuk menyampaikan pesan tauhid, sementara Namrud menggunakan retorika kekuasaan untuk

---

[381] Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2009, hal. 269.

[382] Yusuf al-Qaradawi, *Min Fiqh al-Daulah fi al-Islam*, Kairo: Dar al-Syuruq, 1997, hal. 121

[383] Hafied Cangara, *Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018, hal. 92.

[384] M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2013, hal. 198

[385] Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktik*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011, hal. 72.

mempertahankan status quo. Perbedaan ini menunjukkan kontras antara komunikasi profetik dan komunikasi kekuasaan yang manipulatif.[386]

Kisah Namrud juga memperlihatkan bahwa kekuasaan tanpa moralitas akan melahirkan kepemimpinan yang zalim. Ketika pemimpin menggunakan komunikasi sebagai alat dominasi, maka masyarakat akan kehilangan kebebasan berpikir dan berbicara.[387] Dalam perspektif Al-Qur'an, kondisi seperti ini merupakan tanda kerusakan sosial yang dapat membawa kehancuran suatu peradaban..

Peristiwa dialog tersebut diakhiri dengan pernyataan Al-Qur'an **فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ** yang berarti bahwa orang kafir itu menjadi terdiam. Ungkapan ini menggambarkan kekalahan moral Namrud di hadapan kebenaran yang disampaikan Nabi Ibrahim *'alaihissalam*.[388] Kekalahan tersebut bukan hanya bersifat intelektual, tetapi juga menunjukkan runtuhnya legitimasi moral seorang penguasa di hadapan kebenaran.

Dalam kajian komunikasi kepemimpinan, kisah ini menunjukkan bahwa kekuasaan yang dibangun di atas propaganda dan manipulasi tidak akan bertahan lama. Ketika masyarakat mulai menyadari ketidakkonsistenan dalam narasi penguasa, legitimasi kekuasaan tersebut akan mulai runtuh.[389] Oleh karena itu, komunikasi yang jujur dan transparan menjadi syarat utama bagi keberlangsungan kepemimpinan..

Kisah Namrud juga memberikan pelajaran penting bahwa seorang pemimpin harus memiliki kerendahan hati dalam menerima kebenaran. Kesombongan kekuasaan dapat menutup hati seseorang sehingga tidak mampu melihat kebenaran yang jelas di hadapannya. Dalam perspektif Al-Qur'an, sikap seperti ini merupakan salah satu sebab utama kehancuran pemimpin zalim.[390]

Dengan demikian, kisah Namrud dalam Al-Qur'an memperlihatkan bagaimana kesombongan kekuasaan dapat merusak etika komunikasi kepemimpinan. Dialog antara Nabi Ibrahim *'alaihissalam* dan Namrud menunjukkan pertarungan antara komunikasi profetik yang berbasis kebenaran dan komunikasi tirani yang berbasis manipulasi. Kisah ini menjadi pelajaran penting bahwa kekuasaan yang tidak disertai dengan moralitas dan

---

[386] Stephen W. Littlejohn dan Karen A. Foss, *Theories of Human Communication*, Illinois: Waveland Press, 2009, hal. 194.

[387] Anthony Giddens, *Sociology*, Cambridge: Polity Press, 2017, hal. 356

[388] Ibnu Katsir, *Qashash al-Anbiya*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004, hal. 88

[389] Joseph S. Nye, *The Powers to Lead*, New York: Oxford University Press, 2008, hal. 61

[390] Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2009, hal. 272

keterbukaan terhadap dialog pada akhirnya akan kehilangan legitimasi di hadapan masyarakat.[391]

c. Pemimpin Kaum Aad – Komunikasi Arogansi Kolektif

Kaum ‘Ād merupakan salah satu peradaban besar yang disebutkan dalam Al-Qur’an sebagai masyarakat yang memiliki kekuatan fisik, teknologi, dan kekuasaan politik yang besar. Namun peradaban tersebut mengalami kehancuran karena kesombongan dan penolakan terhadap pesan moral yang dibawa oleh Nabi Hūd *‘alaihissalam*. Dalam konteks kepemimpinan, kisah kaum ‘Ād menunjukkan bagaimana kekuasaan yang tidak disertai dengan etika komunikasi dapat membawa kehancuran sosial dan spiritual.[392]

Al-Qur’an menyebut kisah kaum ‘Ād dalam QS. Al-A‘raf [7]:65:

وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ۚ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ

“Dan kepada kaum ‘Ād (Kami utus) saudara mereka, Hūd. Ia berkata: Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia.”

Ayat ini menunjukkan bahwa dakwah Nabi Hūd *‘alaihissalam* dimulai dengan pendekatan komunikatif yang bersifat persuasif dan spiritual. Nabi Hūd *‘alaihissalam* menggunakan panggilan “*yā qaumi*” (wahai kaumku) sebagai bentuk komunikasi empati yang menekankan kedekatan sosial antara pemimpin dan masyarakat.[393]

Namun para pemimpin kaum ‘Ād menolak pesan tersebut dan menuduh Nabi Hūd *‘alaihissalam* sebagai orang yang tidak berakal. Hal ini dijelaskan dalam QS. Al-A‘raf [7]:66 ketika para pemuka kaum ‘Ād berkata bahwa mereka melihat Hūd sebagai orang yang bodoh.[394] Penolakan ini menunjukkan bagaimana elite kekuasaan sering menggunakan retorika penghinaan untuk melemahkan kredibilitas pembawa pesan kebenaran.

Dalam perspektif komunikasi politik, strategi tersebut merupakan bentuk delegitimasi komunikator, yaitu upaya merusak reputasi seseorang agar pesan yang disampaikannya tidak dipercaya oleh masyarakat. Para pemimpin kaum ‘Ād menggunakan strategi ini untuk mempertahankan struktur kekuasaan mereka.[395]

Al-Qur’an juga menggambarkan kesombongan kaum ‘Ād dalam QS. Fussilat [41]:15:

مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً

---

[391] Hafied Cangara, *Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018, hal. 95.

[392] M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an*, Jakarta: Lentera Hati, 2007, hal. 317.

[393] Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2009, hal. 88

[394] Fakhruddin al-Razi, *Mafatih al-Ghaib*, Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi, 2000, hal. 142

[395] Anwar Arifin, *Komunikasi Politik*, Jakarta: Balai Pustaka, 2011, hal. 158

"Siapakah yang lebih kuat daripada kami?"

Ungkapan ini menunjukkan bagaimana kekuatan fisik dan teknologi membuat kaum ʻĀd merasa superior dibandingkan bangsa lain. Dalam perspektif sosiologi kekuasaan, kesombongan seperti ini sering muncul dalam masyarakat yang memiliki dominasi militer dan ekonomi.[396]

Selain itu, kaum ʻĀd dikenal sebagai bangsa yang membangun kota-kota megah dengan arsitektur yang luar biasa. Al-Qur'an menyebut kota Iram *dzāt al-ʻImād* dalam QS. Al-Fajr [89]:6–7 sebagai simbol kejayaan peradaban mereka. Namun kemajuan material tersebut tidak diimbangi dengan nilai spiritual dan moral.[397]

Nabi Hud *ʻalaihisalam* terus menyampaikan pesan dakwah dengan pendekatan dialogis. Ia mengingatkan bahwa kekuasaan dan kekayaan yang dimiliki kaum ʻĀd merupakan nikmat dari Allah yang harus disyukuri. Dalam QS. Hud [11]:52, Nabi Hūd *ʻalaihisalam* mengajak mereka untuk memohon ampun kepada Allah agar mendapatkan keberkahan.[398] Pendekatan ini menunjukkan komunikasi moral yang berorientasi pada perubahan sosial.

Namun para pemimpin kaum ʻĀd tetap menolak dakwah Nabi Hūd. Mereka bahkan menantang Nabi Hūd *ʻalaihisalam* untuk mendatangkan azab yang ia ancamkan.[399] Sikap ini menunjukkan bagaimana kesombongan kekuasaan dapat menutup ruang dialog dan refleksi moral.

Dalam konteks komunikasi kepemimpinan, kisah kaum ʻĀd menunjukkan kegagalan elite kekuasaan dalam mendengarkan kritik dan nasihat moral. Ketika pemimpin menolak dialog dan hanya mempertahankan kekuasaan, maka hubungan antara pemimpin dan masyarakat akan mengalami kerusakan.[400]

Al-Qur'an kemudian menggambarkan kehancuran kaum ʻĀd melalui angin topan yang dahsyat sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Haqqah [69]:6–7.

وَاَمَّا عَادٌ فَاُهْلِكُوْا بِرِيْحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍۙ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَّثَمٰنِيَةَ اَيَّامٍۙ حُسُوْمًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيْهَا صَرْعٰىۙ كَاَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ

"Sedangkan (kaum) 'Ad telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin. Dia menimpakan angin itu kepada mereka selama tujuh malam delapan hari terus-menerus. Maka, kamu melihat kaum ('Ad) pada waktu itu

---

[396] Anthony Giddens, *Sociology*, Cambridge: Polity Press, 2017, hal. 49

[397] Seyyed Hossein Nasr, *The Study Quran*, New York: HarperOne, 2015, hal. 1465

[398] Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-ʻAzhim*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999, hal. 420

[399] Sayyid Qutb, *Fi Zilal al-Qur'an*, Kairo: Dar al-Syuruq, 2003, hal. 2065

[400] Gary Yukl, *Leadership in Organizations*, New Jersey: Pearson Education, 2013, hal. 312

mati bergelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah (lapuk) bagian dalamnya."

Bencana tersebut menghancurkan seluruh peradaban mereka sebagai akibat kesombongan dan kezaliman yang mereka lakukan.[401] Peristiwa tersebut menjadi pelajaran bahwa kekuatan fisik dan teknologi tidak dapat menyelamatkan suatu bangsa jika mereka kehilangan nilai moral dan spiritual. Dalam perspektif Al-Qur'an, kehancuran suatu peradaban sering kali dimulai dari kerusakan etika kepemimpinan.[402]

Dalam kajian kepemimpinan, kisah ini mengajarkan bahwa legitimasi kekuasaan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan politik atau ekonomi, tetapi juga oleh integritas moral. Pemimpin yang kehilangan integritas moral akan kehilangan legitimasi sosial di mata masyarakat.[403]

Selain itu, kisah kaum 'Ād juga memperlihatkan bagaimana kesombongan kolektif dapat menghancurkan suatu peradaban. Ketika masyarakat secara bersama-sama menolak kebenaran dan mempertahankan struktur kekuasaan yang tidak adil, maka kehancuran sosial menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan.[404]

Dengan demikian, kisah pemimpin kaum 'Ād dalam Al-Qur'an memberikan pelajaran penting tentang bahaya kesombongan kekuasaan dan kegagalan komunikasi moral. Peradaban yang kuat secara material dapat runtuh ketika pemimpinnya menolak kebenaran dan menutup ruang dialog. Al-Qur'an menjadikan kisah kaum 'Ād sebagai peringatan bagi setiap masyarakat agar menjaga etika kepemimpinan dan komunikasi sosial yang adil serta berlandaskan nilai spiritual.

d. Qarun – Komunikasi Elitisme Sosial

Kisah Qarun dalam Al-Qur'an merupakan salah satu contoh penting tentang kegagalan kepemimpinan yang disebabkan oleh kesombongan kekayaan dan kegagalan komunikasi moral dengan masyarakat. Qarun digambarkan sebagai tokoh dari kaum Nabi Musa *'alaihisalam* yang memperoleh kekayaan luar biasa, tetapi menggunakan kekayaannya untuk menunjukkan kesombongan sosial. Al-Qur'an menampilkan kisah ini sebagai

---

[401] Muhammad Sayyid Tantawi, *Al-Tafsir al-Wasit*, Kairo: Dar Nahdah Misr, 1998, hal. 512

[402] Yusuf al-Qaradawi, *Min Fiqh al-Daulah fi al-Islam*, Kairo: Dar al-Syuruq, 1997, hal. 137.

[403] Peter G. Northouse, *Leadership: Theory and Practice*, California: Sage Publications, 2016, hal. 18

[404] Manuel Castells, *Communication Power*, Oxford: Oxford University Press, 2009, hal. 221

pelajaran tentang bagaimana kekayaan tanpa nilai spiritual dapat melahirkan kepemimpinan yang arogan dan merusak hubungan sosial.[405]

Kisah Qarun disebutkan secara rinci dalam QS. Al-Qashash [28]:76. Allah berfirman:

إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ

"Sesungguhnya Qarun termasuk dari kaum Musa, tetapi ia berlaku zalim terhadap mereka."

Ayat ini menunjukkan bahwa kezaliman Qarun tidak hanya berupa kesombongan pribadi, tetapi juga tindakan sosial yang merugikan masyarakat di sekitarnya. Dalam tafsir dijelaskan bahwa kekayaan Qarun menjadikannya merasa lebih tinggi dari masyarakat sehingga ia kehilangan empati sosial.[406]

Al-Qur'an menggambarkan bahwa kekayaan Qarun sangat besar hingga kunci-kunci perbendaharaannya saja sulit dipikul oleh sekelompok orang kuat. Deskripsi ini menunjukkan bahwa kekayaan Qarun bukan sekadar simbol kemakmuran, tetapi juga simbol kekuasaan ekonomi yang berpotensi mempengaruhi struktur sosial masyarakat. Dalam perspektif sosiologi, kekuasaan ekonomi sering kali menjadi alat dominasi yang mempengaruhi hubungan sosial antara elite dan masyarakat.[407]

Masyarakat kemudian menasihati Qarun agar tidak bersikap sombong dan tetap menggunakan kekayaannya untuk kebaikan. Nasihat ini tercantum dalam QS. Al-Qashash [28]:77 yang mendorong Qarun untuk mencari kebahagiaan akhirat tanpa melupakan kehidupan dunia.[408] Dialog ini menunjukkan bahwa masyarakat sebenarnya berusaha membangun komunikasi moral dengan Qarun agar ia menggunakan kekayaannya secara bijak.

Namun Qarun menolak nasihat tersebut dan menjawab dengan penuh kesombongan:

إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِي

"Sesungguhnya aku diberi harta itu hanya karena ilmu yang ada padaku." (QS. Al-Qashash [28]:78).

Pernyataan ini menunjukkan bagaimana Qarun mengklaim bahwa keberhasilannya murni hasil kemampuan pribadi. Sikap ini mencerminkan

---

[405] M. Quraish Shihab, *Al-Lubaab: Makna, Tujuan dan Pelajaran dari Surah-Surah Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2012, hal. 476

[406] Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Wasith*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2001, hal. 219

[407] Anthony Giddens, *The Constitution of Society*, Cambridge: Polity Press, 1984, hal. 258.

[408] Muhammad Ali al-Shabuni, *Shafwat al-Tafasir*, Beirut: Dar al-Qur'an al-Karim, 1981, hal. 144

bentuk komunikasi elit yang menolak peran Tuhan maupun masyarakat dalam keberhasilan seseorang.[409]

Dalam perspektif komunikasi sosial, sikap Qarun menunjukkan kegagalan komunikasi empatik antara elite dan masyarakat. Qarun tidak mau mendengar nasihat masyarakat karena merasa posisinya lebih tinggi dari mereka. Sikap seperti ini sering terjadi pada elite ekonomi yang kehilangan kesadaran sosial terhadap kondisi masyarakat di sekitarnya.[410]

Kisah Qarun juga menunjukkan bagaimana kekayaan dapat menciptakan jarak sosial antara pemimpin dan rakyat. Ketika seseorang terlalu fokus pada kekayaan dan status sosial, ia cenderung kehilangan kemampuan untuk memahami kebutuhan masyarakat. Dalam teori kepemimpinan modern, kondisi ini sering disebut sebagai elitisme sosial, yaitu sikap pemimpin yang merasa lebih unggul dibandingkan masyarakat yang dipimpinnya.[411]

Al-Qur'an juga menggambarkan bagaimana sebagian masyarakat terpesona oleh kekayaan Qarun. Mereka berharap memiliki kekayaan yang sama seperti yang dimiliki Qarun. Hal ini menunjukkan bahwa kekayaan sering kali menciptakan ilusi kesuksesan yang membuat masyarakat lupa terhadap nilai moral dan spiritual.[412]

Namun orang-orang berilmu mengingatkan bahwa pahala Allah lebih baik bagi orang yang beriman dan berbuat kebaikan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an menempatkan nilai moral sebagai ukuran utama keberhasilan seseorang, bukan kekayaan material. Pesan ini sekaligus menjadi kritik terhadap budaya materialisme dalam masyarakat.[413]

Klimaks kisah Qarun terjadi ketika Allah menenggelamkan Qarun bersama rumah dan kekayaannya ke dalam bumi. Peristiwa ini digambarkan dalam QS. Al-Qashash [28]:81 sebagai bentuk hukuman atas kesombongan dan kezaliman yang ia lakukan.[414] Kehancuran Qarun menjadi simbol runtuhnya kekuasaan yang dibangun di atas kesombongan dan ketidakadilan sosial.

Peristiwa tersebut memberikan pelajaran kepada masyarakat bahwa kekayaan tidak dapat menyelamatkan seseorang dari kehancuran jika tidak disertai dengan moralitas. Masyarakat yang sebelumnya iri kepada Qarun

---

[409] Abdul Karim Zaidan, *Al-Mustafad fi Qasas al-Qur'an*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1997, hal. 201

[410] Deddy Mulyana, *Komunikasi Antarbudaya*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005, hal. 128

[411] Gary Yukl, *Leadership in Organizations*, New Jersey: Pearson Education, 2013, hal. 314

[412] Seyyed Hossein Nasr, *The Study Quran*, New York: HarperOne, 2015, hal. 1073

[413] Ismail Raji al-Faruqi, *Al-Tawhid: Its Implications for Thought and Life*, Herndon: IIIT, 1992, hal. 153

[414] Ibnu Katsir, *Qashash al-Anbiya*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004, hal. 256

akhirnya menyadari bahwa kekayaan tanpa nilai spiritual hanya membawa kehancuran[415].

Dalam kajian komunikasi kepemimpinan, kisah Qarun menunjukkan bahwa kesombongan sosial dapat merusak hubungan antara pemimpin dan masyarakat. Ketika pemimpin kehilangan empati sosial, komunikasi dengan masyarakat akan terputus sehingga menciptakan ketimpangan sosial yang berbahaya.[416]

Kisah ini juga menunjukkan bahwa kepemimpinan yang sehat harus dibangun di atas prinsip tanggung jawab sosial. Kekayaan dan kekuasaan harus digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan untuk menunjukkan superioritas pribadi. Dalam perspektif Islam, kekayaan merupakan amanah yang harus digunakan untuk kepentingan sosial. [417]

Selain itu, kisah Qarun mengingatkan bahwa legitimasi kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh kekayaan atau kekuasaan, tetapi oleh integritas moral. Pemimpin yang kehilangan integritas akan kehilangan kepercayaan masyarakat dan pada akhirnya kehilangan legitimasi.[418]

Dengan demikian, kisah Qarun dalam Al-Qur'an memberikan pelajaran penting tentang bahaya kesombongan ekonomi dalam kepemimpinan. Qarun menjadi simbol pemimpin yang gagal menjaga etika komunikasi dengan masyarakat karena terlalu mengandalkan kekayaan dan kekuasaan. Kisah ini menunjukkan bahwa kepemimpinan yang adil harus dibangun di atas kerendahan hati, empati sosial, dan kesadaran spiritual.[419]

e. Abu Lahab – Komunikasi kebencian dan Propaganda Sosial

Abu Lahab merupakan salah satu tokoh Quraisy yang secara terbuka menentang dakwah Nabi Muhammad SAW sejak awal penyebaran Islam di Makkah. Ia bukan hanya seorang penentang, tetapi juga figur yang menggunakan pengaruh sosial dan retorika untuk merusak citra Nabi SAW di tengah masyarakat.[420] Dalam perspektif komunikasi sosial, Abu Lahab mencerminkan pola komunikasi propaganda yang bertujuan mempengaruhi opini publik melalui narasi kebencian dan delegitimasi moral terhadap lawan.

---

[415] Muhammad Sayyid Tantawi, *Al-Tafsir al-Wasit*, Kairo: Dar Nahdah Misr, 1998, hal. 412

[416] Denis McQuail, *McQuail's Mass Communication Theory*, London: Sage Publications, 2010, hal. 341

[417] Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Zakah*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1999, hal. 72

[418] Peter G. Northouse, *Leadership: Theory and Practice*, California: Sage Publications, 2016, hal. 18

[419] M. Dawam Rahardjo, *Etika Sosial dalam Kehidupan Berbangsa*, Jakarta: Kompas, 2013, hal. 94

[420] Said Ramadhan al-Buthi, *Fiqh al-Sirah al-Nabawiyyah*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1998, hal. 94

Penentangan Abu Lahab terhadap Nabi Muhammad SAW secara jelas diabadikan dalam QS. Al-Masad [111]:1–2:

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ۝ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ

"Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sungguh ia akan binasa. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang ia usahakan."

Ayat ini menunjukkan bahwa kekuasaan sosial dan kekayaan tidak mampu menyelamatkan seseorang yang menentang kebenaran. Dalam tafsir klasik dijelaskan bahwa Abu Lahab merupakan contoh tokoh yang menggunakan status sosial untuk melawan dakwah Islam.[421]

Dalam sejarah dakwah Nabi SAW, Abu Lahab sering mengikuti Nabi Muhammad SAW ketika beliau berdakwah kepada masyarakat. Ia kemudian menyampaikan narasi yang bertujuan merusak kredibilitas Nabi SAW di hadapan masyarakat. Misalnya, ia mengatakan bahwa Nabi adalah penyihir atau pendusta. Strategi ini menunjukkan penggunaan komunikasi destruktif untuk menciptakan keraguan dalam masyarakat.[422]

Tindakan Abu Lahab ini dapat dipahami sebagai bentuk *counter-narrative*, yaitu upaya membangun narasi tandingan terhadap pesan dakwah Nabi. Dalam teori komunikasi politik, strategi ini sering digunakan oleh elite yang merasa terancam oleh perubahan sosial yang dibawa oleh suatu ide baru.[423]

Selain itu, Abu Lahab juga memanfaatkan hubungan kekerabatan dengan Nabi SAW untuk merusak citra beliau. Ia ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa bahkan keluarga Nabi SAW sendiri tidak mempercayainya. Strategi ini merupakan bentuk manipulasi simbolik yang bertujuan menciptakan krisis kepercayaan di tengah masyarakat.[424]

Al-Qur'an juga menggambarkan peran istri Abu Lahab, Ummu Jamil, yang turut menyebarkan kebencian terhadap Nabi SAW. Dalam QS. Al-Masad [111]:4 disebutkan:

وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ

"Dan istrinya, pembawa kayu bakar."

Dalam tafsir dijelaskan bahwa ungkapan ini menggambarkan peran Ummu Jamil dalam menyebarkan fitnah dan permusuhan terhadap Nabi Muhammad

---

[421] Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999, hal. 562

[422] Muhammad Husain Haikal, *Hayat Muhammad*, Kairo: Dar al-Ma'arif, 2003, hal. 147

[423] Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016, hal. 204

[424] Denis McQuail, *Mass Communication Theory*, London: Sage Publications, 2010, hal. 412

SAW. Ia menyebarkan kebencian yang memperburuk konflik sosial di masyarakat Makkah.[425]

Kisah ini menunjukkan bahwa komunikasi kebencian sering kali melibatkan jaringan sosial yang lebih luas. Abu Lahab tidak bekerja sendiri, tetapi bersama kelompok yang memiliki kepentingan mempertahankan struktur sosial lama. Dalam konteks ini, propaganda menjadi alat untuk mempertahankan dominasi sosial.[426]

Penolakan Abu Lahab terhadap dakwah Nabi SAW juga dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi dan status sosial. Islam mengajarkan kesetaraan sosial yang mengancam struktur aristokrasi Quraisy. Oleh karena itu, penentangan terhadap Nabi SAW bukan hanya bersifat teologis, tetapi juga politis dan ekonomis.[427]

Dalam perspektif komunikasi, Abu Lahab menggunakan strategi *labeling*, yaitu memberi label negatif kepada Nabi untuk mempengaruhi persepsi masyarakat. Label seperti "penyihir" atau "pendusta" digunakan untuk menciptakan citra negatif yang dapat melemahkan legitimasi dakwah Nabi SAW.[428]

Namun strategi propaganda ini tidak berhasil menghentikan perkembangan Islam. Justru Al-Qur'an secara langsung mengabadikan kisah Abu Lahab[429] sebagai simbol kegagalan komunikasi kebencian dalam menghadapi kebenaran. Hal ini menunjukkan bahwa propaganda tidak mampu mengalahkan pesan yang memiliki kekuatan moral dan spiritual.

Kisah Abu Lahab juga menunjukkan bahwa kekuasaan sosial tanpa integritas moral akan berakhir dengan kehancuran. Al-Qur'an menyatakan bahwa kekayaan dan kekuasaan yang dimiliki Abu Lahab tidak dapat menyelamatkannya dari hukuman Allah. Hal ini menegaskan bahwa legitimasi kepemimpinan tidak hanya bergantung pada kekuatan sosial, tetapi pada kebenaran moral.[430]

Dalam kajian komunikasi dakwah, kisah Abu Lahab menunjukkan pentingnya menjaga etika komunikasi dalam menghadapi propaganda. Nabi Muhammad SAW tidak membalas propaganda dengan propaganda, tetapi dengan kesabaran dan keteladanan moral.[431] Pendekatan ini menunjukkan bahwa komunikasi profetik berorientasi pada transformasi moral masyarakat.

Selain itu, kisah Abu Lahab juga memperlihatkan bagaimana propaganda dapat menciptakan polarisasi sosial dalam masyarakat. Ketika komunikasi

---

[425] Sayyid Qutb, *Fi Zilal al-Qur'an*, Kairo: Dar al-Syuruq, 2003, hal. 3982

[426] Anthony Giddens, *Sociology*, Cambridge: Polity Press, 2017, hal. 520

[427] Karen Armstrong, *Muhammad: A Prophet for Our Time*, New York: HarperCollins, 2007, hal. 56

[428] Richard West dan Lynn H. Turner, *Introducing Communication Theory*, New York: McGraw-Hill, 2010, hal. 87

[429] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2017, hal. 705

[430] Abdul Karim Zaidan, *Usul al-Da'wah*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1996, hal. 189

[431] Ahmad Ghalwusy, *Al-Da'wah al-Islamiyyah*, Kairo: Dar al-Kitab al-Misri, 2000, hal. 141

dipenuhi dengan kebencian dan fitnah, masyarakat akan terpecah menjadi kelompok yang saling bermusuhan. Dalam konteks modern, fenomena ini sering terlihat dalam konflik politik yang dipicu oleh propaganda media.[432]

Namun Al-Qur'an menunjukkan bahwa propaganda tidak akan mampu bertahan lama jika tidak didukung oleh kebenaran. Seiring berjalannya waktu, masyarakat akan mampu membedakan antara narasi manipulatif dan pesan yang membawa kebaikan.[433] Kisah Abu Lahab menjadi bukti bahwa komunikasi yang dibangun di atas kebencian akan berakhir dengan kegagalan.

kisah Abu Lahab dalam Al-Qur'an menggambarkan bagaimana propaganda dan komunikasi kebencian dapat digunakan oleh pemimpin untuk mempertahankan kekuasaan. Namun kisah ini juga menunjukkan bahwa kekuasaan yang dibangun di atas kebencian dan manipulasi tidak akan bertahan lama. Al-Qur'an menjadikan Abu Lahab sebagai simbol kegagalan komunikasi tirani dalam menghadapi kebenaran dan keadilan moral.

---

[432] Manuel Castells, *Communication Power*, Oxford: Oxford University Press, 2009, hal. 302

[433] John L. Esposito, *Islam: The Straight Path*, Oxford: Oxford University Press, 2011, hal. 41

BAB V
MODEL KOMUNIKASI PEMIMPIN QUR'ANI DALAM MEMBANGUN ETIKA DAN RELASI SOSIAL

Bab ini merancang model komunikasi pemimpin Qur'ani sebagai kerangka etika komunikasi dalam membangun relasi sosial antara pemimpin dan rakyat. Pembahasan diawali dengan analisis keterbatasan paradigma komunikasi pemimpin modern yang cenderung menekankan aspek retorika, persuasi, dan strategi kekuasaan sehingga sering mengabaikan dimensi moral dalam komunikasi publik. Bab ini kemudian menjelaskan urgensi rekonstruksi komunikasi pemimpin yang berlandaskan nilai-nilai Qur'ani untuk mengatasi krisis etika komunikasi dalam masyarakat modern. Selanjutnya dirumuskan prinsip komunikasi pemimpin Qur'ani yang menempatkan komunikasi sebagai amanah moral, sarana membangun kepercayaan sosial, instrumen rekonsiliasi konflik, dan manifestasi keteladanan kepemimpinan. Berdasarkan prinsip tersebut, bab ini memformulasikan model komunikasi pemimpin Qur'ani yang berlandaskan lima konsep etika komunikasi dalam Al-Qur'an, yaitu *qaulan karīman, qaulan ma'rūfan, qaulan sadīdan, qaulan layyinan,* dan *qaulan balīghan*. Model ini juga dijelaskan melalui dimensi etika, relasi sosial, dan transformasi sosial serta implikasinya bagi pengembangan teori komunikasi Islam dan praktik kepemimpinan yang berkeadaban

A. Urgensi Rekonstruksi Model Komunikasi Kepemimpinan

1. Keterbatasan paradigma komunikasi kepemimpinan modern

Perkembangan teori komunikasi modern telah memberikan kontribusi penting dalam memahami hubungan antara pemimpin dan masyarakat, terutama dalam konteks komunikasi organisasi, komunikasi politik, dan komunikasi publik. Namun demikian, paradigma komunikasi kepemimpinan modern sering kali lebih menekankan pada aspek teknis penyampaian pesan, efektivitas persuasi, serta strategi komunikasi yang berorientasi pada pencapaian tujuan kekuasaan. Dalam banyak teori komunikasi kontemporer, komunikasi dipahami sebagai alat untuk mempengaruhi opini publik atau mengendalikan persepsi masyarakat terhadap kebijakan politik tertentu. Pendekatan semacam ini menunjukkan bahwa komunikasi sering diposisikan sebagai instrumen strategis dalam mempertahankan legitimasi kekuasaan, bukan sebagai sarana membangun hubungan moral antara pemimpin dan masyarakat.[1]

Paradigma komunikasi kepemimpinan modern juga cenderung berakar pada tradisi komunikasi Barat yang menekankan rasionalitas instrumental dalam proses komunikasi. Dalam paradigma ini, keberhasilan komunikasi sering diukur dari sejauh mana pesan yang disampaikan mampu mempengaruhi sikap dan perilaku *audiens.* Meskipun pendekatan ini efektif dalam menjelaskan dinamika komunikasi politik dan organisasi, paradigma tersebut sering mengabaikan dimensi etika dan moralitas dalam komunikasi kepemimpinan. Akibatnya, komunikasi dalam praktik kepemimpinan sering kali mengalami reduksi makna, dari yang seharusnya menjadi sarana membangun kepercayaan sosial menjadi sekadar alat persuasi politik.[2]

Keterbatasan paradigma komunikasi kepemimpinan modern juga terlihat dalam kecenderungannya yang terlalu menekankan aspek retorika dan strategi komunikasi. Dalam praktik komunikasi politik kontemporer, kemampuan retorika pemimpin sering dipandang sebagai indikator utama keberhasilan komunikasi. Namun demikian, retorika yang kuat tidak selalu diiringi oleh integritas moral dalam komunikasi. Dalam banyak kasus, komunikasi politik bahkan digunakan untuk membangun citra yang tidak selalu sejalan dengan realitas kebijakan yang dijalankan. Hal ini menunjukkan bahwa paradigma komunikasi modern sering kali gagal menjembatani hubungan antara komunikasi dan etika kepemimpinan.[3]

Selain itu, komunikasi kepemimpinan modern sering beroperasi dalam kerangka sistem politik yang kompetitif, di mana komunikasi digunakan

---

[1] Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktik*, Remaja Rosdakarya, 2017, hal. 32

[2] Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, RajaGrafindo Persada, 2016, hal. 114

[3] Ardial, *Komunikasi Politik*, Indeks, 2018, hal. 87

sebagai alat untuk memenangkan dukungan publik. Dalam situasi seperti ini, komunikasi sering kali dipenuhi oleh strategi propaganda, manipulasi informasi, serta *framming* media yang bertujuan membentuk persepsi masyarakat. Praktik komunikasi semacam ini menunjukkan bahwa komunikasi tidak selalu digunakan untuk membangun dialog yang sehat antara pemimpin dan masyarakat, tetapi sering digunakan untuk mempertahankan kepentingan kekuasaan.[4]

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa paradigma komunikasi kepemimpinan modern masih memiliki keterbatasan dalam menjelaskan hubungan komunikasi dengan nilai-nilai moral dalam kepemimpinan. Dalam banyak teori komunikasi, dimensi etika sering kali hanya dipandang sebagai aspek tambahan yang bersifat normatif, bukan sebagai fondasi utama dalam proses komunikasi itu sendiri. Padahal dalam realitas sosial, komunikasi yang tidak dilandasi oleh nilai moral berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemimpin.

Dalam perspektif Islam, komunikasi tidak hanya dipahami sebagai proses pertukaran informasi, tetapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab moral manusia dalam kehidupan sosial. Al-Qur'an menempatkan komunikasi sebagai sarana membangun hubungan yang adil, jujur, dan penuh tanggung jawab dalam masyarakat. Oleh karena itu, komunikasi dalam kepemimpinan tidak hanya berkaitan dengan efektivitas penyampaian pesan, tetapi juga berkaitan dengan integritas moral pemimpin dalam berbicara kepada masyarakat.

Prinsip komunikasi yang berlandaskan kejujuran ditegaskan dalam firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

"Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar." (QS. Al-Ahzab [33]: 70).

Ibn Katsir menjelaskan bahwa ayat ini merupakan perintah agar manusia menjaga kejujuran dalam ucapan serta menghindari segala bentuk kebohongan dalam komunikasi sosial. Menurutnya, ucapan yang benar merupakan dasar penting dalam membangun hubungan sosial yang adil dalam masyarakat.[5] Ayat ini menunjukkan bahwa komunikasi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kejujuran dan kebenaran. Perintah untuk mengucapkan *qaulan sadīdan* menegaskan bahwa komunikasi bukan sekadar aktivitas retorika, tetapi merupakan bagian dari tanggung jawab moral manusia dalam menjaga kebenaran.

---

[4]Dan Nimmo, *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan, dan Media*, Remaja Rosdakarya, 2010, hal. 56

[5] Ibn Katsir, I., *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Dar Tayyibah, 2002, jilid 6, hal. 409

Keterbatasan paradigma komunikasi kepemimpinan modern menunjukkan perlunya rekonstruksi konsep komunikasi yang tidak hanya berorientasi pada efektivitas penyampaian pesan, tetapi juga pada nilai-nilai etika dan moralitas dalam komunikasi. Dalam konteks ini, Al-Qur'an memberikan kerangka normatif yang dapat menjadi landasan dalam membangun model komunikasi kepemimpinan yang lebih berkeadaban. Oleh karena itu, rekonstruksi model komunikasi pemimpin Qur'ani menjadi penting untuk menjawab krisis etika komunikasi dalam praktik kepemimpinan modern.

2. Krisis etika komunikasi antara pemimpin dan rakyat dalam realitas sosial

Krisis etika komunikasi antara pemimpin dan rakyat merupakan salah satu persoalan penting dalam dinamika kehidupan sosial dan politik kontemporer. Dalam banyak konteks kepemimpinan modern, komunikasi yang seharusnya menjadi sarana membangun hubungan yang sehat antara pemimpin dan masyarakat justru sering mengalami distorsi akibat kepentingan kekuasaan, manipulasi informasi, serta penggunaan retorika politik yang tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai kebenaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa komunikasi kepemimpinan sering kali kehilangan dimensi etis yang seharusnya menjadi landasan utama dalam interaksi antara pemimpin dan masyarakat. Padahal, komunikasi yang sehat merupakan prasyarat penting dalam membangun kepercayaan sosial dan legitimasi kepemimpinan dalam masyarakat.[6]

Dalam praktik komunikasi politik modern, hubungan antara pemimpin dan rakyat sering kali dibentuk melalui konstruksi citra yang dibangun melalui media massa dan strategi komunikasi politik. Pemimpin tidak hanya berkomunikasi untuk menyampaikan kebijakan, tetapi juga untuk membangun persepsi publik terhadap kepemimpinannya. Dalam situasi seperti ini, komunikasi sering kali digunakan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan melalui pengelolaan opini publik. Hal ini menyebabkan komunikasi kepemimpinan menjadi sangat rentan terhadap manipulasi informasi yang dapat menyesatkan masyarakat.[7]

Krisis etika komunikasi juga terlihat dalam meningkatnya fenomena polarisasi sosial dalam masyarakat modern. Komunikasi politik yang bersifat provokatif dan konfrontatif sering kali memperdalam perbedaan pandangan dalam masyarakat, sehingga hubungan antara kelompok sosial menjadi semakin tegang. Dalam banyak kasus, komunikasi yang dilakukan oleh elite

---

[6] Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*, Remaja Rosdakarya, 2018, hal. 75

[7] Hafied Cangara, *Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi*, RajaGrafindo Persada, 2019, hal. 142

politik bahkan dapat memperkuat konflik sosial karena digunakan untuk memobilisasi dukungan politik melalui narasi yang memecah belah masyarakat. Fenomena ini menunjukkan bahwa komunikasi kepemimpinan tidak selalu berfungsi sebagai sarana membangun harmoni sosial, tetapi justru dapat menjadi faktor yang memperparah konflik sosial.[8]

Selain itu, perkembangan teknologi informasi dan media digital juga membawa tantangan baru dalam etika komunikasi kepemimpinan. Era digital memungkinkan informasi menyebar dengan sangat cepat melalui berbagai platform media sosial. Meskipun perkembangan ini memberikan peluang bagi pemimpin untuk berkomunikasi secara langsung dengan masyarakat, pada saat yang sama kondisi ini juga membuka ruang bagi penyebaran informasi yang tidak akurat atau bahkan disinformasi. Dalam situasi seperti ini, komunikasi publik sering kali dipenuhi oleh informasi yang tidak terverifikasi sehingga masyarakat mengalami kesulitan dalam membedakan antara informasi yang benar dan yang menyesatkan.[9]

Krisis etika komunikasi antara pemimpin dan rakyat juga berkaitan erat dengan menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap institusi kepemimpinan. Kepercayaan sosial merupakan elemen penting dalam hubungan antara pemimpin dan masyarakat karena kepercayaan memungkinkan masyarakat menerima kebijakan yang diambil oleh pemimpin dengan lebih terbuka. Namun ketika komunikasi pemimpin dipersepsikan sebagai tidak jujur atau manipulatif, masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap kepemimpinan yang ada. Hilangnya kepercayaan ini dapat menimbulkan ketegangan sosial yang pada akhirnya mengganggu stabilitas kehidupan masyarakat.[10]

Dalam perspektif Al-Qur'an, komunikasi yang tidak dilandasi oleh nilai kebenaran dan tanggung jawab moral dapat menimbulkan kerusakan dalam kehidupan sosial. Al-Qur'an menegaskan pentingnya menjaga kejujuran dalam komunikasi agar hubungan sosial dalam masyarakat tetap terjaga. Allah SWT berfirman:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dan janganlah kamu mencampuradukkan kebenaran dengan kebatilan serta menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahuinya." (QS. Al-Baqarah [2]: 42).

Ayat ini menunjukkan bahwa penyembunyian kebenaran dalam komunikasi merupakan bentuk penyimpangan moral yang dapat merusak tatanan kehidupan sosial. Komunikasi yang mencampurkan kebenaran dengan

---

[8] Ardial, *Komunikasi Politik*, Indeks, 2018, hal. 133

[9] Rulli Nasrullah, *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*, Simbiosa Rekatama Media, 2017, hal. 126

[10] Jalaluddin Rakhmat, J., *Psikologi Komunikasi,* Remaja Rosdakarya, 2015, hal. 198

kebohongan berpotensi menimbulkan ketidakadilan serta kebingungan dalam masyarakat.

Dalam tafsirnya, Al-Qurṭubi menjelaskan bahwa ayat ini merupakan larangan bagi manusia untuk menyembunyikan kebenaran atau memutarbalikkan fakta demi kepentingan tertentu. Menurutnya, tindakan tersebut dapat menimbulkan kerusakan dalam kehidupan sosial karena masyarakat kehilangan pegangan terhadap kebenaran.[11]

Krisis etika komunikasi juga dapat dilihat dari semakin menurunnya kualitas dialog antara pemimpin dan masyarakat. Dalam banyak situasi, komunikasi antara pemimpin dan rakyat lebih bersifat satu arah, di mana pemimpin hanya menyampaikan pesan tanpa memberikan ruang yang cukup bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka. Padahal komunikasi yang sehat seharusnya bersifat dialogis dan partisipatif sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran gagasan antara pemimpin dan masyarakat.

Dalam konteks komunikasi kepemimpinan, dialog yang terbuka sangat penting dalam membangun hubungan yang saling percaya antara pemimpin dan rakyat. Ketika masyarakat merasa didengar dalam proses komunikasi, mereka akan lebih mudah menerima kebijakan yang diambil oleh pemimpin. Sebaliknya, ketika komunikasi berlangsung secara tertutup dan tidak transparan, masyarakat cenderung merasa terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan.

Krisis etika komunikasi antara pemimpin dan rakyat menunjukkan bahwa praktik komunikasi kepemimpinan modern masih menghadapi berbagai tantangan serius. Komunikasi yang dipenuhi oleh manipulasi informasi, retorika politik yang provokatif, serta kurangnya transparansi dapat merusak hubungan antara pemimpin dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi paradigma komunikasi kepemimpinan yang tidak hanya menekankan efektivitas penyampaian pesan, tetapi juga menempatkan etika dan moralitas sebagai fondasi utama dalam komunikasi publik. Dalam konteks ini, nilai-nilai komunikasi Qur'ani menawarkan kerangka etika yang dapat menjadi dasar dalam membangun komunikasi kepemimpinan yang lebih jujur, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

3. Relevansi nilai-nilai Qur'ani sebagai landasan etika komunikasi publik

Dalam menghadapi berbagai krisis komunikasi dalam kepemimpinan modern, nilai-nilai Qur'ani menawarkan kerangka etika yang komprehensif untuk membangun komunikasi publik yang berkeadaban. Al-Qur'an tidak

[11] Al-Qurṭubi, *Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*, Muassasah al-Risalah, 2016, jilid 2, hal. 44

hanya memberikan panduan spiritual bagi kehidupan manusia, tetapi juga menyediakan prinsip-prinsip moral yang dapat menjadi dasar dalam membangun hubungan sosial yang sehat dalam masyarakat. Dalam perspektif Islam, komunikasi bukan sekadar aktivitas pertukaran informasi, melainkan juga bagian dari tanggung jawab moral manusia dalam menjaga keadilan, kebenaran, dan keharmonisan dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, nilai-nilai Qur'ani memiliki relevansi yang sangat kuat dalam membentuk etika komunikasi publik yang berlandaskan pada integritas moral dan tanggung jawab sosial.[12]

Salah satu prinsip utama komunikasi dalam Al-Qur'an adalah keharusan menyampaikan kebenaran secara jujur dan bertanggung jawab. Komunikasi yang berlandaskan kebenaran menjadi fondasi penting dalam menjaga kepercayaan antara individu maupun kelompok dalam masyarakat. Dalam konteks kepemimpinan, kejujuran dalam komunikasi memiliki peran penting dalam membangun legitimasi kepemimpinan di mata masyarakat. Pemimpin yang berkomunikasi secara jujur akan lebih mudah memperoleh kepercayaan publik karena masyarakat merasa bahwa informasi yang disampaikan dapat dipercaya. Sebaliknya, komunikasi yang dipenuhi oleh manipulasi informasi dapat merusak hubungan antara pemimpin dan masyarakat.[13]

Al-Qur'an secara tegas menekankan pentingnya menyampaikan kebenaran dalam komunikasi sosial. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

"Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur." (QS. At-Taubah [9]: 119).

Dalam tafsirnya, Ibn Katsir menjelaskan bahwa ayat ini merupakan perintah agar manusia senantiasa menjaga kejujuran dalam perkataan dan perbuatan. Kejujuran dipandang sebagai fondasi utama dalam membangun kehidupan sosial yang adil dan harmonis.[14] Ayat tersebut menunjukkan bahwa kejujuran merupakan nilai fundamental dalam kehidupan sosial manusia. Dalam konteks komunikasi kepemimpinan, kejujuran tidak hanya berkaitan dengan kebenaran informasi yang disampaikan, tetapi juga berkaitan dengan integritas moral pemimpin dalam menjalankan tanggung jawabnya kepada masyarakat.

Komunikasi yang menghargai martabat manusia merupakan bagian penting dari etika sosial dalam Islam. Hal ini terlihat dalam berbagai konsep komunikasi Qur'ani seperti *qaulan karīman dan qaulan ma'rūfan* yang

---

[12] Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, RajaGrafindo Persada, 2016, hal. 214

[13] Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Kencana, 2014, hal. 59

[14] Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Dar Tayyibah, 2002, jilid 4, hal. 203

menekankan pentingnya menggunakan bahasa yang santun dan bermartabat dalam interaksi sosial.

Prinsip penghormatan terhadap manusia dalam komunikasi juga ditegaskan dalam firman Allah SWT:

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ

"Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling." (QS. Al-Baqarah [2]: 83).

Al-Qurṭubi menjelaskan bahwa perintah untuk berkata baik kepada manusia menunjukkan bahwa komunikasi harus dilakukan dengan cara yang menghormati martabat orang lain. Menurutnya, penggunaan bahasa yang santun dalam komunikasi merupakan salah satu bentuk akhlak mulia dalam Islam.[15] Ayat ini menunjukkan bahwa komunikasi yang baik merupakan bagian dari etika sosial yang harus dijaga dalam kehidupan masyarakat. Komunikasi yang santun dapat membantu menciptakan hubungan sosial yang harmonis serta mencegah munculnya konflik dalam masyarakat.

Nilai-nilai komunikasi Qur'ani juga menekankan pentingnya kelembutan dalam berkomunikasi, terutama dalam konteks kepemimpinan. Komunikasi yang lembut dapat membantu menciptakan suasana dialog yang lebih terbuka antara pemimpin dan masyarakat. Dalam banyak situasi, pendekatan komunikasi yang keras justru dapat menimbulkan resistensi dari masyarakat sehingga pesan yang disampaikan menjadi sulit diterima.

Prinsip komunikasi yang lembut ini ditegaskan dalam firman Allah SWT ketika memerintahkan Nabi Musa untuk berbicara kepada Fir'aun:

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ

"Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut." (QS. Ṭāhā [20]: 44).

Nilai-nilai Qur'ani memberikan landasan etika yang sangat kuat dalam membangun komunikasi publik yang berkeadaban. Prinsip kejujuran, penghormatan terhadap martabat manusia, serta kelembutan dalam komunikasi merupakan nilai-nilai yang sangat relevan dalam membangun

[15] Al-Qurṭubi, *Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*, Muassasah al-Risalah, 2016, jilid 2, hal. 355

hubungan yang sehat antara pemimpin dan masyarakat. Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai Qur'ani dalam komunikasi kepemimpinan dapat menjadi solusi normatif dalam mengatasi krisis etika komunikasi yang terjadi dalam praktik kepemimpinan modern.

4. Posisi model komunikasi pemimpin Qur'ani

Model komunikasi pemimpin Qur'ani menempati posisi yang penting dalam upaya merekonstruksi paradigma komunikasi kepemimpinan yang lebih beretika dan berorientasi pada kemaslahatan sosial. Dalam realitas komunikasi kepemimpinan modern, hubungan antara pemimpin dan masyarakat sering kali mengalami distorsi akibat dominasi kepentingan politik dan kekuasaan. Komunikasi yang seharusnya menjadi sarana membangun dialog yang sehat antara pemimpin dan rakyat sering berubah menjadi alat legitimasi kekuasaan semata. Kondisi ini menunjukkan bahwa paradigma komunikasi kepemimpinan modern memerlukan kerangka etika yang lebih kokoh agar komunikasi tidak hanya berfungsi sebagai alat strategis, tetapi juga sebagai sarana membangun kepercayaan sosial dalam masyarakat.[16]

Dalam konteks ini, model komunikasi pemimpin Qur'ani hadir sebagai kerangka normatif yang mengintegrasikan dimensi etika, spiritualitas, dan tanggung jawab sosial dalam praktik komunikasi kepemimpinan. Model ini tidak hanya menekankan efektivitas penyampaian pesan, tetapi juga menempatkan komunikasi sebagai amanah moral yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. *Dengan demikian*, komunikasi pemimpin tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan kebijakan atau mempengaruhi opini publik, tetapi juga untuk membangun hubungan yang adil dan bermartabat antara pemimpin dan masyarakat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa komunikasi kepemimpinan dalam perspektif Qur'ani memiliki orientasi moral yang lebih luas dibandingkan dengan paradigma komunikasi modern yang cenderung bersifat instrumental.[17]

Model komunikasi pemimpin Qur'ani juga memiliki posisi strategis dalam menjembatani hubungan antara nilai-nilai wahyu dengan realitas sosial masyarakat modern. Dalam perspektif Islam, kepemimpinan tidak hanya dipahami sebagai struktur kekuasaan, tetapi juga sebagai amanah yang harus dijalankan dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, komunikasi pemimpin dalam perspektif Qur'ani harus mencerminkan nilai-nilai tersebut agar hubungan antara pemimpin dan masyarakat dapat terbangun secara harmonis. Komunikasi yang dilandasi oleh nilai wahyu akan menghasilkan pola interaksi sosial yang lebih adil dan berkeadaban.[18]

---

[16] Morissan, *Teori Komunikasi Individu hingga Massa*, Kencana, 2015, hal. 214
[17] Nurudin, *Pengantar Komunikasi Massa*, RajaGrafindo Persada, 2017, hal. 97
[18] Abudin Nata,., *Akhlak Tasawuf,* RajaGrafindo Persada, 2016, hal. 148

Posisi model komunikasi pemimpin Qur'ani juga dapat dipahami sebagai upaya integrasi antara tradisi tafsir Al-Qur'an dengan teori komunikasi modern. Integrasi ini penting karena memungkinkan nilai-nilai Qur'ani diterjemahkan ke dalam kerangka konseptual yang dapat dipahami dalam konteks ilmu sosial kontemporer. Dengan cara ini, konsep komunikasi dalam Al-Qur'an tidak hanya dipahami sebagai ajaran normatif yang bersifat spiritual, tetapi juga sebagai konsep yang memiliki relevansi praktis dalam membangun hubungan sosial dalam masyarakat modern.[19]

Selain itu, model komunikasi pemimpin Qur'ani juga menempatkan komunikasi sebagai instrumen utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan. Kepercayaan sosial merupakan elemen penting dalam stabilitas kehidupan masyarakat karena kepercayaan memungkinkan masyarakat menerima kebijakan yang diambil oleh pemimpin dengan lebih terbuka. Ketika komunikasi pemimpin dilakukan secara jujur dan transparan, masyarakat akan lebih mudah membangun kepercayaan terhadap kepemimpinan tersebut. Sebaliknya, komunikasi yang tidak jujur dapat menimbulkan ketidakpercayaan yang berpotensi merusak hubungan antara pemimpin dan masyarakat.[20]

Selain itu, model komunikasi pemimpin Qur'ani juga menempatkan komunikasi sebagai sarana membangun hubungan sosial yang dilandasi oleh nilai *rahmah* (kasih sayang). Dalam Islam, kepemimpinan ideal bukan hanya ditentukan oleh kemampuan mengelola kekuasaan, tetapi juga oleh kemampuan membangun hubungan yang penuh empati dengan masyarakat. Komunikasi yang dilandasi oleh nilai *rahmah* akan mendorong terciptanya hubungan sosial yang lebih harmonis antara pemimpin dan rakyat.

Posisi model komunikasi pemimpin Qur'ani tidak hanya sebagai alternatif paradigma komunikasi kepemimpinan, tetapi juga sebagai kerangka etika yang dapat membimbing praktik komunikasi publik agar lebih berorientasi pada nilai keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan sosial. Model ini menegaskan bahwa komunikasi dalam kepemimpinan bukan sekadar alat politik, tetapi merupakan amanah moral yang harus dijalankan dengan integritas dan tanggung jawab demi terciptanya kehidupan masyarakat yang adil dan berkeadaban.

B. Formulasi Prinsip Komunikasi Pemimpin Qur'ani

1. Komunikasi sebagai Amanah Moral

Dalam perspektif Al-Qur'an, komunikasi pemimpin tidak hanya dipahami sebagai proses penyampaian informasi kepada masyarakat, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral yang harus dijalankan dengan

[19] Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi*, Kencana, 2017, hal. 86
[20] Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, Remaja Rosdakarya, 2015, hal. 204

penuh integritas. Kepemimpinan dalam Islam pada dasarnya merupakan amanah yang mengandung dimensi spiritual, sosial, dan etika yang sangat kuat. Oleh karena itu, komunikasi yang dilakukan oleh seorang pemimpin tidak boleh dilepaskan dari nilai-nilai moral yang mengikat tanggung jawabnya di hadapan masyarakat dan di hadapan Allah SWT. Komunikasi kepemimpinan yang tidak dilandasi oleh kesadaran moral berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat serta merusak legitimasi kepemimpinan dalam kehidupan sosial.[21]

Konsep komunikasi sebagai amanah moral dalam kepemimpinan Islam berakar pada pandangan bahwa setiap tindakan pemimpin memiliki konsekuensi moral yang harus dipertanggungjawabkan. Dalam tradisi kepemimpinan Islam, pemimpin tidak hanya bertanggung jawab atas kebijakan yang diambil, tetapi juga atas setiap ucapan yang disampaikan kepada masyarakat. Komunikasi yang dilakukan oleh pemimpin harus mencerminkan nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial agar dapat menjaga kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, komunikasi kepemimpinan tidak boleh digunakan sebagai alat manipulasi informasi atau propaganda politik yang menyesatkan masyarakat.[22]

Al-Qur'an secara tegas menegaskan bahwa kepemimpinan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (QS. An-Nisa' [4]: 58).

Ibn Katsir menjelaskan bahwa ayat ini mengandung perintah bagi para pemimpin untuk menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab dalam seluruh aspek kepemimpinan. Amanah tersebut mencakup keadilan dalam memimpin, kejujuran dalam berbicara, serta tanggung jawab dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.[23] Ayat ini menunjukkan bahwa amanah merupakan prinsip dasar dalam kepemimpinan Islam. Amanah tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan kekuasaan, tetapi juga mencakup

[21] Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, RajaGrafindo Persada, 2016, hal. 58

[22] Rivai, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, RajaGrafindo Persada, 2018, hal. 303

[23] Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Dar Tayyibah, 2002, jilid 2, hal. 284

tanggung jawab moral dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat secara benar dan adil.

Dalam konteks komunikasi kepemimpinan, integritas menjadi salah satu unsur utama dalam menjaga amanah moral tersebut. Integritas komunikasi berarti kesesuaian antara apa yang disampaikan oleh pemimpin dengan kenyataan yang terjadi dalam praktik kepemimpinan. Pemimpin yang memiliki integritas komunikasi akan berusaha menjaga konsistensi antara ucapan dan tindakan sehingga masyarakat dapat mempercayai pesan yang disampaikan.[24]

Integritas komunikasi juga berkaitan dengan transparansi dalam penyampaian informasi kepada masyarakat. Dalam kehidupan sosial modern, masyarakat menuntut pemimpin untuk bersikap terbuka dalam menjelaskan kebijakan yang diambil serta dampaknya terhadap masyarakat. Transparansi dalam komunikasi memungkinkan masyarakat memahami alasan di balik suatu kebijakan sehingga kepercayaan sosial terhadap kepemimpinan dapat terbangun secara lebih kuat.[25]

Dalam perspektif Qur'ani, komunikasi yang berintegritas juga mencerminkan nilai kejujuran yang menjadi salah satu prinsip utama dalam etika Islam. Kejujuran dalam komunikasi tidak hanya berarti menyampaikan informasi yang benar, tetapi juga menghindari segala bentuk manipulasi informasi yang dapat merugikan masyarakat. Komunikasi yang jujur menciptakan hubungan sosial yang lebih sehat antara pemimpin dan rakyat karena masyarakat merasa bahwa informasi yang mereka terima dapat dipercaya.

Selain itu, komunikasi sebagai amanah moral juga mengandung dimensi spiritual yang kuat. Seorang pemimpin yang menyadari bahwa komunikasinya merupakan amanah dari Allah akan lebih berhati-hati dalam menyampaikan setiap ucapan kepada masyarakat. Kesadaran spiritual ini menjadi landasan penting dalam menjaga etika komunikasi dalam kepemimpinan.

Dalam tradisi kepemimpinan Islam, komunikasi yang jujur dan bertanggung jawab merupakan bagian dari akhlak kepemimpinan yang ideal. Pemimpin yang berakhlak baik akan berusaha menggunakan komunikasi sebagai sarana membangun hubungan yang penuh kepercayaan dengan masyarakat, bukan sebagai alat untuk memperkuat kekuasaan semata.

Konsep komunikasi sebagai amanah moral menunjukkan bahwa komunikasi dalam kepemimpinan Qur'ani tidak hanya berkaitan dengan efektivitas penyampaian pesan, tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab spiritual dan integritas moral pemimpin. Komunikasi yang dilandasi oleh kesadaran amanah akan mendorong pemimpin untuk berbicara secara jujur,

---

[24] Yukl, *Kepemimpinan dalam Organisasi*, Indeks, 2015, hal. 211

[25] Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar,* Remaja Rosdakarya, 2018, hal. 102

adil, dan bertanggung jawab kepada masyarakat, sehingga hubungan antara pemimpin dan rakyat dapat terbangun atas dasar kepercayaan dan kemaslahatan bersama.

2. Komunikasi sebagai Instrumen Pembangunan Kepercayaan Sosial

Dalam perspektif kepemimpinan Qur'ani, komunikasi memiliki peran penting sebagai sarana membangun kepercayaan sosial antara pemimpin dan masyarakat. Kepercayaan sosial merupakan elemen fundamental dalam hubungan kepemimpinan karena legitimasi seorang pemimpin tidak hanya ditentukan oleh kekuasaan formal yang dimilikinya, tetapi juga oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan komitmen moral pemimpin tersebut. Komunikasi yang terbuka, jujur, dan bertanggung jawab memungkinkan terciptanya hubungan yang sehat antara pemimpin dan rakyat, sehingga masyarakat dapat menerima kebijakan yang diambil oleh pemimpin dengan lebih percaya dan partisipatif.[26]

Dalam teori komunikasi sosial, kepercayaan publik terbentuk melalui proses interaksi yang konsisten antara komunikator dan audiens. Ketika pemimpin secara konsisten menyampaikan informasi yang benar serta menunjukkan kesesuaian antara ucapan dan tindakan, masyarakat akan membangun persepsi positif terhadap kepemimpinannya. Sebaliknya, komunikasi yang tidak transparan atau manipulatif dapat merusak kepercayaan masyarakat dan menimbulkan krisis legitimasi dalam kepemimpinan. Oleh karena itu, komunikasi menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga stabilitas hubungan antara pemimpin dan masyarakat.[27]

Hubungan antara komunikasi dan legitimasi kepemimpinan juga terlihat dalam bagaimana pemimpin menjelaskan kebijakan publik kepada masyarakat. Dalam kehidupan sosial modern, masyarakat tidak hanya menilai hasil kebijakan yang diambil oleh pemimpin, tetapi juga menilai bagaimana kebijakan tersebut dikomunikasikan kepada publik. Pemimpin yang mampu menjelaskan kebijakan secara terbuka dan rasional akan lebih mudah memperoleh dukungan masyarakat dibandingkan pemimpin yang menutup informasi atau menghindari dialog dengan publik.[28]

Dalam perspektif Al-Qur'an, hubungan kepercayaan antara pemimpin dan masyarakat sangat berkaitan dengan nilai kejujuran dalam komunikasi. Al-Qur'an menegaskan pentingnya menjaga kejujuran dalam setiap perkataan agar hubungan sosial dalam masyarakat tetap terjaga dengan baik. Sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Ahzab [33]: 70.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

[26] Deddy Mulyana, , *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*, Remaja Rosdakarya, 2018, hal. 118

[27] Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, RajaGrafindo Persada, 2016, hal. 156

[28] Morissan, *Teori Komunikasi Individu hingga Massa*, Kencana, 2015, hal. 241

"*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar*." (QS. Al-Ahzab [33]: 70).

Konsep komunikasi yang membangun kepercayaan juga ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang menempatkan kejujuran sebagai dasar utama dalam hubungan sosial.

Dalam konteks kepemimpinan, komunikasi yang jujur dan transparan akan memperkuat legitimasi kepemimpinan di mata masyarakat. Legitimasi kepemimpinan tidak hanya dibangun melalui struktur kekuasaan formal, tetapi juga melalui penerimaan masyarakat terhadap kepemimpinan tersebut. Ketika masyarakat percaya bahwa pemimpin berbicara dengan jujur dan bertindak dengan integritas, mereka akan lebih mudah menerima kebijakan yang diambil oleh pemimpin.

Selain itu, komunikasi juga berperan penting dalam membangun partisipasi masyarakat dalam kehidupan sosial. Pemimpin yang mampu berkomunikasi secara terbuka akan mendorong masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Partisipasi masyarakat ini merupakan salah satu indikator penting dalam terciptanya hubungan yang sehat antara pemimpin dan rakyat.

Dalam kehidupan sosial modern, kepercayaan publik juga berkaitan dengan transparansi dalam penyampaian informasi. Masyarakat menuntut pemimpin untuk memberikan informasi yang jelas mengenai kebijakan publik serta dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Transparansi komunikasi memungkinkan masyarakat memahami alasan di balik suatu kebijakan sehingga mereka dapat memberikan dukungan yang rasional terhadap kepemimpinan yang ada.[29]

Selain membangun kepercayaan, komunikasi yang baik juga dapat mencegah munculnya kesalahpahaman antara pemimpin dan masyarakat. Banyak konflik sosial dalam masyarakat muncul akibat kurangnya komunikasi yang terbuka antara pemimpin dan rakyat. Ketika komunikasi berjalan secara transparan dan dialogis, potensi konflik sosial dapat diminimalkan karena masyarakat merasa dilibatkan dalam proses komunikasi.

Komunikasi dalam kepemimpinan Qur'ani tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian pesan, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam membangun kepercayaan sosial dalam masyarakat. Komunikasi yang jujur, transparan, dan bertanggung jawab akan memperkuat legitimasi kepemimpinan serta menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara pemimpin dan rakyat. Oleh karena itu, komunikasi yang berlandaskan nilai-nilai Qur'ani menjadi fondasi penting dalam membangun kepemimpinan yang amanah dan dipercaya oleh masyarakat.

---

[29] Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi,* Remaja Rosdakarya, 2015, hal. 212

3. Komunikasi sebagai Sarana Rekonsiliasi Sosial

Dalam perspektif kepemimpinan Qur'ani, komunikasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi antara pemimpin dan masyarakat, tetapi juga memiliki peran strategis sebagai instrumen rekonsiliasi sosial. Kehidupan masyarakat yang plural sering kali diwarnai oleh perbedaan pandangan, kepentingan, dan aspirasi yang berpotensi menimbulkan konflik sosial. Dalam situasi seperti ini, komunikasi yang dilakukan oleh pemimpin memiliki peran penting dalam meredakan ketegangan serta membangun kembali hubungan sosial yang harmonis di tengah masyarakat. Oleh karena itu, komunikasi kepemimpinan harus diarahkan pada upaya menciptakan dialog yang konstruktif sehingga konflik yang muncul dapat diselesaikan melalui pendekatan yang bijaksana.[30]

Dalam kajian komunikasi sosial, konflik sering kali muncul akibat kegagalan komunikasi antara kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan berbeda. Kurangnya dialog yang terbuka dapat memperkuat prasangka sosial serta memperbesar jarak antara kelompok yang berkonflik. Oleh karena itu, komunikasi yang efektif sangat diperlukan untuk menjembatani perbedaan tersebut dan menciptakan ruang dialog yang memungkinkan tercapainya kesepahaman bersama. Pemimpin memiliki tanggung jawab moral untuk menggunakan komunikasi sebagai sarana membangun rekonsiliasi sosial sehingga konflik tidak berkembang menjadi perpecahan yang lebih luas dalam masyarakat.[31]

Dalam perspektif Al-Qur'an, rekonsiliasi sosial merupakan nilai penting yang harus dijaga dalam kehidupan masyarakat. Al-Qur'an mendorong umat manusia untuk menyelesaikan konflik melalui jalan perdamaian dan dialog yang adil. Allah SWT berfirman:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

"Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.." (QS. An-Nisa' [4]: 128).

Ayat ini menunjukkan bahwa penyelesaian konflik melalui jalan damai merupakan prinsip utama dalam etika sosial Islam. Perdamaian dalam masyarakat tidak dapat tercapai tanpa adanya komunikasi yang baik antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik.

---

[30] Liliweri, *Komunikasi Antarbudaya*, Pustaka Pelajar, 2013, hal. 221

[31] Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, Remaja Rosdakarya, 2015, hal. 256

Dalam tafsirnya, Ibn Katsir menjelaskan bahwa ayat ini menekankan pentingnya upaya perdamaian dalam hubungan sosial manusia. Menurutnya, penyelesaian konflik melalui dialog dan musyawarah merupakan cara yang paling baik untuk menjaga keharmonisan dalam kehidupan masyarakat.[32]

Selain itu, Al-Qur'an juga menekankan pentingnya peran pemimpin dalam menjaga persatuan masyarakat. Pemimpin memiliki tanggung jawab untuk mencegah terjadinya perpecahan sosial yang dapat merusak stabilitas kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, komunikasi yang dilakukan oleh pemimpin harus diarahkan pada upaya memperkuat persatuan serta menghindari narasi yang dapat memicu konflik di tengah masyarakat.

Komunikasi yang berorientasi pada rekonsiliasi sosial juga harus mengedepankan prinsip keadilan dan empati terhadap berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemimpin yang mampu memahami berbagai kepentingan sosial dalam masyarakat akan lebih mudah menciptakan komunikasi yang inklusif dan tidak memihak pada kelompok tertentu. Pendekatan komunikasi semacam ini memungkinkan terciptanya hubungan sosial yang lebih harmonis dalam masyarakat yang plural.

Dalam konteks kepemimpinan, komunikasi yang bersifat rekonsiliasi juga berkaitan dengan kemampuan pemimpin dalam meredakan konflik melalui pendekatan yang persuasif. Pemimpin yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik dapat membantu mengurangi ketegangan sosial dengan memberikan penjelasan yang rasional serta menenangkan masyarakat yang sedang mengalami konflik.

Prinsip komunikasi yang menenangkan ini sejalan dengan nilai kelembutan dalam komunikasi yang diajarkan oleh Al-Qur'an. Allah SWT berfirman:

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا

"Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut." (QS. Ṭāhā [20]: 44).

Ayat ini menunjukkan bahwa komunikasi yang lembut memiliki kekuatan besar dalam mempengaruhi sikap manusia. Dalam konteks konflik sosial, pendekatan komunikasi yang lembut dapat membantu meredakan ketegangan dan membuka ruang dialog yang lebih konstruktif.

Dalam tafsirnya, Al-Qurṭubi menjelaskan bahwa perintah untuk berbicara dengan lembut menunjukkan bahwa pendekatan komunikasi yang bijaksana lebih efektif dalam mempengaruhi manusia dibandingkan dengan pendekatan yang keras dan konfrontatif.[33]

---

[32] Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Dar Tayyibah, 2002, jilid 2, hal. 354

[33] Al-Qurṭubi, *Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*, Muassasah al-Risalah, 2016, jilid 11, hal. 220

Dalam kehidupan masyarakat modern, komunikasi rekonsiliatif juga menjadi salah satu strategi penting dalam penyelesaian konflik sosial. Banyak konflik yang dapat diselesaikan melalui dialog yang terbuka dan komunikasi yang menghargai perbedaan pandangan. Oleh karena itu, pemimpin memiliki peran penting dalam menciptakan ruang komunikasi yang memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi mereka secara damai.

Komunikasi sebagai sarana rekonsiliasi sosial merupakan salah satu prinsip penting dalam komunikasi kepemimpinan Qur'ani. Komunikasi yang berorientasi pada perdamaian, dialog, dan empati dapat membantu menjaga harmoni sosial dalam masyarakat. Melalui komunikasi yang bijaksana, pemimpin dapat meredakan konflik sosial serta memperkuat persatuan dalam kehidupan masyarakat yang plural.

4. Komunikasi sebagai Manifestasi Keteladanan Kepemimpinan

Dalam perspektif kepemimpinan Qur'ani, komunikasi tidak hanya dipahami sebagai proses penyampaian pesan antara pemimpin dan masyarakat, tetapi juga sebagai cerminan dari karakter dan keteladanan moral seorang pemimpin. Setiap ucapan yang disampaikan oleh pemimpin memiliki pengaruh yang besar terhadap sikap dan perilaku masyarakat karena pemimpin sering dijadikan sebagai figur rujukan dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, komunikasi yang dilakukan oleh pemimpin harus mencerminkan nilai-nilai moral yang luhur agar dapat menjadi teladan bagi masyarakat. Keteladanan dalam komunikasi merupakan salah satu unsur penting dalam membangun kepemimpinan yang berintegritas dan dipercaya oleh masyarakat.[34]

Dalam kajian kepemimpinan, keteladanan merupakan salah satu faktor utama yang menentukan efektivitas seorang pemimpin dalam mempengaruhi pengikutnya. Pemimpin yang mampu menunjukkan konsistensi antara ucapan dan tindakan akan lebih mudah memperoleh kepercayaan dan penghormatan dari masyarakat. Sebaliknya, pemimpin yang tidak mampu menjaga keselarasan antara apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan akan kehilangan legitimasi moral di mata masyarakat. Oleh karena itu, komunikasi pemimpin harus mencerminkan integritas pribadi yang kuat agar dapat menjadi teladan yang baik dalam kehidupan sosial.[35]

Konsep keteladanan dalam kepemimpinan juga sangat ditekankan dalam ajaran Islam. Al-Qur'an menempatkan keteladanan sebagai salah satu prinsip utama dalam kepemimpinan moral yang mampu membimbing masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik. Pemimpin yang ideal bukan hanya yang mampu mengatur masyarakat melalui kekuasaan, tetapi juga yang mampu memberikan contoh yang baik melalui perilaku dan komunikasinya.

---

[34] Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, RajaGrafindo Persada, 2016, hal. 94

[35] Rivai, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, RajaGrafindo Persada, 2018, hal. 219

Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

"Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah." (QS. Al-Ahzab [33]: 21).

Ibn Katsir menjelaskan bahwa ayat ini menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW merupakan teladan terbaik dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam cara berkomunikasi dengan masyarakat. Rasulullah dikenal sebagai pemimpin yang selalu berbicara dengan jujur, lembut, dan penuh hikmah sehingga masyarakat merasa dihargai dan didengar.[36] Ayat ini menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam Islam sangat erat kaitannya dengan keteladanan moral. Rasulullah SAW menjadi contoh utama dalam bagaimana seorang pemimpin harus berbicara, bertindak, dan berinteraksi dengan masyarakat.

Keteladanan dalam komunikasi juga berkaitan dengan kemampuan pemimpin untuk menjaga konsistensi antara ucapan dan tindakan. Dalam kehidupan sosial, masyarakat cenderung menilai pemimpin tidak hanya dari apa yang mereka katakan, tetapi juga dari bagaimana mereka menjalankan apa yang mereka sampaikan. Ketika seorang pemimpin mampu menunjukkan keselarasan antara kata dan perbuatan, komunikasi yang disampaikannya akan memiliki kekuatan moral yang lebih besar.

Al-Qur'an memberikan peringatan keras terhadap perilaku yang tidak konsisten antara ucapan dan tindakan. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan?" (QS. As-Saff [61]: 2).

Ayat ini menunjukkan bahwa ketidaksesuaian antara ucapan dan tindakan merupakan perilaku yang tidak disukai dalam ajaran Islam. Dalam konteks kepemimpinan, ketidakkonsistenan semacam ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin.

Dalam tafsirnya, Al-Qurṭubi menjelaskan bahwa ayat ini merupakan teguran bagi manusia agar menjaga keselarasan antara perkataan dan perbuatan. Menurutnya, seseorang yang mengatakan sesuatu tetapi tidak melaksanakannya telah merusak integritas moralnya di hadapan masyarakat.[37]

Dalam konteks komunikasi kepemimpinan, keteladanan juga berkaitan dengan cara pemimpin menyampaikan pesan kepada masyarakat. Pemimpin

[36] Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Dar Tayyibah, 2002, jilid 6, hal. 392

[37] Al-Qurṭubi, *Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*, Muassasah al-Risalah, 2016, jilid 18, hal. 92

yang mampu berkomunikasi dengan penuh empati, kejujuran, dan tanggung jawab akan menciptakan hubungan sosial yang lebih harmonis dengan masyarakat. Komunikasi yang mencerminkan nilai keteladanan tidak hanya mempengaruhi pikiran masyarakat, tetapi juga dapat membentuk sikap dan perilaku mereka.

Selain itu, komunikasi yang mencerminkan keteladanan moral juga dapat memperkuat legitimasi kepemimpinan. Legitimasi kepemimpinan tidak hanya dibangun melalui struktur kekuasaan formal, tetapi juga melalui pengakuan moral masyarakat terhadap integritas pemimpin. Ketika masyarakat melihat bahwa pemimpin mereka berbicara dengan jujur dan bertindak sesuai dengan ucapannya, mereka akan lebih mudah menerima kepemimpinan tersebut.

Dalam kehidupan sosial modern, keteladanan komunikasi juga memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas hubungan antara pemimpin dan masyarakat. Banyak konflik sosial muncul akibat komunikasi pemimpin yang tidak mencerminkan nilai kejujuran dan tanggung jawab moral. Oleh karena itu, komunikasi yang berlandaskan keteladanan moral menjadi sangat penting dalam menjaga keharmonisan masyarakat.

Komunikasi sebagai manifestasi keteladanan kepemimpinan menunjukkan bahwa komunikasi pemimpin tidak hanya berfungsi sebagai alat penyampaian pesan, tetapi juga sebagai cerminan karakter moral pemimpin itu sendiri. Pemimpin yang mampu menjaga integritas komunikasi serta menunjukkan konsistensi antara ucapan dan tindakan akan menjadi teladan bagi masyarakat. Melalui komunikasi yang beretika dan penuh tanggung jawab, pemimpin dapat membangun hubungan sosial yang lebih kuat serta menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih adil dan harmonis.

C. Model Komunikasi Pemimpin Qur'ani

1. Fondasi Model: Etika Komunikasi Qur'ani

Model komunikasi pemimpin Qur'ani dibangun di atas fondasi etika komunikasi yang bersumber dari nilai-nilai wahyu dalam Al-Qur'an. Etika komunikasi ini menjadi landasan utama yang membimbing bagaimana seorang pemimpin berbicara, menyampaikan pesan, dan berinteraksi dengan masyarakat. Dalam perspektif Qur'ani, komunikasi tidak hanya dipahami sebagai aktivitas penyampaian informasi, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral yang harus dijalankan dengan penuh kesadaran etis. Oleh karena itu, komunikasi pemimpin tidak boleh dilepaskan dari nilai-nilai spiritual yang menuntun manusia untuk berkata benar, adil, dan penuh hikmah. Fondasi etika komunikasi Qur'ani ini memberikan kerangka normatif yang membedakan

komunikasi kepemimpinan dalam Islam dari paradigma komunikasi yang hanya berorientasi pada efektivitas retorika semata.[38]

Salah satu prinsip penting dalam komunikasi Qur'ani adalah penghormatan terhadap martabat manusia. Al-Qur'an menempatkan manusia sebagai makhluk yang dimuliakan oleh Allah, sehingga setiap bentuk komunikasi harus mencerminkan penghormatan terhadap nilai kemanusiaan tersebut. Dalam konteks kepemimpinan, pemimpin harus menggunakan bahasa yang santun dan menghargai masyarakat yang dipimpinnya. Komunikasi yang menghormati martabat manusia tidak hanya memperkuat hubungan sosial antara pemimpin dan rakyat, tetapi juga menciptakan suasana dialog yang lebih terbuka dalam kehidupan masyarakat.[39] Prinsip penghormatan terhadap martabat manusia ini tercermin dalam konsep *qaulan karīman*, yaitu komunikasi yang dilakukan dengan penuh penghargaan dan kelembutan.

Selain *qaulan karīman*, Al-Qur'an juga mengajarkan konsep *qaulan ma'rūfan* sebagai prinsip komunikasi yang sesuai dengan norma sosial dan nilai kebaikan dalam masyarakat. Komunikasi yang *ma'rūf* berarti komunikasi yang tidak menimbulkan konflik atau ketegangan sosial, tetapi justru membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Prinsip ini menegaskan bahwa komunikasi pemimpin harus memperhatikan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik.[40]

Selain itu, etika komunikasi Qur'ani juga menekankan pentingnya kejujuran dalam komunikasi melalui konsep *qaulan sadīdan*. Konsep ini menegaskan bahwa setiap ucapan yang disampaikan harus didasarkan pada kebenaran dan integritas moral.

Prinsip berikutnya dalam etika komunikasi Qur'ani adalah *qaulan layyinan*, yaitu komunikasi yang dilakukan dengan kelembutan dan pendekatan persuasif. Konsep ini menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif tidak selalu harus dilakukan dengan cara yang keras atau konfrontatif. Sebaliknya, komunikasi yang lembut sering kali lebih mampu menyentuh hati manusia dan membuka ruang dialog yang konstruktif.

Selain kelembutan, Al-Qur'an juga menekankan pentingnya komunikasi yang efektif dan mampu menyampaikan pesan secara jelas melalui konsep *qaulan balīghan*. Komunikasi yang *balīgh* berarti komunikasi yang mampu menyentuh hati dan mempengaruhi pemahaman masyarakat sehingga pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik.

Lima prinsip komunikasi Qur'ani meliputi *qaulan karīman, qaulan ma'rūfan, qaulan sadīdan, qaulan layyinan, dan qaulan balīghan* ini menjadi fondasi etika dalam model komunikasi pemimpin Qur'ani. Prinsip-prinsip

---

[38] M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Mizan, 2017, hal. 312
[39] Abudin Nata, A., *Akhlak Tasawuf*, RajaGrafindo Persada, 2016, hal. 184
[40] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Lentera Hati, 2015, jilid 1, hal. 488

tersebut menunjukkan bahwa komunikasi kepemimpinan dalam Islam tidak hanya menekankan efektivitas penyampaian pesan, tetapi juga mengintegrasikan nilai moral, spiritual, dan sosial dalam proses komunikasi. Melalui fondasi etika ini, komunikasi pemimpin dapat berfungsi sebagai sarana membangun hubungan yang adil, harmonis, dan bermartabat antara pemimpin dan masyarakat.

2. Struktur Model Komunikasi Pemimpin Qur'ani

a. Dimensi Etika

Dimensi etika merupakan fondasi utama dalam struktur model komunikasi pemimpin Qur'ani. Dalam perspektif Al-Qur'an, komunikasi tidak hanya dipahami sebagai proses penyampaian pesan antara pemimpin dan masyarakat, tetapi juga sebagai tindakan moral yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, komunikasi pemimpin harus berlandaskan nilai-nilai etika yang menuntun pemimpin untuk berkata jujur, adil, dan bijaksana dalam setiap interaksi dengan masyarakat. Dimensi etika ini menempatkan komunikasi sebagai bagian dari amanah kepemimpinan yang harus dijalankan dengan integritas moral yang tinggi.[41]

Dalam model komunikasi pemimpin Qur'ani, dimensi etika berfungsi sebagai landasan normatif yang mengarahkan seluruh proses komunikasi kepemimpinan. Tanpa landasan etika yang kuat, komunikasi dapat berubah menjadi alat manipulasi yang hanya bertujuan mempertahankan kekuasaan. Oleh karena itu, Al-Qur'an menekankan bahwa setiap bentuk komunikasi harus didasarkan pada prinsip kebenaran dan tanggung jawab moral. Komunikasi yang beretika memungkinkan pemimpin membangun hubungan yang sehat dengan masyarakat karena masyarakat merasa dihargai dan diperlakukan secara adil.[42]

Salah satu unsur penting dalam dimensi etika komunikasi Qur'ani adalah integritas moral dalam berbicara. Integritas komunikasi berarti kesesuaian antara apa yang disampaikan oleh pemimpin dengan kenyataan yang terjadi dalam praktik kepemimpinan. Pemimpin yang memiliki integritas komunikasi akan menjaga konsistensi antara ucapan dan tindakan sehingga masyarakat dapat mempercayai pesan yang disampaikan. Dalam konteks kepemimpinan, integritas komunikasi menjadi faktor penting dalam menjaga legitimasi moral pemimpin di mata masyarakat.[43]

Selain kejujuran, dimensi etika komunikasi Qur'ani juga menekankan pentingnya tanggung jawab dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Pemimpin tidak boleh menyampaikan informasi yang

---

[41] Abudin Nata, *Akhlak Tasawuf*, RajaGrafindo Persada, 2016, hal. 205

[42] M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Mizan, 2017, hal. 336

[43] Rivai, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, RajaGrafindo Persada, 2018, hal. 271

menyesatkan atau menyembunyikan fakta yang berkaitan dengan kepentingan publik. Tanggung jawab komunikasi ini menjadi bagian dari amanah kepemimpinan yang harus dijalankan dengan penuh kesadaran moral.[44]

Prinsip tanggung jawab dalam komunikasi juga ditegaskan dalam ajaran Islam melalui konsep amanah. Pemimpin dipandang sebagai penjaga amanah masyarakat yang harus menyampaikan informasi secara benar dan adil. Komunikasi yang bertanggung jawab akan membantu masyarakat memahami kebijakan yang diambil oleh pemimpin sehingga tercipta hubungan sosial yang lebih transparan dan partisipatif.

Dalam konteks kepemimpinan modern, dimensi etika komunikasi juga berkaitan dengan transparansi dalam penyampaian kebijakan publik. Transparansi komunikasi memungkinkan masyarakat mengetahui alasan di balik kebijakan yang diambil oleh pemimpin serta dampaknya terhadap kehidupan sosial. Dengan komunikasi yang transparan, masyarakat dapat membangun kepercayaan yang lebih kuat terhadap kepemimpinan yang ada.[45]

Dimensi etika dalam komunikasi kepemimpinan juga mencakup sikap empati terhadap masyarakat. Pemimpin yang memiliki empati akan berusaha memahami kondisi sosial masyarakat sebelum menyampaikan pesan atau kebijakan tertentu. Empati dalam komunikasi memungkinkan pemimpin berbicara dengan cara yang lebih manusiawi dan menghargai perasaan masyarakat.

Selain itu, komunikasi yang beretika juga mengharuskan pemimpin untuk menghindari bahasa yang kasar, merendahkan, atau memicu konflik sosial. Al-Qur'an mengajarkan bahwa komunikasi harus dilakukan dengan cara yang baik dan penuh penghormatan terhadap orang lain agar hubungan sosial tetap terjaga dengan harmonis.

Dimensi etika komunikasi Qur'ani pada akhirnya menempatkan komunikasi sebagai bagian dari akhlak kepemimpinan. Pemimpin yang berakhlak baik akan menjadikan komunikasi sebagai sarana membangun hubungan yang adil dan penuh kepercayaan dengan masyarakat.

Dimensi etika dalam model komunikasi pemimpin Qur'ani menegaskan bahwa komunikasi kepemimpinan harus dilandasi oleh integritas moral, kejujuran, dan tanggung jawab publik. Dimensi ini menjadi fondasi utama yang memastikan bahwa komunikasi pemimpin tidak hanya efektif secara retoris, tetapi juga memiliki nilai moral yang mampu membangun kepercayaan dan keadilan dalam kehidupan masyarakat.

b. Dimensi Relasi Sosial

---

[44] Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*, Remaja Rosdakarya, 2018, hal. 143

[45] Morissan, *Teori Komunikasi Individu hingga Massa*, Kencana, 2015, hal. 266

Dimensi relasi sosial merupakan salah satu unsur penting dalam struktur model komunikasi pemimpin Qur'ani karena komunikasi kepemimpinan pada hakikatnya tidak hanya berkaitan dengan penyampaian pesan, tetapi juga dengan pembentukan hubungan sosial antara pemimpin dan masyarakat. Dalam perspektif Al-Qur'an, kepemimpinan selalu berada dalam kerangka relasi sosial yang menuntut adanya interaksi yang adil, terbuka, dan penuh tanggung jawab antara pemimpin dan rakyat. Oleh karena itu, komunikasi pemimpin harus diarahkan pada upaya membangun hubungan sosial yang harmonis sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang stabil dan berkeadaban.[46]

Relasi sosial yang sehat antara pemimpin dan masyarakat sangat dipengaruhi oleh kualitas komunikasi yang dibangun dalam kehidupan publik. Komunikasi yang terbuka dan dialogis memungkinkan terjadinya pertukaran gagasan antara pemimpin dan rakyat sehingga kebijakan yang diambil dapat mencerminkan aspirasi masyarakat secara lebih luas. Dalam konteks ini, komunikasi tidak hanya berfungsi sebagai alat penyampaian keputusan, tetapi juga sebagai sarana membangun partisipasi masyarakat dalam kehidupan sosial dan politik.[47]

Salah satu unsur utama dalam dimensi relasi sosial adalah pembangunan kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin. Kepercayaan sosial merupakan fondasi penting dalam hubungan kepemimpinan karena legitimasi seorang pemimpin tidak hanya ditentukan oleh kekuasaan formal, tetapi juga oleh tingkat kepercayaan publik terhadap integritas dan komitmen moral pemimpin tersebut. Komunikasi yang jujur dan transparan menjadi faktor utama dalam membangun kepercayaan sosial tersebut.[48]

Dalam perspektif Qur'ani, relasi sosial antara pemimpin dan masyarakat harus dibangun di atas nilai keadilan dan persaudaraan. Al-Qur'an menegaskan pentingnya menjaga persatuan dan menghindari perpecahan dalam kehidupan masyarakat. Allah SWT berfirman:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

"Berpegangteguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, janganlah bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. (Ingatlah pula ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah

---

[46]M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Mizan, 2017, hal. 341

[47] Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*, Remaja Rosdakarya, 2018, hal. 152

[48] Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, Remaja Rosdakarya, 2015, hal. 230

menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk..” (QS. Ali ‘Imran [3]: 103).

Ayat ini menunjukkan bahwa menjaga persatuan merupakan prinsip penting dalam kehidupan sosial umat manusia.

Dalam tafsirnya, Al-Qurṭubi menjelaskan bahwa ayat ini menekankan pentingnya menjaga kesatuan masyarakat melalui hubungan sosial yang didasarkan pada nilai kebenaran dan keadilan. Menurutnya, perpecahan dalam masyarakat sering kali muncul akibat hilangnya komunikasi yang sehat antara kelompok sosial yang berbeda.[49]

Dimensi relasi sosial dalam komunikasi pemimpin Qur’ani juga menekankan pentingnya membangun kohesi sosial dalam masyarakat. Kohesi sosial merupakan kondisi di mana masyarakat memiliki rasa kebersamaan dan solidaritas yang kuat dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan sosial. Komunikasi pemimpin memiliki peran penting dalam memperkuat kohesi sosial karena pesan yang disampaikan oleh pemimpin dapat mempengaruhi cara masyarakat memandang hubungan mereka dengan kelompok lain dalam masyarakat.[50]

Selain membangun kohesi sosial, komunikasi pemimpin juga harus mampu menjembatani berbagai perbedaan pandangan yang ada dalam masyarakat. Masyarakat yang plural sering kali memiliki beragam aspirasi dan kepentingan yang tidak selalu sejalan satu sama lain. Oleh karena itu, komunikasi pemimpin harus bersifat inklusif agar mampu merangkul seluruh kelompok sosial tanpa memihak pada kepentingan tertentu.

Dalam kajian komunikasi politik, komunikasi inklusif dipandang sebagai salah satu strategi penting dalam menjaga stabilitas hubungan antara pemimpin dan masyarakat. Komunikasi yang inklusif memungkinkan semua kelompok masyarakat merasa dihargai dan dilibatkan dalam proses komunikasi publik sehingga potensi konflik sosial dapat diminimalkan.[51]

Penelitian akademik juga menunjukkan bahwa komunikasi yang transparan dan partisipatif dapat memperkuat hubungan antara pemimpin dan masyarakat. Studi dalam jurnal komunikasi sosial menegaskan bahwa pemimpin yang membangun komunikasi dialogis dengan masyarakat cenderung memperoleh tingkat kepercayaan publik yang lebih tinggi dibandingkan pemimpin yang menggunakan komunikasi satu arah.[52]

---

[49] Al-Qurṭubi, *Al-Jāmi‘ li Aḥkām al-Qur’ān*, Muassasah al-Risalah, 2016, jilid 4, hal. 165

[50] Liliweri, *Komunikasi Antarbudaya*, Pustaka Pelajar, 2013, hal. 248

[51] Hafied Cangara, , *Komunikasi Politik*, RajaGrafindo Persada, 2019, hal. 174

[52] Sari, “*Komunikasi Kepemimpinan dalam Membangun Kepercayaan Publik”*, Jurnal Komunikasi Islam, 2021, hal. 89

Selain itu, penelitian lain dalam kajian komunikasi politik menunjukkan bahwa komunikasi pemimpin yang menekankan dialog dan keterbukaan dapat memperkuat kohesi sosial dalam masyarakat yang plural. Komunikasi yang bersifat dialogis memungkinkan masyarakat merasa menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan sehingga mereka lebih mudah menerima kebijakan yang diambil oleh pemimpin.[53]

Dimensi relasi sosial dalam model komunikasi pemimpin Qur'ani pada akhirnya menempatkan komunikasi sebagai sarana membangun hubungan sosial yang adil dan harmonis antara pemimpin dan masyarakat. Komunikasi yang berorientasi pada pembangunan relasi sosial tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan pesan, tetapi juga untuk memperkuat rasa kebersamaan dalam kehidupan masyarakat.

Dimensi relasi sosial dalam model komunikasi pemimpin Qur'ani menegaskan bahwa komunikasi kepemimpinan harus diarahkan pada upaya membangun kepercayaan masyarakat, menjaga kohesi sosial, serta memperkuat hubungan antara pemimpin dan rakyat. Melalui komunikasi yang berorientasi pada relasi sosial yang sehat, pemimpin dapat menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih harmonis, partisipatif, dan berkeadaban.

c. Dimensi Transformasi Sosial

Dimensi transformasi sosial merupakan unsur ketiga dalam struktur model komunikasi pemimpin Qur'ani yang menempatkan komunikasi sebagai sarana perubahan sosial menuju kehidupan masyarakat yang lebih adil dan berkeadaban. Dalam perspektif Al-Qur'an, komunikasi tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan informasi atau menjaga hubungan sosial, tetapi juga memiliki peran penting dalam membimbing masyarakat menuju nilai-nilai kebaikan dan perbaikan moral. Oleh karena itu, komunikasi pemimpin harus diarahkan pada upaya membangun perubahan sosial yang konstruktif sehingga masyarakat dapat berkembang menuju tatanan sosial yang lebih baik.[54]

Dalam kerangka kepemimpinan Islam, transformasi sosial merupakan bagian dari misi moral yang harus dijalankan oleh pemimpin. Pemimpin tidak hanya bertugas menjaga stabilitas sosial, tetapi juga mendorong masyarakat untuk memperbaiki kualitas kehidupan mereka melalui nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Komunikasi menjadi instrumen utama dalam proses transformasi tersebut karena melalui komunikasi pemimpin dapat menyampaikan visi perubahan kepada masyarakat serta menggerakkan mereka untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan sosial.[55]

---

[53] Ahmad Fauzi, "Etika Komunikasi Politik dalam Perspektif Islam", *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 2020, hal. 112

[54] M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Mizan, 2017, hal. 356

[55] Rivai, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, RajaGrafindo Persada, 2018, hal. 298

Al-Qur'an secara jelas menegaskan bahwa perubahan sosial dalam masyarakat sangat berkaitan dengan kesadaran moral manusia. Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri." (QS. Ar-Ra'd [13]: 11).

Ibn Katsir menjelaskan bahwa ayat ini menegaskan bahwa perubahan sosial merupakan hasil dari usaha manusia dalam memperbaiki kondisi moral dan spiritual mereka. Oleh karena itu, pemimpin memiliki tanggung jawab untuk membimbing masyarakat melalui komunikasi yang mampu menumbuhkan kesadaran moral dalam kehidupan sosial.[56] Ayat ini menunjukkan bahwa perubahan sosial tidak dapat terjadi tanpa adanya kesadaran kolektif dalam masyarakat. Dalam konteks kepemimpinan, komunikasi memiliki peran penting dalam membangun kesadaran tersebut sehingga masyarakat terdorong untuk melakukan perubahan menuju kehidupan yang lebih baik.

Dimensi transformasi sosial dalam komunikasi pemimpin Qur'ani juga berkaitan dengan kemampuan komunikasi untuk menggerakkan masyarakat menuju perubahan yang positif. Komunikasi yang efektif tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mampu membangkitkan kesadaran kolektif dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perubahan sosial. Oleh karena itu, komunikasi pemimpin harus mampu memberikan inspirasi dan motivasi kepada masyarakat agar mereka memiliki semangat untuk memperbaiki kondisi sosial di sekitarnya.[57]

Dalam kajian komunikasi Islam, transformasi sosial juga berkaitan dengan fungsi dakwah sebagai proses komunikasi yang bertujuan membawa manusia kepada nilai-nilai kebaikan. Komunikasi dakwah tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian pesan keagamaan, tetapi juga sebagai sarana membangun kesadaran sosial yang mendorong masyarakat untuk memperbaiki perilaku dan sistem kehidupan mereka.[58]

Darwis Hude juga menegaskan bahwa Al-Qur'an mengandung prinsip-prinsip komunikasi yang memiliki kekuatan transformasional dalam kehidupan manusia. Menurutnya, pesan-pesan Qur'ani tidak hanya berfungsi sebagai ajaran normatif, tetapi juga sebagai pedoman yang mampu membentuk

---

[56] Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Dar Tayyibah, 2002, jilid 4, hal. 438
[57] Morissan, *Teori Komunikasi Individu hingga Massa*, Kencana, 2015, hal. 273
[58] M. Abdul Aziz, *Ilmu Dakwah*, Kencana, 2017, hal. 92

kesadaran sosial dan peradaban manusia melalui komunikasi yang sarat dengan nilai moral dan spiritual.[59]

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa komunikasi dalam perspektif Qur'ani memiliki dimensi perubahan yang sangat kuat karena pesan yang disampaikan tidak hanya mempengaruhi pemikiran manusia, tetapi juga membentuk sikap dan perilaku mereka dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, komunikasi pemimpin harus mampu menyampaikan nilai-nilai moral yang dapat mendorong masyarakat menuju kehidupan yang lebih beradab.

Selain itu, komunikasi yang bersifat transformasional juga berkaitan dengan kemampuan pemimpin dalam menyampaikan visi masa depan kepada masyarakat. Pemimpin yang memiliki visi yang jelas akan mampu menggerakkan masyarakat untuk bersama-sama membangun perubahan sosial yang lebih baik. Komunikasi visi ini menjadi penting karena masyarakat membutuhkan arah yang jelas dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan sosial.

Dalam kajian komunikasi kepemimpinan, komunikasi transformasional dipandang sebagai kemampuan pemimpin untuk memotivasi masyarakat melalui nilai-nilai moral dan tujuan bersama yang lebih tinggi. Pemimpin yang mampu mengkomunikasikan visi perubahan dengan baik akan lebih mudah memperoleh dukungan masyarakat dalam menjalankan program pembangunan social.[60]

Penelitian dalam kajian komunikasi Islam juga menunjukkan bahwa komunikasi yang berlandaskan nilai-nilai Qur'ani dapat berfungsi sebagai kekuatan transformasi sosial yang mampu memperkuat kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Komunikasi yang demikian tidak hanya menciptakan perubahan dalam tingkat individu, tetapi juga dalam struktur kehidupan masyarakat.[61]

Dimensi transformasi sosial dalam model komunikasi pemimpin Qur'ani menempatkan komunikasi sebagai sarana strategis dalam membangun perubahan sosial yang berlandaskan nilai-nilai wahyu. Melalui komunikasi yang inspiratif, visioner, dan berorientasi pada nilai moral, pemimpin dapat menggerakkan masyarakat menuju kehidupan yang lebih adil, harmonis, dan berkeadaban. Dimensi ini menunjukkan bahwa komunikasi dalam kepemimpinan Qur'ani tidak hanya berfungsi menjaga hubungan sosial, tetapi juga menjadi kekuatan utama dalam membangun peradaban manusia.

---

[59] Darwis Hude, *Emosi: Penjelajahan Religio-Psikologis tentang Emosi Manusia di dalam Al-Qur'an*, Erlangga, 2016, hal. 211

[60] Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, RajaGrafindo Persada, 2016, hal. 133

[61] Rahman, "Nilai-Nilai Komunikasi Qur'ani dalam Transformasi Sosial", *Jurnal Komunikasi Islam*, 2022, hal. 77

3. Karakteristik Model Komunikasi Pemimpin Qur'ani

Karakteristik model komunikasi pemimpin Qur'ani dibangun atas landasan nilai-nilai wahyu yang menempatkan komunikasi sebagai bagian integral dari tanggung jawab moral dan spiritual dalam kepemimpinan. Dalam perspektif Al-Qur'an, komunikasi tidak hanya dipahami sebagai aktivitas pertukaran informasi, tetapi juga sebagai sarana membangun kehidupan sosial yang adil dan bermartabat. Oleh karena itu, model komunikasi pemimpin Qur'ani memiliki karakteristik yang membedakannya dari paradigma komunikasi kepemimpinan modern yang sering kali berorientasi pada strategi persuasi atau kepentingan kekuasaan semata. Model ini menempatkan komunikasi sebagai sarana membimbing masyarakat menuju nilai-nilai kebaikan yang berlandaskan wahyu.[62]

Karakteristik pertama dari model komunikasi pemimpin Qur'ani adalah berbasis wahyu dan nilai spiritual. Dalam Islam, komunikasi tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai ilahiah yang menjadi pedoman dalam kehidupan manusia. Al-Qur'an memberikan berbagai prinsip komunikasi yang menekankan kejujuran, kelembutan, serta penghormatan terhadap martabat manusia. Nilai-nilai ini menunjukkan bahwa komunikasi dalam kepemimpinan tidak hanya bertujuan menyampaikan pesan, tetapi juga membentuk kesadaran moral dalam masyarakat.[63] Karakteristik komunikasi yang berbasis wahyu ini menjadikan komunikasi pemimpin Qur'ani memiliki dimensi spiritual yang kuat. Setiap ucapan yang disampaikan oleh pemimpin dipandang sebagai bagian dari amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Kesadaran spiritual ini akan mendorong pemimpin untuk lebih berhati-hati dalam berbicara serta menghindari ucapan yang dapat merugikan masyarakat.

Karakteristik kedua dari model komunikasi pemimpin Qur'ani adalah berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Dalam perspektif Islam, kepemimpinan tidak bertujuan untuk memperkuat kekuasaan individu, tetapi untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, komunikasi pemimpin harus diarahkan pada upaya membangun kebaikan bersama serta menjaga keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat.[64] Komunikasi yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat juga menuntut pemimpin untuk memahami kebutuhan sosial masyarakat sebelum menyampaikan kebijakan tertentu. Pemimpin yang memahami kondisi sosial masyarakat akan mampu menyampaikan pesan yang lebih relevan dan dapat diterima oleh masyarakat secara luas. Dalam kajian komunikasi Islam, komunikasi yang berorientasi pada kemaslahatan sosial juga berkaitan dengan

---

[62] M. Quraisy Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Mizan, 2017, hal. 371
[63] Abudin Nata, *Akhlak Tasawuf*, RajaGrafindo Persada, 2016, hal. 226
[64] Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, RajaGrafindo Persada, 2016, hal. 144

prinsip dakwah yang bertujuan membawa manusia kepada nilai-nilai kebaikan. Komunikasi dakwah tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian pesan agama, tetapi juga sebagai sarana membangun kesadaran sosial yang mendorong masyarakat untuk memperbaiki kehidupan mereka.[65]

Karakteristik ketiga dari model komunikasi pemimpin Qur'ani adalah menempatkan komunikasi sebagai amanah moral dalam kepemimpinan. Dalam Islam, setiap pemimpin dipandang sebagai pemegang amanah yang harus menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh integritas. Komunikasi menjadi bagian dari amanah tersebut karena melalui komunikasi pemimpin menyampaikan informasi, kebijakan, serta nilai-nilai moral kepada masyarakat.

Model komunikasi pemimpin Qur'ani memiliki karakteristik yang khas, yaitu berbasis wahyu dan nilai spiritual, berorientasi pada kemaslahatan masyarakat, serta menempatkan komunikasi sebagai amanah moral dalam kepemimpinan. Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa komunikasi dalam kepemimpinan Qur'ani tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian pesan, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan moral dan peradaban sosial yang lebih adil dan berkeadaban.

D. Implikasi Model Komunikasi Pemimpin Qur'ani

1. Implikasi Teoretis

Model komunikasi pemimpin Qur'ani memiliki implikasi teoretis yang signifikan dalam pengembangan kajian komunikasi Islam, khususnya dalam upaya memperkaya perspektif keilmuan komunikasi dengan nilai-nilai wahyu. Selama ini, teori komunikasi yang berkembang dalam ilmu sosial modern sebagian besar dibangun di atas paradigma sekuler yang menekankan aspek rasionalitas instrumental dan efektivitas persuasi dalam proses komunikasi. Meskipun paradigma tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika komunikasi manusia, pendekatan tersebut sering kali belum mengintegrasikan dimensi moral dan spiritual secara komprehensif. Oleh karena itu, model komunikasi pemimpin Qur'ani memberikan kontribusi teoretis dengan menghadirkan kerangka komunikasi yang menggabungkan dimensi etika, spiritualitas, dan tanggung jawab sosial dalam praktik komunikasi kepemimpinan.[66]

Kontribusi teoretis model ini terletak pada upaya mengembangkan konsep komunikasi Islam yang bersumber langsung dari prinsip-prinsip Al-Qur'an. Dalam perspektif ini, komunikasi tidak hanya dipahami sebagai proses pertukaran pesan antara komunikator dan komunikan, tetapi juga sebagai

[65] M. Abdul Aiz, *Ilmu Dakwah*, Kencana, 2017, hal. 107

[66] Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*, Remaja Rosdakarya, 2018, hal. 167

sarana pembentukan nilai moral dalam kehidupan sosial. Konsep komunikasi Qur'ani seperti *qaulan karīman*, *qaulan ma'rūfan*, *qaulan sadīdan*, *qaulan layyinan*, *qaulan balīghan,* dan *qaulan maisuran* menunjukkan bahwa komunikasi memiliki dimensi etis yang kuat dalam membentuk hubungan sosial yang harmonis.[67]

Implikasi teoretis lainnya adalah integrasi antara kajian tafsir Al-Qur'an dengan teori komunikasi modern. Selama ini, kajian tafsir sering diposisikan sebagai disiplin ilmu yang fokus pada penafsiran teks keagamaan, sementara teori komunikasi berkembang dalam kerangka ilmu sosial yang lebih empiris. Model komunikasi pemimpin Qur'ani berupaya menjembatani kedua disiplin tersebut dengan mengintegrasikan nilai-nilai Qur'ani ke dalam kerangka teori komunikasi kontemporer. Integrasi ini memungkinkan konsep komunikasi dalam Al-Qur'an dipahami tidak hanya sebagai ajaran normatif, tetapi juga sebagai konsep yang memiliki relevansi dalam kajian komunikasi modern.[68]

Dalam kerangka teoretis ini, komunikasi Qur'ani dapat diposisikan sebagai paradigma alternatif dalam kajian komunikasi kepemimpinan. Paradigma ini menekankan bahwa komunikasi kepemimpinan tidak hanya berkaitan dengan efektivitas penyampaian pesan, tetapi juga dengan integritas moral komunikator dalam menyampaikan pesan tersebut. *Dengan demikian*, komunikasi pemimpin tidak hanya dinilai dari keberhasilannya mempengaruhi masyarakat, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan nilai-nilai etika yang diajarkan oleh wahyu.

Implikasi teoretis lain dari model komunikasi pemimpin Qur'ani adalah penguatan konsep komunikasi etis dalam kajian komunikasi Islam. Etika komunikasi menjadi elemen penting dalam model ini karena komunikasi dipandang sebagai tindakan moral yang memiliki konsekuensi sosial dan spiritual. Konsep ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori komunikasi yang lebih humanistik karena menempatkan nilai moral sebagai bagian integral dalam proses komunikasi.

Selain itu, model komunikasi pemimpin Qur'ani juga memperluas cakupan kajian komunikasi Islam yang selama ini lebih banyak berfokus pada komunikasi dakwah. Dengan mengkaji komunikasi dalam konteks kepemimpinan sosial, model ini membuka ruang bagi pengembangan teori komunikasi Islam yang lebih luas, termasuk dalam bidang komunikasi politik, komunikasi organisasi, dan komunikasi publik.

Implikasi teoretis dari model komunikasi pemimpin Qur'ani terletak pada kontribusinya dalam memperkaya khazanah teori komunikasi Islam melalui integrasi antara kajian tafsir Al-Qur'an dan teori komunikasi modern. Model ini tidak hanya memberikan perspektif baru dalam memahami

---

[67] M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Mizan, 2017, hal. 382

[68] Morissan, *Teori Komunikasi Individu hingga Massa*, Kencana, 2015, hal. 284

komunikasi kepemimpinan, tetapi juga membuka ruang bagi pengembangan paradigma komunikasi yang lebih beretika, humanistik, dan berlandaskan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sosial masyarakat.

2. Implikasi Sosial

Model komunikasi pemimpin Qur'ani memiliki implikasi sosial yang sangat penting dalam membangun hubungan yang harmonis antara pemimpin dan masyarakat. Dalam kehidupan sosial modern, komunikasi menjadi faktor utama yang menentukan kualitas relasi antara pemimpin dan rakyat. Ketika komunikasi pemimpin dilakukan secara terbuka, jujur, dan berlandaskan nilai moral, hubungan sosial antara pemimpin dan masyarakat akan terbentuk secara lebih kuat dan saling percaya. Oleh karena itu, model komunikasi pemimpin Qur'ani memberikan kontribusi penting dalam memperkuat relasi sosial yang sehat dalam kehidupan masyarakat.[69]

Salah satu implikasi sosial dari model komunikasi ini adalah terciptanya hubungan yang lebih dialogis antara pemimpin dan rakyat. Dalam komunikasi kepemimpinan Qur'ani, pemimpin tidak hanya berperan sebagai penyampai kebijakan kepada masyarakat, tetapi juga sebagai pendengar yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka. Komunikasi yang bersifat dialogis ini memungkinkan terciptanya hubungan sosial yang lebih partisipatif sehingga masyarakat merasa dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan publik.[70]

Implikasi sosial lain dari model komunikasi pemimpin Qur'ani adalah penguatan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan. Kepercayaan sosial merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas kehidupan masyarakat karena masyarakat cenderung lebih mudah menerima kebijakan yang diambil oleh pemimpin yang mereka percayai. Komunikasi yang jujur dan transparan akan membantu membangun kepercayaan tersebut sehingga hubungan antara pemimpin dan masyarakat menjadi lebih harmonis.[71]

Implikasi sosial berikutnya adalah pencegahan konflik sosial melalui komunikasi yang beretika. Dalam banyak kasus, konflik sosial dalam masyarakat sering kali dipicu oleh komunikasi yang tidak etis, seperti penyebaran informasi yang menyesatkan, ujaran kebencian, atau komunikasi yang provokatif. Model komunikasi pemimpin Qur'ani menekankan pentingnya komunikasi yang santun dan bertanggung jawab sehingga potensi konflik sosial dapat diminimalkan.[72]

---

[69] Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar,* Remaja Rosdakarya, 2018, hal. 174

[70] Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, RajaGrafindo Persada, 2016, hal. 189

[71] Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, Remaja Rosdakarya, 2015, hal. 244

[72] Liliweri, *Komunikasi Antarbudaya*, Pustaka Pelajar, 2013, hal. 264

Dalam kerangka komunikasi Qur'ani, pemimpin memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sosial melalui komunikasi yang bijaksana. Komunikasi yang dilakukan oleh pemimpin dapat mempengaruhi cara masyarakat memandang hubungan mereka dengan kelompok lain dalam masyarakat. Oleh karena itu, pemimpin harus berhati-hati dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat agar komunikasi tersebut tidak memicu ketegangan sosial.

Implikasi sosial dari model komunikasi pemimpin Qur'ani terletak pada kemampuannya dalam memperkuat hubungan antara pemimpin dan rakyat serta mencegah konflik sosial melalui komunikasi yang beretika. Komunikasi yang berlandaskan nilai-nilai Qur'ani mampu menciptakan kehidupan sosial yang lebih harmonis karena menekankan kejujuran, keadilan, serta penghormatan terhadap martabat manusia dalam setiap interaksi sosial.

3. Implikasi Kepemimpinan

Model komunikasi pemimpin Qur'ani memiliki implikasi yang sangat penting terhadap pembentukan karakter kepemimpinan yang amanah dalam kehidupan sosial. Dalam perspektif Al-Qur'an, kepemimpinan bukan sekadar posisi kekuasaan yang memberikan kewenangan kepada seseorang untuk mengatur masyarakat, tetapi merupakan tanggung jawab moral yang harus dijalankan dengan penuh integritas. Oleh karena itu, komunikasi yang dilakukan oleh pemimpin menjadi bagian penting dalam membentuk karakter kepemimpinan yang mencerminkan nilai-nilai amanah, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Melalui komunikasi yang beretika, pemimpin dapat menunjukkan komitmen moralnya dalam menjalankan amanah kepemimpinan.[73]

Implikasi kepemimpinan yang pertama dari model komunikasi Qur'ani adalah terbentuknya karakter pemimpin yang berintegritas dalam berkomunikasi dengan masyarakat. Integritas komunikasi berarti kesesuaian antara ucapan dan tindakan seorang pemimpin dalam kehidupan sosial. Pemimpin yang memiliki integritas komunikasi akan menjaga kejujuran dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat serta menghindari segala bentuk manipulasi informasi yang dapat merugikan kepentingan publik. Integritas ini menjadi dasar penting dalam membangun kepemimpinan yang dipercaya oleh masyarakat.[74]

Implikasi kepemimpinan berikutnya adalah menjadikan komunikasi sebagai instrumen utama dalam membangun transformasi sosial dalam masyarakat. Dalam model komunikasi pemimpin Qur'ani, komunikasi tidak hanya digunakan untuk menyampaikan kebijakan, tetapi juga untuk

[73] Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan,* RajaGrafindo Persada, 2016, hal. 158

[74] Rivai, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, RajaGrafindo Persada, 2018, hal. 311

membimbing masyarakat menuju perubahan sosial yang lebih baik. Melalui komunikasi yang inspiratif dan berlandaskan nilai moral, pemimpin dapat menggerakkan masyarakat untuk bersama-sama membangun kehidupan sosial yang lebih adil dan berkeadaban.[75]

Dalam konteks kepemimpinan transformasional, komunikasi memiliki peran penting dalam membangun visi perubahan yang dapat menginspirasi masyarakat. Pemimpin yang mampu menyampaikan visi perubahan secara jelas dan meyakinkan akan lebih mudah memperoleh dukungan masyarakat dalam menjalankan program pembangunan sosial.

Implikasi kepemimpinan lainnya adalah terbentuknya gaya kepemimpinan yang lebih humanis dan berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan. Komunikasi yang berlandaskan nilai Qur'ani menekankan pentingnya kelembutan, empati, dan penghormatan terhadap martabat manusia dalam setiap interaksi sosial. Pemimpin yang mengedepankan komunikasi humanis akan lebih mampu membangun hubungan sosial yang harmonis dengan masyarakat.

Selain itu, komunikasi Qur'ani juga mendorong pemimpin untuk menghindari komunikasi yang bersifat provokatif atau merendahkan pihak lain. Komunikasi yang penuh penghormatan terhadap martabat manusia akan membantu menciptakan suasana sosial yang lebih damai dan stabil dalam masyarakat.

Implikasi kepemimpinan dari model komunikasi pemimpin Qur'ani terletak pada kemampuannya dalam membentuk karakter kepemimpinan yang amanah serta menjadikan komunikasi sebagai instrumen utama dalam membangun transformasi sosial dalam masyarakat. Komunikasi yang berlandaskan nilai-nilai Qur'ani tidak hanya memperkuat hubungan antara pemimpin dan rakyat, tetapi juga membangun fondasi moral yang kokoh dalam kepemimpinan sehingga tercipta kehidupan sosial yang lebih adil, harmonis, dan berkeadaban.

[75] Morissan, *Teori Komunikasi Individu hingga Massa*, Kencana, 2015, hal. 289

BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Disertasi ini menyimpulkan bahwa problematika komunikasi antara pemimpin dan rakyat dalam perspektif Al-Qur'an merupakan persoalan yang tidak semata-mata berkaitan dengan aspek teknis komunikasi, melainkan berkaitan erat dengan dimensi etika, moralitas, dan relasi sosial dalam kehidupan masyarakat. Al-Qur'an memandang komunikasi sebagai fondasi penting dalam membangun hubungan yang adil dan harmonis antara pemimpin dan rakyat, sehingga kerusakan komunikasi sering kali berakar pada penyimpangan nilai-nilai moral dalam praktik kepemimpinan. Dalam konteks tersebut, problem komunikasi kepemimpinan dapat dipahami melalui berbagai isyarat Qur'ani yang menggambarkan penyimpangan dalam relasi sosial, seperti dominasi kekuasaan, kemunafikan komunikasi, serta terputusnya hubungan sosial antara pemimpin dan rakyat. Melalui pendekatan tafsir tematik, penelitian ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak hanya mengidentifikasi berbagai bentuk kerusakan komunikasi dalam kehidupan sosial, tetapi juga menawarkan prinsip-prinsip etika komunikasi yang menempatkan kejujuran, kelembutan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan kemaslahatan sosial sebagai dasar dalam interaksi antara pemimpin dan masyarakat. Dengan demikian, komunikasi kepemimpinan dalam perspektif Qur'ani merupakan komunikasi yang berlandaskan nilai wahyu, berorientasi pada kemaslahatan publik, serta berfungsi sebagai sarana

membangun relasi sosial yang bermartabat dan berkeadaban dalam kehidupan masyarakat.

Kesimpulan disertasi ini didasarkan pada tiga temuan utama sebagai berikut :

1. Problematika komunikasi antara pemimpin dan rakyat dalam perspektif Al-Qur'an dapat dipahami melalui tiga dimensi utama, yaitu problem kekuasaan, problem moralitas, dan problem relasi sosial. Problem kekuasaan muncul ketika komunikasi kepemimpinan berubah menjadi dominasi yang menutup ruang dialog, sebagaimana tergambar dalam konsep *istikbār* yang menunjukkan sikap angkuh dan penolakan terhadap kebenaran. Problem moralitas tampak melalui praktik komunikasi yang tidak jujur dan manipulatif yang dalam Al-Qur'an digambarkan melalui konsep *nifāq*. Sementara itu, problem relasi sosial muncul ketika komunikasi yang destruktif menimbulkan polarisasi sosial, kekerasan hati, dan penolakan terhadap nasihat, yang tercermin dalam konsep *tafarruq*, *qaswah al-qalb*, dan *iʻrāḍ*.
2. Al-Qur'an memberikan seperangkat prinsip etika komunikasi yang menjadi landasan moral bagi relasi antara pemimpin dan rakyat. Prinsip tersebut tercermin dalam enam konsep komunikasi Qur'ani, yaitu *qaulan karīman*, *qaulan maʻrūfan*, *qaulan sadīdan*, *qaulan layyinan*, *qaulan balīghan* dan *qaulan maisuran*. Keenam prinsip ini menunjukkan bahwa komunikasi dalam perspektif Al-Qur'an tidak hanya menuntut efektivitas penyampaian pesan, tetapi juga menekankan dimensi etika yang menghormati martabat manusia, menjunjung kejujuran, serta mengedepankan kelembutan dan kebijaksanaan dalam interaksi sosial. Dengan demikian, komunikasi pemimpin dalam perspektif Qur'ani harus berfungsi sebagai sarana membangun kepercayaan, memperkuat kohesi sosial, serta menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat secara luas.
3. Penelitian ini selanjutnya merumuskan model komunikasi pemimpin Qur'ani yang dibangun melalui integrasi antara etika komunikasi wahyu dan dinamika relasi sosial dalam masyarakat. Model ini menempatkan komunikasi sebagai amanah moral yang harus dijalankan dengan integritas, tanggung jawab, dan orientasi pada kemaslahatan publik. Secara konseptual, model komunikasi pemimpin Qur'ani terdiri dari tiga dimensi utama, yaitu dimensi etika komunikasi yang menekankan integritas moral dan kejujuran, dimensi relasi sosial yang berorientasi pada pembangunan kepercayaan dan harmoni masyarakat, serta dimensi transformasi sosial yang menempatkan komunikasi sebagai sarana perubahan menuju kehidupan yang lebih adil dan berkeadaban. Melalui model ini, komunikasi pemimpin tidak hanya berfungsi sebagai instrumen kekuasaan, tetapi juga sebagai

sarana membangun peradaban sosial yang berlandaskan nilai-nilai Qur'ani.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Secara akademik, penelitian ini merekomendasikan agar kajian mengenai komunikasi dalam perspektif Al-Qur'an terus dikembangkan melalui pendekatan tafsir tematik yang lebih luas dan interdisipliner. Studi tentang komunikasi Qur'ani tidak hanya penting dalam bidang ilmu tafsir, tetapi juga memiliki relevansi besar dalam pengembangan kajian komunikasi Islam, etika sosial, serta studi kepemimpinan. Oleh karena itu, para peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian yang mengintegrasikan konsep-konsep komunikasi dalam Al-Qur'an dengan teori komunikasi modern, sehingga dapat memperkaya khazanah keilmuan Islam sekaligus memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori komunikasi yang berlandaskan nilai-nilai wahyu.
2. Secara sosial, penelitian ini merekomendasikan agar para pemimpin dalam berbagai bidang kehidupan, baik dalam ranah pemerintahan, organisasi, maupun masyarakat, menjadikan nilai-nilai etika komunikasi Qur'ani sebagai pedoman dalam berinteraksi dengan masyarakat. Prinsip-prinsip komunikasi seperti *qaulan karīman*, *qaulan ma'rūfan*, *qaulan sadīdan*, *qaulan layyinan*, *qaulan balīghan* dan *qaulan maisuran* perlu diinternalisasikan dalam praktik komunikasi publik agar hubungan antara pemimpin dan masyarakat dapat dibangun atas dasar penghormatan, kejujuran, serta tanggung jawab moral. Dengan demikian, komunikasi kepemimpinan tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian kebijakan, tetapi juga sebagai instrumen membangun kepercayaan dan harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat.
3. Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan agar lembaga pendidikan Islam, institusi dakwah, serta lembaga pengembangan kepemimpinan menjadikan etika komunikasi Qur'ani sebagai bagian penting dalam kurikulum pembinaan kepemimpinan. Pendidikan kepemimpinan yang berlandaskan nilai-nilai Al-Qur'an diharapkan mampu melahirkan pemimpin yang tidak hanya memiliki kemampuan manajerial, tetapi juga memiliki integritas moral dan kepekaan sosial dalam berkomunikasi dengan masyarakat. Dengan demikian, komunikasi pemimpin Qur'ani dapat berfungsi sebagai sarana transformasi sosial yang mendorong terciptanya kehidupan masyarakat yang lebih adil, harmonis, dan berkeadaban.

DAFTAR PUSTAKA

Abbas, Sanaa F., dan Maisaa Ali Rawabdeh. "Female Competencies from the Narratives of the Qur'an: Queen of Sheba's Crisis Management Style as a Leadership Model." *QIJIS (Qudus International Journal of Islamic Studies)*. 2022.

Abdulsyani. *Sosiologi: Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.

Akhmetova, Ercüment. "Said Nursi on Secularism, Religious Rights, Ethics, and Education." Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought and Civilization, 2021.

Al-Buthi, Said Ramadhan. *Fiqh al-Sirah al-Nabawiyyah*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1998.

Al-Farmawi, A. H. *Metode Tafsir Maudhu'i*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.

Al-Faruqi, Isma'il R. *Islamization of Knowledge: General Principles and Work Plan*. Herndon: International Institute of Islamic Thought, 1987.

_____, Ismail Raji. *Al-Tawhid: Its Implications for Thought and Life*. Herndon: IIIT, 1992.

Al-Ghazali, Abu Hamid. *Ihya' Ulum al-Din*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2005.

Alhazemi, A. “An Analytical Research of Prophet King Solomon’s Leadership Qualities, Decisiveness, and Sagacity.” *The International Journal of Humanities & Social Studies*. 2020.

Alim, Muhammad. *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Madinah*. Yogyakarta: UII Press, 2010.

_____. *Pendidikan Agama Islam: Upaya Pembentukan Pemikiran dan Kepribadian Muslim*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.

Al-Mawardi, Abu al-Hasan. *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2006.

Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh al-Zakah*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1999.

_____. *Min Fiqh ad-Daulah fi al-Islam*. Kairo: Dar al-Syuruq, 1997.

Al-Qaṭṭān, Mannā’ Khalīl. *Mabāḥith fī ‘Ulūm al-Qur’ān*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 2000.

_____. *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur’an*. Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 2015.

Al-Qurṭubi, Muhammad. *Al-Jāmi‘ li Aḥkām al-Qur’ān*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 2016.

Al-Razi, Fakhruddin. *Mafatih al-Ghaib*. Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi, 2000.

Al-Ryahneh, Fadi Mahmoud. “Interfaith and Cultural Dialogue in the Quran.” *International Journal of Religion*. 2024.

Al-Shabuni, Muhammad Ali. *Shafwat al-Tafasir*. Beirut: Dar al-Qur’an al-Karim, 1981.

Al-Suyuthi, Jalaluddin. *Tadrib al-Rawi fi Sharh Taqrib al-Nawawi*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003.

Al-Zarkashi, Badruddin. *Al-Burhan fi ‘Ulum al-Qur’an*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2006.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir al-Munir*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2009.

Amir, Fachrur Razi, Berliana Kartakusumah, dan Miftahulkhairah Anwar. “Educational Communication in the Perspective of Islamic Educational Leadership.” *Proceedings of the International Conference on Education, Language and Society*. 2019.

Anam, Khoirul, dan Lailatul Kusumawati. “Bentuk-Bentuk Komunikasi dalam Perspektif Al-Qur’an dan Implementasinya terhadap Kehidupan Masyarakat.” *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*. 2021.

Anggraini, Fera, dan Saiful Bahri. “Management of Islamic Education Institutions from the Perspective of Prophetic Leadership (Field Study at SMA Muhammadiyah Toboali).” *Proceeding of the Postgraduate School Universitas Muhammadiyah Jakarta*. 2025.

An-Na’im, Abdullahi Ahmed. *Islam and the Secular State*. Cambridge: Harvard University Press, 2008.

Aqil. “Authentic Leadership in the Perspective of Islamic Education.” *Jurnal Pendidikan Islam*. 2021.

Ardianto, Elvinaro, dan Lukiati Komala. *Komunikasi Massa: Suatu Pengantar*. Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2007.

Arifin, Anwar. *Komunikasi Politik: Paradigma, Teori, dan Praktik*. Jakarta: Balai Pustaka, 2011.

Aristotle. *Nicomachean Ethics*. New York: Oxford University Press, 2009.

Armstrong, Karen. *Muhammad: A Prophet for Our Time*. New York: HarperCollins, 2007.

Asad, Muhammad. *The Message of the Qur’an*. Gibraltar: Dar al-Andalus, 1980.

Ashfihani, Raghib al-. *Al-Mufradat fi Gharib al-Qur’an*. Beirut: Dar al-Qalam, 2009.

Aufi, Ahmad Umam. “The Story of Moses and Pharaoh in a Structural Anthropology Approach.” *Jurnal Ushuluddin*. 2021.

Awla, F., dan Rifai, A. *Political Communication in the Quranic Perspective: Ethical Principles for Contemporary Politics*. Palakka: Media and Islamic Communication, 2025.

Aziz, Abd. “Pendidikan Etika Sosial Berbasis Argumentasi Quranik.” *Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam dan Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 1, No. 3, 2019,

Aziz, M. Abdul. *Ilmu Dakwah*. Jakarta: Kencana, 2017.

Azra, Azyumardi. *Islam Nusantara*. Bandung: Mizan, 2019.

_____. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Kencana, 2017.

Barizi, Muhammad Mabrur. “Reading the Qur’an from the Contemporary Approach of Maqāṣid al-Sharī’a.” *Ulumuna*. 2018.

Barker, Chris. *Cultural Studies: Theory and Practice*. London: Sage Publications, 2012.

Basit, Abdul. *Komunikasi Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2017.

Basrowi. *Pengantar Sosiologi*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.

Bass, Bernard M., dan Ronald E. Riggio. *Transformational Leadership*. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 2006.

Berger, Peter L., dan Thomas Luckmann. *The Social Construction of Reality*. London: Penguin Books, 1991.

Blumer, Herbert. *Symbolic Interactionism: Perspective and Method*. Berkeley: University of California Press, 1969.

Bohman, James. *Public Deliberation: Pluralism, Complexity, and Democracy*. Cambridge: MIT Press, 1996.

Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2015.

_____. *Sosiologi Komunikasi*. Jakarta: Kencana, 2017.

Burns, James MacGregor. *Leadership*. New York: Harper & Row, 1978.
Burns, James MacGregor. *Leadership*. New York: Harper & Row, 1978.
Cangara, Hafied. *Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.
_____. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
_____. *Perencanaan dan Strategi Komunikasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
Castells, Manuel. *Communication Power*. Oxford: Oxford University Press, 2009.
Christians, Clifford G. *Communication Ethics and Universal Values*. London: Sage Publications, 1997.
Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks: Sage Publications, 2014.
Daft, Richard L. *The Leadership Experience*. Boston: Cengage Learning, 2015.
Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2001.
Dahlan, Dikdik, dan Lukman. "Madinah sebagai Cikal Bakal Negara Berbasis Good Governance." *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*. 2025.
Daming, K. Muh., Tasmin Tangngareng, M. Zulkifli, S. Syukri, dan St. Halimang. "Justice Construction in Qur'an Perspective." *Advances in Social Sciences Research Journal*. 2017.
Danarta, Agung. "Social Ethics Political Buzzer in the Living Religions (Qur'an and Hadith)." *Jurnal Sosiologi Agama*, 2022.
Danim, Sudarwan. *Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
Das, Anamika. "Secularism and Communalism in India: Role of the State and the Citizens." *International Journal of Political Science and Governance*, 2022.
Daud, Ilyas. "Quranic Exegesis as Social Criticism: The Case of Tafsîr al-Azhâr." 2020.
De Villiers, D. Etienne. "Christian Ethics and Secularisation: Business as Usual?" *Verbum et Ecclesia*, 2018.
Devito, Joseph A. *Human Communication: The Basic Course*. Boston: Pearson Education, 2015.
Dewi, Siska, dkk. "Prophetic Leadership in the Battle of Hunain: Strategic Lessons for Modern Leadership." *Research Horizon*. 2025.
Dhona, Holy Rafika, dkk. *Islam dalam Studi Komunikasi*. Yogyakarta: UII Press, 2022.

Djamdjuri, Dewi Suriyani, dan Fadia Holisah. “The Importance of Ethics in Communication toward Children: An Islamic Overview.” *Al-Aulad: Journal of Islamic Primary Education*, 2021.

Djuyandi, Y. *Pengantar Ilmu Politik*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2023.

Durkheim, Emile. *The Division of Labor in Society*. New York: Free Press, 1997.

Dwiyanto, Agus. *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014.

Effendy, Onong Uchjana. *Dimensi-Dimensi Komunikasi*. Bandung: Alumni, 2003.

_____. *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.

_____. *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktik*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.

El Syam, Robingun Suyud. “Prophetic Leadership: The Leadership Model of Prophet Muhammad in Political Relation of Social–Ummah.” *Jurnal Pendidikan Islam*. 2017.

Eliopoulos, Stephanie. “On Ethical Leadership: A Case for Secular Ethics.” *Journal of Leadership Studies*, 2011.

Espihani, Rahmad, Tuti Fiani, Jasiah Jasiah, Muslimah Muslimah, Normuslim Normuslim, dan Dakir Dakir. “Multicultural Leadership Principles in Islamic Education: A Quranic and Hadith Perspective.” *Urwatul Wutsqo: Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman*. 2025.

Esposito, John L. *Islam: The Straight Path*. Oxford: Oxford University Press, 2011.

Fadli, Muhamad Aroka, B. M. Yunus, Ahmad Sarbini, dan E. Kosasih. “The Story of the Prophet Moses and the Pharaoh in the Qur'an: An Analysis of the Implementation of Structural Da'wah.” *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama*. 2024.

Fairclough, Norman. *Discourse and Social Change*. Cambridge: Polity Press, 1995.

Fauzi, A. “Etika Komunikasi Politik dalam Perspektif Islam.” *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 2020.

Febriani, Nur Arfiyah. “Metode Tematik Multidisipliner: Aplikasi pada Tafsir Ekologi Berwawasan Gender.” *Mashdar: Jurnal Studi Al-Qur’an dan Hadis*, Vol. 1, No. 2, 2019.

Febriyanti, Elystia, Nur Kholid, dan Rudi Hartono. “The Ethical Values in Islamic Tradition Reinterpreting Morals in the Context of Global Moral Crisis.” *Bulletin of Science Education*. 2025.

Fikra, M. “Etika Komunikasi Politik dalam Perspektif Al-Qur’an dan Relevansinya terhadap Kepemimpinan Publik.” *Jurnal Komunikasi Islam*, Vol. 12, No. 2, 2022.

Fitria, Salwa Aida, dan Kharis Nugroho. “Equality of Rights and Obligations: The Role and Position of Women in Politics.” *Proceeding ISETH (International Summit on Science, Technology, and Humanity)*. 2025.

Foucault, Michel. *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. New York: Vintage Books, 1995.

_____. *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings*. New York: Pantheon Books, 1980.

_____. *The Archaeology of Knowledge*. London: Routledge, 2002.

Freire, Paulo. *Education for Critical Consciousness*. London: Bloomsbury Academic, 2013.

_____. *Pedagogy of the Oppressed*. New York: Continuum, 2005.

Fuadia, Sabrina Farah, Raudotul Aini, Raka Meirwanto Soba, dan Asep Abdul Muhyi. “The Concept of the State in Islam: A Study of Maudhu'i's Interpretation.” *Bulletin of Islamic Research*. 2024.

Fukuyama, Francis. *Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity*. New York: Free Press, 1995.

Gavriluţă, Daniel, dan Bogdan Cucu. “Communication Ethics in Local Public Administration in the Age of Facebook.” *Postmodern Openings*, 2017.

Ghalwusy, Ahmad. *Al-Da‘wah al-Islamiyyah*. Kairo: Dar al-Kitab al-Misri, 2000.

Giddens, Anthony. *Sociology*. Cambridge: Polity Press, 2017.

_____. *The Constitution of Society*. Cambridge: Polity Press, 1984.

Goleman, Daniel. *Social Intelligence: The New Science of Human Relationships*. New York: Bantam Books, 2006.

Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2017.

Habermas, Jürgen. *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. Cambridge: MIT Press, 1996.

_____. *Moral Consciousness and Communicative Action*. Cambridge: MIT Press, 1990.

_____. *The Structural Transformation of the Public Sphere*. Cambridge: MIT Press, 1989.

_____. *The Theory of Communicative Action*. Boston: Beacon Press, 1984.

Haerudin., Suryadi, Iyad., dan Helmawati, Helmawati. “Ethics of Communication on Social Media in the Perspective of the Interpretation of Ibn Kathir.” *Studia Quranika*, 2025.

Hafidhuddin, Didin. *Dakwah Aktual*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Haikal, Muhammad Husain. *Hayat Ibrahim al-Khalil*. Kairo: Dar al-Ma’arif, 2003.

_____. *Sejarah Hidup Ibrahim*. Jakarta: Litera AntarNusa, 2001.

Hakam, Muhammad Haris. “Ungkapan Satire Al-Qur’an dalam Mujadalah.” *Misykat: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur’an Hadis Syariah dan Tarbiyah*. 2022.

Hakim, Khairul. *Komunikasi Politik Ali Ibn Abi Thalib pada Masa Kekhalifahannya (35–40 H/656–661 M)*. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020.

Hakim, Lukman, M. Mustaqim, dan Abd. Hadi. “Analyzing the Ideal Leadership of Prophet Yusuf in the Quran: Relevance to Transformational Leadership Theory.” *Tafse: Journal of Qur'anic Studies*. 2024.

_____ . “The Importance of Da’wa Ethics in Social Media: A Quranic Perspective.” *QOF: Journal of Qur’anic Studies*, 2023.

Hamid, Sharmin. “Secular and Theological Ethics: A Brief Overview.” *Philosophy and Progress*, 2024.

Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 2001.

Hanbal, Ahmad bin. *Musnad Ahmad*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001.

Haqiqi, M. Rama, dan Syamsul Hakim. “Human in the Qur’an: Tafsir Maudu’i.” *Jurnal Kajian Islam*. 2025.

Harahap, Katimin, dan Abdullah. “Grounding the Principles of Islamic Communication in Organizational Culture: A Case Study of State Islamic Higher Education Institutions.” *Jurnal Komunikasi Islam*. 2021.

Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.

Hardiman, F. Budi. *Menuju Masyarakat Komunikatif: Ilmu, Masyarakat, Politik & Postmodernisme Menurut Jürgen Habermas*. Yogyakarta: Kanisius, 2009.

Hardjana, Agus M. *Komunikasi Intrapersonal dan Interpersonal*. Yogyakarta: Kanisius, 2016.

Haryanto. *Kepemimpinan Transformasional dalam Organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2017.

Haryatmoko. *Etika Komunikasi: Manipulasi Media, Kekerasan, dan Pornografi*. Yogyakarta: Kanisius, 2016.

Hasan, Kamaruddin. “Islamic Communication Ethics; Concepts and Applications in the Digital Era.” *Jurnal Al-Fikrah*, 2024.

Hasibuan, Effiati Juliana. *Strategi Komunikasi Islami Guru dalam Pendidikan Karakter Siswa di Sekolah Dasar Islam Terpadu Al Fityan School Medan dan Nurul Ilmi Kabupaten Deli Serdang*. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021.

Hasibuan, Malayu S. P. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.

Heryanto, G. G. *Media Komunikasi Politik*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2018.

Hile, Martha Msoo, Msughter Terna, dan Aliyu Abdullahi. "Secularism and Ethical Issues in Media Practice as a Bane for National Development." *Siasat*, 2023.

Holdo, Karl. "How Can We Trust a Political Leader? Ethics, Institutions, and Relational Theory." *Ethical Theory and Moral Practice*, 2019.

Hude, Darwis. *Emosi: Penjelajahan Religio-Psikologis tentang Emosi Manusia di dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Erlangga, 2016.

Huriyah, Lilik, Yeni Endiana, Yuni Setya Ningsih, Lum'atul Hajar, dan Afra Nafisah. "Gender Equality in Women's Leadership through the Perspective of the Qur'an." *An-Nisa: Jurnal Kajian Perempuan dan Keislaman*. 2023.

Ibn Katsir. *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*. Riyadh: Dar Tayyibah, 2002.

_____. *Kisah Para Nabi*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2004.

_____. *Qashash al-Anbiya*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004.

Ihsan, Rafiqi, dan Iskandar Ritonga. "The Relevance of Prophet Muhammad's Leadership as a Modern Leadership Role Model." *Jurnal El-Riyasah*. 2022.

Jaenudin, Jejen. "Ethics of Using Social Media in the Quran and Hadith Guide." *Jurnal Da'wah: Risalah Merintis, Da'wah Melanjutkan*, 2022.

Jahiri, Besnik. "Ethical Communication in Public Relations." *Journal of Education and Social Research*, 2013.

Jaiyeoba, Hakeem., Ushama, Taha., dan Amuda, Yusuf. "The Quran as a Source of Ethical and Moral Guidance in Contemporary Society." *Al-Irsyad: Journal of Islamic and Contemporary Issues*, 2024.

Junaidi, Juliyana, Latifah Abdul Majid, dan Mohd Arif Nazri. "The Role of Quran and Sunnah in Solving Leadership Failure." *'Abqari Journal*, 2022.

Kadir, Abdul, Nur Hidayah, dan Ahmad Zaini. "Enhancing Interpersonal Communication: Lessons from 'Qaulan Sadidan' in the Quran." *Jurnal Komunikasi Islam*. 2024.

Kahani, Z., M. Fazeli, dan M. M. Damghani. "Mythical Aspects of the Cane of Moses in Persian Exegeses." *Propósitos y Representaciones*. 2021.

Kalsum, Kalsum, Mesiono, dan Zein. "Implementation of Prophetic Communication of the Head of MAN Medan City (Multi-Site Study in MAN Medan)." *Jurnal Pendidikan Islam*.

Kamaluddin, Ahmad. *Kontribusi Regulasi Emosi Qur'ani dalam Membentuk Perilaku Positif: Studi Fenomenologi Komunitas Punk Tasawuf Underground*. Surabaya: CV Cipta Media Nusantara, 2022.

Kamaluddin, Kamaluddin, dan Putri Rizka Citaningati. "Islamic Leadership: Prophet Muhammad as a Role Model for Being Charismatic,

Transformational, and Servant Leader." *International Journal of Applied Business and International Management*. 2023.

Kant, Immanuel. *Groundwork of the Metaphysics of Morals*. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.

Karimullah, Karimullah, Suud Sarim, Rahman Rahman, dan Fawwaz Elmurtadho. "Reflections of Prophetic Values on Strengthening Da'wah in the Digitalization Era." *Mawaizh: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*. 2023.

Kartono, Kartini. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.

Keban, Yeremias T. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*. Yogyakarta: Gava Media, 2014.

Khairuddin. "The Principles of Internalization of Qawlan Ma'rufa Perspective of the Quran and Its Relevance to Ethics Contemporary Communication." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 2023.

Khanom, Sadia, Md. Yousuf Ali, dan Md. Rabiul Ahmed. "Advancing Islamic Education: Values-Driven Strategic Leadership in School Culture of the Digital Era." *Journal of Islamic Education Research*. 2023.

Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

Kriyantono, Rachmat. *Public Relations, Issue & Crisis Management*. Jakarta: Kencana, 2015.

_____. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana, 2014.

Kusnadi. *Sosiologi Konflik dan Integrasi Sosial*. Malang: Universitas Negeri Malang Press, 2014.

Langerak, Michael. "How Do Theological and Secular Ethics Relate and Compare?" *Philosophia Reformata*, 2022.

Lasswell, Harold D. "The Structure and Function of Communication in Society." Dalam Wilbur Schramm (ed.), *Mass Communications*. Urbana: University of Illinois Press, 1948.

Liliweri, Alo. *Komunikasi Antarbudaya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Littlejohn, Stephen W., dan Karen A. Foss. *Theories of Human Communication*. Belmont: Wadsworth Publishing, 2009.

Loobuyck, Patrick. "The Moral Requirement in Theistic and Secular Ethics." *The Heythrop Journal*, 2010.

Luthans, Fred. *Organizational Behavior*. New York: McGraw-Hill Education, 2011.

Magnis-Suseno, Franz. *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta: Kanisius, 2006.

Mahmud. "Islamic Spiritual Leadership Model to Enhance Madrasah Quality Culture and Achieve Sustainable Development Goals." *Journal of Islamic Education and Leadership*. 2023.

Majid, Ma'aref. "Various Types of Dialogues and Features of a Corrective Dialogue in the Qur'an." *HTS Teologiese Studies / Theological Studies*. 2018.

Malik, Muh Syauqi, dkk. "Etika Komunikasi dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis." *Asna: Jurnal Kependidikan Islam dan Keagamaan*, 2024.

Martynenko, Oksana. "Post-Secular View on Ethical Discourse of Technoscience." *European Philosophical and Historical Discourse*, 2021.

Matondang, Amrin, Syukur Nasution, dan Anang Anas Azhar. "Antara Rahmah dan Hegemoni: Tafsir Komunikasi Politik Islam atas Kekuasaan Turunan di Kabupaten Deli Serdang." *Jurnal Ilmu Komunikasi Islam*. 2023.

McChesney, Robert W. *Digital Disconnect: How Capitalism Is Turning the Internet Against Democracy*. New York: The New Press, 2013.

McQuail, Denis. *Mass Communication Theory*. London: Sage Publications, 2010.

Mead, George Herbert. *Mind, Self, and Society*. Chicago: University of Chicago Press, 1934.

Mihail, Rarița. "Protestant Ethics and the Secularization of Vocation." Dalam *Rethinking Social Action: Core Values in Practice*. Iasi: Lumen Proceedings, 2018.

Mizwar, Edi, Syabuddin, dan Syahminan. "Konsepsi Ilmu dalam Kisah Nabi Sulaiman dalam Al-Qur'an." *Jurnal Tarbiyah Almuslim*. 2024.

Mokodenseho, Sabil, Sahara Yarbo, Fatmawaty Toani, Liliana Korompot, Fadlun Pakelo, dan Elvi Dotinggulo. "Communication-Based Da'wah Ethics Inspired by the Prophet's Sunnah in the Qur'an." *West Science Islamic Studies*, 2024.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.

Morissan. *Teori Komunikasi Individu hingga Massa*. Jakarta: Kencana, 2015.

Muhammad, Arni. *Komunikasi Organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.

Muhsinin, Mahmud, Tobroni Tobroni, Syamsurizal Yazid, dan Abdul Wahab. "Character Education Values in the Story of Prophet Moses and the Israelites in the Qur'an." *International Journal of Social Science and Human Research*. 2024.

Muhyiddin, Asep, dan Agus Ahmad Safei. *Metode Pengembangan Dakwah*. Bandung: Pustaka Setia, 2002.

Mujahidin, A., Muhammad Shohibul Itmam, dan A. Rofiq. "The Dynamic of Contextualization in Indonesian Qur'anic Tafsirs." *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadis*. 2024.

Mujamil, Ashari., dan Wafa, Ali. "Relevance of Verses on Politics in the Quran with the Constitution in Indonesia; Thematic Pancasila, UUD 1945,

and Controversial Articles in Criminal Code (KUHP).” *Istinbath*, 2023.

Mulyadi, Deddy. *Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan Pelayanan*. Bandung: Alfabeta, 2015.

Mulyadi, Mohammad. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: Alfabeta, 2018.

Mulyana, Deddy. *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.

_____. *Komunikasi Antarbudaya*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.

Narwoko, J. Dwi, dan Bagong Suyanto. *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana, 2013.

Nasr, Seyyed Hossein. *The Study Quran*. New York: HarperOne, 2015.

Nasr, Seyyed Hossein. *The Study Quran*. New York: HarperOne, 2015.

Nasrullah, Rulli. *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*. Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017.

Nasution, S. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.

Nata, Abudin. *Akhlak Tasawuf*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.

_____. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.

Nawawi, Muhammad Adlan dan Abd. Muid N. “Ilmu Pengetahuan dan Etika: Pencarian Makna dan Relevansi dalam Narasi Qur’anik.” *Al Burhan: Jurnal Kajian Ilmu dan Pengembangan Budaya Al-Qur’an*, Vol. 22, No. 1, 2022

Nimmo, Dan. *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan, dan Media*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.

Northouse, Peter G. *Leadership: Theory and Practice*. California: Sage Publications, 2016.

Nugroho, Christiany Juditha. *Cyber Society: Teknologi, Media Baru, dan Disrupsi Informasi*. Jakarta: Prenada Media, 2020.

Nurdin, Ali. *Etika Sosial dalam Islam*. Jakarta: Kencana, 2015.

Nurudin. *Pengantar Komunikasi Massa*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.

_____. *Sistem Komunikasi Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.

Nye, Joseph S. *The Powers to Lead*. New York: Oxford University Press, 2008.

Palmer, Richard E. *Hermeneutics: Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer*. Evanston: Northwestern University Press, 1969.

Panyshev, Aleksandr. “Ethics in the Secular and Religious Life of Man.” *European Journal of Science and Theology*, 2020.

Permana, Asep Amar, dan Eni Zulaiha. “A Comparative Study of Exegesis in al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari’ah wa al-Manhaj and Tafsir al-Mizan.” *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama*. 2024.

Prasojo, Muhammad Imam., dan Athallah, Naufal. "Leadership Ethics in Islam." *International Journal of Strategic Studies*, 2025.

Proios, Miltiadis, dan Ioannis Proios. "Christian and Secular Ethics: A Distinct Relationship." *International Journal of Philosophy and Theology*, 2014.

Putra, A., H. Anwar, dan M. Hariyadi. "Lokalitas Tafsir Al-Qur'an Minangkabau." *Jurnal Studi Alqur'an*, Vol. 1, No. 3, 2006.

Qaradawi, Yusuf al-. *Min Fiqh ad-Daulah fi al-Islam*. Kairo: Dar al-Syuruq, 1997.

Qattan, Mannā' Khalīl al-. *Mabāḥith fī 'Ulūm al-Qur'ān*. Beirut: Muassasah al-Risalah. 2000.

Qutb, Sayyid. *Fi Zilal al-Qur'an*. Kairo: Dar al-Syuruq, 2003.

Rafidawati, Misyailni, dan Titin Nurjanah. "Etika Komunikasi Perspektif Agama Islam." *Al-Akmal: Jurnal Studi Islam*, 2025.

Rahardjo, M. Dawam. *Etika Sosial dalam Kehidupan Berbangsa*. Jakarta: Kompas, 2013.

Rahman, Fazlur. *Major Themes of the Qur'an*. Chicago: University of Chicago Press, 2009.

Rahman, Taufik, Anisah Indriati, dan Muhammad Ridwan. "Prophetic Communication in Historical and Axiological Review." *Komunika: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*. 2024.

Rahman. "Nilai-Nilai Komunikasi Qur'ani dalam Transformasi Sosial." *Jurnal Komunikasi Islam*, 2022.

Rakhmat, Jalaluddin. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.

Rakhmawati. "Prophetic Communication: Transcendental Dimension in Islamic Philanthropy Messages." *Jurnal Komunikasi Islam*. 2022.

Ramadan, Tariq. *Islam and the Arab Awakening*. Oxford: Oxford University Press, 2012.

Rana, Sundus, dkk. "Quranic Principles of Effective Communication: A Timeless Framework for Digital and Interpersonal Ethics." *International Journal of Social Science & Entrepreneurship*, 2025.

Ritzer, George, dan Jeffrey Stepnisky. *Sociological Theory*. New York: McGraw-Hill Education, 2018.

Rivai, Veithzal. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.

Rizki, Ahmad Fadhil, S. M. Johan, dan Afrizal Nur. "Menguak Nilai-Nilai Kedamaian dalam Musyawarah." 2020.

Robbins, Stephen P., dan Timothy A. Judge. *Organizational Behavior*. New Jersey: Pearson Education, 2017.

Rosyidi, Moh Alfin, Khobirul Amru, dan Wildah Nurul Islami. "Discourse on Women's Leadership in the Qur'an." *Bulletin of Indonesian Islamic Studies*. 2025.

Rukin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Makassar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019.

Salam, Dharma Setyawan. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2013.

Salin, Ahmad Saiful Azlin Puteh. "Islamic Ethical Leadership." *I-IECONS E-Proceedings*, 2023.

Samosir, Hasrat Efendi, dan Md Noor Bin Hussin. "Recontextualizing the Medina Charter: Consensus-Based Political Communication for Contemporary Plural Societies." *MILRev: Metro Islamic Law Review*. 2025.

Saniah, Nurul. *Ilmu Komunikasi Islam*. Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2024.

Saputra, Wahidin. *Pengantar Ilmu Dakwah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.

Sari. "Komunikasi Kepemimpinan dalam Membangun Kepercayaan Publik." *Jurnal Komunikasi Islam*, 2021.

Sarnoto, Ahmad Zain. "Exploring Leadership Theory in the Qur'an." *International Journal of Sustainable Social Science (IJSSS)*. 2024.

Sarosa, Samiaji. *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar*. Jakarta: Indeks, 2017.

Sarwono, Sarlito Wirawan. *Psikologi Sosial: Individu dan Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Balai Pustaka, 2012.

Schramm, Wilbur. *The Process and Effects of Mass Communication*. Urbana: University of Illinois Press, 1954.

Sertkaya, S., dan Zuleyha Keskin. "A Prophetic Stance Against Violence: An Analysis of the Peaceful Attitude of Prophet Muhammad during the Medinan Period." *Religions*. 2020.

Setiadi, Elly M., dan Usman Kolip. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Kencana, 2011.

Severin, Werner J., dan James W. Tankard. *Communication Theories: Origins, Methods, and Uses in the Mass Media*. New York: Longman, 2010.

Shannon, Claude E., dan Warren Weaver. *The Mathematical Theory of Communication*. Urbana: University of Illinois Press, 1949.

Shaw, Jonathan. "Introducing Post-Secular Social Work: Towards a Post-Liberal Ethics of Care." *British Journal of Social Work*, 2018.

Shihab, M. Quraish. *Al-Lubaab: Makna, Tujuan dan Pelajaran dari Surah-Surah Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2012.

_____. *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Jakarta: Lentera Hati, 2013.

_____. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2017.

_____. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.

Siagian, Sondang P. *Teori dan Praktik Kepemimpinan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.

Simangunsong, Ali Abdurahman, dan Misnawati Misnawati. "Exploring the Wisdom of Prophet Sulaiman's Story and the Hoopoe through the Lens of Wahbah Zuhayli." *Tafse: Journal of Qur'anic Studies*. 2024.

Siyoto, Sandu, dan Muhammad Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

Solekhan, Muhammad. "Communication Ethics in Social Relationships Using Social Media Wisely in Islamic Values." *Journal of Modern Islamic Studies and Civilization*, 2023.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2018.

Sulaeman. "A Review of Servant and Transformational Leadership Style in Islamic Perspectives: A Lesson from the Prophet Muhammad (PBUH) as an Excellent Role Model for Muslim Leaders in Indonesia."

Sulaiman, S., dan N. Rahman. "The Quranic Depiction of Pharaoh the Sinner: Textual Analysis." *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*. 2019.

Sumartono. *Komunikasi Sosial dan Budaya*. Jakarta: Kencana, 2017.

Sumodiningrat, Gunawan. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999.

Suranto AW. *Komunikasi Interpersonal*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

_____. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.

Sutrisman, D. *Pendidikan Politik, Persepsi, Kepemimpinan, dan Mahasiswa*. Guepedia, 2019.

Sutrisno, Edy. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana, 2016.

Syabibi, M. "Prophetic Leadership Model for Public Bureaucracy: How It's Works?" *Jurnal Ilmiah Syi'ar*. 2022.

Syam, Robingun Suyud El. "Prophetic Leadership: The Leadership Model of Prophet Muhammad in Political Relation of Social–Ummah." *Jurnal Pendidikan Islam*. 2017.

Syarifuddin. "Transforming Personal Selling through Qur'anic Ethical Principles in Marketing Communication." *Journal of Islamic Marketing and Communication*. 2023.

Sztompka, Piotr. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada Media, 2011.

_____. *The Sociology of Social Change*. Oxford: Blackwell, 1993.

Tahir, Suaib. "Gerakan Dakwah Salafiyyah dan Pokok-pokok Pemikirannya." *Mumtäz: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Keislaman*, Vol. 1, No. 2, 2017

Tantawi, Muhammad Sayyid. *Al-Tafsir al-Wasit*. Kairo: Dar Nahdah Misr, 1998.

Tasmara, Toto. *Komunikasi Dakwah*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Taufik. "Determination of Islamic Leadership: Amanah, Fatonah, Tabligh, Siddiq."

Thabathaba'i, Muhammad Husain. *Al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an*. Beirut: Muassasah al-A'lami, 1997.

Thoha, Miftah. *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.

Tohir, Sya'roni. "Communication of Da'wah between the Leaders and Their Understanding in the Qur'an Surat An-Naml." *Jurnal Da'wah: Risalah Merintis, Da'wah Melanjutkan*. 2022.

Turmudi, Endang. *Struggling for the Umma: Changing Leadership Roles of Kiai in Jombang, East Java*. Canberra: ANU Press, 2006.

Usman, Abdul, Azwar, dan Aswar. "Human Civilization between Revelation and Reason." *International Journal of Islamic Thought*. 2022.

Vorster, J. M. "Christian Ethics in the Face of Secularism." *Verbum et Ecclesia*, 2012.

Wati, Desy Rahma. "The Ethics of Social Media Communication in the Perspective of the Al-Qur'an." *Journal of Islamic Communication and Counseling*, 2023.

West, Richard, dan Lynn H. Turner. *Introducing Communication Theory*. New York: McGraw-Hill, 2010.

Wibowo. *Perilaku dalam Organisasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.

Widjaja, H. A. W. *Ilmu Komunikasi: Pengantar Studi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Yukl, Gary. *Kepemimpinan dalam Organisasi*. Jakarta: Indeks, 2015.

Yusoff, Mohd Yusof, Mohd Helmi Hassan, dan Norazlina Hassan. "Integrating Religious Values into Public Relations: A Proposed Framework for Malaysia." *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication*. 2020.

Zabidi. "Sayyid Qutb's Concept of Da'wa in His Fi Zilal al-Quran."

Zaidan, Abdul Karim. *Al-Mustafad fi Qasas al-Qur'an*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1997.

_____. *Dasar-Dasar Ilmu Dakwah*. Jakarta: Media Dakwah, 1996.

_____. *Usul al-Da'wah*. Beirut: Muassasah al-Risalah. 1996.

Zakaria, Muhamad Irfan, Ubaidillah Hasan, dan Siti Marpuah. "The Hermeneutics of Husein Muhammad and Nasaruddin Umar." *Dialogia*. 2022.

Zakiyah, Ermita. "Maudhui's Tafsir Method in the Qur'an and Hadith on Maqasid Syariah for Economic Welfare in Indonesia." *Journal of Islamic Economics and Philanthropy*. 2022.

Zuhaili, Wahbah az-. *Tafsir al-Munir*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2009.

Zulkarnaini, Z., Nawawi Marhaban, dan Nurdin Nurdin. "Narration the Jews in the Qur'an." *International Journal of Social Service and Research*. 2025.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	: Deni Rahman
Nama Panggilan	: Deni / Nden
TTL	: Kuningan, 04 Juni 1984
Nama Ayah	: Muhasan (alm)
Nama Ibu	: Yunasih
Alamat	: Jl. Bagus Hermawan, RT 02 RW 05, Dusun Pasirangin, Desa Pasirangin, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, 16820
HP	: 0812-1927-9414
Email	: dr.ajunfaw@gmail.com

Status Pernikahan

Menikah 1 Istri	: Dewi Yuliani, S.Pd.I binti Didi Supriyadi
Anak 4 orang	: Muhammad Jundullah Al-Fatih (Jundi) Abdullah Ulii Ba'sin Fawwaz (Fawwaz) Kareema Hania Mumtazah (Kareema) Zaada Syauqi Al-Haramain (Syauqi)

Riwayat Pendidikan :

1. SDN 01 Patalagan Pancalang Kuningan (Lulus 1996)
2. SMPN 01 Pancalang Kuningan (Lulus 1999)
3. Pondok Pesantren Al-Fatah Natar Lampung Selatan (Lulus 2002)
4. S1 – Komunikasi Penyiaran Islam Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Fatah Cileungsi Bogor (Lulus 2027)
5. Institute Zakat of Science Khartoum, Sudan (2016)

6. S2 – Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Magister Ilmu Komunikasi Konsentrasi Ilmu Komunikasi Bisnis (lulus 2020)
7. Mahasiswa S3, PTIQ Jakarta, Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Konsentrasi Ilmu Tafsir (2026)
8. Mahasiswa S3, Universitas Islam Asy-Syafiiyah, Prodi Ilmu Dakwah (2024 s.d sekarang)

Riwayat Pekerjaan :

1. Guru di MTs Al-Fatah Bogor (2003 s.d 2009)
2. Pegawai di BMT Al-Fatah Bogor (2007 s.d 2013)
3. Karyawan CV Dafa Aliet Mix (2013 s.d 2024)
4. Wartawan di kantor Berita minanews.net (2019 s.d sekarang)
5. Direktur Perusahaan Konstruksi PT IBB (2022 sd sekarang)
6. Dosen Tetap STAI Al-Fatah Bogor (2020 s.d sekarang)
7. Ketua Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam STAI Al-Fatah Bogor (2021 s.d sekarang)
8. Tour Leader KBIH Al-Fatah / PT Farhana Mulia Wisata (2024 s.d sekarang)

Daftar Buku / Tulisan :

1. Ayo Berzakat ! Suatu Pendekatan Komunikasi Persuasif (2022)
2. Membangun Jembatan Dakwah di Dunia Digital (2024)
3. Pengantar Komunikasi Islam (2024)
4. Dakwah Era Post Truth (2024)
5. Ilmu & Sejarah Dakwah (2025)
6. Jalan Pulang ke Al-Jamaah ; Rute komunikasi menuju kesatuan umat (2025)
7. Haji dan Dakwah Milenial (2026)
8. Komunikasi Keluarga Muslim (2026)
9. Tulisan di beberapa media nasional, dapat diakses di **https://lynk.id/denirahman.**

Daftar Karya Tulis Ilmiah :

1. Komunikasi Persuasif Dalam Penghimpunan Dana Zakat Di Lembaga Amil Zakat Darussalam Kota Wisata Cibubur. Https://Scholar.Google.Com/Citations?View_Op=View_Citation&Hl=En&User=F01e9mwaaaaj&Citation_For_View=F01e9mwaaaaj:U-X6o8ysg0sc
2. Etika Dan Tantangan Dakwah Di Era Post Truth Dan Disrupsi. Https://Scholar.Google.Com/Citations?View_Op=View_Citation&Hl

=En&User=F01e9mwaaaaj&Citation_For_View=F01e9mwaaaaj:Wp0gir-Vw9mc
3. Analisis Semiotik Charles Sanders Peirce Dalam Film Spotlight. Https://Scholar.Google.Com/Citations?View_Op=View_Citation&Hl=En&User=F01e9mwaaaaj&Citation_For_View=F01e9mwaaaaj:Ysmsglbcyi4c
4. Nilai-Nilai Islam Dalam Iklan Wardah Tv. Https://Scholar.Google.Com/Citations?View_Op=View_Citation&Hl=En&User=F01e9mwaaaaj&Citation_For_View=F01e9mwaaaaj:Mxk_Kjrjxjic
5. Al-Qur'an Dan Relasi Antar Umat Beragama: Kajian Pustaka. Https://Scholar.Google.Com/Citations?View_Op=View_Citation&Hl=En&User=F01e9mwaaaaj&Citation_For_View=F01e9mwaaaaj:8k81kl-Mbhgc
6. Peran Persia Sebagai Pusat Global, Geopolitik Dan Dakwah Serta Pemikiran Dan Praktik Aliran Syi'ah Https://Scholar.Google.Com/Citations?View_Op=View_Citation&Hl=En&User=F01e9mwaaaaj&Citation_For_View=F01e9mwaaaaj:Kndyix-Mwkoc
7. Problematika Pemuda Islam: Kajian Strategis Dakwah Yang Efektif. Https://Scholar.Google.Com/Citations?View_Op=View_Citation&Hl=En&User=F01e9mwaaaaj&Citation_For_View=F01e9mwaaaaj:Ulom3_A8wrac
8. Pandangan Ulama Mu'tabar Tentang 3 Ulama Sufi (Ibn Arobi, Al-Hallaj Dan Syekh Siti Jenar), Https://Scholar.Google.Com/Citations?View_Op=View_Citation&Hl=En&User=F01e9mwaaaaj&Citation_For_View=F01e9mwaaaaj:Dhfuzr0502qc
9. Budaya Latah Era Modernis Di Negeri Muslim. Https://Scholar.Google.Com/Citations?View_Op=View_Citation&Hl=En&User=F01e9mwaaaaj&Citation_For_View=F01e9mwaaaaj:L8ckcad2t8mc

Bogor, Syawal 1447 H
Maret 2026

Deni Rahman
NIM : 203530006